ANNUAL REPORT
2014

New Spirit, Strengthen Teamwork, Greater Growth

BankSulselbar

PROFIL PERUSAHAAN 2
VISI DAN MISI 4
NILAI-NILAI 6
BIDANG USAHA BANK SULSELBAR 8
IKHTISAR SEJARAH BANK SULSELBAR 9
IKHTISAR SEJARAH PENDIRIAN, PERUBAHAN NAMA, DAN STATUS BADAN HUKUM BANK SULSELBAR 10
LAPORAN PERISTIWA PENTING TAHUN 2014 11
PENGHARGAAN 12
AKSES INFORMASI BANK SULSELBAR 14
PROFIL DAN IDENTITAS BANK SULSELBAR 32

LAPORAN MANAJEMEN 34
LAPORAN KOMITE 38
LAPORAN DEWAN KOMISARIS PT. BANK SULSELBAR TAHUN BUKU 2014 48
SAMBUTAN DIREKSI 54

TINJAUAN USAHA 64
TINJAUAN PEREKONOMIAN NASIONAL TAHUN 2014 64
PERBANKAN KONSUMER 92
PERBANKAN KOMERSIL 118
PERBANKAN MIKRO 122
UNIT USAHA SYARIAH 128
PROSPEK BISNIS, KEUNGGULAN KOMEPTITIF, DAN RENCANA STRATEGIS 154
SUKU BUNGA DASAR KREDIT 164

ANALISIS OPERASIONAL
TEKNOLOGI INFORMASI 168
SUMBER DAYA MANUSIA 172

ANALISIS KEUANGAN 202
TINJAUAN KEUANGAN 204
PERBANDINGAN PROYEKSI DENGAN HASIL YANG DICAPAI 274

INFORMASI SAHAM DAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN 278

LAPORAN GCG 300
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 428

MANAJEMEN RESIKO 478
PENGUNGKAPAN PERMODALAN & PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 480

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 538

DATA PERUSAHAAN 552
STRUKTUR ORGANISASI 554
BIOGRAFI PEMIMPIN GRUP 556
BIOGRAFI DEWAN KOMISARIS 560
BIOGRAFI DEWAN DIREKSI 564
BIOGRAFI KOMITE 568
BIOGRAFI DEWAN PENGAWAS SYARIAH 572
SEKRETARIS PERUSAHAAN 574
NAMA PEMIMPIN CABANG 578
ALAMAT KANTOR 582

PROFIL PERUSAHAAN

atm
ATMA
BERSAMA
Bank Sulselbar

VISI DAN MISI

Visi dan misi Bank Sulselbar merupakan arah dan tujuan yang hendak dicapai manajemen dan karyawan Bank Sulselbar. Bagi Bank Sulselbar, visi adalah gambaran mengenai *goals* dan atau pernyataan *want to be* yang ingin dicapai di masa mendatang untuk menjamin kesuksesan jangka panjang. Dan untuk menerjemahkan visi agar dapat diwujudkan, maka penguraiannya dirumuskan dalam bentuk misi. Melalui pernyataan misi digambarkan *needs* pasar yang ingin dicapai Bank Sulselbar dan cara untuk memenuhi *needs* tersebut yang pada akhirnya perumusan misi merupakan wujud realisasi yang akan menjadikan Bank Sulselbar dapat memberikan layanan perbankan yang unggul.

Pada tahun 2010, telah dirumuskan visi dan misi serta nilai budaya kerja sebagai upaya dalam pembentukan budaya perusahaan di Bank Sulselbar dan telah ditetapkan melalui surat keputusan Direksi No. SK/002/DIR/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Perubahan Visi, Misi dan Tagline Bank Sulselbar.

Visi dan misi serta budaya perusahaan ini menjadi acuan bagi Bank Sulselbar untuk mencapai *goals* menjadi *Regional Champion*.

Visi

Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Indonesia

Arti Visi :

Bank Kebanggaan :
Bank Sulselbar berkeinginan untuk memberikan rasa bangga kepada masyarakat dengan menyediakan produk yang kompetitif dan bernilai tinggi serta layanan yang berkualitas.

Pilihan Utama :
Bank Sulselbar berkeinginan untuk menjadi *bank of choice* masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan layanan dan jasa perbankan dimanapun kami berada.

Membangun Kawasan Timur Indonesia :
Bank Sulselbar berkeinginan untuk menjadi *market leader* yang menyediakan layanan dan jasa perbankan yang berkualitas di Kawasan Timur Indonesia serta turut serta berkontribusi aktif dalam pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Misi

1. Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan terpercaya
2. Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil
3. Memberikan nilai tambah optimum bagi stakeholder

Arti Misi :

1. Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan terpercaya
   - Bank Sulselbar memberikan solusi layanan yang cepat dan akurat
   - Bank Sulselbar didukung oleh sistem dan teknologi terkini untuk memenuhi kebutuhan produk dan layanan perbankan yang handal.
2. Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil

- Bank Sulselbar menjadi bank pilihan utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam pengelolaan keuangan
- Bank Sulselbar menjadi kontributor deviden tertinggi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di antara BUMD yang ada di daerah.
- Bank Sulselbar secara profesional mendukung program – program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di berbagai sektor untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di masa kini dan masa mendatang.

3. Memberikan nilai tambah optimum bagi *stakeholder*
   - Bank Sulselbar menciptakan dan menyediakan produk dan layanan yang kompetitif dan berkualitas.
   - Bank Sulselbar berupaya untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan program -program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
   - Bank Sulselbar senantiasa berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pengurus secara berkesinambungan.
   - Bank Sulselbar meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Tagline

Melayani Sepenuh Hati

Arti Tagline :

Bank Sulselbar berkeinginan untuk senantiasa memberikan layanan prima kepada nasabah melalui layanan yang ramah dan berempati dengan tetap mengedepankan profesionalisme yaitu layanan yang akurat, responsif, memberikan solusi dan aman. Layanan personal kepada nasabah diimbangi pula dengan penyediaan produk dan layanan berbasis teknologi terkini untuk memberikan *service experience* terbaik bagi nasabah.

NILAI NILAI

Nilai – nilai Budaya merupakan pedoman yang telah disepakati dan tertanam pada seluruh karyawan Bank Sulselbar yang menjadi acuan atau panduan perilaku untuk mencapai visi dan misi Bank Sulselbar. Bank Sulselbar menguraikan nilai – nilai budaya perusahan ke dalam 5 (lima) panduan perilaku yang disingkat dengan PRIORITAS PRIMA.

Nilai – nilai budaya Bank Sulselbar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/159/DIR/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penetapan Nilai – Nilai Budaya Kerja PT Bank Sulsel.

Nilai – Nilai	Perilaku Utama
PRofesional Kami selalu meningkatkan kemampuan untuk menjadi ahli dibidangnya agar dapat memahami arah dan tujuan kerja, bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai dan menghasilkan kinerja yang cepat tepat dan akurat.	• Memahami tugas dan tanggung jawab secara utuh dan kaitannya dengan sasaran yang lebih besar • Bertindak cermat dengan melakukan check & re-check pada setiap kesempatan • Bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan • Memberikan hasil kerja dengan kualitas terbaik pada setiap kesempatan • Menggunakan waktu kerja dengan efektif dan efisien • Aktif mengembangkan diri dari waktu ke waktu sesuai bidang pekerjaan
In**O**vasi Kami mengembangkan ide baru untuk menghasilkan sistem, teknologi, produk dan layanan unggulan dan dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan siap untuk mengantisipasi perubahan	• Berpikir di luar kerangka kelaziman untuk menemukan solusi terbaik • Mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang untuk menghasilkan pengembangan sistem, teknologi, produk dan layanan unggulan • Mengikuti perkembangan jaman dan kemajuan teknologi • Terbuka terhadap ide-ide baru yang membangun • Proaktif dalam mengantisipasi perubahan • Belajar dari keberhasilan dan kegagalan untuk kemajuan perusahaan

KeRjasama

Kami meningkatkan sinergi antar individu, unit kerja dan institusi dengan membagi fungsi dan peran yang sesuai serta tetap memperhatikan hubungan baik antar individu dengan prinsip kesetaraan untuk mencapai sasaran perusahaan

- Melakukan koordinasi anggota tim sesuai fungsi, peran dan tanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan
- Berkomunikasi dengan efektif terhadap anggota tim maupun unit-unit kerja terkait
- Selalu siap membantu satu sama lain untuk mencapai kepentingan bersama
- Saling menghargai perbedaan pendapat yang ada sebagai peluang untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan tujuan
- Menerima dan memberikan kritik dengan baik
- Saling menghormati dan mengapresiasi

IntegrITAS

Kami berpegang teguh pada etika bisnis perusahaan, jujur, satunya kata dengan perbuatan dan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi

- Jujur
- Satunya kata dengan perbuatan
- Berani menindak atau melaporkan segala bentuk penyimpangan
- Menjaga rahasia perusahaan
- Mengemukakan data dan informasi secara akurat dan benar
- Mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan unit kerja

Layanan PRIMA

Kami memberikan layanan dengan sepenuh hati, menggunakan kemampuan maksimal, layanan yang cepat dan tepat serta memberikan nilai tambah sesuai standard layanan untuk mencapai kepuasan dan loyalitas nasabah

- Memberikan layanan dengan sepenuh hati
- Menjiwai pekerjaan dengan berperilaku 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) setiap saat
- Memberikan nilai tambah kepada nasabah
- Memberikan solusi layanan yang cepat dan akurat
- Menjalankan standard layanan dengan konsisten
- Memahami kebutuhan dan keinginan nasabah

BIDANG USAHA BANK SULSELBAR

Perbankan Konsumer

Produk kredit konsumer terdiri dari Kredit Pegawai (Kredit Umum Lainnya/KUL), Kredit Multiguna, Kredit DPRD, Kredit Pensiunan, Kredit Pemilikan Motor dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Produk Simpanan konsumer terdiri dari tiga yaitu Giro, Tabungan dan Deposito.

Perbankan Komersial & Mikro

Produk kredit mikro terdiri dari Kredit Pundi Usaha Rakyat (PUR), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pusaka Mandiri (PUNDI) dan Kredit SUP 005.

Produk Simpanan mikro didominasi produk Tabungan dengan segmentasi nasabah petani dan nelayan serta pengusaha kecil.

Perbankan Komersial & Mikro

Produk kredit komersial terdiri dari Kredit Konstruksi, Kredit Usaha Mandiri (KUM), Kredit PEMDA, dan Kredit Sindikasi.

Produk Simpanan komersial didominasi produk Giro dan Deposito lembaga/perusahaan.

Unit Usaha Syariah

Produk Pembiayaan terdiri dari dua yaitu Pembiayaan Komersial Syariah dan Pembiayaan Konsumer Syariah.

Produk Pendanaan terdiri dari tiga yaitu Giro Syariah, Tabungan Syariah dan Deposito Syariah.

IKHTISAR SEJARAH BANK SULSELBAR

- Januari 1961
  Didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Sulawesi Selatan Tenggara
- Juli 1961
  Berganti nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara
- 1964
  Berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara
- 1976
  Berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (BPD Sulsel)
- 1993
  Perubahan Modal Dasar menjadi Rp25 milyar
- 1999
  Perubahan Modal Dasar menjadi Rp150 milyar
- 2003
  Perubahan status Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT)
- 2003
  Berganti nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Bank Sulsel)
- 2003
  Perubahan Modal Dasar menjadi Rp650 milyar
- 2007
  Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar
- 2009
  Perubahan Modal Dasar menjadi Rp1,6 trilyun
- 2010
  Pembukaan Cabang Jakarta sebagai kantor cabang Bank pertama yang berada di luar wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
- 2011
  Penerbitan Obligasi Bank Sulselbar I sebesar Rp400 miliar
- 2011
  Penerbitan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I sebesar Rp100 miliar
- 2011
  Perubahan Visi dan Misi Bank Sulselbar
- 2011
  Penetapan Nilai – Nilai Perusahaan (Corporate Values) PRIORITAS PRIMA dan Tagline "Melayani Sepenuh Hati"
- 2011
  Berganti nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat (Bank Sulselbar)

IKHTISAR SEJARAH PENDIRIAN, PERUBAHAN NAMA, DAN STATUS BADAN HUKUM BANK SULSELBAR

1961

PT Bank Pembangunan Sulawesi Selatan Tenggara

Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961

1961

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara

Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961

1964

Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara

Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964

1964

Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara

Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964

1976

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (BPD Sulsel)

Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 1976 tentang Perubahan Pertama Kalinya Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara

2003

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Bank Sulsel)

Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-31541. HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel

2011

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat (Bank Sulselbar)

Akta Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH di Makassar Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011.

Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765. AH.01.02. tanggal 08 Maret 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765. AH.01.02. tanggal 08 Maret 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP.GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank Sulselbar.

LAPORAN PERISTIWA PENTING TAHUN 2014

13 Januari 2014	Hari Ulang Tahun Bank Sulselbar Ke- 53 Tahun
13 Januari 2014	Donor Darah Bank Sulselbar
17 Januari 2014	RUPS Luar Biasa Tahun 2014 PT. Bank Sulselbar
11 April 2014	Donor Darah Bank Sulselbar
02 Juni 2014	Pembukaan Kantor Cabang Topoyo
24 Juni 2014	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2013 dan Luar Biasa
26 Juni 2014	Acara Pisah Sambut Direksi PT. Bank Sulselbar
17 Agustus 2014	Peringatan HUT Kemerdekaan RI Indonesia Ke-69
17-Sep-2014	Bank Sulselbar Economic Forum ; "Sulawesi Selatan *Economic Outlook* Pasca Pilpres"
16 Oktober 2014	Donor Darah Bank Sulselbar
12 Desember 2014	Pemindahan Alamat Kantor Operasional PT. Bank Sulselbar Cab. Malili
29 Desember 2014	Pemindahan Alamat Kantor Kas Uloe PT. Bank Sulselbar Cab. Bone
30 Desember 2014	Pembukaan Kantor KasTinambung PT. Bank Sulselbar Cab. Polmas

PENGHARGAAN

AWARD

1. 24 Februari 2014 - Karim Consulting Indonesia Bank Sulselbar meraih penghargaan dengan kategori :
   a. 2nd Rank The Most Efficient Sharia Unit, Bank Pembangunan Daerah.
   b. 2nd Rank Top Growth Funding Sharia Unit, Bank Pembangunan Daerah.
   c. 3nd Rank Top Growth Funding Sharia Unit, Asset < IDR 1 TN.
   d. 3nd Rank The Most Profitable Sharia Unit, Bank Pembangunan Daerah.
   e. 3nd Rank The Most Efficient Sharia Unit, Asset < IDR 1 TN tanggal 24 Februari 2014

2. 18 Juli 2014 – Majalah InfoBank
   Titanium Trophy atas kinerja keuangan "sangat bagus" selama 15 tahun berturut – turut (periode 1999 – 2013)

3. 08 Oktober 2014 – MarkPlus Insight
   The Best of WOW Service Excellence Award, Category Conventional Bank (Buku II)

4. Majalah InfoBank
   Penghargaan dengan Predikat "Sangat Bagus" untuk Kategori UUS Bank Umum Aset di bawah Rp1 T.

PRESTASI

1. Pemeringkatan Bank Sulselbar Tahun 2014, peringkat idA (Single A, Stable Outlook), periode 06 Februari 2014 – 01 Februari 2015

2. Pemeringkatan Obligasi Bank Sulselbar I Seri A Tahun 2011, peringkat idA (Single A, Stable Outlook), periode 06 Februari 2014 – 01 Februari 2015

3. Pemeringkatan Obligasi Bank Sulselbar I Seri B Tahun 2011, peringkat idA (Single A, Stable Outlook), periode 06 Februari 2014 – 01 Februari 2015

4. Pemeringkatan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011, peringkat idA (Single A, Stable Outlook), periode 06 Februari 2014 – 01 Februari 2015

PENGHARGAAN

1. 02 November 2014 - Pemerintah Kota Makassar
   Penghargaan atas Partisipasi & Kerjasama yang Ke – 5 kalinya sebagai Sponsor pada Kegiatan Makassar Jalan Sehat 2014

2. 12 November 2014 - Gubenur Sulawesi Selatan
   Penghargaan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Ke – 50 Tahun 2014 sebagai Pelaksana Donor Darah Reguler dalam rangka Menunjang Program Kesehatan Gratis Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan

3. Jakarta 21 Desember 2014 - Otoritas Jasa Keuangan
   Penghargaan atas Partisipasi dalam kegiatan Literasi dan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014.

infobank
Sebagai
Atas Kinerja Keuangan "Sangat Bagus" 2009-2013
Jakarta, 19 Juli 2014

AKSES INFORMASI BANK SULSELBAR

Sebagai wujud penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam hal transparansi, Bank Sulselbar menyediakan akses informasi kepada pemegang saham dan *stakeholder* melalui Sekretaris Perusahaan dan Departemen Komunikasi & Humas. Saat ini Sekretaris Perusahaan Bank Sulselbar adalah Irwan W. Roem dan Departemen Komunikasi & Humas Bank Sulselbar yang dipangku oleh Rakhmat Nur Kadir. Kemudahan akses informasi mengenai Bank Sulselbar kepada publik juga merupakan bagian dari penerapan azas keterbukaan dan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Informasi yang disediakan yaitu dalam bentuk publikasi (*press release)* secara berkala pada beberapa media nasional dan media lokal, baik cetak maupun elektronik, serta dapat pula diakses melalui situs www.banksulselbar.co.id. Bank Sulselbar juga menyediakan *call center* pada nomor +62411 - 1500855.

Nama Perusahaan
PT Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16
Makassar 90125, Indonesia
Tel. 0411 859171 (*Hunting*)
Fax. 0411 859174

Pendirian Perusahaan
13 Januari 1961

Komposisi Pemegang Saham (per 31 Desember 2014)
Komposisi kepemilikan saham Bank Sulselbar per 31 Desember 2014 sebagai berikut :

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 35,64%
- Pemerintah Kab./Kota se – Sulawesi Selatan 57,55 %
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 0,99%
- Pemerintah Kab./Kota se – Sulawesi Barat 5,82%

Pencatatan Obligasi
Bursa Efek Indonesia

Jenis Usaha
Bank Umum

Kode Obligasi
BSSB

Sekretaris Perusahaan
Irfan W. Roem
Kantor Pusat Bank Sulselbar
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16
Makassar 90125
Telp. 0411 – 859171 ext. 4425
Fax. 0411 – 859171

Departemen Komunikasi & Humas
Rakhmat Nur Kadir
Kantor Pusat Bank Sulselbar
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16
Makassar 90125
Telp. 0411 – 859171 ext. 4425
Fax. 0411 – 859171

Situs Perusahaan
www.banksulselbar.co.id

Call Center
+62411 - 1500855

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2014
RUPS Tahunan akan diselenggarakan paling lambat akhir Mei 2015 di Makassar.

Keterbukaan Informasi
Keterbukaan Informasi Eksternal
Keterbukaan Informasi oleh lembaga keuangan merupakan amanat dan ketentuan yang diwajibkan oleh otoritas lembaga keuangan untuk menyebarluaskan informasi – informasi material mengenai aktivitas dan kinerja Bank Sulselbar. Bank Sulselbar secara berkala mempublikasikan hasil kinerja Bank baik melalui media (seperti media cetak, media elektronik, dan media *online*), maupun konferensi/siaran pers.

Pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi dan publikasi yang dilakukan Bank Sulselbar selama tahun 2014 sebagai berikut :

Bentuk Keterbukaan Informasi	2014	2013	2012
Iklan Publikasi Umum	30	29	21
Iklan Publikasi Laporan Keuangan Kuartal	3	3	3
Laporan Tahunan	1	1	1
Paparan Kinerja *(Financial Highlight)*	2	4	3
Advertorial	30	30	17
Press Conference	1	1	1
Media Visit	-	-	-
Media Gathering	1	-	-

Bank Sulselbar senantiasa mengupayakan agar kewajiban pelaporan yang bersifat periodik dan publikasi atas informasi material diserahkan secara tepat waktu kepada Bapepam-LK dan BEI. Kondisi tersebut untuk meningkatkan transparansi dan sebagai wujud azas kepatuhan Bank Sulselbar terhadap Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 dan peraturan BEI No. 1-E VI.

Sepanjang tahun 2014, Bank telah menyampaikan laporan terkait keterbukaan informasi yang ditujukan kepada BAPEPAM-LK/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut :

No. Surat	Perihal	Tanggal	Tujuan
SR/039/R/GAI/II/2014	Lap. Semester II Thn 2013	27-Feb-14	OJK
SR/044/R/GAI/III/2014	Hasil Audit Internal Sistem BI-RTGS	18-Mar-14	BI
SR/086/R/GAI/VIII/2014	Lap. Semester I Thn 2014	14-Agust-14	OJK
SR/154/R/GAI/XII/2014	Lap. Hasil Evaluasi Kinerja GAI	29-Des-14	OJK Makassar
SR/041/B/GTI/VIII/2014	Lap. Progress Implementasi Teknologi Chip & Pin U/ Kartu ATM dan/atau Kartu Debit Periode Bulan Juni 2014	20-Agust-14	BI Jakarta
SR/033/R/GTI/XII/2014	Lap. Penyampaian Hasil Uji Coba DRC & DRP Level III	29-Des-14	BI Makassar
SR/005/R/GKP/I/2014	Lap. Pelaksanaan Tugas Dirkep Semester II Thn 2013	23-Jan-14	OJK Makassar
SR/010/R/GKP/II/2014	Lap. Hasil RUPS-LB Thn 2014	5-Feb-14	OJK Jakarta
SR/015/R/GKP/II/2014	Revisi Lap. Penyesuaian Action Plan Penerapan Program APU & PPT PT. Bank Sulselbar	19-Feb-14	OJK Makassar
SR/024/R/GKP/III/2014	Lap. Inf. Data Nasabah	28-Mar-14	OJK Jakarta
SR/028/R/GKP/IV/2014	Lap. Pelaksanaan Perbaikan GCG Bank Sulselbar Thn 2012 & Lap. GCG Bank Sulselbar Thn 2013	17-Apr-14	OJK Makassar
SR/058/R/GKP/VII/2014	Lap. Hasil RUPS Tahunan & Luar Biasa Thn 2014	7-Jul-14	OJK Jakarta

No. Surat	Perihal	Tanggal	Tujuan
SR/060/R/GKP/VII/2014	Lap. Pelaksanaan Tugas Dirkep Semester I Thn 2014	17-Jul-14	OJK Makassar
SR/091/R/GKP/XI/2014	Lap. Fraud Penyaluran Bantuan Siswa Miskin	25-Nop-14	OJK Makassar
SR/001/R/GMR/I/2014	Lap. Profil Risiko Posisi 31 Desember 2013	21-Jan-14	OJK Makassar
SR/009/R/GMR/IV/2014	Lap. Profil Risiko Posisi 31 Maret 2014	22-Apr-14	OJK Makassar
SR/010/R/GMR/IV/2014	Lap. Posisi Profil Risiko UUS	22-Apr-14	OJK Makassar
SR/014/R/GMR/ VII/2014	Lap. Profil Risiko Periode 30 Juni 2014	21-Jul-14	OJK Makassar
SR/015/R/GMR/ VII/2014	Lap. Profil Risiko UUS	17-Jul-14	OJK Makassar
SR/022/R/GMR/X/2014	Lap. Profil Risiko Periode 30 September 2014	20-Okt-14	OJK Makassar
SR/067/B/GPP/XII/2014	Lap. Realisasi PT. Bank Sulselbar Sbg Bank Regional Champion (BCR) Posisi Akhir September 2014	3-Des-14	OJK Makassar
SR/003/R/GPP/I/2014	Penjelasan Ttg Penyampaian Lap. Realisasi Rencana Bisnis PT. Bank Sulselbar Triwulan III 2013	24-Jan-14	OJK Makassar
Dilaporkan secara berkala setiap bulan	Lap. Komposisi Setoran Modal Pemprov, Pemkab, Pemkot Se-Sulselbar	Jan-Des 2014	OJK Makassar
Dilaporkan secara berkala setiap bulan	Lap. Transfer Dana	Jan-Des 2014	OJK Makassar
Dilaporkan secara berkala setiap bulan	Lap. Bulanan Valas	Jan-Des 2014	OJK Makassar

No. Surat	Perihal	Tanggal	Tujuan
SR/005/R/GPP/I/2014	Lap. Realisasi RBB PT. Bank Sulselbar Triwulan IV 2013	29-Jan-14	OJK Makassar
SR/012/R/GPP/II/2014	Lap. Realisasi & Evaluasi Action Plan PT. Bank Sulselbar Sbg Bank Regional Champion (BRC) Sampai Dengan Posisi Akhir Des 2013	21-Feb-14	OJK Makassar
SR/016/R/GPP/III/2014	Penyampaian Corporate Plan PT. Bank Sulselbar Thn 2014-2018	14-Mar-14	OJK Makassar
SR/021/R/GPP/IV/2014	Lap. Realisasi Penyesuaian Rencana Bisnis PT. Bank Sulselbar Triwulan I 2014	29-Apr-14	OJK Makassar
SR/024/R/GPP/V/2014	Lap. Realisasi PT. Bank Sulselbar Sbg Bank Regional Champion (BCR) Posisi Akhir Maret 2014	29-Apr-14	OJK Makassar
SR/026/R/GPP/V/2014	Penyampaian Corporate Plan PT. Bank Sulselbar Thn 2014-2018 (Penyesuaian)	22-Mei-14	OJK Makassar
SR/031/R/GPP/VII/2014	Lap. Realisasi Rencana Bisnis (Penyesuaian) PT. Bank Sulselbar Triwulan II 2014	25-Jul-14	OJK Makassar
SR/032/R/GPP/VII/2014	Lap. Realisasi PT. Bank Sulselbar Sbg Bank Regional Champion (BRC) Posisi Akhir Juni 2014	25-Jul-14	OJK Makassar
SR/040/R/GPP/XI/2014	Lap. Realisasi Rencana Bisnis (Penyesuaian) PT. Bank Sulselbar Triwulan III 2014	29-Okt-14	OJK Makassar
SR/044/R/GPP/XI/2014	Penyampaian Rencana Bisnis PT. Bank Sulselbar Thn 2015-2017	28-Nop-14	OJK Makassar

No. Surat	Perihal	Tanggal	Tujuan
SR/156/R/GTR/I/2014	Pelaporan Structured Product Bulan Desember 2013	27-Jan-14	OJK Makassar
SR/196/R/GTR/II/2014	Pelaporan Structured Product Bulan Januari 2014	3-Feb-14	OJK Makassar
SR/007/R/GPS/I/2014	Lap. Penyaluran Dana SUP-UUS	6-Jan-14	BI Makassar
Dilaporkan secara berkala setiap bulan	Lap. Bulanan Pemberian KPRS/RSS	Jan-Des 2014	BI Makassar
SR/256/R/GPS/III/2014	Lap. Pembiayaan UMKM Dengan Pola Executing	4-Mar-14	BI Jakarta
Dilaporkan secara berkala setiap bulan	Lap. Penyaluran Dana SUP-UUS	Jan-Des 2014	BI Makassar
SR/018/R/GUS/III/2014	Lap. GCG 2012 PT. Bank Sulselbar UUS	19-Mar-14	BI Makassar
SR/075/R/GUS/XI/2014	Lap. LSMK UUS Secara Offline	6-Nop-14	BI Makassar
Dilaporkan secara berkala setiap bulan	Lap. Keuangan Publikasi Bulanan	Jan-Des 2014	BI Jakarta
SR/004/B/GPK/I/2014	Lap. LKPBU Form 701 (Lap. Bacassurance)	7-Jan-14	BI Makassar
SR/036/B/GPK/IV/2014	Lap. Keuangan Publikasi Triwulanan	2-Apr-14	BI Jakarta
SR/046/B/GPK/V/2014	Lap. Keuangan Publikasi Triwulanan	2-Mei-14	BI Jakarta
SR/047/B/GPK/V/2014	Bukti Koran Lap. Keuangan Publikasi Triwulanan	2-Mei-14	BI Jakarta
SR/048/B/GPK/V/2014	Lap. Jaringan Kantor	2-Mei-14	BI Jakarta

No. Surat	Perihal	Tanggal	Tujuan
SR/057/B/GPK/V/2014	Lap. Jaringan Kantor	3-Jun-14	BI Jakarta
SR/062/B/GPK/VII/2014	Lap. Jaringan Kantor	1-Jul-14	BI Jakarta
SR/067/B/GPK/ VIII/2014	Lap. Jaringan Kantor	4-Agust-14	BI Jakarta
SR/069/B/GPK/ VIII/2014	Lap. Keuangan Publikasi Triwulanan	4-Agust-14	BI Jakarta
SR/083/B/GPK/X/2014	Lap. Jaringan Kantor	1-Okt-14	BI Jakarta
SR/092/B/GPK/XI/2014	Bukti Koran Lap. Publikasi September 2014	3-Nop-14	BI Makassar
SR/102/B/GPK/XI/2014	Lap. Keuangan Publikasi Triwulanan	11-Nop-14	BI Makassar
SR/002/R/GPK/I/2014	Lap. Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valas	7-Jan-14	OJK Jakarta
SR/003/R/GPK/I/2014	Lap. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Bank Sulselbar Thn 2011 Periode Desember 2013	8-Jan-14	OJK Jakarta
SR/018/R/GPK/II/2014	Lap. Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valas	5-Feb-14	OJK Jakarta
SR/019/R/GPK/II/2014	Lap. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Bank Sulsel-bar Thn 2011 Periode Janu-ari 2014	5-Feb-14	OJK Jakarta
SR/023/R/GPK/II/2014	Lap. Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valas	5-Feb-14	OJK Jakarta
SR/032/R/GPK/III/2014	Lap. Keuangan & Publikasi	27-Mar-14	OJK Jakarta

No. Surat	Perihal	Tanggal	Tujuan
SR/035/R/GPK/IV/2014	Lap. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Bank Sulselbar Thn 2011 Periode Maret 2014	3-Apr-14	OJK Jakarta
Dilaporkan secara berkala setiap bulan	Lap. Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valas	Apr-Des 2014	OJK Jakarta
SR/058/R/GPK/VII/2014	Lap. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Bank Sulselbar Thn 2011 Periode Juni 2014	3-Jul-14	OJK Jakarta
SR/069/R/GPK/VII/2014	Lap. Keuangan & Publikasi	24-Jul-14	OJK Jakarta
SR/095/R/GPK/IX/2014	Lap. Keuangan & Publikasi	19-Sep-14	OJK Makassar
SR/099/R/GPK/X/2014	Lap. Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Bank Sulselbar Thn 2011 Periode september 2014	2-Okt-14	OJK Jakarta
SR/134/B/GCS/IV/2014	Kesiapan Dana Menjelang Jatuh Tempo Obligasi	25-Apr-14	Bursa Efek Indonesia
SR/165/B/GCS/VI/2014	Lap. Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang Topoyo	4-Jun-14	OJK Makassar
SR/209/B/GCS/VI/2014	Lap. Tahunan Bank Sulselbar Tahun 2013	26-Jun-14	OJK Makassar
SR/213/B/GCS/VI/2014	Lap. Tahunan Bank Sulselbar Tahun Buku 2013	25-Jun-14	OJK Regional 6 Sulampua
SR/301/B/GCS/VIII/2014	Penyampaian Perubahan Susunan Direksi PT. Bank Sulselbar	8-Agust-14	OJK Jakarta

No. Surat	Perihal	Tanggal	Tujuan
SR/307/B/GCS/ VIII/2014	Penyampaian Perubahan Susunan Direksi PT. Bank Sulselbar	7-Agust-14	Bursa Efek Indonesia
SR/436/B/GCS/XI/2014	Penyampaian Kegiatan Edukasi	27-Nop-14	OJK Jakarta
SR/442/B/GCS/XII/2014	Lap. Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Operasional	4-Des-14	OJK Makassar
SR/477/B/GCS/XII/2014	Pemberitahuan Perubahan Sekretaris Perusahaan	8-Des-14	OJK Jakarta
SR/502/B/GCS/XII/2014	Lap. Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Kas (Bone)	29-Des-14	OJK Makassar
SR/503/B/GCS/XII/2014	Lap. Pelaksanaan Pemindahan Alamat & Perubahan Nama (Belopa)	29-Des-14	OJK Makassar
SR/004/R/GCS/I/2014	Lap. Realisasi Aktifitas Keagenan Pemasaran Kartu Kredit Co-Brand	24-Jan-14	OJK Makassar
SR/008/R/GCS/II/2014	Penyampaian Pejabat Bank Terkait Penanganan & Fasilitasi Pengaduan Nasabah	14-Feb-14	OJK Jakarta
SR/020/R/GCS/IV/2014	Lap. Tahunan Bank Sulselbar Tahun 2013	28-Apr-14	Bursa Efek Indonesia
SR/021/R/GCS/IV/2014	Lap. Tahunan Bank Sulselbar Tahun 2013	28-Apr-14	OJK Jakarta
SR/032/R/GPK/III/2014	Penyampaian Lap. Keuangan Tahunan	7-Apr-14	Bursa Efek Indonesia Via Idxnet

No. Surat	Perihal	Tanggal	Tujuan
SR/007/R/GCS/II/2014	Laporan Hasil Pemeringka-tan Tahunan	14-Feb-14	Bursa Efek Indonesia Via Idxnet
SR/010/R/GKP/II/2014	Hasil RUPS-LB	10-Feb-14	Bursa Efek Indonesia Via Idxnet
SR/099/B/GPK/X/2014	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	4-Nop-14	Bursa Efek Indonesia Via Idxnet
SR/035/R/GPK/IV/2014	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	11-Apr-14	Bursa Efek Indonesia Via Idxnet
SR/134/B/GCS/IV/2014	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Peng-umuman Pembelian Kembali Atau Pembayaran Efek yang Bersifat Utang	25-Apr-14	Bursa Efek Indonesia Via Idxnet
SR/020/R/GCS/IV/2014	Penyampaian Laporan Tahu-nan	30-Apr-14	Bursa Efek Indonesia Via Idxnet
SR/165/B/GCS/VI/2014	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Pel-aporan Pelaksanaan Pembu-kaan Kantor Cabang Topoyo	5-Jun-14	Bursa Efek Indonesia Via Idxnet
SR/058/R/GKP/VII/2014	Hasil RUPS-LB	7-Jul-14	Bursa Efek Indonesia Via Idxnet
SR/058/R/GPK/VII/2014	Lap. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	10-Jul-14	Bursa Efek Indonesia Via Idxnet

No. Surat	Perihal	Tanggal	Tujuan
SR/069/R/GPK/VII/2014	Penyampaian Lap. Keuangan Interim	24-Jul-14	Bursa Efek Indonesia Via Idxnet
SR/307/B/GCS/ VIII/2014	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Perubahan Susunan Direksi	22-Agust-14	Bursa Efek Indonesia Via Idxnet
SR/405/B/GCS/XI/2014	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan	5-Nop-14	Bursa Efek Indonesia Via Idxnet
SR/442/B/GCS/XII/2014	Penyampaian Bukti Iklan Lainnya	9-Des-14	Bursa Efek Indonesia Via Idxnet
SR/477/B/GCS/XII/2014	Perubahan Corporate Secretary	9-Des-14	Bursa Efek Indonesia Via Idxnet
SR/477/B/GCS/XII/2014	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Penggantian Penunjukan Corporate Secretary	9-Des-14	Bursa Efek Indonesia Via Idxnet
SR/165/B/GCS/VI/2014	Keterbukaan Infomasi Yang Pelu Diketahui Publik Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang Topoyo	5-Jun-14	OJK Via SPE
SR/058/R/GKP/VII/2014	Hasil RUPS-LB	7-Jul-14	OJK Via SPE
SR/058/R/GKP/VII/2014	Hasil RUPS Tahunan	7-Jul-14	OJK Via SPE

No. Surat	Perihal	Tanggal	Tujuan
SR/058/R/GPK/VII/2014	Lap. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	10-Jul-14	OJK Via SPE
SR/069/R/GPK/VII/2014	Penyampaian Laporan Keuangan Interim	24-Jul-14	OJK Via SPE
SR/442/B/GCS/XII/2014	Penyampaian Bukti Iklan Lainnya	9-Des-14	OJK Via SPE
SR/477/B/GCS/XII/2014	Perubahan Corporate Secretary	9-Des-14	OJK Via SPE
SR/477/B/GCS/XII/2014	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Penggantian Penunjukan Corporate Secretary	9-Des-14	OJK Via SPE

Investor Relations

Keterbukaan informasi Bank Sulselbar mengenai kinerja keuangan, informasi dan aktivitas penting Bank lainnya disampaikan secara terkini kepada regulator, lembaga pemerintahan, masyarakat publik dan para pemangku kepentingan. Publikasi mengenai kinerja Bank Sulselbar selama tahun 2014, sebagai berikut :

Materi Pengumuman	*Media*	*Tanggal Publikasi*
Key Financial Highlight	Fajar	13 Februari 2014
Laporan Keuangan Publikasi Periode Desember 2013	Fajar	28 Maret 2014
Laporan Keuangan Publikasi Periode Desember 2013	Bisnis Indonesia	28 Maret 2014
Key Financial Highlight	Tribun Timur	25 April 2014
Pembukaan Kantor Cab. Topoyo	Fajar	04 Juni 2014
Laporan Keuangan Tengah Tahun Periode 30 Juni 2014	Bisnis Indonesia	21 Juli 2014

Materi Pengumuman	Media	Tanggal Publikasi
Laporan Keuangan Publikasi Periode 30 Juni 2014	Fajar	21 Juli 2014
Laporan Keuangan Publikasi Periode 30 September 2014	Bisnis Indonesia	20 Agustus 2014
Laporan Keuangan Publikasi Periode 30 September 2014	Fajar	20 Agustus 2014
Pembukaan Kantor Kas PTSP PT. BSSB Cab. Sidrap	Fajar	30 Oktober 2014
Pemindahan Alamat Kantor PT. Bank Sulselbar Cab. Malili	Fajar	03 Desember 2014

Media Relations

Siaran Pers dan Advertorial

Pada tahun 2014, Bank Sulselbar secara berkala dan teratur memberikan informasi kepada publik melalui media massa, khususnya media cetak. Publikasi media dilakukan dalam bentuk advertorial dan siaran pers, sebagai berikut :

Tanggal	Media	Materi Advertorial / Press Release
Jan-14	Fajar	Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pertama
20-02-2014	Koran Sindo	Produk Gadai Emas Bank Sulselbar Syariah
28-02-2014	Tribun Timur	Pembahasan Talkshow Economic Outlook 2014 oleh Bpk. Ellong Tjandra
20-03-2014	Fajar	Ellong Tjandra : "IPO tak Jamin Penguatan Modal"
15-05-2014	Tribun Timur	Advertorial terkait Pelayanan Cabang Utama Makassar
21-05-2014	Tribun Timur	Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Kedua Bank Sulselbar Syariah Sengkang
21-05-2014	Tribun Timur	Bank Sulselbar Rangkul BPR

Tanggal	Media	Materi Advertorial / Press Release
25-06-2014	Fajar	"Bank Sulselbar Pro UMKM"
28-06-2014	UPEKS	Advertorial terkait Pemilihan Komisaris PT. Bank Sulselbar
18-07-2014	Fajar	"Bank Sulselbar Genjot Kredit Konstruksi"
Juli 2014	SKU Suara Selatan	Dirut PT. Bank Sulselbar : "Motor Pembangunan Daerah"
21-07-2014	Bisnis Indonesia	Komitmen Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Kode Etik Pelaksanaan Bank Sulselbar
24-07-2014	Tribun Timur	Profil Bpk Dirut Bank Sulselbar "H.A.Muh.Rahmat"
27-07-2014	UPEKS	"Bank Sulselbar Rencana Turunkan Bunga Kredit"
12-08-2014	UPEKS	Kredit Pundi Usaha Rakyat Bank Sulselbar
18-08-2014	Fajar	Advertorial terkait Obligasi Bank Sulselbar
19-08-2014	Cakrawala	Pelantikan Pejabat Baru Bank Sulselbar
21-08-2014	Tribun Timur	Pelantikan Pejabat Baru Bank Sulselbar
22-08-2014	Koran Sindo	Pelantikan Pejabat Baru Bank Sulselbar
22-08-2014	UPEKS	Bank Sulselbar pangkas bunga 2 %
28-08-2014	Fajar	Advertorial terkait Obligasi Bank Sulselbar
29-08-2014	UPEKS	Bank Sulselbar Cabang Enrekang Peduli Kebersihan
01-09-2014	UPEKS	Advertorial Profil Direktur Umum PT. Bank Sulselbar "Bpk. H. Ambo Samsuddin"
08-10-2014	Fajar	Pelaksanaan Qur'ban Kel. Besar Bank Sulselbar 1435 H Tahun 2014
09-10-2014	UPEKS	Bank Sulselbar Gagas Kerjasama UPEKS
12-09-2014	Tribun Timur	Perkembangan DPK Bank Sulselbar Syariah

Tanggal	Media	Materi Advertorial / Press Release
15-09-2014	Tribun Timur	Penyerahan Bantuan CSR "Ambulance" Kepada Pemerintah Kota Makassar
18-09-2014	Tribun Timur	Diskusi Economic Forum "Investasi ke Timur"
19-09-2014	Fajar	Bank Sulselbar Economic Forum
19-09-2014	Bisnis Indonesia	Bank Sulselbar Economic Forum
20-10-2014	Tribun Timur	Bank Sulselbar Gaet BCA Terbitkan Kartu Debit
22-10-2014	Fajar	BPD Permudah Penarikan Gaji PNS Jeneponto
28-09-2014	Bisnis Sulawesi	Profil Bpk Dirut H. A. Muh. Rahmat "Optimis Tingkatkan Aset Bank Sulselbar"
31-10-2014	Tribun Timur	Layanan Mobile Banking Bank Sulselbar
03-11-2014	Fajar	Penyerahan Bantuan CSR kepada Korban Kebakaran Kec. Rappocini

Pemberitaan mengenai Bank Sulselbar pada tahun 2014 hanya terpublikasikan melalui media cetak dan *media on line*. Jumlah pemberitaan sebanyak 67 berita yang terdiri dari 52 pemberitaan positif dan 15 pemberitaan netral.

Pemberitaan	Positif	Netral
Media Cetak	30	10
Media Online	22	5

Media Gathering/Media Visit dan Press Conference

Sepanjang tahun 2014, *media gathering/media visit* dan *press conference* Bank Sulselbar yang bertujuan untuk menjaga komunikasi dan hubungan baik antara Bank Sulselbar dan media, serta meningkatkan akurasi dan netralitas pemberitaan media terhadap Bank.

Activities	2014	2013	2012
Press Conference	1	1	1
Media Gathering/Visit	1	-	-

Keterbukaan Informasi Via *Website* dan Media Sosial

Website

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (mengubah PBI No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi dan Kondisi Keuangan Bank) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/35/DPNP tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia, Bank Sulselbar senantiasa berupaya untuk memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan transparansi dan publikasi, yaitu memenuhi kewajiban mengunggah beberapa jenis laporan keuangan dan informasi penting lainnya ke *website* Bank. Dengan menyajikan laporan keuangan dan informasi penting lainnya pada *website*, Bank Sulselbar menjadi relatif terbuka dan publik dapat mengikuti perkembangan Bank yang progresif. Di samping itu, kewajiban ini juga akan mendorong Bank Sulselbar untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan *website*, termasuk pengelolaannya. Bank Sulselbar mengelola *website* dengan alamat www.banksulselbar.co.id

Laporan Keuangan yang wajib disusun dan dilaporkan Bank serta diunggah ke *website* sebagai berikut:

a. Laporan Tahunan
b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
d. Laporan Keuangan Konsolidasi
e. Laporan Publikasi Lain
f. Laporan *Good Corporate Governance*
g. Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

Akses publik terhadap website Bank Sulselbar menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini mengenai Bank Sulselbar. Selama tahun 2014, jumlah akses ke *website* Bank Sulselbar sebagai berikut :

Jumlah Akses Publik ke *Website* Bank Sulselbar

	2014	2013	2012
Total akses	233,316	198,319	158,655

Media Sosial

Guna menjalin komunikasi dan membangun kedekatan secara terbuka dan dua arah dengan nasabah dan masyarakat, Bank Sulselbar meluncurkan akun media sosial Facebook dan Twitter pada tahun 2011. Akun Facebook Bank Sulselbar memiliki *jumlah* friend sebanyak 279 orang dan 245 *follower* pada akun Twitter @Banksulselbar.

Keterbukaan Informasi Internal

Komunikasi yang terjalin baik antara manajemen dan pegawai akan berpengaruh pada terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif bagi pegawai. Untuk itu, Bank Sulselbar selalu berupaya menjalin komunikasi dua arah yang efektif dengan seluruh pegawai melalui media komunikasi sebagai berikut :

Pertemuan Berkala Manajemen Dengan Pegawai

Untuk membangun komunikasi dua arah yang baik antara manajemen dengan pegawai, selama tahun 2014 telah dilakukan beberapa pertemuan antara manajemen dengan pegawai pada beberapa acara internal Bank, baik diselenggarakan di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, seperti Safari Ramadhan dan acara – acara keagamaan lainnya.

Buletin Bank SulselbarNews

Bank SulselbarNews adalah media komunikasi internal untuk menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan di Bank Sulselbar dan pegawai diberikan kesempatan untuk mengirimkan artikel tulisan mengenai perbankan dan hal – hal informatif lainnya. Bank SulselbarNews juga menyediakan ruang publik bagi pegawai untuk menyampaikan saran dan masukan yang konstruktif bagi Bank.

Bank Sulselbar

PROFIL DAN IDENTITAS BANK SULSELBAR

Bank Sulselbar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Bank Sulselbar kini telah tumbuh menjadi Bank Umum beraset Rp10.003.340 juta dengan jaringan kantor mencapai 87 kantor yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta 1 (satu) kantor cabang konvensional di Jakarta. Bank Sulselbar memiliki sumber daya manusia 1.163 karyawan serta beragam produk dan layanan perbankan kepada lebih dari 377.546 nasabah dana dan ..... nasabah kredit.

Profil Logo Bank Sulselbar

Mencerminkan nilai – nilai semangat, *team work*, etos kerja

Logo Bank Sulselbar terdiri dari 2 (dua) elemen yang tampil sebagai satu – kesatuan (tidak terpisahkan) yang membentuk imaginatif sebuah perahu. Melalui bentuk imaginatif tersebut, Bank Sulselbar mengadopsi nilai – nilai semangat, *team work*, etos kerja, dan budaya dari sebuah perahu sebagai simbol Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai daerah bahari.

***Sompe'* atau Perahu yang menginspirasi untuk selalu bergerak maju**

Sompe' atau perahu diartikan sebagai bepergian mencari rejeki (bergerak luas mengumpulkan keuntungan), diangkat sebagai salah satu unsur budaya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang begitu kuat dan kokoh tapi stabil dalam kedinamisannya dan bercitra modern terbuka akan segala peluang dan tantangan menuju tujuan kemakmuran bagi daerahnya.

Tampil berkesan korporat perbankan/lembaga keuangan yang bersih sebagai wujud manajemen yang bersih di bawah kepemimpinan yang handal, mengerti perjalanan Bank Sulselbar dan berpijak pada nilai budaya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam mengembangkan daerahnya. Bank Sulselbar dengan semangat *Good Corporate Governance* senantiasa dinamis mengemban visi dan misinya demi terwujudnya gerak perekonomian yang terus menerus.

Bank Sulselbar tampil penuh keyakinan dan rasa bangga untuk terus bergerak membangun perekonomian Indonesia dan rasa bangga membawa nama wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta bangga membangunan daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Makna Warna

Hijau : Kemakmuran, kesuburan, kesejahteraan, penyegaran, alam, dan simbol dari kehidupan

Biru : *Corporate*, *mature*, elegan, stabil, kokoh, handal, pengalaman, dapat diandalkan, dan merepresentasikan air & langit (harapan).

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat

Nama Panggilan
PT Bank Sulselbar

Bidang Usaha
Perbankan

Kelompok Usaha
Bank Umum Kelompok Usaha 2

Kantor Pusat
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar
Makassar, 90125

Homepage
www.banksulselbar.co.id

Telepon
+62411 - 859 171 (Hunting)

Faksimili
+62411 - 859 178

Call Center
+62411 - 1500855

Dasar Hukum Pendirian
Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961

Tanggal Didirikan
13 Januari 1961

Tanggal Beroperasi
13 Januari 1961

Hasil Pemeringkatan
idA (Single A, Stable Outlook)

Modal Dasar
Rp1,6 Triliun

Modal Disetor
Rp. 606.033 juta

NPWP
01.134.213.6.812.000

TDP
503/0006/TDPPT-P/04/KPAP

SIUP
503/0005/SIUPB-P/04/KPAP

Pemilik

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp Rp216 juta (35,64%)
- Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan sebesar Rp348.747 juta (57,55%)
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp6.000 juta (0,99%)
- Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Barat sebesar Rp35.286 juta (5,82%)

Jumlah Aset

Rp 13.317.812 juta (2014)
Rp 8.734.875 juta (2013)

Jumlah Kantor

1 (satu) Kantor Pusat

3 (tiga) Kantor Cabang Utama

28 (dua puluh delapan) Kantor Cabang

3 (tiga) Kantor Cabang Syariah

2 (dua) Kantor Cabang Pembantu

45 Kantor Kas

96 ATM yang tergabung dengan 49.000 terminal ATM jaringan ATM Bersama dan 73.000 jaringan ATM Prima

6 (enam) *Payment Point*

3 (tiga) Mobil Kas Keliling

25 (dua puluh lima) Kantor Layanan Syariah

Jumlah Karyawan

1.065 (2014)
1.037 (2013)

Profil Logo Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar

Logo Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar memiliki keselarasan dengan Logo Bank Sulselbar dengan menambahkan tulisan "syariah" ditulis miring ke arah kanan dan berwarna "merah" yang memiliki makna Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar memberikan layanan perbankan syariah yang dinamis dan kuat.

Informasi Unit Usaha Syariah

Nama

Bank Sulselbar Syariah

Kategori

Unit Usaha Syariah

Homepage

www.banksulselbar.co.id

Tanggal Didirikan

28 April 2007

Tanggal Beroperasi

28 April 2007

Modal Dasar

Rp16 miliar

Total Aset

Rp725.954 juta (2014)

Rp675.075 juta (2013)

Jumlah Karyawan

71 orang

Jumlah Kantor

3 (tiga) kantor cabang yaitu Cabang Syariah Sengkang, Cabang Syariah Maros dan Cabang Syariah Makassar

Office Channeling/Konter Layanan Syariah

25 (dua puluh lima) Kantor Layanan Konvensional Bank Sulselbar

LAPORAN MANAJEMEN

ulselbar
COUNTER 6
Ir. H. AGUS ARIFIN NU'MANG, MS.

LAPORAN KOMITE

Laporan Komite Audit

Bank Sulselbar telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan PBI Nomor 8/14/PBI/2007 tanggal 05 Oktober 2007 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum (selanjutnya disebut PBI GCG) serta Surat Edaran BI Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum maka bank berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap aktivitas usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Kerangka Acuan Tugas

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor :1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director), dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum untuk menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).

b. Panduan Audit Intern dan Internal Audit Charter BPD Sulsel tahun 2003, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas bagi semua aparat GAI.

c. Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) GAI yang telah disetujui Direktur Utama.

d. LHP GAI Umum dan Khusus.

e. LHP Auditor Ekstern, dan (OJK) Otoritas Jasa Keuangan

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Bahwa mulai 31 Desember 2013 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengatur dan mengawasi Perbankan. Peraturan OJK (dahulu Bapepam-LK) Nomor : IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, menetapkan Tugas dan Tanggung Jawab komite Audit adalah sebagai berikut :

a. **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

b. **Wewenang Komite Audit**

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh PBI tersebut di atas, Komite Audit juga melaksanakan tugas sebaimana yang diamanahkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam –LK) tersebut diatas serta tugas lain yang diperintahkan oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan Tugas Komite Audit sebagaimana yang ditetapkan dalam PBI GCG tersebut di atas, maka selama tahun 2014 Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugasnya antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) GAI tahun 2014.

2. Melakukan evaluasi kesesuaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) GAI (Umum dan Khusus) dengan standar penyusunan laporan audit menurut SPFAIB dan Audit Charter yang meliputi :
   a. Evaluasi kesesuaian LHP GAI dengan SPFAIB dan Audit Charter
   b. Kesesuaian realisasi Audit dengan PKAT
   c. Evaluasi temuan tahun lalu yang belum ditindak lanjuti
   d. Evaluasi temuan saat ini dan rekomendasinya
   e. Evaluasi pelaksanaan Risk Based Audit

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit laporan tahunan untuk tahun ke 2, tahun buku 2014.

4. Melakukan evaluasi atas LHP Auditor Ekstern (BPK-RI dan OJK) dan tindak lanjutnya.

5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Dewan Komisaris.

Anggota Komite

Susunan keanggotan Komite Audit Bank Sulselbar Per 31 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar SK Direksi No.SK/072/DIR/VIII/2014, sebagai berikut :

Ketua : **Muhammad Amri (Komisaris Independen)**

Anggota : **M. Natsir Kadir (Pihak Independen)**

Anggota : **Aristo A. Awusy (Pihak Independen)**

Masa tugas Komite Audit mulai tanggal 01 Agustus 2014 s/d tanggal 31 Desember 2015.

a. Anggota Komite Audit atas nama Aristo A. Awusy, tidak merangkap jabatan lain, selain anggota Komite Audit pada PT. Bank Sulselbar.

b. Anggota Komite Audit atas nama : M. Natsir Kadir merangkap jabatan :

1. Komite Audit PT. Semen Tonasa, Mei 2007-sekarang
2. Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Hasanuddin, 1987-sekarang.

Rapat dan Kehadiran

a. Frekuensi Kehadiran Anggota Komite

Tahun 2014	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	Jum
As'ad Makarau	15	10	12	8	6	9	8	9	-	-	-	-	77
M. Natsir Kadir	11	7	11	6	3	5	5	4	7	5	7	8	79
Aristo A. Awusy	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	9	10	36

b. Frekuensi Rapat

Rapat-rapat yang dilakukan Komite Audit meliputi rapat intern Komite (Ketua dan anggota Komite Audit) dan rapat dengan unit kerja lainnya antara lain GAI dan rapat gabungan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko (KPR) dan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

Selama tahun 2014 rapat-rapat yang dilakukan Komite Audit adalah :

1. Rapat Intern Khusus Komite Audit : 2 kali
2. Rapat dengan KAP Husni, Mucharam & Rasidi : 2 kali
3. Rapat dengan Dekom, KPR dan KRN (Semua Komite) : 9 kali
4. Rapat dengan Dekom, KPR, GAI : 1 kali

Jumlah : 14 kali

Pendidikan dan Pelatihan

Dalam tahun 2014 Komite Audit merencanakan 4 (empat) kali mengikuti Diklat/workshop. Realisasi pendidikan dan pelatihan/workshop yang ber-

hubungan dengan tugasnya adalah sebagai berikut :

a. As'ad Makawaru :

- Workshop Pemutahiran Teknik Investigasi Fraud berdasarkan Best Practice, di Jakarta
- Seminar Nasional Internal Audit 2014, di Lombok NTT

b. M. Natsir Kadir :

- Workshop Audit Anti Korupsi (Fraud Audit) di Asbanda Jakarta
- Workshop Penyusunan Laporan Dewan Komisaris yang Komprehensif & Efektif di Asbanda Jakarta

c. Aristo A. Awusy :

- Seminar Nasional BPDSI : Pelaksanaan GCG Dekom dan Komite-komite dalam rangka mendukung peningkatan Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan RBBR, di Asbanda Jakarta

Rencana Kerja Tahun 2015

Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 43 PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, maka dalam tahun 2015 Komite Audit konsisten melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya sebagai berikut:

1. Melakukan Evaluasi Program Kerja Audit Tahunan Grup Audit Intern tahun 2014
2. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit tahun 2015.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
4. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
   a. Pelaksanaan tugas Grup Audit Intern (GAI)
   b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
   c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
   d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan GAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
   e. Mengadakan pertemuan secara berkala/semester dengan GAI, untuk mengevaluasi Laporan Hasil Audit GAI.
5. Menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite Audit tahun 2014 dan menyusun Rencana Kerja tahun 2015.

Atas Nama Komite Audit,

Prof. Muhammad Amri, Ph.D

Ketua

Laporan Komite Pemantau Risiko

Bank Sulselbar telah membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance bagi Bank Umum, maka Bank berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.*

Selanjutnya pada Pasal 5 dan Pasal 6 PBI tersebut di atas menetapkan bahwa Dewan Komisaris Bank wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pengelolaan bank termasuk di dalamnya tugas pengendalian terhadap kebijakan manajemen risikio yang ditetapkan oleh Direksi .

Kerangka Acuan Tugas

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko berpedoman pada PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 juli 2009 tentang Perubahan Atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum, Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan :

a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

Untuk mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia tersebut dengan baik, maka tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Sulsel No. 002/DK-BPDSS/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Pedoman dan TataTertib Komite-Komite pada Dewan Komisaris PT Bank Sulawesi Selatan.

Surat Keputusan dimaksud lebih rinci mengatur tentang uraian tugas komite yakni:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen Risiko

3. Memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi pada ayat 1 dan 2 diatas, kepada Dewan Komisaris

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan komisaris berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas Komite

Selama tahun 2014, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pemantauan atas strategi-strategi usaha dan potensi risikonya, melakukan evaluasi atas kebijakan pengelolaan risiko dan pelaksanaanya, serta melakukan tinjauan kinerja unit pengelolaan risiko dan melaporkan temuannya kepada Dewan Komisaris.

Anggota Komite

Susunan keanggotan Komite Pemantau Risiko Bank Sulselbar Per 31 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/181/Dir/XII/2013/tanggal 04 Desember 2013 telah memenuhi peraturan Bank Indonesia tentang GCG, sebagai berikut:

Ketua : **Natali Ikawidjaja (Komisaris Independen)**

Anggota : **Muslimin Abbas (Pihak Independen), sebagai ahli di bidang manajemen risiko**

Anggota : **Aristo A Awusi (Pihak Independen), sebagai ahli di bidang akuntansi dan keuangan**

Dalam perkembangan selanjutnya dilakukan rotasi keanggotaan Komite dalam tubuh Dewan Komisaris, dimana anggota Komite Pemantau Risiko atas nama Drs Aristo Awusi dimutasikan menjadi anggota Komite Audit dan digantikan oleh sdr Drs As'ad Makarau berdasarkan Keputusan Direksi Bank Sulselbar No. SK/071/Dir/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014.

Rapat dan Kehadiran

Rapat-rapat yang dilakukan meliputi rapat intern komite Pemanatau Risiko untuk membahas dan mengevaluasi permasalahan tertentu yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko. Selain rapat intern, Komite Pemantau Risiko juga melakukan rapat dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, Grup Treasury dan Grup TeknoIogi Informasi.

Semua hasil/kesimpulan rapat, baik rapat intern maupun rapat dengan Grup/satuan mitra Komite Pemantau Risiko yang strategis telah dibuatkan rekomendasi dalam bentuk surat/memorandum kepada Dewan Komisaris.

Jumlah rapat yang dilaksanakan dalam tahun 2014 dan kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Pertemuan	Bulan												
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
Rapat	2	1	1	2	1	3	5	4	-	-	1	-	20
Kehadiran													
a. N.Ikawidjaja	9	11	9	5	9	8	8	8	8	9	8	8	100
b. H.Muslimin Abbas	9	11	9	5	9	8	8	6	1	10	9	8	93
c. Aristo Awusi.	9	11	9	5	9	8	8	8	-	-	-	-	67
d. As'ad Makkarau	-	-		-	-	-	-	-	8	9	8	8	25

Pendidikan dan Pelatihan

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang atau berhubungan dengan tugas Komite Pemantau Risiko atau aspek risiko pada industri perbankan, Komite Pamantau Risiko telah mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh konsultan dan nara sumber dari Bank Indonesia.

Workshop yang diikuti anggota Komite Pemantau Risiko selama tahun 2014 sebagai berikut :

1. Workshop Audit berbasis Risiko, Implementasi PSAK 50/55
2. Diklat Good Corporate Governance
3. Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko
4. Peran Komite Pemantau Risiko dalam rangka pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Rencana Kerja Tahun 2015.

Dalam tahun 2015, Komite Pemantau Risiko merencanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi secara reguler terhadap Laporan Satuan Kerja Managenmen Risik dan Komite Manajemen Risiko , yang selanjutnya akan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris
2. Evaluasi Rencana Bisnis (RBB) untuk Triwulanan, Semester dan Tahunan
3. Mengikuti Seminar dan Pelatihan yang berkaitan dengan manajemen Risiko.
4. Melaksanakan Rapat Kerja dengan Direksi dan para Puimpinan Grup ,secara Reguler berdasarkan Issue yang berkembang .

Atas Nama Komite Pemantau Risiko,

Drs. Natali Ikawidjaja, MM

Ketua

Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank Sulselbar telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan PBI Nomor 8/14/PBI/2007 tanggal 05 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum serta Surat Edaran BI Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum maka bank berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap aktivitas usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance* (pasal 45 dan 46) tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah :

a. Terkait dengan kebijakan remunerasi :

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
   - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
   - Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

b. Terkait dengan kebijakan nominasi :

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c, pasal 39 ayat (1) huruf b dan c kepada Dewan Komisaris.

c. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :

1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Prestasi kerja Individual
3. Kewajaran dengan *Peer Group*
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Pelaksanaan Tugas Komite

Dalam tahun 2014 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan kajian Upaya Transformasi Pengelolaan SDM Bank Sulselbar.
2. Melakukan kajian Pembayaran Uang Penghargaan Direksi
3. Pembahasan Calon Direktur Pemasaran sehubungan dengan pengangkatan Direktur

Pemasaran menjadi Direktur Utama Bank Sulselbar.

4. Membuat persyaratan Calon Direktur Pemasaran Bank Sulselbar.

5. Membuat Pengumuman untuk Calon Direktur Pemasaran Bank Sulselbar.

6. Melakukan penjaringan/seleksi terhadap permohonan yang masuk untuk menjadi Direktur Pemasaran Bank Sulselbar.

7. Melakukan seleksi Bakal Calon Direktur Pemasaran Bank Sulselbar

8. Melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam pelaksanaan seleksi Bakal Calon Direktur Pemasaran Bank Sulselbar

9. Membuat Persyaratan Calon Komisaris

10. Menyurat/menyampaikan kepada Bupati/Walikota se Sulselbar selaku Pemegang Saham Bank Sulselbar melalui Komisaris Utama perihal Penyampaian Calon Komisaris Independen Bank Sulselbar.

Anggota Komite

Penugasan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/033/DIR/IV/2014 tanggal 01 April 2014 tentang Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar, dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : **H. A. Tjoneng Mallombasang (Komisaris Independen)**

Anggota : **H. A. Muallim (Komisaris Utama)**

Anggota : **Muhammad Amri (Komisaris Independen)**

Anggota : **Hj. Sulaeha Achmad (Pihak Independen)**

Anggota : **H. A. Syahriwijaya (Pihak Independen)**

Anggota : **Pemimpin Group Sumber Daya Manusia**

Waktu penugasan Komite Remunerasi dan Nominasi ini terhitung mulai tanggal 01 April 2014 sampai dengan 31 Desember 2015.

Rapat dan Kehadiran

a. Frekuensi Kehadiran (Anggota Komite Independen)

Nama	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jum
H.A. Syahriwijaya	7	7	6	8	9	8	8	8	8	9	8	10	96
Hj. Sulaeha Achmad	7	7	8	7	9	7	8	8	8	9	7	10	95

Catatan :

- Hari kerja dalam tahun 2014 adalah sebanyak 100 hari
- Hari kerja di luar jadwal adalah sebanyak 6 hari

Prosentase kehadiran :

- H. A. Syahriwijaya, sebesar : 96 %.
- Hj. Sulaeha Achmad, sebesar : 95 %.

b. Frekuensi Rapat

Dalam tahun 2014 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali . Rapat tersebut adalah rapat intern Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 12 (dua belas) kali dan rapat dengan Komite-komite lainnya di bawah Komisaris.

Semua hasil/kesimpulan rapat berupa notulen rapat telah disampaikan/dilaporkan kepada Komisaris Utama melalui memorandum dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pekerjaannya, kepada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulselbar telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan, sebagai berikut :

- H. A. Syahriwijaya, sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
  - Workshop Best Praktices Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
  - Workshop Sistem Remunerasi dan Nominasi yang Komprehensif, Identifikasi dan Impelementasi Sistem Remunerasi Bank Di Indonesia.
  - Training Knowledge Manajement "Widening Horizon Thinking for Better Dicision".
  - Workshop Transfer Pricing.
- Hj. Sulaeha Achmad, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
  - Workshop Best Praktices Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
  - Workshop Transfer Pricing.

Rencana Kerja Tahun 2015

Komite Remunerasi dan Nominasi tetap konsisten melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 45 dan 46 PBI Nomor : 8/1/PBI/2006, tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Dalam tahun 2015 Komite Remunerasi dan Nominasi akan merumuskan Sistem dan Mekanisme pencalonan Direksi dan Komisaris serta pembahasan tentang Pembinaan Karyawan/Personil yang saat ini belum berjalan, pada tahun 2015 diusulkan pelaksanaan RUPS Tahunan dirangkaikan/bersamaan dengan RUPS Luar Biasa karena adanya 2 (dua) Komisaris yang berakhir masa jabatannya dan 1 (satu) Direksi berhubung Direktur Pemasaran diangkat menjadi Direktur Utama.

Selain melaksanakan tugas tersebut, Komite Remunerasi dan Nominasi siap melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Dewan Komisaris.

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang tugas Komite Remunerasi dan Nominasi, kami mengusulkan kiranya Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diberi kesempatan untuk mengikuti Diklat/Workshop dan mengadakan studi banding pada BPD yang se-*peer Group*.

Atas Nama Komite Remunerasi dan Nominasi ,

Drs. H. A. Tjoneng Mallombasang
Ketua

LAPORAN DEWAN KOMISARIS PT. BANK SULSELBAR TAHUN BUKU 2014

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Bank Sulselbar dapat melalui tahun 2014 dengan pencapaian dan pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan tahun 2013.

Pada tahun 2014, Bank Sulselbar merayakan hari ulang tahun yang ke-54 Bank Sulselbar telah melakukan transformasi organisasi dan layanan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan visi Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Indonesia dan misi yaitu Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan terpercaya, Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil, dan Memberikan nilai tambah optimum bagi stakeholder.

Bank Sulselbar akan senantiasa berorientasi pada bisnis dan fokus kepada nasabah untuk meningkatkan kemampuan dalam menyediakan layanan yang komprehensif.

Selama tahun 2014 Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum serta dibantu oleh organ Komite yang bertugas sejak 2007.

Selain itu, untuk pengawasan atas kinerja Management Bank Sulselbar, Dewan Komisaris beserta Komite telah melakukan rapat-rapat pembahasan, kajian dan evaluasi atas surat – surat dan Laporan Direksi serta memberikan petunjuk dan arahan untuk ditindak lanjuti oleh Direksi untuk perkembangan Bank ke depan.

Dalam rangka pengawasan aktif, Dewan Komisaris dibantu oleh anggota Komite Dewan Komisaris dan pembentukannya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi sebagai berikut :

I. Komite Audit, mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai Pasal 43 Peraturan Bank Inonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi terakhir No. SK/072/DIR/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 Tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit PT. Bank Sulselbar, maka selama tahun 2014 Komite Audit telah melakukan tugas –tugas dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

   a. Rapat-rapat yang meliputi rapat intern Komite Audit dan Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi beserta Unit Kerja terkait untuk membahas dan mengevaluasi permasalahan tertentu yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

b. Evaluasi LHP Umum terhadap atas Temuan tahun lalu yang belum ditindak lanjuti dan Temuan saat ini beserta Rekomendasi serta pelaksanaan *Risk Based Audit*.

c. Evaluasi LHP Khusus atas temuan kasus/permasalahan pada Kantor-kantor Cabang dan Unit Kerja pada Kantor Pusat yang harus segera ditindaklanjuti .

d. Melakukan evaluasi kesesuaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Umum dan Khusus Grup Audit Intern (GAI) dengan standar penyusunan laporan audit menurut SPFAIB dan Audit *Charter*.

e. Merekomendasikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan tahunan Tahun Buku 2014 dan laporan Kinerja untuk dilaporkan ke RUPS Tahunan.

f. Semua hasil/kesimpulan rapat baik intern maupun rapat dengan Grup yang strategis direkomendasi dalam bentuk Memorandum kepada Dewan Komisaris dan diteruskan ke Direksi dengan surat Dewan Komisaris.

II. Komite Pemantau Risiko & Anti *Fraud*, mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai Pasal 44 Peraturan Bank Inonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi terakhir No. SK/071/DIR/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 Tentang Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Dan Anti *Fraud* PT. Bank Sulselbar, maka selama tahun 2014 Komite Pemantau Risiko Dan Anti *Fraud* telah melakukan tugas-tugas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain sebagi berikut :

a. Rapat-rapat yang meliputi rapat intern Komite Pemantau Risiko & Anti *Fraud* dan Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko & Anti *Fraud*, Direksi dan Unit Kerja terkait untuk membahas dan mengevaluasi permasalahan tertentu yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.

b. Selain rapat intern, Komite Pemantau Risiko juga melakukan rapat dengan Satuan Kerja terkait, yaitu Grup Audit Intern, Grup Manajemen Risiko, Grup Kepatuhan, Grup Treasury, Grup TI dan Grup SDM dan Unit Anti *Fraud*.

c. Semua hasil/kesimpulan rapat baik intern maupun rapat dengan Grup yang strategis direkomendasi dalam bentuk Memorandum kepada Dewan Komisaris dan diteruskan ke Direksi dengan surat Dewan Komisaris.

III. Komite Remunerasi dan Nominasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai Pasal 45 Peraturan Bank Inonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi No. SK/182/DIR/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013 Tentang Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi Dan Nominasi PT. Bank Sulselbar, maka selama tahun 2014 melakukan tugas-tugas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain sebagi berikut :

a. Rapat – rapat yang meliputi rapat intern Komite Remunerasi Dan Nomi-

nasi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi Dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko & anti *Fraud* serta Komite audit untuk membahas dan mengevaluasi permasalahan tertentu yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi Dan Nominasi.

b. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:

1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.

2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai ;

a) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
b) Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

c. Terkait dengan kebijakan Nominasi :

1) Menyusun mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

3) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 pada pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c, pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf c, kepada Dewan Komisaris.

d. Wajib memastikan bahwa kebijakan paling kurang sesuai dengan :

1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Prestasi kerja individual.
3) Kewajaran dengan *peer group*.
4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka pendek dan jangka panjang bank.

IV. Hal-hal strategis yang telah disampaikan Dewan Komisaris :

a. Implementasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014 kaitannya dengan *Corporate Plan* 2014-2018.

b. Upaya dan strategi peningkatan pengelolaan modal ;

c. Penyusunan *data base* kepegawaian dan proses pembuatan *blue print*/cetak biru data kepega-

waian.

d. Untuk permasalahan Teknologi Informasi khususnya *Disaster Recovery Center* (*DRC)* dan Data Center.

e. Atas pelaksanaan penerapan manajemen risiko dan manajemen umum Bank.

f. Komitmen Bank atas temuan Hasil Pemeriksaan, baik intern maupun ekstern.

g. Pedoman Perusahaan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris ;
   - Pedoman Pencatatan Data Kerugian (LED) Risiko Operasional
   - Pedoman Komite Manajemen Risiko (Komenko)
   - Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Whistle Blower
   - Pedoman *Bisness Continuity Plan* (BCP)
   - Buku Pedoman Tata Kerja Direksi
   - Pedoman tentang *Risk Appetite*
   - Pedoman tentang TIPI Bank
   - Pedoman tentang Hapus Buku, Hapus Tagih, Hapus Penjaminan dan Pengampunan Bunga
   - Pedoman Cr*edit Line* dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

h. Pedoman Perusahaan yang sedang dalam proses oleh Direksi ;
   - Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud*
   - Pedoman Internal Audit Charter (IAC)

V. Untuk tantangan ke depan yang menjadi pemantauan Dewan Komisaris antara lain :
   a. Pencapaian komponen BRC;
   b. Implementasi atas *Corporate Plan*; dan
   c. Implementasi Cetak Biru SDM

VI. Prospek Usaha Bank

Menyikapi beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh regelator utamanya Bank Indonesia dan OJK termasuk diantaranya *blue print*/cetak biru BPD *Regional Champion* pada tahun 2014, dimana setiap BPD harus dapat menjadi juara di daerahnya masing-masing dengan cara menjadi lembaga keuangan yang kuat dan berperan lebih aktif dalam membangun daerah serta meningkatkan layanan dan akses masyarakat kepada Bank Pembangunan Daerah (*Egent of development*) serta kondisi finansial dan sistem moneter penuh dengan tantangan dan persaingan yang mana tentunya perlu diantisipasi dengan baik oleh Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Oleh karenanya Dewan Komisaris menyambut baik pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi yang menghendaki adanya transformasi Bank Sulselbar menjadi *Great Company* dan *Center Of Excellence* yang meliputi *Good Corporate Governance, Human Resources, Perfomance, Service* dan *Corporate Social Responsibilty* yang dieksekusi secara baik guna mewujudkan pernyataan visi Bank Sulselbar adalah menjadi Bank yang terbaik di Kawasan Indonesia

Timur dengan dukungan sumber daya manusia yang professional serta memberikan nilai tambah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dan Sulawesi barat dan Masyarakat.

Sedangkan misi Bank Sulselbar adalah :

1. Penggerak dan pendorong laju pembangunan ekonomi daerah;
2. Pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah;
3. Salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Untuk itu, komunikasi interaktif, iklim kerja yang positif dan team work yang solid senantiasa dibangun oleh segenap manajemen dan karyawan Bank Sulselbar untuk mencapai kinerja yang maksimal. Selain itu dukungan baik moril maupun berupa modal terutama dari para Pemegang Saham, kemitraan yang saling menguntungkan dengan nasabah, dan seluruh pemangku kepentingan.

IV. Adapun komposisi Dewan Komisaris sebagai berikut ;

- H. A. Muallim : Komisaris Utama
- H. A. Tjoneng Mallombasang : Komisaris Independen
- N. Ikawidjaja : Komisaris Independen
- Muhammad Amri : Komisaris Independen

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Secara umum kinerja Bank Pembangunan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sampai dengan Desember 2014 telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari terlampauinya beberapa target yang telah ditetapkan pada Rencana Bisnis Bank.
- Kinerja Bank Pembangunan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sampai dengan Desember 2014 secara umum baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kinerja pada Desember 2013. Kinerja ini diharapkan semakin ditingkatkan di masa yang akan datang.
- Berdasarkan penilaian kinerja dari 4 (empat) faktor, yaitu Faktor Profil Risiko, Faktor *Good Corporate Governance* (GCG), Faktor Entabilitas dan Faktor Permodalan, sesuai Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum secara keseluruhan berdasarkan faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko, maka kinerja Bank Pembangunan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sampai dengan Desember 2014 masih berada pada peringkat 3 (Cukup Baik).

Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Namun hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan atas Komposit Tingkat Kesehatan Bank (TKB) sesuai amanah RUPS tanggal 25 Juni 2013 salah satu *action plan* Direksi adalah meningkatkan komposit TKB menjadi minimal 2 (dua).

Tak lupa pula kami mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun yang Ke – 54, semoga di usia ini Bank Sulselbar semakin bertumbuh dan berjaya dalam melayani kebutuhan perbankan oleh masyarakat dan Pemerintah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan bahkan di Wilayah Indonesia Bagian Timur.

Segenap jajaran Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para pemegang saham, nasabah, mitra bisnis dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang telah memberikan dukungan, kepercayaan dan kerjasamanya kepada Bank Sulselbar.

Kinerja Bank Sulselbar yang membaik selama tahun 2014 tentunya tidak lepas dari upaya, dedikasi dan kerja keras jajaran Direksi dan manajemen serta seluruh karyawan (i) Bank Sulselbar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank Sulselbar Tahun 2014.

PT. BANK SULSELBAR

Dewan Komisaris

H.A. Muallim, SH, M.Si

Plts. Komisaris Utama

SAMBUTAN DIREKSI

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Kami Hormati,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkah dan hidayah yang diberikan kepada Bank Sulselbar sehingga kami dapat menuntaskan tahun 2014 yang merupakan tahun transisi politik dan ekonomi dengan pencapaian kinerja keuangan yang solid dan menggembirakan ditengah perlambatan ekonomi & peningkatan volatilitas global serta semakin meningkatnya persyaratan regulasi dan persaingan yang ketat di industri perbankan. Untuk itu, atas nama Direksi Bank, perkenankanlah kami menyampaikan pencapaian kinerja dan inisiatif strategis yang telah kami lakukan selama tahun 2014 kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

KINERJA KEUANGAN

Tahun 2014 telah berhasil kami lewati dengan hasil yang patut dibanggakan dengan fundamental bisnis yang cukup kuat ditengah ketidakpastian ekonomi global dan kondisi perekonomian domestik maupun bisnis perbankan yang belum kondusif. Hal tersebut tercermin dari terjaganya profitabilitas pada tingkat yang memadai melalui pencapaian laba bersih yang meningkat signifikan hingga 27,41% (YoY) menjadi Rp402.510 juta dari Rp315.926 juta di tahun 2013 dan melampaui target RBB Tahun 2014 – 2016 senilai Rp338.165 juta. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan bunga tahun 2014 sebesar 15,11% menjadi Rp1.434.306 juta dan pendapatan bunga bersih yang juga bertumbuh 12,01% atau sebesar Rp 1.021.626 juta. Peningkatan pendapatan bunga tersebut didorong oleh kenaikan portofolio kredit & pembiayaan sebesar 13,01 % yakni senilai Rp7.523.765 juta dengan pertumbuhan tertinggi pada Kredit Umum Lainnya sebesar 17,53%.

Net Interest Margin Bank Sulselbar pada tahun 2014 sebesar 10,52% atau sedikit lebih rendah dari NIM tahun 2013 sebesar 10,73%. Penurunan rasio NIM tahun 2014 tersebut disebabkan oleh peningkatan biaya bunga yang berasal dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 18,26% serta kenaikan suku bunga deposito sebagai respon atas kenaikan BI *rate*. Selain hal tersebut, strategi manajemen untuk menjadi *leading driver* bagi pembiayaan kredit konstruksi/infrastruktur dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan pendapatan bunga kredit secara keseluruhan pada tahun 2014 yang tumbuh lebih rendah dari beban bunga sebesar 15,11%. Beban bunga pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp 412.680 juta atau mengalami peningkatan sebesar 23,59% dibandingkan tahun 2013. *Cost of money* Bank terus mengalami tendensi membaik yaitu mengalami tekanan hingga pada level 12,72% atau tertekan hingga 2,88% dari posisi tahun 2013 yang mencapai 15,60%. Penurunan tersebut didorong oleh langkah-langkah efisiensi dan pengendalian biaya yang dilakukan oleh Bank.

Total aset Bank Sulselbar pada tahun 2014 senilai Rp10.003.340 juta atau meningkat

14,52% dibandingkan tahun 2013. Pertumbuhan total aset ini dipengaruhi oleh kenaikan kredit dan pembiayaan syariah sebesar 13,01% menjadi Rp7.523.765 juta pada tahun 2013, dari Rp6.657.865 juta di 2013.

Rasio-rasio keuangan Bank Sulselbar selama tahun 2014, antara lain Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) meningkat dari 23,47% di 2013 menjadi 25,32%. Rasio CAR Bank Sulselbar ini berada jauh diatas rata-rata CAR BPD sebesar 17,58% serta berada di atas persyaratan permodalan yang ditetapkan BRC sebesar 15% dan kewajiban pemenuhan modal minimum yang ditetapkan Bank Indonesia yakni minimal 8%, sehingga dipandang cukup untuk menghadapi risiko bisnis saat ini. Disparitas CAR yang cukup lebar dari target BRC dan *risk appetite* Bank sebesar 17% akan dimanfaatkan Bank untuk penyaluran kredit ke sektor produktif yang memiliki *risk premium* yang lebih tinggi namun memiliki *multiplier effect* terhadap laju perekonomian daerah.

Pada tahun 2014 juga telah dilakukan perbaikan kualitas aset yang tercermin dari penurunan Rasio Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*/ NPL) dari 1,19% pada tahun 2013 menjadi 0,86% di 2014. Hal ini menunjukan pengeloaan risiko kredit yang semakin baik. Perbaikan kualitas kredit juga didorong oleh langkah *remedial action* yang dilakukan oleh Bank melalui penyelesaian terhadap kredit bermasalah yang meliputi penagihan debitur, pengajuan klaim secara tepat waktu agar tidak terjadi *lapse*. Upaya pengendalian kualitas kredit juga dilakukan melalui pemantauan atas sektor ekonomi yang rentan terhadap krisis serta melakukan supervisi kredit atas kredit berkualitas rendah agar dapat dideteksi lebih dini dalam hal terjadi penurunan *cash flow* debitur.

Bank Sulselbar senantiasa berupaya untuk menjaga dan memelihara kualitas kredit serta meminimalisir risiko kredit agar rasio NPL tidak melampaui ketentuan minimum Bank Indonesia sebesar 5% sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 3/PBI/2011 tanggal 26 Desember 2001.

Rasio Kredit terhadap Simpanan Dana Pihak Ketiga (*Loan to Deposit Ratio*/LDR) yang lebih rendah menjadi 108,63% di tahun 2013 dibandingkan LDR tahun 2013 sebesar 113,21%. Penurunan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari pertumbuhan Kredit serta pengelolaan likuiditas yang semakin efisien. Rasio LDR Bank Sulselbar merupakan kondisi LDR yang *comman* dan sesuai pola historisnya untuk industry perbankan Sulsel , dimana untuk tahun 2014, LDR Perbankan Sulsel mencapai 126,39%. Siklus dana pemda yang menurun di akhir tahun, namun kembali meningkat di awal tahun juga menjadi salah satu *trigger* LDR yang tinggi.

Rasio Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas (*Return on Equity*/ROE) mengalami peningkatan dari 25,49% menjadi 27,92%. Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan laba bersih yang signifikan yang berimplikasi terhadap kenaikan ekuitas secara keseluruhan. Rasio Imbal Hasil Rata-Rata Aktiva (*Return on Asset*/ROA) meningkat menjadi 4,71% pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 sebesar 4,20%. Peningkatan rasio ROA tahun 2014 menunjukkan bahwa aset yang dikelola Bank Sulselbar dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan kinerja finansial Bank Sulselbar selama tahun 2014 didukung pula program efisiensi yang tepat guna dan tepat sasaran yang dapat memaksimalkan efisiensi rasio BOPO pada akhir tahun 2013 menjadi 65,25% dibandingkan tahun 2012 sebesar 68,06%.

Bidang Kredit dan Pembiayaan

Total kredit dan pembiayaan yang disalurkan selama tahun 2014 senilai Rp7.523.765 juta atau meningkat 13,01% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp6.657.865 juta. Kenaikan penyaluran kredit dan pembiayaan dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit konsumtif (Kredit Umum Lainnya dan KPR) sebesar 15,26%

menjadi Rp6.403.704 juta pada tahun 2014 dari Rp5.555.849 juta pada tahun 2013.

Kredit Umum Lainnya mendominasi total kredit dan pembiayaan tahun 2014 sebesar 85,06%, yang diikuti kredit investasi dengan proporsi 7,48%, kredit modal kerja 7,41% dan KPR 0,05%.

Pada tahun 2014, Bank Sulselbar telah menghitung Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar Rp73.568 juta sehingga total kredit dan pembiayaan yang diberikan setelah dikurangi CKPN yaitu sebesar Rp7.450.197 juta. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada tahun 2014 lebih rendah dari perhitungan CKPN tahun 2013 sejalan dengan penurunan rasio NPL dari 1,19% pada tahun 2013 menjadi 0,86% pada tahun 2014. Hal ini juga berarti bahwa risiko kredit selama tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013.

Dukungan terhadap pembiayaan infrastruktur juga diwujudkan melalui pembiayaan sindikasi untuk proyek pembangunan dengan pola sindikasi. Keikutsertaan Bank Sulselbar dalam proyek sindikasi pada tahun 2014 yaitu sebagai *participant* untuk membiayai proyek *Fast Track Program* 10.000 MegaWatt pada PT. PLTU Kalimantan Selatan, Papua, Sulawesi Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp15.179 juta serta proyek pembangunan pabrik PT. Semen Tonasa V senilai Rp8.692 juta. Selain itu, pada tahun 2014 Bank Sulselbar juga ikut serta dalam pembiayaan sindikasi syariah untuk PT. Amanah Finance sebesar Rp36.699 juta.

Bidang Pendanaan

Dari sisi pendanaan, kami berhasil meningkatkan simpanan nasabah ditengah ketatnya likuiditas perbankan dengan *growth* hingga mencapai 18,26% YoY yaitu dari Rp5.856.310 pada tahun 2013 menjadi Rp6.925.837 pada tahun 2014. Peningkatan tersebut ditopang oleh pertumbuhan Deposito sebesar Rp796.383 juta yaitu dari Rp1.717.229 juta menjadi Rp2.513.612 juta dengan tingkat pertumbuhan 46,38%. Pertumbuhan Deposito tersebut didorong oleh keberhasilan Bank dalam mengakuisisi deposan institusional yang didominasi oleh nasabah kantor cabang Jakarta. Dana Giro juga mengalami peningkatan sebesar 11,55% secara tahunan, yaitu dari Rp2.360.888 menjadi Rp2.633.659. Dana Tabungan meningkat tipsi sebesar 0,02% yaitu dari Rp1.778.193 pada tahun 2013 menjadi Rp1.778.566 pada tahun 2014. Adapun secara komposisi, dana Giro masih menempati komposisi terbesar dengan porsi 38,03%, Deposito 36,29% dan Tabungan 25,68%.

Dalam rangka peningkatan daya saing produk, program intensifikasi melalui peningkatan fitur untuk *basic product* seperti tabugan simpeda terus dilakukan antara lain dengan bergabung dengan ATM Prima sehingga akses layanan secara *real time* dapat dilakukan. Manajemen Bank Sulselbar juga melakukan penyesuaian suku bunga bagi deposito sehingga lebih merefleksikan suku bunga pasar serta dalam rangka meretensi nasabah-nasabah yang *rate sensitive*.

Dalam rangka peningkatan program inklusi, maka kepada nasabah pelajar dan petani/nelayan tidak dikenakan biaya administrasi yang pada akhirnya memacu nasabah untuk terus meningkatkan jumlah saldo simpanannya pada Bank Sulselbar.

Adapun sumber pendanaan lainnya bagi Bank Sulselbar selain simpanan masyarakat dalam bentuk simpanan dana pihak ketiga, antara lain Simpanan dari Bank Lain, Surat Berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan liabilitas lainnya yang mencapai 16,39% dari total liabilitas tahun 2013 yang dicatat sebagai kewajiban Bank dalam laporan keuangan.

Ke depan, Bank Sulselbar akan berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan portofolio pendanaan komersial dengan menjaring nasabah baru serta memelihara dan mengoptimalkan jangkauan layananan bagi *existing* nasabah.

Bidang Layanan

Sampai dengan Desember 2014, jumlah jaringan jaringan kantor Bank Sulselbar mencapai 88 kantor yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta Cabang Jakarta. Jaringan kantor Bank Sulselbar terdiri dari 3 Kantor Cabang Utama, 28 Kantor Cabang Konvensional, 3 Kantor Cabang Syariah, 2 Kantor Cabang Pembantu, 46 Kantor Kas, 6 Payment Point, 94 ATM, 3 Mobil Kas Keliling dan 25 *Office Channeling* Syariah (Konter Layanan Syariah).

Jaringan kantor yang luas dan mencakup hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat akan semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkau dan menggunakan jasa perbankan Bank Sulselbar. Nasabah Bank Sulselbar dapat pula menikmati kemudahan bertransaksi dengan menggunakan fasilitas ATM Bank Sulselbar yang telah tergabung dalam jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.

Dalam rangka meningkatkan utilitas Kartu ATM Bank Sulselbar menjadi Kartu Debet guna memberikan kemudahan kepada nasabah melakukan aktivitas transaksi dimana pun dan kapan pun, perizinan penerbitan Kartu Debet sementara berproses di Bank Indonesia dan diharapkan paling lambat pertengahan tahun 2015 nasabah pemegang Kartu ATM Bank Sulselbar sudah dapat mempergunakan Kartu ATM sebagai Kartu Debit.

TANTANGAN

Meskipun mengalami sedikit perlambatan, perekonomian Sulsel tumbuh 7,1% secara YoY, berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,1% pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Sulsel yang cukup kondusif tersebut memberikan *direct effect* terhadap pertumbuhan asset Bank Sulselbar yang tumbuh sebesar 14,52% yang berada di atas rata-rata pertumbuhan asset perbankan di Sulselbar sebesar 12,57%. Pertumbuhan asset tersebut di-*drive* oleh pertumbuhan kredit Bank Sulselbar sebesar 13,01% yang berada diatas pertumbuhan kredit perbankan Sulsel sebesar 10,11% Dari sisi penghimpunan dana, Bank mencatat pertumbuhan sebesar 18,26% atau berada diatas pertumbuhan industri perbankan di Sulsel yang hanya sebesar 11,36%. Namun demikian, tahun 2014 merupakan fase awal terjadinya pengetatan likuditas yang diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2015. Hal tersebut tercermin dari rasio LDR industri perbankan yang mencapai level 90% dibandingkan dengan level historis tiga tahunan sebesar 79%. Hal tersebut akan membatasi ruang gerak perbankan dalam penyaluran kredit dan semakin ketatnya persaingan dalam penghimpunan dana pihak ketiga.

Selain hal tersebut, integrasi ekonomi yang merupakan langkah penting bagi pencapaian ASEAN *Economic community* (AEC) yang berdaya saing dan berperan aktif dalam ekonomi global akan diinisiasi implementasinya pada tahun 2015. Oleh karenanya, perusahaan dari berbagai industri telah melakukan langkah – langkah antisipatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan komparatif dalam rangka mempertahankan basis pengguna jasa dan produk serta meningkatkan *market share* terhadap industri.

Hal yang sama juga tentunya berlaku di industri perbankan dan saat ini para pengurus Bank terus melakukan inisiatif strategis agar perusahaan yang dipimpinnya dapat *survive* dan tumbuh secara *sustainable.* Hal tersebut akan menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi Bank Sulselbar melalui penyediaan SDM yang lebih *responsive* terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan ekspektasi segmen nasabah yang akan lebih *demanding* terhadap layanan digital yang mendukung mobilitas nasabah.

Dalam konteks pemenuhan BPD *Regional Champion*, Bank Sulselbar akan melakukan *market*

mapping dan *assessment* tehadap keberadaannya ditengah industriy perbankan serta menyusun *business model* yang lebih pro-pasar dan pro-*growth* serta membangun *cluster* ekonomi yang berbasis kerakyatan/yang dapat mengakselarasi perkonomian daerah dan regional

Dalam konteks BPD, Bank Sulselbar dengan visi menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Indonesia Timur akan terus berinovasi dalam menciptakan produk yang berkualitas yang sesuai dengan ekspektasi nasabah serta terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, sehingga dengan strategi bisnis yang *customer oriented* diharapkan agar Bank Sulselbar akan mampu untuk meretensi nasabah *existing* dan bahkan meningkatkan *customer based*-nya.

PROSPEK DAN STRATEGI

Perekonomian Sulsel keseluruhan tahun 2015 diperkirakan cenderung stabil pada kisaran 7,5% - 8,5% (yoy), dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 (7,57%, yoy) dengan tingkat inflasi 7,4% . Proyeksi Pertumbuhan ekonomi Sulsel tersebut lebih tinggi dari *outlook* ekonomi Indonesia yang diperkirakan pada kisaran level 5,4% - 5,8% pada tahun 2015 dengan tingkat inflasi sebesar 4±1%. Permintaan domestik diperkirakan akan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, baik konsumsi maupun investasi. Industri perbankan Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan akan bertumbuh sekitar 15% - 17% untuk penyaluran kredit dan pembiayaan, sementara untuk pertumbuhan DPK diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran 14% - 16%. Prospek dan tantangan di masa mendatang menjadi pendorong bagi Bank Sulselbar untuk terus melanjutkan usaha demi mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan dan meningkatkan daya saing di industri perbankan yang makin *hypercompetitive*. Strategi Bank adalah menjaga stabilisasi dan meningkatkan *market share* DPK Bank berada pada level 12% - 15% dan *market share* kredit pada level minimum 10% dari 41 Bank umum konvensional yang beroperasi di Sulselbar dengan fokus untuk mengimplementasikan 5 Prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas pertama difokuskan kepada upaya untuk memaintain modal pada Buku II dengan jumlah yang dapat meng-cover peningkatan portofolio kredit produktif secara bertahap hingga mencapai 60% pada tahun 2018 dengan inisiatif strategi penambahan setoran modal melalui usulan menurunkan *Dividen Payout Ratio* Bank yang selama ini dibagikan ke Pemegang saham sebesar 60% menjadi 45% melalui mekanisme RUPS dan melakukan E/MSOP (*Employee/Management Stock Option Plan)* .

2. Prioritas kedua dilakukan dengan meningkatkan kapasitas Bank dalam pembiayaan sektor produktif secara gradual sehingga memenuhi target Buku II yang antara lain dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas nasabah dalam memperoleh kredit dengan membuka gerai UMKM dan *loan center* , desain *credit scoring system* yang diharapkan akan mempercepat proses kredit dengan risiko yang termitigasi sehingga tingkat suku bunga kredit yang diberikan ke nasabah akan disesuaikan dengan premi risikonya.

3. Prioritas ketiga difokuskan kepada upaya penguatan segmen retail dan *mass market* melalui inovasi produk dan pengembangan fitur yang dilakukan dengan *renewal/repackaging* produk Tampan, optimalisasi fitur ATM menjadi *debit card* dan membangun arsitektur dan infrastruktur internet dan *mobile banking* dalam satu *platform,* meningkatkan jumlah pengguna/*usage* kartu kredit serta perluasan jaringan kantor & ATM pada daerah prospektif.

4. Prioritas empat difokuskan kepada *organization alignment/*Penyelarasan Organisasi melalui

penetapan KPI pada setiap jenjang organisasi serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM untuk memenuhi kebutuhan bisnis secara tepat waktu/*time to market* hal tersebut dilakukan melalui penyempurnaan *blueprint* SDM . Untuk itu fokus Bank dibidang penguatan SDM & Organisasi adalah melakukan asesmen pada unit kerja strategis untuk memperkuat fundamental Bank dan menyiapkan kader pimpinan Bank dimasa mendatang seperti Grup Audit Intern, Grup Pemasaran serta menggunakan jasa konsultan untuk penyelesaian Sisdur SDM & project strategis Bank lainnya. Bank juga akan menyempurnakan metodogi *Risk Based Audit* untuk pengelolaan risko bank secara terintegrasi.

5. Prioritas lima difokuskan kepada Penguatan Manajemen Risiko dan Peningkatan Kualitas Pengendalian Intern melalui penyempurnaan metodogi *Risk Based Audit* & pemetaan *critical area* untuk dilakukan langkah-langkah mitigatif dalam rangka memperkecil dampak risiko yang dapat berpengaruh kepada profitabilitas & sustainibilitas Bank.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam pengelolaan Bank secara menyeluruh, pada tahun 2014 Bank Sulselbar melanjutkan upayanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten bagi pencapaian kinerja perusahaan yang lebih baik. Hal tersebut tersebut diwujudkan dengan menjalankan seluruh aktivitas perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta melaksanakan operasional perbankan yang sehat. Penerapan *good corporate governance* oleh Bank Sulselbar dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka penyempurnaan kebijakan maupun penerapan tata kelola perusahaan.

Implementasi GCG di Bank Sulselbar tidak hanya dipandang sebagai kewajiban perusahaan untuk memenuhi peraturan, tetapi juga menjadi budaya perusahaan, sehingga dapat membangun Bank Sulselbar menjadi organisasi yang kompetitif didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, profesional, memiliki integritas, dan terbuka terhadap berbagai perubahan yang mengarah pada perbaikan perusahaan yang lebih baik.

Kami menyadari bahwa komitmen yang kuat dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang sama pentingnya. Kami meyakini bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik harus senantiasa mengedepankan transparansi, tanggung jawab dan penerapan mekanisme kontrol yang benar dan seimbang. Hal-hal di atas merupakan fokus utama praktik tata kelola perusahaan di karena kami senantiasa mengacu kepada standar tertinggi di bidang kepatuhan, transparansi, tanggung jawab, dan etika profesional.

MANAJEMEN RISIKO

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank Sulselbar berpedoman kepada pilar penerapan yang meliputi : 1).Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, 2).Kecukupan Kebijakan, Prosedure dan Penetapan Limit, 3).Kecukupan proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, dan 4). Sistem Pengendalian Intern.

Penjabaran berbagai pilar tersebut, selanjutnya ditetapkan dalam suatu Kerangka Manajemen Risiko Bank Sulselbar yang terdiri dari Organisasi & SDM; Kebijakan, Proses & Metodologi; dan Infrastruktur. Kerangka ini menjadi dasar penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko di seluruh aktivitas maupun produk bank.

Esensi penerapan manajemen risiko Bank

Sulselbar adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank.

Sebagai pelengkap Pilar 1 dan Pilar 2 ,penerapan Pilar 3 Basel II pada Bank Sulselbar ditujukan untuk menciptakan transparansi kondisi keuangan sebagai salah satu aspek penting dalam rangka memperkuat perbankan. Pengungkapan informasi merupakan sarana efektif untuk menginformasikan kepada pasar mengenai eksposur risiko yang ada pada bank. Pengungkapan Pilar 3 akan menjadi sarana untuk menunjukkan keunggulan dalam mengelola risiko, hal ini akan berdampak positif terhadap hasil kinerja bank, sehingga dapat meningkatkan daya kompetisi Bank Sulselbar.

Cakupan pengungkapan dalam Pilar 3 dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan *Good Corporate Governance*, Transparansi Informasi Keuangan, transparansi produk, dan transparansi proses manajemen risiko bank.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan Bank Sulselbar pada tahun 2014 meliputi kegiatan kesehatan, sosial & pendidikan, pelestarian alam & lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana umum dan program kemitraan. Fokus program CSR Bank Sulselbar adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang akan melahirkan kemapanan masyarakat serta meningkatkan kemampuan adaptasi Bank terhadap lingkungan sekitar. Bank Sulselbar dalam menjalankan aktivitas bisnisnya selain berorientasi pada *profit* atau keuntungan untuk kelangsungan bisnis, juga tetap memperhatikan pembangunan lingkungan sosial ekonomi sebagai bentuk kepedulian Bank Sulselbar dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan di sekitar wilayah operasionalnya.

Penyaluran dana untuk kegiatan CSR dilakukan secara proporsional, menyeimbangkan antara program yang direncanakan dengan permohonan diterima, sesuai dengan kondisi masyarakat di sekitar lingkungan operasional Bank Sulselbar.

SUMBER DAYA MANUSIA

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas merupakan komitmen tertinggi Bank Sulselbar dalam rangka mendukung peran dan kontribusi SDM secara optimal untuk mewujudkan strategi dan target usaha Bank. Bank Sulselbar memandang bahwa SDM merupakan aset utama perusahaan, sehingga senantiasa menjadi prioritas dalam pengelolaannya. Dan karenanya, Bank secara terus menerus melakukan penyempurnaan dan penyelarasan pada sistem dan prosedur SDM.

Kebijakan yang tertuang dalam sistem dan prosedur SDM yakni pengelolaan SDM yang terintegrasi dan komprehensif. Untuk itu, Bank Sulselbar telah menyusun Sistem dan Prosedur SDM untuk diimplementasikan ke seluruh jajaran organisasi secara konsisten dan terintegrasi.

Bank Sulselbar secara konsisten dan berkesinambungan terus berupaya untuk membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia menjadi handal, terampil dan profesional yang akan melahirkan pegawai yang produktif. Di samping itu, kesejahteraan pegawai akan menumbuhkan rasa nyaman untuk berkarya lebih maksimal, sehingga akan berimplikasi pada peningkatan produktifitas dan *returns* bagi bank. Peningkatan potensi SDM menjadi perhatian utama manajemen untuk dikelola secara berkelanjutan agar SDM Bank Sulselbar dapat

memberdayakan potensinya dengan optimal dalam mencapai tujuan, visi dan misi sehingga Bank Sulselbar dapat berada pada posisi yang lebih baik dan kompetitif di masa mendatang.

PENGHARGAAN

Kinerja keuangan Bank Sulselbar yang senantiasa konsisten meningkat setiap tahunnya selama 15 (lima belas) tahun berturut – turut dan implementasi *good corporate governance* (GCG) yang juga terjaga baik dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian nasional, oleh Majalah InfoBank memberikan penghargaan *InfoBank Awards Titaium Trophy* sebagai Bank dengan Kinerja Sangat Bagus selama 15 tahun berturut – turut.

Pada tahun 2014, Bank Sulselbar berhasil meraih predikat *The Best of WOW Service Excellence Award, Category Conventional Bank* (Buku II) dari *MarkPlus Insight*. Penghargaan tersebut merupakan hasil pengukuran *service excellence* atas layanan Bank Sulselbar khususnya di Kota Makassar dan sekitarnya. Melalui penghargaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat advokasi dan kepuasan terhadap layanan Bank Sulselbar diterima baik oleh nasabah dan masyarakat.

Atas kinerja baik Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar yang telah beroperasi sejak tahun 2007, UUS Bank Sulselbar berhasil meraih penghargaan *InfoBank Sharia Award* Kategori UUS Bank Umum Aset di bawah Rp1 trilyun dengan Predikat "Sangat Bagus" atas Kinerja Keuangan Tahun 2014 dari Majalah InfoBank. Di samping itu, UUS Bank Sulselbar juga mendapatkan penghargaan dari Karim *Consulting* Indonesia untuk beberapa kategori yakni : 2nd *Rank The Most Efficient Sharia Unit*, Bank Pembangunan Daerah; 2nd *Rank Top Growth Funding Sharia Unit*, Bank Pembangunan Daerah; 3nd *Rank Top Growth Funding Sharia Unit*, *Asset* < IDR 1 TN; 3nd *Rank The Most Profitable Sharia Unit*, Bank Pembangunan Daerah; dan 3nd *Rank The Most Efficient Sharia Unit*, *Asset* < IDR 1 T.

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2014, terjadi perubahan Komposisi Direksi Bank Sulselbar.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank yang diaktakan dengan akta No. 04 tanggal 2 Sesember 2011, akta No. 74 tanggal 25 Juni 2013 serta akta No. 13 tanggal 24 Juni 2014 seluruhnya oleh Rakhmawati Laica Marzuki, S.H., notaris di Makassar, susunan pengurus Bank Sulselbar pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2014 – 24 Juni 2014 :

Direktur Utama : Ellong Tjandra

Plt. Direktur Umum : Andi Muhammad Rahmat

Direktur Pemasaran : Andi Muhammad Rahmat

Direktur Kepatuhan : Harris Saleng

Periode 24 Juni 2014 – 31 Desember 2014 :

Direktur Utama : Andi Muhammad Rahmat

Direktur Umum : Ambo Samsudin

Plt. Direktur Pemasaran : Andi Muhammad Rahmat

Direktur Kepatuhan : Harris Saleng

Walaupun susunan Direksi setelah tanggal 31 Desember 2014 hanya 3 (tiga) orang tetapi secara hukum memenuhi ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya untuk memenuhi jumlah Direksi, akan dipenuhi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya.

APRESIASI

Bank Sulselbar telah mencatatkan pencapaian kinerja yang sangat baik sepanjang tahun 2014 sebagai hasil kerja keras dan dedikasi dari segenap karyawan. Atas nama Direksi, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada seluruh pegawai untuk komitmen dan kerja keras dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab guna mendukung upaya pencapaian target kinerja dan mewujudkan visi dan misi Bank Sulselbar. Kami juga mengucapkan terima dan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku pemegang saham pengendali atas dukungan yang sangat besar dan tiada henti ke Bank Sulselbar. Kepada Dewan Komisaris, kami sampaikan pula terima kasih yang sebesar – besarnya untuk arahan yang sangat baik kepada manajemen dalam rangka pencapaian target kinerja yang memuaskan di tahun 2014. Direksi juga berterima kasih kepada seluruh pemegang saham, yakni pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten/kote se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, mitra usaha dan seluruh *stakeholders* yang berperan dalam memajukan Bank Sulselbar. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh nasabah Bank Sulselbar atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan membimbing serta serta melindungi kita semua dalam upaya untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan di masa depan.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 31 Desember 2014

H.A.M. Rahmat Alimuddin
Direktur Utama

TINJAUAN USAHA

BAB 3

TINJAUAN PEREKONOMIAN NASIONAL TAHUN 2014

Perekonomian Indonesia pada tahun 2014 tumbuh sebesar 5,03%, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang tumbuh 5,58%. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi akibat ketidakpastian dinamika perekonomian global dan kebijakan stabilisasi makroekonomi serta ketergantungan yang tinggi sebagian besar wilayah di Indonesia terhadap ekspor komoditas primer yang kinerjanya pada 2014 masih belum membaik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 melambat terutama disebabkan oleh melambatnya ekspor dan permintaan domestik. Ekspor melambat sejalan dengan pelemahan volume perdagangan dunia, terutama negara *emerging*, dan kebijakan pembatasan ekspor mentah tambang. Sementara itu, melambatnya permintaan domestik terutama terjadi pada konsumsi pemerintah dan investasi. Perlambatan konsumsi pemerintah terkait program penghematan anggaran guna menjaga kesinambungan fiskal. Investasi yang tumbuh melambat sebagai respon atas pelemahan ekspor yang berlanjut dan sebagai dampak dari kebijakan stabilisasi.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia terkait dengan masih tingginya ketergantungan Sumatera, Ka-

limantan, dan beberapa daerah di KTI terhadap ekspor komoditas primer yang kinerjanya masih menurun. Beberapa daerah yang menunjukkan perlambatan ekonomi akibat terbatasnya kinerja sektor berbasis sumber daya alam (SDA) antara lain Provinsi Aceh, Kalimantan Timur, Riau, dan Papua. Di tengah melambatnya kinerja ekonomi di daerah-daerah basis produksi SDA, kinerja daerah yang mengandalkan kinerja manufaktur seperti Jawa dan Jakarta, serta beberapa daerah di Sulawesi masih relatif tumbuh kuat sehingga dapat menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut.

Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2014

Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Laporan Nusantara Bank Indonesia

Inflasi tahun 2014 sebesar 8,36% (yoy) dan relatif terkendali dibandingkan tahun 2013 sebesar 8,38% (yoy). Relatif lebih terkendalinya inflasi di

tahun 2014 disebabkan oleh bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, disertai intensifnya koordinasi kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam memitigasi risiko inflasi yang timbul sepanjang 2014. Peran aktif daerah semakin kuat dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan masyarakat khususnya melalui upaya memperkuat sisi produksi pangan dan menjaga kelancaran distribusi. Berbagai rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mulai menyentuh persoalan struktural yang perlu diatasi segera untuk menjamin stabilitas harga seperti masalah tata niaga produk pangan dan upaya memperluas akses pasar melalui penguatan kerjasama perdagangan antara daerah.

Peningkatan inflasi terbesar di Indonesia pada tahun 2014 terjadi di wilayah Sumatera, Jakarta dan Jawa yang melebihi 8%. Tekanan kenaikan inflasi paling tinggi tercatat dialami oleh beberapa daerah di Sumatera - Sumatera Barat bahkan merupakan daerah dengan inflasi tertinggi secara nasional - dan wilayah Sulampua-Balnustra seperti di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Dampak kenaikan harga BBM terhadap kenaikan tarif angkutan, harga komponen kendaraan dan biaya jasa pemeliharaan kendaraan di Sulawesi Utara dan Maluku Utara lebih besar daripada di daerah-daerah lain. Selain itu, kenaikan inflasi dipicu oleh tekanan kenaikan harga beberapa komoditas pangan strategis dan sejumlah komoditas pada kelompok inti.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4 – 5,8%. Perkiraan pertumbuhan tersebut terutama akan ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan kontribusi positif dari peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung kegiatan

ekonomi produktif, termasuk pembangunan infrastruktur. Reformasi struktural yang ditempuh pemerintah dengan melakukan reformasi subsidi energi, rencana percepatan pembangunan infrastruktur, serta langkah – langkah perbaikan iklim investasi termasuk pelayanan terpadu perijinan satu pintu (PTSP) akan berdampak positif bagi penguatan ekonomi. Kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan juga diperkirakan akan meningkat meskipun belum signifikan. Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan dan sektor pengangkutan & komunikasi diperkirakan meningkat dan menjadi penggerak perekonomian. Sektor konstruksi juga meningkat signifikan sejalan dengan berjalannya proyek – proyek infrastruktur yang telah dicanangkan pemerintah.

Tabel Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran

(%; yoy; tahun dasar 2010)

Komponen	2013				2013	2014				2014
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	5.52	5.25	5.35	5.41	5.38	5.35	5.14	5.08	5.01	5.14
Konsumsi LNPRT	6.51	6.43	6.70	12.81	8.18	23.66	22.79	5.64	(-0.23)	12.43
Konsumsi Pemerintah	3.02	3.20	12.44	7.89	6.93	6.12	(-1.50)	1.33	2.83	1.98
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	7.95	5.52	6.00	2.10	5.28	4.66	3.71	3.86	4.27	4.12
Ekspor Barang dan Jasa	3.50	2.10	1.34	9.44	4.17	3.16	1.38	4.86	(-4.53)	1.02
Impor Barang dan Jasa	2.92	0.88	4.93	(-0.85)	1.86	5.04	0.41	0.28	3.22	2.19
PDB	5.61	5.59	5.50	5.61	5.58	5.14	5.03	4.92	5.01	5.02

Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Laporan Nusantara Bank Indonesia

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Lapangan Usaha

(%; yoy; tahun dasar 2010)

Sektor	2013				2013	2014				2014
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Pertanian,Peternakan,Kehutanan,& Perikanan	4.21	4.60	3.51	4.63	4.20	5.28	4.99	3.63	2.77	4.18
Pertambangan & Penggalian	0.90	0.66	2.69	2.72	1.74	-2.00	1.14	0.78	2.22	0.55
Industri Pengolahan	4.72	5.38	3.67	4.24	4.49	4.52	4.81	4.98	4.24	4.63
Listrik, Gas & Air Bersih	9.76	4.70	2.43	4.42	5.23	3.29	6.47	5.95	6.50	5.57
Pengadaan Air	3.50	3.57	4.66	4.51	4.06	3.59	3.16	2.81	2.65	3.05
Konstruksi	5.41	6.31	6.46	6.21	6.11	7.22	6.46	6.53	7.67	6.97
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor	3.00	4.77	4.88	6.12	4.71	6.11	5.10	4.78	3.46	4.84
Transportasi dan Pergudangan	7.44	8.90	8.28	8.87	8.38	8.44	8.49	7.98	7.15	8.00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.97	7.00	6.94	6.30	6.80	6.48	6.45	5.90	4.86	5.91
Informasi dan Komunikasi	10.62	11.41	10.13	9.49	10.39	9.79	10.46	9.80	10.03	10.02
Jasa Keuangan	13.21	10.95	9.18	3.47	9.09	3.23	4.94	1.50	10.20	4.93
Real Estat	8.91	7.66	5.45	4.33	6.54	4.66	4.93	5.07	5.30	5.00
Jasa Perusahaan	7.80	7.57	8.25	8.00	7.91	10.27	9.99	9.30	9.69	9.81
Administrasi Pemerintahan	1.60	-2.07	6.41	3.81	2.38	2.85	-2.49	2.58	6.86	2.49
Jasa Pendidikan	11.67	3.24	8.60	9.43	8.20	5.20	5.41	7.27	7.13	6.29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	6.88	5.19	8.28	10.69	7.83	7.75	8.50	9.90	6.09	8.01
Jasa Lainnya	5.62	5.59	6.17	8.21	6.41	8.37	9.46	9.50	8.37	8.92
PDB	5.61	5.59	5.50	5.61	5.58	5.14	5.03	4.92	5.01	5.02

Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Laporan Nusantara Bank Indonesia

Tingkat inflasi tahun 2015 diperkirakan akan membaik dan berada di kisaran 4 ± 1%. Ekspektasi perkiraan inflasi yang terkendali dan rendah di tahun 2015 didukung oleh terkendalinya inflasi inti, menurunnya harga minyak dunia, dan membaiknya pasokan bahan pangan. Terkendalinya inflasi inti diperkirakan didorong oleh terjaganya ekspektasi inflasi, harga komoditas internasional yang relatif

renda, serta relatif minimalnya tekanan dari sisi permintaan. Menurunnya harga minyak dunia dan perbaikan pasokan bahan pangan diperkirakan akan mengakibatkan relatif rendahnya tekanan inflasi *administered prices* dan *volatile food relative*. Perkiraan inflasi *volatile food* yang rendah terkait dengan asumsi bahwa produksi dan distribusi bahan makanan dan tata niaga akan lebih baik dalam periode mendatang. Rendahnya perkiraan *administered prices* dipengaruhi tren penurunan harga komoditas internasional yang menyebabkan harga barang energi menjadi lebih rendah.

Perbankan Indonesia 2014

Stabilitas sistem keuangan Indonesia tahun 2014 yang solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga serta dukungan permodalan yang masih kuat.

Laju pertumbuhan kredit tahun 2014 mengalami perlambatan 11,6% (yoy) yang dipengaruhi oleh perlambatan kredit modal kerja (KMK) sebesar 10,8% (yoy) dan kredit investasi (KI) sebesar 13,2% (yoy). Namun kredit konsumtif (KK) justru mengalami peningkatan sebesar 11,5% (yoy). Secara sektoral, perlambatan pertumbuhan kredit didorong oleh melambatnya pertumbuhan kredit di sektor perdagangan dan industri pengolahan masing – masing sebesar 12,4% (yoy) dan 14,3% (yoy).

Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tahun 2014 juga melambat sebesar 12,3% (yoy) yang terjadi pada seluruh komponen DPK.

Tabel Pertumbuhan Kredit

	Pertumbuhan Kredit (%)						Share Kredit Des'14
	Rerata 2008-2009	Rerata 2010-2013	Mar-14	Jun-14	Sep-14	Des-14	
Industri/Agregat	24.9	22.1	19.45	17.20	13.16	11.58	100.00
Per Sektor Ekonomi							
Perdagangan	22.4	23.8	24.16	18.28	13.87	12.36	21.51
Lain-lain	25.8	22.2	8.59	13.93	11.20	12.67	28.09
Industri	16.6	19.2	26.20	24.90	16.08	14.30	17.98
Pengangkutan	53.2	21.0	28.40	28.61	18.21	5.13	4.68
Konstruksi	27.6	15.3	24.75	17.54	18.65	26.86	4.01
Pertanian	24.5	22.5	24.46	25.44	21.66	19.90	5.99
Jasa Dunia Usaha	27.6	21.5	19.53	6.18	(1.03)	(3.68)	9.03
Jasa Sosial	19.0	53.9	24.35	14.31	19.51	19.22	2.66
Pertambangan	35.5	38.0	13.81	6.97	17.05	11.83	3.86
Listrik	85.2	36.4	41.41	19.53	21.09	2.06	2.21
Per Jenis Penggunaan							
KMK	23.1	21.1	16.58	17.30	13.33	10.83	47.83
KI	28.4	26.0	34.64	22.46	16.40	13.16	24.58
KK	25.8	21.3	12.93	12.72	10.14	11.51	27.59

Sumber : Laporan Kebijakan Moneter (Ekonomi, Moneter dan Keuangan) Bank Indonesia, Triwulan IV - 2014

Grafik Suku Bunga Kredit

Sumber : Laporan Kebijakan Moneter (Ekonomi, Moneter dan Keuangan) Bank Indonesia, Triwulan IV - 2014

Grafik Spread Suku Bunga Perbankan

Sumber : Laporan Kebijakan Moneter (Ekonomi, Moneter dan Keuangan) Bank Indonesia, Triwulan IV - 2014

Meskipun pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga mengalami perlambatan, namun ketahanan permodalan masih cukup memadai dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) melampaui ketentuan minimum 8% yakni sebesar 19,36% dan rasio profitabilitas ROA (*Return On Asset*) sebesar 2,85%. Rasio kredit bermasalah (*non performing loan*/NPL) tetap rendah dan stabil di kisaran 2,0%.

Grafik Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

Sumber : Laporan Kebijakan Moneter (Ekonomi, Moneter dan Keuangan) Bank Indonesia, Triwulan IV – 2014

Tabel Kondisi Umum Perbankan

Indikator Utama		2014											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Des
Total Aset	(T Rp)	4,880.5	4,888.8	4,933.0	5,008.1	5,097.5	5,198.0	5,121.1	5,218.9	5,418.8	5,445.7	5,511.1	5,615.1
DPK	(T Rp)	3,594.7	3,603.6	3,618.1	3,694.8	3,763.5	3,834.5	3,778.4	3,855.9	3,995.8	4,011.4	4,054.7	4,114.4
Kredit *	(T Rp)	3,258.4	3,267.8	3,306.9	3,361.3	3,403.1	3,468.2	3,495.0	3,498.4	3,561.3	3,558.1	3,596.6	3,674.3
LDR*	(%)	90.6	90.7	91.4	91.0	90.4	90.4	92.5	90.7	89.1	88.7	88.7	89.3
NPLs Gross*	(%)	1.9	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.2
CAR	(%)	19.6	19.8	19.8	19.4	19.5	19.3	19.3	19.3	19.4	19.5	19.6	19.4
NIM	(%)	4.1	4.1	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
ROA	(%)	2.8	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8

* tanpa channeling

Sumber : Laporan Kebijakan Moneter (Ekonomi, Moneter dan Keuangan) Bank Indonesia, Triwulan IV - 2014

TINJAUAN PEREKONOMIAN SULAWESI SELATAN TAHUN 2014

Perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2014 tumbuh 7,57% (yoy) sedikit melambat dibandingkan tahun 2013 sebesar 7,63% (yoy). Pencapaian pertumbuhan yang masih diatas angka nasional (5,02%; yoy) tersebut terutama bersumber dari ekspansi lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (11,4%; yoy) serta tingginya pertumbuhan Ekspor (11,85%; yoy). Sebaliknya, penurunan kinerja lapangan usaha Perdagangan Hotel dan Restoran, serta Bangunan (konstruksi) menjadi sumber perlambatan. Dari sisi tekanan harga, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di penghujung tahun menyebabkan inflasi 2014 mencapai 8,61% (yoy), diatas inflasi 2013 (6,22%; yoy).

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV – 2014

*) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Tabel Pendapatan Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku TD 2010 (Rp Juta)

Kategori	2010	2011	2012	2013*	2014*
Penduduk (jiwa)	8,060,401	8,156,129	8,250,018	8,342,047	8,432,163
PDRB per kapita (Juta Rp.)	21.31	24.31	27.67	31.01	35.59

Sumber : Badan Pusat Statistik

Perlambatan kinerja ekonomi Sulsel pada Triwulan IV – 2014 tercermin pada beberapa komponen sisi pengeluaran. Pertumbuhan ekonomi di Triwulan IV – 2014 tercatat 7,71% (yoy) lebih rendah dibandingkan Triwulan III – 2013 yang mencapai 8,23% (yoy). Komponen yang memperlihatkan perlambatan pertumbuhan adalah konsumsi rumah tangga dan LNPRT. Sedangkan konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi sebesar -2,92 (yoy). Peningkatan investasi dan perbaikan neraca perdagangan menjadi faktor penahan ekonomi Sulsel tidak terdeselerasi lebih lanjut.

Untuk tahun 2014, perlambatan perekonomian Sulsel terutama didorong oleh melemahnya investasi. Investasi di tahun 2014 tercatat hanya tumbuh sebesar 1,24% (yoy) jauh lebih rendah dibandingkan 2013 yang mampu mencapai pertumbuhan sebesar 12,32% (yoy). Motor pendorong pertumbuhan di tahun 2014, yang sekaligus menjadi faktor penahan ekonomi tidak terdeselerasi lebih lanjut adalah komponen konsumsi. Di tahun 2014, komponen konsumsi tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan komponen di sisi permintaan lainnya yaitu sebesar 5,38% (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 5,51% (yoy). Kinerja perdagangan (ekspor-impor) juga mengalami peningkatan. Dari nilai neraca perdagangan bersih diketahui bahwa terjadi peningkatan sebesar 40,22% (yoy) meski-

pun bila dilihat dari nominal masih mengalami defisit sebesar Rp11,12 triliun.

Ekspor Sulsel mengalami pertumbuhan 14,73% (yoy) yang ditopang oleh peningkatan ekspor non migas. Hal ini tercermin dari peningkatan volume dan nilai ekspor non migas luar negeri. Sementara itu, kegiatan ekspor nonmigas antardaerah mengalami perlambatan yang tercermin dari pertumbuhan volume barang yang dimuat di pelabuhan Makassar.

Beberapa komoditas ekspor utama dengan orientasi penjualan luar negeri mengalami peningkatan yaitu rumput laut, biji coklat (kakao) dan karet alam olahan. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kinerja industri manufaktur para negara mitra dagang Sulsel yang lebih baik. Dari *Purchasing Manager Index* (PMI), Negara Jepang, Korea Selatan, dan Zona Eropa menunjukan peningkatan pada tahun 2014.

Grafik Volume Ekspor Non Migas

Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV – 2014

Grafik Pertumbuhan Volume Ekspor Komoditas

Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV – 2014

Impor Sulsel di tahun 2014 tercatat tumbuh sebesar 9,35% (yoy) yang dipengaruhi peningkatan nilai impor non migas luar negeri. Di sisi lain impor antar pulau diperkirakan mengalami penurunan, terindikasi dari penurunan bongkar muat barang dalam negeri di pelabuhan Makassar.

Struktur ekspor maupun impor luar negeri Sulsel pada tahun 2014 relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Produk industri masih menjadi komoditas yang dominan dalam komposisi barang dari Sulsel yang dijual ke luar negeri yang diikuti komoditas pertanian. Sementara itu, impor bahan baku mencatat pangsa terbesar dari total nilai impor Sulsel yang kemudian diikuti oleh impor barang modal dan barang konsumsi.

Neraca perdagangan Sulsel di tahun 2014 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2013. Membaiknya kinerja ekspor menjadi pendorong perbaikan neraca perdagangan Sulsel pada tahun 2014. Ekspor Sulsel tumbuh 11,85% (yoy) lebih besar dibandingkan tahun 2013 yang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,06% (yoy). Dari sisi impor, terjadi kontraksi pada tahun 2014 sebesar -1,64% (yoy) dibandingkan tahun 2013 (5,36%, yoy). Akselerasi kinerja ekspor pada tahun 2014 yang dibarengi dengan deselerasi impor membuat pertumbuhan surplus perdagangan atas dasar harga konstan (ADHK) menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013.

Pada tahun 2014, kinerja ekonomi Sulsel (7,57% yoy) masih di topang oleh akselerasi kinerja sektor primer. Sektor primer yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami pertumbuhan sebesar 11,43% (yoy) disusul oleh Lapangan Usaha pengadaan listrik dan gas (10,56%, yoy) dan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (10,23%, yoy). Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian yang merupakan sektor penyumbang pertumbuhan terbesar di tahun 2014 tumbuh sebesar 9,98% (yoy).

Bila dilihat dari andil terhadap pertumbuhan ekonomi, Lapangan Usaha pertanian masih menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar di tahun 2014. Sektor pertanian memberikan andil pertumbuhan sebesar 2,18%, lebih tinggi dibandingkan andil di tahun 2013 yang tercatat sebesar 1,08%. Sektor lain yang memberikan andil besar dalam pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2014 adalah sektor industri pengolahan (1,35%), sektor perdagangan (1,00%), sektor pertambangan dan penggalian (0,71%), dan sektor konstruksi (0,72%).

Grafik Sumbangan Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha

Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV – 2014

*) Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Laju inflasi Sulsel pada tahun 2014 tercatat sebesar 8,61% (yoy) yang disebabkan oleh peningkatan tekanan inflasi pada beberapa kelompok barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat pasca kenaikan harga bahan bakar minnyak (BBM) yang disubsidi. Peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok barang yang terkait dengan *volatile food* (kelompok bahan pangan dan makanan jadi) dan *administered price* (perumahan dan transportasi). Secara kelembagaan, seluruh TPID (Tim Pengendalian Inflasi

Daerah) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah terbentuk, diiringi dengan peningkatan kegiatan koordinasi, terutama untuk mengantisipasi implikasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Grafik Perkembangan Inflasi Sulawesi Selatan

Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV – 2014

Peningkatan tekanan inflasi Sulsel didorong oleh peningkatan inflasi di seluruh kota IHK (Indeks Harga Konsumen) di Sulawesi Selatan (Watampone, Makassar Palopo, Parepare, dan Bulukumba). Inflasi Watampone, Makassar, Palopo, Parepare, dan Bulukumba pada Triwulan III 2014, secara berurutan tercatat sebesar 8,22% (yoy);8,51% (yoy);8,59% (yoy);9,38% (yoy) dan 9,45% (yoy). Pada Triwulan sebelumnya, laju inflasi di tiga kota IHK tersebut tercatat sebesar 4,55% (yoy), 3,57% (yoy), 4,03% (yoy), 3,04% (yoy) dan 7,30% (yoy).

Grafik Perkembangan Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Kota

Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV – 2014

Perekonomian Sulsel di Triwulan I – 2015 diperkirakan akan didorong oleh aktivitas komponen konsumsi dan investasi. Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada Triwulan I – 2015 diperkirakan dalam arah stabil hingga melambat dalam kisaran 6,9% - 7,9% (yoy). Dari sisi permintaan, permintaan konsumsi rumah tangga tetap baik, yang terpantau dari optimisme ekspektasi konsumen dan pedagang (hasil survei penjualan eceran), serta peningkatan upah minimum regional (UMR). Investasi meningkat, didorong oleh investasi yang dibiayai pemerintah yang diperkirakan meningkat. Dari sisi lapangan usaha, peningkatan di tahun 2015 akan terjadi pada lapangan usaha konstruksi, perdagangan, transportasi, informasi/komunikasi, real estate, dan jasa-jasa.

Dengan mempertimbangkan kondisi domestik dan global, ekonomi Sulsel keseluruhan tahun

2014 diperkirakan cenderung stabil pada kisaran 7,5% - 8,5% (yoy), dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 (7,57%, yoy). Pertumbuhan ekonomi 2015, diperkirakan diwarnai dengan perlambatan negara permintaan mitra dagang Sulsel dan tren perlambatan ekonomi dunia, yang menyebabkan pelemahan ekspor. Ekonomi global membaik, namun tidak secepat prakiraan sebelumnya. Perbaikan berasal dari ekonomi negara maju (Amerika Serikan dan Kawasan Eropa), sementara ekonomi negara berkembang (Asia dan ASEAN) melambat. Sementara, dari sisi lokal,kategori utama yang diperkirakan menopang pertumbuhan antara lain pertambangan, konstruksi, perdagangan besar/eceran, transportasi, penyediaan akomodasi, informasi/komunikasi, real estate, dan jasa-jasa. Peningkatan beberapa sektor tersebut terkait beroperasinya tambahan *smelter* dan kegiatan pendukungnya, mulai beroperasinya hotel di Makassar, serta pembangunan infrastruktur transportasi dan distribusi.

Laju inflasi Triwulan I – 2015 secara umum diperkirakan melambat dalam rentang 7,4% - 8,4% (yoy), dibandingkan Triwulan IV-2014 sebesar 8,61%; yoy dengan asumsi harga bakar minyak dalam tren stabil atau turun. Tekanan inflasi yang relatif mereda berasal dari komponen *volatile food* dan *administered prices,* demikian pula inflasi inti cenderung stabil. Relatif stabilnya inflasi karena pasokan bahan makanan cukup dan distribusi yang lancar. Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulsel senantiasa akan mencermati risiko kenaikan inflasi terkait harga BBM, elpiji, dan tarif listrik yang secara bertahap mulai dilepas menuju harga keekonomiannya. Berbagai langkah koordinasi akan dilakukan untuk meminimalisasi dampak kenaikan harga BBM baik dampak langsung maupun dampak tidak

langsung (ekspektasi harga serta tarif angkutan). Kegiatan untuk menjaga ketersediaan barang dan kelancaran distribusi terus dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulsel maupun TPID di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Sulsel berkomitmen untuk mencapai tingkat inflasi 2015 sekitar 4%.

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Sulawesi Selatan (Tahun Dasar 2010)

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Provinsi Sulsel	2011	2012	2013	2014		2015[P]	
				IV	Total	I[P]	Total
Sisi Pengeluaran							
Konsumsi Rumah Tangga	6,5	7,0	6,0	5,5	5,9	6,5-7,5	6,5-7,5
Konsumsi LNPRT	6,6	7,1	10,4	4,9	11,3	4,1-5,1	5,2-6,2
Konsumsi Pemerintah	4,7	4,2	2,7	(2,9)	1,9	5,4-6,4	5,4-6,4
Pembentukan Modal Tetap Bruto	12,7	15,7	13,2	9,0	9,4	10,9-11,9	10,5-11,5
Ekspor	(9,5)	(2,0)	3,1	14,7	11,9	5,4-6,4	4,4-5,4
Impor	(7,1)	6,1	5,4	9,4	(1,6)	6,1-7,1	6,1-7,1
Sisi Lapangan Usaha							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,9	4,6	4,9	10,4	10,0	6,4-7,4	5,4-6,4
Pertambangan dan Penggalian	(3,8)	5,3	5,6	9,6	11,4	5,7-6,7	7,4-8,4
Industri Pengolahan	9,0	8,7	9,2	15,2	9,5	8,4-9,4	8,5-9,5
Pengadaan Listrik, Gas	10,1	16,2	8,2	15,0	10,6	7,0-8,0	7,0-8,0
Pengadaan Air	12,6	3,5	5,5	(1,2)	2,1	4,7-5,7	5,0-6,0,
Konstruksi	6,9	9,9	10,6	5,1	6,1	6,3-7,3	6,6-7,6
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,3	11,9	7,2	3,4	7,1	8,7-9,7	9,3-10,3
Transportasi dan Pergudangan	13,0	13,4	6,4	4,8	2,1	4,0-5,0	6,0-7,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,7	11,4	6,8	5,6	7,8	5,4-6,4	6,0-7,0
Informasi dan Komunikasi	11,8	20,6	14,1	6,6	5,8	8,0-9,0	8,7-9,7
Jasa Keuangan	19,8	15,9	9,3	11,9	5,9	5,0-6,0	5,4-6,4
Real Estate	11,1	10,5	9,0	9,0	8,0	7,4-8,4	9,6-10,6
Jasa Perusahaan	9,0	8,0	7,0	7,4	6,8	7,1-8,1	8,3-9,3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,5	2,2	3,1	0,7	1,0	4,4-5,4	5,0-6,0
Jasa Pendidikan	10,4	7,5	7,7	3,1	4,7	6,8-7,8	6,8-7,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,0	10,7	8,2	3,3	10,2	7,8-8,8	8,8-9,8
Jasa lainnya	6,7	8,1	7,1	9,4	7,6	7,1-8,1	6,9-7,9
PDRB	**8,13**	**8,9**	**7,6**	**7,7**	**7,6**	**6,9-7,9**	**7,5-8,5**
Inflasi	**2,9**	**4,4**	**6,2**	**8,6**	**8,6**	**7,4-8,4**	**3,4-4,4**

Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV – 2014

[P] proyeksi Bank Indonesia

Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV – 2014

PELUANG INVESTASI DI SULAWESI SELATAN

Sulawesi Selatan merupakan salah satu Propinsi di Indonesia yang memiliki nilai strategis dalam konstalasi pembangunan Indonesia. Selain memiliki sumberdaya alam yang cukup besar, khususnya di bidang Pertanian, Pertambangan dan Pariwisata. Dengan letak strategis ditengah-tengah Indonesia dan menjadi pintu gerbang sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Timur Indonesia. Oleh karena itu Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif sekaligus kompetitif untuk kegiatan investasi.

Keunggulan berinvestasi di Sulawesi Selatan yaitu:

1. Posisi yang strategis secara ekonomi sehingga berperan sebagai pusat pelayanan angkutan udara dan laut di Kawasan Timur Indonesia dan Pusat pelayanan jasa perdagangan, industri serta perbankan.
2. Wilayah yang relatif aman bagi kegiatan investasi di Indonesia, dimana gejolak masyarakat dan komunitas buruh relatif rendah.
3. Keanekaragaman potensi sumber daya alam untuk investasi. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai bagi kegiatan investasi.
4. Kawasan Timur Indonesia sebagai pasar potensial yang belum termanfaatkan secara maksimal.
5. Komitmen Pemerintah Daerah yang sangat kuat dalam memberikan kemudahan bagi investor.
6. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas.
7. Ketersediaan lahan yang masih luas dan relatif murah.

PERBANKAN SULAWESI SELATAN TAHUN 2014

Kinerja perbankan Sulsel tahun 2014 memperlihatkan peningkatan, tercermin dari kinerja semua indikator utama (aset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit/pembiayaan yang disalurkan). Peningkatan asset bank umum terjadi pada kelompok bank pemerintah dan swasta nasional. Sementara itu, pertumbuhan DPK yang lebih rendah diband-

ingkan pertumbuhan kredit menyebabkan kegiatan intermediasi (LDR) sedikit meningkat menjadi sebesar 126,39% dari 125,06%. Risiko kredit perbankan masih terjaga dengan baik yang tercermin dari Rasio *nonperforming loan* (NPL) yang masih berada pada level aman. Masih amannya rasio NPL juga mendukung ketahanan sektor keuangan baik pada sektor korporasi, rumah tangga. Namun demikian, perlu perhatian khusus pada kualitas kredit UMKM.

Dari sisi kelembagaan, jumlah bank umum di Sulsel pada tahun 2014 bertambah satu bank menjadi sebanyak 48 bank. Jumlah BPR cenderung konstan (tidak mengalami pertumbuhan) yaitu sebanyak 29 BPR. Untuk bank syariah terdapat penambahan jumlah kantor cabang (KC) sebanyak 1, sementara kantor cabang pembantu (KCP), kantor kas (KK) maupun kantor fungsional (KF) tidak berubah. Namun terdapat penurunan yang signifikan pada jumlah kantor dari 980 menjadi 972 karena terdapat 8 kantor unit syariah yang tutup sesuai kebijakan dari pihak bank.

Total aset bank umum tahun 2014 tercatat tumbuh sebesar 11,46% (yoy) atau menjadi Rp101,35 triliun. Peningkatan aset perbankan disebabkan oleh meningkatnya aset pada semua kelompok bank terutama pada bank pemerintah dan swasta nasional disusul bank asing dan campuran masing-masing sebesar 10,72% (yoy), 12,68% (yoy) dan 0,77% (yoy) pada Triwulan IV.

Dana Pihak Ketiga (DPK) jenis deposito, giro dan tabungan yang dihimpun oleh bank umum mengalami perlambatan. Perlambatan pertumbuhan DPK disebabkan oleh menurunnya kinerja seluruh komponen simpanan yaitu deposito, giro dan tabungan. Deposito tumbuh melambat dari 23,39% (yoy) menjadi 17,61% (yoy), giro tumbuh

melambat dari 5,11% (yoy) menjadi hanya 1,89% (yoy) sedangkan tabungan tumbuh melambat dari 8,58% (yoy) menjadi 6,92% (yoy). Perlambatan DPK dipengaruhi oleh realisasi penyerapan anggaran pemerintah daerah pada akhir tahun dalam pembiayaan proyek dan pembangunan daerah. Selain itu, perlambatan DPK sesuai dengan indeks penghasilan saat ini terjadi perlambatan dari 150,83 menjadi 144,17 (qtq) meskipun berada pada kondisi optimis. Secara tahunan 2014, pertumbuhan DPK sebesar 9,38% adalah jauh melambat dibandingkan pertumbuhan 2013 sebesar 12,52%. Kondisi ekonomi global yang masih belum cerah yang berdampak kepada perekonomian domestik membuat pertumbuhan ekonomi nasional 2014 ikut melambat (5,02%) yang tercermin juga pada pendapatan masyarakat.

Kredit yang disalurkan perbankan pada tahun 2014 mencatatkan peningkatan pertumbuhan dan akselerasi terjadi pada semua jenis kredit. Kredit tercatat tumbuh sebesar 10,84% (yoy) menjadi Rp83,56 triliun. Peningkatan ini didorong oleh tingginya penyaluran kredit untuk modal kerja dan investasi serta konsumsi. Secara sektoral, penyaluran kredit juga tumbuh meningkat pada sebagian besar sektor terutama pada sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan jasa sosial masyarakat yang tumbuh signifikan. Sementara sektor LGA dan jasa dunia usaha mengalami perlambatan dan sektor pengangkutan mengalami penurunan sebesar -3,52% (yoy). Secara tahunan 2014, pertumbuhan kredit sebesar 10,84% adalah lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2013 sebesar 13,84%. Searah dengan kebijakan moneter untuk pengetatan likuiditas, pertumbuhan kredit sektor perbankan diarahkan pada kisaran 15-17% secara nasional.

Tabel Perkembangan Rasio Jumlah Rekening terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah Rekening DPK Lokasi KC/KCP (Ribu Rekening)			Jumlah Penduduk (Ribu Orang)*			Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Jumlah Penduduk (%)		
2012	2013	2014**	2012	2013	2014**	2012	2013	2014**
4,070	4,794	4,959	8,207	8,309	8,408	49.59	57.70	58.98

Jumlah Rekening Kredit Lokasi Proyek (Ribu Rekening)			Jumlah Penduduk (Ribu Orang)*			Rasio Jumlah Rekening Kredit terhadap Jumlah Penduduk (%)		
2012	2013	2014**	2012	2013	2014**	2012	2013	2014**
934	986	1,030	8,207	8,309	8,408	11.38	11.86	12.25

*) Jumlah penduduk merupakan proyeksi dari proporsi jumlah penduduk miskin berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS
**) Data terkini perbankan dan jumlah penduduk miskin

Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV – 2014

Loan to Deposit Ratio (LDR), sebagai indikator intermediasi perbankan tercatat sedikit meningkat dari 125,06% menjadi 126,39% (qtq). Dengan pertumbuhan kredit yang meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan DPK maka LDR Sulsel masih di atas 100. Penyaluran kredit sesuai sektornya, seperti periode sebelumnya masih didominasi oleh sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor jasa dunia usaha. Sebaran pangsa kredit sektoral tersebut juga tercermin pada struktur sektor ekonomi dominan di PDRB.

Meningkatnya kinerja penyaluran kredit diikuti dengan risiko kredit yang tetap terkendali. Ditinjau dari sisi manajemen risiko, kondisi perbankan Sulsel tahun 2014 masih menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini tercermin dari rasio *non performing loan* (NPL) bank umum yang masih terjaga pada level aman (di bawah 5%), yaitu se-

besar 3,13% (dari 3,57% ; qtq). NPL yang sedikit membaik tersebut antara lain mencerminkan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh Perbankan mengingat kondisi perekonomian daerah yang mengalami perlambatan di akhir tahun.

Total aset perbankan syariah tercatat tumbuh sebesar 5,92% menjadi Rp5,90 triliun. Peningkatan pertumbuhan aset perbankan syariah terutama didorong oleh meningkatnya pertumbuhan aset dari bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Pangsa aset bank syariah terhadap total aset menunjukkan peningkatan sebesar 5,64% menjadi 5,83% (qtq). Hal ini disebabkan oleh kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah yang semakin meningkat.

Kinerja indikator perbankan syariah Sulsel menunjukkan sedikit peningkatan, terutama dilihat dari indikator pertumbuhan pembiayaan dan DPK yang positif. Pertumbuhan pembiayaan tercatat meningkat sebesar 17,55% (yoy) dan penghimpunan dana tumbuh sebesar 3,7% (yoy). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tercatat masih tinggi sebesar 171,91% yang menunjukkan masih belum berimbangnya penghimpunan DPK dibandingkan pembiayaan seiring minat masyarakat untuk mengambil pembiayaan dari perbankan syariah yang lebih tinggi dibandingkan menyimpan dananya di perbankan syariah. Sementara itu, kualitas pembiayaan tetap terjaga pada level aman, tercermin dari *non performing financing* (NPF) sebesar 2,74%.

Penyaluran kredit bagi UMKM tercatat tumbuh sebesar 12,11% (yoy). Pangsa kredit UMKM (produktif) terhadap total kredit adalah 33,12% atau sebesar Rp27,67 triliun. Dari nilai tersebut, sekitar 69% merupakan kredit UMKM yang digunakan untuk modal kerja sedangkan sisanya digunakan un-

tuk investasi. Angka NPL kredit UMKM membaik yaitu sebesar 4,81% dari 5,42% (qtq) yang melewati batas aman (5%). Peningkatan kualitas kredit UMKM didorong oleh penurunan NPL pada hampir semua sektor terutama sektor pertambangan, pertanian, industri pengolahan, konstruksi, pertanian, perdagangan dan pengangkutan. UMKM pada sektor konstruksi mencatat NPL tertinggi.

Upaya pengembangan akses keuangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, KPw BI Provinsi Sulsel terus mencoba melakukan kegiatan edukasi keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk dan jasa keuangan yang dimaksud serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada umumnya untuk mulai menabung. Pada Oktober 2014, telah dilakukan kegiatan edukasi keuangan dan Gerakan Indonesia Menabung kepada petani di Kabupaten Pinrang. Selain itu pada tanggal 17-19 November 2014 telah dilakukan pelatihan kewirausahaan di Kota Palopo yang diikuti oleh 60 UMKM terpilih. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung perkembangan sektor perdagangan, mengembangkan wirausaha mandiri di sektor riil dan UMKM melalui penguatan pembiayaan inklusif dan inovatif.

PERBANKAN KONSUMER

Perbankan Konsumer

Perbankan konsumer Bank Sulselbar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perbankan nasabah perorangan dalam bentuk produk simpanan dan fasilitas kredit.

Perbankan konsumer ditujukan untuk nasabah perorangan yang terdiri dari Produk Simpanan dan Produk Kredit. Produk Simpanan terbagi menjadi tiga, yaitu: Giro, Tabungan dan Deposito. Sedangkan, Produk Kredit terbagi menjadi enam, yaitu: Kredit Pegawai (Kredit Umum Lainnya/KUL), Kredit Multiguna, Kredit DPRD, Kredit Pensiunan, Kredit Pemilikan Motor dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Produk Simpanan

Bank Sulselbar menyediakan beragam produk simpanan konsumer untuk memenuhi kebutuhan perbankan nasabah. Produk simpanan yang ditawarkan kepada nasabah dilengkapi fitur-fitur yang menarik sehingga produk simpanan konsumer Bank Sulselbar memiliki daya saing dan menjadi salah satu produk pilihan nasabah. Selain itu, produk simpanan konsumer Bank Sulselbar menjadi bagian dari strategi menjaga dan meningkatkan komposisi pendanaan yang terjangkau dan kompetitif untuk menjaga tingkat likuiditas.

Lebih jauh lagi, Bank Sulselbar senantiasa berupaya melakukan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah setiap produknya guna memenuhi kebutuhan nasabah. Bank Sulselbar juga memperhatikan kualitas pelayanan dengan menyajikan *service experience* yang lebih baik kepada nasabah sebagai bentuk implementasi pelayanan prima, baik layanan yang bersifat *tangible* seperti gedung kantor dan *service hall* yang nyaman, maupun *intangible service* berupa layanan transaksi yang ramah, cepat, akurat dan aman.

Secara umum, dana yang dihimpun dari masyarakat melalui produk Bank Sulselbar dapat dikategorikan menjadi giro, tabungan dan deposito. Komposisi terbesar dana masyarakat yang dihimpun adalah Giro (termasuk Unit Usaha Syariah) sebesar 38,03% terhadap total dana pihak ketiga tahun 2014. Pertumbuhan simpanan tertinggi pada tahun 2014 adalah produk Deposito (termasuk Unit Usaha Syariah) yang mengalami peningkatan sebesar 46,38% dibandingkan posisi tahun 2013.

Berikut adalah grafik perkembangan dana pihak ketiga yang disimpan di Bank Sulselbar dalam bentuk giro, tabungan dan deposito tahun 2010 – 2014 :

Catatan : termasuk Simpanan Unit Usaha Syariah

Selain pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, selama 5 (lima) tahun terakhir Bank Sulselbar juga mencatatkan peningkatan pertumbuhan dana berbiaya murah yang berasal dari Giro (*Current Account*/CA) dan Tabungan (*Savings Account*/SA), dibandingkan Deposito Berjangka (*Time Deposit*/TD). Perkembangan komposisi CASA yang meningkat dari 29,32% pada 2013 menjadi 36,29% pada tahun 2014. Berikut adalah grafik rasio CASA – TD terhadap dana pihak ketiga yang disimpan di Bank Sulselbar tahun 2010 – 2014 :

Catatan : termasuk Simpanan Unit Usaha Syariah

Catatan : termasuk Simpanan Unit Usaha Syariah

Catatan : termasuk Simpanan Unit Usaha Syariah

Jika dilihat dari jenis usahanya, dana masyarakat yang dihimpun tahun 2014 sebagian besar diterima melalui unit usaha konvensional yaitu sebesar 94,87% dan 5,13% dari Unit Usaha Syariah. Meski demikian, seluruh unit usaha secara umum mengalami pertumbuhan setiap tahun.

Berikut adalah grafik perkembangan dana pihak ketiga yang disimpan di Bank Sulselbar berdasarkan jenis unit usaha tahun 2010 – 2014 :

Penjelasan mengenai perkembangan produk simpanan konsumer (tidak termasuk Unit Usaha Syariah), sebagai berikut :

Total dana pihak ketiga (tidak termasuk dalam Unit Usaha Syariah) tahun 2014 sebesar Rp6.570.525 juta atau meningkat 18,78% dari tahun 2013 sebesar Rp5.531.850 juta. Pendanaan Bank Sulselbar bersumber dari 357.817 rekening dana pihak ke-

tiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Pertumbuhan ini disebabkan oleh perkembangan positif simpanan konsumer Bank Sulselbar.

Simpanan (tidak termasuk Unit Usaha Syariah) dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014 adalah produk deposito yang meningkat 53,29% lebih tinggi dari tahun 2013, disusul produk giro yang tumbuh sebesar 11,28%. Adapun produk tabungan mengalami perlambatan pada tahun 2014 sebesar 0,12% lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Meski tabungan pada tahun 2014 pencapaiannya lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun proporsi tabungan terhadap total dana pihak ketiga konvensional tahun 2014 masih di atas 20%, yaitu sebesar 26,19%, sedangkan komposisi giro dan deposito masing–masing sebesar 39,86% dan 33,95%. Penurunan saldo tabungan pada tahun 2014 terjadi karena adanya *shifting* simpanan dari tabungan ke deposito sebagai dampak kebijakan Bank yang menaikkan suku bunga deposito. Bank menaikkan suku bunga deposito sebagai respon terhadap kenaikan BI *rate* untuk disesuaikan dengan suku bunga pasar.

Catatan : tidak termasuk Simpanan Unit Usaha Syariah

Catatan : tidak termasuk Simpanan Unit Usaha Syariah

Giro

Giro adalah simpanan pihak ketiga dalam mata uang Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan (misalnya bilyet giro, warkat,dll). Saldo Giro (tidak termasuk Giro Syariah) Bank Sulselbar pada tahun 2014 sebesar Rp2.619.003 juta. Jumlah tersebut lebih tinggi 11,28% dibandingkan perolehan giro tahun 2013 sebesar Rp2.353.630 juta. Tingginya pencapaian giro tahun 2014 dipengaruhi oleh meningkatnya simpanan giro pihak ketiga di luar pemerintah daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Posisi giro merupakan sumber dana terbesar terhadap total DPK (tidak termasuk Giro Syariah) yaitu sebesar 39,86% dan 99,44 % terhadap total giro konsolidasi (termasuk Giro Syariah).

Giro Bank Sulselbar tahun 2014 diklasifikasikan menjadi giro pihak berelasi dan giro pihak ketiga. Giro pihak berelasi, yakni simpanan yang memiliki hubungan dengan karyawan kunci (komisaris, direksi, pemimpin cabang dan pemimpin grup) dan

pemegang saham. Adapun, giro pihak ketiga merupakan simpanan giro yang pendanaannya bersumber nasabah masyarakat umum.

Komposisi giro pihak berelasi pada tahun 2014 adalah sebesar 4,87%, sedangkan giro pihak ketiga sebesar 95,13% terhadap total giro. Peningkatan giro dipengaruhi oleh peningkatan signifikan pada giro pihak berelasi sebesar 125,14%.

Berikut adalah data dalam bentuk tabel dan grafik mengenai jumlah giro (tidak termasuk Giro Syariah) Bank Sulselbar berdasarkan hubungan dengan Bank.

Bentuk Keterbukaan Informasi	2014	2013	2012
Iklan Publikasi Umum	30	29	21
Iklan Publikasi Laporan Keuangan Kuartal	3	3	3
Laporan Tahunan	1	1	1
Paparan Kinerja *(Financial Highlight)*	2	4	3
Advertorial	30	30	17
Press Conference	1	1	1
Media Visit	-	-	-
Media Gathering	1	-	-

Giro Bank Sulselbar
Berdasarkan Hubungan dengan Bank Tahun 2010 - 2014

	2010	2011	2012	2013	2014	Growth	
			Rp Juta			Rp Juta	%
Giro Pihak Berelasi	499.824	351.299	584.404	56.682	127.612	70.930	125,14%
Giro Pihak Ketiga	1.199.431	1.689.248	1.355.900	2.296.948	2.491.391	194.443	8,47%
Total Giro	1.699.255	2.040.547	1.940.304	2.353.630	2.619.003	265.373	11,28%

Catatan : tidak termasuk Giro Syariah

Catatan : tidak termasuk Giro Syariah

Catatan : tidak termasuk Giro Syariah

Catatan : tidak termasuk Giro Syariah

Catatan : tidak termasuk Giro Syariah

Tingkat suku bunga giro Bank Sulselbar tahun 2014, adalah sebagai berikut:

1. Jasa giro Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan sebesar 3% p.a dari saldo harian
2. Jasa giro Pemerintah Prov. Sulawesi Barat sebesar 3,5% p.a dari saldo harian
3. Jasa giro Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar 2,5% p.a dari saldo harian
4. Jasa giro Jawatan/Dinas sebesar 2% p.a dari saldo harian
5. Jasa giro pihak swasta 1,5% p.a dari saldo harian
6. Jasa giro antar bank sebesar 1% p.a dari saldo harian.
7. Jasa giro Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah sebesar 1% p.a dari saldo terendah.

Rencana Pengembangan dan Strategi Pemasaran

Simpanan giro Bank Sulselbar sebagian besar bersumber dari dana–dana pemerintah daerah, meskipun beberapa pemerintah daerah juga mulai menempatkan dananya dalam bentuk simpanan deposito. Untuk itu, Bank Sulselbar akan mengupayakan pula untuk semaksimal mungkin menghimpun dana dari non pemerintah daerah yaitu dari korporasi dan swasta. Dengan upaya tersebut, diharapkan komposisi giro pemerintah daerah dan non pemerintah daerah akan seimbang sehingga simpanan giro Bank Sulselbar akan memiliki risiko yang merata karena tidak didominasi dana pemerintah daerah saja.

Tabungan

Selama tahun 2014, total tabungan (tidak termasuk Tabungan Syariah) yang berhasil dihimpun Bank Sulselbar sebesar Rp1.721.123 juta atau lebih rendah 0,12% dari tahun 2013 sebesar Rp1.723.178 juta. Proporsi tabungan terhadap total DPK (tidak termasuk Tabungan Syariah) sebesar 26,19% sedangkan proporsinya terhadap total tabungan konsolidasi (termasuk Tabungan Syariah) adalah 96,77%.

Penurunan saldo tabungan tahun 2014 terjadi karena adanya *shifting* simpanan dari tabungan ke deposito sebagai dampak kebijakan Bank yang menaikkan suku bunga deposito. Bank menaikkan suku bunga deposito sebagai respon terhadap kenaikan BI *rate* untuk disesuaikan dengan suku bunga pasar.

Berdasarkan hubungan atau relasinya dengan Bank, jenis tabungan Bank Sulselbar terdiri dari tabungan dengan pihak berelasi dan tabungan dengan pihak ketiga. Tabungan dengan pihak berelasi, yakni simpanan yang memiliki hubungan dengan karyawan kunci (komisaris, direksi, pemimpin cabang dan pemimpin grup) dan pemegang saham. Adapun, tabungan pihak ketiga merupakan simpanan yang pendanaannya bersumber nasabah masyarakat umum.

Penghimpunan tabungan Bank Sulselbar diperoleh melalui produk Tabungan Simpeda, Tabungan Tapemda, Tabungan Tapemda Sayang Petani, Tapemda Pelajar dan Mahasiswa, Tapemda Pensiunan, Tabungan Haji, Tabungan Masa Depan (Tampan), Tabungan-KU dan Tabungan Tapemda bantuan siswa.

Tabel dan grafik berikut menyajikan data mengenai tabungan Bank Sulselbar (tidak termasuk Tabungan Syariah) berdasarkan jenis produk dan relasi :

Jenis Tabungan	2010	2011	2012	2013	2014	Growth 2013 - 2014		Proporsi
			Rp Juta			Rp Juta	%	
Simpeda	715.366	843.433	996.079	1.109.627	1.198.960	89.333	8,05%	69,66%
Tampan	0	22.085	69.164	70.875	75.734	4.859	6,86%	4,40%
Tapemda	174.171	182.209	202.522	166.298	193.846	27.548	16,57%	11,26%
Tapemda Pelajar dan Mahasiswa	0	87	78	63	529	466	739,95%	0,03%
Tapemda Sayang Petani	34.443	46.566	36.305	31.452	26.012	(5.440)	(17,30%)	1,51%
Tapemda Pensiunan	0	422	42.727	57.645	57.609	(36)	(0,06%)	3,35%
Tapemda Bantuan Siswa	0	0	0	233.419	92.133	(141.286)	(60,53%)	5,35%
Tabungan-Ku	11.689	12.648	25.374	27.682	49.875	22.193	80,17%	2,90%
Tabungan Haji	18.783	20.922	23.631	26.117	26.426	309	1,18%	1,54%
Total Tabungan	**954.452**	**1.128.372**	**1.395.880**	**1.723.178**	**1.721.123**	**(2.055)**	**(0,12%)**	**100,00%**

Catatan : tidak termasuk Tabungan Syariah

Tabungan Bank Sulselbar

Berdasarkan Hubungan dengn Bank Tahun 2010 - 2014

	2010	2011	2012	2013	2014	Growth	
			Rp Juta			Rp Juta	%
Tabungan Pihak Berelasi	4.111	4.604	5.049	7.388	15.296	7.908	107,04%
Tabungan Pihak Ketiga	950.341	1.123.768	1.390.831	1.715.790	1.705.827	(9.963)	(0,58%)
Total Tabungan	954.452	1.128.372	1.395.880	1.723.178	1.721.123	(2.055)	(0,12%)

Catatan : tidak termasuk Tabungan Syariah

Catatan : tidak termasuk Tabungan Syariah

Catatan : tidak termasuk Tabungan Syariah

Catatan : tidak termasuk Tabungan Syariah

Rencana Pengembangan dan Strategi Pemasaran

Bank Sulselbar melakukan upaya dan strategi pemasaran untuk mendorong peningkatan portofolio tabungan demi memperkuat pertumbuhan dana konsumer. Beberapa hal yang dilakukan antara lain mengembangkan fitur produk, pemasaran yang aktif, peningkatan kualitas layanan dan perluasan jaringan kantor serta *delivery channel* untuk memudahkan nasabah menjangkau layanan Bank Sulselbar.

Tabungan Simpeda

Tabungan Simpeda adalah jenis simpanan BPD seluruh Indonesia yang memberikan banyak keuntungan dan kemudahan bagi nasabah. Tabungan Simpeda diperuntukkan bagi perseorangan, yayasan, badan hukum, dan lembaga lainnya. Manfaat Tabungan Simpeda antara lain fasilitas Real Time On-Line *System* sehingga akun tabungan dapat dibuka dan transaksi dapat dilakukan di seluruh kantor operasional Bank Sulselbar.

Nasabah Tabungan Simpeda Bank Sulselbar memiliki kesempatan untuk mendapatkan undian berhadiah uang tunai melalui Program Panen Rejeki BPD. Program tersebut merupakan program undian berhadiah Tabungan Simpeda yang diselenggarakan oleh ASBANDA (Asosiasi Bank Daerah) dengan mengikutsertakan seluruh nasabah Tabungan Simpeda BPD Seluruh Indonesia (BPDSI). Total hadiah undian Panen Rejeki BPD sebesar Rp 6 miliar yang pengundiannya diselenggarakan dua kali (dua periode) dalam satu tahun dengan hadiah masing – masing periode adalah Rp 3 miliar.

Suku bunga Tabungan Simpeda Bank Sulselbar tahun 2014 diberlakukan secara tiering ditampilkan dalam tabel berikut

Tabel Suku Bunga Tabungan Simpeda Tahun 2014

Tier	Saldo	Rate
I	Sampai dengan Rp2.000.000,-	0%
II	> Rp2.000.000 - Rp5.000.000,-	0,25% p.a
III	> Rp5.000.001 - Rp10.000.000,-	0,50% p.a
IV	> Rp10.000.001 - Rp500.000.000,-	2% p.a
V	> Rp500.000.001	3% p.a

Jumlah saldo Tabungan Simpeda tahun 2014 sebesar Rp1.198.960 juta atau 8,05% lebih tingga dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp1.109.627 juta. Jumlah nasabah Tabungan Simpeda pada tahun 2014 sebanyak 192.818 nasabah atau 1,66% lebih rendah dari tahun 2013 sebanyak 196.065 nasabah. Saldo Tabungan Simpeda tahun 2014 mendominasi total tabungan konvensional (tidak termasuk Tabungan Syariah) sebesar 69,66%. Terhadap keseluruhan total tabungan Bank Sulselbar tahun 2014 (termasuk Tabungan Syariah), proporsi Tabungan Simpeda sebesar 67,41%.

Tabungan Tapemda

Dalam rangka meningkatkan potensi dan mendorong pertumbuhan *outstanding* Tabungan Tapemda, Bank Sulselbar telah melakukan *repackaging* produk dengan membagi segmen nasabah berdasarkan pekerjaan dan tingkat suku bunga yang berjenjang (*tiering*) serta kompetitif untuk masing – masing segmen.

1. **Tabungan Tapemda**

   Tabungan Tapemda Bank Sulselbar diperuntukkan bagi nasabah kredit atau debitur kredit produktif Bank Sulselbar dengan setoran awal pembukaan rekening yang relatif terjangkau. Tabungan Tapemda pada tahun 2014 realisasinya sebesar Rp193.846 juta atau meningkat 16,57% dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp166.298 juta. Jumlah nasabah Tabungan Tapemda mengalami penurunan 0,58% dari 50.001 nasabah pada tahun 2013 menjadi 49.709 nasabah pada tahun 2014. Penurunan jumlah nasabah Tabungan Tapemda pada tahun 2014 disebabkan beberapa debitur kredit produktif melakukan pelunasan atas pinjamannya pada Bank Sulselbar.

   Komposisi Tapemda terhadap total tabungan konvensional (tidak termasuk Tabungan Syariah) adalah sebesar 11,26% dan terhadap total tabungan secara keseluruhan (termasuk Tabungan syariah) sebesar 10,90%.

Tabel Suku Bunga Tabungan Tapemda Tahun 2014

Saldo	Rate
Kurang dari Rp500.000,-	0%
> Rp500.001 - Rp10.000.000,-	1% p.a
> Rp10.000.001 - Rp250.000.000,-	1,50% p.a
> Rp250.000.001	2% p.a

2. **Tabungan Tapemda Sayang Petani**

Segmentasi Tabungan Tapemda Sayang Petani yakni bagi para petani dan nelayan untuk membangun kebiasaan positif menabung dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk disimpan pada bank dan mengurangi belanja untuk kebutuhan konsumtif.

Tabungan Tapemda Sayang Petani tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan setoran awal pembukaan rekening relatif terjangkau.

Suku bunga Tabungan Tapemda Sayang Petani Bank Sulselbar tahun 2014 diberlakukan bertingkat berdasarkan jumlah saldo simpanan yang ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel Suku Bunga Tabungan Tapemda Sayang Petani Tahun 2014

Saldo	Rate
Kurang dari Rp500.000,-	0%
> Rp500.001 - Rp10.000.000,-	1% p.a
> Rp10.000.001 - Rp250.000.000,-	1,50% p.a
> Rp250.000.001	2% p.a

Tabungan Tapemda Sayang Petani pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp26.012 juta atau 17,30% lebih rendah dari Rp31.452 juta pada tahun 2013. Proporsi Tapemda Sayang Petani terhadap total tabungan konvensional (tidak termasuk Tabungan Syariah) sebesar 1,51% dan terhadap total tabungan secara keseluruhan (termasuk Tabungan Syariah) sebesar 1,46%. Jumlah nasabah Tapemda Sayang Petani pada tahun 2014 meningkat 10,68% yakni dari 23.691 nasabah menjadi 26.222 nasabah.

3. **Tabungan Tapemda Pelajar dan Mahasiswa**

Tabungan Tapemda Pelajar dan Mahasiswa merupakan produk simpanan diperuntukkan bagi pelajar (SD, SMP, dan SMA) dan mahasiswa yang bertujuan menanamkan kebiasaan menabung untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Tabungan Tapemda Pelajar dan Mahasiswa tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan setoran awal pembukaan rekening relatif terjangkau.

Selama tahun 2014, Tabungan Tapemda Pelajar dan Mahasiswa terealisasikan sebesar Rp529 juta atau lebih tinggi 739,95% dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp63 juta. Peningkatan saldo Tabungan Tapemda Pelajar dan Mahasiswa disebabkan adanya pencairan Bantuan SPP Gratis kepada 24.202 mahasiswa perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Bantuan SPP Gratis merupakan program Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan yang memberikan bantuan beasiswa pendidikna kepada mahasiswa, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Tingkat suku bunga Tabungan Tapemda Pelajar dan Mahasiswa Bank Sulselbar tahun 2014 diberlakukan bertingkat berdasarkan jumlah saldo simpanan disajikan pada tabel berikut :

Tabel Suku Bunga Tabungan Tapemda Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2014

Saldo	Rate
Kurang dari Rp500.000,-	0%
> Rp500.001 - Rp10.000.000,-	1% p.a
> Rp10.000.001 - Rp250.000.000,-	1,50% p.a
> Rp250.000.001	2% p.a

Catatan : Tabungan Tapemda Pelajar & Mahasiswa mulai diluncurkan pada tahun 2011

4. **Tabungan Tapemda Pensiunan**

Tabungan Tapemda Pensiunan merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi pensiunan PNS yang penerimaan gaji pensiunannya melalui Bank Sulselbar. Tabungan Tapemda Pensiunan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan setoran awal pembukaan rekening juga relatif terjangkau.

Tabungan Tapemda Pensiunan pada tahun 2014 lebih rendah 0,06% dari Rp57.645 juta pada tahun 2013 menjadi Rp57.609 juta pada tahun 2013. Proporsi Tabungan Tapemda Pensiunan terhadap total tabungan konvensional (tidak termasuk Tabun-

gan Syariah) sebesar 3,35% dan terhadap total tabungan secara keseluruhan (termasuk Tabungan Syariah) sebesar 3,24%.

Tabel Suku Bunga Tabungan Tapemda Tahun 2014

Saldo	Rate
Kurang dari Rp500.000,-	0%
> Rp500.001 - Rp10.000.000,-	1% p.a
> Rp10.000.001 - Rp250.000.000,-	1,50% p.a
> Rp250.000.001	2% p.a

Catatan : Tabungan Tapemda Pensiunan awalnya merupakan Tabungan Tapemda. Dan pada tahun 2011, dilakukan segmentasi dan pemisahan antara produk Tabungan Tapemda dan Tabungan Tapemda Pensiunan.

5. **Tabungan Haji**

Tabungan Haji merupakan simpanan yang bertujuan membantu nasabah dalam mewujudkan niat melaksanakan ibadah haji. Suku bunga Tabungan Haji Bank Sulselbar tahun 2014 sebesar 3% p.a dari saldo harian. Dalam pemberian bunga Tabungan Haji Bank Sulselbar (balas jasa), nasabah diberikan pilihan bunga tabungan (balas jasa) sebagai berikut :

a. Bersedia menerima bunga tabungan (balas jasa).

b. Bunga tabungan (balas jasa) disalurkan ke Badan atau Yayasan yang dipilih nasabah.

c. Tidak menginginkan bunga tabungan (balas jasa).

Selama tahun 2014, Tabungan Haji Bank Sulselbar sebesar Rp26.426 juta atau 1,18% lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp26.117 juta. Proporsi Tabungan Haji terhadap total tabungan konvensional (tidak termasuk Tabungan Syariah) sebesar 1,54% dan terhadap total tabungan secara keseluruhan (termasuk Tabungan Syariah) sebesar 1,49%.

6. **Tabungan Masa Depan (Tampan)**

Tabungan Masa Depan (Tampan) merupakan tabungan berjangka dalam mata uang Rupiah untuk mewujudkan rencana masa depan nasabah penabung dengan sistem setoran rutin bulanan tetap yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penabung. Sebagai produk simpanan yang mewajibkan nasabah untuk melakukan penyetoran secara rutin setiap bulannya selama jangka waktu tertentu, maka periode jangka waktu Tabungan Tampan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.

Tabungan Tampan dicairkan pada saat jatuh tempo dan pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan *penalty break* sesuai ketentuan bank.

Tingkat suku bunga Tabungan Masa Depan Bank Sulselbar Tahun 2014 yakni untuk jangka waktu 1 - 3 tahun sebesar 4,50% dan jangka waktu 4 – 5 tahun sebesar 5,00%.

Saldo Tabungan Tampan pada tahun 2014 sebesar Rp75.734 juta atau meningkat 6,86% dari tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp70.875 juta. Proporsi Tabungan Tampan terhadap total tabungan konvensional (tidak termasuk Tabungan Syariah) sebesar 4,40% dan terhadap total tabungan secara keseluruhan (termasuk Tabungan Syariah) sebesar 4,26%. Selama tahun 2014, jumlah nasabah Tabungan Tampan sebanyak 20.358 nasabah atau menurun 16,13% dibandingkan tahun 2013 sebanyak 24.273 nasabah. Penurunan jumlah nasabah Tabungan Tampan disebabkan beberapa rekening Tabungan Tampan yang jatuh tempo, terutama yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Berikut adalah tabel yang menampilkan data Tabungan Masa Depan berdasarkan jangka waktu penempatan dana.

Catatan : Tabungan Tampan mulai diluncurkan pada tahun 2011

Tabungan Tampan Bank Sulselbar Berdasarkan Jangka Waktu Tahun 2010 - 2014

Jangka waktu	2010	2011	2012	2013	2014
			Rp Juta		
1 tahun	n.a	266	2.069	6.729	6.657
2 tahun	n.a	13.559	41.936	21.845	23.682
3 tahun	n.a	3.203	9.637	16.104	8.263
4 tahun	n.a	674	2.263	3.825	5.455
5 tahun	n.a	4.383	13.259	22.372	31.677
Total Tampan	**n.a**	**22.085**	**69.164**	**70.875**	**75.734**

Catatan : Tabungan Tampan mulai diluncurkan pada tahun 2011

7. **TabunganKU**

TabunganKu diperuntukkan bagi perorangan Warga Negara Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan yang diselenggarakan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TabunganKU tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan setoran awal pembukaan rekening juga relatif terjangkau.

Saldo simpanan TabunganKU pada tahun 2014 meningkat 80,17% dari Rp27.682 juta pada tahun 2013 menjadi Rp49.875 juta pada tahun 2014. Porsi TabunganKU terhadap total tabungan konvensional (tidak termasuk Tabungan Syariah) sebesar 2,90% dan terhadap total tabungan secara keseluruhan (termasuk Tabungan Syariah) sebesar 2,80%.

Suku bunga TabunganKU Bank Sulselbar tahun 2014 diberlakukan secara bertingkat dan ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel Suku Bunga TabunganKU Tahun 2014

Saldo	Rate
Kurang dari Rp500.000,-	0%
> Rp500.001 - Rp1.000.000,-	0,25% p.a
> Rp1.000.001 ,-	1,00% p.a

8. **Tabungan Tapemda Bantuan Siswa**

Tabungan Tapemda Bantuan Siswa adalah simpanan yang diperuntukkan bagi pelajar penerima beasiswa BSM (Bantuan Siswa Miskin) yang merupakan program pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan, yang berlangsung sejak tahun 2013. Pemerintah berkomitmen memberikan bantuan pendidikan bagi pelajar yang kurang mampu secara finansial, mulai tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan tingkat menengah atas (SMA), untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikannya. Tabungan Tapemda Bantuan Siswa merupakan produk turunan dari Tabungan Tapemda yang disegmentasikan khusus bagi pelajar penerima beasiswa BSM.

Saldo Tabungan Tapemda Bantuan Siswa pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp92.133 juta atau lebih rendah 60,53% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp233.419 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh karena adanya pengembalian dana ke Kementerian Pendidikan dan peralihan pengelolaan bantuan BSM dari BPD ke Bank BRI. Meskipun terjadi peralihan pengelolaan, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap total tabungan selama tahun 2014.

Proporsi Tabungan Tapemda Bantuan Siswa terhadap total tabungan konvensional (tidak termasuk Tabungan Syariah) sebesar 5,35% dan terhadap total tabungan secara keseluruhan (termasuk Tabungan Syariah) sebesar 5,18%.

Deposito

Deposito merupakan simpanan pihak ketiga dalam Rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara Bank dengan nasabah. Atas simpanan tersebut, Bank Sulselbar memberi bunga sesuai suku bunga yang ditetapkan pada waktu perjanjian atau persetujuan dibuat (*counter rate*).

Deposito Bank Sulselbar berdasarkan hubungan atau relasinya dengan Bank, terdiri dari deposito dengan pihak berelasi dan deposito dengan pihak ketiga. Deposito pihak berelasi, yakni simpanan yang memiliki hubungan dengan karyawan kunci (komisaris, direksi, pemimpin cabang dan pemimpin grup) dan pemegang saham. Adapun, deposito pihak ketiga merupakan simpanan berjangka yang pendanaannya bersumber nasabah masyarakat umum.

Suku bunga deposito Bank Sulselbar pada tahun 2014 ditampilkan pada tabel berikut :

Suku Bunga Deposito Tahun 2014

Jangka Waktu	Rate
1 (satu) bulan	7,00%
3 (tiga) bulan	7,00%
6 (enam) bulan	7,50%
12 (dua belas) bulan	7,50%

Selain suku bunga yang telah ditampilkan sebelumnya, Bank Sulselbar juga memberikan *special rate* Deposito untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan, sebagai berikut:

Special Rate Suku Bunga Deposito Tahun 2014

Jangka Waktu	Rate	Nominal Penempatan
1 (satu) bulan	10,00%	minimal penempatan > Rp250 juta
3 (tiga) bulan	7,00%	minimal penempatan > Rp250 juta

Selama tahun 2014, Deposito Bank Sulselbar (tidak termasuk Tabungan Syariah) mengalami peningkatan sebesar 53,29% dari Rp1.455.042 juta pada tahun 2013 menjadi Rp2.230.399 pada tahun 2014. Peningkatan deposito yang signifikan pada tahun 2014 disebabkan oleh adanya pemberian *special rate* untuk nominal simpanan dan jangka waktu tertentu pada akhir tahun 2014.

Selain itu, pertumbuhan Deposito tahun 2014 juga didorong oleh keberhasilan Bank dalam mengakuisisi deposan institusional yang didominasi oleh nasabah pada Kantor Cabang Jakarta.

Persentase komposisi deposito terhadap total dana pihak ketiga konvensional (tidak termasuk Deposito Syariah) pada tahun 2014 sebesar 33,95% dan terhadap total deposito (termasuk Deposito Syariah) sebesar 88,73%.

Jumlah nasabah simpanan deposito pada tahun 2014 sebanyak 2.883 nasabah atau meningkat 12,84% dari tahun 2013 sebanyak 2.555 nasabah. Selama tahun 2014, Bank Sulselbar tidak melakukan aktivitas promosi untuk produk deposito.

Berikut adalah tabel dan grafik yang menampilkan data deposito (tidak termasuk Deposito Syariah) Bank Sulselbar berdasarkan hubungan nasabah dengan Bank :

Deposito Bank Sulselbar
Berdasarkan Hubungan dengn Bank Tahun 2010 – 2014

	2010	2011	2012	2013	2014	Growth	
	Rp Juta					Rp Juta	%
Deposito Pihak Berelasi	12.080	12.080	59.165	1.315	820	(495)	-37,64%
Deposito Pihak Ketiga	1.972.602	1.972.602	1.767.055	1.453.727	2.229.579	775.852	53,37%
Total Tabungan	1.984.682	**1.984.682**	**1.826.220**	**1.455.042**	**2.230.399**	**775.357**	**53,29%**

Catatan : tidak termasuk Deposito Syariah

Catatan : tidak termasuk Deposito Syariah

Catatan : tidak termasuk Deposito Syariah

Catatan : tidak termasuk Deposito Syariah

Produk Kredit

Pembiayaan konsumer Bank Sulselbar melalui penyaluran kredit tetap menjadi usaha inti (*core business*) Bank Sulselbar. Komposisi dan kontribusi kredit konsumer cukup besar terhadap total penyaluran kredit secara keseluruhan dan berkontribusi terhadap total pendapatan.

Selama tahun 2014, penyaluran kredit konsumer (tidak termasuk Unit Usaha Syariah) tahun 2014 sebesar Rp6.002.074 juta atau meningkat 16,05% dari tahun 2013 sebesar Rp5.172.112 juta. Proporsi penyaluran kredit konsumer Bank Sulselbar tahun 2014 mencapai 85,32% dari total penyaluran kredit secara keseluruhan (tidak termasuk Unit Usaha Syariah). Pertumbuhan penyaluran kredit konsumer pada tahun 2014 sejalan pula dengan peningkatan kemampuan pengelolaan kualitas aset bank.

Berikut adalah tabel dan grafik yang menampilkan data kredit konsumer Bank Sulselbar (tidak termasuk Unit Usaha Syariah) :

Kredit Konsumer Bank Sulselbar Tahun 2010 - 2014

	2010	2011	2012	2013	2014	Growth		Proporsi
	Rp Juta					Rp Juta	%	
KPR	40.202	26.145	14.878	110.612	4.037	(106.575)	(96,35%)	0,07%
Kredit Umum Lainnya	2.707.432	3.454.681	4.326.670	5.061.500	5.998.036	936.536	18,50%	99,93%
Total Kredit Konsumer	2.747.634	**3.480.826**	**4.341.548**	**5.172.112**	**6.002.074**	**829.961**	**16,05%**	**100,00%**

Catatan : tidak termasuk Unit Usaha Syariah

Catatan : tidak termasuk Unit Usaha Syariah

Rencana Pengembangan dan Strategi Pemasaran

Untuk meningkatkan potensi kredit konsumer yang menjadi bisnis utama Bank Sulselbar dengan mempertahankan tingkat kolektibilitas agar tetap terjaga pada ambang batas yang aman, maka rencana strategis yang ditempuh antara lain mengembangkan fitur produk skim kredit konsumer, penetapan tingkat suku bunga yang kompetitif, melakukan penyempurnaan proses bisnis dengan tetap memperhatikan kecepatan proses dan kualitas kredit yang baik serta memperluas jaringan kantor Bank Sulselbar sehingga mudah diakses oleh nasabah dan masyarakat.

Produk kredit konsumer Bank Sulselbar tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut :

1. Kredit Pegawai (Kredit Umum Lainnya/KUL)

   Kredit Pegawai (KUL) merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya ditatausahakan atau dibayarkan melalui Bank Sulselbar. Kredit ini diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tujuan penggunaannya bersifat konsumtif. Suku bunga KUL tahun 2014 adalah sebesar 16% p.a dihitung secara efektif bulanan dengan angsuran tetap.

	2014	2013	2012
Kredit Pegawai (Rp Juta)	Rp6.040.126	Rp5.170.011	Rp4.314.363
Kredit Pegawai (Rp Juta)	68.318	64.215	57.210

2. Kredit Multiguna

Kredit Multiguna merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Pensiunan untuk memenuhi kebutuhan pegawai/pensiunan yang sifatnya mendesak, seperti misalnya pembayaran biaya anak sekolah. Penerima fasilitas Kredit Multiguna adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiunan yang gajinya dibayarkan melalui Bank Sulselbar. Suku bunga kredit multiguna tahun 2014 sebesar 9% p.a dihitung secara efektif bulanan dengan angsuran tetap.

	2014	2013	2012
Kredit Multiguna (Rp Juta)	Rp47.124	Rp40.005	Rp36.112
Debitur	2.170	1.901	1.724

3. Kredit DPRD

Skema Kredit DPRD diselenggarakan untuk peningkatan kesejahteraan anggota Dewan (DPRD). Penerima fasilitas kredit adalah Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang penghasilann ya dibayar melalui Bank Sulselbar. Suku bunga kredit DPRD tahun 2014 sebesar 16% p.a dihitung secara efektif bulanan dengan angsuran tetap.

	2014	2013	2012
Kredit DPRD (Rp Juta)	Rp21.072	Rp19.442	Rp17.110
Debitur	979	921	865

4. Kredit Pensiunan

Kredit Pensiunan adalah kredit yang diberikan kepada pensiun pegawai/janda/duda dan yatim piatu yang gajinya ditatausahakan atau dibayarkan melalui Bank Sulselbar. Kredit Pensiunan merupakan upaya untuk membantu pensiunan pegawai negeri/janda/duda dan yatim piatu yang berpenghasilan tetap dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Suku bunga Kredit Pensiunan tahun 2014 adalah sebesar 17% p.a dihitung secara efektif bulanan dengan angsuran tetap.

	2014	2013	2012
Kredit Pensiunan (Rp Juta)	Rp7.035	Rp5.436	Rp4.972

5. Kredit Pemilikan Rumah

Kredit Pemilikan Rumah KPR bertujuan untuk pembelian dan pembiayaan unit hunian baru maupun hunian lama/bekas berupa rumah tinggal, rumah susun, apartemen, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), toko, kios, kantor. Kredit Pemilikan Rumah dipertuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS), anggota Mengembangkan fitur produk kredit konsumer, melakukan penyempurnaan proses bisnis dengan tetap memperhatikan kecepatan proses dan kualitas kredit yang baik serta memperluas jaringan kantor Bank Sulselbar sehingga mudah diakses oleh nasabah dan masyarakat TNI/POLRI, anggota DPRD, karyawan atau pegawai BUMD termasuk juga pegawai Bank Sulselbar / BUMN / perusahaan swasta nasional / lainnya, profesional, wiraswasta (pengusaha) yang direkomendasi dan disetujui oleh Kantor Pusat. Suku bunga kredit pemilikan rumah tahun 2014 sebesar 17% p.a dihitung secara efektif bulanan dengan angsuran tetap.

	2014	2013	2012
Kredit Pemilikan Rumah (Rp Juta)	Rp3.833	Rp4.016	Rp4.331
Debitur	442	461	490

Layanan Perbankan Konsumer Lainnya

Selain penghimpunan dana dan menyalurkan kredit, Bank Sulselbar juga menyediakan layanan berbasis biaya sebagai sumber pendapatan *fee based income*, sebagai berikut:

Kartu Konsumer

1. **ATM Bank Sulselbar**

Kartu ATM Bank Sulselbar tergabung dalam jaringan ATM Bersama dan jaringan ATM Prima yang dapat diakses pada puluhan ribu terminal ATM berlogo ATM Bersama dan ATM Prima di seluruh Indonesia. Untuk memudahkan nasabah memenuhi transaksi keuangan dan perbankan, Bank Sulselbar telah melengkapi Kartu ATM Bank Sulselbar dengan berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah. Fitur – fitur layanan ATM Bank Sulselbar antara lain informasi saldo, penarikan tunai, transfer antar bank, fasilitas pembayaran tagihan (listrik, telepon seluler pasca bayar), dan pembelian pulsa (top up) telepon seluler pra bayar, yang dilakukan dengan mendebet

secara otomatis dari rekening nasabah.

Kartu ATM Bank Sulselbar dapat digunakan pada lebih dari 49.000 jaringan ATM Bersama dan 73.000 jaringan ATM Prima untuk transaksi informasi saldo, tarik tunai dan transfer.

Jumlah pemegang Kartu ATM Bank Sulselbar sampai dengan tahun 2014 berjumlah 44.247 pemegang kartu, yang berarti meningkat 4,11% dibandingkan tahun 2013.

Berikut ini tabel jumlah pemegang Kartu ATM Bank Sulselbar Tahun 2012 – 2014 :

Jumlah Pemegang Kartu ATM Bank Sulselbar Tahun 2012 - 2014

	2012	2013	2014
Silver	23.291	41.826	43.437
Gold	139	278	337
Platinum	314	395	473
Jumlah Pemegang Kartu	**23.744**	**42.499**	**44.247**

2. **Kartu PNS Elektronik (KPE)**

Kartu PNS Elektronik (KPE) merupakan kartu identitas PNS yang dapat digunakan untuk menerima dana pensiun PNS dan mendapatkan pelayanan lainnya di bidang kepegawaian, pengendalian data kepegawaian serta perbankan yang telah mendapatkan legitimasi berdasarkan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik. Dalam rangka memfasilitasi fungsi perbankan dan mengoptimalkan kartu KPE, Bank Sulselbar bekerjasama dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara). KPE dapat digunakan untuk melakukan aktivitas perbankan yaitu sebagai Kartu ATM dengan layanan yang sama dengan layanan Kartu ATM nasabah Bank Sulselbar, seperti informasi saldo, penarikan tunai, transfer antar bank, fasilitas pembayaran tagihan (listrik, telepon seluler pasca bayar), dan pembelian pulsa (top up) telepon seluler pra bayar, yang dilakukan dengan mendebet secara otomatis dari rekening nasabah. Pemegang Kartu KPE berlogo Bank Sulselbar dipergunkan oleh seluruh PNS di Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. PNS pemegang Kartu KPE berlogo Bank Sulselbar sampai dengan Desember 2014 sebanyak 159.795 pemegang kartu.

3. **Kartu Kredit Co-Brand**

   Dalam rangka melengkapi produk yang dapat memenuhi keperluan transaksi non-tunai nasabah untuk berbelanja, Bank Sulselbar bekerjasama dengan Bank Mandiri telah melakukan kerjasama *co-branding* penerbitan Kartu Kredit *Co-Brand* Bank Sulselbar. Dengan adanya layanan kartu kredit *co-brand*, para nasabah Kartu Kredit Co-Brand Bank Sulselbar dapat melakukan transaksi berbelanja pada seluruh *merchant* berjaringan Visa di dalam maupun di luar negeri.

Layanan Konsumer Lainnya

1. **Kiriman Uang Dalam Negeri**

   Kiriman Uang merupakan fasilitas perbankan untuk mengirim/membayar dengan menyetorkan uang

   tunai atau atas beban rekening nasabah non tunai kepada seseorang/perusahaan/nasabah di tempat lain berdasarkan perintah nasabah kepada bank. Jasa Kiriman Uang Bank Sulselbar terdiri dari kiriman uang masuk dan kiriman uang keluar.

2. **Inkasso**

   Inkasso merupakan jasa penagihan atas warkat dari bank lain yang telah diterbitkan oleh nasabahnya yang berada pada lokasi yang berbeda. Dalam jasa Inkasso, Bank melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang ditunjuk pemberi amanat.

3. **Transfer BI-RTGS**

   Transfer BI-RTGS merupakan layanan jasa sistem transfer dana elektronik antar bank peserta BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

4. **Penerimaan Pembayaran Tagihan *Billing Provider***

   Bank Sulselbar memberikan layanan penerimaan pembayaran tagihan (*billing provider*) yang selain dapat dilakukan melalui ATM, dapat juga dilakukan melalui counter pembayaran yang disiapkan bank. Pembayaran tagihan yang dilayani pada counter bank antara lain *fix phone*/telepon rumah (Telkom), pembayaran listrik (PLN), telepon seluler, pra dan pasca bayar, dan pajak.

5. ***SMS Banking***

   Bank Sulselbar menyediakan layanan *mobile* untuk transaksi perbankan dengan menggunakan telepon seluler. SMS Banking Bank Sulselbar menyediakan fasilitas layanan perbankan yang memudahkan nasabah untuk melakukan informasi saldo dan isi ulang pulsa. SMS Banking Bank Sulselbar dapat diakses dengan menggunakan perintah SMS biasa.

6. **Pembayaran Gaji**

   Bank Sulselbar dengan pemegang saham yang terdiri dari pemerintah daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat juga bertanggunjawab dalam penatakelolaan gaji sekitar 170.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

PERBANKAN KOMERSIL

Perbankan Komersial

Perbankan konsumer (*consumer banking*) Bank Sulselbar ditujukan untuk segmen komersial dan korporasi dengan menekankan pada pembiayaan sektor produktif. Penyaluran kredit di sektor ini menggunakan sumber dana yang berasal dari internal Bank Sulselbar dan juga melalui sindikasi kredit bersama bank lain, terutama untuk kebutuhan pembiayaan di atas Rp 500 juta. Produk perbankan komersial dan korporasi Bank Sulselbar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kredit Usaha Mandiri (KUM)

   KUM diselenggarakan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit produktif, khususnya yang dikelola oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik oleh suami maupun istri yang memiliki usaha dan/atau mengelola usaha produktif. Jenis kredit yang disalurkan untuk KUM terdiri dari Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk merehabilitasi atau modernisasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha, dan Kredit Modal Kerja, yaitu kredit untuk memenuhi kebutuhan modal kerja melalui pembiayaan aktiva lancar perusahaan. Tingkat suku bunga KUM diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Direksi. Suku bunga KUM tahun 2014 adalah sebesar 16% p.a dihitung secara efektif bulanan dengan angsuran tetap.

	2014	2013	2012
Kredit Usaha Mandiri (Rp Juta)	Rp 471 juta	Rp971 juta	Rp1.734 juta
Debitur	**3.705**	**5.871**	**6.795**

2. Kredit PEMDA

   Kredit PEMDA merupakan kredit pembiayaan program–program pemerintah daerah pada semua sektor yang telah dialokasikan pada setiap tahun anggaran sebagai optimalisasi peranan Bank Sulselbar dalam berkontribusi pada pembangunan daerah.

   Penyaluran Kredit PEMDA menjadi alternatif sumber pembiayaan APBD dan/atau menutup kekurangan kas daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Selain itu, Kredit PEM DA dapat juga digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Suku bunga kredit PEMDA tahun 2014 sebagai berikut :

   a. Kredit PEMDA Investasi sebesar 15% p.a dihitung dari saldo pokok.

b. Kredit PEMDA Modal Kerja sebesar 15% p.a dihitung dari saldo pokok.

	2014	2013	2012
Kredit PEMDA (Rp Juta)	-	-	Rp48 juta
Debitur	-	-	10

3. Kredit Konstruksi

Kredit Konstruksi diselenggarakan dengan tujuan untuk mengoptimalisasi peranan Bank Sulselbar dalam berkonstribusi pada pembiayaan program-program pemerintah daerah pada semua sektor yang telah dialokasikan pada setiap tahun anggaran.

Keberadaan Kredit Konstruksi juga bermanfaat untuk menggerakkan sektor riil dan berperan sebagai Agent of Develoment. Skema Kredit Konstruksi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi yang membutuhkan modal kerja untuk melaksanakan proyek pembangunan yang bersumber dari dana APBD kabupaten, kota dan provinsi serta APBN yang dananya ditatausahakan pada Bank Sulselbar maupun di luar Bank Sulselbar. Suku bunga Kredit Konstruksi tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Kredit Konstruksi Investasi

Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, suku bunga Kredit Konstruksi adalah sebesar 9% yang dihitung berdasarkan saldo pokok, sedangkan untuk jangka waktu di atas 1 (satu) tahun, suku bunga Kredit Konstruksi adalah sebesar 19% p.a - 22% p.a. dihitung berdasarkan saldo pokok.

b. Kredit Konstruksi Modal Kerja

Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, suku bunga Kredit Konstruksi adalah sebesar 9 % yang dihitung berdasarkan saldo pokok, sedangkan untuk jangka waktu di atas 1 (satu) tahun, suku bunga Kredit Konstruksi adalah sebesar 18% p.a - 21% p.a. dihitung berdasarkan saldo pokok.

	2014	2013	2012
Kredit Konstruksi (Rp Juta)	Rp7 juta	Rp4 juta	Rp4 juta
Debitur	215	120	95

4. Kredit Sindikasi

   Kredit Sindikasi diselenggakan untuk membiayai proyek–proyek pembangunan yang belum mampu dilakukan oleh Bank Sulselbar dengan dana maupun resources sendiri akibat keterbatasan yang dimiliki.

   Sebagai wujud peran serta Bank Sulselbar dalam pembangunan nasional secara umum maupun pembangunan daerah, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, maka Bank Sulselbar berpartisipasi bersama Bank lain dalam Kredit Sindikasi. Suku bunga kredit sindikasi Bank Sulselbar mengikuti rate dari leading proyek sindikasi karena Bank Sulselbar hanya berperan sebagai participant.

   Keikutsertaan Bank Sulselbar dalam pinjaman sindikasi dengan Bank lain atas kredit yang diberikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah:

   a. Rp15.179 juta dan Rp15.446 juta untuk PT. Perusahaan Listrik Negara, dengan tingkat partisipasi sebesar 1,56%.
   b. Rp8.692 juta dan Rp11.249 juta untuk PT. Semen Tonasa, dengan tingkat partisipasi 1,66% .
   c. Keikutsertaan Bank Sulselbar dalam Kredit Sindikasi dengan Bank lain adalah atas pembiayaan Syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan jumlah Rp35.699 juta untuk PT Amanah Finance. Persentase keikutsertaan Bank Sulselbar atas sindikasi tersebut adalah 26,74%.

Sebagai penyedia solusi total perbankan, Bank Sulselbar juga menyediakan layanan bagi lembaga, seperti :

1. **Bank Garansi (Jaminan Bank)**

   Bank Garansi (Jaminan Bank) merupakan semua bentuk garansi atau jaminan yang diterima atau diberikan oleh Bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak ketiga yang menerima jaminan apabila pihak yang dijaminkan tersebut wanprestasi atau cidera janji. Bank Garansi (Jaminan Bank) yang diberikan kepada nasabah bertujuan untuk memberikan bantuan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan agar dapat memperlancar transaksi atau kegiatan yang sedang dijalankannya.
2. **Surat Keterangan Bank (Referensi Bank)**

   Surat Keterangan Bank merupakan surat resmi yang dapat digunakan oleh nasabah sebagai sumber acuan untuk melakukan kegiatan atau memenuhi persyaratan tertentu.

3. **Inkasso**

   Inkasso merupakan jasa penagihan atas warkat dari bank lain yang telah diterbitkan oleh nasabahnya yang berada pada lokasi yang berbeda. Dalam jasa Inkasso, Bank melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang ditunjuk pemberi amanat.
4. **Kiriman Uang Dalam Negeri**

Kiriman Uang merupakan fasilitas perbankan untuk mengirim/membayar dengan menyetorkan uang
tunai atau atas beban rekening nasabah non tunai kepada seseorang/perusahaan/nasabah di tempat lain berdasarkan perintah nasabah kepada bank. Jasa Kiriman Uang Bank Sulselbar terdiri dari kiriman uang masuk dan kiriman uang keluar.

5. **Transfer BI-RTGS**
   Transfer BI-RTGS merupakan layanan jasa sistem transfer dana elektronik antar bank peserta BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
6. **Penerimaan Pembayaran Tagihan *Billing Provider***
   Bank Sulselbar memberikan layanan penerimaan pembayaran tagihan (*billing provider*) yang selain dapat dilakukan melalui ATM, dapat juga dilakukan melalui counter pembayaran yang disiapkan bank. Pembayaran tagihan yang dilayani pada counter bank antara lain *fix phone*/telepon rumah (Telkom), pembayaran listrik (PLN), telepon seluler, pra dan pasca bayar, dan pajak.

PERBANKAN MIKRO

Bank Sulselbar senantiasa berupaya menjaga komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran kredit dan pembiayaan untuk sektor mikro, kecil dan menengah (UKM). Sektor UKM memiliki peranan penting dalam perekonomian secara komprehensif karena dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

Bank Sulselbar mengkategorikan nasabah UKM dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Nasabah usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Nasabah usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- dan (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah).

Nasabah usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Produk perbankan mikro Bank Sulselbar sumber pembiayaannya selain berasal dari internal Bank Sulselbar, ada juga yang sumber pembiayaannya berasal dari subsidi atau bantuan dana dari pihak eksternal, terutama pemerintah

Kredit UKM yang sumber dana pembiayaannya berasal dari internal Bank Sulselbar sebagai berikut :

Kredit Pundi Usaha Rakyat (PUR)

Bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat serta menggali potensi usaha berbasis kerakyatan yang untuk meningkatkan skala usaha menjadi lebih besar melalui pendekatan pendanaan Bank. Fasilitas kredit diperuntukkan bagi pengusaha mikro baik perorangan maupun kelompok usaha produktif yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama yang bertujuan dalam memperkuat dalam berproduksi, akses permodalan dan pemasaran bersama, jenis usaha yang dapat dibiayai adalah perdagangan, industri kecil, pertanian, peternakan, perkebunan, agrobisnis, periklanan dan jasa.

Tingkat suku bunga kredit PUR tahun 2014 sebesar 16% p.a yang dihitung secara efektif yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/120/DIR/DIR/IX/2014.

	2014	2013	2012
Kredit Pundi Usaha Rakyat (Rp Juta)	149	158	174
Debitur	179	192	215

Linkage Program* Pola *Executing

Linkage program merupakan bentuk optimalisasi peranan Bank Sulselbar dalam penguatan lembaga keuangan untuk mendorong dan memberdayakan potensi sektor usaha mikro kecil dan untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan (Bank Perkreditan Rakyat maupun Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam - Koperasi) khususnya peningkatan jangkauan layanan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil.

Penyaluran pembiayaan melalui *linkage program* ini diperuntukkan bagi pelaku usaha UMKM yang tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dimana belum ada jaringan kantor Bank Sulselbar, antara lain dengan BPR Batara Wajo di Makassar, Kopsyah BMT As'adiyah di Sengkang, KPRI Marannu dan KPN Kopemda di Maros.

Kredit UKM yang merupakan Kredit Program yang sumber pembiayaannya berasal dari subsidi atau bantuan dana dari pihak eksternal, terutama pemerintah, sebagai berikut :

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bertujuan untuk memberikan kemudahan memperoleh fasilitas kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang bergerak di bidang perdagangan, industri kecil, pertanian, peternakan, perkebunan, agrobisnis, periklanan dan jasa dengan bunga yang kompetitif. KUR diperuntukkan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang bertujuan untuk pengembangan usaha dalam meningkatkan produksi, permodalan dan pemasaran.

Tingkat suku bunga KUR tahun 2014 sebesar 13% p.a yang dihitung secara efektif.

	2014	2013	2012
Kredit Usaha Rakyat (Rp Juta)	19.649	19.972	12.470
Debitur	199	217	105

Kredit Program PUNDI (Pusaka Mandiri)

Kredit PUNDI bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan keluarga prasejahtera, sejahtera I dan miskin yang talah mempunyai usaha kecil, serta membantu pengembangan manajemen produksi, pemasaran dan permodalan usaha keluarga-keluarga yang mulai mandiri tersebut menjadi pengusaha kecil atau pengusaha menengah yang profesional.

Kredit PUNDI adalah kerjasama antara Yayasan Damandiri dengan Bank Sulselbar sejak tahun 2001 dalam penyaluran kredit produktif dengan pola *executing* untuk sektor usaha kecil (Perdagangan, Jasa, Pertanian dan Industri).

Tingkat suku bunga Kredit Program PUNDI Bank Sulselbar tahun 2014 sebesar 12% p.a.

	2014	2013	2012
Kredit Pundi (Rp Juta)	4.010	4.232	4.517
Debitur	4.143	4.325	4.670

Kredit Program SUP 005

Kredit SUP 005 bertujuan untuk memberikan nilai tambah/meningkatkan pendapatan bagi para pengusaha mikro kecil dan membantu pengembangan sektor usaha mikro kecil dan koperasi yang layak dan belum mendapat bantuan pembiayaan.

Kredit SUP 005 merupakan Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan perkuatan akses permodalan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) termasuk Koperasi yang disalurkan Bank Sulselbar sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) melalui kerjasama dengan Kementerian Keuangan RI dalam hal Pendanaan terhadap usaha Mikro dan Kecil.

Tingkat suku bunga Kredit SUP 005 untuk usaha mikro sebesar 15% - 17% dan usaha kecil sebesar 12% - 14%.

	2014	2013	2012
Kredit Program SUP 005 (Rp Juta)	77.725	75.897	82.110
Debitur	5.671	5.876	6.431

Kerjasama Pembiayaan

Di tahun 2014, Bank Sulselbar melakukan kerjasama penyaluran pembiayaan kepada sejumlah lembaga pembiayaan sebagaimana tabel dibawah ini:

Instansi (Lembaga Pembiayaan/Multifinance dan atau Koperasi)	Skema (Joint Financing/Excecuting/ Channeling
PT. PNM	JOINT FINANCING
KOPERASI BERINGIN	EXCECUTING
KOPERASI RIZKY USAHA	EXCECUTING

Keunggulan Produk Mikro Bank Sulselbar

Keunggulan produk mikro Bank Sulselbar untuk menjadi pilihan nasabah UMKM, antara lain :

1. Suku bungan yang kompetitif

2. Persyaratan kredit cukup mudah

3. Dapat memenuhi segala bentuk jenis kredit mikro.

Strategi Pemasaran Produk

Sepanjang tahun 2014, aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh Bank Sulselbar untuk meningkatkan portofolio kredit pada segmen UMKM, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga SDM khususnya penyaluran kredit mikro
2. Pengembangan produk mikro
3. Kerjasama dengan penjaminan kredit khusus mikro
4. Peningkatan Jaringan Kantor
5. Melakukan kerjasama dengan instansi / pihak terkait pengelola pelaku UMKM.

UNIT USAHA SYARIAH

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar beroperasi sejak tahun 2007 berdasarkan izin prinsip dari Bank Indonesia No. 9/20/DPBS/Mks tanggal 20 April 2007 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah. Dilanjutkan dengan pembukaan kantor cabang Bank Sulselbar Syariah yang pertama yakni Bank Sulselbar Cabang Syariah Sengkang pada tanggal 28 April 2007 (11 Rabiul Akhir 1428 H) disusul pembukaan Cabang Syariah Maros pada tanggal 28 November 2007 (18 Dzulqaidah 1428 H) dan terakhir Cabang Syariah Makassar pada tanggal 30 Desember 2008. Modal usaha Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp16 miliar.

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar didirikan untuk memberikan alternatif layanan perbankan berbasis syariah kepada masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Melalui beragam produk dan layanan perbankan dengan skema keuangan yang bervariasi, serta beroperasi dengan prinsip bagi hasil, Unit Usaha Syariah menjadi alternatif solusi perbankan yang kredibel dan menguntungkan bagi masyarakat.

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar mencatatkan pertumbuhan yang signifikan selama tahun 2014 :

Total asset bertumbuh sebesar 7,54% dari posisi Desember 2013 sebesar Rp675.075 juta menjadi sebesar Rp725.954 juta pada Desember 2014. Pertumbuhan total aset UUS Bank Sulselbar dipengaruhi oleh kenaikan pembiayaan sebesar 4,94% pada tahun 2014.

Laba pada bulan Desember 2014 mencapai Rp43.123 juta atau79,13% dari Desember 2013 sebesar Rp24.073 juta.

Berikut ini tabel dan grafik ikhtisar kinerja keuangan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Tahun 2010 – 2014 :

Ikhtisar Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Tahun 2010 - 2014

Kinerja Keuangan	2010	2011	2012	2013	2014	Growth 2013 - 2014	
			Rp Juta			Rp Juta	%
Total Aset	275.412	349.929	454.864	675.075	725.954	50.879	7,54%
Dana Pihak Ketiga	87.298	137.484	239.171	324.460	355.312	30.852	9,51%
- Giro	5.587	10.850	9.426	7.258	14.656	7.398	101,93%
- Tabungan	19.989	31.032	44.477	55.015	57.443	2.428	4,41%
- Deposito	61.722	95.602	185.268	262.187	283.213	21.026	8,02%
Pembiayaan	143.903	259.959	370.557	466.139	489.150	23.011	4,94%
Pendapatan Bagi Hasil	17.859	32.357	48.135	69.561	85.123	15.562	22,37%
Beban Bagi Hasil	4.904	7.207	12.204	22.024	22.747	723	3,28%
Laba (Rugi)	4.443	11.223	17.991	24.073	43.123	19.050	79,13%

A. **Produk Pendanaan**

1. **Total Dana Pihak Ketiga**

Pendanaan UUS Bank Sulselbar pada tahun 2014 peningkatannya sebesar 9,51% menjadi Rp355.312 juta dari Rp324.460 juta di tahun 2013. Pendanaan UUS Bank Sulselbar bersumber dari 19.729 rekening dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Jumlah rekening dana pihak ketiga UUS Bank Sulselbar meningkat sebesar 26,74% dibandingkan tahun 2013 sebesar 15.566 rekening. Proporsi total DPK Syariah terhadap total DPK konsolidasi tahun 2014 sebesar 5,13%.

Dana Pihak Ketiga Tahun 2010 – 2014

Kinerja Keuangan	2010	2011	2012	2013	2014	Growth	
			Rp Juta			Rp Juta	%
Giro	5.587	10.850	9.426	7.258	14.656	7.398	101,93%
Tabungan	19.989	31.032	44.477	55.015	57.443	2.428	4,41%
Deposito	61.722	95.602	185.268	262.187	283.213	21.026	8,02%
Total Dana Pihak Ketiga	**87.298**	**137.484**	**239.171**	**324.460**	**355.312**	**30.852**	**9,51%**

Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Tahun 2010 – 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Giro	125	151	174	180	180
Tabungan	5.172	11.111	16.949	13.700	17.813
Deposito	559	870	1.246	1.686	1.736
Jumlah Rekening	**5.856**	**12.132**	**18.369**	**15.566**	**19.729**

2. **Komposisi Dana Murah (*Low Cost Fund*)**

Komposisi dana berbiaya murah yang berasal dari Giro (*Current Account*/CA) dan Tabungan (*Savings Account*/SA), dibandingkan Deposito Berjangka (*Time Deposit*/TD) pada tahun 2014 tercatat meningkat menjadi 91,20% dibandingkan tahun 2013 sebesar 89,17%. Berikut adalah grafik rasio CASA – TD Unit Usaha Syariah tahun 2010 – 2014 :

3. **Rincian Dana Pihak Ketiga Syariah**

a. **Giro**

Sampai akhir tahun 2014 pencapaian penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk giro adalah sebesar Rp14.656 juta. Giro syariah pada tahun 2014 mengalami peningkatan signifikan mencapai sebesar 101,93% terhadap posisi tahun 2013 sebesar Rp7.258 juta. Pencapaian ini ditopang oleh program pemasaran yang aktif atas giro syariah gratis. Berbeda dengan giro konvensional yang memiliki proporsi terbesar dari total DPK konvensional maupun konsolidasi, giro syariah memiliki proporsi terkecil dari total DPK syariah yakni hanya sebesar 4,12% atau hanya 0,56% dari total giro konsolidasi dan 0,21% dari total DPK konsolidasi. Pertumbuhan giro syariah Bank Sulselbar mencerminkan meningkatnya aktivitas bisnis nasabah UUS Bank Sulselbar.

b. **Tabungan**

Sampai dengan akhir tahun 2014 pencapaian penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan adalah sebesar Rp57.443 juta, meningkat sebesar 4,41% dari Rp55.015 juta di tahun 2013. Tabungan ini meliputi Tabungan Syariah, Tabungan Hatam iB, Tabungan BKMT Syariah dan

Tabungan Kemitraan Syariah.

Kenaikan tabungan UUS Bank Sulselbar pada tahun 2014 dipengaruhi oleh pertumbuhan signifikan Tabungan Kemitraan Syariah sebesar 365,90% dan Tabungan Syariah 4,23%.

Jumlah rekening (*number of account*) tabungan sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 17.813 rekening, meningkat sebanyak 4.113 rekening atau 30,02% dibandingkan tahun 2013 sebanyak 13.700 rekening.

Rincian produk tabungan UUS Bank Sulselbar tahun 2014, sebagai berikut :

1) **Tabungan Syariah**

Tabungan Syariah pada tahun 2014 peningkatannya 4,23% menjadi Rp55.574 juta dari Rp53.319 juta di tahun 2013. Tabungan Syariah tahun 2014 memiliki porsi terbesar mencapai 96,75% dari total DPK syariah dan 3,12% dari total tabungan konsolidasi. Pemasaran yang aktif, karakteristik produk yang menarik, dan *pricing* yang kompetitif merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi peningkatan Tabungan Syariah.

Jumlah rekening Tabungan Syariah sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 10.418 rekening.

2) **Tabungan Hatam iB**

Tabungan Hatam iB atau Haji dan Umrah Tabungan Masa Depan adalah produk yang didesain untuk keperluan biaya perjalanan ibadah haji dan umrah. Pada tahun 2014, Tabungan Hatam tercatat sebesar Rp1.056 juta atau 29,27% lebih rendah dari Tabungan Hatam iB tahun 2013 sebesar Rp1.493 juta. Komposisi Tabungan Hatam iB terhadap total DPK syariah tahun 2014 sebesar 1,84% dan 0,06% dari total tabungan konsolidasi. Penurunan jumlah saldo Tabungan Hatam iB pada tahun 2014 disebabkan oleh adanya beberapa nasabah yang melakukan pelunasan biaya pelaksanaan ibadah haji untuk pemberangkatan haji tahun 2014 dan perubahan pemasaran segmen produk Hatam ini yaitu kepada anak-anak dan remaja. Dan biaya pelunasan tersebut diteruskan ke rekening Ditjen. Haji dan Umroh Kementerian Agama. Jumlah rekening Tabungan Hatam iB tahun 2014 sebanyak 90 rekening.

3) **Tabungan BKMT Syariah**

Tabungan BKMT Syariah pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 76,67% menjadi Rp7 juta dari Rp30 juta di tahun 2013. Proporsi Tabungan BKMT Syariah tahun 2014 hanya sebesar 0,01% dari total DPK Syariah. Penurunan ini disebabkan relatif belum dimaksimalkannya kegiatan pemasaran Tabungan BKMT Syariah kepada majelis taklim sebagai segmen produk ini.

4) **Tabungan Kemitraan Syariah**

Tabungan Kemitraan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sangat signifikan mencapai 365,90% menjadi Rp806 juta dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp172 juta. Peningkatan tersebut disebabkab oleh optimalisasi Kantor Kas Syariah Menara UMI yang mengelola dana registrasi pendaftaran mahasiswa baru pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) untuk tahun ajaran 2014. Tabungan Kemitraan tahun 2014 komposisinya sebesar 1,40% dari total DPK Syariah.

Jumlah rekening Tabungan Kemitraan Syariah pada tahun 2014 sebanyak 7.305 rekening.

c. **Deposito**

Pada tahun 2014, deposito UUS yang disebut juga Deposito *Mudharabah* tercatat sebesar Rp283.213 juta, meningkat 8,02% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp262.187 juta. Pertumbuhan deposito UUS Bank Sulselbar menunjukkan bahwa produk ini merupakan investasi yang menguntungkan serta mampu memberikan tingkat pengembalian dengan *equivalent rate* yang kompetitif dengan skema bagi hasil dan relatif lebih tinggi dari bank lainnya. Deposito *Mudharabah* memiliki proporsi terbesar terhadap total penghimpunan DPK Syariah tahun 2014 sebesar 79,71%, sedangkan posisinya atas total deposito konsolidasi sebesar 11,27%.

Jumlah rekening Deposito *Mudharabah* sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 1.736 rekening. Jumlah rekening Deposito *Mudharabah* pada tahun 2014 memiliki pertumbuhan sebanyak 50 rekening atau sebesar 2,97% terhadap posisi tahun 2013 sebanyak 1.686 rekening.

Selama tahun 2014, UUS Bank Sulselbar telah melakukan beberapa program dalam rangka meningkatkan kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) sehingga mampu memenuhi harapan nasabah antara lain :

1. Program pemasaran giro gratis
2. Program pemasaran giro *mudharabah*
3. Program resegmentasi produk tabungan haji dan umroh (Hatam)
4. Program resosialisasi tabungan kemitraan (*co-branding*) pada kampus – kampus dan mahasiswa
5. Program pemasaran aktif atas deposito *mudharabah*

B. **Pembiayaan**

Pembiayaan UUS Bank Sulselbar disalurkan dengan menggunakan akad *murabahah* dan *mudharabah*. Jenis pembiayaan UUS Bank Sulselbar meliputi Piutang *Murabahah* Investasi, Piutang *Murabahah* Modal Kerja, Piutang *Murabahah* Lainnya dan Pembiayaan *Mudharabah* serta Piutang *Qardh* dalam bentuk Gadai Emas (*Rahn*) Berkah iB.

Total pembiayaan meningkat 4,94% menjadi Rp489.150 juta pada tahun 2014, dari Rp466.139 juta tahun 2013. Pembiayaan Bank Sulselbar tahun 2014 didominasi oleh pembiayaan dalam bentuk Piutang *Murabahah* Lainnya sebesar 80,74% dari total pembiayaan syariah, Piutang *Murabahah* Modal Kerja sebesar 8,08% dan Piutang *Murabahah* Investasi sebesar 7,03%.

	2010	2011	2012	2013	2014
Pembiayaan (Rp Juta)	143.903	259.959	370.557	466.139	489.150
Growth (%)	80,29%	80,65%	42,54%	25,79%	4,94%

Komposisi Piutang & Pembiayaan Tahun 2014
2,79%
1,36%
95,85%
Piutang Murabahah
Pembiayaan Mudharabah
Qardh (Rahn)

Komposisi Piutang & Pembiayaan Tahun 2013
3,43%
1,31%
95,26%
Piutang Murabahah
Pembiayaan Mudharabah
Qardh (Rahn)

1. **Komposisi Pembiayaan**

   a. **Pembiayaan per Akad**

   Portofolio pembiayaan tahun 2014 didominasi pembiayaan dengan akad *murabahah* sebesar Rp468.845 juta atau 95,85% terhadap total portofolio pembiayaan UUS Bank Sulselbar, meningkat dibandingkan pembiayaan dengan akad *murabahah* pada akhir tahun 2013 sebesar Rp444.031 juta atau 5,59% terhadap total portofolio pembiayaan UUS Bank Sulselbar. Sedangkan porsi pembiayaan dengan akad *mudharabah* sebesar Rp13.631 juta atau 2,79% dari total portofolio pembiayaan UUS Bank Sulselbar. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 14,81% dibandingkan akhir tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp16.002 juta. Komposisi pembiayaan dengan akad *qardh* yaitu sebesar 1,36% terhadap total portofolio pembiayaan syariah tahun 2014.

   b. **Pembiayaan per Sektor Ekonomi**

   Kinerja pembiayaan beberapa sektor ekonomi pada tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu jasa – jasa dunia usaha sebesar 179,68% dan perumahan 15,94%. Sedangkan kinerja beberapa sektor ekonomi mengalami penurunan di tahun 2014 antara lain sektor pertanian, konsumtif, industri, konstruksi, perdagangan, dan pengangkutan & distribusi.

Perkembangan Pembiayaan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2010 - 2014

	2010	2011	2012	2013	2014	Growth 2013 - 2014		Proporsi 2014
	Rp Juta					Rp Juta	%	%
Konsumtif	89.216	137.879	107.225	145.462	103.039	(42.423)	(29,16%)	21,06%
Pertanian	72	6.360	4.599	2.858	264	(2.594)	(90,76%)	0,05%
Industri	184	1.221	1.446	935	384	(551)	(58,93%)	0,08%
Listrik/Air	0	48	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Konstruksi	955	749	1.987	2.060	1.448	(612)	(29,71%)	0,30%
Perumahan	6.103	86.916	229.201	291.129	337.535	46.406	15,94%	69,00%
Perdagangan	20.808	7.313	9.482	10.203	9.989	(214)	(2,10%)	2,04%
Pengangkutan & Distribusi	0	527	478	669	627	(42)	(6,28%)	0,13%
Jasa - Jasa Dunia Usaha	24.638	18.946	16.139	12.823	35.864	23.041	179,68%	7,33%
Jasa - Jasa Sosial Masyarakat	1.927	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Total Pembiayaan	**143.903**	**259.959**	**370.557**	**466.139**	**489.150**	**23.011**	**4,94%**	**100,00%**

2. **Rincian Pembiayaan**

a. **Piutang *Murabahah***

Piutang *Murabahah* yang disalurkan UUS Bank Sulselbar selama tahun 2014 sebesar Rp468.845 atau meningkat 5,59% dibandingkan tahun 2013. Piutang Murabahah UUS Bank Sulselbar antara lain disalurkan untuk pembiayaan investasi, modal kerja dan konsumsi. Komposisi piutang murabahah terhadap total pembiayaan UUS Bank Sulselbar tahun 2014 sebesar 95,85%.

Rincian piutang *murabahah* UUS Bank Sulselbar tahun 2014, sebagai berikut :

1) **Piutang *Murabahah* Investasi**

Piutang *Murabahah* Investasi pada tahun 2014 sebesar Rp34.388 juta atau mengalami penurunan 33,84% lebih rendah dari tahun 2013 yang tercatat Rp51.975 juta. Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya beberapa calon debitur yang telah melakukan investasi tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2014 lebih fokus pada penggunaan modal kerja agar investasi sebelumnya bisa menghasilkan pendapatan usaha. Piutang *Murabahah* Investasi porsinya sebesar 7,03% dari total piutang dan pembiayaan tahun 2014 dan 6,11% terhadap total kredit investasi konsolidasi. Jumlah debitur Piutang *Murabahah* Investasi pada tahun 2014 sebanyak 286 debitur.

	2010	2011	2012	2013	2014
Piutang Murabahah Investasi (Rp Juta)	24.568	48.932	61.192	51.975	34.388
Growth (%)	290,34%	99,17%	25,06%	-15,06%	-33,84%

2) **Piutang *Murabahah* Modal Kerja**

Pada tahun 2014 Piutang *Murabahah* Modal Kerja mengalami peningkatan signifikan mencapai 173,81% atau sebesar Rp39.500 juta dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp14.426. Peningkatan piutang *Murabahah* pada tahun 2014 disebabkan oleh optimalisasi pembiayaan investasi oleh debitur pada tahun sebelumnya dengan memaksimalkan penggunaan pembiayaan modal kerja. Piutang *Murabahah* Modal Kerja memiliki porsi terhadap total piutang dan pembiayaan tahun 2014 yaitu sebesar 8,08% dan 7,09% terhadap total kredit modal kerja konsolidasi. Jumlah debitur Piutang Murabahah Modal Kerja Tahun 2014 sebanyak 58 debitur.

	2010	2011	2012	2013	2014
Piutang Murabahah Modal Kerja (Rp Juta)	4.561	8.033	8.372	14.426	39.500
Growth (%)	31,86%	76,12%	4,22%	72,31%	173,81%

3) **Piutang *Murabahah* Lainnya**

Piutang *Murabahah* Lainnya merupakan pembiayaan konsumtif syariah yang tercatat sebesar Rp394.957 juta atau meningkat sebesar 4,59% dari tahun 2013 sebesar Rp377.630 juta. Piutang *Murabahah* Lainnya pada tahun 2014 memiliki porsi terbesar dari total piutang dan pembiayaan sebesar 80,74%. Pembiayaan konsumtif syariah porsinya 6,17% dari total kredit konsumtif konsolidasi. Jumlah debitur Piutang Murabahah Lainnya pada tahun 2014 sebanyak 4.438 debitur.

b. **Pembiayaan *Mudharabah***

Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan skema bagi hasil. Pembiayaan *Mudharabah* pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp13.631 juta atau mengalami penurunan 14,81% lebih rendah dari Rp16.002 juta di tahun 2013. Pembiayaan *Mudharabah* terhadap total piutang dan pembiayaan tahun 2014 proporsinya sebesar 2,79% dan 2,45% dari total kredit modal kerja konsolidasi. Jumlah debitur Pembiayaan Mudharabah tahun 2014 sebanyak 100 debitur.

c. **Piutang *Qardh***

Piutang *Qardh* merupakan pembiayaan yang sejenis dengan pegadaian, yakni pembiayaan yang disalurkan berdasarkan harta nasabah berupa emas sebagai aset yang digadai/dijaminkan. Dan untuk bank mengenakan imbal jasa atas penyimpanan aset yang digadai/dijaminkan tersebut. Total penyaluran dana sebagai pembiayaan untuk akad qardh pada tahun 2014 sebesar Rp6.673 juta atau meningkat 9,28% dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp6.107 juta. Proporsi Gadai Emas Berkah iB sebesar 1,36% dari total piutang dan pembiayaan tahun 2014 dan 0,10% terhadap total kredit konsumtif. Jumlah debitur Gadai Emas Berkah iB tahun 2014 sebanyak 348 debitur.

Catatan : Gadai Emas Berkah iB pertama diluncurkan pada tahun 2012

C. **Produk Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar**

1. Pendanaan

a. Giro

Merupakan produk pendanaan yang berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah. Nasabah dapat memanfaatkan produk ini untuk membantu aktifitas dan kelancaran transaksi keuangan

b. Tabungan

1) Tabungan Syariah

Merupakan produk investasi yang menarik dan menguntungkan dengan akad *Mudharabah*, dana investasi dikelola sesuai prinsip syariah dan professional serta memberikan imbal hasil kompetitif sesuai nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil Tabungan Syariah tahun 2014 untuk nasabah sebesar 22,50%.

2) Haji dan Umroh Tabungan Masa Depan (HATAM iB)

Tabungan Haji iB merupakan simpanan pada Bank Sulselbar Syariah dengan prinsip *Mudharabah* bagi perorangan yang diperuntukkan bagi calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Nisbah bagi hasil Tabungan Hatam iB tahun 2014 untuk nasabah sebesar 10%.

3) Tabungan Kemitraan

Simpanan dengan pola *co branding* dengan akad *Mudharabah* pada Bank Sulselbar Syariah yang didisain khusus bagi seluruh anggota instansi/kelompok dengan syarat – syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama (MoU) antara instansi tersebut dengan Bank Sulselbar Syariah. Nisbah bagi hasil Tabungan Kemitraan tahun 2014 untuk nasabah sebesar 30%.

c. Deposito

Deposito merupakan produk pendanaan dalam bentuk simpanan berjangka dengan akad *Mudharabah* dan atas simpanan nasabah Bank memberikan bagi hasil maksimal yang kompetitif bagi nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Kentungan dan kenyamanan layanan yang diberikan produk ini adalah bagi hasil yang menarik dan kompetitif serta dapat diakumulasikan dengan simpanan pokok deposito, sehingga menjadikan investasi lebih cepat berkembang. Tersedia pilihan jangka waktu yang dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan yaitu: 1, 3, 6 dan 12 bulan, dan jangka waktu deposito dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*/ARO).

Bagi hasil Deposito *Mudharabah* tahun 2014 sebagai berikut :

Jangka Waktu	Nisbah (Nasabah : Bank)	Equivalent Rate rata-rata
1 Bulan	57% : 43%	8,14% pa.
3 Bulan	58% : 42%	8,28% pa.
6 Bulan	59% : 41%	8,43% pa.
12 Bulan	59% : 41%	8,43% pa.

2. Pembiayaan

a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi merupakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip akad *Murabahah* (jual beli) dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah. Pembiayaan investasi ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang modal (*capital expenditure*) nasabah seperti pembelian mesin dan pembangunan atau renovasi pabrik/gedung.

Keuntungan bagi nasabah dan ketersediaan layanan yang diberikan adalah Bank menyediakan dana 80% dari kebutuhan yang dapat dimanfaatkan untuk pembelian dan/atau modernisasi alat produksi seperti mesin, gedung, dan lain sebagainya dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 10 (sepuluh) tahun.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja merupakan produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja nasabah dengan menggunakan prinsip akad antara lain *Murabahah* (jual beli) dan dengan konsep margin *Mudharabah* dengan konsep bagi hasil, dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

Melalui pembiayaan modal kerja, Bank menyediakan modal kerja bagi kelancaran usaha nasabah, dan nasabah akan mengembalikan pembiayaan berdasarkan bagi hasil pendapatan atau margin dari hasil kegiatan bisnis yang dibiayai, yang penetapannya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah.

Keuntungan bagi nasabah yakni nasabah akan mendapatkan keuntungan dan/atau layanan berupa jangka waktu pembiayaan maksimal 3 (tiga) tahun dan Bank menyediakan dana 80% dari kebutuhan modal kerja untuk berbagai macam penggunaan, seperti Kopkar untuk disalurkan kepada anggota dengan pengembalian potong gaji, Lembaga Keuangan Syariah/ Mikro Syariah (LKS/LKMS) untuk disalurkan kepada nasabahnya sebagai modal kerja perdagangan, dan sebagainya.

c. Pembiayaan Lainnya

Fasilitas pembiayaan lainnya berdasarkan akad *murabahah* (jual beli) antara bank dan nasabah sebesar harga perolehan (harga barang yang diperjualbelikan) ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Pembayaran nasabah dilakukan secara tangguh dengan dibayar secara sekaligus atau dicicil/angsuran.

3. Skim Produk Pembiayaan Syariah

a. Pembiayaan Oto Berkah iB

Pembiayaan Kepemilikan Mobil atau Oto Berkah iB adalah pembiayaan dalam rangka pembelian kendaraan bermotor (mobil) bagi nasabah perorangan dengan menggunakan akad *Murabahah* dengan tingnkat harga dan margin yang disepakati bersama.

Keuntungan pembiayaan Oto Berkah iB bagi nasabah yakni angsuran tetap *(fixed)* sampai masa pembiayaan selesai, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun, maksimal pembiayaan Bank 80% dari harga beli di dealer dan 20% sisanya merupakan kontribusi uang muka nasabah. Debitur Pembiayaan Oto Berkah iB tahun 2014 sebanyak 5 debitur.

b. Pembiayaan Graha Berkah iB

Pembiayaan Graha Berkah iB adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah yang diberikan kepada perorangan dengan akad *Murabahah* untuk membeli rumah baru atau keperluan renovasi/membangun rumah tinggal, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing pemohon.

Keuntungan pembiayaan Graha Berkah iB bagi nasabah yakni kesepakatan harga akan tetap terjaga (*fixed*) pada nilai tertentu sehingga nilai angsuran tidak berubah sampai akhir, jangka waktu pembiayaan maksimal 10 (sepuluh) tahun, maksimal pembiayaan Bank 80% dari harga beli rumah dari pengembang dan 20% sisanya merupakan kontribusi uang muka nasabah. Debitur Pembiayaan Graha Berkah iB tahun 2014 sebanyak 3.406 debitur.

c. Modal Kerja Mitra iB

Pembiayaan Modal Kerja Mitra iB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan nasabah/Mitra untuk mengelola pembiayaan. Debitur Modal Kerja Mitra iB tahun 2014 sebanyak 60 debitur.

d. Gadai Emas Berkah iB

Merupakan pinjaman berdasarkan prinsip *Qardh* yang diberikan kepada nasabah berdasarkan

kesepakatan, yang disertakan dengan Surat Gadai sebagai penyerahan *marhun* (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank. Pembiayaan ini sejenis dengan gadai yakni pembiayaan yang disalurkan berdasarkan harta nasabah, berupa emas sebagai aset tergadai. Dan atas penyimpanan barang gadai (*ujrah*) tersebut, Bank memberikan imbal jasa.

Pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan nasabah seperti pendidikan, pernikahan, perjalanan wisata, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah

4. Jasa – Jasa UUS Bank Sulselbar

a. ATM UUS Bank Sulselbar

Kartu ATM UUS Bank Sulselbar tergabung dalam jaringan ATM Bersama yang dapat diakses pada puluhan ribu terminal ATM berlogo ATM Bersama di seluruh Indonesia. Fitur – fitur layanan ATM Bank Sulselbar antara lain informasi saldo, penarikan tunai, transfer antar bank, fasilitas *payment* pembayaran tagihan (listrik, telepon seluler pasca bayar), dan pembelian pulsa (*top up*) telepon seluler pra bayar, yang dilakukan dengan mendebet secara otomatis dari rekening nasabah. Jumlah pemegang Kartu ATM Syariah pada tahun 2014 sebanyak 13.699 *card holder*s.

b. Kiriman Uang (*Wakalah*)

Kiriman Uang yang diberikan dengan akad *wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

c. Jaminan Bank (*Kafalah*)

Jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

Jaminan bank diberikan dengan akad *kafalah* yaitu Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*Makful 'anhu/ashil*).

Layanan Unit Usaha Syariah

Jaringan operasional dan pemasaran Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar sampai dengan 31 Desember 2014, sebagai berikut :

Layanan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar
Cabang Syariah
Cabang Syariah Makassar
Cabang Syariah Maros
Cabang Syariah Sengkang
***Office Channeling*/ Layanan Syariah**
Cabang Utama Bone
Cabang Palopo
Cabang Bulukumba
Cabang Utama Mamuju
Cabang Pangkep
Cabang Barru
Cabang Pinrang
Cabang Sidrap
Cabang Soppeng
Cabang Sinjai

Cabang Enrekang
Cabang Belopa
Cabang Gowa
Cabang Takalar
Cabang Polman
Cabang Jeneponto
Cabang Parepare
Cabang Bantaeng
Cabang Masamba
Cabang Majene
Cabang Makale
Cabang Selayar
Cabang Malili
Cabang Pasangkayu
Cabang Mamasa

-

Tinjauan Fungsional UUS Bank Sulselbar

Untuk memastikan pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan bisnis maka Bank menye diakan pelatihan yang menyentuh seluruh lini organisasi. Program tersebut tercermin pada program pelatihan terstruktur sesuai profil kompetisi dan bidang bisnis meliputi :

Sumber Daya Insani (SDI) yang berkualitas merupakan penopang bagi perkembangan bisnis UUS Bank Sulselbar untuk melayani kebutuhan nasabah dan masyarakat akan perbankan berlandaskan prinsip syariah. Untuk itu, guna membentuk SDI dengan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan bisnis, UUS Bank Sulselbar menumbuhkembangkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur sesuai profil kompetisi dan bidang bisnis serta menyentuh seluruh lini organisasi. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Pelaksanaan program pendidikan pelatihan bekerjasama antara lain dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Karim Bussiness Consulting, dan lain sebagainya.

Jumlah karyawan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia	2012	2011	2010	2013	2014
Pasca Sarjana (S2)	7	6	3	7	7
Sarjana/Diploma (S1/D3)	31	33	32	31	62
SMA	2	2	2	2	2
Jumlah	**40**	**41**	**37**	**40**	**71**

Strategi Unit Usaha Syariah

Strategi pengembangan produk dan jasa UUS Bank Sulselbar yakni dengan integrasi dan harmonisasi produk dengan karakteristik berbeda dengan produk konvensional dan beberapa produk UUS Bank Sulselbar dapat menjadi produk pelengkap (*supplementary product*) yang menambah varian produk Bank Sulselbar.

Rencana pengembangan jaringan operasional dan penerbitan maupun diversifikasi produk dan jasa UUS Bank Sulselbar sebelumnya melalui tahapan konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap pengembangan bisnis UUS Bank Sulselbar senantiasa berpegang pada prinsip – prinsip syariah.

PROSPEK BISNIS, KEUNGGULAN KOMEPTITIF, DAN RENCANA STRATEGIS

Prospek Bisnis

Perekonomian Sulsel keseluruhan tahun 2015 diperkirakan cenderung stabil pada kisaran 7,5% - 8,5% (yoy), dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 (7,57%, yoy) dengan tingkat inflasi 7,4% . Proyeksi Pertumbuhan ekonomi Sulsel tersebut lebih tinggi dari *outlook* ekonomi Indonesia yang diperkirakan pada kisaran level 5,4% - 5,8% pada tahun 2015 dengan tingkat inflasi sebesar 4±1%. Permintaan domestik diperkirakan akan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, baik konsumsi maupun investasi. Industri perbankan Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan akan bertumbuh sekitar 15% - 17% untuk penyaluran kredit dan pembiayaan, sementara untuk pertumbuhan DPK diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran 14% - 16%. Prospek dan tantangan di masa mendatang menjadi pendorong bagi Bank Sulselbar untuk terus melanjutkan usaha demi mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan dan meningkatkan daya saing di industri perbankan yang makin *hypercompetitive*.

Pertumbuhan ekonomi 2015, diperkirakan diwarnai dengan perlambatan negara permintaan mitra dagang Sulsel dan tren perlambatan ekonomi dunia, yang menyebabkan pelemahan ekspor. Ekonomi global membaik, namun tidak secepat prakiraan sebelumnya. Perbaikan berasal dari ekonomi negara maju (Amerika Serikan dan Kawasan Eropa), sementara ekonomi negara berkembang (Asia dan ASEAN) melambat. Sementara, dari sisi lokal,kategori utama yang diperkirakan menopang pertumbuhan antara lain pertambangan, konstruksi, perdagangan besar/eceran, transportasi, penyediaan akomodasi, informasi/komunikasi, real estate, dan jasa-jasa. Peningkatan beberapa sektor tersebut terkait beroperasinya tambahan *smelter* dan kegiatan pendukungnya, mulai beroperasinya hotel di Makassar, serta pembangunan infrastruktur transportasi dan distribusi.

Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV – 2014

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Sulawesi Selatan (Tahun Dasar 2010)

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Provinsi Sulsel	2011	2012	2013	2014		2015[P]	
				IV	Total	I[P]	Total
Sisi Pengeluaran							
Konsumsi Rumah Tangga	6,5	7,0	6,0	5,5	5,9	6,5-7,5	6,5-7,5
Konsumsi LNPRT	6,6	7,1	10,4	4,9	11,3	4,1-5,1	5,2-6,2
Konsumsi Pemerintah	4,7	4,2	2,7	(2,9)	1,9	5,4-6,4	5,4-6,4
Pembentukan Modal Tetap Bruto	12,7	15,7	13,2	9,0	9,4	10,9-11,9	10,5-11,5
Ekspor	(9,5)	(2,0)	3,1	14,7	11,9	5,4-6,4	4,4-5,4
Impor	(7,1)	6,1	5,4	9,4	(1,6)	6,1-7,1	6,1-7,1
Sisi Lapangan Usaha							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,9	4,6	4,9	10,4	10,0	6,4-7,4	5,4-6,4
Pertambangan dan Penggalian	(3,8)	5,3	5,6	9,6	11,4	5,7-6,7	7,4-8,4
Industri Pengolahan	9,0	8,7	9,2	15,2	9,5	8,4-9,4	8,5-9,5
Pengadaan Listrik, Gas	10,1	16,2	8,2	15,0	10,6	7,0-8,0	7,0-8,0
Pengadaan Air	12,6	3,5	5,5	(1,2)	2,1	4,7-5,7	5,0-6,0,
Konstruksi	6,9	9,9	10,6	5,1	6,1	6,3-7,3	6,6-7,6
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,3	11,9	7,2	3,4	7,1	8,7-9,7	9,3-10,3
Transportasi dan Pergudangan	13,0	13,4	6,4	4,8	2,1	4,0-5,0	6,0-7,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,7	11,4	6,8	5,6	7,8	5,4-6,4	6,0-7,0
Informasi dan Komunikasi	11,8	20,6	14,1	6,6	5,8	8,0-9,0	8,7-9,7
Jasa Keuangan	19,8	15,9	9,3	11,9	5,9	5,0-6,0	5,4-6,4
Real Estate	11,1	10,5	9,0	9,0	8,0	7,4-8,4	9,6-10,6
Jasa Perusahaan	9,0	8,0	7,0	7,4	6,8	7,1-8,1	8,3-9,3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,5	2,2	3,1	0,7	1,0	4,4-5,4	5,0-6,0
Jasa Pendidikan	10,4	7,5	7,7	3,1	4,7	6,8-7,8	6,8-7,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,0	10,7	8,2	3,3	10,2	7,8-8,8	8,8-9,8
Jasa lainnya	6,7	8,1	7,1	9,4	7,6	7,1-8,1	6,9-7,9
PDRB	**8,13**	**8,9**	**7,6**	**7,7**	**7,6**	**6,9-7,9**	**7,5-8,5**
Inflasi	**2,9**	**4,4**	**6,2**	**8,6**	**8,6**	**7,4-8,4**	**3,4-4,4**

Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Regional
Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV – 2014

[P] proyeksi Bank Indonesia

Grafik Perkembangan Laju Inflasi Sulawesi Selatan dan Proyeksinya

Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV – 2014

PELUANG INVESTASI DI SULAWESI SELATAN

Sulawesi Selatan merupakan salah satu Propinsi di Indonesia yang memiliki nilai strategis dalam konstalasi pembangunan Indonesia. Selain memiliki sumberdaya alam yang cukup besar, khususnya di bidang Pertanian, Pertambangan dan Pariwisata. Dengan letak strategis ditengah-tengah Indonesia dan menjadi pintu gerbang sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Timur Indonesia. Oleh karena itu Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif sekaligus kompetitif untuk kegiatan investasi.

Keunggulan berinvestasi di Sulawesi Selatan yaitu:

1. Posisi yang strategis secara ekonomi sehingga berperan sebagai pusat pelayanan angkutan udara dan laut di Kawasan Timur Indonesia dan Pusat pelayanan jasa perdagangan, industri serta perbankan.

2. Wilayah yang relatif aman bagi kegiatan investasi di Indonesia, dimana gejolak masyarakat dan komunitas buruh relatif rendah.

3. Keanekaragaman potensi sumber daya alam untuk investasi. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai bagi kegiatan investasi.

4. Kawasan Timur Indonesia sebagai pasar potensial yang belum termanfaatkan secara maksimal.

5. Komitmen Pemerintah Daerah yang sangat kuat dalam memberikan kemudahan bagi investor.

6. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas.

7. Ketersediaan lahan yang masih luas dan relatif murah.

Keunggulan Kompetitif

Pencapaian selama tahun 2014 menunjukkan kemampuan Bank Sulselbar untuk mengelola keunggulan dan peluang yang dimiliki untuk terus tumbuh dan berkembang positif dari tahun ke tahun. Keunggulan yang dimiliki merupakan potensi strategis untuk dimanfaatkan dalam rangka

mendorong kemajuan Bank Sulselbar di tahun – tahun mendatang.

Keunggulan kompetitif Bank Sulselbar sebagai berikut :

Basis Nasabah dan Jaringan yang Luas di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Potensi yang menjadi keunggulan kompetitif Bank Sulselbar dalam menjalankan aktivitas bisnisnya yaitu jaringan kantor yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jaringan yang luas merupakan bagian dari strategi penetrasi pasar Bank Sulselbar untuk memperluas *coverage area* operasional khususnya di daerah baru yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Jaringan kantor yang luas juga akan mendukung peningkatan volume bisnis, menciptakan dan memelihara loyalitas nasabah serta memperluas customer base dan *market share* Bank Sulselbar.

Bank Sulselbar memiliki 88 jaringan kantor dan 96 terminal ATM yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta Jakarta yang terhubung secara online. Sampai dengan 31 Desember 2014, Bank Sulselbar memiliki 377.546 rekening simpanan dan ..... rekening kredit serta 57.946 pemegang Kartu ATM dan 159.795 pemegang Kartu KPE berlogo Bank Sulselbar. Basis nasabah yang besar merupakan dasar yang kuat untuk memasarkan produk dan jasa Bank Sulselbar.

Inovasi untuk Mendorong Pertumbuhan Bisnis

Untuk mencapai pertumbuhan dan target bisnis yang optimal, inovasi menjadi faktor pendorong penting untuk senantiasa memberikan layanan dan produk yang kompetitif bagi nasabah. Inovasi yang dilakukan sebagai respon atas dinamisnya kebutuhan pasar sehingga diharapkan dengan inovasi yang terus menerus dapat mempertahankan dan meningkatkan jumlah basis nasabah Bank Sulselbar.

Diantaranya dengan melakukan pembukaan jaringan kantor baru di lokasi yang strategis, baik di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Begitu juga di daerah lainnya yang dipandang potensial untuk mendukung pencapaian strategi pertumbuhan bisnis Bank Sulselbar.

Dari aspek produk dan jasa, Bank Sulselbar merancang strategi diversifikasi produk dan layanan dengan, menciptakan produk baru yang kompetitif, penambahan fitur — fitur pada *existing* layanan dan produk, dan menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan yang leading di bidangnya untuk melahirkan produk dan layanan baru seperti kerjasama *co-branding* dan bancassurance.

Bank Sulselbar telah mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2007 untuk menyediakan alternatif layanan berbasis syariah bagi nasabah Bank Sulselbar. UUS Bank Sulselbar mencatatkan pencapaian kinerja yang terus bertumbuh secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, Bank Sulselbar telah membuka 1 (satu) kantor cabang pertama yang berada di luar Pulau Sulawesi, yaitu

Cabang Jakarta. Bank Sulselbar Cabang Jakarta memberikan kontribusi yang cukup signifikan khususnya dalam peningkatan komposisi penghimpunan dana masyarakat.

Diversifikasi produk dilakukan antara lain dengan menciptakan produk baru dan mendesain produk turunan dari *existing* produk yang sudah ada. Strategi diversifikasi ini bertujuan sebagai salah satu upaya untuk mencapai target BPD regional champion yaitu keragaman produk. Pada tahun 2010, telah dilakukan pengembangan *existing* produk simpanan, yaitu tabungan Tapemda. Pengembangan yang dilakukan yakni dengan memperkaya segmen nasabah tabungan Tapemda yang sebelumnya diperuntukkan bagi pensiunan PNS. Hingga saat ini nasabah dari segmen petani dan nelayan juga telah memiliki produk tabungan yang diberi nama Tapemda Sayang Petani. Demikian pula halnya bagi para pelajar dan mahasiswa dengan tabungan Tapemda Pelajar.

Upaya inovasi untuk meningkatkan volume bisnis dan memperluas market share pendanaan Bank Sulselbar dibuktikan pula dengan diluncurkannya produk tabungan berbasis asuransi yang pertama dari Bank Sulselbar pada tahun 2011 yaitu Tabungan Masa Depan (TAMPAN).

Selanjutnya, pada tahun 2013, Bank Sulselbar melakukan aliansi strategis dengan Bank Mandiri dalam meluncurkan Kartu kredit Bank Sulselbar. Penerbitan Kartu Kredit Bank Sulselbar ini sebagai wujud komitmen terus memberikan layanan yang lengkap dan kemudahan bagi nasabah sebagai upaya berkelanjutan untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang unggul. Trend nasabah yang makin *cashless* di era digital ini harus dipenuhi melalui suatu produk yang dapat digunakan sebagai substitusi transaksi dengan menggunakan uang tunai. Hal ini merupakan value yang ditawarkan kepada nasabah untuk meretensi nasabah *existing*, Perihal lainnya yang ingin dicapai adalah pertumbuhan nasabah baru dari bisnis kartu kredit.

Penetrasi pasar dilakukan untuk memperluas segmen nasabah diluar *captive market* Bank Sulselbar yaitu PNS seperti Karyawan swasta, karyawan BUMN /BUM D, TNI/Polri, Pengusaha / Wiraswasta, atau Profesional lainnya yang tentunya dari sisi bisnis juga bertujuan untuk meningkatkan FBI (*Fee Based Income*).

Memiliki Potensi Pasar yang Prospektif

Bank Sulselbar memiliki potensi *captive market* yang sangat besar yaitu pegawai negeri sipil (PNS) pada Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Su-

lawesi Barat dan akan terus bertambah seiring dengan penerimaan PNS baru yang berlangsung hampir setiap tahun. Selain menyediakan produk pendanaan dalam bentuk tabungan dan deposito untuk pengelolaan dana simpanan yang aman, Bank Sulselbar juga melayani kebutuhan pembiayaan melalui kredit konsumtif, KPR dan produktif. Kredit produktif bagi PNS merupakan produk pembiayaan unggulan Bank Sulselbar dengan memberikan pinjaman bagi PNS yang memiliki usaha dan atau mengelola usaha produktif.

Potensi pasar Bank Sulselbar lainnya yaitu masyarakat umum, korporasi dan UMKM dengan fokus pada sektor produktif, baik investasi maupun modal kerja. Bank Sulselbar senantiasa mendukung program pemerintah daerah dengan menyalurkan pembiayaan untuk proyek - proyek pembangunan pemerintah daerah, baik Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Prov. Sulawesi Barat. Pembiayaan untuk proyek pemerintah daerah yaitu dengan menyalurkan kredit modal kerja

kepada kontraktor yang mengerjakan proyek - proyek yang sumber dananya berasal dari APBD maupun dari APBN.

Di samping itu, sebagai wujud peran serta Bank Sulselbar dalam pembangunan nasional secara umum maupun pembangunan daerah, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi barat, Bank Sulselbar juga turut berpartisipasi membiayai proyek -– proyek secara sindikasi sebagai partisipan karena keterbatasan resource yang dimiliki. Bentuk dukungan dan peran serta Bank Sulselbar dalam mengembangkan sektor UMKM yaitu dengan menyediakan pembiayaan produktif dan kredit program bagi para pelaku usaha sektor UMKM.

Arah Kebijakan Manajemen

Bank Sulselbar dalam menjalankan dan mencapai tujuan bisnisnya senantiasa berupaya untuk menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan melalui perumusan arah kebijakan dan rencana strategis perusahaan. Arah kebijakan dan strategi Bank Sulselbar untuk mencapai tujuan bisnis dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Komposit Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) dan GCG
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi
3. Penyempurnaan struktur organisasi berdasarkan prioritas guna peningkatan daya saing organisasi.
4. Peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan.
5. Peningkatan fungsi intermediasi dengan menghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit sesuai dengan amanah BRC serta ketentuan regulasi.
6. Diverifikasi dan pengembangan produk yang sesuai dengan market yang disasar dan pembukaan aktivitas baru serta memperluas akses jaringan kantor.
7. Peningkatan modal bank dari setoran saham, laba ditahan, saham internal.
8. Rasio keuangan minimum sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia dan rasio BPD *regional champion* dan memonitor pelaksanaannya.

9. Manajemen aset, membuat lingkungan kerja yang sehat, nyaman dan aman, penyesuain saran dan prasarana operasional dengan pembangunan gedung kantor serta melakukan standarisasi *lay out* dan desain *banking hall* guna meningkatkan *brand image* bank.

10. Penguatan sistem teknologi informasi melalui proses, people, dan teknologi yang cukup sesuai dengan efektif dan efesien.

11. Mendorong pertumbuhan UUS dengan memaksimalkan infrastruktur dan jaringan yang dimiliki oleh Bank Sulselbar menjadi lebih inklusif.

12. Melaksanakan perubahan budaya kerja, pola pikir dan perilaku SDM Bank dengan pendekatan sistem integrasi perencanaan strategis, anggaran dan manajemen kinerja.

13. Melaksanakan upaya – upaya pengendalian internal berupa pencegahan kerugian Bank dan penindakan secara tegas terhadap kasus – kasus tindak kecurangan (fraud) di Bank berupa praktek – praktek Korupsi, Kolusi dan Nepostime (KKN) terkait dengan hubungan pegawai dan pihak ketiga (nasabah dan pemasok barang/jasa).

Strategi Bisnis Bank

Rencana Jangka Pendek

Rencana jangka pendek kegiatan usaha Bank Sulselbar meliputi strategi *repackaging* produk/aktivitas baru dan pengembangan jaringan kantor. Pada tahun 2015 telah direncanakan untuk melakukan *repackaging* produk dan fitur -– fitur transaksi untuk pendanaan dan pembiayaan guna memberikan nilai tambah produk bagi nasabah Bank Sulselbar. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan komposisi dana pihak ketiga dengan pertumbuhan yang berimbang dan meningkatkan penghimpunan dana berbiaya rendah (*low cost*). Dalam hal penyaluran kredit dan pembiayaan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit yang berkualitas dengan fokus pada kredit sektor produktif. Di samping itu, untuk mendorong pertumbuhan bisnis Bank kearah *transaction banking* , maka bank akan meluncurkan produk *internet banking* dan *mobile banking* yang akan dibangun dalam satu *platform*.

Untuk mencapai target peningkatan pendanaan dan penyaluran pembiayaan, Bank Sulselbar akan

mengembangkan jaringan kantor konvensional dan unit usaha syariah yang meliputi pembukaan kantor cabang (konvensional dan syariah) dan kantor kas, peningkatan status payment point, relokasi kantor kas dan penambahan jaringan. Pengembangan jaringan kantor Bank Sulselbar diprioritaskan pada daerah - daerah yang potensial, baik di kawasan perekonomian daerah, perkantoran maupun pemukiman penduduk dengan sebaran terbesar di Sulawesi Selatan.

-

Rencana Jangka Menengah

Rencana jangka menengah Bank Sulselbar dituju kan untuk mencapai sasaran – sasaran kinerja sebagai berikut :

• Penguatan infrastruktur utama (IT, Manajemen Risiko dan Kantor Cabang) dalam rangka mendukung akselarasi bisnis.

• Menetapkan struktur organisasi kantor cabang yang disesuaikan dengan komplesitas bisnis serta visi dan misi strategis Bank Sulselbar.

• Implementasi dan sosialisasi *corporate culture* Bank Sulselbar.

• Implementasi perbaikan, pembenahan dan pelaksanaan sistem pengarsipan agar lebih modern

dan aman.

• Pengembangan perbankan syariah dengan melaksanakan program transformasi yang difokuskan

pada peningkatan modal dan pengembangan jaringan operasional.

• Impelementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang senantiasa berlandaskan pada prinsip – prinsip GCG .

Unit Usaha Syariah

Arah Kebijakan

Bank Sulselbar menetapkan arah kebijakan pengembangan jangka panjang UUS dengan tujuan melepas unit bisnisnya tersebut untuk mandiri (*spin off*) dengan target maksimal di tahun 2023 sesuai dengan kebijakan regulator. Diharapkan di tahun tersebut aset dan modal UUS telah mencapai posisi yang ideal untuk dilepas. Untuk itu arah pengembangan jangka pendek dilakukan dengan mengejar pertumbuhan aset yang maksimal serta modal yang terukur dengan merubah model bisnisnya yang dahulu *end to end* menjadi lebih *inklusif* dengan memaksimalkan infrastruktur dan jaringan yang dimiliki oleh Bank Sulselbar.

Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi misi sesuai dengan arah kebijakan tersebut maka langkah strategis yang dilakukanpun sama dengan induknya yaitu :

1. Mendukung upaya untuk memperbesar porsi pembiayaan produktif, dengan komposisi yang diharapkan sebesar 60% dengan dukungan produk pembiayaan syariah yang variatif

2. Pelayanan prima yaitu pelayanan dengan sepenuh hati, menjiwai dengan berperilaku 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) setiap saat, memberikan nilai tambah kepada nasabah, memberikan solusi layanan yang cepat dan akurat, menjalankan standar layanan dengan konsisten serta memahami kebutuhan dan keinginan nasabah.

3. Mendukung upaya penghimpunan dana pihak ketiga masyarakat (di luar dana Pemda) dengan dukungan produk simpanan syariah.

SUKU BUNGA DASAR KREDIT (SBDK)

Perkembangan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

Berdasarkan Surat Edaran Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 13/g/DpG/DPNP tanggal 30 Maret 2011 perihal Penerapan Surat Edaran Transparansi Informasi SBDK guna meningkatkan transparansi mengenai karakteristik produk perbankan termasuk manfaat, biaya dan risikonya dalam rangka memberikan kejelasan kepada nasabah, dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan melalui terciptanya disiplin pasar yang lebih baik, maka Bank diwajibkan untuk menyampaikan informasi mengenai suku bunga kredit yang berlaku di Bank. Kewajiban publikasi SBDK yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember untuk posisi SBDK akhir bulan-bulan tersebut yang dipublikasikan melalui surat kabar harian dan website Bank Sulselbar.

Selama tahun 2014, Suku Bunga Dasar Kredit Bank Sulselbar beberapa kali mengalami perubahan. Hal tersebut seiring dengan peningkatan suku bunga BI rate yang juga mengalami peningkatan pada tahun 2014. Suku Bunga Dasar Kredit Bank Sulselbar secara bulanan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

SUKU BUNGA DASAR KREDIT (*PRIME LENDING RATE*) BANK SULSELBAR TAHUN 2014

Suku Bunga Dasar Kredit (PRIME LENDING RATE)	Suku Bunga Dasar Kredit (*Prime Lending Rate*) Berdasarkan Segmen Bisnis				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
Januari	12,63%	13,03%	12,81%	11,63%	15,49%
Februari	12,63%	13,05%	12,82%	11,63%	15,92%
Maret	12,66%	13,30%	12,90%	11,77%	16,55%
April	12,66%	13,13%	12,86%	11,66%	16,68%
Mei	12,66%	13,12%	12,86%	11,66%	16,70%
Juni	12,66%	13,42%	12,94%	11,65%	16,87%
Juli	12,66%	13,42%	12,94%	11,65%	16,87%
Agustus	12,66%	13,27%	12,94%	11,66%	16,80%
September	12,65%	13,30%	12,92%	11,65%	16,73%
Oktober	12,65%	13,30%	12,94%	11,65%	16,77%
November	10,64%	11,12%	12,05%	9,64%	15,94%
Desember	10,64%	11,15%	12,05%	9,64%	15,94%

Keterangan:

a. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK ini belum memperhitungkan komponen premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK

b. Dalam Kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan.

c. Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi disetiap kantor Bank Sulselbar dann / atau website banksulselbar (www.banksulselbar.co.id)

ANALISIS OPERASIONAL

TERIMAKASIH

TEKNOLOGI INFORMASI

Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi

Bank Sulselbar berkomitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM TI. Dukungan SDM di bidang TI yang handal sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional bisnis Bank serta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM di bidang TI agar senantiasa mengikuti perkembangan teknologi informasi terbaru pada industri perbankan. Untuk itu, selama tahun 2014 telah dilakukan pelatihan di bidang teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan *skill* dan kompetensi SDM TI dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan, seminar, *workshop* terkait teknologi informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan bisnis Bank.

Mitra Bank Sulselbar untuk Pengembangan Teknologi Informasi

Pengembangan produk dan layanan yang berbasis teknologi informasi pada Bank Sulselbar dapat dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa mitra kerja yang profesional dan handal di bidang teknologi informasi. Biaya investasi yang besar dan kompleksnya cakupan pengembangan teknologi informasi merupakan kendala yang harus dihadapi Bank untuk mendukung perkembangan bisnis Bank yang integratif. Untuk itu, Bank telah menjalin kerja sama dengan beberapa mitra guna mengefisienkan besarnya biaya investasi. Adapun mitra kerja sama Bank dalam pengembangan teknologi informasi, sebagai berikut :

Mitra Kerjasama	Bidang Kerjasama
PT. Mantra Global Konsultan	Core Banking
PT. Metalogix Info Link Persada	ATM Switching
PT. Praweda	Interface RTGS
PT. Sarana Pactindo	Electronic Data Capture
PT. Artajasa	Jaringan ATM Bersama & Modul Pembayaran PLN
PT. Rintis Sejahtera	Jaringan ATM Prima
Internet Cipta Rekayasa	e-Tax (MPN)

Investasi Teknologi Informasi 2014

Guna mewujudkan teknologi informasi Bank yang terkini, handal dan terpercaya untuk mendorong kelancaran operasional bisnis, Bank Sulselbar telah mengalokasikan dana untuk keperluan investasi di bidang TI. Pengembangan teknologi informasi Bank Sulselbar pada tahun 2014 tidak hanya pada pengadaan perangkat keras, tetapi juga perangkat lunak untuk menjamin kecepatan dan kemudahan transaksional.

Rencana Teknologi Informasi Tahun 2015

Pengembangan teknologi informasi Bank akan difokuskan pada perbaikan dan optimalisasi seluruh aspek sumber daya teknologi informasi yang dimiliki untuk meningkatkan layanan dengan menjaga konsistensi kualitas layanan dalam memenuhi aspek *zero complaint*. Pemenuhan akan regulasi TSI (Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007) akan menjadi fokus utama untuk menciptakan sistem informasi yang aman dan baik terhadap *threat* maupun kepatuhan akan regulasi yang berlaku.

Fokus utama pengembangan teknologi informasi tahun 2015 sebagai berikut :

1. Mendukung rencana kerja Bank sesuai kebijakan manajemen dan rencana strategis teknologi informasi.
2. Melanjutkan transformasi perangkat infrastruktur (hardware, software, dan network) secara bertahap dan berkesinambungan sesuai manajemen kapasitas yang ada.
3. Melakukan penyesuaian, penyempurnaan dan perbaikan tata kelola informasi (core banking system) sesuai kebijakan dan regulasi yang berlaku serta berdasarkan rekomendasi dari temuan pemeriksaan.

4. Peningkatan dan optimalisasi sumber daya TI yang handal untuk menjamin ketersediaan layanan secara berkesinambungan.

5. Penyediaan layanan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, dalam bentuk mitra strategis untuk sentralisasi tata kelola keuangan, sistem penerimaan dan pengeluaran.

Strategi Inisiatif Penguatan Sistem Teknologi Informasi

Strategi inisiatif penguatan sistem teknologi informasi Bank, sebagai berikut :

1. Pengembangan aplikasi seiring dengan bertambahnya fitur dan produk Bank. Pengembangan aplikasi juga memungkinkan sistem Bank Sulselbar untuk berkomunikasi dengan sistem lain yang dapat memperluas jangkauan layanan Bank Sulselbar.

2. Peningkatan kapabilitas TI yang mampu mendukung pencapaian tujuan binis bank yang memerlukan pengembangan *hardware*. Khususnya kapabilitas yang akan menambah ragam *electronic delivery channels*. Kapabilitas TI terkait implementasi *e-mail* dan *website* juga memerlukan pengembangan *hardware* seperti pengembangan *firewall* dan *monitoring tools*.

3. Mengembangkan *server Disaster Recovery Center* (DRC) guna optimalisasi kemampuannya untuk mendukung kelangsungan bisnis pada saat terjadi gangguan (*disaster*).

4. Implementasi *security policy* yang meliputi jaringan, *hardware*, *software*, dan kebijakan untuk memastikan koneksi sistem *core banking* ke jaringan eksternal melalui *middleware* dan *interface* berlangsung lebih mudah, efesien dan aman.

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi di Masa Mendatang

Pengembangan teknologi informasi Bank untuk tahun 2015 dan periode berikutnya akan senantiasa diarahkan sejalan dengan upaya mewujudkan dengan visi dan misi Bank Sulselbar. Teknologi informasi yang terkini memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, mendukung bisnis bank yang lebih progresif, pemenuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah dari sisi Kepatuhan dan GCG, serta mewujudkan pencapaian target BPD *regional champion*.

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas merupakan komitmen tertinggi Bank Sulselbar dalam rangka mendukung peran dan kontribusi SDM secara optimal untuk mewujudkan strategi dan target usaha Bank. Bank Sulselbar memandang bahwa SDM merupakan aset utama perusahaan, sehingga senantiasa menjadi prioritas dalam pengelolaannya. Dan karenanya, Bank secara terus menerus melakukan penyempurnaan dan penyelarasan pada sistem dan prosedur SDM.

Kebijakan yang tertuang dalam sistem dan prosedur SDM yakni pengelolaan SDM yang terintegrasi dan komprehensif. Untuk itu, Bank Sulselbar telah menyusun Sistem dan Prosedur SDM untuk diimplementasikan ke seluruh jajaran organisasi secara konsisten dan terintegrasi.

Bank Sulselbar secara konsisten dan berkesinambungan terus berupaya untuk membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia menjadi handal, terampil dan profesional yang akan melahirkan pegawai yang produktif. Di samping itu, kesejahteraan pegawai akan menumbuhkan rasa nyaman untuk berkarya lebih maksimal, sehingga akan berimplikasi pada peningkatan produktifitas dan *returns* bagi bank. Peningkatan potensi SDM menjadi perhatian utama manajemen untuk dikelola secara berkelanjutan agar SDM Bank Sulselbar dapat memberdayakan potensinya dengan optimal dalam mencapai tujuan, visi dan misi sehingga Bank Sulselbar dapat berada pada posisi yang lebih baik dan kompetitif di masa mendatang.

Grup Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Bank Sulselbar dikelola melalui Grup Sumber Daya Manusia yang fungsinya mengelola pengembangan dan peningkatan mutu SDM yang profesional guna menyukseskan misi perusahaan. Grup SDM secara berkesinambungan berupaya menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan, baik dalam jumlah maupun kualitas SDM yang diharapkan dapat berperan dalam melaksanakan fungsi – fungsi organisasi secara maksimal. Dan secara keseluruhan, Grup SDM Bank Sulselbar bertanggung jawab terhadap pengelolaan SDM secara komprehensif meliputi rekruitmen, pengembangan kompetensi, manajemen karir, dan peningkatan kesejahteraan.

Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan sumber daya manusia oleh Bank Sulselbar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam upaya mencapai tujuan strategis bank. Ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi, baik kualitatif maupun kuantitatif, merupakan dasar yang kuat untuk menjaga keberlangsungan bisnis untuk terus bertumbuh optimal. Oleh karena itu, pemenuhan ketersediaan SDM yang kompeten prosesnya telah dilakukan sejak awal yaitu melalui program rekrutmen yang terencana. Selain rekrutmen, perencanan SDM Bank Sulselbar juga mencakup kompensasi, pendidikan dan pelatihan, struktur kerja dan promosi.

Kesamaan Hak dan Kesempatan Kerja Yang Sama

Bank Sulselbar memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada seluruh pegawai dalam mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan gender, golongan, suku, agama, ras, dan kondisi fisik. Setiap pegawai yang telah memenuhi persyaratan memiliki hak yang sama untuk menduduki posisi atau jabatan yang lebih tinggi setelah melalui tahapan seleksi yang keputusannya menjadi kewenangan manajemen.

Sistem Informasi Manajemen SDM

Dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik dan terintegrasi, maka Grup SDM Bank Sulselbar saat ini dalam proses pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen SDM berbasis kompetensi yakni *Human Resources Information System* (HARIS).

Rekrutmen

Bank Sulselbar melaksanakan rekrutmen sebagai sebuah proses pencarian sumber daya manusia, kuantitas maupun kualitas, untuk memenuhi kebutuhan SDM yang akan mendukung operasional dan bisnis Bank Sulselbar yang terus bertumbuh.

Pemenuhan kebutuhan SDM Bank Sulselbar untuk mengisi berbagai posisi dalam struktur organisasi dengan melakukan rekrutmen dari eksternal bank dengan tetap memperhitungkan efesiensi dan efektivitas serta merupakan proses alih pengetahuan dan keterampilan bagi pegawai Bank Suslelbar. Mekanisme rekrutmen Bank Sulselbar antara lain dilakukan dengan :

- Rekrutmen Terbuka melalui pemasangan iklan/informasi rekrutmen pada media cetak maupun media elektronik dengan status Calon Pegawai
- Rekrutmen Tenaga Berpengalaman dengan status *pro hire*
- Rekrutmen Tenaga Kontrak Ahli
- Rekrutmen melalui penyedia jasa *outsorcing* dengan status pegawai magang dan atau kontrak

a. Rekrutmen yang diselenggarakan Bank Sulselbar dalam 7 tahun terakhir sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI BARU YANG DIREKRUT BANK SULSELBAR

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
145	1	142	33	43	63	2	179

Rekrutmen yang diselenggarakan Bank Sulselbar dalam tahun 2014 sebagai berikut :

- Rekrutmen Tenaga Kontrak Ahli sebanyak 5 (lima) orang
- Rekrutmen Tenaga Frontliner & Back office 165 (seratus enam puluh lima) orang
- Rekrutmen Tenaga Marketing Funding sebanyak 7 (tujuh) orang
- Rekrutmen Tenaga Teknisi sebanyak 2 (dua) orang

b. Kebijakan Rekrutmen

Penyelenggaran rekrutmen Bank Sulselbar dilakukan secara independen dan transparan melalui kerjasama dengan pihak eksternal yaitu lembaga atau *assessor* rekrutmen seperti Universitas Hasanuddin, PPM Manajemen, LPPI, Kimia Farma, RS. Labuang Baji, Universitas Negeri Makassar, Prospek Human Capital dan sebagainya.

Komposisi dan Jumlah Pegawai

Seiring dengan pertumbuhan aset Bank Sulselbar, jumlah pegawai meningkat 12,15% pada tahun 2014 sebanyak 1.163 orang dibandingkan tahun 2013 sebanyak 1.037 pegawai. Sampai dengan 31 Desember 2014, jumlah pegawai tetap Bank Sulselbar mencapai 1.069 orang. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 939 orang. Kenaikan tersebut diakibatkan adanya penambahan pegawai sehubungan dengan pertumbuhan bisnis dan jaringan bank.

Pada tahun 2014 pegawai kontrak atau tidak tetap berjumlah 94 orang, terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebanyak 98 orang. Hal ini diakibatkan tidak diperpanjangnya atau berakhirnya masa kontrak pegawai tersebut dengan bank.

Sementara pertumbuhan tenaga *outsourcing*, seperti satuan pengamanan, sopir dan pesuruh pada tahun 2014 sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) orang atau menurun dari tahun 2013 yang tercatat sebanyak 435 orang. Hal in i diakibatkan oleh adanya penyesuaian/standarisasi jumlah tenaga alih daya (outsourching) oleh internal bank.

Komposisi pegawai Bank Sulselbar berdasarkan pendidikan, status kepegawaian, jenis kelamin dan usia sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	31 Desember						
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Pasca Sarjana	32	37	37	41	44	39	38
Sarjana/Sarjana Muda	764	611	641	589	552	529	404
SLTP/SLTA	347	367	372	381	389	400	414
SD	20	22	24	26	28	29	30
Jumlah	1.163	1.037	1.074	1.037	1.013	997	886

Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian:

Status Kepegawaian	31 Desember						
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Tetap	1069	939	978	929	899	851	733
Tidak Tetap	94	98	96	108	114	146	153
Jumlah	**1.163**	**1.037**	**1.074**	**1.037**	**1.013**	**997**	**886**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	31 Desember						
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Laki-laki	762	939	978	929	899	851	733
Perempuan	401	98	96	108	114	146	153
Jumlah	**1163**	**1.037**	**1.074**	**1.037**	**1.013**	**997**	**886**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Usia	31 Desember						
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
20 – 30 Tahun	396	307	318	303	303	297	220
31 – 40 Tahun	358	348	394	382	364	366	361
41 – 50 Tahun	310	277	259	254	253	251	228
Lebih dari 50 Tahun	99	105	103	98	93	83	77
Jumlah	**1.163**	**1.037**	**1.074**	**1.037**	**1.013**	**997**	**886**

Komposisi pegawai Bank Sulselbar yang berusia muda dengan rentang usia 20 – 40 tahun sebesar 64,83% dari jumah seluruh pegawai Bank Sulselbar pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai Bank Sulselbar antara yang berusia muda dan yang berusia di atas 40 tahun yang memiliki pengalaman lebih banyak hampir seimbang, yang pada akhirnya akan membentuk suatu entitas organisasi bisnis yang terus berkembang dengan progresif.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

	31 Desember					
	2014	2013	2012	2011	2010	2008
Komisaris	4	4	3	3	4	4
Dewan Pengawas Syariah	3	3	3	3	3	3
Direksi	3	4	4	4	4	4
Job Grup 12	12	12	11	16	16	10
Job Grup 11	15	15	18	9	10	2
Job Grup 10	36	38	38	49	48	48
Job Grup 9	22	15	18	10	12	13
Job Grup 8	47	39	45	37	27	21
Job Grup 7	139	141	130	127	114	115
Job Grup 6	115	88	99	114	110	62
Job Grup 5	135	181	174	168	182	240
Job Grup 4	416	271	306	257	235	214
Job Grup 3	6	6	7	8	8	9
Job Grup 2	118	106	109	111	112	113
Job Grup 1	8	23	23	23	21	0
Jumlah	**1069**	**946**	**988**	**939**	**906**	**858**

Tingkat *Turn Over*

Selama tahun 2014, terdapat 3 (tiga) orang pegawai yang mengajukan permohonan pengunduran diri, terdiri dari 3 (tiga) orang level staf.

Alasan pengunduran disebabkan karena :

1. Mengembangkan usaha sendiri/keluarga agar lebih fokus;
2. Diterima/mendapat pekerjaan ditempat lain yang lebih sesuai dengan pilihannya;
3. Melangsungkan pernikahan dengan sesama pegawai Bank Sulselbar;
4. Lebih fokus mengurus keluarga;

Dengan demikian, pada tahun 2014, dari 1.069 pegawai tetap Bank Sulselbar, terdapat 3 (tiga) orang pegawai yang mengundurkan diri. Berdasarkan angka ini, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat *turnover* Bank Sulsebar hanya sebesar 0,3%. Lingkungan kerja yang kondusif dengan suasana kerja yang sehat dan nyaman menjadi alasan rendahnya tingkat *turnover* Bank Sulselbar selama tahun 2014. Dan ke depannya, Bank Sulselbar terus berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang dapat mendukung seluruh pegawai untuk bekerja dan berkontribusi lebih optimal bagi perusahaan.

***Turn Over* Pegawai Bank Sulselbar**

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Mengundurkan Diri	Jumlah Pegawai Bank Sulselbar	Proporsi
	2014	2013	2012
2007	0	904	0%
2008	6	886	0,7%
2009	4	997	0,4%
2010	2	1.013	0,2%
2011	3	1.037	0,3%
2012	1	1.074	0,1%
2013	10	1.037	1 %
2014	**3**	**1.163**	**0,3%**

Jumlah Pegawai Pensiun dan Masa Persiapan Pensiun

Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pensiun	7	16	9	13	16	42	34
Masa Persiapan Pensiun	0	0	7	11	21	20	19
Jumlah	**7**	**16**	**16**	**24**	**37**	**62**	**53**

Pengembangan SDM

Kompetensi dan produktivitas pegawai senantiasa menjadi fokus Bank Sulselbar untuk terus ditingkatkan demi mendukung kelangsungan bisnis dan pencapaian target perusahaan yang optimal. Selain itu, lingkungan kerja yang sehat juga memiliki peran penting guna memotivasi pegawai untuk terus memberikan sumbangsih yang terbaik yang dimilikinya bagi perusahaan.

Bank Sulselbar memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk dapat mengikuti program pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan wawasan dan keahlian. Program – program terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan tahun 2014, antara lain :

Program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdasarkan *training need analysis* dengan memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan, *job description* dan perkembangan bisnis dan organisasi. Pendidikan dan pelatihan kepada pegawai dilakukan secara *inhouse* maupun *exhouse training*. Program pendidikan dan pelatihan Bank Sulselbar tahun 2014 sebagai berikut :

1. Pendidikan karir yang dilaksanakan secara reguler dan bertujuan untuk mengantisipasi rencana pengembangan organisasi dan jaringan kantor cabang, serta pengembangan karir. Bank Sulselbar telah melaksanakan program ini dengan baik, di antaranya adalah

Pelatihan Manajer Lini Pertama, Manajer Madya, Sertifikasi Pemimpin Cabang Konvensional dan Syariah, Pelatihan ALMA, Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (Sespibank). Pegawai yang diikutsertakan dalam pendidikan karir pada tahun 2014 sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang.

2. Pendidikan dan pelatihan di bidang teknis perbankan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai, antara lain Pendidikan Akuntansi Bank, Analis Kredit, *Account Officer*, dll. Terdapat 1.230 orang pegawai yang diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis perbankan pada tahun 2014.

3. Pelatihan maupun sosialisasi terkait dengan tranformasi organisasi dan pengembangan jaringan dilakukan melalui pelatihan Budaya Kerja, Nilai – Nilai Perusahaan dan Layanan Prima yang diikuti oleh 185 orang.

4. Pendidikan akademis, dengan memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan S-2 dan S-3. Sepanjang tahun 2014 tidak terdapat pegawai Bank Sulselbar yang diikutkan pendidikan akademis S-2 dan S-3.

5. Dalam hal pengelolaan risiko bank, sebagai bagian kepatuhan (*compliance*) bank terhadap peraturan Bank Indonesia, Bank Sulselbar secara konsisten mengikutsertakan pejabat dan staf untuk mengikuti program Sertifikat Manajemen Risiko dan pendidikan di bidang *risk management* secara berkelanjutan. Sebanyak 544 orang telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko pada tahun 2013, sehingga total pegawai Bank Sulselbar yang telah memegang Sertifikasi Manajemen Risiko sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Bank Sulselbar dengan Sertifikasi Manajemen Risiko

Sertifikasi Manajemen Risiko	2014	2013	2012	2011
Level I	100	98	149	149
Level II	185	223	95	95
Level III	212	176	91	93
Level IV	57	39	3	3
Level V	5	8	1	1

Anggaran Pelatihan 2014

Biaya untuk program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Bank Sulselbar tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp15.444 juta dan terealisasikan sebesar Rp11.017 juta atau sekitar 71,34 % dari anggaran yang direncanakan.

Biaya Pendidikan terhadap Biaya Tenaga Kerja Bank Sulselbar Tahun 2007 – 2014

Tahun	Biaya Pendidikan	Biaya Tenaga Kerja	Proporsi (%)
	Rp Juta		
2014	11.017	337.008	3,27%
2013	11.746	312.355	3,76 %
2012	7.192	275.279	2,61%
2011	8.552	207.785	4,12%
2010	7.100	224.390	3,16%
2009	5.395	177.022	3,05%
2008	5.746	170.933	3,36%
2007	2.257	133.526	1,69%

Program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tahun 2015

Program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Bank Sulselbar bertujuan untuk membentuk, mempersiapkan, membina, dan meningkatkan kompetensi serta kualitas pegawai secara berkesinambungan. Untuk itu, pendidikan dan pelatihan memiliki peran penting yang tidak hanya sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan produktivitas kerja.

Program pendidikan dan pelatihan Bank Sulselbar senantiasa berupaya memperhatikan prinsip – prinsip :

- Pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang disyaratkan untuk setiap jabatan merupakan faktor penentu untuk menetapkan program pelatihan dan pengembangan di setiap jenis pendidikan dan pelatihan.
- Pengembangan kualitas pegawai mengikuti kebutuhan Bank akan kompetensi dan keahlian tertentu untuk mendukung peningkatan kapasitas dan volume bisnis.
- Pendidikan dan pelatihan diprioritaskan untuk memenuhi persyaratan atas kompetensi dan pengetahuan untuk setiap posisi jabatan.
- Meningkatkan keahlian profesi segenap pegawai.
- Merupakan program yang dinamis, secara terus menerus beradaptasi pada kebutuhan organisasi dan pekerjaan.

Bank Sulselbar juga telah menetapkan pola pelatihan sebagai acuan untuk setiap program pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan, sebagai berikut :

- Program Pelatihan Umum

  Program pelatihan ini diperuntukkan bagi calon pegawai atau pegawai baru sebagai tahap pengenalan terhadap Bank Sulselbar antara lain organisasi, budaya kerja dan garis besar lingkup usaha Bank Sulselbar. Program pelatihan umum terdiri atas program pelatihan umum untuk pegawai administrasi dan non administrasi.

- Program Pelatihan Kompetensi

  Program pelatihan kompetensi diperuntukkan bagi calon pegawai maupun pegawai tetap. Pelatihan kompetensi dimaksudkan agar setiap pegawai memiliki *knowledge* dan *skills* yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga diperoleh mutu dan hasil kerja yang optimal.

- Program Pelatihan Lainnya

  Program ini merupakan program pelatihan yang tidak termasuk dalam program pelatihan umum maupun pelatihan kompetensi, yang antara lain terdiri dari pengembangan wawasan, ceramah kerohanian, dll.

- Program Pengembangan profesi

  Program ini adalah program pengembangan yang disusun khusus untuk sekelompok

peran tertentu, sebagai berikut :

1. Program pengembangan profesi untuk jabatan fungsional, misalnya program pengembangan auditor dan pengembangan sekretaris.
2. Program pengembangan profesi untuk jabatan struktural yang terdiri dari program pengembangan kepemimpinan yang diselenggarakan khusus untuk pegawai dengan golongan jabatan dan pangkat tertentu.
3. Program pengembangan manajerial yang diselenggarakan khusus untuk pegawai dengan jabatan struktural tertentu, misalnya Pemimpin Grup, Pemimpin Cabang, dan Pemimpin Departemen.

Sepanjang tahun 2014, Bank Sulselbar telah menginvestasikan dana untuk program pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan program pengembangan pegawai lainnya, sebesar Rp11.017 juta, terjadi peningkatan sebesar 73% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp11.746 juta.

Anggaran dan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Bank Sulselbar Tahun 2008 – 2014

Tahun	Realisasi	Anggaran	Realisasi (%)
	Rp Juta		
2014	11.017	15.444	71,34 %
2013	11.289	15.000	75,26 %
2012	7.192	8.068	89,14%
2011	8.552	10.255	83,39%
2010	7.100	8.120	87,44%
2009	5.395	5.256	102,64%
2008	5.746	6.199	92,69%

Program pendidikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan pegawai Bank Sulselbar baik melalui program regular maupun non regular. Program pelatihan diselenggarakan secara *inhouse* maupun *exhouse* yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan ternama dan profesional, khususnya di bidang perbankan.

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan secara internal maupun oleh pihak eksternal. Pada tahun 2014, program pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai Bank Sulselbar yaitu sekitar 198 pelatihan dengan jumlah pegawai yang ikut serta sebanyak 2016 orang.

Program Pendidikan dan Jumlah Peserta Tahun 2011 – 2014

Jenis Pendidikan	Jumlah Peserta (Tahun)			
	2014	2013	2012	2011
Pendidikan Karir	39	253	230	394
Pendidikan Teknis	1230	117	186	641
Seminar, Sosialisasi & Workshop	479	159	267	1.015
Pendidikan Lainnya	268	423	633	79
Total	**2.016**	**952**	**1.316**	**2.219**

Rencana dan Strategi SDM Tahun 2015

Rencana dan strategi pengelolaan dan pengembangan SDM Bank Sulselbar pada tahun 2015 sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2015, sebagai berikut:

1. **Penerapan Sistem Manajemen Kinerja**

   Selain *Balanced Scorecard* sebagai sistem manajemen kinerja atau pengukuran operasional yang taktis, Balanced Scorecard juga merupakan sistem manajmen strategis untuk mengelola strategi perusahaan secara kontinyu dengan fokus pada proses-proses manajemen kritis.

   Bekerjasama dengan Grup Perencanaan, triwulan IV Tahun 2015 direncanakan untuk melakukan inisiasi penerapan *Balanced Scorecard* meliputi penyusunan tahapan dan penetapan output dihasilkan yang disesuaikan dengan blue print pengembangan SDM.

2. Peningkatan Peran Grup SDM

Untuk mendukung peran Grup SDM sebagai mitra strategis dalam pengembangan bisnis bank, maka direncanakan untuk :

a. Penyempurnaan visi dan misi serta perangkat organisasi Grup SDM berbasis Human Capital Management

b. Optimalisasi peran HelpDesk sebagai customer service bagi pegawai.

c. Renovasi dan penataan ruang Grup SDM yang mempresentasikan fungsi dan peran Grup SDM

d. Penyederhanaan tata kerja berbasis teknologi sistem informasi antara lain : pengembangan sistem cuti, sistem pelatihan, sistem jalur karir, sistem kenaikan berkala & kepangkatan, sistem penghargaan dan failitas.

3. Perencanaan & Pemenuhan SDM

Untuk pengisian formasi SDM, maka diprogramkan hal sebagai berikut :

a. Pengisian Pimpinan Seksi Layanan sesuai struktur organisasi akan dilakukan melalui proses seleksi internal yang disebut dengan *Assistant Manager Development Program* (AMDP).

b. Pengisian Pimpinan Cabang atau pejabat yang setingkat akan dilakukan melalui seleksi internal yang disebut dengan *Manager Development Program* (MDP).

c. Pengisian Pimpinan Grup atau pejabat yang setingkat akan dilakukan melalui seleksi internal yang disebut dengan *Executive Development Program* (EDP).

d. Pengisian officer dari eksternal melalui *Officer Development Program* (SDP) sebanyak 60 orang dengan standar TOEFL minimal 500.

e. Pengisian resident auditor kantor cabang akan dikombinasikan melalui rekruitmen dari program ODP, SDP bekerjasama dengan KAP dan atau rekruitmen tenaga kontrak / pro-hire yang ekspert dibidang audit dan keuangan.

f. Untuk peningkatan kualitas laporan keuangan, diprogramkan untuk melakukan rekruitmen pegawai yang memiliki keahlian di bidang keuangan.

g. Pengisian Account Officer & Analis Kredit akan dilakukan melalui penerimaan dari internal melalui Staff Development Program (SDP).

h. Rekruitment pegawai sebanyak 70 orang untuk mengantisipasi jumlah pegawai yang pensiun, pembukaan kantor cabang dan kantor kas serta pertumbuhan transaksi.

i. Adapun posisi pegawai dasar dalam hal ini Security (Satpam), Driver, Pramubakti dan *Cleaning Service* dilakukan melalui mekanisme outsourching yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

j. Untuk meningkatkan efisiensi dalam

proses penempatan, selain penerapan kompetensi model, diprogramkan pula pengembangan sistem staffing model sebagai salah satu acuan dalam penempatan dan pemenuhan SDM per unit kerja.

4. Pendidikan & Pengembangan Pegawai

Untuk menopang sasaran strategis bank, program pendidikan dan pengembangan diarahkan kepada upaya meningkatkan daya saing bank melalui penyempurnaan kebijakan maupun peningkatan fokus pada bidang tertentu.

Untuk hal trsebut, program pelatihan dan pengembangan untuk tahun 2015 meliputi :

a. Penyusunan sistem pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi.

b. Penyusunan standarisasi vendor penyelenggara exhouse training guna memastikan efektifitas penyelenggaraan program pendidikan.

c. Mendorong penerapan standar sertifikasi pada bidang keahlian strategis antara lain sertifikasi bidang perkreditan, bidang treasury dan bidang audit perbankan, bidang HRD dan bidang Teknologi Informasi.

d. Sesuai dengan regulasi, diprogramkan pula seluruh pejabat dan pegawai yang diproyeksikan untuk menduduki jabatan yang dipersyaratkan untuk mengikuti sertifikasi Manajemen risiko dan Kepatuhan sesuai jenjang yang dipersyaratkan.

e. Pelaksanaan inhouse maupun exhouse training meliputi : *account officer,* analis kredit, *Asset Liability Management* , *Risk Management* , audit dan anti fraud, *Good Corporate Governance*, *Strategic Management*, *Service excellence* dan *marketing*.

f. Secara periodik, setiap unit kerja direncanakan untuk melakukan pula inhouse training terkait ketentuan eksternal, kebijakan dan SOP internal oleh unit terkait.

g. Selain hal tersebut, diprogramkan pula pendidikan regular yang dipersyaratkan pada jenjang jabatan tertentu antara lain : *Sespibank*, *Branch Manager*, *First Line Manager*, *Sub Branch Manager*, Pendidikan Khusus untuk Pemimpin Kantor Kas.

h. Sebagai bagian dari penerapan *Knowledge Management* (KM) , direncanakan untuk mengembangkan *e-learning system* yang berisi seluruh bahan ajar, petunjuk / instruksi kerja dan media sharing informasi / pengetahuan yang relevan dan dapat diakses oleh seluruh pegawai.

i. Pengembangan Manajemen jalur karir yang terintegrasi dengan kompetensi model.

j. Untuk menyeimbangkan harapan organisasi dan haraapoan individu , maka direncanakan untuk menerapkan sistem pemilihan jalur karir secara terbuka bagi pegawai dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

5. Penyempunaan Kebijakan dalam Pengembangan Pegawai

Untuk mendukung program pengembangan sebagaimana diuraikan, maka dibutuhkan revisi kebijakan SDm khususnya menyangkut jalur karir, sistem kepangkatan, sistem reward & punishment, kebijakan pemenuhan pegawai dan kebijakan pelatihan dan pendidikan pegawai.

6. Kebijakan Remunerasi

a. Remunerasi Pengurus

Sebagaimana yang diatur dalam Akte Notaris No. 13 tanggal 30 April 2015 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah, Anggota Direksi menerima penghasilan yang terdiri dari :

1. Gaji dan tunjangan lain
2. Tunjangan jabatan, kendaraan dinas dan fasilitas kesehatan termasuk keluarga
3. Pemberian bonus dan tantiem
4. Tunjangan hari raya keagamaan
5. Uang Pengabdian, Uang penghargaan dan asuransi purna bakti

b. Remunerasi Pegawai

Sesuai dengan ketentuan kepegawaian, maka remunerasi pegawai diberikan gaji dan fasilitas lainnya yang terdiri dari :

1. Gaji, tunjangan, upah dan honorarium
2. Uang Lembur & uang makan harian
3. Perawatan kesehatan
4. Uang cuti dan uang penghargaan masa kerja
5. Tunjangan hari tua bagi yang berhak
6. Tunjangan hari raya keagamaan
7. Bonus atas pencapaian target rencana bisnis (33% dari pelampuan)
8. Bantuan biaya pendidikan untuk seluruh pegawai
9. Jasa produksi

Penghasilan Berdasarkan Jabatan

Program kesejahteraan bagi pegawai sangat penting dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental pegawai beserta keluarganya. Upaya yang dilakukan dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental pegawai untuk meningkatkan produktivitas, motivasi, semangat kerja, dan loyalitas pegawai, serta mempertahankan pegawai agar tidak pindah ke perusahaan lain yakni melalui program kesejahteraan pegawai yang disusun berdasarkan peraturan legal, berasaskan keadilan dan kelayakan serta berpedoman kepada kemampuan perusahaan.

Pada tahun 2014, biaya tenaga dianggarkan sebesar Rp15.400 juta atau naik sekitar 5% dibandingkan anggara biaya tenaga kerja tahun 2013 sebesar Rp12.000 juta. Rencana

kenaikan tersebut berasal dari rencana kenaikan gaji, rencana rekrutmen pegawai baru berstatus calon pegawai dan penghargaan uang jasa pengabdian kepada Direksi yang akan berakhir masa tugasnya pada tahun 2014.

Adapun kisaran penghasilan pegawai Bank Sulselbar mulai dari Komisaris Utama sampai dengan tenaga *outsorcing*(per 31 Desember 2014) sebagai berikut :

Jabatan	Penghasilan (Rp Juta)	
	Terendah	Tertinggi
Pengurus dan Pegawai		
Dewan Komisaris	50.010.535	52.642.668
Direksi	67.683.434	75.203.817
Pemimpin Grup	17.766.062	27.839.308
Pemimpin Cabang Utama/Khusus	23.376.989	28.023.049
Pemimpin Cabang Kelas I	17.235.013	23.652.493
Pemimpin Cabang Kelas II	15.860.254	22.025.781
Pemimpin Cabang Syariah/Pembantu	15.411.250	17.860.019
Manajer & Setara	11.414.476	21.905.804
Analis & Setara	6.342.203	18.329.264
Staf & Setara	3.629.998	16.193.704
Pegawai Kontrak dan *Outsourcing*		
Kontrak Tenaga Ahli	7.000.000	10.000.000
Kontrak Magang	1.908.000	2.112.000
Tenaga *Outsourcing*	1.873.000	2.077.813

Penghargaan dan Sanksi

Bank Sulselbar memberikan penghargaan kepada pegawai atas dedikasi dan pengabdian kepada bank dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan untuk memotivasi pegawai agar terus meningkatkan kinerja dan pengabdian terbaiknya bagi bank. Penghargaan kepada pegawai sebagai berikut :

1. Penghargaan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan Peraturan Direksi Bank Sulsel No. 002/PD-PT Bank Sulsel/ XI/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada PT Bank Sulsel, sebagai berikut :

   a. Penghargaan Karena Prestasi

      Penghargaan ini diberikan kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa bagi pengembangan bank sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya. Penghargaan yang diberikan berupa kenaikan pangkat istimewa berdasarkan Paraturan Direksi yang berlaku dan hadiah lainnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

   b. Penghargaan Karena Masa Kerja

      Manajemen memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada :

      - Pegawai yang memiliki masa kerja 15 tahun dan hasil penilain karya selama 2 tahun terakhir menunjukkan minimal rata – rata baik , diberikan penghargaan minimal 3 kali penghasilan kotor terakhir ditambah piagam dengan tulisan warna hitam.
      - Pegawai yang memiliki masa kerja 25 tahun dan hasil penilain karya selama 2 tahun terakhir menunjukkan minimal rata – rata baik , diberikan penghargaan minimal 5 kali penghasilan kotor terakhir ditambah piagam dengan tulisan warna perak dan cinderamata berupa logo emas seberat 10 gram.
      - Pegawai yang memiliki masa kerja 30 tahun dan hasil penilaian karya selama 2 tahun terakhir menunjukkan minimal rata – rata baik , diberikan penghargaan minimal 6 kali penghasilan kotor terakhir ditambah piagam dengan tulisan warna emas dan cinderamata berupa cincin emas seberat 10 gram.

   c. Penghargaan Karena Masa Kerja Proporsional

      Penghargaan ini diberikan kepada pegawai yang berhenti dengan hormat dan berhak atas pensiun yang dipercepat serta hasil penilaian karya selama 2 tahun terakhir menunjukkan nilai rata – rata minimal baik, sedangkan masa kerjanya diatas 15 tahun.

      - Pegawai yang memiliki masa kerja di atas 15 tahun namun kurang dari 20 tahun, diberikan penghargaan minimal 3 kali penghasilan.

- Pegawai yang memiliki masa kerja di atas 25 tahun namun kurang dari 30 tahun, diberikan penghargaan minimal 5 kali penghasilan.
- Pegawai yang memiliki masa kerja di atas 30 tahun, diberikan penghargaan minimal 6 kali penghasilan.

d. Penghargaan Karena Memasuki Masa Pensiun

Pegawai yang memasuki masa pensiun diberikan penghargaan minimal 5 kali penghasilan kotor terakhir sebagai imbalan jasa, yang dibayarkan pada saat yang bersangkutan memasuki pensiun dan cinderamata berupa cincin emas seberat 10 gram.

2. Jasa produksi diberikan atas kinerja selama 1 (satu) tahun penuh
3. Pencapaian dan pelampauan target Rencana Bisnis akan diberikan bonus kepada pegawai dan dibebankan setiap akhir semester.

Penerapan sanksi kepada pegawai bertujuan untuk membina dan meningkatkan kejujuran pegawai dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang diberikan bank kepadanya. Sanksi diberikan kepada pegawai yang melakukan penyimpangan dan fraud dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Melakukan hal – hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Bank dan Pemerintah/Negara, baik langsung maupun tidak langsung.
2. Melakukan tindakan tercela di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
3. Menggunakan kedudukan dalam bank untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain yang dapat merugikan bank, baik langsung maupun tidak langsung.
4. Melakukan tindakan yang dapat merugikan bank, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Melakukan hal yang bertentangan dengan aturan kepegawaian dan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Peraturan Direksi Bank Sulsel No. 002/PD-PT Bank Sulsel/XI/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada PT Bank Sulsel, jenis – jenis sanksi atas penyimpangan sebagai berikut :

1. Sanksi Administratif, yang terdiri dari :
   - Peringatan
   - Demosi
   - Pemberhentian
2. Tuntutan Ganti Rugi
3. Tindakan Sementara Non Aktif dan Skorsing

DANA PENSIUN

Untuk memelihara kesinambungan penghasilan setelah masa purna bhakti serta dalam rangka meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja para pegawai, maka manajemen mendirikan Dana Pensiun BPD Sulsel sebelumnya merupakan Yayasan Dana Pensiun Bank Sulsel, didirikan dengan Akte Pendirian dari Notaris Abdullah Sahal, SH, No. 139 tanggal 26 Juli 1985 yang berkedudukan di Makassar.

Selanjutnya atas Akte Pendirian tersebut telah diadakan perubahan dengan Akte Perubahan No. 20 tanggal 09 November 1988 dari Notaris yang sama, dan terakhir Akte Perubahan No. 66 tanggal 02 Februari 1996 dari Notaris Mestariany Habie, SH, tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan berubah menjadi Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan No. SK/028/DIR tanggal 29 Maret 1993. Dana Pensiun BPD Sulsel telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-211/KM.17/1996 tanggal 14 Juni 1996 yang selanjutnya telah diadakan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun Bank Sulselbar No. 001/PD.BPDSS/2013 tanggal 31 Desember 2014 dan telah memperoleh pengesahan dari OJK berdasarkan salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-1675/NB-1/2014 tanggal 14 Juli 2014.

Pengelolaan Dana Pensiun BPD Sulsel dilaksanakan oleh Susunan Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang dalam menjalankan tugasnya Pengurus diawasi oleh Dewan Pengawas dan bertanggung jawab pada Pendiri.

a. Susunan Pengurus

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar No. SK/132/DIR/VII/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Penunjukan Sdri. Hj. Srie Caturwatie sebagai Ketua Pengurus Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, No. SK/066/DIR/VIII/2010 tanggal 23 Juli 2014 tentang Penunjukan Sdr. H. Idrus A. Dadi sebagai Pengurus Dana Pensiun BPD Sulsel, maka susunan pengurus Dana Pensiun BPD Sulsel tahun 2014 sebagai berikut :

Susunan Pengurus Dana Pensiun BPD Sulsel Tahun 2014

Nama	Jabatan	Periode
Hj. Srie Caturwatie	Ketua/Anggota	01 Januari 2014 - 01 Januari 2019
H. Idrus A. Dadi	Anggota	01 Agustus 2014 - 01 Agustus 2019

Dari 2 (dua) orang pengurus Dana Pensiun BPD Sulsel sebagaimana tersebut di atas, semuanya telah memiliki Sertifikasi Pengetahuan Dasar Dana Pensiun atau telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan

OJK No. 04/POJK.05/2013 dalam rangka memenuhi kewajiban tentang pendidikan yang berkelanjutan, setiap Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun diwajibkan untuk mengikuti Seminar, Workshop atau Kegiatan Lain, paling sedikit 1 kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk tahun 2014, seluruh Pengurus Dana Pensiun BPD Sulsel telah memperoleh poin sesuai ketentuan tersebut.

Selain pengurus tersebut di atas, dalam melaksanakan dan mengelola Dana Pensiun, Pengurus dibantu oleh 3 (tiga) orang Pegawai Tenaga Administrasi, 1 (satu) orang pramubakti dan 1 (satu) orang sopir.

STRUKTUR ORGANISASI DANA PENSIUN BANK BPD SULSEL

b. Pendiri dan Dewan Pengawas

Susunan unsur Pendiri dan Pengawas Dana Pensiun BPD Sulsel tahun 2013 terjadi perpanjangan masa tugas sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar No. SK/137/DIR/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar No. SK/077/DIR/V/2013 tentang Penunjukan Susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun BPD Sulsel, adapun susunan Pendiri dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Sulsel tahun 2014 sebagai berikut :

Susunan Pendiri Dana Pensiun BPD Sulsel Tahun 2014

Nama	Jabatan	Periode
H. A. Muhammad Rahmat	Direktur Utama	24 Juni 2014 - 24 Juni 2018
H. Ambo Samsuddin	Direktur Umum	24 Juni 2014 - 24 Juni 2018

Susunan Dewan Pengawas Dana BPD Sulsel Tahun 2014

Nama	Jabatan	Periode
H. Harris Saleng	Ketua	20 Sept 2012 s/d 19 Sept 2017
Farouk Bamatraf	Anggota	20 Sept 2012 s/d 19 Sept 2017
H. Beddu Side	Anggota	01 Feb 2013 s/d 19 Feb 2017
H. M. Chatib Saleh	Anggota	02 Jan 2014 s/d 02 Jan 2018

c. Jenis Program Pensiun

Jenis Program Pensiun Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan adalah Program Pensiun Manfaat (PPMP).

d. Jumlah Peserta Aktif dan Pensiunan

Jumlah peserta aktif dan pensiunan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebanyak 1.129 sebagai berikut :

Peserta Aktif dan Pensiunan Dana Pensiun Bank Sulselbar Tahun 2008 – 2014

Keterangan	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Peserta Aktif	908	869	873	856	831	713	679
Peserta Pensiunan :							
• Pensiunan Direksi	6	5	5	5	5	0	3
• Pensiunan Pegawai	135	114	113	98	80	86	68
• Pensiunan Janda/ Duda/Yatim/ Piatu (PJ/PD/YP)	57	53	30	31	35	28	30
• Pensiunan Ditunda	23	23	11	12	16	13	11
Jumlah	**1129**	**1.064**	**1.032**	**1.002**	**967**	**840**	**792**

Dari jumlah tersebut di atas apabila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2013, terdapat penambahan sebanyak 65 orang karena adanya penerimaan pegawai baru dan bertambahnya pensiunan baru.

Pencatatan peserta baru Dana Pensiun BPD Sulsel berdasarkan PDP No. 001/PD/BPDSS/2013 tanggal 13 Desember 2013, Pasal 20 tentang kepesertaan yang dimulai pada saat yang bersangkutan menjadi pegawai organik dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti ketentuan pada Dana Pensiun BPD Sulsel.

Pada tahun 2014, terdapat 201 pegawai yang pensiun dari Bank Sulselbar, dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebanyak 172 orang yang pensiun. Pegawai yang memasuki Masa Persiapan Pensiun pada tahun 2014 sebanyak 17 orang atau lebih tinggi dari tahun 2013 sebanyak 14 orang.

Jumlah Pegawai Pensiun dan Masa Persiapan Pensiun

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pensiun	7	7	16	9	13	16	20	31
Masa Persiapan Pensiun	0	0	0	7	11	21	14	27
Jumlah	7	7	16	16	24	37	34	58

e. Kebijaksanaan Pendanaan

Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari iuran pemberi kerja, iuran peserta, dan hasil investasi. Kekayaan Dana Pensiun tersebut merupakan sumber pendanaan bagi Dana Pensiun. Sehubungan dengan hal tersebut Dana Pensiun harus secara berkala mengukur tingkat kecukupan dana (minimal tiga tahun sekali) melalui valuasi aktuaria. Adapun tujuan dari valuasi aktuaria tersebut adalah antara lain :

a. Menilai kewajiban aktuaria dan kewajiban solvabilitas;

b. Menentukan iuran normal;

c. Menentukan iuran tambahan dalam hal terdapat defisit.

Dalam melakukan valuasi aktuaria pada Dana Pensiun BPD Sulsel, aktuaris menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan menghitung *unit cost* setiap tahun sesuai dengan kondisi gaji dan tingkat bunga saat itu serta mengasumsikan adanya kenaikan gaji.

Dana Pensiun Bank Sulselbar menganut metode pendanaan *Full Funding*, yaitu melaksanakan pemupukan dana sejak peserta masih aktif bekerja. Adapun sumber pendanaan adalah dalam bentuk iuran normal tahunan yang dibayar oleh Peserta dan Pemberi Kerja. Besar Iuran adalah :

- Iuran Beban Peserta : 4% x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).

- Iuran Beban Pemberi Kerja : Berdasarkan perhitungan aktuaris terakhir.

Pendanaan Dana Pensiun Bank Sulselbar Tahun 2009 – 2014

Rp (Juta)

Keterangan	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Iuran Normal	96.323	81.556	67.746	48.624	40.189	33.916
Iuran Tambahan	142.096	116.059	93.357	86.310	66.786	58.802
Perhitungan Manfaat Pensiun	61.186	49.231	40.080	32.799	26.359	22.473

f. Perhitungan Manfaat Pensiun

Usia pensiun normal adalah 55 tahun sedangkan usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang – kurangnya 45 tahun. Penentuan pensiun serta sebagai dasar penetapan hak memperoleh manfaat pensiun adalah tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama peserta sebagai pegawai. Perhitungan manfaat pensiun yaitu sebesar 2,5% x MK x PhDP (terakhir).

Manfaat pensiun tahun 2014 sebesar Rp9.683 juta atau meningkat 41,81% dari tahun 2013 sebesar Rp6.828 juta. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pertambahan jumlah pensiunan yaitu dari 172 orang menjadi 201 orang dan kenaikan manfaat pesiun sebesar Rp600.000,- kepada seluruh pensiunan sesuai PDP No.001/PD-BPDSS/2013 tanggal 13 Desember 2013 Pasal 36 Ayat 1.

Dengan adanya kerjasama antara Pendiri dengan pihak Asuransi Jiwasraya No. 130/PKS-BBS/VI/2011 dan 054.SJU.062011 serta 131/PKS-BSS/VI/2011 dan 054.SJU.062011, maka sebagian pembayaran THT dibayarkan oleh pihak Asuransi Jiwasraya.

g. Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan Dana Pensiun BPD Sulsel sebagai berikut :

Pendanaan Dana Pensiun Bank Sulselbar Tahun 2009 – 2014

Rp (Juta)

Keterangan	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Iuran Normal	96.323	81.556	67.746	48.624	40.189	33.916
Iuran Tambahan	142.096	116.059	93.357	86.310	66.786	58.802
Perhitungan Manfaat Pensiun	61.186	49.231	40.080	32.799	26.359	22.473

Neraca Dana Pensiun BPD Sulsel Tahun 2009 – 2014

Rp (Juta)

Keterangan	2014	2013	2012	2011	2010	2009
AKTIVA						
Investasi	265.031	216.423	175.539	154.144	122.582	103.774
Selisih Penilaian Investasi	5.600	6.462	7.340	5.128	1.387	0
Aktiva Lancar di Luar Investasi	3.295	2.344	2.268	1.684	1.729	1.544
Aktiva Operasional	1.951	1.853	734	764	792	822
Jumlah Aktiva	275.877	227.082	185.881	161.721	126.490	106.140
Jumlah Aktiva Bersih	275.877	227.082	185.881	161.721	126.490	106.140
KEWAJIBAN						
Kewajiban Aktuaria	107.487	103.544	97.750	88.345	83.688	80.895
Selisih Kewajiban Aktuaria	168.390	123.538	88.131	73.375	42.802	25.245
Kewajiban di luar Kewajiban Aktuaria	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban	275.877	227.082	185.881	161.721	126.490	106.140

Total aset Dana Pensiun BPD Sulsel pada tahun 2014 meningkat 21,49 % menjadi Rp275.877 juta dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp227.082 juta. Kenaikan total aset Dana Pensiun Bank Sulselbar disebabkan terjadinya peningkatan investasi pada deposito, obligasi, dan penempatan.

h. Investasi dan Hasil Usaha Dana Pensiun

Investasi Dana Pensiun BPD Sulsel pada akhir tahun 2014 sebesar Rp265.031 juta yang terdiri dari bentuk deposito berjangka, obligasi dan penyertaan langsung serta tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Investasi Dana Pensiun Bank Sulselbar Tahun 2009 – 2014

Rp (Juta)

Keterangan	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Deposito	228.000	174.280	128.280	106.750	88.000	69.400
Obligasi	26.111	31.111	36.118	36.144	25.222	24.419
Penempatan	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.422
Tanah dan Bangunan	7.920	8.032	8.141	8.250	8.360	8.533
Jumlah	**265.031**	**216.423**	**175.539**	**154.144**	**122.582**	**103.774**

Hasil usaha Dana Pensiun Bank Sulselbar sebagai berikut :

Hasil usaha Dana Pensiun Bank Sulselbar Tahun 2009 – 2014

Rp (Juta)

Keterangan	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Pendapatan Investasi	24.204	16.084	13.404	12.179	10.135	9.104
Beban Investasi	151	159	161	(159)	(149)	125
Hasil Usaha Investasi	24.053		13.243	12.020	9.986	8.979
Beban Operasional	3.258	2.356	1.989	2.076	1.957	1.332
Pendapatan dan Beban Lain-Lain	29	14	14	26	26	8
Hasil Usaha Sebelum Pajak	20.824	13.584	11.268	9.970	8.055	7.655
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0
Hasil Usaha Setelah Pajak	20.824	13.584	11.268	9.970	8.055	7.655

Total hasil usaha setelah pajak meningkat 53,30% dari Rp13.584 juta pada tahun 2013 menjadi Rp20.824 juta di tahun 2014. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan investasi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan No. SK/087/DIR/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Arahan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan dalam rangka menyesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/KMK.010/2008 tanggal 05 Desember 2008 tentang Investasi Dana Pensiun, maka penempatan investasi Dana Pensiun Bank Sulselbar diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan No. SK/114/DIR/IX/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Arahan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Investasi dana kekayaan Dana Pensiun BPD Sulsel ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut :

1. Surat Berharga Negara
2. Tabungan pada Bank
3. Deposito Berjangka pada Bank
4. Deposito on Call pada Bank
5. Sertifikat Deposito pada Bank
6. Sertifikat Bank Indonesia

7. Saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia
8. Obligasi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia
9. Sukuk yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia
10. Unit Penyertaan Reksa Dana dari :
    a. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham
    b. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks
    c. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
    d. Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek
11. Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
12. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
13. Kontrak Opsi Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
14. Penempatan Langsung pada Saham
15. Tanah di Indonesia dan atau
16. Bangunan di Indonesia.

Sehubungan dengan jenis investasi tersebut di atas, maka investasi Dana Pensiun BPD Sulsel telah dilaksanakan sesuai dengan Arahan Investasi Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/KMK.010/2008 tanggal 05 Desember 2008 tentang Investasi Dana Pensiun dan telah dituangkan pula dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan No. SK/114/DIR/IX/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan tidak menyimpang dari peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pengurus Dana Pensiun BPD Sulsel senantiasa fokus pada pengambilan keputusan investasi yang objektif, aman dan menguntungkan bagi kepentingan Peserta Dana Pensiun dan Bank Sulselbar sebagai Pemberi Kerja. Dan untuk itu, investasi kekayaan Dana Pensiun BPD Sulsel telah dan akan terus dikelola secara benar dan sehat sesuai ketentuan dan peraturan Dana Pensiun yang berlaku untuk meraih hasil investasi yang optimal sehingga kewajiban pembayaran manfaat pensiun dapat dipenuhi secara berkesinambungan.

Laporan Portofolio Investasi dan Laporan Keuangan Dana Pensiun BPD Sulsel tahun 2014 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi sedangkan PT. Dian Artha Tama Jakarta telah ditunjuk untuk melakukan valuasi aktuaria Dana Pensiun BPD Sulsel tahun 2014.

ANALISIS KEUANGAN

TINJAUAN KEUANGAN

Analisis Keuangan pada bagian ini harus dibaca bersamaan dengan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi yang juga disajikan dalam Laporan Tahunan ini, yang seluruhnya mendapat opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan tersebut telah diaudit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.

Selain itu, kami juga akan memberikan analisis dan diskusi untuk kinerja unit bisnis syariah, yang didirikan sejak tahun 2007, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja keuangan Bank.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rupiah.

LAPORAN LABA RUGI

Laba Bersih

Bank Sulselbar mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 26,68% menjadi Rp400.228 juta di tahun 2014 dibanding pencapaian sebesar Rp315.927 juta pada tahun 2013.

Kenaikan perolehan laba bersih antara lain disebabkan adanya kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 12,01% lebih tinggi pada tahun 2014 dari Rp912.106 juta pada tahun 2013 menjadi Rp1.021.626 juta. Kenaikan pendapatan bunga bersih antara lain karena kenaikan pendapatan bunga dan pendapatan bagi hasil syariah masing – masing sebesar 14,68% dan 22,37%. Kenaikan laba bersih pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang hanya bertumbuh sebesar 13,75%.

Laporan Rugi Laba dan Laporan Rugi Laba Komprehensif dapat dilihat melalui tabel, sebagai berikut :

Laporan Laba Rugi Bank Sulselbar Tahun 2012 - 2014

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014	
	Rp Juta			Rp Juta	%
PENDAPATAN BUNGA					
Pendapatan Bunga	1.349.183	1.176.464	1.048.608	172.719	14,68%
Pendapatan Bagi Hasil Syariah	85.123	69.561	48.135	15.562	22,37%
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah	*1.434.306*	*1.246.025*	*1.096.743*	*188.281*	15,11%
Beban Bunga	341.322	260.301	311.806	81.021	31,13%
Bagi Hasil Syariah	22.747	22.025	12.204	722	3,28%
Surat Berharga Yang Diterbitkan	48.611	51.593	51.330	(2.982)	(5,78%)
Total Beban Bunga dan Bagi Hasil Syariah	*412.680*	*333.919*	*375.340*	*78.761*	23,59%
Pendapatan Bunga Bersih	**1.021.626**	**912.106**	**721.403**	**109.520**	12,01%
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA					
Pendapatan Operasional					
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	13.822	14.985	25.390	(1.163)	(7,76%)
Administrasi	38.091	36.740	36.766	1.351	3,68%
Pendapatan Operasional Lainnya	7.322	5.267	9.932	2.055	39,02%
Total Pendapatan Operasional Lainnya	59.235	56.992	72.088	2.243	3,94%
Beban personalia	337.008	312.355	275.279	24.653	7,89%
Beban umum dan administrasi	191.070	211.547	124.281	(20.477)	(9,68%)
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan - bersih	4.443	913	9.424	3.530	386,64%
Total Beban Operasional Lainnya	*532.521*	*524.815*	*408.984*	*7.706*	1,47%
Total Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	*(473.286)*	*(467.823)*	*(336.896)*	*(5.463)*	1,17%
Laba (Rugi) Operasional	**548.340**	**444.283**	**384.507**	**104.057**	23,42%

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014	
	Rp Juta			Rp Juta	%
Pendapatan Non Operasional	445	1.686	4.961	(1.241)	(73,61%)
Beban Non Operasional	9.098	13.023	12.837	(3.925)	(30,14%)
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(8.653)	(11.337)	(7.876)	2.684	(23,67%)
Laba Sebelum Taksiran Manfaat Pajak Penghasilan					
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan	139.459	117.019	98.903	22.440	19,18%
Laba Bersih	**400.228**	**315.927**	**277.728**	**84.301**	26,68%
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	400.228	315.926	277.728	84.302	26,68%

Pendapatan

Pendapatan Bunga

Bank Sulselbar memperoleh pendapatan bunga adalah hasil dari kredit dan pembiayaan yang diberikan, penempatan dana dan pembelian surat berharga obligasi. Pendapatan bunga bertumbuh sebesar 14,68% menjadi Rp1.349.183 juta pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp1.176.464 juta. Peningkatan pendapatan pendapatan bunga pada tahun 2014 didorong oleh kenaikan portofolio kredit yang diberikan sebesar 13,61% dari penyaluran kredit pada tahun 2013. Pendapatan bunga yang diperoleh dari penyaluran kredit dan pembiayaan memiliki kontribusi terbesar yaitu 82,58% dari total pendapatan bunga dan bagi hasil pada tahun 2014.

Pendapatan Bunga Kredit

Kredit yang diberikan pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp7.034.615 juta (tidak termasuk syariah) dan menghasilkan pendapatan bunga kredit sebesar Rp1.184.480 juta, meningkat sebesar 11,07% dibandingkan pendapatan bunga kredit tahun 2013. Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan Bank, yakni sebesar 82,58% pada tahun 2014 dan 85,58% pada tahun 2013.

Bank memperoleh pendapatan bunga berdasarkan saldo porto folio kredit produktif dan konsumtif yang disalurkan kepada debitur.

Suku bunga rata – rata kontraktual atas kredit yang diberikan per 31 Desember 2014 sebesar 16,12% atau lebih tinggi dari tahun 2013 yang tercatat sebesar 15,50%. Suku bunga rata – rata efektif per tahun untuk kredit yang diberikan per 31 Desember 2014 sebesar 18,12% atau lebih rendah dibandingkan suku bunga rata – rata efektif tahun 2013 sebesar 18,50%.

Penurunan suku bunga kredit merupakan bagian dari strategi manajemen untuk menempatkan sasaran yang tepat dari penempatan harga pembiayaan berdasarkan target debitur dan tujuan pinjaman yang diberikan, yakni produktif atau konsumtif.

Tinjauan suku bunga kredit dilakukan secara periodik untuk menjaga tingkat harga pembiayaan. Untuk itu, maka Bank Sulselbar dapat mempertahankan margin bunga bersih di atas 5% pada tahun 2013 dan mampu menarik lebih banyak debitur untuk meningkatkan aset. Strategi dan penetapan suku bunga yang baik pada akhirnya mempengaruhi peningkatan portofolio kredit (tidak termasuk syariah) sebesar

13,61% pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 serta pertumbuhan pendapatan bunga kredit juga mengalami kenaikan mencapai 11,07% pada tahun 2014.

Pendapatan Bunga Penempatan

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan likuiditas, Bank melakukan penempatan dana pada instrumen keuangan tertentu seperti penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank lainnya yang dapat menghasilkan pendapatan bunga. Atas portofolio penempatan tersebut, pendapatan dari bunga yang dihasilkan dari saldo penempatan dana pada Bank Indonesia dan penempatan pada bank lainnya memberikan kontribusi masing – masing sebesar 0,34% dan 9,40% terhadap total pendapatan bunga pada 2014.

Pendapatan bunga yang bersumber dari penempatan pada Bank Indonesia tahun 2014 menurun dari Rp7.803 juta pada tahun 2013 menjadi Rp4.894 juta pada tahun 2014. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya penempatan Bank yaitu SBI yang jatuh tempo pada tahun 2014. Adapun penempatan pada Bank Lain tahun 2014 mengalami kenaikan 47,98% menjadi Rp134.859 juta dari Rp91.134 juta di tahun 2013.

Pendapatan Bunga Surat Berharga

Pendapatan bunga surat berharga per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp24.950 juta atau meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp11.118 juta. Pendapatan bunga surat berharga mempengaruhi total pendapatan bunga tahun 2014 sebesar 1,74%.

Pendapatan Syariah

Unit Usaha Syariah memperoleh pendapatan bagi hasil melalui penyediaan pembiayaan dengan konsep *murabahah* untuk piutang investasi, modal kerja dan konsumtif. Selain itu, UUS Bank Sulselbar juga menyediakan pembiayaan berkonsep *mudharabah* untuk pembiayaan modal kerja.

Pendapatan bagi hasil sampai dengan akhir tahun 2014 sebesar Rp85.123 juta atau mengalami peningkatan 22,37% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp69.561 juta. Pembiayaan syariah yang berbasis *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan bagi hasil syariah dimana pembiayaan syariah 4,94% lebih tinggi pada tahun 2014 sebesar Rp489.150 juta dibandingkan Rp466.139 juta di tahun 2013.

Sama halnya dengan pendapatan bunga kredit, pendapatan bagi hasil yang berasal dari margin *murabahah* dan *mudharabah* memiliki proporsi terbesar ketiga terhadap total pendapatan bunga bank tahun 2014 sebesar 5,93%. Nisbah bagi hasil *mudharabah*, *murabahah* dan *rahn* per 31 Desember 2014 masing – masing sebesar 16% - 18%, 14% - 18% dan14%.

Pendapatan Bagi Hasil 2013 - 2014
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
44,51%
22,37%
69.561
85.123
2013
2014
Pendapatan Bagi Hasil (Rp Juta)
Growth (%)

Pendapatan Margin Murabahah & Mudharabah
2013 - 2014
72.000
70.000
68.000
66.000
64.000
62.000
60.000
58.000
56.000
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
35,82%
14,15%
62.035
70.810
2013
2014
Margin Murabahah dan Mudharabah (Rp Juta)
Growth (%)

Beban Bunga

Beban

Beban bunga meningkat sebesar 23,59% lebih tinggi selama tahun 2014, yakni dari sebesar Rp333.919 juta pada tahun 2013 menjadi Rp412.680 juta pada tahun 2014.

Peningkatan ini dipengaruhi adanya peningkatan total liabilitas pada tahun 2014 dan kenaikan tingkat suku bunga simpanan, yaitu deposito, yang didorong oleh kenaikan suku bunga Bank Indonesia.

Peningkatan total liabilitas sejalan dengan pertumbuhan aset Bank, khususnya pertumbuhan kredit pada tahun 2014, saldo liabilitas, yang merupakan sumber pendanaan Bank, mengalami peningkatan sebesar 13,61% lebih tinggi pada tahun 2014. Di samping itu, kenaikan tingkat suku bunga simpanan yang didorong oleh kenaikan suku bunga Bank Indonesia dari rata - rata 7,50% pada awal tahun 2014 menjadi 7,75% pada akhir tahun 2014, yang disebabkan dari dampak intervensi Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan moneter.

Beban Bunga Giro

Beban bunga giro meningkat 16,26% dari Rp91.464 juta pada tahun 2013 menjadi Rp106.340 juta pada tahun 2014. Peningkatan beban giro dipengaruhi pertumbuhan saldo giro di tahun 2014 sebesar 11,28% dibandingkan tahun 2013. Pengaruh beban bunga giro terhadap total beban bunga per 31 Desember 2014 sebesar 25,77%. Tingkat suku bunga giro rata – rata pada tahun 2014 sebesar 1,70% atau lebih rendah dari rata – rata suku bunga giro tahun 2013 sebesar 3%.

Beban Bunga Tabungan

Beban bunga tabungan per 31 Desember 2014 mengalami kenaikan 5,64% dibandingkan tahun 2013 yakni dari Rp27.246 juta menjadi Rp28.782 juta. Kenaikan beban bunga tabungan dipengaruhi oleh peningkatan saldo tabungan Tapemda Pelajar dan Mahasiswa yang mencapai 736,61%. Peningkatan saldo tabungan Tapemda Pelajar dan Mahasiswa yang signifikan dipengaruhi oleh penyaluran SPP Gratis bagi mahasiswa universitas negeri dan swasta di Sulawesi Selatan yang merupakan Program Pemerintah Pov. Sulawesi Selatan di bidang pendidikan.

Tingkat suku bunga rata – rata tabungan pada tahun 2014 berada pada kisaran 0% - 4,00% dan tidak mengalami perubahan dari tahun 2013. Beban bunga tabungan terhadap total beban bunga tahun 2014 proporsinya mencapai 7,38%.

Beban Bunga Deposito

Berdasarkan Laporan Posisi keuangan per 31 Desember 2014 dan 2013, sebagian besar sumber pendanaan Bank berasal dari deposito berjangka, yakni sebesar 33,95% dari total dana pihak ketiga (tidak termasuk unit usaha syariah) pada tahun 2014. Dengan demikian, beban bunga dari deposito berjangka merupakan beban bunga terbesar.

Beban bunga dari deposito berjangka mengalami peningkatan dari Rp116.316 juta di tahun 2013 menjadi Rp181.178 juta di tahun 2014, atau meningkat 55,76% lebih tinggi. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan saldo portofolio simpanan deposito berjangka dari nasabah sebesar 53,29% lebih tinggi dan kenaikan kisaran tingkat suku bunga deposito berjangka selama tahun 2014 yaitu 6,00% - 7,80% dibandingkan tahun 2013 yang berada pada kisaran 6,75% - 7,00%.

Sejalan dengan sumber pendanaan deposito yang memberikan kontribusi yang signifikan atas pertumbuhan aset Bank, beban bunga deposito juga memberikan pengaruh signifikan terhadap jumlah beban bunga keseluruhan, yakni sebesar 43,90% pada tahun 2014.

Beban Bunga Pinjaman Yang Diterima

Beban bunga dari pinjaman yang diterima sebesar 27,46% lebih rendah pada tahun 2014 dari Rp10.156 juta di tahun 2013 menjadi Rp7.367 juta pada tahun 2014.

Beban bunga yang dihitung dari pinjaman yang diterima proporsinya terhadap jumlah beban bunga pada tahun 2014 sebesar 1,79%.

Beban Bunga Surat Berharga Yang Diterbitkan

Beban bunga dari surat-surat berharga yang diterbitkan per 31 Desember 2014 sebesar 5,78% lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yakni dari Rp51.593 juta menjadi Rp48.611 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 Seri A sebesar Rp50 milyar telah jatuh tempo sejak Mei 2014. Beban bunga surat berharga yang diterbitkan mempengaruhi total beban bunga sebesar 11,78%.

Beban Bagi Hasil Syariah

Beban bagi hasil syariah mengalami peningkatan sebesar 3,28% menjadi Rp22.747 juta pada tahun 2014 dibandingkan beban bagi hasil tahun 2013 sebesar Rp22.024 juta. Kenaikan beban bagi hasil syariah dipengaruhi oleh pertumbuhan dana pihak ketiga syariah pada tahun 2013 sebesar 9,51%. Pengaruh kenaikan beban bagi hasil syariah sebesar 5,51% terhadap total beban bunga tahun 2014.

Beban Lainnya

Beban Lainnya yaitu beban asuransi kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebesar Rp17.655 juta atau meningkat 16,77% dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp15.120 juta. Saldo beban lainnya terhadap total Beban Bunga tahun 2014 adalah 4,28%.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya pada tahun 2014 mengalami kenaikan 3,94% menjadi Rp59.235 juta dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp56.992 juta. Peningkatan pendapatan operasional lainnya dipengaruhi kenaikan pendapatan operasional lain – lain sebesar 39,02%. Pendapatan lain – lain tersebut terdiri atas penerimaan terkait risiko operasional, setoran pokok debitur yang telah dihapusbuku dan setoran lain – lain. Secara keseluruhan pendapatan administrasi memiliki proporsi terbesar terhadap total pendapatan operasional lainnya tahun 2014 sebesar 64,30%.

Pendapatan Provisi & Komisi Selain dari Kredit Yang Diberikan 2013 -2014
15.500
15.000
14.500
14.000
13.500
13.000
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%
-30,00%
-35,00%
-40,00%
-45,00%
14.985
13.822
-7,76%
-40,98%
2013
2014
Pendapatan Provisi dan Komisi selain dari Kredit Yang Diberikan (Rp Juta)
Growth (%)

Pendapatan Administrasi 2013 - 2014
38.500
38.000
37.500
37.000
36.500
36.000
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
3,68%
-0,07%
36.740
38.091
2013
2014
Pendapatan Administrasi (Rp Juta)
Growth (%)

Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya terdiri dari beban personalia, beban umum dan administrasi, dan beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan. Sampai dengan akhir tahun 2014, beban operasional lainnya mengalami peningkatan 1,47% dari Rp524.815 juta pada tahun 2013 menjadi Rp532.521 juta per 31 Desember 2014. Peningkatan beban operasional lainnya terutama dipengaruhi oleh kenaikan beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan sebesar 386,64%.

Selama tahun 2014, kredit yang diberikan meningkat 13,61% lebih tinggi dari tahun 2013. Berdasarkan analisis kolektibilitas kredit, 99,18% dari pinjaman merupakan kredit *performing* dan 0,82% yang non *performing* (bermasalah). Aset Bank sebagian besar didominasi oleh fasilitas kredit dan guna memitigasi risiko kredit tak tertagih dan sesuai ketentuan yang berlaku, Bank diwajibkan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Dengan demikian, sebagai bentuk komitmen manajemen dalam memitigasi risiko kolektibilitas fasilitas kredit yang diberikan, Bank meningkatkan nilai estimasi penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan, yang mengakibatkan peningkatan beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan sebesar Rp4.443 juta pada tahun 2014 dibandingkan Rp913 juta pada tahun 2013.

Peningkatan gaji dan kesejahteraan pegawai didorong oleh peningkatan pegawai tetap dari 1.037 pegawai di tahun 2013 menjadi 1.163 pegawai di tahun 2014 seiring dengan adanya penambahan jaringan kantor layanan Bank. Selain itu, Bank juga telah mendistribusikan bonus pada tahun 2014 yang berpengaruh terhadap peningkatan total biaya gaji.

Peningkatan beban personalia tertinggi pada tahun 2014 yaitu biaya honorarium dan biaya tantiem & jasa produksi yang masing – masing mengalami kenaikan 43,60% dan 26,68%. Secara keseluruhan beban personalia dipengaruhi oleh biaya gaji sebesar 38,23%.

Kenaikan beban umum dan administrasi disebabkan oleh kenaikan signifikan pada beban bank sebesar 43,93%; beban penyusutan sebesar 38,88%; beban sewa sebesar 21,59%; beban listrik, air dan telekomunikasi sebesar 16,73% dan beban lain – lain sebesar 15,01%.

Laba Usaha

Secara keseluruhan kinerja, khususnya pada peningkatan signifikan pendapatan bruto, Bank mencapai pertumbuhan laba sebesar 24,65% lebih tinggi pada tahun 2014 menjadi Rp539.687 juta dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp432.946 juta.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 2013 - 2014
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
14,95%
24,65%
432.946
539.687
2013
2014
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (Rp Juta)
Growth (%)

Laba (Rugi) Operasional 2013 - 2014
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
15,55%
23,42%
444.283
548.340
2013
2014
Laba (Rugi) Operasional (Rp Juta)
Growth (%)

Pendapatan Operasional 2013 - 2014
1.550.000
1.500.000
1.450.000
1.400.000
1.350.000
1.300.000
1.250.000
1.200.000
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
11,48%
14,62%
1.303.016
1.493.541
2013
2014
Pendapatan Operasional (Rp Juta)
Growth (%)

Pendapatan Non Operasional 2013 - 2014
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
-62,00%
-64,00%
-66,00%
-68,00%
-70,00%
-72,00%
-74,00%
-76,00%
-65,99%
-73,62%
1.687
445
2013
2014
Pendapatan Non Operasional (Rp Juta)
Growth (%)

Total Pendapatan 2013 - 2014
1.550.000
1.500.000
1.450.000
1.400.000
1.350.000
1.300.000
1.250.000
1.200.000
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
11,15%
14,51%
1.304.703
1.493.986
2013
2014
Total Pendapatan (Rp Juta)
Growth (%)

Beban Operasional 2013 - 2014
960.000
940.000
920.000
900.000
880.000
860.000
840.000
820.000
800.000
10,20%
10,10%
10,00%
9,90%
9,80%
9,70%
9,60%
9,50%
9,40%
9,30%
9,20%
9,10%
9,49%
10,07%
858.734
945.201
2013
2014
Beban Operasional (Rp Juta)
Growth (%)

Pajak Penghasilan

Bank Sulselbar menghitung pajak penghasilan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Pada tahun 2014, Bank Sulselbar mencatatkan laba sebelum pajak meningkat 24,65% menjadi Rp539.687 juta dari Rp432.945 juta di tahun 2013. Beban pajak penghasilan sebesar 19,18% lebih tinggi pada tahun 2014 yaitu dari Rp117.019 juta pada tahun 2013 menjadi Rp139.459 juta.

Laba Bersih

Peningkatan laba usaha dan peningkatan proproporsional beban pajak penghasilan telah mengakibatkan peningkatan laba bersih. Laba bersih pada tahun 2014 sebesar Rp400.228 juta atau meningkat sebesar 26,68% lebih tinggi dari laba bersih pada tahun 2013 sebesar Rp315.926 juta. Pertumbuhan laba bersih tahun 2014 merupakan pertumbuhan tertinggi yang berhasil diraih Bank Sulselbar dalam 4 (empat) tahun terakhir.

NERACA

Total Aset

Selama tahun 2014, jumlah aset meningkat secara signifikan 14,52% dari Rp8.734.875 pada tahun 2013 menjadi Rp10.003.340 juta pada tahun 2014. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan portofolio kredit & pembiayaan yang diberikan (setelah dikurangi pencadangan) sebesar 13,33% lebih tinggi pada tahun 2014 yaitu menjadi Rp7.450.197 juta dari Rp6.573.711 juta pada tahun 2013.

Total Aset Bank Sulselbar Tahun 2012 – 2014

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014	
	Rp Juta			Rp Juta	%
Kas	505.986	346.988	323.019	158.998	45,82%
Giro pada Bank Indonesia	707.683	644.901	546.679	62.782	9,74%
Giro pada Bank Lain-Bersih	1.328	1.878	406	(550)	(29,29%)
Penempatan pada Bank Lain & Bank Indonesia - Bersih	594.800	550.050	681.498	44.750	8,14%
Surat Berharga	470.451	335.126	202.094	135.325	40,38%
Kredit Yang Diberikan - Bersih	6.971.735	6.117.979	5.663.552	853.756	13,95%
Pembiayaan Syariah - Bersih	478.462	455.732	363.629	22.730	4,99%
Penyertaan	81	81	81	0	0,00%
Pajak Dibayar Di Muka	30.756	27.144	9.595	3.612	13,31%
Aset Tetap - Bersih	125.968	123.582	112.345	2.386	1,93%
Aset Pajak Tangguhan	18.053	19.194	14.012	(1.141)	(5,94%)
Aset Lain - Lain	98.037	112.220	101.545	(14.183)	(12,64%)
Jumlah Aset	**10.003.340**	**8.734.875**	**8.018.455**	**1.268.465**	**14,52%**

Total aset tahun 2014 masih didominasi oleh aktiva produktif setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai yaitu sebesar 85,14%. Aktiva produktif tahun 2014 sebesar Rp8.516.857 juta atau meningkat 14,18% dari Rp7.460.846 juta di tahun 2013. Komposisi aktiva produktif antara lain kredit dan pembiayaan sebesar 74,48%, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia sebesar 5,95%, surat berharga sebesar 4,70% dan aktiva produktif lainnya, yaitu dan Giro pada Bank Lain – Bersih dan Penyertaan, masing – masing sebesar 0,01% dan 0,001%.

Kredit Yang Diberikan

Total kredit dan yang diberikan per 31 Desember 2014 bertumbuh 13,61% yakni sebesar Rp7.034.615 dari Rp6.191.726 juta tahun 2013. Kenaikan penyaluran kredit dipengaruhi pertumbuhan kredit lainnya (kredit konsumtif) sebesar 18,50% menjadi Rp5.998.036 juta di tahun 2014, dari Rp5.061.500 juta tahun 2013. Kredit Investasi dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mengalami penurunan pada tahun 2014 masing – masing sebesar 2,45% dan 96,35%. Penurunan tersebut disebabkan adanya pelunasan kredit menjelang akhir tahun 2014.

Kredit lainnya mendominasi total kredit yang diberikan sebesar 85,26%, yang diikuti kredit investasi dengan proporsi 7,51%, kredit modal kerja 7,17% dan KPR 0,06%. Kredit yang diberikan memiliki proporsi sebesar 93,50% terhadap total kredit dan pembiayaan.

Kredit lainnya merupakan kredit yang diberikan untuk PNS di lingkungan Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Semua kredit lainnya tersebut dijamin oleh Perum Jamkrindo, PT Askrindo, PT Jasa Raharddja Putera, PT ASEI, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Sarana Lindung Upaya, PT Asuransi Bumi Putera Muda 1976, dan PT Asuransi Jiwa Recapital.

Pembiayaan

Tahun 2014, posisi pembiayaan Unit Usaha Syariah sebesar Rp466.139 juta yang memberikan kontribusi sebesar 6,50% dari seluruh portofolio kredit Bank pada tahun 2014. Jumlah ini meningkat 4,94% lebih tinggi dari tahun 2013. Berdasarkan penggunaannya, pembiayaan unit usaha syariah didominasi oleh pembiayaan *murabahah* lainnya dengan kontribusi sebesar 80,74%.

Pembiayaan 2013 - 2014
495.000
490.000
485.000
480.000
475.000
470.000
465.000
460.000
455.000
450.000
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
25,79%
4,94%
466.139
489.150
2013
2014
Pembiayaan (Rp Juta)
Growth (%)

Komposisi Pembiayaan Unit Usaha Syariah Tahun 2014
2,79%
1,36%
7,03%
8,08%
80,74%
Piutang murabahah investasi
Piutang murabahah modal kerja
Piutang murabahah lainnya
Pembiayaan mudharabah
Rahn

Kredit & Pembiayaan Berdasarkan Jenis Tahun 2012 – 2014

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014		Proporsi
	Rp Juta			Rp Juta	%	
Kredit Investasi	562.752	593.580	818.599	(30.828)	(5,19%)	7,48%
Kredit Modal Kerja	557.309	508.436	671.421	48.873	9,61%	7,41%
KPR	4.038	110.612	14.878	(106.574)	(96,35%)	0,05%
Kredit Umum Lainnya	6.399.666	5.445.237	4.610.155	954.429	17,53%	85,06%
Total Kredit & Pembiayaan	**7.523.765**	**6.657.865**	**6.115.053**	**865.900**	**13,01%**	**100,00%**

Pertumbuhan Kredit & Pembiayaan Berdasarkan Unit Usaha Tahun 2012 – 2014

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014	
	Rp Juta			Rp Juta	%
Konvensional	7.034.615	6.191.726	5.744.496	842.889	13,61%
Unit Usaha Syariah	489.150	466.139	370.557	23.011	4,94%
Total Kredit & Pembiayaan	**7.523.765**	**6.657.865**	**6.115.053**	**865.900**	**13,01%**

Pertumbuhan kredit berdasarkan sektor usaha pada tahun 2014 mencatatkan peningkatan paling tinggi yaitu kredit jasa – jasa dunia usaha dengan kenaikan sebesar 72,64% dari Rp30.892 juta pada tahun 2013 menjadi Rp53.332 juta

Adapun kredit berdasarkan sektor usaha yang proporsinya di atas 5% yaitu sektor konsumtif 81,15% dan sektor perdagangan 8,41%, sedangkan untuk sektor usaha lainnya proporsinya kurang dari 5%.

Kredit dan Pembiayaan Yang Diberikan Bank Sulselbar Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2012 – 2014

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014		Proporsi
	Rp Juta			Rp Juta	%	
Konsumtif	6.105.222	4.349.443	4.496.945	1.755.779	40,37%	81,15%
Pertanian	135.009	113.744	147.437	21.265	18,70%	1,79%
Industri	64.101	60.935	74.716	3.166	5,20%	0,85%
Listrik/Air	16.761	16.675	19.271	86	0,52%	0,22%
Pertambangan	2.497	2.257	2.604	240	10,63%	0,03%
Konstruksi	8.051	6.739	9.276	1.312	19,47%	0,11%
Perumahan	348.323	1.267.202	238.944	(918.879)	(72,51%)	4,63%
Perdagangan	632.809	662.905	915.076	(30.096)	(4,54%)	8,41%
Pengangkutan & Distribusi	34.857	26.208	17.651	8.649	33,00%	0,46%
Jasa - Jasa Dunia Usaha	53.332	30.892	31.924	22.440	72,64%	0,71%
Jasa - Jasa Sosial Masyarakat	122.803	120.865	161.209	1.938	1,60%	1,63%
Total Kredit dan Pembiayaan	**7.523.765**	**6.657.865**	**6.115.053**	**865.900**	**13,01%**	**100,00%**

Pada tahun 2014, Bank Sulselbar telah menghitung Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar Rp73.568 juta sehingga total kredit dan pembiayaan yang diberikan setelah dikurangi CKPN yaitu sebesar Rp7.450.197 juta. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada tahun 2014 lebih rendah dari perhitungan CKPN tahun 2013 sejalan dengan penurunan rasio NPL dari 1,19% pada tahun 2013 menjadi 0,86% pada tahun 2014. Hal ini juga berarti bahwa risiko kredit selama tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Dalam upaya penanganan kredit bermasalah, Bank senantiasa menjaga dan memelihara kualitas kredit serta meminimalisir risiko kredit. Untuk itu Bank melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian terhadap kredit-kredit bermasalah yang mencakup penagihan debitur atau kompensasi, pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi kredit, hapusbuku kredit dan atau cara-cara lain yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kredit dan Pembiayaan Diperhitungkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Bank Sulselbar Tahun 2012 – 2014

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014	
	Rp Juta			Rp Juta	%
Kredit & Pembiayaan	7.523.765	6.657.865	6.115.053	865.900	13,01%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	(73.568)	(84.155)	(87.872)	10.587	(12,58%)
Jumlah	**7.450.197**	**6.573.710**	**6.027.181**	**876.487**	**13,33%**

Kas dan Setara Kas

Penempatan dana pada beberapa instrumen keuangan yang lebih likuid merupakan upaya optimalisasi fungsi dan pengelolaan treasury guna menjaga kondisi likuiditas Bank antara aset dan kewajiban. Klasifikasi aset Bank berdasarkan tingkat likuiditasnya yaitu kas dan setara kas yang meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, simpanan yang sewaktu – waktu dapat dicairkan dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas

Kas adalah dana kas yang disediakan oleh *teller* atau disimpan dalam ATM untuk kegiatan operasional Bank, antara lain untuk menyediakan dana kas sesuai permintaan penarikan simpanan nasabah Bank. Pada tahun 2014, kas meningkat 45,82% menjadi Rp505.986 juta dibandingkan posisi kas tahun 2013 sebesar Rp346.988 juta.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas Kantor Cabang operasional Bank dan mesin ATM pada tahun 2014 yang berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan dana kas. Pada tahun 2014, Bank telah memiliki total 3 kantor cabang utama, 28 kantor cabang, 2 kantor cabang pembantu, 46 kantor kas, 3 Kantor Cabang Syariah, 1 kantor kas syariah, 7 kantor kas syariah, dan 94 ATM di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang terkoneksi dengan jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.

Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penambahan 4 terminal ATM baru.

Giro pada Bank Indonesia

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/7/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 12/19/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/41/DKMP Tanggal 1 Oktober 2013 Perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum sekunder dan Giro Wajib Minimum berdasarkan *Loan To Deposit Rasio (LDR)* dalam Rupiah, yang mewajibkan Bank untuk menempatkan dananya pada rekening giro di Bank Indonesia sebesar 8% dari Dana Pihak Ketiga dalam rupiah (GWM Primer), sementara untuk GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dan GWM LDR untuk batas bawah sebesar 78% dan batas atas sebesar 92%. Untuk itu, guna pemenuhan kewajiban GWM pada Bank Indonesia, Bank telah melakukan penempatan giro pada Bank Indonesia pada tahun 2014 sebesar Rp707.683 juta atau lebih tinggi 9,74% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp644.901 juta.

Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain bertujuan untuk menyediakan cara yang lebih mudah dalam melaksanakan transfer dana/pengiriman uang/penyelesaian transaksi antar bank. Fluktuasi giro bergantung pada frekuensi transaksi dana yang diberikan oleh nasabah. Selama tahun 2014, rekening giro pada bank lain sebesar Rp1.328 juta atau 29,29% lebih rendah dari saldo tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp1.878 juta.

Suku bunga giro rata-rata pada tahun 2014 berkisar 2,50% - 3,00%. Manajemen berpendapat bahwa seluruh giro pada bank lain konvensional di tahun 2014 tidak mengalami penurunan nilai sehingga cadangan kerugian penurunan nilai atas giro pada bank lain tidak dibentuk.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Pada tahun 2014, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain mengalami peningkatan sebesar 8,15% yakni dari Rp552.000 juta pada tahun 2013 menjadi Rp597.000 juta pada tahun 2014. Peningkatan penempatan tersebut disebabkan adanya pengalokasian kelebihan dana untuk penyaluran kredit di tahun 2014. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tahun 2014 terdiri dari deposito berjangka, *deposito on call* dan *interbank call money*.

Efek-efek

Selama tahun 2014, efek-efek meningkat sebesar 40,38% yaitu sebesar Rp470.451 juta dibandingkan saldo tahun 2013 sebesar Rp335.126 juta. Peningkatan terjadi karena Bank telah melakukan pembelian efek – efek dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara (SUN) dan obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Pembelian efek- efek ini juga merupakan bagian dari langkah efektivitas pengelolaan dana yang diterima guna mencapai optimalisasi profitabilitas dan realisasi komitmen manajemen dalam memitigasi resiko likuiditas Bank.

Aset Tetap

Aset tetap meningkat sebesar 7,18% lebih tinggi dari saldo tahun 2013 yakni dari Rp264.890 juta menjadi Rp283.902 juta pada tahun 2014. Peningkatan ini terjadi karena adanya penambahan aset tetap Bank antara lain pembangunan 3 (tiga) gedung kantor baru yaitu Kantor Cabang Malili, Cabang Bulukumba dan Cabang Pasangkayu serta pembelian peralatan dan inventaris kantor.

Beban penyusutan aset tetap pada tahun 2014 sebesar 11,77% lebih tinggi dibandingkan tahun 2013.

Aktiva Tetap & Inventaris Bank Sulselbar Tahun 2012 – 2014

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014	
	Rp Juta			Rp Juta	%
HARGA PEROLEHAN					
Tanah	26.846	26.400	25.089	446	1,69%
Bangunan kantor	93.228	91.795	90.482	1.433	1,56%
Bangunan rumah dinas	5.290	5.290	5.040	0	0,00%
Kendaraan	15.319	15.318	15.271	1	0,01%
Perabot kantor	118.794	106.327	101.525	12.467	11,73%
Perabot rumah dinas	2.112	2.044	1.934	68	3,33%
Aset dalam penyelesaian	22.313	17.716	631	4.597	25,95%
Jumlah	**283.902**	**264.890**	**239.972**	**19.012**	**7,18%**
AKUMULASI PENYUSUTAN					
Bangunan kantor	36.488	30.057	23.703	6.431	21,40%

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014	
	Rp Juta			Rp Juta	%
Bangunan rumah dinas	2.245	1.913	1.574	332	17,35%
Kendaraan	15.002	14.180	13.814	822	5,80%
Perabot kantor	102.325	93.463	87.045	8.862	9,48%
Perabot rumah dinas	1.874	1.695	1.491	179	10,56%
Jumlah	**157.934**	**141.308**	**127.627**	**16.626**	**11,77%**
Nilai Buku	**125.968**	**123.582**	**112.345**	**2.386**	**1,93%**

Aset Lain - Lain

Aset lain-lain terdiri dari bunga yang masih harus diterima, uang muka dan biaya dibayar dimuka, agunan yang diambil alih, persediaan barang cetakan dan lain - lain. Sampai dengan akhir tahun 2014, aset lain – lain Bank Sulselbar tercatat mengalami penurunan menjadi sebesar Rp98.037 juta atau 12,64% lebih rendah dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp112.220 juta. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan yang signifikan pada bunga surat berharga dan bunga penempatan pada bank lain masing – masing sebesar (86,09%) dan (76,37%).

LIABILITAS

Pertumbuhan aset sebesar 14,52% lebih tinggi didukung oleh peningkatan liabilitas sebagai sumber pendanaan aset sebesar 13,37% lebih tinggi pada tahun 2014. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan hutang pajak sebesar 35,08%; liabilitas segera 21,77%; simpanan nasabah 18,26%; liabilitas lainnya sebesar 1406%; imbalan pasca kerja dan simpanan dari bank lain masing – masing sebesar 13,11% dan 10,22%.

Simpanan nasabah memiliki proporsi terbesar terhadap total liabilitas atau kewajiban pada tahun 2014 sebesar 83,61%, kemudian simpanan dari Bank Lain dan surat berharga yang diterbitkan masing – masing dengan komposisi 5,66% dan 5,42%, sedangkan sisa liabilitas lainnya hanya berkontribusi sekitar 1% kecuali Liabilitas Segera dengan proporsi 2,15%. Adapun total liabilitas atau kewajiban memiliki proporsi 82,81% dari total aset tahun 2012.

Liabilitas Bank Sulselbar Tahun 2012 – 2014

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014	
	Rp Juta			Rp Juta	%
Liabilitas Segera	177.780	145.991	103.584	31.789	21,77%
Simpanan Nasabah	6.925.837	5.856.310	5.401.576	1.069.527	18,26%
Simpanan dari Bank Lain	468.499	521.818	497.172	(53.319)	(10,22%)
Surat Berharga Yang Diterbitkan	449.304	498.139	496.506	(48.835)	(9,80%)
Pinjaman Yang Diterima	100.085	100.145	150.632	(60)	(0,06%)
Hutang Pajak	25.428	39.167	14.814	(13.739)	(35,08%)
Imbalan Pasca Kerja	50.540	44.681	37.089	5.859	13,11%
Liabilitas Lainnya	85.973	100.038	90.335	(14.065)	(14,06%)
Jumlah Liabilitas	**8.283.446**	**7.306.289**	**6.791.708**	**977.157**	**13,37%**

Simpanan Nasabah

Simpanan nasabah atau dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang ditempatkan di Bank Sulselbar yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Simpanan nasabah merupakan kontribusi pendanaan terbesar yakni sebesar 83,61% dari total liabilitas tahun 2014. Sejalan dengan peningkatan kredit dan pembiayaan yang diberikan pada tahun 2014, saldo simpanan nasabah (konvensional dan syariah) mengalami peningkatan dari Rp5.856.310 juta pada tahun 2013 menjadi Rp6.925.837 juta pada tahun 2014 atau meningkat 18,26%. Peningkatan penghimpunan DPK tahun 2014 didominasi pertumbuhan giro dan deposito yang masing – masing bertumbuh 38,03% dan 36,29%. Untuk meningkatkan portofolio DPK, Bank secara kontinu berupaya menyeimbangkan penghimpunan dana murah dengan dana mahal. Namun demikian, Bank memprioritaskan penghimpunan dana murah yaitu giro dan tabungan.

Komposisi Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Segmen Unit Usaha

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Bank Sulselbar terdiri dari DPK konvensional dan DPK Unit Usaha Syariah. Saldo DPK tahun 2014 didominasi penghimpunan DPK konvensional yaitu sebesar 94,87%, sedangkan DPK syariah hanya sebesar 5,13%. Dana pihak ketiga konvensional tahun 2014 tercatat sebesar Rp6.570.525 juta atau mengalami peningkatan 18,78% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp5.531.850 juta. Adapun DPK syariah bertumbuh 9,51% dari Rp324.460 juta pada tahun 2013 menjadi Rp355.312 juta pada tahun 2014.

Komposisi DPK Berdasarkan Segmen Unit Usaha 2014
5.13%
94.87%
DPK Konvensional
DPK Syariah

Komposisi DPK Berdasarkan Unit Usaha 2013
5.54%
94.46%
DPK Konvensional
DPK Syariah

Komposisi Dana Berdasarkan Jenis Produk

Komposisi DPK Konvensional
Berdasarkan Jenis 2014
33.95%
39.86%
26.19%
Giro
Tabungan
Deposito

Komposisi DPK Syariah
Berdasarkan Jenis 2014
4.12%
16.17%
79.71%
Giro
Tabungan
Deposito

Giro

Giro Bank Sulselbar terdiri dari Giro dan Giro *Wadiah* yang dikelola dalam segmen usaha perbankan konvensional dan Unit Usaha Syariah. Saldo giro pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp2.633.659 juta atau lebih tinggi 11,55% dibandingkan giro tahun 2013 sebesar Rp2.360.888 juta. Giro Bank Sulselbar terdiri dari Giro Konvensional sebesar Rp2.619.003 juta, atau 99,44% dari total giro, dan Giro *Wadiah* sebesar Rp14.656 juta atau sebesar 0,56% dari total giro tahun 2014.

Tabungan

Tabungan Bank Sulselbar terdiri dari : Tabungan Simpeda, Tabungan Tapemda, Tabungan Tapemda Sayang Petani, Tabungan Tapemda Pelajar dan Mahasiswa, Tapemda Bantuan Siswa, Tapemda Pensiunan, Tabungan-KU, Tabungan Haji dan Tabungan Masa Depan (Tampan). Sedangkan produk tabungan syariah terdiri dari : Tabungan Syariah, Tabungan HATAM (Haji & Umrah), dan Tabungan Kemitraan dan Tabungan BKMT Syariah.

Pada tahun 2014, Bank Sulselbar menerima penempatan dana nasabah dari tabungan sebesar Rp1.778.566 juta atau lebih tinggi 0,02% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp1.778.193 juta. Saldo tabungan Bank Sulselbar didominasi oleh tabungan konvensional sebesar 96,77% terhadap total tabungan dan tabungan iB hanya sebesar 3,23%. Realisasi tabungan konvensional tahun 2014 tercatat sebesar Rp1.721.123 juta atau 0,12% lebih rendah dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp1.723.1787 juta. Tabungan iB mengalami kenaikan 4,41% dari Rp55.015 juta pada tahun 2013 menjadi Rp57.443 juta pada tahun 2014.

Deposito

Deposito Bank Sulselbar terdiri dari Deposito Konvensional dan Deposito *Mudharabah*. Pada tahun 2014, deposito Bank Sulselbar tercatat sebesar Rp2.513.612 juta yang meningkat signifikan sebesar 36,26% lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp1.717.229 juta.

Selama tahun 2014, Bank Sulselbar menerima penempatan dana masyarakat dalam bentuk deposito konvensional sebesar Rp2.230.399 juta atau 53,29% dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp1.455.042 juta. Pertumbuhan deposito konvensional merupakan pertumbuhan tertinggi DPK konvensional dan mendominasi total penghimpunan deposito sebesar 88,73%. Deposito *Mudharabah* mengalami kenaikan 8,02% pada tahun 2014 menjadi Rp283.213 juta dari Rp262.187 juta pada tahun 2013. Deposito *Mudharabah* memiliki proporsi tertinggi terhadap total DPK syariah sebesar 79,71% dan 11,27% terhadap total penghimpunan deposito Bank Sulselbar tahun 2014.

Dana Pihak Ketiga Bank Sulselbar Tahun 2012 – 2014

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014		Proporsi
	Rp Juta			Rp Juta	%	%
DANA PIHAK KETIGA KONVENSIONAL						
Giro	2.619.003	2.353.630	1.940.304	265.373	11,28%	39,86%
Tabungan	1.721.123	1.723.178	1.395.880	(2.055)	-0,12%	26,19%
Deposito	2.230.399	1.455.042	1.826.220	775.357	53,29%	33,95%
Total Dana Pihak Ketiga Konvensional	6.570.525	5.531.850	5.162.404	1.038.675	18,78%	100,00%
DANA PIHAK KETIGA UNIT USAHA SYARIAH						
Giro	14.656	7.258	9.426	7.398	101,93%	4,12%
Tabungan	57.443	55.015	44.477	2.428	4,41%	16,17%
Deposito	283.213	262.187	185.268	21.026	8,02%	79,71%
Total Dana Pihak Ketiga Unit Usaha Syariah	355.312	324.460	239.171	30.852	9,51%	100,00%
DANA PIHAK KETIGA						
Giro	2.633.659	2.360.888	1.949.730	272.771	11,55%	38,03%
Tabungan	1.778.566	1.778.193	1.440.357	373	0,02%	25,68%
Deposito	2.513.612	1.717.229	2.011.488	796.383	46,38%	36,29%
Total Dana Pihak Ketiga	**6.925.837**	**5.856.310**	**5.401.575**	**1.069.527**	**18,26%**	**100,00%**

Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain yaitu penempatan dana dari bank lain pada Bank Sulselbar dan menjadi liabilitas atau kewajiban Bank dalam bentuk giro dan *interbank call money* yang jumlahnya dinyatakan sesuai jumlah kewajiban terhadap bank lain.

Simpanan dari Bank lain pada tahun 2014 mengalami penurunan dalam jumlah yang tidak signifikan yaitu sebesar 10,22% dari Rp521.818 juta di tahun 2013 menjadi Rp468.499 juta. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan *interbank call money* sebesar 10,68%. Rerata suku bunga simpanan dari bank lain pada tahun 2014 masing – masing sebesar 1% untuk giro dan kisaran 6,00% - 7,50% untuk *interbank call money*.

Surat Berharga Yang Diterbitkan

Surat Berharga yang Diterbitkan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 12,50% dari Rp400.000 juta pada tahun 2013 menjadi Rp350.000 juta pada akhir tahun 2014. Penurunan surat berharga yang diterbitkan terjadi karena Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 Seri A sebesar Rp50.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun telah jatuh tempo pada tanggal 29 April 2014, dan Bank telah melunasi kewajibannya.

Surat berharga yang diterbitkan pada tahun 2014 setelah amortisasi dan dikurangi biaya emisi menjadi sebesar Rp449.305 juta atau 19,84% lebih rendah dari tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp498.139 juta. Kontribusi dana dari surat berharga yang diterbitkan adalah sebesar 5,42% dari total liabilitas tahun 2014.

Surat Berharga Yang Diterbitkan Tahun 2012 - 2014

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014	
	Rp Juta			Rp Juta	%
Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011	350.000	400.000	400.000	(50.000)	(12,50%)
Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011	100.000	100.000	100.000	0	0,00%
Biaya emisi obligasi	(6.836)	(6.836)	(6.836)	0	0,00%
Penerimaan penerbitan obligasi bersih	443.164	493.164	493.164	(50.000)	(10,14%)
Amortisasi biaya obligasi	6.141	4.975	3.342	1.166	23,44%
	449.305	**498.139**	**496.506**	(98.834)	(19,84%)

Pinjaman Yang Diterima

Selama tahun 2014, posisi pinjaman yang diterima oleh Bank Sulselbar mengalami penurunan 0,06% dari Rp100.085 juta pada tahun 2013 menjadi Rp100.085 juta pada tahun 2014.

Pinjaman dari Bank Indonesia merupakan pinjaman yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk dipinjamkan kembali kepada pengusaha kecil dan mikro, kredit mikro investasi dan kredit rumah sederhana. Pinjaman ini jatuh tempo tahun 2014 dengan suku bunga 3%-6% per tahun.

Pinjaman dari Pemerintah (PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk) merupakan pinjaman yang sifatnya penerusan pinjaman Pemerintah melalui Bank Sulsel dalam rangka pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/ Rumah Sangat Sederhana (KPR-RS/RSS). Dalam perjanjian penerusan ini pemerintah telah menunjuk PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Bank Koordinator. Atas pinjaman penerusan tersebut, Bank wajib membayar pokok pinjaman dengan dua puluh empat angsuran per setengah tahunan secara prorata dimulai 12 September 2002 dan berakhir 12 Maret 2014 dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 3% per tahun atas jumlah dana pinjaman yang telah ditarik dan masih terutang dari waktu ke waktu. Atas pinjaman kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah dilakukan pelunasan sebesar Rp25.740 juta pada tanggal 12 Maret 2014 yang menyebabkan penurunan realisasi pinjaman yang diterima tahun 2014.

Pinjaman dari Pemerintah (Kementrian Keuangan) merupakan fasilitas pinjaman yang diperuntukkan

bagi kredit usaha mikro dan kecil yang diterima oleh Bank dan dipinjamkan kepada nasabah-nasabah yang mempunyai persyaratan program fasilitas yang bersangkutan. Sifat pinjaman tersebut di atas adalah penerusan, dimana risiko kredit ditanggung oleh Bank. Berdasarkan perubahan perjanjian No. AMA-44/KP-040/DSMI/2009 tanggal 27 Januari 2009 Bank wajib membayar pokok pinjaman dengan lima kali angsuran per setengah tahunan secara prorata dimulai 10 Desember 2017 dan berakhir 10 Desember 2019.

Hutang Pajak

Hutang Pajak Bank Sulselbar tahun 2014 terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. Hutang pajak tahun 2014 sebesar 35,08% lebih rendah dari tahun 2013 menjadi Rp25.428 juta pada tahun 2014 dari Rp39.167 juta di tahun 2013.

Imbalan Pasca Kerja

Kewajiban Imbalan Pasca Kerja berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 dan telah dihitung sesuai PSAK 24 (Revisi 2004). Penilaian aktuaria atas kewajiban imbalan pasti dan imbalan pensiun dihitung oleh aktuaria independen PT. Dian Artha Tama. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah 905 dan 876 orang.

Kewajiban Imbalan Pasca Kerja tahun 2014 meningkat 13,11% menjadi sebesar Rp50.540 juta dari Rp44.681 juta pada tahun 2013.

Liabilitas Lainnya

Pada akhir tahun 2014, liabilitas lainnya tercatat sebesar Rp85.973 juta atau mengalami penurunan 14,06% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp100.038 juta. Kewajiban lainnya Bank Sulselbar tahun 2014 terdiri dari setoran jaminan, pendapatan yang ditangguhkan, tantiem & jasa produksi serta cadangan bonus dan penghargaan.

EKUITAS

Selama tahun 2014, total ekuitas Bank Sulselbar tercatat sebesar Rp1.719.894 juta atau meningkat 20,39% lebih tinggi dari ekuitas tahun 2013 sebesar Rp1.428.586 juta. Peningkatan total ekuitas tahun 2013 dipengaruhi antara lain kenaikan Modal Disetor Lainnya tahun 2014 sebesar 375,31% menjadi Rp55.136 juta dari Rp11.600 juta di tahun 2013.

Ekuitas 2012 - 2014

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014	
	Rp Juta			Rp Juta	%
Modal Saham					
Modal Disetor	606.033	568.933	528.739	37.100	6,52%
Modal Disetor Lainnya	55.136	11.600	2	43.536	375,31%
Saldo Laba	1.058.725	848053	698.005	210.672	24,84%
Jumlah Ekuitas	**1.719.894**	**1.428.586**	**1.226.746**	291.308	20,39%

STRUKTUR MODAL

Selama tahun 2014, aktiva Bank dibiayai oleh 82,81% dari liabilitas dan 17,19% dari ekuitas. Hal ini berarti bahwa sebagian besar aset Bank Sulselbar dibiayai dalam bentuk kewajiban. Selanjutnya, guna mengurangi perbedaan selisih periode antara aktiva sebagai pemanfaatan pendanaan dan sumber pendanaan itu sendiri, Bank mendanai sebagian besar asetnya dalam bentuk liabilitas dengan jangka waktu yang lebih pasti, seperti simpanan dari nasabah dalam bentuk deposito berjangka.

Modal Inti

Modal inti merupakan modal bank yang terdiri dari: modal disetor, cadangan tambahan modal yang diungkapkan sebagai : modal sumbangan, tambahan modal disetor, laba ditahan (termasuk saldo laba yang dicadangkan untuk tujuan tertentu), dan penurunan nilai atas instrumen keuangan yang tersedia untuk dijual. Modal Inti Bank Sulselbar tahun 2014 sebesar Rp1.440.921 juta atau mengalami kenaikan 20,46% dari Rp1.196.220 juta pada tahun 2013.

Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)

Modal pelengkap mengacu pada modal bank yang terdiri dari: penyisihan penilaian kembali aktiva tetap, penyisihan umum untuk provisi penghapusan aktiva produktif, pinjaman subordinasi, dan kenaikan nilai instrumen keuangan yang tersedia untuk dijual.

Selama tahun 2014, Modal Pelengkap mengalami peningkatan 11,24% lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yakni dari Rp67.282 juta menjadi Rp74.842 juta.

Modal Inti 2013 - 2014
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
16,68%
20,46%
1.196.222
1.440.921
2013
2014
Modal Inti (Rp Juta)
Growth (%)

Modal Pelengkap 2013 - 2014
76.000
74.000
72.000
70.000
68.000
66.000
64.000
62.000
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
8,42%
11,24%
67.282
74.842
2013
2014
Modal Pelengkap (Rp Juta)
Growth (%)

RASIO KEUANGAN PERBANKAN

Rasio keuangan perbankan untuk mengukur solvabilitas kolektibilitas dan profitabilitas Bank Sulselbar tahun 2012 – 2014 sebagai berikut :

	2014	2013	2012
Rasio Kecukupan Modal untuk Risiko Kredit	34,36%	31,71%	28,91%
Rasio Kecukupan Modal untuk Risiko Operasional	25,35%	23,47%	21,90%
NPL Gross	0,86%	1,19%	1,39%
ROA	4,71%	4,20%	3,99%
ROE	27,92%	25,49%	26,37%
NIM	10,52%	10,73%	9,53%
BOPO	65,25%	68,06%	71,66%
LDR	108,63%	113,69%	113,21%

SOLVABILITAS DAN KOLEKTIBILITAS

Rasio Kecukupan Modal

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2011 yang mewajibkan pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8%, dan rasio kecukupan modal Bank Sulselbar yang berada di atas 20% menunjukkan bahwa struktur permodalan Bank Sulselbar tetap memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko kredit dan risiko operasional karena kedua rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum BI dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan BI. Hal ini berarti bahwa Bank telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

Selama tahun 2014, rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) Bank Sulselbar terdiri dari rasio kecukupan modal untuk risiko kredit sebesar 34,36% dan rasio kecukupan modal untuk risiko oper-

asional sebesar 25,32%.

Rasio Kredit Bermasalah

Kredit dan pembiayaan yang diberikan yang dikategorikan sebagai *Non Performing Loan* (NPL) sebagaimana yang ditetapkan Bank Indonesia yakni kredit yang berada dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Batas maksimum NPL (netto) untuk kredit *non performing* adalah maksimal 5% sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 3/PBI/2011 tanggal 26 Desember 2001. Untuk itu, Bank Sulselbar senantiasa berupaya untuk menjaga dan memelihara kualitas kredit serta meminimalisir risiko kredit agar rasio NPL tidak melampaui ketentuan minimum Bank Indonesia.

Rasio NPL–Netto Bank Sulselbar mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,29% dibandingkan tahun 2013 sebesar 0,39%. Penurunan rasio NPL tersebut menunjukkan semakin baiknya kualitas pengelolaan risiko kredit. Dengan menurunnya rasio kredit bermasalah, Bank Sulselbar telah berupaya maksimal dan fokus kolektabilitas untuk mengurangi jumlah kredit macet pada Bank. Di samping itu, Bank Sulselbar juga secara konsisten terus mengoptimalkan upaya penyelamatan dan penyelesaian terhadap kredit bermasalah seperti penagihan debitur atau kompensasi, pengajuan klaim secara tepat waktu agar tidak terjadi *lapse*, hapusbuku kredit dan atau cara – cara lain yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan yang perundang – undangan yang berlaku. Di samping itu, telah dibentuk Tim Khusus untuk menangani kredit bermasalah melalui Surat Keputusan (SK) Direksi.

Upaya pengendalian kualitas kredit juga dilakukan melalui pemantauan atas sektor ekonomi yang rentan terhadap krisis serta melakukan supervisi kredit atas kredit berkualitas rendah agar dapat dideteksi lebih dini dalam hal terjadi penurunan *cash flow* debitur.

Surat Berharga Yang Diterbitkan Tahun 2012 - 2014

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014	
	Rp Juta			Rp Juta	%
Lancar	7.437.549	6.545.411	5.996.173	892.138	13,63%
Dalam Perhatian Khusus	21.464	33.063	33.932	(11.599)	(35,08%)
Kurang Lancar	4.473	6.150	7.389	(1.677)	(27,27%)
Diragukan	3.951	5.710	10.901	(1.759)	(30,81%)
Macet	56.328	67.531	66.658	(11.203)	(16,59%)
Jumlah	**7.523.765**	**6.657.865**	**6.115.053**	865.900	13,01%

	2014	2013	2012
NPL Gross			
Jumlah (Rp Juta)	64.755	79.391	84.949
Persentase	0,86%	1,19%	1,39%
NPL Net			
Jumlah (Rp Juta)	21.394	26.366	29.051
Persentase	0,29%	0,40%	0,48%

Likuiditas

***Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau Rasio Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga**

Selama tahun 2014, rasio LDR Bank Sulselbar tercatat sebesar 108,63% atau lebih rendah dibandingkan LDR tahun 2013 sebesar 113,69%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan

simpanan sebagai sumber pendanaan yang lebih tinggi dari pada peningkatan kredit sebagai aset pada tahun 2014. Disamping itu, pengelolaan likuiditas yang semakin efesien juga berpengaruh terhadap penurunan rasio LDR pada tahun 2014. Simpanan meningkat sebesar 18,26% sementara kredit dan pembiayaan yang diberikan meningkat 13,01%.

Rentabilitas

***Net Interest Margin* (NIM) atau Margin Pendapatan Bunga Bersih**

Margin pendapatan bunga bersih (*Net Interest Margin*/NIM) pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 10,52% dibandingkan tahun 2013 sebesar 10,73%. Penurunan rasio NIM tahun 2014 disebabkan oleh peningkatan beban bunga yang berasal dari pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 18,26%. Menjelang akhir tahun 2014 terjadi kenaikan suku bunga deposito sebagai respon atas kenaikan BI *rate* yang mempengaruhi peningkatan beban bunga yang merupakan beban pokok pendapatan. Dengan kemampuan untuk mempertahankan rasio NIM di atas 5%, maka Bank Sulselbar masih memiliki profitabilitas yang baik, yang berkapabilitas menumbuhkembangkan posisi portofolio ekuitas Bank.

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Selama tahun 2014, rasio BOPO Bank Sulselbar mengalami penurunan 2,81% menjadi 65,25% dari 68,06% pada tahun 2013. Fluktuasi rasio BOPO disebabkan strategi manajemen untuk mempertahankan efesiensi dan efektivitas kegiatan operasional Bank melalui perbaikan struktur pendanaan serta menghilangkan biaya-biaya yang dianggap tidak perlu.

***Return on Asset* (ROA) atau Rasio Imbal Hasil terhadap Aktiva**

Rasio imbal hasil terhadap aktiva (*Return on Asset*/ROA) meningkat dari 4,20% pada tahun 2013 menjadi 4,71% pada tahun 2014. Peningkatan rasio ROA tahun 2014 menunjukkan bahwa aset yang dikelola Bank Sulselbar dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mana peningkatan total aset pada tahun 2014 sebesar 14,52% sementara perolehan laba bersih meningkat signifikan sebesar 27,41%.

***Return on Equity* (ROE) atau Rasio Imbal Hasil terhadap Ekuitas**

Selama tahun 2014, rasio imbal hasil terhadap ekuitas (*Return on Equity*/ROE) meningkat 2,43% dari 25,49% pada tahun 2013 menjadi 27,92% pada akhir tahun 2014. Peningkatan rasio ROE menunjukkan bahwa peningkatan total ekuitas dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Total ekuitas mengalami pertumbuhan sebesar 20,39% pada tahun 2014 semen-

tara laba bersih meningkat signifikan sebesar 27,41%.

BELANJA BARANG MODAL

Bank Sulselbar secara konsisten berkomitmen untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung guna mengoptimalkan fungsi dan peranan Bank Sulselbar sebagai lembaga keuangan terpercaya dan pilihan masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Di samping itu, sarana dan prasarana pendukung sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional Bank untuk meningkatkan *market base* Bank Sulselbar guna mendukung pertumbuhan bisnis yang progresif. Sarana dan prasarana tersebut antara lain pembangunan kantor cabang yang nyaman dan berkualitas bagi nasabah serta jaringan ATM yang memberikan kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan bersama Bank Sulselbar dan sarana yang terintegrasi serta infrastruktur yang aman dan terpercaya guna meningkatkan kredibilitas Bank Sulselbar.

Selama tahun 2014, belanja barang modal Bank Sulselbar sebesar Rp283.902 juta atau 7,18% lebih tinggi dari belanja modal tahun 2013 sebesar Rp264.890 juta yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan gedung kantor cabang. Investasi barang modal tersebut seluruhnya berasal dari dana internal. Seluruh transaksi belanja barang modal dilakukan dalam mata uang rupiah sehingga bank tidak memiliki risiko mata uang asing dalam transaksi belanja modal.

Selama tahun 2014, Bank Sulselbar melakukan pembangunan 3 (tiga) kantor cabang yaitu Cabang Malili, Cabang Bulukumba, dan Cabang Pasangkayu. Selain itu, dilakukan pula renovasi gedung kantor Cabang Utama Makassar untuk menyediakan sarana dan layanan yang representatif dan nyaman bagi nasabah dan masyarakat yang bertransaksi di Bank Sulselbar.

Aktiva Tetap & Inventaris Bank Sulselbar Tahun 2012 – 2014

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014	
	Rp Juta			Rp Juta	%
Harga perolehan					
Tanah	26.846	26.400	25.089	446	1,69%
Bangunan kantor	93.228	91.795	90.482	1.433	1,56%
Bangunan rumah dinas	5.290	5.290	5.040	0	0,00%
Kendaraan	15.319	15.318	15.271	1	0,01%
Perabot kantor	118.794	106.327	101.525	12.467	11,73%
Perabot rumah dinas	2.112	2.044	1.934	68	3,33%
Aset dalam penyelesaian	22.313	17.716	631	4.597	25,95%
Jumlah	**283.902**	**264.890**	**239.972**	**19.012**	**7,18%**

ARUS KAS

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Bank Sulselbar pada tahun 2014 sebesar Rp445.373 juta yang berasal dari penerimaan bunga, provisi dan komisi, penerimaan pendapatan operasional lainnya, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan kewajiban lainnya. Peningkatan portofolio kredit yang sejalan dengan peningkatan simpanan berpengaruh terhadap kenaikan arus kas bersih dari aktivitas operasional yang meningkat 10,19% dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp404.201 juta.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp19.011 juta yang berasal dari pembelian aset tetap dan penyertaan atau lebih rendah dibandingan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp24.919 juta. Aktivitas arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013 disebabkan oleh adanya aset tetap yang masih dalam proses pembangunan sehingga belum saatnya jatuh tempo pelunasan untuk pembelian aset tetap. Dengan demikian, arus kas bersih untuk belanja modal menjadi lebih rendah dari tahun 2012.

Selama tahun 2014, arus kas dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar Rp158.980 juta atau mengalami defisit 3,40% dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp164.574 juta. Penurunan arus kas aktivitas pendanaan diperoleh dari adanya pembayaran deviden sebesar Rp189.556 juta, pembayaran

pinjaman yang diterima sebesar Rp60 juta dan pelunasan Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 sebesar Rp50.000 juta. Selain itu, juga terjadi penambahan setoran modal sebesar Rp80.635 juta sebagai sumber pendanaan alternatif selain simpanan.

Berdasarkan laporan arus kas bersih tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2014, Bank Sulselbar melakukan peningkatan portofolio kredit melalui arus kas yang diterima dari simpanan nasabah dan penambahan setoran modal pada aktivitas pendanaan. Untuk itu, arus kas bersih pada tahun 2014 meningkat 24,53% menjadi Rp267.382 juta dari Rp214.708 juta pada tahun 2013

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014	
	Rp Juta			Rp Juta	%
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	445.373	404.201	(13.758)	41.172	10,19%
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(19.011)	(24.919)	(8.325)	5.908	(23,71%)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(158.980)	(164.574)	(126.320)	5.594	(3,40%)
Arus Kas Bersih	**267.382**	**214.708**	**(148.403)**	**52.674**	**24,53%**

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Komitmen dan kontijensi merupakan rekening administrasif yang timbul dari transaksi kredit. Komitmen mengacu pada komitmen penyediaan, pembiayaan dari instrument keuangan yang mengakibatkan pengakuan aktiva dan/atau kewajiban selama periode tertentu. Kontijensi merupakan probabilitas aset dan/atau kewajiban yang dapat terjadi sebagai akibat dari beberapa kejadian sehubungan dengan kredit dan transaksi akseptasi di Bank Sulselbar.

Selama tahun 2014, fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (*undisbursement loans)* tercatat sebesar Rp8.778 juta atau 31,22% lebih rendah dari tahun 2013 sebesar Rp12.762 juta. Sementara itu, kontijensi juga mengalami penurunan 25,90% dari Rp146.152 juta pada tahun 2013 menjadi Rp108.296 juta pada tahun 2014.

	2014	2013	2012	Growth 2013 - 2014	
	Rp Juta			Rp Juta	%
Estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi berasal dari:					
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	8.778	12.762	9.056	(3.984)	(31,22%)
Garansi yang diterbitkan	108.296	146.152	413.357	(37.856)	(25,90%)
Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:					
Saldo awal tahun	0	0	0		
Penyesuaian	0	0	0		
Saldo akhir periode	0	0	**0**		

INFORMASI KEUANGAN DENGAN KEJADIAN LUAR BIASA

Selama tahun 2014, tidak ada kejadian luar biasa yang terjadi.

INFORMASI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI

Pihak-pihak

Transaksi dengan pihak-pihak afiliasi dilakukan antara Bank bersama dengan pihak – pihak yang memiliki hubungan kepemilikan, kepengurusan/manajemen dan pemerintah.

Kewajaran Transaksi dan Kepatuhan terhadap Peraturan Bapepam

Selama tahun 2014 , tidak terdapat transaksi dengan pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Bank Sulselbar, yang didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1 "Benturan Kepentingan". Di samping itu, manajemen telah mengkalkulasi tingkat suku bunga sehubungan dengan transaksi berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar. Dengan demikian, Bank telah melakukan transaksi dengan pihak istimewa secara wajar.

Alasan dan Realisasi Transaksi

Berikut ini adalah transaksi yang terjadi antara Bank dengan pihak afiliasi dan alasannya:

- Selama tahun 2014, Bank Sulselbar telah mengadakan transaksi fasilitas kredit kepada pihak berelasi sebesar Rp2.916 juta atau 88,49% lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar Rp1.547 juta. Pertimbangan dari transaksi ini adalah guna mencapai pertumbuhan aset pada tahun 2014.

  Kredit yang diberikan kepada pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama seperti yang diberikan kepada pihak lain (yang tidak berelasi). Demikian pula halnya dengan simpanan pihak berelasi maupun karyawan kunci, Bank Sulselbar membayarkan beban bunga sesuai suku bunga yang berlaku. Oleh karena manajemen telah mengkalkulasi tingkat suku bunga berdasarkan suku bunga yang berlaku, Bank Sulselbar telah melakukan transaksi dengan pihak berelasi secara wajar.

- Pada tahun 2014 Bank Sulselbar juga telah menerima simpanan dari pihak berelasi dan karyawan kunci sebesar Rp149.075 juta atau meningkat 100,19% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp74.468 juta. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk menyediakan sumber pembiayaan alternatif atas aset Bank.

- Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Pemenuhan Regulasi

  Setiap transaksi dengan pihak berelasi harus dilakukan secara perlakuan yang wajar dengan standar operasional prosedur yang sama dengan perlakuan transaksi terhadap pihak ketiga. Bank melaksanakan transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan PSAK No.7 (revisi tahun 2010) mengenai "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar pada suatu periode.

INFORMASI MATERIAL LAINNYA

Informasi material lainnya yang terjadi selama tahun 2014 yaitu Bank Sulselbar telah menarik fasilitas Dana Kelolaan dari Bank Indonesia untuk membiayai produk kredit mikro.

Tujuan transaksi tersebut untuk memperoleh sumber pendanaan yang tepat dalam membiayai aktivitas operasional. Bank menyediakan produk pembiayaan mikro kepada masyarakat dan pengusaha kecil untuk membantu pembiayaan aktivitas operasionalnya.

Informasi material di atas merupakan bagian dari aktivitas utama Bank dimana Bank telah mematuhi ketentuan transaksi material, seperti yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2.

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN INFORMASI KEUANGAN KEJADIAN LUAR BIASA

Laporan keuangan Bank untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008 termasuk Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan" yang terdapat dalam lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Sejak tahun 2007, Bank menerapkan unit usaha berprinsip Syariah. Laporan Keuangan unit usaha syariah tersebut disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2011)"Penyajian Laporan Keuangan Syariah", 102 "Akuntansi Murabahah", 105 "Akuntansi MUdharabah" 110 "Akuntansi Sukuk" dan 107 "Akuntansi Rahn" menggantikan No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) dan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Standar Akuntansi Syariah yang digunakan mengikuti Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/BPS tanggal 10 Juli 2013.

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan dasar akrual (kecuali laporan arus kas).

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, investasi jangka pendek likuid lainnya dengan

jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Selama tahun 2014, Bank tidak memiliki kejadian luar biasa yang terjadi dan mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan. Bank telah menjelaskan kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan di dalam catatan laporan keuangan per 31 Desember 2014 dan 2013 yang termasuk dalam laporan ini.

PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA BANK

Tahun 2014 merupakan tahun dimulainya Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap perbankan di seluruh Indonesia. Pada tahun tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan 19 (sembilan belas) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Disamping itu, selain aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdapat aturan-aturan lainnya yang wajib ditaati oleh Perbankan misalnya Peraturan Bank Indonesia. Kesemua ini disebabkan karena perbankan merupakan suatu lembaga yang wajib dijalani secara hati-hati sehingga dapat mencegah timbulnya risiko sistemik dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Terdapat beberapa peraturan Peraturan dan Surat Edaran Otoritas serta Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia yang dapat mempengaruhi kinerja Bank Sulselbar, antara lain :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sehubungan dengan keluarnya peraturan OJK ini, Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah harus melakukan perbaikan terkait SOP Tentang Penilaian Tingkat Kesehatannya. Hal ini disebabkan dikarenakan terdapat ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur pada Peraturan sebelumnya dan setelah keluar peraturan tersebut telah dihapus, salah satunya adalah bahwa dalam menentukan tingkat kesehatan bagi Unit Usaha Syariah sebelumnya dengan menghitung 6 (enam) faktor yaitu : permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar, sedangkan pada peraturan baru untuk Unit Usaha Syariah hanya menghitung secara individual terhadap faktor profil risiko *(risk profile).*

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makro Prudensial. Sebagaimana diketahui pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan tugas pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, namun dengan keluarnya PBI tersebut, Bank Indonesia masih berhak untuk melakukan pengawasan terutama pengawasan makro prudensial yang bertujuan untuk mencegah dan

mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan keluarkannya Peraturan ini, Bank Sulselbar wajib melakukan perubahan terhadap SOP terkait Penilaian Kualitas Aset Unit Usaha Syariah. Adapun perubahan tersebut adalah bahwa pada SOP sebelumnya yang disusun dengan peraturan lama batas maksimal melakukan restrukturisasi pembiayaan adalah sebanyak 1 (Satu) kali namun dengan keluarnya POJK ini tidak diatur.

4. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 Perihal penyelenggaraan layanan keuangan Digital dalam rangka keuangan inklusif melalui agen layanan keuangan Digital Individu. Pada SEBI ini, yang dapat melakukan kegiatan ini hanya Bank yang telah masuk dalam BUKU 4 (empat). Namun berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif, hal tersebut tidak diatur, dalam artian Bank dapat melakukan kegiatan ini tanpa melihat Bank tersebut masuk dalam BUKU berapa. Sehingga hal ini dapat menimbulkan keraguan dalam bertindak.

5. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 16/18/DPSP tanggal 28 November 2014, Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 Perihal Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS), pada peraturan sebelumnya tidak dibatasi jumlah uang yang dapat dilayani dengan RTGS, namun dengan peraturan baru disebutkan bahwa untuk transaksi dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) wajib melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan untuk transaksi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui RTGS.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan adanya POJK ini Bank Sulselbar wajib mengubah Anggaran Dasar Perseroannya, namun terdapat beberapa aturan dalam POJK ini yang bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia.

7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku. Aturan ini menyebabkan Bank Sulselbar melakukan revisi terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian lainnya dengan nasabahnya.

8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Peraturan ini mengatur mengenai materi dan kewajiban PUJK dalam memasarkan produknya, berdasarkan aturan ini Bank Sulselbar mengubah isi dari iklan pemasaran produknya tersebut.

PERUBAHAN KEBIJAKAN STANDAR AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Efektif 1 Januari 2012, Bank telah menerapkan PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK 55 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, menggantikan PSAK No 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan: Penyajian" efektif sejak tanggal 1 januari 2010 yang menggantikan PSAK No. 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian".

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG/MODAL

Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi hutang/modal.

DERIVATIF DAN FASILITAS LINDUNG NILAI

Bank tidak menghadapi risiko pasar atas perubahan tingkat suku bunga dan atau atas penggunaan instrument derivatif sehubungan dengan aktivitas manajemen risiko. Bank tidak menggunakan atau menerbitkan instrument derivatif untuk tujuan diperdagangkan.

KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/BPS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Bank mulai menerapkan PSAK 50/55 pada tanggal 30 Januari 2015 sesuai dengan memo No. MM/001/KMRK/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 dengan rincian penyesuaian sebagai berikut:

Jenis	Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian Sehubungan Dengan PSAK 50 dan 55	Setelah Penyesuaian
Pembiayaan	10.688.014.594	419.962.141	10.268.052.453

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak tersedia informasi dan fakta material setelah tanggal laporan akuntan dan mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan. Bank telah menjelaskan kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan di dalam catatan laporan keuangan per 31 Desember 2014 dan 2013 yang termasuk dalam laporan ini.

DAMPAK PERUBAHAN SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA BANK

Selama tahun 2014, Bank Indonesia telah menyatakan untuk meningkatkan suku bunga Bank Indonesia sebesar 0,25% lebih tinggi dari suku bunga sebelumnya. Suku bunga Bank Indonesia merupakan standar tarif untuk menghitung beban pokok pendapatan bunga. Oleh karena itu, dengan peningkatan suku bunga Bank Indonesia, beberapa tingkat bunga untuk sumber pendanaan Bank, antara lain suku bunga untuk pinjaman yang diberikan dilakukan penyesuaian sehingga berpengaruh terhadap beban pokok pendapatan bunga.

Selama tahun 2014, Bank Sulselbar telah mengelola dengan baik tingkat suku bunga untuk produk kredit dan telah menetapkan tingkat bunga yang terjangkau bagi masyarakat. Sebagai hasil, selama tahun 2014, marjin bunga bersih (NIM) lebih rendah dari margin yang diakui pada tahun 2013. Margin bunga bersih tahun 2014 menurun dari 10,73% menjadi 10,52%.

DEVIDEN

Kebijakan pembagian deviden Bank Sulselbar yaitu membayarkan deviden tunai sebesar 60% dari laba bersih setiap tahunnya yang besarnya diputuskan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi DIreksi. Keputusan untuk membayar dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan dan likuiditas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Bank Sulselbar setelah memperoleh persetujuan RUPS.

Deviden kepada pemegang saham akan dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai pemegang saham menurut perbandingan

besarnya modal yang telah disetor sampai dengan akhir tahun buku yang bersangkutan.

Selama tahun 2014, Bank Sulselbar telah membagikan deviden tunai sebesar Rp189.556 juta sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 25 Juni 2013. Deviden tunai tersebut dihitung berdasarkan pencapaian kinerja keuangan Bank Sulselbar per 31 Desember 2013.

Pembagian Deviden Bank Sulselbar

Deviden Tahun	Pemprov. Sulsel	Pemprov. Sulbar	Total Deviden	Keterangan
	Rp Juta			
2006	84.795	3.168	87.963	Dibagikan pada tahun 2007
2007	107.151	4.628	111.779	Dibagikan pada tahun 2008
2008	124.148	5.660	129.808	Dibagikan pada tahun 2009
2009	113.406	5.195	118.601	Dibagikan pada tahun 2010
2010	139.222	6.636	145.858	Dibagikan pada tahun 2011
2011	145.082	7.011	152.093	Dibagikan pada tahun 2012
2012	156.540	9.339	165.079	Dibagikan pada tahun 2013
2013	177.083	12.473	189.556	Dibagikan pada tahun 2014

PERBANDINGAN PROYEKSI DENGAN HASIL YANG DICAPAI

Kinerja keuangan Bank Sulselbar pada tahun 2014 terhadap proyeksi yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2014, secara keseluruhan menunjukkan pencapaian target di kisaran 70% - 110%. Target total aset tahun 2014 sebesar Rp10.942.810 juta dan hanya dapat terealisasikan 91,41% atau sebesar Rp10.003.340 juta dari angka proyeksi. Pencapaian target total aset Bank ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 8,42%. Laba bersih tahun 2014 terealisasikan sebesar 118,35% atau Rp400.228 juta dari target sebesar Rp338.165 juta yang dipengaruhi oleh kemampuan Bank untuk melakukan efesiensi serta pencapaian maksimal target ekuitas Bank sebesar 100,27%.

Pendapatan bunga mencatatkan pencapaian 98,76% yaitu dari target RBB sebesar Rp1.452.300 juta dan terealisasikan sebesar Rp1.434.306 juta pada tahun 2014. Pencapaian target pendapatan bunga seiring dengan strategi Bank untuk meningkatkan pengelolaan bunga Bank atas produk – produk kredit dan pembiayaan Bank guna memberikan tingkat suku bunga yang terjangkau dan menarik lebih banyak nasabah. Di samping itu, Bank juga berhasil mengelola marjin bunga bersih agar selalu di atas 5%, yang berdampak pada pencapaian pendapatan bunga bersih sebesar 105,40% dari proyeksi keuangan tahun 2014.

Perbandingan Proyeksi dan Realisasi Tahun 2014

	Tahun 2014		Pencapaian
	Realisasi	Proyeksi	
	Rp Juta		(%)
Laporan Laba Rugi			
Pendapatan Bunga	1.434.306	1.452.300	98,76%
Beban Bunga	412.680	483.013	85,44%
Pendapatan Bunga Bersih	1.021.626	969.287	105,40%
Laba Sebelum Pajak	539.687	450.886	119,69%
Laba Bersih Setelah Pajak	400.228	338.165	118,35%
Laporan Posisi Keuangan			
Jumlah Assets	10.003.340	10.942.810	91,41%
Jumlah Kewajiban	8.283.446	9.227.531	89,77%
Jumlah Ekuitas	1.719.894	1.715.279	100,27%
Giro Konvensional	2.619.003	2.839.322	92,24%
Tabungan Konvensional	1.721.123	1.774.576	96,99%
Deposito Konvensional	2.230.399	2.968.181	75,14%
	6.570.525	7.582.079	86,66%

	Tahun 2014		Pencapaian
	Realisasi	Proyeksi	
	Rp Juta		(%)
Giro UUS	14.656	18.050	81,20%
Tabungan UUS	57.443	59.232	96,98%
Deposito UUS	283.213	375.026	75,52%
	355.312	452.308	78,56%
Total Giro	2.633.659	2.857.372	92,17%
Total Tabungan	1.778.566	1.833.808	96,99%
Total Deposito	2.513.612	3.343.207	75,19%
	6.925.837	8.034.387	86,20%
Kredit Yg Diberikan	7.034.615	6.700.050	104,99%
Pembiayaan	489.150	691.585	70,73%
Total Kredit & Pembiayaan	7.523.765	7.391.635	101,79%

TARGET KEUANGAN TAHUN 2015

Atas kinerja keuangan tahun 2014 dengan catatan performa yang memuaskan, maka Bank telah menetapkan target bisnis tahun 2015 yang disusun berdasarkan kondisi internal dan eksternal Bank yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Target yang hendak dicapai Bank pada tahun 2015, sebagai berikut :

- Total aset tahun 2015 meningkat 22,41% dari realisasi tahun 2014 atau 11,90% dari target tahun 2014. Peningkatan target total aset ini disebabkan sebagian besar oleh peningkatan kredit yang mencapai 15,34% dari total realisasi penyaluran kredit dan pembiayaan tahun 2014. Dengan

pertumbuhan aset Bank, diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan kapasitas bisnis Bank untuk menjadi *regional champion*.

- Dana Pihak Ketiga ditargetkan meningkat 7,99% dari target Desember 2014 sebesar Rp8.034.387 juta menjadi sebesar Rp8.676.140 juta atau sebesar 25,27% dari realisasi tahun 2014.
- Kredit (termasuk syariah) tumbuh sebesar 17,38% dibandingkan target Desember 2014 sebesar Rp7.391.635 menjadi sebesar Rp8.676.140 juta.
- Pendapatan bunga tahun 2015 ditargetkan agar meningkat 12,57% dari perolehan pada tahun 2014 atau tumbuh 11,18% dibandingkan target tahun 2014.
- Target Laba bersih tahun 2015 meningkat 7,75% lebih tinggi dari hasil laba bersih selama tahun 2014.
- Modal ditargetkan bertumbuh sebesar 11,08% lebih tinggi dari hasil tahun 2014. Bank Sulselbar juga telah menetapkan kebijakan dividen maksimum 60% dari laba bersih tahun berjalan, yang jumlahnya akan ditentukan dalam RUPS.
- Rasio kecukupan modal atau CAR diproyeksikan pada kisaran 23,30%
- NPL Gross dan NPL Net masing – masing diproyeksikan pada kisaran0,75% dan 0,25%
- Imbal hasil rata – rata aktiva (ROA) ditargetkan di kisaran 4,70%
- Imbal hasil rata – rata ekuitas (ROE) ditargetkan di kisaran 27,99%
- Marjin pendapatan bunga bersih (NIM) diproyeksikan pada kisaran 10,24% sebagai hasil dari perbaikan struktur pendanaan dan optimalisasi penyaluran kredit bermargin tinggi.
- Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) diproyeksikan sebesar 65,22%
- Rasio kredit yang diberikan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga (LDR) diproyeksikan sebesar 100,00%

INFORMASI SAHAM DAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Selama tahun 2013, Bank Sulselbar menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yaitu pada tanggal 25 Juni 2013 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Persetujuan/Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2012
3. Persetujuan/Penetapan Auditor Independen untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2013.

KEPEMILIKAN SAHAM PER 31 DESEMBER 2013
Pemegang Saham Bank Sulselbar

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tahun 1950, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administratif Sulawesi. Selanjutnya pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 47 Tahun 1960 yang mengesahkan terbentuknya Sulawesi Selatan dan Tenggara. Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 13 Tahun 1964 yang memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan yang terdiri dari 27 kabupaten/kota. Dan terakhir berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004, Sulawesi Selatan dimekarkan menjadi 2 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dengan pemisahan tersebut, wilayah administratif Sulawesi Selatan menjadi 24 kabupaten/kota.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.18/P/2008 menetapkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk masa jabatan 2008 – 2013, sebagai berikut :

Gubernur : Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, Msi, MH

Wakil Gubernur : Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, MS

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2004 dan terdiri dari 5 (lima) kabupaten. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk masa jabatan 2011– 2016, sebagai berikut :

Gubernur : H. Anwar Adnan Saleh

Wakil Gubernur : H. Aladin S. Mengga

Kepemilikan Saham Masyarakat Umum

Saham Bank Sulselbar seluruhnya dimiliki oleh

Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan belum dilepas untuk dijual ke publik.

Pemegang Saham Bank Sulselbar

Sampai dengan 31 Desember 2013, Bank Sulselbar dimiliki oleh 31 pemegang saham yang terdiri dari Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Pemerintah Prov. Sulawesi Barat serta 29 Pemerintah Kabupaten/ Kota se – Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Laporan Laba Rugi Bank Sulselbar Tahun 2012 - 2014

Nama Pemegang Saham	2013		
	Jumlah saham	Kepemilikan	Jumlah (Rupiah)
Propinsi Sulawesi Selatan	216.000	37,97%	216.000.000.000
Kabupaten Pangkep	23.524	4,13%	23.524.000.000
Kabupaten Selayar	21.830	3,84%	21.830.000.000
Kabupaten Pinrang	19.500	3,43%	19.500.000.000
Kabupaten Wajo	18.265	3,21%	18.265.000.000
Kota Makassar	17.000	2,99%	17.000.000.000
Kabupaten Takalar	18.440	3,24%	18.440.000.000
Kabupaten Barru	16.110	2,83%	16.110.000.000
Kabupaten Janeponto	12.501	2,20%	12.501.000.000
Kabupaten Bantaeng	13.017	2,29%	13.017.000.000
Kabupaten Sidrap	11.571	2,03%	11.571.000.000
Kabupaten Luwu Timur	35.000	6,15%	35.000.000.000
Kota Parepare	9.647	1,70%	9.647.000.000
Kabupaten Enrekang	8.510	1,50%	8.510.000.000
Kabupaten Luwu	10.172	1,79%	10.172.000.000
Kabupaten Soppeng	20.000	3,52%	20.000.000.000
Kabupaten Sinjai	8.745	1,54%	8.745.000.000
Kabupaten Bone	7.106	1,25%	7.106.000.000
Kabupaten Maros	12.500	2,20%	12.500.000.000
Kota Palopo	8.000	1,41%	8.000.000.000
Kabupaten Luwu Utara	3.355	0,59%	3.355.000.000
Kabupaten Tana Toraja	5.586	0,98%	5.586.000.000
Kabupaten Gowa	4.054	0,71%	4.054.000.000
Kabupaten Bulukumba	3.214	0,56%	3.214.000.000
Kabupaten Toraja Utara	6.000	1,05%	6.000.000.000
Propinsi Sulawesi Barat	4.000	0,70%	4.000.000.000
Kabupaten Mamuju	8.540	1,50%	8.540.000.000
Kabupaten Polman	7.399	1,30%	7.399.000.000
Kabupaten Majene	6.800	1,20%	6.800.000.000
Kabupaten Mamasa	7.500	1,32%	7.500.000.000
Kabupaten Mamuju Utara	5.047	0,89%	5.047.000.000
Jumlah Modal Saham	**568.933**	**100,00%**	**568.933.000.000**

2014			Kenaikan	
Jumlah saham	Kepemilikan	Jumlah (Rupiah)	Rp Juta	%
216.000	35,64%	216.000.000.000	0,00%	0
23.524	3,88%	23.524.000.000	0,00%	0
24.330	4,01%	24.330.000.000	11,45%	2.500.000.000
20.500	3,38%	20.500.000.000	5,13%	1.000.000.000
18.265	3,01%	18.265.000.000	0,00%	0
17.000	2,81%	17.000.000.000	0,00%	0
18.440	3,04%	18.440.000.000	0,00%	0
18.110	2,99%	18.110.000.000	12,41%	2.000.000.000
12.501	2,06%	12.501.000.000	0,00%	0
13.017	2,15%	13.017.000.000	0,00%	0
11.571	1,91%	11.571.000.000	0,00%	0
45.000	7,43%	45.000.000.000	28,57%	10.000.000.000
11.147	1,84%	11.147.000.000	15,55%	1.500.000.000
8.510	1,40%	8.510.000.000	0,00%	0
11.172	1,84%	11.172.000.000	9,83%	1.000.000.000
20.000	3,30%	20.000.000.000	0,00%	0
10.845	1,79%	10.845.000.000	24,01%	2.100.000.000
7.106	1,17%	7.106.000.000	0,00%	0
17.500	2,89%	17.500.000.000	40,00%	5.000.000.000
10.000	1,65%	10.000.000.000	25,00%	2.000.000.000
3.355	0,55%	3.355.000.000	0,00%	0
10.086	1,66%	10.086.000.000	80,56%	4.500.000.000
4.054	0,67%	4.054.000.000	0,00%	0
5.214	0,86%	5.214.000.000	62,23%	2.000.000.000
7.500	1,24%	7.500.000.000	25,00%	1.500.000.000
6.000	0,99%	6.000.000.000	50,00%	2.000.000.000
8.540	1,41%	8.540.000.000	0,00%	0
7.399	1,22%	7.399.000.000	0,00%	0
6.800	1,12%	6.800.000.000	0,00%	0
7.500	1,24%	7.500.000.000	0,00%	0
5.047	0,83%	5.047.000.000	0,00%	0
606.033	**100,00%**	**606.033.000.000**	**6,52%**	**37.100.000.000**

Modal Dasar Bank Sulselbar

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Rakhmawati Laica Marzuki, S.H., Notaris di Makassar, jo Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 02 tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, S.H.dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-46963.AH.01.02.Tahun.2009 tanggal 30 September 2009, dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063272.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 90 tanggal 10 November 2009, Tambahan No. 26944 telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sulsel yaitu dengan meningkatkan besarnya Modal Dasar menjadi sebesar Rp1.600.000.000.000,-, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No: AHU–46963.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 30 September 2009.

Komposisi Kepemilikan Saham

Komposisi kepemilikan saham Bank Sulselbar per 31 Desember 2014 sebagai berikut :

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

  35,64%

- Pemerintah Kab./Kota se – Sulawesi Selatan

  57,55%

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

  0,99%

- Pemerintah Kab./Kota se – Sulawesi Barat

  5,82%

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Modal Sendiri (Rp Juta)	447.167	468.061	487.477	528.739	568.933	606.033
Growth (%)	2,91%	4,67%	4,15%	8,46%	7,60%	6,52%

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Ikhtisar Harga Saham

Informasi terkait harga saham tidak tersedia karena saham Bank Sulselbar tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

PEMEGANG SAHAM YANG TERCATAT MEMILIKI LEBIH DARI 5% SAHAM PER 31 DESEMBER 2013

Nama	Jumlah Saham (Rupiah)	% Saham
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	216.000.000.000	35,64%

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nama	Bank Sulselbar	Bank Lain	Perusahaan Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Keterangan
Dewan Komisaris					
1. H. Andi Muallim	-	-	-	-	Tidak Ada
2. H. A. Tjoneng Mallombasang	-	-	-	-	
3. N. Ikawidjaja	-	-	-	-	
4. Muhammad Amri					
Dewan Direksi	-	-	-	-	
1. H. A. Muhammad Rahmat	-	-	-	-	Tidak Ada
2. H. Ambo Samsuddin	-	-	-	-	
3. H. Harris Saleng	-	-	-	-	

PEMBAGIAN DEVIDEN

Bank Sulselbar akan melakukan kebijakan pembagian deviden yaitu membayarkan deviden sebesar 60% dari laba bersih setiap tahunnya. Deviden kepada pemegang saham akan dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai pemegang saham menurut perbandingan besarnya modal yang telah disetor sampai dengan akhir tahun buku yang bersangkutan.

Selama tahun 2014, Bank Sulselbar telah membagikan deviden tunai sebesar Rp189.555.873.823,-sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 24 Juni 2014. Deviden tunai tersebut dihitung berdasarkan pencapaian kinerja keuangan Bank Sulselbar per 31 Desember 2013.

Ikhtisar Deviden

Kebijakan deviden Bank Sulselbar berpedoman pada Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan jumlah deviden yang dibagikan yaitu sebesar 60% dari laba bersih. Keputusan untuk membayarkan dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan, likuiditas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Bank Suslelbar setelah memperoleh persetujuan RUPS.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2012 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2014 lalu, jumlah dividen tunai yang dibagikan tahun 2014 adalah sebesar Rp189.555.873.823,- yang dihitung berdasarkan pencapaian kinerja selama tahun 2013.

Bank Sulselbar merupakan BUMD Prov. Sulsel dengan nilai kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perkembangan Dividen yang disalurkan Bank Sulselbar kepada Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat selama 6 (enam) tahun terakhir sebagai berikut:

Pembagian Deviden Bank Sulselbar

Deviden Tahun	Pemprov. Sulsel	Pemprov. Sulbar	Total Deviden	Keterangan
	Rp Juta			
2006	84.795	3.168	87.963	Dibagikan pada tahun 2007
2007	107.151	4.628	111.779	Dibagikan pada tahun 2008
2008	124.148	5.660	129.808	Dibagikan pada tahun 2009
2009	113.406	5.195	118.601	Dibagikan pada tahun 2010
2010	139.222	6.636	145.858	Dibagikan pada tahun 2011
2011	145.082	7.011	152.093	Dibagikan pada tahun 2012
2012	156.540	9.339	165.079	Dibagikan pada tahun 2013
2013	177.083	12.473	189.556	Dibagikan pada tahun 2014

IKHTISAR EFEK LAINNYA (OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH)

OBLIGASI & SUKUK MUDHARABAH

Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan diversifikasi produk, Bank Sulselbar terus berupaya untuk meningkatkan dan memperkuat struktur pendanaan. Untuk memperluas basis pendanaan lebih jauh

lagi, Bank Sulsebar mencari pendanaan berjangka panjang melalui penerbitan obligasi korporasi dan sukuk *mudharabah*. Selain bertujuan untuk memperbaiki struktur pendanaan dan penyesuaian likuiditas, dana dari emisi obligasi dan sukuk mudharabah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor konsumtif dan produktif, terutama investasi yang memiliki tenor panjang.

Penerbitan obligasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan *corporate image* Bank Sulselbar dalam lingkup yang lebih luas, yaitu *scope* nasional.

a. **Nama Obligasi**

OBLIGASI BANK SULSELBAR I TAHUN 2011

b. **Nama Sukuk**

SUKUK MUDHARABAH BANK SULSELBAR I TAHUN 2011

c. **Surat Pernyataan Efektif BAPEPAM & LK**

Surat pernyataan efektif dari BAPEPAM – LK No. S-4750/BL/2011 tanggal 29 April 2011 perihal Pemberitahuan Pernyataan Efektifnya Pendaftaran.

d. **Surat Izin Bank Indonesia**

Surat izin penerbitan produk baru dari Bank Indonesia No. 13/14/DPIP/Prz/Mks tanggal 11 April 2011 perihal Penegasan atas Prodouk atau Aktivitas Baru.

e. **Jenis Obligasi**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi diterbitkan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan terdaftar atas nama PT PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

f. **Jenis Sukuk Mudharabah**

Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) sebagai bukti investasi Pemegang *Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah* ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana *Sukuk. Sukuk Mudharabah* ditawarkan pada nilai nominal, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan ketentuan mengenai pembelian awal seluruh Sukuk Mudharabah yang dapat dilaksanakan oleh Perseroan.

Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan terdaftar atas nama PT PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

g. **Jumlah Pokok Obligasi dan Jangka Waktu**

Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 diterbitkan dalam 2 seri yaitu Seri A dan Seri B

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah).

h. **Jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan Jangka Waktu**

Sukuk Mudharabah diterbitkan dengan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 72,5% (tujuh puluh dua koma lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

i. **Pembayaran Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi**

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran Bunga Obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2011, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi yaitu tanggal 12 Mei 2014 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 12 Mei 2016 untuk Obligasi Seri B.

j. **Pembayaran Bagi Hasil dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah**

Bagi hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bagi hasil Sukuk Mudharabah pertama telah dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2011 dan terakhir kalinya pada tanggal 12 Mei 2016.

k. **Ketentuan Umum Pembayaran Bunga/Bagi Hasil**

Bunga/bagi hasil Obligasi dan Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap setiap triwulan dan dicatatkan

pada Bursa Efek Indonesia. Pembayaran bunga/bagi hasil pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2011. Untuk layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta administrasi rekening efek dilakukan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Bunga/bagi hasil Obligasi dan Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak tanggal distribusi obligasi secara elektronik (yang juga merupakan tanggal emisi), dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Bunga/bagi hasil dibayarkan oleh Bank Sulselbar kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada tanggal pembayaran bunga/bagi hasil yang bersangkutan.

l. **Pemeringkatan Obligasi**

Pemeringkatan Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni idA (*Single A Flat; Stable Outlook*).

m. **Pemeringkatan Sukuk Mudharabah**

Pemeringkatan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni idA(sy) (*Single A Flat Syariah; Stable Outlook*).

n. **Jaminan Obligasi**

Obligasi dijamin dengan jaminan berupa piutang yang dibebankan dengan fidusia. Jaminan yang diberikan adalah sesuai dengan nilai jaminan pada tanggal emisi sekurang – kurangnya sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi (obyek fidusia). Apabila nilai obyek jaminan fidusia kurang dari 100% dari nilai pokok Obligasi, maka Perseroan wajib menambah jaminan dengan piutang, dalam hal piutang tidak mencukupi maka penambahan jaminan dilakukan dengan uang tunai dalam bentuk deposito berjangka atas nama perseroan.

o. **Jaminan Sukuk Mudharabah**

Sukuk Mudharabah dijamin dengan jaminan berupa piutang yang dibebankan dengan fidusia. Jaminan yang diberikan adalah sesuai dengan nilai jaminan pada tanggal emisi sekurang – kurangnya sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi (obyek fidusia). Apabila nilai obyek jaminan fidusia kurang dari 100% dari nilai Dana Sukuk, maka Perseroan wajib menambah jaminan dengan piutang,

dalam hal piutang tidak mencukupi maka penambahan jaminan dilakukan dengan uang tunai dalam bentuk deposito berjangka atas nama perseroan.

p. **Realisasi Penggunaan Dana Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Bank Sulselbar pada tanggal 15 April 2011 telah melakukan *Due Diligence* dan *Public Expose* (Pemaparan Publik) Obligasi dan Sukuk dan *Mudharabah* Bank Sulsebar I Tahun 2011 dengan nilai emisi Obligasi dan Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp500 miliar. Dana hasil penawaran umum Obligasi Obligasi dan Sukuk dan *Mudharabah* Bank Sulsebar I Tahun 2011 setelah dikurangi biaya emisi, telah digunakan seluruhnya untuk ekspansi kredit dan pembiayaan. Adapun rinciannya, sebagai berikut :

Realisasi Penggunaan Dana Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Uraian	2014	2013	2012	2011
	Rp Juta			
Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011	350.000.000.000	400.000.000.000	400.000.000.000	400.000.000.000
Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Biaya Emisi Obligasi & Sukuk Mudharabah	(6.836.190.602)	(6.836.190.602)	(6.836.190.602)	(6.836.190.602)
Penerimaan Emisi Obligasi & Sukuk Mudharabah Bersih	443.163.809.398	493.163.809.398	493.163.809.398	493.163.809.398
Amortisasi Biaya Emisi Obligasi & Sukuk Mudharabah	6.140.564.878	4.974.975.924	3.342.406.765	1.396.831.131
Obligasi dan Sukuk Mudharabah 2011	449.304.374.276	498.138.785.322	496.506.216.163	494.560.640.529
Sisa Dana	0	0	0	0

q. **Wali Amanat Obligasi**

Sehubungan dengan emisi Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 No. 33 tanggal 25 Februari 2011 dan Perubahan I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 No. 12 tanggal 8 April 2011 serta Perubahan II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011 No. 73 tanggal 26 April 2011 yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi SH., antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011" adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan Surat Pernyataan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tertanggal 23 Februari 2011, Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalimanatan Efek Bersifat Utang.

Alamat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

FICS Group

Plaza Mandiri Lt. 22 Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190

r. **Wali Amanat Sukuk Mudharabah**

Sehubungan dengan emisi Sukuk Mudharabah Bank Sulsel I Tahun 2011 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011 No. 36 tanggal 25 Februari 2011 dan Perubahan I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011 No. 14 tanggal 8 April 2011 serta Perubahan II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011 No. 76 tanggal 26 April 2011 yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi S.H., antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero)

Tbk. selaku Wali Amanat Sukuk Mudharabah.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat Sukuk Mudharabah atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah dalam rangka Penawaran Umum "Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011" adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang telah terdaftar di Bapepam dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan Surat Pernyataan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tertanggal 23 Februari 2011, Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due dilligence*) terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalimanatan Efek Bersifat Utang. Wali Amanat Sukuk mempunyai pejabat penanggungjawab dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal sesuai Peraturan Bapepam dan LK No.IX-.A.13 angka 3.a.2.c.

Alamat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

FICS Group

Plaza Mandiri Lt. 22 Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190.

s. **Agen Pembayaran Obligasi**

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Akta No. 38 tertanggal 25 Februari 2011 dan Perubahan I Agen Pembayaran No. 78 tertanggal 27 April 2011 yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi SH., yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bil-

amana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran :

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, Lantai 5

Jl. Jendral Sudirman kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon: (021) 5299 1001

Faksimili: (021) 5299 1199

t. **Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah**

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Akta No. 39 tertanggal 25 Februari 2011 dan Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah No. 79 tertanggal 27 April 2011 yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi S.H., yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI.

Pelunasan Dana Sukuk dan pembayaran Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan.

bilamana tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran :

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, Lt. 5

Jl. Jendral Sudirman kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon: (021) 52991001

Faksimili: (021) 52991199

u. **Tindakan Korporasi (*Corporate Action*) yang menyebabkan Perubahan Jumlah Efek**

Tidak terdapat adanya tindakan korporasi (*corporate action*) yang menyebabkan Perubahan Jumlah Efek (Obligasi dan Sukuk Mudharabah) yang diterbitkan Bank Sulselbar.

v. **Perubahan jumlah Efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku**

Tidak terdapat perubahan jumlah efek (Obligasi dan Sukuk Mudharabah) Bank Sulselbar, dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku.

Ikhtisar Obligasi & Sukuk Mudharabah

Obligasi	Jumlah (Rp)	Waktu	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*
Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 Seri A	50.000.000.000,-	3 tahun	9,5%	12 Mei 2011	12 Mei 2014	idA
Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 Seri B	350.000.000.000,-	5 tahun	10,4%	12 Mei 2011	12 Mei 2016	idA
Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011	100.000.000.000,-	5 tahun	72,5%	12 Mei 2011	12 Mei 2016	idA

* Rating oleh Pefindo (06 Februari 2014 –01 Februari 2015)

Obligasi Korporasi

Keterangan	Tanggal Penerbitan	Jumlah Obligasi
Penawaran Umum Obligasi I Bank Sulselbar Tahun 2011	12 Mei 2011	400.000.000.000,-

Sukuk Mudharabah

Keterangan	Tanggal Penerbitan	Jumlah Obligasi
Penawaran Umum Obligasi I Bank Sulselbar Tahun 2011	12 Mei 2011	400.000.000.000,-

Kronologis Pembayaran Bunga Obligasi

Obligasi	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*
Pembayaran Bunga Ke – 1 (12 Mei 2011 – 11 Agustus 2011)	11 Agustus 2011	10.287.500.000,00
Pembayaran Bunga Ke – 2 (12 Agustus 2011 – 11 November 2011)	11 November 2011	10.287.500.000,00
Pembayaran Bunga Ke – 3 (12 November 2011 – 11 Februari 2012)	10 Februari 2012	10.287.500.000,00
Pembayaran Bunga Ke – 4 (12 Februari – 11 Mei 2012)	11 Mei 2012	10.287.500.000,00
Pembayaran Bunga Ke – 5 (12 Mei – 11 Agustus 2012)	10 Agustus 2012	10.287.500.000,00
Pembayaran Bunga Ke – 6 (12 Agustus – 11 November 2012)	09 November 2012	10.287.500.000,00
Pembayaran Bunga Ke – 7 (12 November 2012 – 11 Februari 2013)	11 Februari 2013	10.287.500.000,00
Pembayaran Bunga Ke – 8 (12 Februari – 11 Mei 2013)	08 Mei 2013	10.287.500.000,00
Pembayaran Bunga Ke – 9 (12 Mei – 11 Agustus 2013)	02 Agustus 2013	10.287.500.000,00
Pembayaran Bunga Ke – 10 (12 Agustus – 11 November 2013)	11 November 2013	10.287.500.000,00
Pembayaran Bunga Ke – 11 (12 November 2013 – 11 Februari 2014)	11 Februari 2014	12.806.739.850,00
Pembayaran Bunga Ke – 12 (12 Februari – 11 Mei 2014)	09 Mei 2014	13.013.594.058,30
Pembayaran Bunga Ke – 13 (12 Mei – 11 Agustus 2014)	07 Agustus 2014	11.636.933.636,08
Pembayaran Bunga Ke – 10 (12 Agustus – 11 November 2014)	11 November 2014	11.765.109.389,38

Kronologis Pembayaran Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*

Obligasi	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 1 (12 Mei 2011 – 11 Agustus 2011)	12 Agustus 2011	2.600.000.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 2 (12 Agustus 2011 – 11 November 2011)	11 November 2011	2.600.000.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 3 (12 November 2011 – 11 Februari 2012)	11 Februari 2012	2.585.061.107,06
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 4 (12 Februari – 11 Mei 2012)	2 Mei 2012	2.563.992.098,62
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 5 (12 Mei – 11 Agustus 2012)	1 Agustus 2012	2.570.022.233,20
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 6 (12 Agustus – 11 November 2012)	24 Oktober 2012	2.581.576.713,33
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 7 (12 November 2012 – 11 Februari 2013)	23 Januari 2013	2.451.466.990,66
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 8 (12 Februari – 11 Mei 2013)	01 Mei 2013	2.643.128.978,61
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 9 (12 Mei – 11 Agustus 2013)	26 Juli 2013	2.480.963.275,00
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 10 (12 Agustus – 11 November 2013)	28 Oktober 2013	2.656.981.916,66
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 11 (12 November 2013 – 11 Februari 2014)	30 Januari 2014	2.519.239.850,00
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 12 (12 Februari – 11 Mei 2014)	12 Mei 2014	2.726.094.058,33
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 13 (12 Mei – 11 Agustus 2014)	05 Agustus 2014	2.536.933.636,11
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 14 (12 Agustus – 11 November 2014)	31 Oktober 2014	2.665.109.389,42

Obligasi Jatuh Tempo

Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 Seri A dengan nilai emisi Rp50 milyar dengan tingkat bunga sebesar 9,50% per tahun telah jatuh tempo pada tanggal 29 April 2014. Atas Obligasi Seri A yang jatuh tempo tersebut, Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh pemegang Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 Seri A.

LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

elbar

LAPORAN PELAKSANAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SULSELBAR

TAHUN 2014

I. KONVENSIONAL

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu unsur penting dalam penilaian tingkat kesehatan Bank bersama-sama dengan profil risiko, rentabilitas dan Permodalan. Penerapan 5 (lima) prinsip GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran, pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat Bank Sulselbar senantiasa dilakukan dalam setiap kegiatan usahanya.

Untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* tersebut membutuhkan proses yang panjang guna memberikan hasil berupa *sustainable value* bagi Bank Sulselbar. Berdasarkan hal tersebut, Bank Sulselbar berupaya untuk menyempurnakan praktek-praktek bisnis yang berdasarkan *GCG* dan melaksanakan praktik perbankan yang *Prudential* dalam setiap kegiatan operasinya.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pada tahun 2014, Bank Sulselbar menyelenggarakan RUPS sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) untuk RUPS Luar Biasa dan 1 (satu) RUPS Tahunan.

1.1 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Sulselbar diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2014, ditempat kedudukan Perseroan yaitu Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut adalah :

a. Penyampaian dan pengesahaan laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan tahun buku 2013;
b. Penetapan penggunaan laba perseroan tahun buku 2013;
c. Penetapan kantor akuntan publik (KAP) untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2014;
d. Persetujuan atas modal sumbangan Bank Indonesia *(Integrated Banking System)* dan Pajak tangguhan untuk menambah cadangan umum perseroan;
e. Persetujuan plafon dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* Tahun 2014;
f. Pengesahan tambahan modal setor dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui/mengesahkan setoran modal saham perseroan.

Adapun keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut adalah :

a. Agenda Penyampaian dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroran Tahun Buku 2013

   Untuk agenda ini rapat mengesahkan/menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013, yang terdiri atas :

   a) Laporan Tahunan Direksi berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
   b) Laporan mengenai kegiatan perseroan dalam rangka pencapaian kinerja.
   c) Laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR).
   d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku 2013.
   e) Gambaran tentang rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) PT. Bank Sulselbar.
   f) Persetujuan setoran modal saham per tanggal 26 Juni 2014 oleh Pemegang saham, sebesar Rp. 37.100.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar seratus juta rupiah).

b. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2013

   a) Rapat mengesahkan penggunaan laba perseroan tahun buku 2013 sebesar Rp. 315.926.456.373,- (Tiga ratus lima belas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang diperuntukan untuk

      A. Dividen Saham, Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan

         - Dividen Saham 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp. 189.555.873.823,- (Seratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)

         - Cadangan Umum 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 63.185.291.275,- (Enam puluh Tiga milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

         - Cadangan Tujuan 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 63.185.291.275,- (Enam puluh tiga milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

c. Penetapan Kantor Akutan Publik (KAP) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014

Pemegang Saham melalui RUPS telah memutuskan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik "Husni, Muharram dan Rasidi" guna melakukan audit laporan keuangan dan audit kinerja perseroan tahun buku 2014 dan menugaskan kepada Direksi untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) termasuk Honoriumnya dengan persetujuan Dewan Komisaris.

d. Persetujuan atas Modal Sumbangan Bank Indonesia dan Pajak tangguhan untuk menambah cadangan umum Perseroan.

Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) atas Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Tahun buku 2013 Perseroan terdapat kelebihan yang berasal dari Modal Sumbangan Bank Indonesia *(Integrated Banking System)* dan Pajak tangguhan masing-masing, yaitu : Modal Sumbangan Bank Indonesia *(integrated Banking System)* sebesar Rp. 243.905.400,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu empat ratus rupiah) dan pajak tangguhan sebesar Rp. 4.296.464.944,- (Empat milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui modal sumbangan dari sumbangan Bank Indonesia *(Integrated Banking System)* dan Pajak tangguhan dengan total sebesar Rp. 4.530.370.344,- (Empat milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) disetor untuk menambah cadangan umum perseroan.

e. Persetujuan Plafon Dana *Corporate Social Responsibilty (CSR)* Tahun 2014.

RUPS tahunan menyetujui usulan penyediaan plafond dana *Corporate Social Responsibilty (CSR)* untuk tahun 2014 sebesar 2.5% (Dua Koma lima persen) dari laba bersih perseroan tahun buku 2013 dan menjadi dasar plafon anggaran tahun berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaannya diserahkan kepada Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

f. Pengesahan Tambahan Modal Disetor dan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui/mengesahkan setoran Modal Saham Perseroan.

RUPS Tahunan juga menyetujui setoram modal sebesar Rp. 37.100.000.000,- (Tiga puluh tujuh milyar seratus ribu rupiah) sehingga total setoran modal para pemegang saham pertanggal 24 Juni 2014 adalah sebesar Rp. 606.033.000.000,- (enam ratus enam milyar tiga puluh tiga juta rupiah). Selain itu, rapat juga menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui dan mengesahkan tambahan modal disetor yang masuk sesudah RUPS ini sampai RUPS yang akan datang menjadi modal disetor PT. Bank Sulselbar.

Seluruh keputusan tersebut telah dibuat aktenya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH, Notaris di Makassar dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Sulselbar Nomor 12 Tanggal 24 Juni 2014 serta telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum milik Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU.03877.40.21.2014 Tanggal 08 Juli 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

1.2 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pada tahun 2014, Bank Sulselbar menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Januari 2014 dan Juni 2014. Adapun agenda dari RUPS LB tersebut adalah :

1.0.1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Bulan Januari 2014

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2014, di Clarion Hotel and Convention, ruangan Jasmine Hall, dengan tingkat kehadiran pemegang saham sebanyak 100% (seratus persen) atau 568.933 (Lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Atas dasar itu rapat berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam rapat.

Adapun agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah agenda tunggal yaitu **"Pemilihan Calon Anggota Direksi PT. Bank Sulselbar yaitu Direktur Utama dan Direktur Umum."**

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah :

1. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 12 mengenai sebab berakhirnya jabatan anggota Direksi, huruf D, Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS, dan Rapat dengan ini menyetujui dan memberhentikan dengan hormat :

- **Drs. Ellong Tjandra**, sebagai **Direktur Utama Perseroan** masa jabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
- **Haji Yanuarfachruddin SE.MM.** sebagai **Direktur Umum Perseroan** masa jabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Dan mengenai pemberhentian tersebut masing-masing telah diterima seluruh penyelesaian dan pertanggungjawabannya ***(acquit et de charge)*** dalam masa jabatannya.

2. Rapat Umum Pemegang Saham secara bulat menyetujui 2 (dua) orang nama untuk jabatan **calon Direktur Utama,** yaitu :

   - **Ir.Drs. Andi Muhammad Rahmat, MM**; dan
   - **Drs. Ellong Tjandra**.

   Dan untuk Jabatan **calon Direktur Umum,** yaitu :

   - **Haji Ambo Samsuddin,** dan
   - **Supardi Nadjamuddin, SE,AK**

   Yang telah disebutkan diatas diajukan untuk dilakukan *Fit and Propert Test* ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

   Calon yang memperoleh nilai hasil tertinggi dalam *Fit and Propert Test,* masing-masing akan menjabat Direktur Utama dan Direktur Umum, dan Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan harus dianggap telah diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, guna memenuhi Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

   Apabila kedua calon untuk masing-masing jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum tidak lulus *Fit and Propert Test,* maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya hasil *Fit and Propert Test* tersebut harus segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kembali.

3. Sehubungan dengan kosongnya jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum, rapat juga menyetujui dan mengangkat :

   - **Drs. Ellong Tjandra** sebagai **Pelaksana Tugas Sementara (PLTS) Direktur Utama,** sampai dengan adanya surat persetujuan hasil *Fit and Propert Test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- **Ir.Drs. Andi Muhammad Rahmat, SE** sebagai **Pelaksanan tugas Sementara (PLTS) Direktur Umum** merangkap **Direktur Pemasaran,** sampai dengan adanya Surat Persetujuan hasi *Fit and Propert Test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seluruh Persetujuan hasil Rapat Umum Luar Biasa pada bulan Januari ini telah dibuatkan Aktanya oleh Rakhmawati Laica Marzuki, Notaris di Makassar, dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sulselbar Nomor 21 Tanggal 17 Januari 2014.

1.0.2. **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bulan Juni 2014**

Pada tanggal 24 Juni 2014 di Clarion *Hotel and Convention*, Bank Sulselbar menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk kedua kalinya pada tahun 2014. Tingkat kehadiran pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kali ini sebanyak 97.8 % (sembilan puluh tujuh koma delapan persen) atau 556.393 (lima ratus lima puluh enam tiga ratus sembilan puluh tiga) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bulan Juni 2014 tersebut, mengagendakan, yaitu :

1. Pengangkatan dan Penetapan Direktur Utama dan Direktur Umum berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat.
2. Penyampaian atas berakhirnya masa tugas 2 (dua) orang Komisaris.
3. Pengajuan nama calon Komisaris untuk diajukan mengikuti uji kelayakan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Penyegaran kepengurusan Direksi yang tersisa.
5. Optimalisasi 8 (delapan) indikator Kinerja Direksi.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan, yaitu:

1. **Pengangkatan dan Penetapan Direktur Utama dan Direktur Umum berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat.**

   Bahwa memperhatikan :

a. Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masing-masing Nomor S-33/KR-6/2014 tanggal 28-5-2014 Perihal Penyampaian Keputusan atas Pencalonan Direksi Bank Saudara.

b. Hasil uji Kompetensi *(Assessment Test)* atas calon Direktur Utama dan Direktur Umum, serta

c. Arahan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, maka ditetapkan masing-masing nama Direktur Utama dan Direktur Umum PT. Bank Sulselbar Periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 untuk mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu :

   1) **Ir.Drs. Andi Muhammad Rahmat MM,** sebagai **Direktur Utama PT. Bank Sulselbar.**
   2) **Haji Ambo Samsuddin,** sebagai **Direktur Umum PT. Bank Sulselbar.**

Maka dengan memperhatikan hal tersebut diatas, kemudian ***rapat dengan suara bulat menyetujui pengangkatan dan penetapan***

1) **Ir.Drs. Andi Muhammad Rahmat MM,** sebagai **Direktur Utama PT. Bank Sulselbar** untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dan pengangkatannya terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ini ditutup.

2) **Haji Ambo Samsuddin,** sebagai **Direktur Umum PT. Bank Sulselbar** untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dan pengangkatannya terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ini ditutup.

Memberhentikan dengan Hormat,

1) **Drs. Ellong Tjandra**, sebagai **Direktur Utama** Perseroan masa jabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
2) **Haji Yanuarfachrudin, SE, MM.** Sebagai **Direktur Umum** Perseroan masa jabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
3) Dan mengenai pemberhentian tersebut telah diterima seluruh penyelesaian dan pertanggungjawab *(acquiet de charge)* dalam masa jabatan tersebut.

Selanjutnya untuk tidak terjadi kekosongan jabatan Direktur Pemasaran Perseroan, dengan diangkatnya Direktur Pemasaran sebagai Direktur Utama, maka rapat juga menyetujui **Ir. Drs. Andi Muhammad Rahmat,**

MM, ditetapkan sebagai **Pelaksana Tugas Sementara (PLTS) Direktur Pemasaran** sampai dengan calon Direktur Pemasaran yang terpili mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan hasil *fit and proper test* dan melaksanakan tugas secara efektif setelah ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berikutnya. Pemimpin Rapat kemudian menyampaikan bahwa calon Direktur Umum yang tidak terpilih, yaitu : **Supardi Nadjamuddin SE, AK.** Dapat mendaftar sebagai calon Direktur Pemasaran bersama pendaftar lain untuk mengikuti proses administrasi, dengan pertimbangan masih dalam batas kadaluarsa *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. **Penyampaian atas berakhirnya masa tugas 2 (dua) orang Komisaris.**

   Menunjuk Pasal 15 ayat 10 anggaran dasar perseroan mengenai sebab berakhirnya jabatan Anggota Dewan Komisaris, huruf d, yaitu "Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS", rapat dengan ini menyetujui dan memberhentikan dengan hormat :

   1) **Haji Andi Muallim, SH, Msi** sebagai **Komisaris Utama** Perseroan masa jabatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
   2) **Haji Drs. Andi Tjoneng Mallombasang, Msi** sebagai **Komisaris Independen** Perseroan masa jabatan tahun 2010 sampai dengan 2014.
   3) dan mengenai pemberhentian tersebut telah diterima seluruh penyelesaian dan pertanggungjawaban *(acquiet de charge)* dengan masa jabatan tersebut.

3. **Pengajuan nama calon Komisaris untuk diajukan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

   Rapat menyetujui mengenai pengajuan nama calon dilaksanakan dengan cara yaitu setiap calon dari para pemegang saham bilamana ada dipersilakan mendaftar untuk mengikuti proses administrasi dan direkomendir oleh pemegang saham dan bertugas secara efektif setelah adanya hasil *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diangkan dalam RUPS selanjutnya.

   Untuk tidak terjadi kekosongan jabatan Komisaris Utama dan satu jabatan Komisaris Independen serta menjamin efektifitas fungsi dan tugas Dewan Komisaris maka untuk sementara waktu, Rapat memutuskan sebagai berikut :

1) **Haji Andi Muallim, SH, Msi,** sebagai **Pelaksana Tugas Sementara (PLTS) Komisaris Utama** sampai dengan calon **Komisaris Utama** yang terpilih mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan hasil *fit and propert test* dan melaksanakan tugas secara efektif setelah ditetapkan pada RUPS LB berikutnya.

2) **Haji Drs. Andi Tjoneng Mallombasang Msi,** sebagai **Pelaksana Tugas Sementara (PLTS) Komisaris Independen** yang terpilih mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan hasil *Fit and Propert Test* dan melaksanakan tugas secara efektif setelah ditetapkan RUPS LB berikutnya.

4. **Penyegaran Kepengurusan Direksi yang Tersisa.**

Sesuai arahan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan selaku pemegang saham pengendali perseroan dikemukakan bahwa untuk kepengurusan Direksi yang ada sekarang perlu dilakukan penyegaran agar perseroan ke depan lebih maju dan berdaya saing dengan Bank-Bank di tingkat Nasional, dan untuk itu kepada jajaran Dewan Komisaris agar segera melakukan langkah-langkah persiapan penyegaran atas Direksi yang tersisa.

Untuk itu dibacakan kembali oleh Ketua Rapat bahwa kepada Direksi yang tersisa sekarang, yaitu **Drs. Haji Harris Saleng,** sebagai **Direktur Kepatuhan** terhitung mulai Rapat Umum Pemegang Saham hari ini diberhentikan dengan hormat dan disarankan kepada yang bersangkutan **untuk mengikuti penyegaran** melalui proses pencalonan Direktur Pemasaran yang dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris Perseroan.

Dan kemudian **Rapat pada saat ini tidak menyetujui agenda tersebut diatas.**

5. **Optimalisasi 8 (delapan) Indikator Kinerja Direksi**

Dalam rapat tersebut, Ketua Rapat membacakan Optimalisasi 8 (delapan) Indikator Kinerja Direksi, yaitu :

1) Strategi peningkatan TKB (Tingkat Kesehatan Bank) dari Komposit 3 (tiga) menjadi Komposit 2 (dua), dicapai pada bulan Juni tahun 2015. Strategi disusun dalam bentuk *action plan* yang terukur oleh masing-masing unit satuan kerja.

2) Strategi pengembalian *(Recovery)* asset Bank terhadap kredit hapus buku *(Ekstrakomtabel)* hingga kurang dari 5% (lima persen) dicapai pada

bulan Juni tahun 2015, Total Ekstrakomtabel Rp. 162.800.000.000,- (Seratus enam puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah) (Posisi bulan Desember tahun 2013). Strategi disusun dalam bentuk action plan yang terukur untuk masing-masing kantor cabang.

3) Strategi peningkatan efisiensi Bank melalui pembentukan komite efisiensi, menyusun *action plan* berupa sistem dan kebijakan efisiensi pada masing-masing unit satuan kerja. Efisiensi biaya-biaya operasional sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen). Strategi dicapai pada bulan Juni tahun 2015.

4) Strategi penurunan kerugian akibat praktek kecurangan/fraud di Bank (strategi *zero fraud)*. Adanya action plan pengembalian *(Recovery)* dana-dana Bank akibat praktek *fraud* yang dilakukan oleh keterlibatan internal pegawai, total kerugian *fraud* sebesar Rp. 9.800.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) (periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013), strategi dicapai pada bulan Juni tahun 2015.

5) Strategi penurunan biaya-biaya denda/sanksi dari Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Pajak *(strategi Zero Tolerance)*. *Action Plan* berupa penyusunan pedoman perusahaan atas pengenaan tanggungjawab kepada unit satuan kerja akibat timbulnya denda/ sanksi, perbaikan fungsi kepatuhan bagi Sumber Daya Manusia/SDM Bank. Total denda/sanksi periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 telah mencapai Rp. 2.700.000.000,- (Dua Milyar Tujuh ratus Juta Rupiah). Stategi penurunan dicapai pada bulan Juni tahun 2015.

6) Strategi pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) mencakup perbaikan sistem dan kebijakan manajemen SDM (Sumber Daya Manusia), *action plan* percepatan perbaikan sistem dan kebijakan manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) sekurang-kurangnya meliputi : Implementasi sistem penilaian kinerja berbasis *Key Performance Indicator (KPI),* dan *Balance Score card (BS),* sistem Rekruitmen dan Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) secara Transparan dan Akuntabilitas Tinggi melalui Uji Kompetensi: Phisikotes, Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kesehatan dilaksanakan oleh pihak ketiga independen berpengalaman nasional melakukan rekruitmen Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan keuangan, strategi dicapai pada bulan Juni tahun 2015.

7) Strategi optimalisasi struktur organisasi group Sumber Daya Manusia

(SDM) yang semula berada pada supervisi Direktur Kepatuhan, dialihkan kepada supervisi Direktur Utama. Pengalihan supervisi dilakukan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015.

8) Strategi peningkatan kreatifitas dan persentase pangsa pasar perbankan se-Sulselbar terhadap dana pihak ketiga (DPK) Non Pemerintah Daerah dan Kredit Produktif bagi usaha kecil dan mikro (UKM). Adanya *action plan* yang terukur sekurang-kurangnya berupa komitmen dan target untuk masing-masing kantor cabang dan sebagai bagian dari penilaian kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan persentase pangsa pasar dana pihak ketiga (DPK) dan usaha kecil dan mikro (UKM) sedikitnya 5% (lima persen) dari kondisi saat ini. Stategi dicapai pada bulan Juni tahun 2015.

Dan kemudian Rapat memutuskan agar optimalisasi 8 (delapan) Indikator kinerja Direksi **dibacakan kembali** pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya dengan dihadiri oleh Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini telah dibuatkan Aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Nomor 13 Tanggal 24 Juni 2014 dan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-19313.40.22.2014 Tanggal 14 Juli 2014.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.

2.1. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar terdiri dari 4 (empat) orang dan jumlah tersebut adalah sama dengan jumlah anggota Direksi PT. Bank Sulselbar. Adapun susunan dari anggota Dewan Komisaris tersebut adalah 1 (satu) anggota Dewan Komisaris merupakan utusan dari Pemegang saham dan 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris adalah Pihak Independent. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 51% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independent.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar berdomisili di tempat kedudukan

perseroan dan merupakan Warga Negara Indonesia serta Dewan Komisaris ini dipimpin oleh Komisaris Utama yang merupakan Komisaris Utusan dari Pemegang Saham terbesar yaitu Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar sebelum menjalankan tugasnya telah lulus *fit and proper test* dan memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia) dan dipilih oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa setelah memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Adapun Susunan Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar per 31 Desember 2014, sebagai berikut :

1) Haji Andi Muallim SH, Msi sebagai Pelaksana Tugas Sementara Komisaris Utama.
2) Haji Drs. Andi Tjoneng Mallombassang, Msi sebagai Pelaksana Tugas Sementara Anggota Dewan Komisaris Independent.
3) Professor Muhammad Amri, Doctors of Phylosophy, sebagai Komisaris Independent.
4) Drs. Natali Ikawidjaja, MM, sebagai Komisaris Independent.

Penyebab adanya Pelaksana tugas sementara Komisaris Utama dan Komisaris Independent disebabkan karena telah berakhirnya periode jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Independent tersebut dan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa belum memilih penggantinya.

2.2. Independensi Dewan Komisaris

Berdasarkan atas Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, maka seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Tidak termasuk merangkap jabatan apabila anggota Komisaris Independent merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama. Adapun anggota Komisaris Independent Bank Sulselbar yang merangkap pada 2 (dua) Komite adalah Professor Muhammad Amri, Doctors of Phylosophy, namun yang bersangkutan hanya menjabat sebagai Ketua pada Komite Audit namun pada Komite lainnya sebagai anggota yaitu pada Komite Remunerasi dan Nominasi.

2.3. Tugas dan TanggungJawab Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris melakukan secara independen dalam artian dilaksanakan secara obyektif dan bebas dari tekananan dan kepentingan pihak manapun. Anggota Dewan Komisaris yang terpilih juga memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Adapun tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris antara lain adalah :

1) Dewan Komisaris memastikan terselenggarakanya pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;

2) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi;

3) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;

4) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali terhadap keputusan-keputusan yang mewajibkan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan atau perundang-undangan yang berlaku;

5) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi Perseroan telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Group Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia;

6) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independent;

7) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota untuk 3 (tiga) Komite tersebut telah dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan yang terakhir bernomor yaitu :

   a) Komite Audit, SK Direksi No. SK/072/DIR/VIII/2014 Tanggal Agustus 2014;
   b) Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud, SK Direksi No. 071/DIR/VII/2014 Tanggal Agustus 2013; dan
   c) Komite Remunerasi dan Nominasi, SK Direksi No. SK/033/DIR/IV/2014 Tanggal 1 April 2014.

   Direksi membuat Surat Keputusan Pengangkatan tersebut berdasarkan

Keputusan rapat Dewan Komisaris yaitu :

- Surat Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Nomor No.068/DK-BPDSS/04/2014 Tanggal 1 April 2014 Perihal Penetapan Ketua dan Anggota Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulselbar.
- Surat Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Nomor 160/DK-BPDSS/07/2014 Tanggal 23 Juli 2014 Perihal Pergantian Susunan Keanggotaan Komite Pada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.

8) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif;

9) Dewan Komisaris Perseroaan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, waktu kerja dan rapat; dan

10) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal.

2.4. Kewenangan Dewan Komisaris

Kewenangan Dewan Komisaris Bank Sulselbar diatur dalam anggaran dasar Bank Sulselbar yang merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Perseroan terakhir. Adapun kewenangan dari Dewan Komisaris Bank Sulselbar adalah :

1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi;

2) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

4) Dewan Komisaris berhak untuk memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UU Perseroan Terbatas (UUPT)

5) Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 Ayat 2 UUPT.

6) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang

diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

7) Dalam menjalankan tugas pengawasan Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang anggotanya semua atau lebih adalah Dewan Komisaris yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

8) Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Perseroan. Mengenai hal-hal yang belum diatur pada Pasal ini diatur pada Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121 UU Perseroan Terbatas.

2.5. Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Sulselbar telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat. Namun, pedoman tersebut hingga saat ini belum pernah dilakukan pengkinian.

2.6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2014 antara lain :

1) Persetujuan pencatatan data kerugian (LED) Risiko Operasional, buku pedoman perusahaan kebijakan dan prosedur penerapan ICAAP, Pembiayaan sindikasi PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS) kepada PT. Amanah Finance Di Jakarta belum dapat disetujui, dan Persetujuan Pedoman Hapus Buku dan Hapus Tagih PT. Bank Sulselbar.
2) Komitmen Bank terhadap hasil pemeriksaan Umum PT. Bank Sulselbar tahun 2013 (Posisi Juni 2013).
3) Persetujuan *Corporate Plan PT. Bank Sulselbar Tahun 2014-2018.*
4) Tindaklanjut Study banding pada Bank Jatim dan LPPI Jakarta
5) Tindak lanjut hasil pertemuan dengan Dewan Komisaris .
6) Penjelasan atas sanksi/denda tahun 2013.
7) Pembentukan *Card Center* dan Kartu ATM/Debit.
8) Amanah RUPS tahunan 2013 dan RUPS LB 2014 tentang 8 (delapan) Indikator Kinerja Direksi sebagai Faktor Keberhasilan *(critical success factors (CSF)*.
9) Duplikasi Komponen Tunjangan Dalam sistem penggajian Pegawai PT. Bank Sulselbar.
10) Saran dan Tindak lanjut atas SOP Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Sulselbar.

2.7. Rapat Dewan Komisaris.

Untuk tahun 2014, Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

Nama	Rapat Dewan Komisaris	
	Jumlah Kehadiran	% Presentase
H. Andi Muallim	10	100 %
H.A. Tjoneng Mallombasang	10	100 %
H. Natali Ikawidjaja	10	100 %
Muhammad Amri	8	80 %

2.8. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat-rapat yang dilaksanakan Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2014 adalah sebanyak 3 (tiga) kali, dengan pembahasan, yaitu :

1) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pemimpin Grup yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2014, membahas tentang :

   a. Penjelasan Surat OJK Regional 6 No. S-9/KR.611/2014 tanggal 20 Januari 2014;
   b. Penjelasan Surat OJK Regional 6, masing-masing No. S-1/KR.6/2014 tanggal 21 Januari 2014 dan No. S/KR.6/2014 Tanggal 25 Februari 2014;
   c. Penjelasan atas Progress KAP Husni, Mucharam & Rasidi
   d. Lain-lain :
      a) Surat Direksi No.SR/074/R/GPS/I/2014 Tanggal 20 Januari 2014 Perihal Usul Ekstrakomtabel debitur Cabang.
      b) Surat Direksi No.SR/002/R/I/2014 tanggal 07 Januari 2014 Perihal Laporan Kecurangan Bank Sulselbar Cabang Bantaeng.
      c) Surat BPR HASAMITRA No.009/MKSBPR.HM/0114 tanggal 10 Januari 2014.
      d) Surat SEKAWAN No. 04/SK-BSSB/II/2014 tanggal 4 Februari 2014

2) Rapat Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2014, yang membahas tentang :

a. Penjelasan atas *Corporate Plan* PT. Bank Sulselbar Tahun 2014-2018 yang telah dilaporkan ke OJK.
b. Persiapan materi RUPS Tahunan Tahun Buku 2013.
c. Penjelasan atas hasil pemeriksaan OJK semester II Tahun 2013 yang diindikasikan *Fraud.*
d. Perkembangan penyelesaian kredit macet pada Cabang Pasangkayu.

3) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2014, yang membahas tentang :

a. Pembahasan Surat Direksi tentang Klarifikasi atas tindaklanjut hasil pengawasan OJK.
b. Permohonan persetujuan anggaran audit kinerja fungsi audit intern.
c. Permohonan persetujuan revisi perhitungan masa kerja proporsional kepada Pegawai.
d. Usulan pengembangan Departemen pada Grup SDM
e. Pelaksanaan Amanah RUPS tahunan tanggal 25 Juni 2013 dan RUPS tanggal 24 Juni 2014, yaitu Efisiensi minimal 15% (lima belas persen) dan pembentukan komite efisiensi.
f. Pelaksanaan Amanah RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juni 2014, yaitu pengalihan supervisi grup SDM dari Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama.
g. Pembahasan Draft SOP Restrukturisasi;
   a) Pembiayaan Konvensional
   b) Pembiayaan Unit Usaha Syariah
h. Persiapan Pembahasan RBB tahun 2015.

2.9. Pelatihan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Judul Pelatihan	Penyelenggara
H. Andi Tjoneng Mallombasang	Komisaris Independent	Workshop Best Practice Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	RMI
H. Andi Tjoneng Mallombasang	Komisaris Independent	Seminar Nasional BPDSI	ASBANDA

Nama	Jabatan	Judul Pelatihan	Penyelenggara
Natali Ikawidjaja	Komisaris Independent	Workshop Penyusunan Laporan Dewan Komisaris yang Komprehensif dan efektif.	ASBANDA
Natali Ikawidjaja	Komisaris Independent	Roundtable Discussion Implementasi Basel III	OJK
Natali Ikawidjaja	Komisaris Independent	Seminar Penerapan Peraturan OJK Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Khususnya yang terkait dengan perbankan	OJK
Natali Ikawidjaja	Komisaris Independent	Workshop Performance Coaching: Leader in Action	
Natali Ikawidjaja	Komisaris Independent	Human Capital Planning Towards ASEAN Economic Community 2015	
Muhammad Amri	Komisaris Independent	Pemuktahiran Teknik Investigasi Fraud berdasarkan Best Practice	RMG
Muhammad Amri	Komisaris Independent	Penyusunan Laporan Dewan Komisaris Yang Komprehensif dan Efektif	ASBANDA
Muhammad Amri	Komisaris Independent	Sistem Remunerasi dan Nominasi yang Komprehensif, Identifikasi dan Implementasi Sistem Remunerasi Bank di Indonesia	RMG

Nama	Jabatan	Judul Pelatihan	Penyelenggara
Muhammad Amri	Komisaris Independent	Workshop Kupas Tuntas Factor Self Assesment GCG sebagai elemen penting dalam penetapan Peringkat Komposisi GCG.	RMG
Muhammad Amri	Komisaris Independent	Seminar Nasional BPD SI	ASBANDA

2.10. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
H. Andi Muallim	Plts. Komisaris Utama	2014
H. A. Tjoneng Mallombasang	Plts. Komisaris Independent	2014
H. Natali Ikawidjaja	Komisaris Independent	2012-2015
Prof. Muhammad Amri	Komisaris Independent	2014-2017

Untuk masa jabatan bagi H. Andi Muallim dan H.A. Tjoneng Mallombasang, masing-masing sebagai Plts. Komisaris Utama dan Plts Komisaris Independent dimulai dan diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Akta Nomor 13 Tanggal 24 Juni 2014.

2.11. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham 5 % (lima persen) atau lebih pada Bank Sulselbar maupun pada perusahaan lainnya.

2.12. Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Antara Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai hubungan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan. Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa 5 (lima) prinsip GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran telah dilaksanakan oleh Direksi serta memberikan nasihat dan bimbingan.

3. KOMITE-KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

3.1. Komite Audit

3.0.1. Struktur, keanggotaan, keahlian dan Independensi anggota Komite Audit

Struktur Komite Audit yang berada pada PT. Bank Sulselbar terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu Komisaris dari Pihak Independen pada PT. Bank Sulselbar dan masing-masing Pihak Independen yang ahli dibidang Hukum dan bidang Keuangan.

Komite ini diketuai oleh anggota Dewan Komisaris dan keseluruh anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Susunan nama-nama yang menjadi anggota Komite Audit, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/072/DIR/VIII/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit PT. Bank Sulselbar adalah :

a. Muhammad Amri sebagai Ketua Komite Audit
b. M. Natsir Kadir sebagai anggota Independent Komite Audit
c. Aristo A. Awusy sebagai anggota Independent Komite Audit.

Surat Keputusan Direksi pengangkatan anggota Komite Audit merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris Bank Sulselbar sebagaimana Surat Dewan Komisaris Nomor 160/DK-BPDSS/07/2014 tanggal 23 Juli 2014 Tentang Pergantian Susunan Keanggotaan Komite pada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.

Aristo A. Awusy merupakan anggota Independent Komite Audit baru yang menggantikan As'ad Makarau, dimana sebelumnya Aristo A. Awusy adalah anggota Komite Pemantau Risiko.

Pihak Independen pada anggota Komite Audit PT. Bank Sulselbar tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent.

Salah satu anggota Komite yang berasal dari pihak independen yaitu M. Natsir Kadir merangkap jabatan sebagai anggota Komite pada salah satu Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Semen Tonasa yang berkedudukan di Pangkep Sulawesi Selatan. Dalam rangkap jabatan tersebut telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaaan tugas dan tanggungjawab.

Selain itu, terdapat anggota Komite yang berasal dari mantan Pejabat Eksekutif

yang berasal dari PT. Bank Sulselbar yang tidak melakukan fungsi pengawasan yaitu Aristo A. Awusy. Namun yang bersangkutan telah menjalani masa tunggu *(Cooling Off)* selama 6 (enam) bulan sebagaimana ditetapkan oleh PBI tentang GCG.

3.0.2. Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

Sesuai dengan PBI 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, khususnya Pasal 43 Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit dan Peraturan OJK Nomor : IX.i.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Audit adalah :

1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

   a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
   b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
   c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akutansi yang berlaku;
   d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akutan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Penerapan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/DK-BPDSS/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite-Komite yang ada pada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.

3.0.3. Rapat Komite Audit

Pada tahun 2014, Komite Audit telah melaksanakan Rapat sebanyak 14 (empat) belas kali, yaitu :

a. Rapat Intern Khusus Komite Audit sebanyak 2 (dua) kali.
b. Rapat dengan KAP Husni, Mucharam & Rasidi sebanyak 2 (dua) kali.
c. Rapat dengan Dekom, KPR dan KRN (semua Komite) sebanyak 9 (sembilan) kali.
d. Rapat dengan DEKOM, KPR dan GAI sebanyak 1 (satu) kali.

Rapat-rapat Komite Audit telah didokumentasikan dengan baik dan selama rapat yang dilaksanakan Komite Audit tidak terdapat *dissenting opinions.*

3.0.4. Laporan Kinerja Komite Audit

Dalam kurung waktu tahun 2014, hal-hal yang telah dilakukan oleh Komite Audit adalah :

a. Evaluasi atas realisasi PKAT (Program Kerja Audit Tahunan)

Untuk rencana audit tahun 2014, Grup Audit Intern (GAI) telah menyusun program kerja Audit Tahunan (PKAT) tahun 2014 yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Sesuai dengan PKAT tersebut, dalam tahun 2014 GAI merencanakan untuk melakukan audit pada 30 (tiga puluh) objek pemeriksaan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) Cabang Konvensional, 3 (tiga) cabang Syariah dan 1 (satu) Kantor Pusat.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, realisasi pelaksanaan Audit GAI sesuai dengan LHP Umum yang telah diterima Dewan Komisaris adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) objek pemeriksaan (obrik) atau 86,67 % dari PKAT.

Terhadap realisasi pelaksanaan audit pada 26 (dua puluh enam) obrik tersebut, dilaporkan bahwa 19 (sembilan belas) cabang (73,07 %) realisasi pelaksanaan auditnya sesuai dengan jadwal dalam PKAT, 4 (empat) cabang (15,38%) mendahului PKAT, 3 (tiga) cabang (11,54%) baik yang mendahului PKAT maupun yang terlambat dilakukan Audit, dalam laporan GAI tidak mengungkapkan alasannya dan penyebabnya.

b. Evaluasi atas LHP GAI

Dalam tahun 2014 Dewan Komisaris telah menerima LHP Umum dan GAI sebanyak 26 (dua puluh enam) laporan dan 1 (satu) LHP Khusus.

Hasil evaluasi atas LHP tersebut berikut rekomendasi dari Komite Audit telah disampaikan kepada Komisaris Utama dalam bentuk Memorandum dari Komite Audit.

3.0.5. Memorandum Komite Audit

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Inpenden **"HUSNI, MUHARRAM DAN RASIDI"** untuk melakukan Audit Laporan Keuangan dan Audit Kinerja Perseroan 2014.

b. Secara Umum LHP GAI belum sepenuhnya disusun sesuai dengan SPFAIB dan Audit charter. Hal-hal yang belum sesuai tersebut antara lain :

a) Ruang lingkup Pemeriksaan GAI

Group Audit Intern (GAI) tidak memasukkan dalam ruang lingkup pemeriksaannya dan laporannya:

- Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan struktur pengendalian intern
- Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern (Audit Charter hal 5 dan 6, SPFAIB hal 21).

Dengan tidak dimasukkanya kedua hal tersebut dalam ruang lingkup pemeriksaan dan dalam LHP mengakibatkan tidak ada informasi tentang kondisi sistem pengendalian intern pada cabang yang diaudit

b) Temuan audit yang diungkap dalam laporan belum memuat secara lengkap mengenai fakta (kondisi) yang terjadi, belum diungkapkan keadaan yang seharusnya (Kriteria), sebab dan akibat (audit charter halaman 40, 41 dan 45, SPFAIB halaman 28)

c) Tidak ada tanggapan Auditee (audit Charter halaman 46, SPFAIB halaman 31), karena tidak ada tanggapan auditee maka tidak dapat diketahui komentar/tanggapan auditee, apakah setuju atau tidak setuju dengan temuan dimaksud.

d) Semua temuan-temuan GAI dalam Pemeriksaan Umum hanya direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan, GAI tidak merekomendasikan pemberian sanksi meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap SIP atau ketentuan yang berlaku.

c. *Risk Based Audit*

Dalam laporan hasil audit umum GAI telah memasukkan mengenai *Risk Based*

Audit. Risk Based Audit yang diungkapkan GAI dalam laporannya menurut Komite Audit, hal tersebut baru merupakan laporan hasil pemetaan Risiko *(risk profil)* bukan Audit berbasis risiko, sebagaimana yang dimaksud temuan hasil pemeriksaan BI posisi per 30 Juni 2007 dan 2008. Menurut Komite Audit, *Risk Based Audit* adalah audit yang berdasarkan pada hasil pemetaan risiko yang dihasilkan oleh *Risk Manajemen Unit*. Dari hasil pemetaan risiko tersebut maka GAI melakukan audit berdasarkan tingkat risiko tertinggi *(high risk)* pada masing-masing cabang/grup.

d. LHP Khusus GAI

Hasil evaluasi atas LHP-LHP khusus berikut rekomendasi dari Komite Audit telah disampaikan kepada Komisaris Utama dalam bentuk memorandum dari Komite Audit. Dalam Laporan khusus tersebut GAI belum mengungkapkan modus operansi dari pelaku.

3.2. Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud*

3.0.1. Struktur, keanggotaan, keahlian dan Independensi anggota Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud*

Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* pada PT. Bank Sulselbar terdiri atas seorang Komisaris Independent dan 2 (dua) orang dari pihak independent yang masing-masing ahli pada bidang keuangan dan manajemen risiko. Adapun susunan nama-nama dari Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 071/DIR/VIII/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud PT. Bank Sulselbar adalah :

a. H. Natali Ikawidjaja, anggota Dewan Komisaris dari Pihak Independent sebagai Ketua.
b. H. Muslimin Abbas, Pihak Independent pada Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud.*
c. As'ad Makarau, Pihak Independent pada Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud.*

Susunan nama-nama anggota Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* sebelum diputuskan oleh Direksi telah memperoleh rekomendasi Dewan Komisaris dengan surat nomor 160/DK-BPDSS/07/2014 tanggal 23 Juli 2014 Perihal Pergantian Susunan Keanggotaan Komite pada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar. Disamping itu, As'ad Makarau sebelumnya merupakan anggota Komite Audit yang menggantikan Aristo A . Awusy yang pindah ke Komite Audit.

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun bank lain. Selain itu, tidak ada anggota Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* yang rangkap jabatan pada Komite lainnya baik pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain.

Pihak Independen pada anggota Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* PT. Bank Sulselbar tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent.

3.0.2. Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit dan *Anti Fraud*

Berdasarkan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, komite pemantau risiko paling kurang melakukan :

a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Untuk mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia tersebut dengan baik, maka tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Sulsel No. 002/DK-BPDSS/XI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite-Komite pada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Surat Keputusan dimaksud lebih rinci mengatur tentang uraian tugas komite yakni :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
3. Memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi pada ayat 1 dan 2 diatas, kepada Dewan Komisaris.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.0.3. **Rapat Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud***

Rapat-rapat yang dilakukan oleh Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* meliputi rapat intern Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* untuk membahas dan mengevaluasi permasalahan tertentu yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud*. Selain itu, Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* selama tahun 2014 juga melakukan rapat dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, Group Treasury dan Group Teknologi Informasi.

Seluruh hasil/kesimpulan rapat, baik rapat intern maupun rapat dengan Group/ Satuan mitra Komite Pemantau Risiko yang strategis telah dibuatkan rekomendasi dalam bentuk surat/memorandum kepada Dewan Komisaris serta didokumentasikan dengan baik.

Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* selama tahun 2014 telah melakukan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali.

3.0.4. **Rekomendasi Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud***

Dalam tahun 2014, Komite Pemantau Risiko dan *Anti Fraud* telah mengeluarkan Rekomendasi sebanyak 43 (empat puluh tiga) rekomendasi, antara lain :

1. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris selama ini diberikan berupa pemberian uang pengabdian kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta uang penghargaan kepada Direksi. Dalam rapat disepakati bahwa kebijakan remunerasi tersebut dihapus/ditiadakan dan selanjutnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris hanya diberikan uang penghargaan.

2. Uang penghargaan kepada Direksi maupun Komisaris diberikan/dibayarkan pada saat yang bersangkutan mengakhiri tugasnya selama 1 (satu) periode dan seterusnya dan tidak terpilih/diperpanjang lagi.

3. Masa jabatan Direksi dan Komisaris (pengurus bank) satu periode selama 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu periode lagi tanpa menghilangkan hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Pedoman penetapan *risk appetite* dan *risk limit* PT. Bank Sulselbar merupakan pedoman bagi semua unit kerja dan telah dilakukan sosialisasi dan implementasi secara bertahap kepada Pemimpin Grup, tetapi masih mendapatkan kendala pada Grup Pemasaran dan Grup Treasury PT. Bank Sulselbar.

5. Terhadap limit risio pemberian kredit kepada pihak terkait disarankan agar lebih rendah/kecil dari pihak yang tidak terkait.

6. Disarankan agar selain menghitung nilai rasio dari *Risk Appetite* juga harus menghitung nilai nominal sebagai *check and balance* karena hal tersebut dapat menyebabkan *connective error* bagi Bank.

7. Terhadap risk limit kredit konsumtif disarankan agar dilakukan review sehingga risk limitnya menjadi 0 bukan 0,2. Hal ini bertujuan untuk menghindari pegawai melakukan kesalahan dalam pemberian kredit dan disarankan agar setiap pegawai ditetapkan *job description* secara jelas, selain tugas pokok harus menambahkan tugas tambahan sehingga dapat menimbulkan *sense of belonging* karyawan terhadap Bank.

8. Sistem operasional prosedur penanganan dugaan tindak pidana perbankan, diperluas menjadi sistem operasional prosedur penanganan dugaan tipikor pada PT. Bank Sulselbar sehingga bila terdapat kalimat Tipibank diubah menjadi Tipikor pada PT. Bank Sulselbar. Pertimbangan ini memperhatikan bahwa aset Bank merupakan bagian dari aset pemerintah/negara yang dipisahkan.

9. Pegawai/pejabat yang terindikasi tindakan fraud khususnya baik dalam hal pemberian kredit maupun penyalahgunaan keuangan disarankan dalam jangka waktu tertentu *(cooling off)* tidak boleh ditempatkan pada tempat/posisi yang identik/terkait langsung dengan posisi sebelumnya yang berhubungan dengan risiko kredit dan operasional.

10. Perlunya dilakukan pencatatan terhadap rekam jejak *(track record)* bagi pelaku fraud dalam sistem administrasi SDM (Sumber Daya Manusia) yaitu pada *Curriculum Vitae* agar kedepannya penempatan yang bersangkutan tidak dibolehkan pada posisi yang dapat menimbulkan kembali terjadinya *Fraud.*

11. Pentingnya pembuatan SOP bank tentang *Know Your Employee*, dimana pedoman ini dimaksudkan sebagai proses pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan yang mencakup karakter, perilaku/gaya hidup karyawan, praktek bisnis sampingan dan sebagainya.

12. SOP Restrukturisasi sebaiknya diperluas dan terintegrasi menjadi SOP penyelamatan Pembiayaan bermasalah.

13. Tahapan restrukturisasi sebainya melalui tahapan sebelumnya, yaitu *rescheduling, reconditioning* dan akhirnya proses *restructuring.*

14. Harus dipastikan tidak ada benturan kepentingan antara SDM/Komite Pembiayaan dan Debitur.

15. Perlunya dibahas pada Bab tersendiri tentang implementasi benturan

kepentingan dengan jelas pada anggota tim/komite kredit sehingga tidak multitafsir.

3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

1.1.1. Struktur, keanggotaan, keahlian dan Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

PT. Bank Sulselbar telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi serta tidak terpisah antara remunerasi dan nominasi. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada PT. Bank Sulselbar terdiri atas 6 (enam) anggota Komite, dimana Komite ini diketuai oleh Komisaris Independent, Komisaris dan pejabat eksekutif yang berasal dari Group Sumber Daya Manusia yaitu Pemimpin Group serta 3 (tiga) anggota komite berasal dari pihak Independent dari Bank.

Susunan nama-nama dari Komite Remunerasi dan Nominasi ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/033/DIR/IV/2014 Tanggal 1 April 2014 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Nomor 068/DK-BPDSS/04/2014 Tanggal 1 April 2014, adalah :

1. H.A. Tjoneng Mallombasang sebagai Ketua (Plts Komisaris Independent);
2. H.A. Muallim, sebagai Anggota (Plts Komisaris Utama);
3. Muhammad Amri sebagai Anggota (Komisaris Independent);
4. Hj. Sulaeha Achmad sebagai Anggota (Pihak Independent);
5. H. A. Syahriwijaya sebagai Anggota (Pihak Independent);
6. Pemimpin Group Sumber Daya Manusia, sebagai anggota.

Rangkap jabatan pada Komite ini adalah Muhammad Amri yang juga merupakan Ketua Komite Audit dan Anti *Fraud* PT. Bank Sulselbar, namun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance,* hal ini tidak dilarang dikarenakan masih pada Bank yang sama yaitu PT. Bank Sulselbar.

Pihak Independent pada Komite ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independent.

Selain itu, Pihak Independent yang berasal dari mantan Pejabat eksekutif yang berasal dari Bank telah menjalani masa tunggu *(cooling off)* selama 6 (enam) bulan.

1.1.2. Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar, adalah:

1. Terkait dengan Kebijakan remunerasi :
   1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
   2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
      - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
      - Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
2. Terkait dengan Kebijakan Nominasi
   1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
   2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
   3) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
3. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
   1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   2) Prestasi kerja individual.
   3) Kewajaran dengan *peer group.*
   4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.

1.1.3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2014 telah melakukan rapat baik intern atau melibatkan pihak Direksi atau Group yang berada pada PT. Bank Sulselbar. Jumlah rapat yang diselenggarakan pada tahun 2014 oleh Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebanyak 14 (empat belas) kali.

Seluruh hasil/kesimpulan rapat berupa notulen rapat telah disampaikan/dilaporkan kepada Komisaris Utama melalui memorandum dari Komite Remunerasi dan

Nominasi serta didokumentasikan secara baik.

1.1.4. **Memorandum Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi telah membuat beberapa memorandum antara lain, :

1. Memorandum upaya transformasi pengelolaan SDM PT. Bank Sulselbar.
2. Memorandum Pembayaran Uang Penghargaan Direksi
3. Memorandum tentang calon Direktur Pemasaran sehubungan dengan pengangkatan Direktur Pemasaran menjadi Direktur Utama PT. Bank Sulselbar.
4. Memorandum persyaratan calon Direktur Pemasaran PT. Bank Sulselbar.
5. Memorandum untuk mengumumkan calon Direktur Pemasaran PT. Bank Sulselbar.
6. Memorandum tentang penjaringan/seleksi terhadap permohonan yang masuk untuk menjadi Direktur Pemasaran PT. Bank Sulselbar.
7. Memorandum terkait seleksi bakal calon Direktur Pemasaran PT. Bank Sulselbar.
8. Memorandum mengenai kerjasama dengan pihak luar dalam pelaksanaan seleksi bakal calon Direktur Pemasaran.
9. Memorandum perihal persyaratan calon komisaris.
10. Membuat surat kepada Bupati/Walikota se Sulselbar selaku pemegang saham PT. Bank Sulselbar melalui Komisaris Utama Perihal Penyampaian calon Komisaris Independen PT. Bank Sulselbar.

3. Direksi

4.1. Komposisi dan Kriteria Direksi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa Direksi bertanggungjawab atas pengelolaan perseroan. Direksi diwajibkan untuk menjunjung tinggi penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam semua kegiatan usaha disetiap tingkatan organisasi dan menindaklanjuti setiap temuan maupun rekomendasi baik yang berasal dari intern bank maupun ekstren.

Pada tahun 2013 terdapat 3 (tiga) Direksi Bank Sulselbar yang telah berakhir masa jabatannya, yaitu Direktur Utama yang dijabat oleh Ellong Tjandra dan Direktur Umum yang dijabat oleh H. Yannuar Fachruddin serta H. Harris Salleng sebagai Direktur Kepatuhan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Juli 2013, H. Harris Saleng terpilih kembali untuk menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, namun untuk jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum diberhentikan pada bulan Januari 2014 oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Pemilihan untuk Direktur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan pada tahun 2014, tepatnya pada tanggal 17 Januari, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Adapun keputusan RUPS LB tersebut adalah :

1. Memberhentikan dengan hormat, Ellong Tjandra sebagai Direktur Utama Perseroan dan H. Yanuarfachruddin sebagai Direktur Umum Perseroan. Atas pemberhentian tersebut, diterima seluruh penyelesaian dan pertanggungjawabannya ***(acquit et de charge)*** dalam masa jabatan tersebut.

2. RUPS LB secara bulat menyetujui 2 (dua) nama untuk jabatan **calon Direktur Utama**, yaitu :

   - Andi Muhammad Rahmat dan
   - Ellong Tjandra

   Dan untuk jabatan **calon Direktur Umum**, yaitu :

   - Haji. Ambo Samsuddin dan
   - Supardi Nadjamuddin

   Seluruh nama calon Direktur Utama dan Direktur Umum tersebut diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan *fit and propert test*.

   Calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam *fit and propert test* dari Otoritas Jasa Keuangan, masing-masing akan menjabat Direktur Utama dan Direktur Umum, dan Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan harus dianggap telah diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa ini, guna memenuhi Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

   Apabila kedua calon untuk masing-masing jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum tidak lulus *fit and propert test,* maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya hasil *fit and propert test* tersebut harus segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kembali.

3. Sehubungan dengan kosongnya jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum, rapat menyetujui dan mengangkat :

   - Ellong Tjandra sebagai Pelaksana Tugas Sementara (PLTS) Direktur Utama, sampai dengan adanya surat persetujuan hasil *fit and propert test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

   - Andi Muhammad Rahmat sebagai Pelaksana tugas sementara (PLTS) Direktur Umum merangkap Direktur Pemasaran, sampai dengan adanya surat

Persetujuan hasil *fit and propert test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seluruh persetujuan RUPS LB tersebut telah dibuatkan Aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH, Notaris di Makassar, Nomor 21 Tanggal 17 Januari 2014.

Seluruh anggota Direksi yang terpilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa merupakan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulselbar.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tgl 24 Juni 2014, setelah melalui *fit and Propert Test* Otoritas Jasa Keuangan terpilihlah Andi Muhammad Rahmat sebagai Direktur Utama dan Ambo Samsuddin sebagai Direktur Umum PT. Bank Sulselbar serta RUPS LB juga menetapkan Andi Muhammad Rahmat sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direktur Pemasaran. Keputusan ini telah dituangkan dalam Akte Notaris Nomor 13 Tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH, Notaris di Makassar.

Berdasarkan anggaran dasar perseroan PT. Bank Sulselbar, Direksi terdiri atas 4 (empat) orang, yaitu Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan. Namun terdapat 1 (Satu) jabatan Direktur yang kosong dan dipimpin oleh seorang Pelaksana tugas sementara, yaitu jabatan Direktur Pemasaran. Adapun susunan Direksi PT. Bank Sulselbar per Desember 2014 adalah :

1.	Direktur Utama	H. Andi Muhammad Rahmat
2.	Direktur Umum	H. Ambo Samsuddin
3.	Plts Direktur Pemasaran	H. Andi Muhammad Rahmat
4.	Direktur Kepatuhan	H. Harris Saleng

Seluruh anggota Direksi PT. Bank Sulselbar berdomisili pada tempat kedudukan perseroan yaitu Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Direksi PT. Bank Sulselbar berasal dari intern PT. Bank Sulselbar sendiri dan telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif bagian Operasional yaitu sebagai Pemimpin Cabang dan seluruhnya juga telah lulus tes sertifikasi manajemen risiko .

4.2. Independensi Direksi

Seluruh Direksi PT. Bank Sulselbar tidak ada yang merangkap sebagai Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada Bank, Perusahaan dan atau lembaga lainnya. Direksi PT. Bank Sulselbar baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham mencapai 5% (lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain atau PT. Bank Sulselbar termasuk *shares option*. Antara para anggota Direksi PT. Bank Sulselbar tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Direktur Utama PT. Bank Sulselbar berasal dari pihak yang independent terhadap pemegang saham pengendali dalam artian tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga. Selain itu, seluruh anggota Direksi Bank Sulselbar telah lulus *fit and Propert test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia.

Anggota Direksi PT. Bank Sulselbar memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Disamping itu, anggota Direksi PT. Bank Sulselbar juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini dibuktikan oleh Direksi PT. Bank Sulselbar dimana dengan tidak digunakannya penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali bagi proyek yang bersifat khusus dan telah dibuatkan kontrak kerja yang jelas dalam hal lingkup kerja, tanggungjawab, jangka waktu penyelesaian dan biaya serta konsultan yang dilibatkan merupakan konsultan yang independent dan kualifikasinya khusus untuk proyek tersebut.

Anggota Direksi PT. Bank Sulselbar tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Kuasa yang diberikan Direksi kepada Pihak Intern PT. Bank Sulselbar adalah Kuasa Khusus sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan intern PT. Bank Sulselbar.

4.3. Tugas Dan Tanggungjawab Direksi

PT. Bank Sulselbar telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah diperbaharui sebagaimana diputuskan melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor SK/106/DIR/VIII/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Direksi bertanggungjawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Adapun tugas pokok Direksi tersebut adalah :

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan guna kepentingan perseroan;
3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi

audit internal perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal atau pemeriksa eksternal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.

4. Menciptakan sarana dan prasarana serta menjamin terlaksananya fungsi kepatuhan pada setiap struktur organisasi dan kegiatan bank guna terciptanya budaya kepatuhan sehinggga menjadi bank yang menjalankan usahanya berdasarkan kepada *Good Corporate Governance.*

5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan terdapat tindakan-tindakan tertentu berdasarkan anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu :

   1) Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
      - Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas maksimum pemberian Kredit Bank Umum
      - Yang melebih jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

   2) Memberikan jaminan atau penanggungan hutang *(borgtocht);*
      - Guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
      - Guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

   3) Membeli atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.

   4) Mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambahkan pernyertaan modal, kecuali :

- Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham perseroan atau ;
- Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit.

Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Meminjam uang yang tidak termasuk dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

6) Mengalihkan atau melepaskan hak tagih perseroan yang telah dihapusbukukan baik untuk sebagian ataupun seluruhnya yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.

6. Untuk tindakan-tindakan salah satu berikut ini :

   1) Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau

   2) Menjadikan jaminan hutang yang berjumlah melebihi dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan antara satu dengan lainnya; atau

   3) Mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang tentang kepailitan Perseroan atau permohonan agar Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang *(surseance van betaling);*

   Direksi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang dihadiri oleh para Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang bersangkutan.

7. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi itu memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka Perseroan wajib diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam

anggaran dasar perseroan. Jika kesemua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut Dewan Komisaris Perseroan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.

8. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Jika Direktur Utama tidak atau belum diangkat atau berhalangan, atau tidak ada ditempat (mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lainnya), maka Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

9. Tanpa mengurangi tanggungjawab Direksi, untuk perbuatan tertentu Direksi berhak untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam Surat Kuasa Khusus.

10. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi, yaitu :

    a. Direksi wajib :

        a) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan lapangan usahanya.
        b) Menyiapkan rencana pengembangan perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris.
        c) Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi perseroan;
        d) Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
        e) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan anggaran dasar perseroan atau berdasarkan petunjuk rapat Dewan Komisaris atau RUPS;
        f) Melakukan supervisi terhadap satuan kerja yang merupakan satuan kerja supervisinya.

    b. Direksi berhak dan berwenang :

        a) Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus perseroan;

        b) Mengatur ketentuan tentang kepegawaian perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai perseroan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada);

c) Mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan;

d) Mengatur dan penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain;

e) Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Tugas-tugas Direksi lainnya adalah sebagai berikut :

a) Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi perseroan.

b) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Grup Audit Internal Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

c) Membentuk Grup Audit Internal, Grup Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Grup Kepatuhan.

d) Menyampaikan *Corporate Plan* yang memuat rencana bisnis bank kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum batas akhir yang telah ditetapkan.

e) Menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa.

f) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai surat keputusan dan edaran-edaran yang dapat diakses seluruh karyawan serta melalui perjanjian kerja bersama (PKB), kebijakan mengenai sistem *recruitment,* sistem promosi, sistem remunerasi. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh karyawan.

g) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

h) Mengangkat anggota komite-komite penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

i) Menyelenggarakan RUPS tahunan dan/atau RUPS lainnya/Luar biasa sesuai kebutuhan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

j) Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan perseroan selama 1 (satu) tahun kepada RUPS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.

k) Menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan instransi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

l) Mengadakan dan menyimpan Daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, Dokumen keuangan perseroan, dokumen perseroan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disimpan ditempat kedudukan perseroan serta menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai petunjuk rapat dewan komisaris atau RUPS.

m) Mereview visi dan misi perseroan pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya apabila dianggap perlu.

n) Melaporkan kepada perseroan setiap transaksi saham yang dimilikinya baik saham perseroan maupun bukan, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal transaksi.

o) Apabila dipandang perlu, Direksi dapat membentuk komite-komite penunjang Direksi/eksekutif untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

p) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

q) Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan anggaran dasar perseroan serta pedoman dan tata tertib Direksi Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

4.4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi *(Board Charter)*

Pedoman dan tata tertib Direksi PT. Bank Sulselbar telah dilakukan pengkinian/revisi pada bulan Agustus 2014. Dalam pedoman ini diatur antara lain mengenai Tugas dan Tanggungjawab Direksi, Tugas-Tugas Khusus Direktur berdasarkan Supervisinya, Aspek Transparansi dan larangan bagi Direksi.

4.5. Rapat Direksi

Direksi menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyarawah mufakat.

Tahun 2014, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali, dengan tingkat kehadiran Direksi dalam rapat tersebut sebagai berikut :

Nama & Jabatan	Jumlah Kehadiran	% Presentase
Ellong Tjandra Plts Direktur Utama	16	41%
H. Yanuar Fachruddin Direktur Umum	0	0%
H. A.M. Rahmat Alimuddin Direktur Utama dan Plts Direktur Pemasaran	39	100%
H. Ambo Samsuddin Direktur Umum	23	58%
H. Harris Saleng Direktur Kepatuhan	39	100%

Keterangan :

Bapak Ellong Tjandra menjabat sebagai Plts Direktur Utama dimulai dari bulan Januari hingga Juni 2014, H. YannuarFachruddin diberhentikan pada bulan Januari 2014, H.A.M.

Rahmat Alimuddin menjabat sebagai Direktur Utama dan Plts Direktur Pemasaran semenjak bulan Juni 2014, serta H. Ambo Samsuddin pada bulan Februari 2014.

Seluruh rapat tersebut telah dibuatkan risalah rapat termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* yang terjadi dalam rapat Direksi dan hasil risalah rapat tersebut disimpan oleh Group SDM PT. Bank Sulselbar. Pada tahun 2014 terdapat 1 (satu) *dissenting opinions* yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan.

4.6. Remunerasi dan Fasilitas Lain Direksi dan Dewan Komisarisa

Remunerasi dan Fasilitas Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sementara untuk Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham Mayoritas. Kedua hal tersebut merupakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan RUPS tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. Jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2014, adalah : (satuan orang)

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lain	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN			
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
	ORANG	RUPIAH	ORANG	RUPIAH
Remunerasi gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilits lainnya dalam bentuk non natura	4	9.503.222.951	5	18.637.857.734
Fasilitas lainnya dalam bentuk natura (Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb yang:		233.604.000		389.215.000
• Dapat dimiliki	-		-	
• Tidak dimiliki	4		5	

* Dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun *	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 Milyar	4 orang	3 orang
Di atas Rp 1 Milyar s/d Rp 2 Milyar	1 orang	1 orang
Di atas Rp. 500 juta s/d Rp 1 Milyar	Nihil	Nihil
Rp. 500 Juta ke bawah	Nihil	Nihil

* Yang diterima secara tunai

4.6.1. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah antara Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan

Keterangan	Tertinggi	Terendah	Rasio
Dewan Komisaris	52.642.668	50.010.535	1.05
Direksi	75.203.812	67.683.840	1.11
Pegawai	29.365.763	3.759.840	7.81

4.6.2. Rasio Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi

Keterangan	Direksi	Pegawai	Rasio
GAJI	75.203.812	29.365.763	2.5

4.7. Komite-Komite Dibawah Direksi

Surat Keputusan Direksi yang mengatur Komite-Komite Dibawah Direksi, pada tahun 2014 telah dilakukan pengkinian. Pengkinian ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dan *Good Corporate Governance (GCG)* serta membantu Direksi

dalam menetapkan dan mengeksekusi kebijakan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor SK/110/DIR/IX/2014 Tentang Organisasi Komite Dalam Penerapan Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. Bank Sulselbar, maka komite yang dibentuk dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direksi, yaitu : Komite Manajemen Risiko, yang terdiri dari beberapa sub Komite, yaitu :

a. Komite Manajemen Risiko Kredit
b. *Asset & Liability Management Committee (ALCO)*
c. Komite Manajemen Risiko Operasional
d. Komite Manajemen Risiko Teknologi Informasi
e. Komite Manajemen Sumber Daya Manusia
f. Komite Manajemen Efisiensi
g. Komite Manajemen Strategik
h. Komite Kode Etik

Komite yang dibentuk untuk membantu tugas Komite Manajemen Risiko dan atau sub Komite Manajemen Risiko adalah

a. *Staff Supporting Group Asset & Liability Committee (SSG-ALCO)*
b. *Staff Supporting Group* Komite Manajemen SDM (SSG-KSDM)

4.0.1. Komite Manajemen Risiko

a. Anggota Komite Manajemen Risiko terdiri atas :
    1. Direktur Utama selaku Ketua
    2. Direktur Kepatuhan selaku Ketua Pengganti I
    3. Direktur Pemasaran selaku Ketua Pengganti II
    4. Direktur Umum selaku Ketua Pengganti III
    5. Pemimpin Group Manajemen Risiko selaku Sekretaris
    6. Pemimpin Group Kepatuhan
    7. Pemimpin Group Pengendalian Keuangan
    8. Pemimpin Group Audit
    9. Pemimpin Group Pemasaran
    10. Pemimpin Group Treasury

b. Tugas & Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko secara umum diatur sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko bank dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

4.0.2. Komite Manajemen Risiko Kredit

a. Anggota Komite Manajemen Risiko Kredit, terdiri dari :
   1. Direktur Utama selaku Ketua
   2. Direktur Pemasaran selaku Ketua Pengganti I
   3. Direktur Kepatuhan
   4. Pemimpin Group Pemasaran selaku sekretaris
   5. Pemimpin Group Unit Usaha Syariah
   6. Pemimpin Group Manajemen Risiko
   7. Pemimpin Group Kepatuhan

Anggota tidak tetap Komite Manajemen Risiko Kredit terdiri atas :

1. Pemimpin Group Pengendalian Keuangan
2. Pemimpin Group Teknologi Informasi
3. Pemimpin Group Treasury

b. Tugas dan Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko Kredit

Secara garis besar, tugas dan tanggungjawab Komite Manajemen Risiko kredit adalah :

1. Penyusunan kebijakan manajemen risiko kredit serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko Kredit, tingkat Risiko Kredit yang diambil dan toleransi risiko kredit, kerangka manajemen risiko kredit serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.

2. Penyempurnaan proses manajemen risiko kredit secara berkala maupun bersifat insindentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko kredit, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko Kredit berdasarkan hasil evaluasi.

3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan kredit yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi kredit yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan poisis/eksposur risiko kredit yang melampaui limit yang telah ditetapkan

4.0.3. ***Asset & Liability Committee (ALCO)***

a. Keanggotaan *ALCO*

1. Direktur Utama selaku Ketua
2. Direktur Pemasaran selaku Ketua Pengganti I
3. Direktur Kepatuhan
4. Pemimpin Group Treasury selaku sekretaris
5. Pemimpin Group Manajemen Risiko
6. Pemimpin Group Kepatuhan
7. Pemimpin Group Pemasaran
8. Pemimpin Group Unit Usaha Syariah
9. Pemimpin Group Perencanaan
10. Pemimpin Group Pengendalian Keuangan
11. Pemimpin Group Teknologi Informasi
12. Anggota tidak tetap Komite ALCO terdiri dari pada Pemimpin Group yang tidak termasuk anggota tetap.

b. Tugas dan Tanggung Jawab *Asset & Liability Committee (ALCO)*

Adapun gambaran umum tugas dan tanggungjawab *Asset Liability Committee (ALCO)* adalah :

1. Penyusunan kebijakan *ALMA* serta perubahannya, termasuk strategi, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko likuiditas & pasar kredit serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses *Asset & Liability Management (ALMA)* secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko pasar & Likuiditas, dan tidak efektifnya penerapan pasar & likuiditas berdasarkan hasil evaluasi.
3. Menetapkan strategi dan kebijakan pengendalian *Asset & Liability Management (ALMA).*
4. Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan perbankan.
5. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan eksposure *Asset & Liability Management (ALMA).*
6. Melihat prakiraan & Proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga/imbal hasil nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
7. Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada :
    1) Risiko likuiditas *(liquidity management)*
    2) Risiko suku bunga *(Gap Management)*
    3) Risiko Valuta Asing *(Foreign Exchange Management)*
    4) Risiko portolio *(Earnings & Investment Management)*
    5) Risiko konsentrasi *(Contentration Risk)*
    6) Risiko imbal hasil untuk Unit Usaha Syariah
    7) Risiko Investasi untuk Unit Usaha Syariah.
8. Meneview dan menetapkan suku baunga dan menetapkan suku bunga kredit/margin/fee dan bunga/imbal hasil dana dan *risk premium.*
9. Menetapkan batas *(limit) secondary reserve serta instrumennya.*

10. Menetapkan batas (limit) GAP serta instrumennya.
11. Menetapkan batas (limit) kredit serta penyebarannya.
12. Menetapkan harga transfer dana internal *(Internal funds transfer rate)* atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang bank.
13. Meninjau kembali performance dan posisi *Asset & Liability Management (ALMA)* keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO terhadap tujuan bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi.
14. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan Bank.

4.0.4. *Staff Supporting Grup Asset & Liability Committee (SSG-ALCO)*

1. Pada *staff supporting Group Asset & Liability Committee* terdiri atas 2 (dua), yaitu :

   1) Anggota Tetap *SSG-ALCO*
      i. Pemimpin Group Treasury selaku Ketua
      ii. Pemimpin Group Pengendalian Keuangan selaku Ketua Pengganti
      iii. Pemimpin Group Pemasaran
      iv. Pemimpin Group Perencanaan
      v. Pemimpin Group Teknologi Informasi
      vi. Pemimpin Departemen ALMA selaku sekretaris
      vii. Pemimpin Departemen Anggaran
      viii. Pemimpin Group Unit Usaha Syariah

   2) Anggota tidak tetap SSG-ALCO
      a. Pemimpin Departemen Pengembangan Bisnis & Jaringan
      b. Pemimpin Departemen pada Grup Pengendalian Keuangan
      c. Pemimpin Departemen Operasional pada Grup Teknologi informasi
      d. Pemimpin Departemen pada Grup Perencanaan
      e. Pemimpin Departemen pada Grup Pemasaran
      f. Pemimpin Departemen pada Grup Unit Usaha Syariah.

2. Tugas & Tanggungjawab Staff Supporting Asset & Liability Committee SSG-ALCO

   a. Tugas dan tanggungjawab staff supporting Asset & Liability Committee (SSG-ALCO) adalah menyiapkan data, menganalisa, dan memberi rekomendasi kepada *Asset & Liability Management (ALCO)* dalam rangka membantu keputusan ALCO.

   b. Tugas tersebut meliputi namun tidak terbatas pada :

      a) Membantu meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan perbankan.

      b) Membantu meninjaui kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan eksposure *Asset & Liability Management (ALM).*

      c) Membantu melihat prakiraan & proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga/imbal hasil/nisbah, nilai tukar dan valuta asing untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.

      d) Membantu menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada :

         i. Risiko likuiditas *(Liquidity Risk)*
         ii. Risiko suku bunga *(Interest Rate Risk)*
         iii. Risiko Portfolio *(Earnings and Investment Risk)*
         iv. Risiko Konsentrasi *(Concentration Risk)*
         v. Risiko Imbal hasil pada Unit Usaha Syariah
         vi. Risiko Investasi pada Unit Usaha Syariah

      e) Membantu mereview suku bunga pinjaman/margin/fee dan bunga/imbal hasil dana.

      f) Membantu menetapkan batas (limit) *secondary reserve* serta instrumennya.

      g) Membantu menetapkan batas (limit) gap serta instrumennya.

      h) Membantu menetapkan batas (limit) pinjaman serta penyebarannya.

      i) Membantu menetapkan harga transfer dana internal *(internal Funds Transfer Rate)* atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan *Asset & Liability* antar cabang bank.

j) Membantu meninjau kembali performance dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALM terhadap tujuan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun tujuan terhadap kepatuhan regulasi.

k) Membantu mengadakan penyesuauan strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALM dan tujuan bank.

4.0.5. Komite Manajemen Risiko Operasional

a. Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Operasional terdiri dari

a) Direktur Utama selaku Ketua
b) Direktur Umum selaku Ketua Pengganti I
c) Direktur Kepatuhan
d) Pemimpin Group Manajemen Risiko selaku sekretaris
e) Pemimpin Group Audit Intern
f) Pemimpin Grup Kepatuhan
g) Pemimpin Grup Teknologi Informasi
h) Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia
i) Pemimpin Unit Anti Fraud (UAF)
j) Anggota tidak tetap Komite Manajemen Risiko Operasional terdiri dari Pemimpin Group yang tidak termasuk sebagai anggota tetap.

b. Tugas & Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko Operasional

a) Penyusunan kebijakan manajemen risiko operasional serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko operasional, limit/tingkat risiko operasional yang diambil dan toleransi risiko operasional, kerangak manajemen risiko operasional serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal

b) Penyempurnaan proses manajemen risiko operasional secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi profil risiko operasional dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko operasional berdasarkan hasil evaluasi.

c) Penetapan kebijakan dan/atau keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.

4.0.6. Komite Manajemen Sumber Daya Manusia

a. Keanggotaan Komite Manajemen Sumber Daya Manusia terdiri dari

a) Direktur Utama selaku Ketua
b) Direktur Kepatuhan selaku Ketua Pengganti I
c) Direktur Pemasaran
d) Direktur Umum
e) Pemimpin Grup SDM (Sekretaris)
f) Pemimpin Grup Audit (Narasumber)
g) Pemimpin Group SDM & Pemimpin Group Audit Intern dalam Komite Manajemen Kepegawaian adalah tanpa hak suara.
h) Kehadiran dalam rapat pemimpin Grup SDM & Pemimpin Group Audit ditujukan untuk memberikan informasi-informasi kepada para Direktur

b. Tugas & Tanggungjawab Komite Manajemen Sumber Daya Manusia secara umum diatur sebagai berikut :

a) Menetapkan kebijakan kepegawaian
b) Mengevaluasi kebijakan kepegawaian
c) Memonitor pelaksannaan kebijakan oleh Group SDM.

4.0.7. *Staff Supporting Grup Komite Manajemen Sumber Daya Manusia (SSG KMSDM)*

a. Keanggotaan *Staff Supporting group* Komite Manajemen Sumber Daya Manusia, terdiri atas :

a) Pemimpin Group SDM selaku Ketua
b) Pemimpin Group Audit selaku Ketua Pengganti
c) Pemimpin Grup Kepatuhan
d) Pemimpin Grup Pengendalian Keuangan
e) Pemimpin Group Manajemen Risiko
f) Pemimpin Group Perencanaan
g) Anggota tidak tetap staff supporting Group Komite Manajemen Sumber Daya Manusia (SSG-KMSDM) terdiri dari seluruh pemimping Departemen (disesuaikan dengan relevansi pembahasan rapat)

b. Tugas & Tanggungjawab dari SSG-KMSDM adalah

- Merumuskan dan merekomendasi kebijakan-kebijakan sumber daya manusia kepada Direksi

4.0.8. Komite Pengarah Teknologi Informasi

a. Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi, terdiri atas :

a) Direktur Utama selaku Ketua
b) Direktur Umum selaku Ketua Pengganti I
c) Direktur Pemasaran
d) Direktur Kepatuhan
e) Pemimpin Group Teknologi Informasi selaku Sekretaris
f) Pemimpin Group Manajemen Risiko
g) Pemimpin Group Perencanaan
h) Pemimpin Group Treasury
i) Pemimpin Group Pemasaran
j) Pemimpin Group Umum
k) Anggota tidak tetap Komte Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari Pemimpin Group yang tidak termasuk sebagai anggota tetap

b. Tugas dan tanggungjawab Komite Pengarah Teknologi Informasi secara umum diatur sebagai berikut :

a) Menyusun rencana strategis Ti (Information Technology Strategic Plan) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank dengan mempertimbangkan :

i. Faktor efisiensi dan efektifitas

ii. Rencana pelaksanaan (road-map) untuk mencapai kebutuhan Ti yang mendukung strategi bisnis bank. Road map terdiri dari kondisi saat ini *(current state)*, kondisi yang ingin dicapai *(future state)* serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai future state

iii. Sumber daya yang dibutuhkan;

iv. Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan

b) Menetapkan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank

c) Mengevaluasi kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritital (bertampak signifikan terhadap kegiatan

operasional bank) misalnya pergantian *core banking application,* server production dan topologi jaringan.

d) Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek *(project charter)* yang disepakati dalam service level agreement.

e) Mengevaluasi kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha bank.

f) Mengevaluasi efektivitas langkah-langka minimalisasi risiko atas investasi bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank.

g) Melakukan pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI

h) Mengupayakan penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite dapat memfasilitasikan hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.

i) Mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang memiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

4.0.9. Komite Efisiensi

a. Keanggotaan Komite Efisiensi terdiri dari:

a) Direktur Utama selaku Ketua
b) Direktur Umum selaku Ketua Pengganti
c) Direktur Kepatuhan
d) Pemimpin Pengendalian keuangan selaku sekretaris
e) Pemimpin Group Umum
f) Pemimpin Group Manajemen Risiko
g) Anggota tidak tetap Komite Efisiensi terdiri dari Pemimpin Grup yang tidak termasuk sebagai anggota tetap
h) Komponen biaya yang termasuk dalam cakupan tugas dan

tanggungjawab komite adalah biaya tidak termasuk biaya bunga dana pihak ketiga, biaya penyisihan aktiva dan biaya tenaga kerja.

b. Tugas dan Tanggungjawab Komite Efisiensi

a) Tugas dan tanggungjawab Komite Efisiensi secara umum adalah menyusun dan menetapkan kebijakan dan stategi pengendalian biaya untuk meningkatkan efisiensi bank sebagai bagian dari proses manajemen risiko operasional.

b) Menyusun prosedur dan menetapkan limit & kewenangan serta sistem distribusi pengeluaran biaya dengan mempertimbangkan efektivitas kecukupan sistem pengendalian.

c) Melakukan evaluasi kinerja unit kerja dalam pengendalian biaya.

4.0.10. Komite Manajemen Risiko Strategik

a. Keanggotaan dari Komite Manajemen Risiko Strategik, adalah :

a) Direktur Utama selaku Ketua
b) Direktur Kepatuhan selaku Ketua Pengganti 1
c) Direktur Pemasaran
d) Direktur Umum
e) Pemimpin Group Perencanaan selaku sekretaris
f) Pemimpin Group Manajemen Risiko
g) Pemimpin Group Kepatuhan
h) Pemimpin Group Pengendalian Keuangan.
i) Pemimpin Grup Pemasaran
j) Pemimpin Group Treasury
k) Anggota tidak tetap Komite ini terdiri dari seluruh Pemimpin Group yang tidak termasuk anggota tetap.

b. Tugas & tanggungjawab Komite Manajemen Risiko Strategik, terdiri atas:

a) Menyusun dan atas persetujuan Dewan Komisaris menetapkan rencana strategis bank dalam bentuk rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah

b) Mengevaluasi pencapaian rencana strategis bank

c) Atas persetujuan Dewan Komisaris menetapkan produk dan aktivitas

baru yang akan diluncurkan.

4.0.11. Komite Kode Etik

a. Susunan dari Komite Kode Etik adalah :

a) Direktur Utama sebagai Ketua
b) Direktur Kepatuhan sebagai Anggota
c) Pemimpin Group Kepatuhan sebagai Sekretaris
d) Pemimpin Group Audit Intern sebagai Anggota
e) Pemimpin Group SDM sebagai Anggota

b. Tugas & Tanggungjawab dari Komite Etik adalah :

a) Meneliti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai PT. Bank Sulselbar
b) Mengumpulkan dan menganalisa informasi atau keterangan dari Pihak-Pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran kode etik.
c) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik
d) Menyatakan bahwa pelanggaran kode etik terbukti atau tidak terbukti.
e) Memberikan rekomendasi keputusan atas pernyataan dugaan pelanggaran Kode Etik kepada pejabat pemutus yang berwenang.
f) Menjadi ethic advisor dalam rangka edukasi, pencegahan dan penindakan pelanggaran kode etik.

4.0.12. Komite Kredit Korporasi dan Sindikasi

a. Susunan Organisasi Komite Kredit Korporasi & Sindikasi terdiri dari :

a) Pemimpin Group Unit Usaha Syariah selaku Ketua
b) Pemimpin Group Pemasaran selaku Wakil Ketua
c) Pemimpin Departemen Kredit pada Group Pemasaran
d) Pemimpin Group Treasury
e) Pemimpin Group Pengendalian Keuangan
f) Pemimpin Departemen Pembiayaan pada Group UUS
g) Kontrol unit pada Konvensional/Syariah

h) Dalam hal tertentu, Komite dapat menghadirkan narasumber sebagai berikut :

1. Pemimpin Grup Kepatuhan

2. Pemimpin Group Manajemen Risiko

b. Tugas dan Tanggungjawab Komite Kredit Korporasi & Sindikasi

a) Membantu Direksi dalam melakukan evaluasi kredit sindikasi dalam hal :

1. Mengorganisasikan proses-proses dalam tahapan kredit sindikasi termasuk memperoleh mandate dari debitur sebagai *manadated lead arranger.*
2. Negoisasi terkait *term & condition* dengan debitur.
3. Memperoleh data mengenai debitur atau proyek yang akan dibiayai.
4. Negoisasi besaran fee, bunga, margin atau yang dipersamakan dengan imbalan.
5. Memberikan usulan rencana kredit/pembiayaan sindikasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komite Kredit/Pembiayaan sindikasi kepada Direksi
6. Menunjuk kantor cabang yang akan menjadi pengelola kredit/ pembiayaan sindikasi
7. Hal-hal yang dianggap perlu sesuai tanggjawab arranger/ partisipan

b) Tugas dan tanggungjawab Komite terkait Kredit Korporasi adalah:

1. Memproses usulan kredit/pembiayaan korporasi yang diusulkan oleh bisnis terkait.
2. Limit kredit/pembiayaan yang diajukan adalah sebesar lebih dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
3. Mengorganisasikan proses-proses dalam tahapan kredit korporasi.
4. Negoisasi terkait *term & Condition* dengan debitur.
5. Memperoleh data mengenai debitur atau proyek yang akan dibiayai
6. Negosiasi besaran fee, bunga, margin atau yang dipersamakan dengan imbalan.
7. Memberikan usulan rencana kredit/pembiayaan korporasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komite Kredit/Pembiayaan Korporasi kepada Direksi.
8. Menunjukkan kantor cabang yang akan menjadi pengelola kredit/pembiayaan korporasi
9. Komite secara kolegial bertanggungjawab kepada Direksi atas

pelaksanaan tugasnya.

10. Hal-hal yang dianggap perlu

4.8. Pelatihan Direksi

Nama	Jabatan	Judul Pelatihan
H. Andi Muhammad Rahmat	Direktur Utama	Training Rencana Bisnis Bank
H. Ambo Samsuddin	Direktur Umum	Peningkatan pemahaman tentang Aktivitas Treasury
H. Ambo Samsuddin	Direktur Umum	Monitoring BPD Net Online dan Workshop Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sektor Perbankan
H. Ambo Samsuddin	Direktur Umum	Pengukuhan PIA angkatan XV dan Seminar Nasional
H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	Seminar Nasional pengawasan Industri jasa Keuangan terintegrasi
H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	Seminar FKDKP untuk level pengurus bank.
H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	Training rencana Bisnis Bank
H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	Seminar Human Capital Toward Asean Economic

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Mengenai Benturan Kepentingan, telah diatur dalam Kode Etik Pegawai PT. Bank Sulselbar. Kode etik ini berlaku bagi seluruh pegawai baik itu *outsourcing* maupun tetap, Direksi dan Dewan

Komisaris, dan sebagai bentuk ketersediaannya untuk mengikuti dan mentaati aturan tersebut, kesemuanya telah menandatangani Surat Pernyataan untuk patuh dan melaksanakan Kode Etik tersebut.

Nama dan Jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
		NIHIL		

Selama tahun 2014 tidak pernah terjadi benturan kepentingan terkait operasional bank, kebijakan yang dibuat Direksi maupun hal-hal lainnya. Ini dibuktiktan selama tahun 2014 tidak ada pelaporan benturan kepentingan yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan.

Penganganan benturan kepentingan masih dinyatakan kurang oleh Otoritas Jasa Keuangan**.** Kekurangan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya Standar Prosedur Operasional penanganan Benturan Kepentingan. Dimana Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan Bank untuk penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengingat setiap pengurus dan pegawai bank. Dan administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

6.1. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Sulselbar

Pengangkatan dan pemilihan Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulselbar, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia terutama Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia.

Hal ini dibuktikan terpilihnya Direktur Kepatuhan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan sebelum diajukan ke RUPS LB, para calon Direksi tersebut telah memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulselbar.

Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulselbar memsupervisi dari 2 (dua) group yaitu Group Kepatuhan dan Group Manajemen Risiko. Group Kepatuhan PT. Bank Sulselbar tidak terlibat dalam operasional Bank namun melakukan pemantauan dan pengawasan antara lain terhadap operasional Bank dan kebijakan Direksi.

Dalam stuktur organisasi Group Kepatuhan PT. Bank Sulselbar, terbagi atas 2 (dua) Departement yaitu Departement Hukum dan Kepatuhan dan Departemen Pengenalan Nasabah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan untuk 32 (tiga puluh dua cabang) dan 41 (empat puluh satu) kantor Kas dengan Total Asset diatas Rp. 10 (sepuluh) triliyun.

Namun terdapat kekurangan sumber daya manusia yang perlu ditindaklanjuti yaitu belum adanya pegawai yang secara khusus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan untuk Unit Usaha Syariah sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Direktur Kepatuhan terus mencanangkan kepada seluruh manajemen Bank dan Kantor Cabang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam melaksanakan aktivitas fungsional perbankan.

Berbagai tindakan dan langkah yang telah dilakukan mampu menciptakan budaya kepatuhan yang bisa direalisasikan pada setiap unit kerja PT. Bank Sulselbar sehingga keseragaman dalam pemahaman terhadap ketentuan internal dan eksternal dapat berjalan dengan baik.

Direktur kepatuhan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menciptakan budaya kepatuhan dan peningkatan kualitas penerapan fungsi kepatuhan, antara lain :

1. Melakukan pemantauan/monitoring atas profil dan transaksi nasabah
2. Menciptakan keselarasan antara kebijakan dan prosedur Bank dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Memberikan arahan dalam melakukan pengkinian buku pedoman / SOP internal Bank.
4. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan kepatuhan dalam rencana kerja tahunan dan rencana bisnis bank.
5. Bersama-sama dengan Grup Manajemen Risiko dalam mengelolah risiko kepatuhan.
6. Mensosialisasikan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia dan atau Otorias Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang terbaru kepada seluruh unit kerja di PT. Bank Sulselbar.
7. Serta memastikan kepatuhan bank atas komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

6.2. Indikator Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

PT. Bank Sulselbar setiap semester pada tahun 2014 menyampaikan laporan Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain laporan semesteran tersebut, Direktur Kepatuhan juga menyampaikan laporan Direktur Kepatuhan setiap triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar. Adapun indikator kepatuhan mencakup antara lain :

1. **Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)**

   Rasio KPMM atau CAR Bank Sulselbar untuk 5 (lima) tahun terakhir selalu diatas batas maksimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Adapun KPMM Bank Sulselbar selama 5 (lima) tahun terakhir adalah :

Rasio Per Desember	2014	2013	2012	2011	2010
Rasio KPMM / CAR (%)	24.83%	23.47%	21.90%	21.29%	21.11%

2. **Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**

   Peraturan yang mengatur Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 dan terakhir kali dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006. Pada peraturan tersebut diatur bahwa maksimum pemberian kredit/pembiayaan kepada pihak terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal dan maksimum pemberian kredit/pembiayaan kepada pihak tidak terkait untuk perindividu adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dan kelompok adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal.

   Selama 5 (lima) tahun berturut-turut Bank Sulselbar tidak melakukan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit tersebut.

3. ***Non Performing Loan (NPL)***

   Perkembangan *Non Performing Loan* untuk 5 (lima) tahun terakhir Bank Sulselbar adalah:

Rasio Per Desember	2014	2013	2012	2011	2010
NPL Gross (%)	0.86%	1.19%	1.39%	2.02%	2.02%

NPL Nett (%)	0.28%	0.39%	0.47%	1.78%	0.16%

4. **Posisi Devisa Netto**

Bank Sulselbar bukanlah merupakan Bank Devisa, sehingga PT. Bank Sulselbar tidak dapat dikenakan Peraturan Bank Indonesia mengenai Posisi Devisa Netto.

5. **Denda**

Pada tahun 2014, jumlah denda yang dikenakan telah menurun, yaitu sebesar Rp. 44.277.220,- (empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), dibandingkan pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.204.047.000,- (satu milyar Dua Ratus Empat Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pembagian untuk denda pajak adalah sebesar Rp. 38.826.708,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah), sementara denda dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar Rp. 54.505.13,- (Lima puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga belas rupiah).

6.3. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Salah satu fungsi yang melekat pada Group Kepatuhan adalah pelaksanaan Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selama tahun 2014 Bank Sulselbar telah melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU &PPT).

Pada tahun 2014, Bank Sulselbar telah melakukan pengembangan program Aplikasi AML yang telah diimplementasikan secara efektif pada tanggal 2 Januari 2014

Adapun sosiliasasi terkait APU & PPT kepada karyawan yang berada pada bagian operasional bank yang terdiri atas :

- Pelatihan dasar baik kepada karyawan baru.
- Pelatihan teknikal, diberikan kepada tim KYC local dan *Fronliners.*

Sementara, untuk aktivitas pelaporan dan tindak lanjut permintaan otoritas baik itu PPATK dan KPK adalah :

Aktivitas	Tahun 2014 (Laporan)
Melaporkan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) ≥ Rp. 500 Juta	367
Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR)	0.16%
Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening/ keuangan dari :	
• **PPATK**	1
• **KPK**	41

6. **Penerapan Fungsi Audit Intern**

Pelaksanaan fungsi audit intern ini dilaksanakan oleh Group Audit Intern (GAI). Group Audit Intern PT. Bank Sulselbar disupervisi oleh Direktur Utama, adapun Pimpinan Grup Audit Intern ini, Direksi terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Group Audit Intern PT. Bank Sulselbar dalam melakukan pemeriksaan berpedoman kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang juga merupakan panduan dalam melakukan audit inten. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank perlu dilakukan evaluasi, hal ini disebabkan semenjak standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dibuat belum pernah dikinikan.

Sumber Daya Manusia pada Group Audit Intern sebanyak 14 (empat) belas orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Pemimpin Grup, 4 (empat) orang Pemimpin Departement, 6 (enam) orang Senior Auditor, 2(dua) Orang Auditor Internal yang ditempatkan pada Cabang Utama dan 1 (satu) orang merupakan tenaga kontrak yang juga merupakan Senior Auditor dimana sebelumnya merupakan Pensiunan karyawan PT. Bank Sulselbar.

7.1. **Wewenang & Tanggungjawab Audit Intern**

Auditor intern harus diberikan wewenang, kedudukan dan tanggungjawab didalam organisasi sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar tugas yang dituntut oleh profesinya sebagai auditor intern bank.

1. **Internal Audit Charter (IAC)**

Internal Audit Charter memuat misi, wewenang dan tanggungjawab Grup Audit Intern (GAI) dirumuskan dalam suatu dokumen tertulis yang disetujui oleh Dewan Pengawas/

Komisaris yang disebut dengan internal audit charter yang memuat :

1.1 Kedudukan GAI.

1.2 Kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

1.3 Ruang lingkup kegiatan audit intern

1.4 Pernyataan bahwa Audit Intern tidak mempunyai wewenang atau tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari auditee.

Audit intern mempunyai wewenang untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta asset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit yang meliputi :

1. Melaksanakan pengkajian ulang dan penilaian terhadap kecukupan efektivitas serta kualitas struktur pengendalian intern dalam semua aktivitas usaha tanpa campur tangan, paksaan, ataupun izin dari manajemen.
2. Kemudahaan dalam mendapatkan semua catatan, informasi, berhubungan langsung dengan karyawan atau sumber-sumber lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan audit intern.
3. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, pendekatan dan frekuensi audit intern tanpa campur tangan dari manajemen.
4. Melaporkan kepada Direktur Utama yang tembusannya disampaikan kepada Komisaris Utama dan Direktur Kepatuhan atas hasil audit dan permasalahannya termasuk usaha yang menghambat kases kepada sumber-sumber daya bank ataupun campur tangan terhadap aktivitas audit intern baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi.

2. Wewenang dan Tanggungjawab Pemimpin Group Audit Intern (GAI)

a. Jabatan Pemimpin GAI harus menjaga independensi, memberikan perhatian yang cukup terhadap laporan hasil audit dan tindak lanjutnya.

b. Pemimpin GAI bertanggungjawab untuk merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur & mengarahkan audit serta mengevaluasi untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari bank akan dapat dicapai secara optimal.

c. Dalam hubungan ini Pemimpin (GAI) harus mempertanggungjawabkan kegiataannya secara berkala kepada Direktur Utama

3. Peran Group Audit Intern (GAI) sebagai Konsultan

Group Audit Intern (GAI) harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern bank yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya, antara lain :

a. Harus memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur untuk dapat memastikan bahwa dalam kebijakan ataupun sistem yang baru tersebut sudah dimasukkan aspek-aspek pengendalian intern sehingga didalam pelaksanaannya akan tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.

b. Dengan keterlibatannya GAI didalam mereview diatas tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai obyek audit.

4. Peran Group Audit Intern sebagai Katalis

GAI harus berusaha agar dapat berperan sebagai katalis bagi pihak-pihak intern bank yang membutuhkan terutama dalam hal mendorong dan menjembatani pihak auditee kepada pihak manajemen untuk menindaklanjuti setiap permasalahan yang mengalami hambatan didalam penyelesaian masalah.

7.2. Indepedensi Audit Intern dan Kualifikasi Profesi Audit Internal

Berdasarkan kepada Panduan Audit Intern dan Internal Audit Charter PT. Bank Sulselbar, indepedensi Audit Internal adalah sebagai berikut :

1) Group Audit Intern merupakan wakil resmi dari bank dalam hal melakukan audit dan penilaian terhadap kinerja sistem pengendalian manajemen untuk mencapai hasil yang optimal maka audit intern harus independent dari aktivitas yang diperiksanya.

2) Audit intern harus bekerja secara luwes dan independen sehingga mampu mengungkapkan pandangan & pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan bank.

Kualifikasi profesi audit internal Bank Sulselbar adalah

1) Latar belakang pendidikan

a) Memahami penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank (SPFAIB) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Norma Pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern BUMN/BUMD serta peraturan Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan Nomor 797/K/1985 tanggal 24 Desember 1985;

b) Memahami standar Akutansi Keuangan (PSAK) yang berlaku;

c) Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan;

d) Memahami prinsip-prinsip manajemen khususnya manajemen perbankan;

e) Memiliki pengetahuan mengenai Ilmu yang berkaitan dengan kegiatan perbankan seperti; Ilmu ekonomi, Hukum, perpajakan dan masalah-masalah keuangan, statistik dan memahami prinsip-prinsip pengelolahan data elektronik (PDE). Dalam penerapannya, masing-masing auditor intern tidak perlu memahami seluruh bidang tersebut diatas, namun Group Audit Intern secara keseluruhan harus mempunyai personal yang memahami disiplin ilmu diatas.

2) Pengalaman Kerja

Auditor intern bank harus mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang operasional bank dan atau diutamakan yang pernah menjabat sebagai Kepala Cabang minimal 3 (tiga) tahun dengan kinerja yang baik serta tidak pernah melakukan pelanggaran selama menjalankan tugasnya.

3) Sikap Mental & Etika

Auditor intern harus memiliki sikap mental & etika serta tanggungjawab yang tinggi terhadap profesi, sehingga kualitas hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk membantu terwujudnya perkembangan bank yang wajar dan sehat.

4) Kemampuan Komunikasi

Auditor intern bank harus memiliki kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif, karena Auditor Intern harus senantiasa berhubungan dengan berbagai pihak, baik intern maupun ekstern

5) Tanggungjawab terhadap Profesi

Auditor intern bank harus menunjukkan tanggungjawab terhadap profesi dengan selalu menerapkan prinsip kerja yang cermat dan seksama serta terus memelihara kemampuan teknisnya, sehingga dapat menghasilkan kualitas kerja yang optimal.

6) Independensi

Group Audit Intern bank wajib memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar

pemeriksaan yang berlaku umum. Independensi tersebut sangat penting agar produk yang dihasilkannya memiliki manfaat yang optimal dan terjaminnya kepentingan bank dan masyarakat.

7.3. Uraian Pelaksanaan Kegiatan Group Audit Intern Tahun 2014

Untuk tahun 2014, total pemeriksaan GAI baik itu pemeriksaan umum maupun khusus adalah sebanyak 13 (tiga belas) kali pemeriksaan, pada Kantor Cabang maupun Kantor Pusat.

Jenis Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan
Pemeriksaan Umum	12 (dua belas)
Pemeriksaan Khusus	1 (satu)

Berdasarkan hasil pemeriksaan/audit tersebut terdapat 180 (seratus delapan puluh) temuan, yaitu : temuan di bidang perkreditan sebanyak 50 (lima puluh) temuan, bidang akuntansi & TI sebanyak 91 (sembilan puluh satu) temuan dan Umum sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) temuan. Terdapat 84 (delapan puluh empat) temuan dari 11 (sebelas) kantor Cabang yang merupakan temuan tahun lalu dan belum ditindaklanjuti.

Seluruh temuan tersebut telah dilaporkan kepada Direktur Utama. Direktur Utama telah menyurati cabang yang menjadi obyek temuan tersebut untuk ditindaklanjuti dengan tembusan Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan.

7.4. Penyimpangan Internal *Fraud* Tahun 2014

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia setiap *fraud* dengan kerugian diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan hal ini telah dilaksanakan oleh PT. Bank Sulselbar melalui Direktur Kepatuhan. Adapun jumlah *fraud* yang terjadi selama tahun 2014 adalah sebanyak 4 (empat), dengan potensi kerugian sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah).

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan					
	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Total Fraud	0	0	10	3	2	1
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	1	1	1	0

7.5. Evaluasi Kinerja Group Audit Intern Tahun 2014

Tahun 2014, Group Audit Intern PT. Bank Sulselbar telah dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan *(Compliance Director)* dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Adapun hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut adalah:

1. **Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT)**

   Penyusunan perencanaan **belum** sepenuhnya sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) yaitu : Skedul kerja audit tidak memuat secara detail rencana waktu mulai pemeriksaan, rencana selesai pemeriksaan dan rencana penerbitan laporan untuk setiap auditan serta *Risk Based Audit* belum sepenuhnya

menjadi pertimbangan dalam menetapkan prioritas tahunan.

2. **Pelaksanaan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT)**

1) Komitmen/dukungan Dewan Komisaris dan Manajemen

Unsur pemenuhan yang tingkat pemenuhannya masih kuran dan segera memerlukan perbaikan, terinci sebagai berikut :

a. Direksi belum memiliki praktek tertulis dalam memastikan temuan audit dan rekomendasi;
b. Laporan yang dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya belum dilaporkan secara benar dan mematuhi ketentuan/perundangan berlaku serta ketepatan waktunya;
c. SOP kegiatan audit intern dilingkungan bank belum seluruhnya dipedomani;
d. Belum terlihat adanya aktivitas reviu pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut oleh manajemen;
e. Internal audit charter belum mencantumkan pernyataan misi GAI;
f. Langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen dalam menindaklanjuti hasil audit belum sepenuhnya efektif, terlihat masih ditemukan permasalahan yang berulang terjadi di kantor cabang.

2) Independensi

Unsur pemenuhan yang tingkat pemenuhannya masih kurang dan segera memerlukan perbaikan, terinci sebagai berikut :

a. Analisis auditor dalam pelaksanaan teknik dan prosedur audit tidak tergambarkan dan terdokumentasikan dalam KKA.
b. Adanya audit berulang yang dilaksanakan oleh auditor yang sama untuk auditan yang sama dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut.
c. Laporan hasil audit belum disajikan secara lengkap, obyektif dan berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.

3) Profesionalisme

Unsur pemenuhan yang tingka pemenuhannya masih kurang dan segera memerlukan perbaikan, terinci sebagai berikut :

a. Bank belum menetapkan persyaratan minimal pendidikan bagi auditor internal.
b. Laporan hasil audit yang dihasilkan belum sepenuhnya didasarkan analisis yang obyektif.
c. Penulisan temuan hasil audit hanya menyajikan judul permasalahan, belum

ada pengungkapan secara rinci atas fakta/keadaan yang sebenarnya terjadi, keadaan yang seharusnya, penyebab yang sebenarnya serta dampak terjadinya penyimpangan dan langkah perbaikan yang telah dilakukan serta rekomendasi secara menyeluruh atas permasalahan yang ditemukan.

4) Organisasi dan Manajemen

a. Laporan kegiatan yang disampaikan belum memuat perbandingan realisasi hasil audit dengan anggaran, masalah, penyebab, tindakan yang telah dan perlu diambil.
b. Perencanaan audit belum memuat anggaran biaya, penentuan jadwal, kegiatan yang diaudit, tanggal mulai dan waktu yang dibutuhkan, ruang lingkup dan hasil audit sebelumnya.
c. Perencanaan audit belum memuat rencana SDM dan anggaran, jumlah auditor yang diperlukan, kualifikasi yang dibutuhkan, pelatihan yang diperlukan untuk upaya pengembangan selain kegiatan administrasinya.
d. Belum ada program rekrutmen dan pengembangan SDM GAI,
e. Belum ada aktivitas reviu secara berkesinambungan atas kualitas pekerjaan Audit GAI.

5) Ruang Lingkup Audit

Indikator kepatuhan terkait dengan ruang lingkup audit yang belum sepenuhnya terpenuhi yaitu penilaian sistem pengendalian intern dimana penilaian kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian intern belum sepenuhnya dilaksanakan.

6) Pelaksanaan Audit Intern

a. GAI belum sepenuhnya menerapkan metode kerja minimal dalam penetapan sampling, teknik pengujian, bukti minimal yang dibutuhkan cara mendapatkan bukti dan konsep materialitas.
b. Tidak terdapat audit program yang menyajikan tujuan audit, luas dan tingkat pengujian serta metodologi pengujian yang akan dilaksanakan serta jangka waktu pelaksanaannya.
c. Tidak terdapat audit program yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi aspek teknis, risiko, transaksi yang harus diuji, termasuk PDE.
d. Ikhtisar temuan hanya mengungkapkan kondisi, belum memaparkan sebab terjadinya temuan tersebut, dan tidak terungkap penyebab yang sebenarnya sehingga rekomendasi yang diambil tidak menghilangkan penyebab terjadinya suatu masalah.

e. Pada ikhtisar temuan hanya ada fakta, kriteria, tanggapan dan rekomendasi. Sedangkan penyebab, dampak dan langkah perbaikan yang telah dilakukan auditee belum ada.
f. Reviu secara cermat dan berjenjang atas laporan hasil audit serta prosesnya belum sepenuhnya dilakukan secara berkesinambungan.
g. Standar pelaporan hasil audit telah dilakukan secara tertulis, namun masih belum didukung KKA yang memadai.
h. Dokumen reviu laporan tidak terdokumentasikan.
i. Administrasi tindak lanjut belum dibuat dengan baik sehingga sulit untuk mengetahui temuan-temuan yang belum ditindak lanjuti.
j. Tidak dilakukan pemantauan tindak lanjut dan pelaporan tindak lanjut hasil audit.

7) Dokumentasi dan Administrasi Audit.

a. Penyusunan KAA belum terdokumentasi dengan rapi dan sistematis.
b. LHA belum didukung oleh KKA yang telah reviu oleh Kepala GAI.
c. GAI kurang meneliti ulang kelengkapan administrasi seluruh berkas KAA baik tahap perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut.

8) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Lalu

Terhadap hasil evaluasi perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Grup Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Sulsel Tahun 2008, 2009, 2010 Nomor: LHE-817/PW21/4/2011 tanggal 6 Juli 2011 belum seluruhnya dilaksanakan, bahkan masih terjadi pada periode evaluasi ini.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Sulselbar Tahun 2014, Husni, Muharram dan Rasidi telah ditujuk kembali untuk mengaudit PT. Bank Sulselbar tahun Buku 2014. Penunjukan ini telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dimana sebelum ditetapkan oleh RUPS, telah memperoleh rekomendasi dari Komite Audit Bank Sulselbar dan Kantor Akuntan Publik belum melakukan audit selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat dengan Kantor Akutan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, disebutkan bahwa jasa yang diberikan adalah melaksanakan *General Audit* atas Laporan Keuangan yang meliputi Laporan

Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Kompehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan Ruang lingkup audit sekurang-kurangnya mencakup hal-hal yang telah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 Tanggal 13 Desember 2001 Pasal 18 ayat 4.

Adapun nilai kontrak untuk pekerjaan jasa audit ini sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian tersebut sebesar Rp. 472.935.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) .

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Kantor Akuntan Publik (KAP) selalu bertindak Independent, memenuhi standar profesional yang ditetapkan oleh Asosiasi Akuntan Indonesia serta Strandar Akuntan Publik serta Perjanjian kerja dengan PT. Bank Sulselbar.

8.1 Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank Konvensional

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang dipilih/ditunjuk PT. Bank Sulselbar merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar pada BAPEPAM-LK dan BANK INDONESIA serta memiliki ijin dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut merupakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2014, dimana RUPS tersebut menyerahkan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik.

Dalam penugasan audit kepada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut telah memenuhi aspek-aspek seperti Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan bersedia melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hasil auditnya.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen, sesuai dengan standard akuntan publik dan perjanjian yang ditetapkan.

8.2 Hubungan antara Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

PT. Bank Sulselbar mendirikan Unit Usaha Syariah dengan total cabang yang dimiliki adalah sebanyak 3 (tiga) Kantor Cabang yaitu Makassar, Maros dan Sengkang, semenjak Tahun 2008.

Laporan Keuangan PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah semenjak tahun 2013 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HUSNI, MUHARRAM DAN RASIDI serta terdaftar di BANK INDONESIA, BAPEPAM-LK dan telah memperoleh ijin dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA. Dimana hal ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian kerja dengan PT. Bank Sulselbar disamping mengaudit PT. Bank Sulselbar Konvensional juga mengaudit Unit Usaha Syariah sebagaimana diatur dalam ruang lingkup dalam perjanjian kerja.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH Bank Sulselbar Syariah telah memberikan pendapatnya terkait dengan ketaatan Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar terhadap Pelaksanaan prinsip Syariah sebelum menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan Bank Sulselbar Syariah kepada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik. Disamping itu, Laporan Keuangan hasil Audit Tahun 2014 Juga telah ditandatangani oleh DEWAN PENGAWAS SYARIAH sebagaimana diumumkan dalam media cetak.

8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Tahun 2013, PT. Bank Sulselbar melakukan perbaikan pada Penerapan Manajeme Risiko. Hal ini bertujuan agar penerapan manajemen Risiko Bank lebih baik daripada tahun sebelumnya sekaligus memitigasi risiko-risiko yang ditimbul dimasa akan datang. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor SK/092/DIR/VII/2013 Tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Sebelum disetujui oleh Direksi, telah pula memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar dengan surat Nomor 170/DK-BPDSS/07/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Perihal Persetujuan Buku Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar dan juga telah memperoleh persetujuan dari Komite Manajemen risiko sebagaimana diputuskan dalam rapat Komite Manajemen Risiko yang dituangkan dalam notulen rapat tanggal 26 Maret 2013.

Group Manajemen Risiko disupervisi oleh Direktur Kepatuhan. Pada Group Manajemen Risiko terbagi atas 2 (dua) departement yaitu Departement Pengendalian Risiko dan Departement Administrasi dan Pelaporan.

Namun berdasarkan hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank masih kurang, dimana Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa perlu dilakukan penguatan pada Group Manajemen Risiko (GMR), khususnya terkait dalam melakukan penilaian risiko inhern dan kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) bank, serta perlunya diungkapkan dalam suatu analisa pada penilaian tingkat kesehatan bank untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dimana harapan Otoritas Jasa Keuangan, dengan adanya penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk penilaian faktor-faktor tingkat kesehatan bank yang dihasilkan oleh GMR tersebut.

9.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Bank. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya manajemen risiko di Bank.

Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggungjawab yang jelas pada masing-masing unit serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, yang penjabarannya diuraikan sebagai berikut :

A. Organisasi

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, bank harus menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank

Struktur organisasi PT. Bank Sulselbar dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang berfungsi melakukan suatu transaksi *(risk taking unit)* adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern *(group Audit Intern)*, serta independen pula terhadap Group Manajemen Risiko .

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam kegiatan manajemen risiko memerlukan keahlian dan ketrampilan memadai untuk menerapkan manajemen risiko. Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan langkah-langkah :

a) Menetapkan kualifikasi jabatan yang jelas sesuai dengan jenjang jabatan yang ada dalam organisasi PT. Bank Sulselbar;

b) Meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas melalui penyusunan budaya kerja berwawasan manajemen risiko dan membudayakannya menjadi perilaku sehari-hari seluruh sumber daya manusia;

c) Menetapkan sistem penerimaan pegawai, pendidikan dan pelatihan; serta pemberian remunerasi yang memadai sehingga memberikan dukungan terwujudnya penerapan manajemen risiko secara konsisten.

d) Khusus untuk sumber daya manusia yang akan ditempatkan pada tim manajemen risiko maupun pejabat yang akan ditempatkan pada unit kerja yang langsung mengelola risiko antara lain unit kerja kredit, unit kerja dana dan treasury, serta unit kerja akutansi dan pengelolaan data elektronik akan disiapkan khusus sehingga memiliki kemampuan memadai untuk :

- Memahami risiko yang melekat pada setiap produk dan aktivitas fungsional bank;
- Memahami faktor-faktor risikonya, kondisi lingkungan dan pasar yang mempengaruhinya, serta mampu memprediksikan dampak perubahannya.
- Mampu melakukan komunikasi secara aktif mengenai implikasi eksposur risiko kepada Direksi, dan Komite Manajemen Risiko secara mudah, jelas dan tepat sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan secara memadai.

9.2 Kecukupan kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan manajemen risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis bank dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau unit kerja terkait.

Kebijakan dan prosedur didesain dan dimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, profil risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat.

9.3 Kecukupan Proses identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko, Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya, Bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, Bank menetapkan unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko. Selain itu, efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko.

9.4 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggungjawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Group Audit Intern.

9.5 Profil Risiko

A. Profil Risiko Konvensional

Risk Profile	Peringkat Per Posisi			Peringkat Posisi Sebelumnya		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Moderate	Fair	3 - Moderate	3 -Moderate	Fair	3 – Moderate
Risiko Pasar	Moderate	Fair	3 - Moderate	3 -Moderate	Fair	3 - Moderate
Risiko Likuiditas	Moderate	Fair	3 - Moderate	3 -Moderate	Fair	3 - Moderate
Risiko Operasional	Moderate to High	Marginal	4 –Moderate to High	4 -Moderate to high	Marginal	4 -Moderate to High
Risiko Hukum	Low to Moderate	Fair	2- Low to Moderate	2 - Low To Moderate	Fair	2 - Low to Moderate
Risiko Stratejik	Moderate	Marginal	3 - Moderate	3 - Moderate	Fair	3 - Moderate
Risiko Kepatuhan	Moderate to High	Fair	4 -Moderate to high	3 -Moderate	Fair	3 -Moderate
Risiko Reputasi	Low To Moderate	Fair	2 - Low To Moderate	3 -Moderate	Fair	3 - Moderate
Peringkat Risiko	Moderate	Fair	3 - Moderate	Moderate	Fair	3 - Moderate

Analisis

a. Peringkat Risiko

Peringkat komposit profil risiko adalah **Moderate (3).**

b. Risiko Inheren:

Penilaian komposit berdasarkan faktor penilaian dan indikator kuantitatif maupun kualitatif, disimpulkan peringkat risiko inherent adalah 3 (Moderate)

c. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko disimpulkan :

- Tata kelola risiko (Fair): i. Penilaian *Risk Appetite* dan *Risk Tollerance* adalah *Fair,* dan ii. *Oversight* Dewan Komisaris & Direksi perlu ditingkatkan.
- Kerangka manajemen risiko: perangkat organisasi dan kebijakan manajemen risiko disimpulkan *fair.*
- Sistem informasi manajemen, proses pemantauan, pengendalian risiko memenuhi ekspektasi minimum *(fair).*
- Penetapan kebijakan sumber daya manusia & organisasi memerlukan peningkatan yang sifatnya segera. *(marginal)*

ANALISIS PER RISIKO

1. **Peringkat Risiko Kredit (Moderate)**

   a. Risiko Inherent ***(Moderate)*** dengan uraian:

      i. Penyediaan dana yang terkonsentrasi pada sektor lain-lain yang memiliki eksposure risiko rendah dan pengaruh dari faktor eksternal yang juga rendah.

      ii. Konsentrasi kredit pegawai dapat meningkatkan eksposur risiko kredit jika terdapat pemerintah daerah yang memindahkan pengelolaan gajinya ke bank lain.

      iii. Penjaminan kredit konsumtif terkonsentasi pada lembaga asuransi swasta dapat meningkatkan eksposur risiko secara signifikan jika terjadi penurunan peringkat investasi lembaga asuransi.

      iv. Sebagian debitur kredit konsumtif dijamin Asuransi Jiwa Nusantara yang

telah dilikuidasi sehingga berpotensi meningkatkan risiko kredit jika terjadi klaim atas debitur yang meninggal.

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko memiliki peringkat **3-Fair** dengan uraian :

i. Tata Kelola *(Risk Governance)*

- Bank telah menetapkan *Risk Appetite* yang selaras dengan harapan stakeholder, namun penyesuaian portfolio atas risk limit yang ditetapkan masih dalam transisi penyelarasan termasuk diantaranya adalah kebutuhan untuk menyesuaikan portfolio penempatan antar bank dan portfolio NPL per sector ekonami berdasarkan *risk appetite* bank.
- Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi terkait risiko kredit belum memadai.

ii. Kerangka Manajemen Risiko :

- Perubahan organisasi kantor cabang tidak dibarengi dengan penyesuaian SOP, menimbulkan ketidakjelasan dalam proses bisnis pemberian kredit.
- Ketidakjelasan wewenang dan tanggungjawab dalam proses pemantauan kantor pusat dalam pelaporan SID kantor cabang.
- Ketidakjelasan penanggungjawab/petugas pada beberapa aktivitas perkreditan antara lain appraisal & pengelolaan agunan kredit kantor cabang.
- Tidak adanya SOP & Standar dalam penilaian agunan kredit.
- Analis kredit tidak didukung dengan perangkap SOP yang rinci sehingga kualitas analisa kredit tidak terstandar.
- Kebijakan pembentukan CKPN individual yang dikhususkan bagi kredit di atas Rp. 2 Milyar tidak sesuai dengan profil debitur bank.
- Eksepsi atas kebijakan limit risiko kredit masih tinggi antara lain pelampauan rasio gaji bagi debitur kredit pegawai.

iii. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi & SDM

- Tidak adanya standar kualifikasi terhadap pejabat/petugas yang bertanggungjawab dalam proses perkreditan.
- Tidak adanya suatu proses dalam penetapan kecukupan jumlah dan kualitas pejabat/petugas kredit yang sistematis.

- Proses pemberian kredit pada cabang pembantu yang tidak menggambarkan koordinasi dengan kantor cabang induk.
- Dukungan sistem informasi yang belum optimal antara lain informasi agunan yang belum sepenuhnya dicakup dalam *core banking*, belum adanya credit scoring serta belum tersedianya MIS perkreditan yang memungkinkan penetapan strategi penyediaan dana dilakukan secara cepat & tepat.
- Pelaporan SID belum mencakup sepenuhnya kredit *extracomtable*.

iv. Sistem Pengendalian Intern :

- Proses *review* terhadap kebijakan & SOP bidang perkreditan yang belum optimal.
- Masih terdapatnya perangkapan jabatan dalam bidang perkreditan yang melemahkan internal control, a.l. analisis kredit, account officer, pelaporan kredit, serta peninjauan & Pengelolaan agunan.
- Cakupan dan kualitas pelaksanaan kaji ulang oleh audit internal dan manajemen risiko yang masih rendah.
- Metodelogi pemeriksaan yang belum sepenuhnya berbasis risiko.

2. Peringkat Risiko Pasar (Moderate)

a. Risiko Inherent memiliki peringkaat ***(Moderate)*** dengan uraian :

i. Bank tidak memiliki eksposur yang dikategorikan *trading book.*
ii. Bank terekspos risiko pasar *(banking book)* akibat dominasi aset pada portfolio jangka panjang yang bersuku bunga tetap.
iii. Bank rentan terhadap perpindahan nasabah akibat perubahan tingkat bunga pada bank pesaing. (pendanaan non inti cukup tinggi).
iv. Kerugian potensial risiko suku bunga dalam *banking book* berdasarkan fluktuasi yang diskrenariokan tidak secara signifikan mempengaruhi NII. (perspektif pendapatan).

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko **(3-Fair)** dengan uraian :

i. Tata Kelola *(Risk Governance) :*

- Bank telah menetapkan *risk appetite* terkait dengan risiko pasar.

- Namun demikian, penyesuaian portfolio atas market risk limit yang ditetapkan masih dalam transisi penyelarasan termasuk diantaranya adalah pertumbuhan pendanaan non inti.
- Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi terkait risiko pasar belum memadai.

ii. Kerangka Manajemen Risiko

- Belum optimalnya fungsi dan tugas Departemen ALMA pada Grup Treasury dalam pengelolaan risiko pasar.
- Pelaksanaan pengelolaan Asset & Liability (ALMA) belum sepenuhnya didukung kebijakan & Prosedur yang jelas.

iii. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi & SDM

- Laporan profil maturitas yang menjadi dasar perhitungan GAP belum sepenuhnya disusun berdasarkan asumsi yang memadai *(kontraktual & Behavior)* berdasarkan kondisi internal bank.
- Belum tersedianya sistem informasi manajemen yang menyediakan profil maturitas secara tepat waktu.
- Tidak adanya standar kualifikasi terhadap pejabat/petugas yang bertanggungjawab dalam bidang risiko pasar (keuangan & Treasury)
- Tidak terdapatnya program pendidikan dan pengembangan kompetensi pejabat/petugas terkait risiko pasar yang sistematis.

iv. Sistem pengendalian intern :

- Audit internal belum mencakup aktivitas terkait risiko pasar.
- Audit working plan belum sepenuhnya berbasis risiko.

3. Peringkat Risiko Likuiditas (3-Moderate)

a. Risiko Inherent memiliki peringkat ***3-Moderate*** dengan uraian :

i. Konsentarasi kewajiban pada pendanaan non inti & pendanaan sensitive yang cukup tinggi.

ii. Signifikansi 10 deposan terbesar cukup rendah jika dibandingkan dengan total DPK.

iii. Arus kas yang berasal dari asset & kewajiban dapat saling tutup *(matched)* pada beberapa skala waktu.

iv. Akses ke sumber pendanaan yang memadai mengingat reputasi bank yang cukup baik.

b. Kualitas Manajemen Risiko ***(3-Fair)*** dengan uraian :

i. Tata Kelola *(Risk Governance) :*

- Bank telah menetapkan *risk appetite* terkait dengan risiko likuiditas.
- Namun demikian, penyesuaian portfolio atas *liquidity risk limit* yang ditetapkan masih dalam transisi penyelarasan termasuk diantaranya adalah pertumbuhan pendanaan non inti dan LDR.
- Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan & Direksi terkait risiko likuiditas belum memadai

ii. Kerangka Manajemen Risiko:

- Belum optimalnya fungsi dan tugas Departemen ALMA dalam pengelolaan risiko likuiditas
- Pelaksanaan pengelolaan Asset & Liability (ALMA) belum sepenuhnya didukung kebijakan & prosedur yang jelas.

iii. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi & SDM

- *Maturity Profile & Proyeksi Cash Flow* belum sepenuhnya disusun berdasarkan asumsi yang memadai dan belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam proses pengelolaan likuiditas oleh Group Treasury.
- Belum tersedianya sistem informasi yang menyediakan profil maturitas & cashflow secara tepat waktu.
- Tidak adanyanya standar kualifikasi terhadap pejabat/ petugas yang bertanggungjawab dalam bidang risiko likuiditas (keuangan & treasury)

- Tidak terdapatnya program pendidikan dan pengembangan kompetensi pejabat/petugas terkait risiko likuiditas yang sistematis.

iv. Sistem Pengendalian Intern :

- Audit intern belum sepenuhnya mencakup aktivitas terkait risiko likuiditas.
- Kualitas pemantauan oleh Grup Manajemen Risiko yang belum optimal.
- Audit working plan belum sepenuhnya berbasis risiko.

4. **Peringkat Risiko Operasional *(Moderate to high)***

a. Risiko Inherent ***(4-Moderate to High)*** dengan uraian :

i. Skala usaha yang ditunjukkan oleh jumlah asset, transaksi & jaringan kantor bank mengalami peningkatan.
ii. Frekwensi fraud internal & eksternal yang cukup tinggi.
iii. Produk & aktivitas baru yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pegawai.
iv. Penggunaan tenaga *outsourcing* yang cukup tinggi.
v. Ancaman *business discruption* dari external event yang cukup tinggi.

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko ***(4-Marginal)*** dengan uraian :

i. Tata Kelola *(Risk Governance)* **:**

- Bank telah menetapkan *risk appetite* yang terkait dengan risiko operasional.
- Namun belum secara utuh diterjemahkan dalam risk tolerance & risk limit dalam aktivitas operasional.
- Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi terkait risiko operasional belum memadai.

ii. Kerangka Manajemen Risiko :

- Perubahan organisasi kantor cabang tidak dibarengi dengan penyesuaian SOP menimbulkan ketidakjelasan dalam beberapa proses bisnis bank.
- *Job Description* pegawai yang belum terstandar dengan baik.

- Koordinasi yang lemah dan ketidakjelasan wewenang dan tanggungjawab unit Anti Fraud dan Grup Audit Intern dalam pelaksanaan investigasi.
- Koordinasi antara cabang pembantu dan cabang induk yang belum dirumuskan secara tegas.
- Kerangka Business Continuity Plan (BCP) yang belum sepenuhnya dilaksanakan dan diuji berkala.
- Terdapat perangkapan fungsi dalam pelaksanaan operasional bank al. Pemimpin Seksi layanan yang dirangkap oleh Pemimpin Seksi Keuangan Cabang.

iii. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi & SDM

- Tidak adanya standar kualifikasi terhadap pejabat/petugas yang menjadi dasar dalam penempatan.
- Tidak adanya suatu proses dalam penetapan kecukupan jumlah dan kualitas pejabat/petugas sesuai kebutuhan operasional (mapping).
- Tidak terdapatnya program pendidikan dan pengembangan kompetensi pejabat/petugas terkait kebutuhan operasional yang sistematis dan terencana.
- Kemampuan deteksi dini fraud yang lemah yang antara lain diakibatkan oleh mekanisme *whisleblowing* yang belum memadai, pemantauan pelaksanaan cuti yang belum optimal.
- Pengendalian *user & password* pada *core banking* yang masih lemah.
- Pengendalian transaksi & laporan keuangan yang lemah antara lain terdapatnya selisih yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

iv. Sistem Pengendalian intern

- Audit working plan belum sepenuhnya berbasis risiko.
- Belum adanya pedoman/SOP rinci terkait anti fraud dan standar pelaksanaan pemeriksaan.
- *Feedback mechanism* lemah yang mengakibatkan penyelesaian permasalahan hanya pada sisi dampak sehingga terjadi temuan berulang.

5. **Peringkat Risiko Hukum *(Low To Moderate)***

   a. Risiko Inherent ***(Low to moderate)*** dengan uraian :

      i. Estimasi kerugian akibat gugatan hukum dan proyeksi kerugian atas gugatan serupa rendah jika dibandingkan dengan modal bank.
      ii. Kerugian akibat gugatan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum rendah jika dibandingkan dengan modal bank.
      iii. Dalam melaksanakan perikatan dengan pihak lain, keberadaan dokumen pendukung dan cukup memenuhi klausula perjanjian.

   b. Kualitas Manajemen Risiko Hukum ***(Fair):***

      i. Tata Kelola *(Risk Governance)* :

         - Bank telah menetapkan risk appetite yang terkait dengan risiko hukum.
         - Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi terkait risiko pasar cukup memadai.

      ii. Kerangka Manajemen Risiko :

         - Bank telah membentuk unit legal pada Group Corporate Secretary untuk menangani proses litigasi. Namun demikian, prosedur dan tata kerja belum didukung kebijakan dan SOP yang jelas.

      iii. Proses Manajemen Risiko, sistem informasi & SDM

         - Seluruh perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga telah terlebih dahulu melalui proses pengkajian di Group Kepatuhan.
         - Dalam proses litigasi bank bekerja sama dengan konsultan hukum.

      iv. Sistem Pengendalian intern :

         - Proses Review perjanjian terhadap perubahan dari *Best Practice* atau perundang-undangan perlu peningkatan.

6. **Peringkat Risiko Strategik *(Moderate)***

a. Risiko Inherent ***(Moderate)***

i. Strategi bisnis bank relatif berisiko rendah dan strategi usaha ke depan diarahkan pada usaha yang sama.

ii. Bank memiliki keunggulan kompetitif namun ancaman dari kompetitor cukup tinggi.

iii. Penetapan sasaran strategi bisnis belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi internal bank termasuk visi & misi bank.

b. Kualitas penerapan Manajemen Risiko ***(4-Marginal)*** dengan uraian :

i. Tata Kelola *(risk governance)* :

- Bank telah menetapkan risk appetite namun belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penetapan strategi Bank.
- Pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi terkait risiko strategic memerlukan peningkatan.

ii. Kerangka manajemen Risiko :

- Organisasi bank yang belum diselaraskan dengan visi & misi bank.
- Rencana bisnis bank yang belum selaras dengan rencana korporasi sebagaimana tertuang dalam *Corporate Plan* Bank Sulselbar.
- Belum adanya mekanisme reward & punishment yang komprehensif dalam penilaian pencapaian target-target unit kerja.
- Belum adanya pedoman penyusunan RBB & Rencana Korporasi yang komprehensif.

iii. Proses Manajemen Risiko, sistem Informasi & SDM

- *Corporate plan* yang tidak didukung oleh blueprint SDM & Program pengembangan culture yang memadai.
- Tidak adanya standar kualifikasi terhadap pejabat/petugas yang bertanggungjawab dalam proses penyusunan perencanaan strategis.
- Tidak terdapatnya program pendidikan dan pengembangan pejabat bidang strategis yang terencana.
- Penyusunan rencana bisnis & Korporasi belum secara detil memuat target penyelesaian maupun output yang diharapkan.

iv. Sistem pengendalian intern :

- Perlunya peningkatan proses review terhadap pencapaian rencana strategis yang dilakukan secara periodik

7. **Peringkat Risiko Kepatuhan (4-Moderate to High)**

a. Risiko Inherent ***(4-Moderate to high)*** dengan uraian :

i. Pemenuhan komitmen atas tindaklanjut audit yang rendah
ii. Frekwensi temuan berulang cukup tinggi.
iii. Frekwensi dan denda pelaporan cukup tinggi.
iv. Dengan karakteristik & jumlah nasabah serta kualitas pengkinian data yang rendah mengakibatkan bank rentan terhadap pencucian uang.

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko ***(4-Marginal)***

i. Tata kelola *(Risk Governance)* :

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi dalam pemantauan tindaklanjut temuan dan pemenuhan komitmen Bank belum memadai.

ii. Kerangka Manajemen Risiko :

- Kebijakan dan SOP yang tidak clear dan masih disusun secara partial.
- Belum adanya pedoman penyusunan hirarki baku dalam ketentuan internal.
- Belum terdapatnya mekanisme reward & punishment yang komprehensif terkait dengan tingkat kepatuhan pegawai terhadap ketentuan.
- Belum adanya mekanisme diseminasi ketentuan yang komprehensif.

iii. Proses manajemen risiko, sistem informasi & SDM

- Belum diinventarisnya seluruh ketentuan internal bank.
- Belum tersedianya system informasi yang dapat digunakan oleh setiap pegawai untuk mengakses ketentuan internal bank.

- Belum adanya system informasi manajemen yang secara dini menyediakan warning terhadap pemenuhan komitmen maupun pelaporan bank.

iv. Sistem pengendalian intern :

- Pelaksanaan review terhadap ketentuan yang belum optimal.
- Belum adanya pedoman tindak lanjut temuan audit.

8. **Peringkat Risiko Reputasi *(2-Low To Moderate)***

a. Risiko Inheren ***(2-low to Moderate)***

i. Penilaian tingkat kesehatan & profil risiko yang berada pada PK-3 dapat mempengaruhi reputasi bank.
ii. Frekwensi publikasi negative terkait bank rendah
iii. Jumlah dan materialitas kerjasama bank dengan mitra bisnis semakin meningkat.
iv. Frekwensi, materialitas dan eksposur dan eksposur publikasi negative periode laporan rendah.

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko ***(3-Fair)***:

i. Tata Kelola *(Risk Governance)*

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi dalam pemantauan risiko reputasi cukup memadai.

ii. Kerangka Manajemen Risiko :

- Bank telah membentuk Grup Corporate Secretary untuk penanganan reputasi bank.
- Penanganan reputasi bank belum didukung oleh kebijakan dan prosedur kerja yang jelas.
- Pelaksanaan fungsi UP3N (Unit Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah) Kantor cabang dan Kantor pusat belum optimal.

iii. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi & SDM

- Kualitas data & proses updating websites bank belum memadai.

- Kualitas data pada laporan pengaduan nasabah belum memadai.

iv. Sistem pengendalian intern

B. Profil Risiko Unit Usaha Syariah

Risk Profile	Peringkat Posisi Sebelumnya		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	*Moderate*	*Marginal*	*3 Moderate*
Risiko Pasar	*Moderate*	*Marginal*	*3 Moderate*
Risiko Likuiditas	*Moderate*	*Fair*	*3 Moderate*
Risiko Operasional	*Moderate*	*Fair*	*3 Moderate*
Risiko Hukum	*Low To Moderate*	*Fair*	*2 Low to Moderate*
Risiko Stratejik	*Moderate*	*Fair*	*3 Moderate*
Risiko Kepatuhan	*Moderate*	*Fair*	*3 Moderate*
Risiko Reputasi	*Moderate*	*Fair*	*3 Moderate*
Risiko Imbal Hasil	*Low*	*Fair*	*1 Low*
Risiko Investasi	*Low*	*Satisfactory*	*1 Low*
Peringkat Komposit	*Moderate*	*Satisfactory*	*Moderate*

ANALISIS

Peringkat Risiko :

Peringkat komposit profil risiko adalah Moderate

Risiko Inheren :

Penilaian komposit berdasarkan faktor penilaian dan indikator kuantitatif maupun kualitatif, disimpulkan peringkat risiko inherent adalah 3 Moderate

Kualiatas Penerapan Manajemen Risiko :

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko disimpulkan sebagai berikut :

- Tata kelola risiko pada Grup Unis Usaha Syariah dominan bersifat fair, namun masih diperlukan penguatan manajemen dan organisasi pengelolaan risiko pada Grup UUS,
- Sistem informasi manajemen, proses pemantauan dan pengendalian risiko bersifat moderate mengingat jumlah sumber daya insani (SDI) dalam pemenuhan struktur organisasi telah terpenuhi.

ANALISIS PER RISIKO

1. Risiko Kredit

   a. Resiko Inheren ***Moderate,*** hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

      - Secara konsolidasi kualitas pembiayaan yaitu nilai non performing Finance (NPF) pada bulan Desember 2014 adalah sebesar 1,45%. Angka ini menunjukkan penurunan dari posisi bulan September 2014 yang mencapai 1,66%.
      - Penurunan NPF ini telah dimitigasi dengan upaya-upaya pencegahan dan pemantauan yang intensif oleh Grup UUS terhadap seluruh pembiayaan bermasalah yang ada pada kantor-kantor cabang syariah. Proses mitigasi ini kemudian dikoordinasikan antara grup UUS dengan satuan kerja pemulihan kredit bermasalah Grup Pemasaran Kantor Pusat dan langsung diteruskan ke Direktur Supervisi.
      - Penyaluran piutang dan pembiayaan yang masih tidak tersegmentasi dengan baik, dimana kesiapan organisasi sering menjadi kendala utama, sehingga terkadang masih terjadi konsentrasi kredit pada satu sektor.

b. Sistem pengendalian Risiko bersifat ***Marginal,*** dengan :

- Identifikasi dan pengukuran piutang dan pembiayaan yang dikelola oleh kantor-kantor cabang syariah telah diukur oleh Grup UUS secara reguler setiap bulannya, dan terus diupayakan dilakukan pemantauan dan pengendalian risiko piutang dan pembiayaan ini sebelum terjadinya masalah.
- Kekurangan *infrastruktur,* tenaga analis dan administrasi yang membantu kelancaran proses piutang dan pembiayaan sangat mempengaruhi pemenuhan administrasi proses pembiayaan yang akan berpengaruh kepada pergerakan bisnis bank.
- Kekurangan jumlah SDI menyebabkan lemahnya monitoring yang dilakukan secara rutin kepada debitur.

2. Risiko Pasar

a. Risiko Inherent ***Moderate.*** Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

- Unit Usaha Syariah tidak melakukan aktivitas trading.
- UUS masih memiliki kecukupan aset jangka panjang (>3 tahun).

b. Sistem pengendalian Risiko bersifat ***Marginal.*** Dimana :

- Belum maksimalnya kesiapan prosedur perihal pengendalian risiko pasar.
- Serta optimalisasi sistem informasi pengaturan risiko pasar tersebut yang belum dapat dipenuhi dengan baik.

3. Risiko Likuiditas

a. Risiko Inherent ***Moderate.*** Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

- Saat ini UUS masih memiliki kemampuan likuiditas yang cukup baik pada GIRO BI sebagai giro wajib minimum telah memenuhi ketentuan pada akhir Desember 2014 tercatat saldo sebesar Rp. 20,099 Milyar dan saldo penempatan Dana antar bank aktiva sebesar Rp. 220 Milyar.

- Untuk memenuhi kecukupan likuiditas Group UUS dapat memanfaatkan instrumen RAK syariah-konvensional

b. Sistem pengendalian Risiko bersifat ***fair,*** dimana :

- Identifikasi dan pengukuran penggunaan likuiditas kantor cabang syariah dapat terukur dengan baik, walaupun hingga saat ini *maturity profil* yang ada pada seluruh kantor cabang syariah belum dapat dijadikan sebagai acuan pemantauan likuiditas.
- Pengendalian likuiditas dapat dilakukan dengan baik dan jelas penggunaannya, melalui pemantauan rutin yang dilakukan oleh Group UUS.

4. Risiko Operasional

a. Risiko inherent ***Moderate.*** Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

- Peningkatan kejadian risiko operasional yang bersifat rutin dengan impact yang kecil sering terjadi sehingga menghasilkan in-efisiensi pada aktivitas bisnis.
- Kekurangan Sumber Daya Insani (SDI) dalam pemenuhan organisasi cabang serta kualitas kompetensi menyebabkan organisasi tidak dapat berjalan dengan baik dan berimbang.
- Belum teraturnya mekanisme pengelolaan SDI yang baik, menyebabkan terjadinya perlambatan proses regenerasi pada organisasi Bank.
- Keterlambatan perekrutan sangat berdampak signifikan terhadap kemungkinan terjadi *fraud,* mengingat bisnis bank terus bertambah.

b. Sistem pengendalian risiko bersifat ***fair,*** dimana :

- Sistem pengendalian risiko fair yang tergambar dari beberapa temuan auditor baik internal maupun eksternal terhadap beberapa pelanggaran administratif terhadap standar operasional dan pelaksanaan.
- Pemenuhan SDI untuk mengisi fungsi-fungsi organisasi kantor cabang belum terpenuhi dengan baik.

- Kejelasan mekanisme pengelolaan SDI dan sistem informasi belum terukur dengan baik terhadap peningkatan dan rencana bisnis bank.

5. Risiko Hukum

   a. Risiko inherent ***Low To Moderate.*** Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

      - Kurangnya staf legal dan pemahaman hukum dari tiap-tiap analisis dan staf pemasaran atas akad-akad yang dibuat menyebabkan sering terjadinya kesalahpahaman pada implementasi akad tersebut.
      - Tidak adanya upgrade dan refresh pemahaman hukum yang rutin bagi setiap pegawai menyebabkan lemahnya negosiasi antara unit bisnis dengan debitur dan kreditur, sehingga berpotensi menyebabkan *fraud.*

   b. Sistem pengendalian risiko bersifat ***fair,*** namun harus diperbaiki beberapa hal, yaitu :

      - Identifikasi awal tidak dapat dilakukan dengan baik.
      - Perlunya me-*refreshment* kembali pemahaman pegawai atas pengendalian risiko hukum disegala strata organisasi.

6. Risiko Reputasi :

   a. Risiko inherent ***Moderate.*** Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

      - Secara khusus pemberitaan negatif kepada Unit Usaha Syariah tidak pernah ada, hanya saja akibat dari adanya pemberitaan tentang Bank secara umum, maka akan memberikan dampak secara tidak langsung kepada Group UUS.

   b. Sistem pengendalian risiko bersifat ***fair,*** namun :

      - Perlunya kesiapan manajemen untuk menyiapkan saluran-saluran komunikasi yang jelas baik oleh pihak internal ataupun eksternal sehingga aspirasi dan informasi yang negatif dapat dimitigasi sedini mungkin.

7. Risiko Startegik

   a. Risiko Inherent ***Moderate.*** Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

      - Hingga saat ini strategi yang dibuat UUS bank hanya mengikuti pola produk yang telah existing pada Bank Syariah lainnya. Diferensiasi produk yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah atau sesuai strategi bisnis Bank Sulselbar saat ini belum dioptimalkan

      - Strategi jangka panjang Grup UUS belum tersosialisasi dengan baik ke unit-unit bisnis induk bank, sehingga pemahaman eksklusifme Group UUS masih terlalu nampak. Sementara pada rencana bisnis bank 2014 Group UUS kembali mencoba memberikan pemahaman inklusifme, dimana UUS adalah bagian yang terintegrasi dari bisnis induk.

   b. Sistem pengendalian Risiko bersifat ***Fair,*** namun :

      - Identifikasi dan pengukuran strategi Grup UUS belum teridentifikasi dengan baik, mengingat kurangnya riset dan pengembangan yang detail terhadap pencapaian visi dan misi bank.

      - Pemantauan serta pengendalian atas visi dan misi bank belum tersosialisasi dengan baik, sehingga terkadang unit bisnis tidak dapat menterjemahkan visi dan misi induk.

8. Risiko Kepatuhan :

   a. Risiko Inherent ***Moderate.*** Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

      - Saat ini koordinasi antar grup UUS dan Grup Kepatuhan serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan secara rutin setiap bulannya, sehingga DPS dan Grup Kepatuhan dapat memberikan peringatan dini *(early warning system)* atas adanya temuan audit baik intern maupun ekstern.

      - Beberapa indikasi penyimpangan pelaksanaan proses pembiayaan dan penghimpunan dana pada kantor cabang syariah sebagaimana rekomendasi Grup Audit Intern, mengindikasikan adanya beberapa penyimpangan atas aturan-aturan yang telah ditetapkan.

b. Sistem pengendalian risiko bersifat ***Fair,*** namun :

- Kedepannya pemantauan risiko ini dapat dikoordinasikan lebih awal sehingga pengambilan keputusan dapat diawasi dengan baik dan diselaraskan dengan bisnis bank.
- Seringnya meng-update pemahaman atas aturan-aturan internal (SOP) dan/ataupun eksternal wajib dilakukan dengan baik.

9. Risiko Investasi

a. Risiko inherent ***Low.*** Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

- Identifikasi risiko ini sementara dikaji dengan detail oleh Grup UUS, namun saat ini risiko ini masih terdistribusikan kedalam risiko kredit, mengingat saat ini portofolio pembiayaan-pembiayaan berbasis bagi hasil masih sangat kecil hanya sebesar 0.03% dari seluruh outstanding pembiayaan per Desember 2014.
- Akad pembiayaan yang digunakan saat ini seluruhnya bersifat *mudharabah* dengan konsistensi pembayaran yang sesuai dengan ekspektasi Bank.

b. Sistem pengendalian risiko bersifat ***satisfactory,*** namun :

- Identifikasi dan pengukuran pembiayaan yang dikelola oleh kantor-kantor cabang syariah telah diukur oleh Group UUS secara reguler setiap bulannya, namun pemantauan dan pengendalian risiko piutang dan pembiayaan ini masih dikategorikan lemah karena risiko baru dapat diidentifikasi setelah terjadinya masalah.
- Kekurangan jumlah SDI pada organisasi pembiayaan ini dapat menyebabkan lemahnya monitoring yang dilakukan secara rutin kepada debitur, hal ini tercermin dari beberapa temuan audit terkait pemenuhan dokumen-dokumen nasabah.

10. Risiko Imbal Hasil :

a. Risiko inheren ***Low.*** Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

- Saat ini risiko ini dikategorikan rendah *(low),* dimana saat ini dana pihak

ke III yang berbasis bagi hasil di Bank Sulselbar tergolong stabil. Hal ini disebabkan oleh karena imbal hasil dana pihak ke III bukan Bank selama 6 (enam) bulan terakhir rata-rata sebesar Rp. 11,69 per Rp.1.000,- investasi.

- Sehingga bila dibagihasilkan sesuai nisbah yang disepakati, maka kepada investor rata-rata deposito per bulan Desember 2014 tercatat sebesar 8,24% per tahun.
- Dengan melihat data tersebut diatas maka risiko imbal hasil ini terdistribusi kedalam risiko pasar terkait banking book atas suku bunga pasar bank konvensional ataupun imbal hasil bank syariah lainnya.

b. Sistem pengendalian risiko bersifat ***satisfactory***, namun :

- Pemantauan risiko ini dapat dilakukan dengan baik dan detail, sehingga pembenahan sumber-sumber informasi (SIM) data penghimpunan dana pihak ke III berbasis bagi hasil dapat dilakukan dengan baik.
- Seringnya memantau perubahan suku bunga atau imbal hasil secara eksternal wajib dilakukan dengan baik, sehingga dapat menjadi acuan strategis pada komite ALCO terkait penetapan nisbah.

9. **Penyediaan dana kepada Pihak terkait *(related Party)* dan Penyediaan dana besar *(large exposure)***

Pedoman yang mengatur tentang penyediaan dana kepada pihak terkait *(related party)* dan penyediaan dana besar *(large exposure)* telah dimiliki oleh PT. Bank Sulselbar. Dalam pedoman tersebut telah diatur mengenai kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang wajib dilaksanakan sebelum menyediakan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar termasuk monitoring dan penyelesaian permasalahan apabila ada.

Pada tahun 2013, Pedoman penyediaan dana kepada Pihak terkait *(Related Party)* dan penyediaan dana besar *(Large Exposure)* telah dilakukan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedurnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyediaan dana, pihak manajemen telah bertindak independent dalam artian tidak terdapat intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan kemampuan permodalan Bank. Selama tahun 2014 tidak terjadi pelampauan dan pelanggaran BMPK dan hal ini telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun rincian penyediaan dana kepada pihak terkait *(related party)* dan penyediaan dana besar *(large exposure)* selama tahun 2014 adalah :

Rp Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (dalam jutaan rupiah)
Kepada Pihak terkait	12	2.233.788.657,-
Kepada Debitur Inti : • Individu • Group	25	 42.006.359.679 Nihil

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

11.1. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kondisi keuangan dan non keuangan PT. Bank Sulselbar dibuat secara transparan dan jelas, adapun laporan-laporan tersebut adalah :

1. Laporan Tahunan

Dalam penyusunan laporan tahunan mencakup antara lain :

a. Iktisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan serta tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi atas laporan Tahunan.

b. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Bank Indonesia dan mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dengan penyajian diperbandingkan dengan tahun buku sebelumnya.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Bank Sulselbar disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini dan ditandatangani oleh Direksi. Laporan keuangan publikasi Triwulanan ini juga diumumkan pada *website* milik Bank Sulselbar dan juga diumumkan pada koran nasional dan regional.

3. Laporan Keuangan Bulanan

Laporan keuangan bulanan Bank Sulselbar disusun sesuai dengan format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia.

4. Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate)

Laporan ini dibuat setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Dalam penyusunan laporan ini disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

11.2. Laporan Non Keuangan Bank

Bank Sulselbar telah menyampaikan informasi mengenai produk bank secara jelas melalui leafet, brosur yang ditempatkan pada seluruh kantor cabang PT. Bank Sulselbar dan pada ruangan ATM PT. Bank Sulselbar dan Kantor Cabang Pembantu termasuk pada *website* milik PT. Bank Sulselbar.

Adapun call center PT. Bank Sulselbar dipergunakan untuk pengaduan nasabah termasuk memberikan informasi terkait produk-produk PT. Bank Sulselbar. Nomor call center Bank Sulselbar adalah 150855.

a. Pengaduan Nasabah

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana diubah dengan PBI 10/10/PBI/2008, Bank wajib memiliki suatu unit kerja yang menangani pengaduan nasabah tersebut.

Adapun metode pengaduan nasabah tersebut, nasabah dapat melaporkan secara tertulis melalui petugas yang berada pada Kantor Cabang atau melalui call center.

Namun terdapat kelemahan terkait penanganan pengaduan nasabah, yaitu belum dikinikannya Pedoman Pengaduan Nasabah tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

b. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dilakukan dalam bentuk *CSR* (*Corporate Social Responsibility)***.** Kegiatan CSR PT. Bank Sulselbar direncanakan setiap tahunnya dengan dana yang diperoleh dari 2.5% Laba PT. Bank Sulselbar. Pelaksanaan CSR berpedoman

kepada Sistem Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusannya dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Laporan Keuangan terkait penggunaan dana CSR tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik dan hasil Auditnya diserahkan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui. Adapun penggunaan dana CSR selama tahun 2014, adalah sebesar Rp. 4.502.763.500,- (empat milyar lima ratus dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Dimasa akan datang, *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. Bank Sulselbar akan lebih baik. PT. Bank Sulselbar merencanakan bahwa CSR bermula dari hulu ke hilir. Yang bermula dari *Supplier, Input, Process, Output* dan *Customer* (SIPOC).

Adapun contoh kegiatan tersebut adalah pada posisi *Supplier,* Bank akan menggunakan kertas yang ramah lingkungan, dimana *Supplier* wajib menunjukkan bahwa bahan baku untuk pembuatan kertas tersebut tidak berasal dari hutan konservasi atau hutan lindung yang dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan dari otoritas yang berwenang. Untuk *input* bahan baku untuk pembuatan kertas tersebut dari kayu, bukannya dari bambu, bank wajib memperhitungkan dampak yang ditimbulkannya dari berkurangnya jumlah pohon.

Pada bagian *Process*, bank dalam menghasilkan jasa, wajib melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dampak yang ditimbulkan dapat membahayakan karyawan dan hal ini berkaitan dengan subyek HAM dan praktik tenaga kerja. Sehubungan dengan *output* Bank bukan hanya jasa tetapi juga termasuk limbah yang dihasilkan. Disamping itu, untuk *Customer,* cara perusahaan memperlakukan nasabahnya.

Sehingga diharapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh PT. BANK SULSELBAR adalah bukan merupakan kegiatan bagi-bagi laba, donasi dan kedermawanan, namun merupakan bentuk tanggungjawab Bank Sulselbar atas dampak yang diciptakan dari keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan hidup, melalui perilaku yang transparan dan etis.

c. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

PT. Bank Sulselbar mempunyai kebijakan untuk tidak memberikan dana untuk bantuan kegiatan politik. Oleh karena itu, selama tahun 2014 tidak terdapat bantuan dana untuk kegiatan politik.

d. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

PT. Bank Sulselbar menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan yang

telah ditentukan berdasarkan Peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Laporan GCG PT. Bank Sulselbar selama 3 (tiga) tahun berturut selalu mengalami perubahan dimana penilaian yang dilakukan sendiri oleh PT. Bank Sulselbar *(self assessment),* sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia selalu dirubah oleh Bank Indonesia, terakhir pada laporan GCG tahun 2013 dari komposit 2 (dua) oleh Otoritas Jasa Keuangan diturunkan menjadi 3 (tiga). Seluruh hasil revisi telah diumumkan pada *website* PT. Bank Sulselbar.

11.3. Pelaporan Internal

PT. Bank Sulselbar telah memiliki pelaporan internal yang didukung dengan SIM yang memadai untuk mendukung kebutuhan informasi yang diperlukan bagi perencanaan dan pengawasan serta pengambilan keputusan manajemen.

PT. Bank Sulselbar juga memiliki *IT Security system* yang memadai dan sesuai standar dan secara berkala dilakukan audit IT dari pihak independent maupun Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan

Namun Sistem Informasi tersebut masih terdapat kelemahan, dimana masih terdapat selisih-selisih yang ditemukan baik oleh pemeriksa intern maupun pemeriksa ekstern dan hal ini mempengaruhi laporan keuangan.

11. Rencana Strategis Bank

Dalam menyusun rencana strategis bank, terlebih dahulu PT. Bank Sulselbar menyusun *corporate plan* (rencana korporasi) dan selanjutnya rencana bisnis *(business plan)* yang merupakan pengjawantahan rencana korporasi tersebut.

Rencana bisnis baik *Corporate Plan* maupun *Business Plan* telah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik menyetujui *corporate Plan* dan *Business Plan* tersebut dan wujud lainnya adalah adanya penambahan setoran modal.

12.1. Rencana Bisnis Jangka Pendek

Adapun rencana bisnis jangka pendek tahun 2014, antara lain adalah :

1. Pembukaan Kantor Cabang Topoyo, Mamuju
2. Kartu Debet, Mobile Banking dan Internet Banking
3. Kartu PNS Elektronik (KPE) dan Hospital Billing
4. Unit Usaha Syariah

a. Simpanan Giro Mudharabah

b. Pembiayaan Rekening Koran Syariah

c. Program Giro Gratis

5. Peningkatan permodalan guna melaksanakan Program BPD Regional Champion, dengan upaya-upaya sebagai berikut :

   a. Menyarankan agar deviden yang diterima sebagian disetor kembali sebagai tambahan modal disetor.

   b. Program kunjungan pengurus dan Dewan Komisaris ke Pimpinan Daerah Provinsi, Kotamadya, dan Kabupaten se Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

6. Perbaikan Sistem SDM, *outsourcing*, rekrutmen pegawai, dan pengurus

7. Pengembangan & Pengaplikasikan Laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan (LSMK) melalu format XBRL, Pengembangan Aplikasi Core Banking sebagai sumber data sesuai format dan kebutuhan laporan LSMK tahap I, Pengembangan modul DHN pada Aplikasi Core Banking secara full integrasi.

8. Implementasi BPD-NET, Pengembangan Interface dan Middleware, implementasi Data Warehouse, pemenuhan lisensi-lisensi.

12.2. Rencana Bisnis Jangka Panjang

Rencana bisnis Jangka Panjang Bank Sulselbar tercantum dalam *Corporate Plan,* antara lain adalah :

1. Ketahanan Kelembagaan yang kuat

   a. Memaintain modal pada kategori buku II dengan besaran yang dapat mengcover aspirasi bank untuk meningkatkan portofolio kredit produktif secara bertahap hingga 60 % . (fokus utama).

   b. Tingkat kesehatan bank minimum berada pada peringkat komposit 2. (fokus utama).

   c. Menjaga agar CAR minimal menjadi 17%, 2 % sebagai buffer

   d. ROA pada kisaran 4%

   e. ROE pada Kisaran 24%

   f. BOPO <75% dan menjadi 5 besar terefisien dalam *peer group.*

2. Kemampuan sebagai agent Regional of Development

   a. Kemampuan portofolio kredit produktif secara bertahap menjadi minimal 60%.

   b. Menjaga agar LDR berada pada kisaran 92%.

   c. DPK diluar dana PEMDA minimal 70%.

   d. Pertumbuhan kredit produktif minimal 20%.

   e. Sebagai financial consultant PEMDA.

3. Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat

   a. Pengembangan *mobile banking, internet banking*, EDC, optimalisasi fitur ATM, Debit dan *E-money*.

   b. Product *Renewal/Repackaging*: Produk Tampan dan peningkatan jumlah pengguna dan usage kartu kredit.

   c. Pengembangan *Branchless Banking*.

   d. Menjadikan Bank Sulselbar sebagai bank devisa dan agen *Western Union.*

12.3. Pelaksanaan Rencana Strategis Bank

Adapun kelemahan-kelamahan dari rencana bisnis bank antara lain :

1. Rencana bisnis yang disusun oleh Bank, belum sepenuhnya dapat teralisasi.
2. Rencana bisnis tidak berkesinambungan antara rencana jangka panjang, menengah dan pendek.

12. *Shares Option*

Kebijakan mengenai shares option atau opsi untuk membeli saham pada PT. Bank Sulselbar tidak terdapat, namun pada Anggaran Dasar Perseroan terdapat *shares option* kepada Karyawan.

Pelaksanaan *shares option* pada karyawan belum terlaksana, bahkan rencana *shares Option* yang tadinya direncanakan sebesar 10% (sepuluh persen) akan diberikan kepada Karyawan telah berkurang menjadi tinggal 5% (lima persen) sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Keterangan/Nama	Jumlah	
	Debitur	Nominal (dalam jutaan rupiah)
Kepada Pihak terkait	12	2.233.788.657,-
Kepada Debitur Inti : • Individu • Group	25	 42.006.359.679 Nihil

Keterangan/Nama	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		Yang diberikan (lembar Saham)	Yang telah dieksekusi (lembar Saham)		
Komisaris					
Direksi					
Pejabat Eksekutif					
Total	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

13. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	1 (satu)	2 (dua)
Dalam proses penyelesaian		1 (satu)
Total	1 (satu)	3 (tiga)

Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT. Bank Sulselbar yang diajukan melalui proses hukum sebanyak 4 (empat) kasus, yaitu 1 (satu) kasus untuk masalah perdata dan 3 (tiga) kasus pidana.

14.1. Kasus Pidana

1. **Penggelapan Dana Nasabah**

   Kasus ini timbul setelah adanya pengaduan nasabah pada PT. Bank Sulselbar kantor kas Gubernuran Sulawesi Selatan pada tahun 2013. Nasabah melakukan penarikan dan ternyata dana yang dimilikinya tidak mencukupi, namun menurut nasabah, dana yang berada pada rekeningnya lebih dari jumlah yang ingin ditariknya. Atas pengaduan tersebut, Direksi memerintahkan Group Audit Intern (GAI) melakukan pemeriksaan khusus dan hasil pemeriksaan khusus tersebut membuktikan terjadi *fraud* dengan pelaku adalah pegawai kantor Kas Gubernuran tersebut.

   Berdasarkan pemeriksaan GAI tersebut, Bank melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dan diajukan ke pengadilan negeri. Pada tahun 2014, Pengadilan Negeri Makassar memutuskan hukuman 5 (lima) tahun hukuman penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2. **Perkreditan**

   Kasus hukum ini terjadi pada PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo. Kasus ini dimulai pada

saat Group Audit Intern PT. Bank Sulselbar melakukan pemeriksaan umum terhadap penyaluran kredit. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan umum, permasalahan ini ditingkatkan menjadi Pemeriksaan Khusus, dengan kesimpulan bahwa Pemimpin Bank Sulselbar Cabang Palopo beserta stafnya dalam menyalurkan kredit melanggar prosedur yang ditetapkan dan tujuan pemberian kredit tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pemeriksaan tersebut juga diperdalam oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan melaporkannya ke kepolisian Kota Palapo. Berdasarkan pelaporan tersebut, disidangkan pada Pengadilan Negeri Palopo untuk staff kredit dengan hukuman 1 (satu) tahun dan staff tersebut telah menjalani hukumannya serta kembali bekerja pada Bank Sulselbar.

Adapun untuk pemimpin Cabang saat kredit ini disalurkan telah ditetapkan sebagai tersangka namun belum menjalani proses persidangan hingga saat laporan GCG ini dibuat.

14.2. Kasus Perdata

Kasus ini terjadi pada PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Sengkang, dimana nasabah keberatan bahwa tanah dan bangunannya yang menjadi obyek jaminan pembiayaannya dilelang oleh Pihak Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Sengkang.

Menurut nasabah, PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah Cabang Sengkang telah melakukan penipuan dimana dikatakan bahwa praktek yang dilaksanakan dalam pemberian pembiayaan berkedok syariah namun konvensional serta persyaratan yang ditetapkan memberatkan nasabah.

Gugatan nasabah pada Pengadilan Negeri Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan ditolak oleh Pengadilan Negeri Soppeng dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkompeten mengadili, seharusnya adalah Pengadilan Agama sesuai dengan akad yang ditandatangani oleh para pihak.

14. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Bank Sulselbar pada tahun 2011 telah menerbitkan obligasi sebanyak Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus Milyar rupiah), dengan pembagian Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar) untuk Konvensional dan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar) untuk syariah. Pada bagian konvensional terbagi atas 2 (dua) Seri yaitu seri A sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) dan seri B sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah).

Dalam tahun 2014, PT. Bank Sulselbar tidak pernah melaksanakan *Buy Back* Obligasi yang telah diterbitkannya. Namun, pada tahun 2014 Obligasi Seri A yang diterbitkan PT. Bank Sulselbar dengan

nilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah jatuh tempo dan lunas terbayarkan.

15. Keterbukaan Informasi Lainnya

16.1. Group Corporate Secretary

Pada tanggal 22 November 2012, Group Corporate Secretary didirikan, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/144/DIR/XI/2012 Tanggal 22 November 2012 Tentang Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pembentukan Group Corporate Secretary ini sebelumnya telah memperoleh izin dari Bank Indonesia Makassar sebagaimana disebutkan dalam Suratnya Nomor 14/64/APBU/Mks tanggal 6 November 2012 Perihal Penjelasan Tambahan Mengenai Pembentukan Group Corporate Secretary.

Pembentukan Group Corporate Secretary ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-63/PM/1996 Tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan terutama Peraturan Nomor IX.I.4 tanggal 17 Januari 1996.

16.1.1. Struktur Organisasi Group Corporate Secretary

Direktur Utama Bank membawahi Group Corporate Secretary, dimana Group ini memiliki 2 (dua) departemen yaitu Departemen Komunikasi dan Humas dan Departemen Legal dan Kesekretariatan serta 1 (satu) bagian yang langsung bertanggungjawab langsung kepada Pemimpin Group Corporate Secretary yaitu Asisten Operasional. Pada Departemen Komunikasi dan Humas terdapat 1 (satu) sub Departemen yaitu Sub Departemen Protokol. Per Desember 2014, Pelaksana Tugas Sementara (Plts) Pimpinan Group Corporate Secretary adalah Andi Irvan Wiraguna Roem mengganti Irmayanti Sultan yang menjadi Pemimpin Cabang.

16.1.2. Uraian Pekerjaan Group Corporate Secretary

Secara garis besar tugas dari Group Corporate Secretary adalah :

1. Pengelolaan *corporate image* secara tepat baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media display dan lainnya termasuk pengelolaan website milik bank yang berfungsi sebagai portal layanan.

2. Pengelolan dan pengembangan majalah/bulletin internal dalam rangka edukasi dan informasi kepada karyawan bank.

3. Formulasi langkah strategis atas *corporate action* dalam merespon berbagai informasi pemegang obligasi/investor dan hal-hal yang terkait dengan pasar modal.

4. Penyelenggaraan *shareholder relation* yang mencakup tugas-tugas merespon permintaan informasi dari shareholder termasuk mengkoordinir penyampaian laporan ke BAPEPAM-LK, bursa efek Indonesia, lembaga penunjang pasal modal & kewajiban penyampaian laporan lainnya sehubungan dengan aktivitas obligasi/aksi korporasi lainnya secara tepat waktu.

5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham maupun luar biasa termasuk menyediakan materi LPJ Direksi beserta penyusunan laporan tahunan, company profile, event internal (Raker, Family gathering, ultah bank) dan lain sebagainya.

6. Menjadi counterpart dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan termasuk melakukan penyusunan program/ rencana kerja pelaksanaan CSR/program kemitraan dan Bina lingkungan dan memastikan bahwa pelaksanaannya telah selaras dengan corporate objective yang dilaksanakan secara terarah, terstruktur serta melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan CSR termasuk mengusulkan konsep strategi CSR serta langkah perbaikan yang diperlukan.

7. Mengkoordinir dilakukannya edukasi masyarakat dibidang perbankan termasuk melakukan fungsi pengelolaan customer care melalui penyelesaian pengaduan nasabah secara responsive dan terintegrasi dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

8. Pembinaan hubungan dengan investor/pemegang obligasi/stakeholder yang

mencakup tugas identifikasi target interaksi dan kegiatan lain yang terkait dengan pembinaan intensitas ketertarikan investor/prime customer yang merupakan nasabah target antara lain melalui penyelenggaraan customer gathering atau even sejenis.

9. Penyelesaian proses litigasi berdasarkan skala perkara yang dihadapi, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak luar termasuk penugasan/mewakili Bank dalam melakukan penyelesaian perkara hukum.

16.2. KODE ETIK

Seluruh pegawai PT. Bank Sulselbar wajib melaksanakan Kode Etik yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugasnya. kode etik ini adalah bentuk implentasi dari nilai perusahaan yaitu integritas.

Kode etik diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/55/DIR/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 Tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan, dimana kode etik ini berisikan mengenai, yaitu :

1. Lima Pilar Budaya Kerja PT. Bank Sulselbar
2. Perilaku Pegawai
    1) Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajiban secara tulus ikhlas dengan berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan YME.
    2) Pegawai selalu menjungjung tinggi dan mentaati kode etik bankir Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
    3) Pegawai selalu tanggap terhadap permintaan pasar dan berorientasikan pada pembangunan nasional.
    4) Pegawai selaku berupaya memberikan layanan unggul dengan pendekatan yang bersahabat kepada mitra usahanya.
    5) Pegawai selalu bekerja atas dasar prioritas dan rencana dengan standar mutu kerja yang mungkin namun realitstis.
    6) Pegawai selalu peduli terhadap semua permasalahan di unit kerjanya.
    7) Pegawai selalu melaksanakan pengawasan melekat dan menindaklanjuti hasilnya.
    8) Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh inisiatif serta bertanggungjawab atas mutu hasil kerjanya dengan selalu meningkatkan

profesionalisme dalam melaksanakannya tugas dan kewajibannya.

9) Pegawai selalu melaksanakan komunikasi terbuka dengan saling mengingatkan (asah) , saling menghargai (asih) dan saling membimbing (asuh).

10) Pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban selalu dilandasi semangat kebersamaan.

3. Etika Kerja

1) Patuh dan taat pada ketentuan perundang dan peraturan yang berlaku.

2) Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan bank.

3) Menghindari diri dari persaingan tidak sehat.

4) Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.

5) Menghindari diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.

6) Menjaga kerahasiaan bank dan nasabah.

7) Memperhitungkan dampak merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.

8) Tidak menerima hadiah atau imbalan untuk memperkaya diri dan keluarga.

9) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

4. Etika Jabatan Direksi

1) Etika Keteladanan.

2) Etika Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

3) Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi.

4) Etika berkaitan dengan peluang perseroan.

5) Etika berkaitan dengan keuntungan pribadi.

6) Etika berkaitan dengan benturan kepentingan.

7) Etika berkaitan dengan penyuapan.

8) Etika berkaitan dengan prinsip kehati-hatian

5. Etika Jabatan Dewan Komisaris

   1) Etika berkaitan dengan keteladanan.

   2) Etika berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

   3) Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi.

   4) Etika berkaitan dengan peluan perseroan.

   5) Etika berkaitan dengan benturan kepentingan.

   6) Etika berkaitan dengan penyuapan.

   7) Etika berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kode etik ini berlaku untuk semua tenaga kerja PT. Bank Sulselbar baik outsourcing, kontrak maupun pegawai tetap dan Direksi serta Dewan Komisaris. Agar kode etik ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka telah dibuatkan Pernyataan tahunan yang diperbaruhi setiap tahunnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Perseroaan melalui Group Kepatuhan untuk menerapkan dan menegakkan kode etik ini adalah :

- Sosialisasi kepada seluruh tenaga kerja Bank Sulselbar
- Membuat kotak pengaduan kode etik dimana setiap karyawan atau unsur-unsur bank yang menemukan pelanggaran kode etik untuk segera melaporkan ke Group SDM dengan melampirkan bukti-bukti agar dapat ditindaklanjuti oleh Manajemen Bank Sulselbar.

16.3. *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/134/DIR/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 mengenai Tata Kerja Organisasi Unit Anti Fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ditetapkan bahwa Unit Anti Fraud diwajibkan untuk membuat Pedoman *Whistleblowing System.*

Pedoman *whistleblowing system* ini mengalami hambatan dimana hingga saat ini belum adanya sambungan telepon langsung guna menunjang aktivitas *whistleblowing*. Akibatnya pedoman *Whistleblowing System* belum dibuatkan Surat Keputusan Direksi dan dilaksanakan.

II. Laporan *Good Corporate Governance* Unit Usaha Syariah

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BANK SULSELBAR UNIT USAHA SYARIAH

PERIODE TAHUN 2014

A. Pendahuluan

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) merupakan komitmen yang konsisten sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Bank Sulselbar, yang unit syariahnya meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG sebagaimana tertuang pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Unit Usaha Syariah dan SE No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders PT. Bank Sulselbar dimana UUS berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan internal bank sesuai perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang telah ditetapkan oleh bank yang berlaku secara umum. Pelaksanaan operasional perbankan yang sehat dalam penerapan Good Corporate Governance, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dengan penerapan tata kelola perusahaan.

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan lima prinsip utama yaitu prinsip-prinsip keterbukaan *(transparency)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggungjawaban *(responsibility)*, professional (professionality), dan kewajaran *(fairness)*. PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah senantiasa berupaya untuk melaksanakan prinsip Good Corporate Governance yang meliputi kelima prinsip utama tersebut dengan baik dan menjadi pedoman bagi setiap karyawan untuk senantiasa melakukan peningkatan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

Bank wajib melaksanakan prinsip Good Corporate Governance tersebut dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan organisasi serta wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya dipandang sebagai kewajiban perusahaan untuk memenuhi peraturan, tetapi juga menjadi budaya perusahaan (Corporate Culture), sehingga dapat membangun PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah menjadi organisasi yang kompetitif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang unggul, professional, memiliki integritas dan terbuka terhadap berbagai perubahan yang mengarah kepada perbaikan perusahaan yang akan lebih baik.

B. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Unit Usaha Syariah (UUS) paling kurang harus terwujud dalam :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selaku Supervisi Grup UUS.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3. Penyaluran dana kepada Nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti.
4. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Unit Usaha Syariah (UUS)

Catatan: Sebelumnya supervisi Grup UUS dilakukan oleh Direktur Pemasaran. Setelah RUPS, Direktur pemasaran belum terpilih sehingga supervisi dilakukan langsung Direktur Utama selaku Plt Direktur Pemasaran.

1. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit bagi Unit Usaha Syariah

Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama Bank Sulselbar	1	20.00%	0.20
Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	2	35.00%	0.70
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	10.00%	0.20
Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh Deposan inti	2	10.00%	0.20
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.	2	25.00%	0.50
Nilai Komposit		100.00%	1.80

Predikat : ~~Sangat baik~~/Baik /~~Cukup baik~~/~~Kurang baik~~/~~Tidak baik~~*)

*) coret yang tidak perlu

2. Hasil Assesment atas Pelaksanaan GCG

   a. Hingga saat ini Direktur Utama telah melakukan fungsinya dengan baik, karena pemahamannya makin sempurna dalam perkembangan lini bisnis syariah yang semakin luas dan cepat perkembangannya.
   b. Update keilmuan dan kompetensi sangat diperlukan untuk mempertahankan konsistensi pengawasan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab DPS
   c. Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar walaupun terus melakukan uji petik atas materi produk penyaluran dana dan penghimpunan dana dianggap belum efesien dan efektif.
   d. Transparansi laporan UUS telah dilakukan dengan baik dan telah mentaati prinsip-prinsip GCG.
   e. Complience terhadap aturan-aturan serta SOP atas Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana telah di assesment oleh DPS.
   f. Untuk mengefektifkan unsur-unsur kepatuhan syariah dilakukan rapat rutin bulanan yang membahas isue-isue strategis pada Grup UUS dengan mengikut sertakan grup kepatuhan, GAI dan instansi terkait yang diperlukan.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

   Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah meliputi :

   a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
   b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
   c. Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi, Grup UUS, KCS dan karyawan serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
   d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI bila ada produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
   e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
   f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Hal ini nampak dalam rapat bulanan dan evaluasi triwulanan KCS yang diselenggarakan Grup UUS.

   Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan RUPS, dijalankan dengan baik. Yang menonjol tahun ini adalah setiap pemberian opini syariah sesuai permintaan (demand) UUS selalu mengikut sertakan Grup Kepatuhan dan Grup yang terkait agar opini telah mencakupi pula pertimbangan regulasi.

4. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi sebagai Supervisior UUS dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah dengan syarat:

   a. Anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 3 (tiga) orang yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham/ RUPS dan direkomendasikan DSN-MUI.
   b. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di Makassar.
   c. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota DPS dan atau anggota Direksi maupun Komisaris.

5. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

   a. Dewan Pengwas Syariah yang diangkat oleh RUPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh RUPS. Dewan Pengawas Syariah hadir dan melakukan pertemuan internal sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan yang dihadiri oleh DPS, Grup UUS, Grup Kepatuhan dan Grup-grup yang terkait didalamnya. Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar Syariah menyediakan waktu yang cukup terutama Ketua yang hadir setiap hari memberikan masalah yang muncul, karena telah diberi fasilitas yang memadai. Sedang anggota lain selain wajib hadir sekali sebulan, hadir sesuai waktunya yang tersedia karena mempunyai tugas lain.

      Dewan Pengawas Syariah (DPS) rutin melakukan rapat yang dituangkan dalam risalah ` rapat yang merupakan keputusan bersama dan didokumentasikan dengan baik, karena didukung oleh fasilitas (Komputer, printer, ATK, Dll) dan seorang Sekertaris tetap.

      Adapun jumlah kehadiran DPS pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

Tahun 2014	Frekuensi Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran DPS (orang)
Januari	1	2
Februari	1	2
Maret	1	2
April	2	2
Mei	1	1
Juni	1	2
Juli	2	2
Agustus	1	2
September	1	2
Oktober	2	2
Nopember	-	-
Desember	1	2
	11	

b. Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat 12 kali dalam tahun 2014

Nama	Jumlah Kehadiran (rapat)	% Prosentase
Prof. DR. H. Halide	11	100%
DR. (Hc) K.H. Sanusi Baco, Lc	2	17%
DR. Mukhlis Sufri, M.Si	10	98%

6. Susunan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar per 31 Desember 2014 :

Nama	Jabatan
Prof. H. Halide	Ketua
DR, (Hc) K.H. Sanusi Baco, Lc	Anggota
DR. Mukhlis Sufri, M.Si	Anggota

7. Rangkap Jabatan DPS, pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya sebagai berikut.

Nama DPS	Posisi	% Rangkap Jabatan
Prof. H. Halide	Ketua DPS	- DPS PT. Amanah Finance - DPS BPRS Niaga Madani
DR. Mukhlis Sufri, M.Si	Anggota	- Ketua MES Makassar - Dosen tetap UMI - Tim kerja Pemprov
DR. (HC) Ag. H. Sanusi Baco, Lc	Anggota	- Ketua MUI Sulsel - DPS PT. Amanah Finance

8. Seminar dan Pelatihan yang telah diikuti oleh Dewan Pengawas Syariah

Pelatihan/ Seminar	Tempat/ Lokasi	% Pelaksanaan
Prof. H. Halide	Ketua DPS	- DPS PT. Amanah Finance - DPS BPRS Niaga Madani
DR. Mukhlis Sufri, M.Si	Anggota	- Ketua MES Makassar - Dosen tetap UMI - Tim kerja Pemprov
DR. (HC) Ag. H. Sanusi Baco, Lc	Anggota	- Ketua MUI Sulsel - DPS PT. Amanah Finance

Pelatihan/Seminar	Tempat/ Lokasi	Pelaksanaan
Prof. DR. H. Halide		
- Seminar LDDI tentang Ekonomi Islam	Hotel UIN	22 Februari 2014
- Workshop Pembiayaan Sindikasi oleh Al-IQTISHAD Consulting	Hotel Sofyan Betawi Jakarta	20 Mei 2014
- Seminar tentang Spin Off oleh Asbanda	MTH Tower Jakarta	23 Juni 2014
- Outlook Ekonomi Sulawesi Selatan oleh Bank Sulselbar	Hotel Clarion	17 September 2014
- Forum Riset Keuangan Syariah oleh OJK	Kampus IPB, Dramaga Bogor	14-16 Oktober 2014
- Musyawarah Nasional III MES	Jakarta	20 November 2014
- Riset Stabilitas Sistem Keuangan 2014 oleh BI & OJK	Makassar	27 November 2014
- Ijtima" Sanawi DPS X Tahun 2014	Jakarta	15-18 Desember 2014
DR. (Hc.) KH. Sanusi Baco, Lc		
-	-	-
DR. Mukhlis Sufri, M.Si		
- Seminar Outlook Ekonomi Syariah 2014 oleh Bank Sulselbar	Makassar	20 November 2014
- Sosialisasi & Edukasi Ekonomi dan Perbankan Syariah 2014 oleh Pemprov Sulsel	Pare-Pare/ Bulukumba	13/27 November 2014
- Sekolah Pasar Modal Syariah 2014 oleh MES	Makassar	14 Juni 2014
- Ijtima" Sanawi DPS X Tahun 2014	Jakarta	15-18 Desember 2014

1. Kebijakan Remunerasi PT. Bank Sulselbar UUS

   a. Honor Dewan Pengawas Syariah Tahun 2014

No	Nama	Jabatan	Gaji
1	Prof. H.Halide	Ketua	Rp. 7.000.000,-
2	DR (Hc.) K.H. Sanusi Baco.LC	Anggota	Rp. 5.000.000,-
3	DR. Mukhlis Sufri, SE.M.Si	Anggota	Rp. 5.000.000,-

   b. Fasilitas-fasilitas Dewan Pengawas Syariah

   - Ketua Dewan Pengawas Syariah mendapatkan fasilitas kendaraan dinas kantor PT. Bank Sulselbar.
   - Ketiga Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar mendapatkan fasilitas Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa

   c. Anggota DPS yang menerima remunerasi dalam setahun

Jumlah Remunerasi (non natura) Per orang dlm setahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp. 2 Milyar	-
di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	-
di atas Rp. 500 jt s/d Rp. 1 Milyar	-
Rp. 500 jt ke bawah	3 (tiga)

2. Kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga

   Dewan Pengawas Syariah (DPS) TIDAK MEMILIKI

   a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, sesama anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi serta anggota Komisaris.

   b. Hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga mereka dapat bertindak INDEPENDEN.

3. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi

Selama periode tahun 2014 tidak terdapat transaksi *Buy Back* Saham atau *Buy Back Obligasi* yang dilakukan oleh Bank, karena seluruh saham PT. Bank Sulselbar dimiliki oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

4. Shares Option

PT Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah tidak memberikan *Shares Option* sebagai kompensasi kepada pengurus dan pejabat Bank.

5. Daftar Konsultan, Penasehat atau yang dipersamakan dengan yang digunakan oleh UUS.

No.	Nama Consultan	Kegiatan
1.	PT. Mantra Global Consultan	Core Banking System & Pelaporan ke BI
2.	Arta Jasa	Koneksi ATM
3.	Praweda	BI-RTGS/BI-SSSS

6. Transparansi Keuangan Bank

Kondisi keuangan secara komprehensif telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi UUS maupun Laporan Publikasi. Untuk menginformasikan produk-produknya kepada masyarakat PT. Bank Sulselbar Cq Unit Usaha Syariah melakukan promosi melalui media cetak lokal/daerah, pengumuman pada kantor cabang, brosur dan sebagainya.

7. Sasaran Strategis

Dalam mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan, maka langkah strategis yang dilakukan sama dengan induknya yaitu :

a. Pelayanan Prima yaitu pelayanan dengan sepenuh hati, menjiwai dengan berprilaku 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) setiap saat, memberikan nilai tambah kepada nasabah, memberikan solusi layanan yang cepat dan akurat, menjalankan standar layanan dengan konsisten serta memahami kebutuhan dan keinginan nasabah.

b. Mendukung upaya untuk memperbesar porsi pembiayaan produktif, dimana komposisinya diharapkan sebesar 60% dengan dukungan produk pembiayaan syariah yang variatif.

c. Mendukung upaya penghimpunan Dana Pihak Ketiga masyarakat dengan dukungan produk simpanan syariah, melalui penguatan jaringan Kantor Layanan Syariah (KLS) yang berada pada setiap Kabupaten dan Kota.

d. Berusaha menjadikan Bank Sulselbar sebagai Regional Champion minimal Indonesia Timur.

8. Rencana Pengembangan Organisasi

Terkait dengan pengembangan model bisnis UUS untuk menjadi lebih inklusif dengan memanfaatkan jaringan dan infrastruktur yang dimiliki, maka diperlukan pengembangan layanan syariah yang ada di Kantor Cabang Konvensional dengan melakukan program optimalisasi, dimana pegawai/SDM yang menangani bisnis syariah ditambah dan fungsi layanan funding maupun lending diperkuat. Untuk itu masing-masing layanan syariah akan ditambah pegawainya secara bertahap dimana masing-masing cabang akan ditambah sebanyak 4 orang.

9. Risiko Likuiditas

Dengan pertumbuhan asset pembiayaan, diperlukan pengelolaan sumber pendanaan yang senantiasa dapat dikelola. Dalam mengelola risiko likuiditas Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar berupaya untuk dapat memenuhi setiap kewajiban yang jatuh tempo, menjaga tingkat likuiditas yang optimal, memperbaiki struktur pendanaan dan pembiayaan dengan mengurangi tingkat konsentrasi terhadap nasabah maupun produk tertentu. Mekanisme transmisi Rekening Antar Kantor (RAK) Syariah-Konvensional yang telah ditetapkan merupakan back-up likuiditas UUS.

10. Jumlah Penyimpangan *(internal fraud)*

Selama tahun 2014, tidak terdapat kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai terkait dengan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan (Internal Fraud).

11. Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah selama periode laporan telah diajukan melalui proses hukum. Untuk periode Januari – Desember 2014, terdapat 1 (satu) permasalahan hukum di PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS) dimana debitur melakukan gugatan terhadap eksekusi Hak Tanggungan

jaminan nasabah yang macet. Adapun proses gugatan tersebut sedang dalam proses pengadilan (tanggal 11 Desember 2014).

12. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

    Selama tahun 2014 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi.

13. Wujud kepedulian sosial yang diselenggarakan oleh PT. Bank Sulselbar berperan aktif Bank untuk selalu berkontribusi pada lingkungan sekitarnya dalam bentuk penyaluran dana Kegiatan Sosial telah disampaikan oleh Bank Sulselbar Konvensional yang berjumlah Rp. 5.187.045.200.

14. Pendapatan *non* halal dan penggunaannya

    Tidak terdapat pendapatan *non* halal dan penggunaannya selama tahun 2014.

15. Penerapan Fungsi Kepatuhan

    Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik karena memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Koordinasi antara DPS dengan Grup Kepatuhan telah dijalankan secara rutin, minimal satu kali dalam sebulan dalam rapat rutin DPS.

    Sampai saat ini fungsi kepatuhan masih bergabung dengan personil dari PT. Bank Sulselbar (Konvensional).

16. Penerapan fungsi audit intern

    Pelaksanaan fungsi audit intern pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Grup Audit Intern telah melaksanakan pemeriksaan pada seluruh unit kerja Bank Sulselbar termasuk dalam rangka menilai efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan penerapan *GCG,* dan melaporkan hasilnya pada Manajemen Bank.

    Saat ini Audit Intern PT. Bank Sulselbar terhadap Unit Usaha Syariah (UUS) masih merupakan

satu kesatuan dengan Audit Intern PT. Bank Sulselbar yaitu Grup Audit Intern (GAI), yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap audit yang dilakukan di PT. Bank Sulselbar. GAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui Direktur Utama.

Hasil temuan GAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) memantau apakah telah dilakukan langkah-langkah terkait temuan audit tersebut.

Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun 2014 telah mencakup audit atas Laporan Keuangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang ada pada UUS di PT. Bank Sulselbar.

17. Harapan kami dengan hasil annual meating DPS X oleh DSN-MUI tahun 2014 diharapkan agar fungsi dan peran DPS terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan regulasi OJK menyongsong perkembangan MEA 2014.

C. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah kami sampaikan semoga tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) senantiasa berjalan dengan baik menuju Unit Usaha Syariah yang berdaya saing kuat dalam menghadapi perkembangan yang makin dinamis dan kompetitif terutama menghadapi era MEA tahun 2015 dengan catatan laporan ini masih mengikuti laporan format BI. Dan sambil menunggu format dari OJK kami berharap laporan ini dapat diterima dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

III. Laporan Penilaian Sendiri *(Self Assessment)* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Merujuk kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP, tanggal 29 April 2013, Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, khusus angka romawi X. Laporan Pelaksanaan GCG, huruf B. Laporan pelaksanaan GCG paling kurang terdiri dari :

1) Transparansi Pelaksanaan GCG Bank sebagaimana dimaksud pada angka romawi IX; dan

2) Laporan Penilaian sendiri *(self assesment)* pelaksanaan GCG sesuai periode penilaian tingkat

kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan format sebagaimana Lampiran IV.

3) *Action Plan* dan pelaksanaanya berikut waktu penyelesaian dan kendala/hambatan penyelesaiannya (apabila ada).

Berdasarkan beberapa hal yang telah disebutkan di atas, khususnya angka 2 (dua), maka PT. Bank Sulselbar melakukan penilaian sendiri *(self assesment)* dengan format yang telah ditetapkan, yaitu :

A. Laporan Semester I Tahun 2014

Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (disingkat PT. Bank Sulselbar).

Posisi : Semester I Tahun 2014

Hasil Penilaian Sendiri *(Self Assessment)* Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	**Definisi Peringkat**
Individ-ual	**3 (tiga)**	Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **Cukup Baik.** Namun terdapat kelemahan yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang lebih dari manajemen bank.
Konsoli-dasi	Bank Sulselbar tidak memiliki anak usaha.	
Analisis		

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. ***Governance Structure***

- Faktor-faktor positif aspek *Governance structure* PT. Bank Sulselbar adalah :

1) Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan memiliki keinginan untuk meningkatkan/memperbaiki *Good Corporate Governance* Bank Sulselbar, melalui semua prasarana/struktur yang tersedia.

2) Jumlah Komisaris Independent Bank melebihi 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

3) Satuan kerja Kepatuhan Independent terhadap satuan kerja operasional.

4) Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

- Faktor-Faktor negatif aspek *Governance structure* PT. Bank Sulselbar adalah :

1) Bank belum memiliki Sistem Operasional Prosedur yang mengatur mengenai benturan kepentingan.

2) Bank belum memiliki suatu pedoman yang mengatur mengenai mekanisme nominasi Direksi dan Dewan. Hal ini tercermin dari pelaksanaan nominasi yang baru dilakukan mendekati atau setelah masa jabatan Direksi dan/atai Komisaris berakhir sehingga menyebabkan adanya rangkap jabatan atau Pelaksana Tugas Sementara (PLTS).

3) Tidak terdapatnya unsur Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan dalam susunan keanggotaan Komite Audit Bank. Selain itu, belum diketahui pula kompetensi masing-masing anggota dan kesesuaiannya dengan PBI dan SEBI GCG bagi Bank Umum.

4) Bank belum menuangkan standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB) dalam Dokumen tertulis dan bank juga belum melakukan pengkinian terhadap *Internal Audit Charter* serta Pedoman Audit Intern.

2. ***Governance Process***

- Faktor-faktor Posifit aspek *Governance Process* PT. Bank Sulselbar adalah :

1) Dewan Komisaris telah melakukan pengarahan, pemantauan evaluasi terhadap kebijakan strategis bank sebagai wujud pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu: pengawasan.

2) Direksi bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan bank.

3) Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam PBI Fungsi Kepatuhan.

- Faktor-faktor negatif aspek *Governance Process* PT. Bank Sulselbar adalah :

1) Bank belum transparan/kurang memberikan informasi terhadap produk bank sesuai dengan kentuan Bank Indonesia.

2) Pelaksanaan rencana bisnis bank belum berjalan efektif, dimana masih terdapat rencana bisnis yang tidak bisa diselesaikan sesuai periodenya.

baikan SOP masih disusun secara parsial dan hal tersebut dapat membingungkan pegawai dalam merujuk ketentuan internal/SOP dimaksud.

4) Bank belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi kinerja GAI periode 2008 hingga 2010 yang dilakukan oleh BPKP

3. ***Governance Outcome***

- Faktor-faktor positif aspek *Governance Outcome* PT. Bank Sulselbar adalah :

  1) Komite-komite yang dimiliki oleh Bank telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

  2) Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya telah diterima oleh Pemegang Saham melalui RUPS.

  3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan modal yang dimilikinya guna menyerap risiko kerugian.

- Faktor-faktor negatif aspek *Governance Outcome* PT. Bank Sulselbar adalah :

  1) Bank belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

  2) Bank juga belum dapat membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank.

  3) Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern yang telah ditetapkan oleh Bank.

  4) Pelaksanaan rapat-rapat komite dinilai belum dilakukan secara efektif dan belum menghasilkan rekomendasi perbaikan yang optimal serta tidak adanya pengungkapan perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* pada notulen rapat Komite.

B. Laporan Semester II Tahun 2014

Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (disingkat PT. Bank Sulselbar).

Posisi : Semester II Tahun 2014

Hasil Penilaian Sendiri *(Self Assessment)* Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat

Individual	**3 (tiga)**	Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **Cukup Baik.** Namun terdapat kelemahan yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang khusus dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank.
Konsolidasi	Bank Sulselbar tidak memiliki anak usaha.	
Analisis		

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. ***Governance Structure***

- Faktor-faktor positif aspek *Governance structure* PT. Bank Sulselbar adalah :

  1) Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulselbar terpilih merupakan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, dipilih dan diangkat oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Dan sebelum menjalankan jabatannya telah lulus *fit and Proper test* dan memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

  2) Jumlah Komisaris Independent Bank melebihi 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

  3) Pedoman tata Kerja Direksi Bank Sulselbar telah dievaluasi.

  4) Satuan kerja Kepatuhan Independent terhadap satuan kerja operasional.

- Faktor-Faktor negatif aspek *Governance structure* PT. Bank Sulselbar adalah :

  1) Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau

penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun belum dapat berjalan dengan baik sehingga menyebabkan adanya Pelaksana Tugas sementara baik pada jabatan pada Dewan Komisaris maupun Direksi.

2) Sistem informasi yang dimiliki oleh Bank Sulselbar belum cukup handal. Hal ini dibuktikan masih adanya kesalahan dan selisih pada laporan keuangan.

3) Bank Sulselbar belum memiliki pedoman benturan kepentingan.

4) Tidak adanya Pihak independent yang ahli pada bidang hukum pada Komite Audit.

5) Pelaksanaan rapat-rapat komite belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini dibuktikan pada risalah rapat yang tidak memuat keterangan terkait adanya *dissenting opinions.*

2. ***Governance Process***

- Faktor-faktor Posifit aspek *Governance Process* PT. Bank Sulselbar adalah :

  1) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi tidak pernah membuat surat kuasa umum kepada pihak lain sehingga mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

  2) Bank Sulselbar telah melakukan kaji ulang atas efektifitas pelaksanaan kerja Group Audit Intern dan Kepatuhan terhadap SPFAIB yang dilakukan oleh pihak Independent yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

  3) Pelaksanaan audit laporan keuangan Bank Sulselbar dilakukan oleh Akuntan Publik yang terdaftar pada Bank Indonesia dan mendapatkan izin dari Menteri Keuangan serta merupakan rekomendasi dari Komite Audit.

- Faktor-faktor negatif aspek *Governance Process* PT. Bank Sulselbar adalah :

  1) Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang berorientasi expose

  2) Langkah-langkah dalam menciptakan budaya kepatuhan belum dapat dilaksanakan maksimal oleh Group Kepatuhan.

  3) Masih banyaknya temuan audit dan rekomendasi serta komitmen baik kepada Pemeriksa Intern maupun Ekstern antara lain Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dilaksanakan atau ditindaklanjuti baik oleh Direksi maupun Dewan Komisaris.

  4) Bank belum mengkinikan pedoman Audit Intern dan *Internal Audit Charter* sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

  5) Jumlah auditor dengan jaringan kantor tidak sebanding sehingga mengakibatkan adanya kelebihan beban kerja.

3. ***Governance Outcome***

- Faktor-faktor positif aspek *Governance Outcome* PT. Bank Sulselbar adalah :

1) Bank Sulselbar tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan yang dimilikinya guna menyerap risiko kerugian.
2) Bank sulselbar telah menyusun laporan *Good Corporate Governance* secara transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan kondisi yang terjadi pada Bank Sulselbar.
3) Rencana stategis bank baik dalam bentuk *corporate plan* maupun *business plan* didukung oleh pemegang saham. Hal ini buktikannya dengan disetujuinya rencana strategis tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- Faktor-faktor negatif aspek *Governance Outcome* PT. Bank Sulselbar adalah :

1) Rencana strategis bank yang telah disusun oleh Bank Sulselbar sebagian besar tidak dapat direalisasikan.
2) Dukungan struktur organisasi & delegasi kewenangan yang lemah.
3) Penerapan manajemen risiko belum dilakukan secara efektif.
4) Direksi belum berhasil membangun budaya kepatuhan pada Bank Sulselbar.
5) Tidak terdokumentasinya penyelesaian benturan kepentingan pada Bank.

Demikian laporan *Good Corporate Governance* ini, atas penerimaannya diucapkan terima kasih.

Makassar, Februari 2015

PT. Bank Pembangunan Daerah

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Dewan Komisaris

H. Andi Muallim
Plts. Komisaris Utama

Direksi

H. A.M. Rahmat Alimuddin
Direktur Utama

H. Harris Saleng
Direktur Kepatuhan

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI *(SELF ASSESSMENT)* PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Tujuan

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.

2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.

3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- kecukupan transparansi laporan;
- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- perlindungan konsumen;
- obyektivitas dalam melakukan *assessment*/audit;
- kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Bank Indonesia.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
A. Governance Structure	
1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris pada Bank Sulselbar melebih dari 3 (tiga) orang namun tidak melebihi jumlah anggota Direksi.
2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	2) Kesemua anggota Dewan Komisaris berdomisili di tempat kedudukan Bank Sulselbar yaitu Makassar, Sulawesi Selatan.
3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	3) 3 (tiga) dari 4 (empat) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independent.
4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: a) pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b) yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;	4) Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (Satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank, namun Bank Sulselbar tidak memiliki anak perusahaan.
5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.	5) Terdapat Komisaris Independent yang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada 2 (dua) Komite pada Bank Sulselbar.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
6) Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi.	6) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga antar anggota Dewan Komisaris maupun para Direktur.
7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	7) Dalam melakukan pekerjaannya anggota Dewan Komisaris berpedoman pada pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris.
8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	8) Bukti bahwa anggota Dewan Komisaris memiliki integritas salah satunya adalah telah lulus *fit & Proper test* Bank Indonesia.
9) Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak- pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	9) Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dari mantan Direksi atau eksekutif Bank, sehingga tidak perlu melalui masa *cooling off.*
10) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	10) Seluruh Komisaris Independent tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya termasuk Direksi dan pemegang saham.
11) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	11) Sebelum menjalankan tugasnya seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test.*

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
12) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	12) Kesemua anggota Dewan Komisaris mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan jabatannya.
13) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	13) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar secara berkelanjutan agar sesuai dengan tugas dan jabatannya.
14) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	14) Komposisi Dewan Komisaris tidak pernah dintervensi oleh pemilik/pemegang saham.
B. Governance Process	
1) Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1) Kesemua anggota Dewan Komisaris sebelum diangkat dan dipilih oleh Pemegang Saham melalui RUPS LB telah memperoleh persetujan dari Komite Remunerasi dan Nominasi
2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip- prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	2) Dewan Komisaris Bank Sulselbar berusaha agar prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dalam kegiatan usaha-usaha Bank dengan memberikan nasehat kepada Direksi melalui Surat Dewan Komisaris.
3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	3) Dewan Komisaris Bank Sulselbar telah melakukan tugas sebagai Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi walaupun hal tersebut belum cukup.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	4) Dewan Komisaris Bank Sulselbar senantiasa berusaha untuk menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.
5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	5) Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.
6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	6) Dewan Komisaris dibantu dengan Komite Audit melakukan pemantauan tindaklanjut Direksi/ Manajemen terhadap hasil pemeriksaan dan masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Direksi.
7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	7) Belum pernah terjadi kejadian ini sebagaimana ditanyakan.
8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	8) Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris belum sepenuh dilaksanakan secara independen.
9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	9) Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) Komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi
10) Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris	10) Seluruh anggota Komite diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi berdasarkan rekomdasi dari Dewan Komisaris

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa tugas Komite dijalankan secara efektif dikarenakan anggota Dewan Komisaris terdapat dalam Komite tersebut.
12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	12) Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di tempat kedudukan Bank Sulselbar sehingga waktu dan kesempatan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi apabila anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	13) Semua rapat Dewan Komisaris berjalan sesuai agenda dan diselenggarakan lebih dari 4 (empat) kali.
14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	14) Kesemua keputusan Direksi diambil secara musyawarah dan mufakat atau suara terbanyak apabila tidak terjadi musyawarah mufakat
15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	15) Dewan Komisaris Bank Sulselbar hanya mempergunakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Sulselbar.
16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	16) Dewan Komisaris Bank Sulselbar mempergunakan fasilitas yang telah disetujui oleh RUPS dan Bank Sulselbar.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
17) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	17) Dewan Komisaris Bank Sulselbar independent terhadap intervensi pemegang saham
C. Governance Outcome	
1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions yang terjadi secara jelas.	1) Keseluruhan rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan risalah rapat tersebut disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris termasuk dissenting opinions apabila ada.
2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	2) Keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait telah menerima notulen rapat.
3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	3) Tidak kesemua hasil rapat dapat direkomendasikan atau diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi
4) Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan: a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) *shares option* yang dimilik Dewan Komisaris.	4) Dalam laporan Pelaksanaan GCG telah dijelaskan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham lebih dari 5 % (lima persen) pada perusahaan, tidak memiliki hubungan keuangan, keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi dan hanya menikmati remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dan Bank Sulselbar. Untuk program share option, Bank Sulselbar tidak memiliki.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan *(stakeholders)*. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan Perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.	5) Telah terjadi peningkatan dalam kinerja bank, penyelesaian permasalahan dan pencapaian hasil yang sesuai keinginan pemangku kepentingan namun hal tersebut masih perlu ditingkatkan.
6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	6) Tidak terdapat intervensi/gangguan dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan berkurangnya keuntungan bank.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
B. Governance Structure	
1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.	1) Berdasarkan anggaran dasar Bank Sulselbar jumlah anggota Direksi adalah 4 (empat) orang dan dimungkinkan bertambah.
2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	2) Keseluruhan anggota Direksi Bank Sulselbar berdomisili ditempat kedudukan Bank Sulselbar yaitu Makassar, Sulawesi Selatan.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 (dua) tahun).	3) Keseluruhan anggota Direksi Bank Sulselbar telah memiliki pengetahuan lebih dari 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif bank.
4) Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	4) Tidak terdapat anggota Direksi Bank Sulselbar yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun perusahaan lainnya.
5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	5) Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) pada perusahaan lainnya.
6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	6) Keseluruhan anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua.
7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	7) Anggota Direksi sebelum dipilih menjadi Direksi oleh RUPS telah memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	8) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib namun pedoman tersebut perlu dilakukan perubahan mengikuti struktur organisasi dan peraturan yang berlaku

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
9) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	9) Dalam melakukan pekerjaannya Direksi tidak melibatkan konsultan atau jasa profesional lainnya kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.
10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	10) Seluruh anggota Direksi Bank Sulselbar telah lulus *fit and Proper test* sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
11) Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.	11) Direktur Utama Bank Sulselbar berasal dari Pihak Independent.
12) Seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	12) Seluruh Direksi Bank Sulselbar telah lulus *fit and Proper test,* termasuk Direktur Kepatuhan yang terpilih kembali.
13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	13) Secara keseluruhan anggota Direksi memiliki Kompetensi dan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	14) Kemauan dan kemampuan untuk belajar dimiliki oleh Direksi Bank Sulselbar. Hal ini dibuktikan dengan pelatihan-pelatihan yang diikuti guna menambah pengetahuan dan mengimplementasikan dalam tugasnya
15) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	15) Budaya belajar merupakan salah satu budaya yang dimiliki oleh Direksi Bank Sulselbar guna menunjang tugasnya.
16) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	16) Jumlah/komposisi Direksi telah sesuai dengan anggaran dasar Bank Sulselbar dimana jumlah Direksi minimal 4 (empat) dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.
B. Governance Process	
1) Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	1) Seluruh anggota Komite yang diangkat oleh Direksi merupakan keputusan dari Dewan Komisaris.
2) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	2) Direksi tidak pernah memberi kuasa umum melainkan kuasa khusus dan hal ini tidak mengalihkan tugas dan fungsi Direksi
3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	3) Direksi bertanggungjawab penuh terhadap kepengurusan Bank.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	4) Dalam menjalankan atau mengelola Bank didasari pada anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Perseroan Terbatas.
5) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.	5) Masih terdapat intervensi dari pemegang saham namun hal tersebut masih dapat ditangani oleh Direksi.
6) Direksi telah melaksanakan prinsip- prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	6) 5 (lima) prinsip GCG selalu pergunakan dalam melakukan tugasnya oleh Direksi.
7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	7) Tidak semua hasil temuan ditindaklanjuti oleh Direksi
8) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.	8) Setiap permintaan data dari Dewan Komisaris diberikan tepat waktu, lengkap, akurat dan terkini.
9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	9) Kebijakan/keputusan yang dibuat oleh Direksi berdasarkan kepada hasil musyawarah mufakat atau melalui suara terbanyak apabila tidak ditemukan kata sepakat.
10) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.	10) Tidak semua keputusan Direksi dapat diimpelemntasikan. Hal ini terkadang tidak adanya kemauan dari bawahan untuk menjalani keputusan Direksi tersebut.
11) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	11) Setiap keputusan/kebijakan yang diambil oleh Direksi ditempuh melalui mekanisme Rapat Direksi.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	12) Seluruh Direksi Bank Sulselbar hanya mempergunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan RUPS.
13) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	13) Direksi Bank Sulselbar tidak ada yang menggunakan fasilitas kantor demi kepentingan pribadi dan keluarganya.
14) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	14) Terdapat intervensi, namun masih dapat dikendalikan oleh Direksi.
C. Governance Outcome	
1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1) Direksi telah menyerahkan pertanggungjawabannya atas pelaksanaan tugas Direksi kepada RUPS.
2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	2) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direksi telah diterima oleh RUPS.
3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	3) Setiap kebijakan Direksi khususnya terkait kepegawaian telah disampaikan kepada pegawai antara lain melalui sosialisasi.
4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.	4) Setiap arah bisnis yang ditentukan oleh Direksi disosialisasikan melalui Surat Edaran Direksi ke setiap cabang.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* yang terjadi dalam rapat Direksi.	5) Seluruh rapat Direksi baik yang terdapat *dissenting opinions* maupun tidak telah dibuatkan notulen rapat.
6) Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) *shares option* yang dimiliki Direksi.	6) Dalam laporan pelaksanaan GCG, diungkapkan bahwa Direksi tidak memiliki saham mencapai 5% (lima persen) pada Bank maupun perusahaan lain dan antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan darah serta hanya menikmati Fasilitas yang ditetapkan oleh RUPS dan Bank. Tidak terdapat program shares option untuk Direksi pada Bank Sulselbar.
7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	7) Target laba yang ditetapkan dalam rencana bisnis pada tahun 2013 tercapai dan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bank dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi.
8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.	8) Adanya peningkatan kinerja individu mendorong tercapainya target. Hal ini semua disebabkan karena sistem pelatihan yang mulai berjalan dengan baik.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	9) Penerapan budaya pembelajaran secara berlanjutan diterapkan untuk seluruh karyawan guna meningkatkan prestasi dan pencapaian target yang ditetapkan oleh Bank.
10) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/ atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/ atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.	10) Terdapat intervensi dari pemilik namun hal tersebut tidak mengganggu secara signifikan dan tetap memberikan keuntungan sesuai dengan yang ditetapkan.
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
A. Governance Structure	
1) Komite Pemantau Risiko	
a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.	a) Pada Komite Audit Bank Sulselbar diketuai oleh Komisaris Independent dan 2 (dua) orang anggota Komite masing ahli di bidang keuangan/ akutansi dan hukum/perbankan. Namun Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Pihak Independent yang mewakili bidang Hukum/ perbankan tidak diketahui Kompetensinya.
b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.	b) Komite Audit Bank Sulselbar diketuai oleh Muhammad Amri yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris dari pihak independent.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	c) Secara keseluruhan semua anggota Komite Audit merupakan Pihak Independent.
d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	d) Kesemua anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2) Komite Pemantau Risiko	
a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.	a) Pada Bank Sulselbar Komite Pemantau Risiko dinamakan Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud. Komite ini terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) dari Komisaris Independent dan 2 (dua) dari Pihak Independent.
b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.	b) Komite ini diketuai oleh Komisaris Independen.
c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	c) 51% (lima puluh satu persen) berasal dari pihak independent dan sisa berasala dari Pensiunan Pejabat Eksekutif Bank Sulselbar.
d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	d) Kesemua anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
3) Komite Remunerasi dan Nominasi	
a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.	a) Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri atas 5 (lima) orang, 1 (satu) dari anggota Dewan Komisaris Independent dan 1 (satu) orang dari Pihak SDM Bank Sulselbar.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.	b) Pejabat eksekutif Bank Sulselbar yang ditunjuk untuk mewakili merupakan Pemimpin Group SDM yang notabene memiliki ilmu mengenai remunerasi, nominasi dan *succession plan.*
c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.	c) Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar diketuai oleh anggota Dewan Komisaris dari Pihak Independent.
d) Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.	d) 2 (dua) anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
e) Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka: (1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan (2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan Bank.	e) Di Bank Sulselbar remunerasi dan nominasi digabung sehingga menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.	4) Tidak terdapat unsur Direksi pada Komite Audit dan Pemantau Risiko

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	5) Terdapat 1 (satu) anggota Komite Audit yang merangkap jabatan pada Komite Audit di PT. Semen Tonasa. Namun dalam melaksanakan tugas anggota komite ini mempunyai kompetensi, kriteria, independensi, dan kerahasian serta Kode etik Bank Sulselbar.
6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	6) Kesemua anggota komite dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan keluarga.
7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan.	7) Semua pihak independen yang merupakan pejabat eksekutif Bank Sulselbar telah melalui masa tunggu *(cooling off)* selama 6 (enam) bulan.
8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.	8) Lebih dari 51% (lima puluh satu persen) tingkat kehadiran anggota Independent dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dalam rapat.
9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.	9) Lebih dari 51% (lima puluh satu persen) tingkat kehadiran anggota Komite yang berasal dari pihak independen dalam rapat Komite Remunerasi
10) Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	10) Tidak ada intervensi pemilik dalam penentuan anggota Komite-Komite pada Bank Sulselbar.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
B. Governance Process	
1) Komite Audit	
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:	
a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.	a) Tugas utama dari Komite audit antara lain adalah melakukan pemantauan, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjutnya. Kesemua tugas tersebut telah dilakukan/dilaksanakan
b) Komite Audit telah melakukan review terhadap: (1) pelaksanaan tugas SKAI; (2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku; (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan (4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.	b) Kesemua tugas untuk mereview pelaksanaan tugas SKAI (GAI), kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akutansi yang berlaku dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas segala temuan dari SKAI, Akuntan Publik dan Bank Indonesia telah dilaksanakan. Bentuk pelaksaan tugas tersebut dilakukan dengan cara memberikan masukan/memorandum kepada Dewan Komisaris.
c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.	c) Komite Audit Bank Sulselbar telah memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Dewan Komisaris untuk Akuntan Publik dan KAP.
2) Komite Pemantau Risiko	

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:	
a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;	a) Komite Pemantau Risiko Bank Sulselbar telah melakukan pemantauan risiko, evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, namun itu semua masih jauh dari kata sempurna.
b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	b) Komite Pemantau Risiko setiap saat melakukan rapat dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) untuk mengevaluasi kinerja dari SKMR tersebut.
3) Komite Remunerasi dan Nominasi	
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:	
a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: (1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; (2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.	a) Komite remunerasi telah memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Direksi terkait remunerasi pejabat eksekutif dan pegawai.
b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.	b) Untuk kebijakan nominasi, komite telah memiliki kebijakan tersebut dan penerapannya telah dilaksanakan pada pemilihan Direksi tahun 2013 serta disampaikan kepada RUPS. Namun Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan mekanisme dimiliki belum berjalan baik, hal ini dibuktikan adanya PLTS Direksi dan Dewan Komisaris.
c) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.	c) Tidak semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan rekomendasi dari Komite Nominasi dan remunerasi.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.	d) Kesemua anggota Dewan Komisaris dari Pihak Independen sebelum dipilih dan diangkat oleh RUPS telah memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.	4) Rapat Komite Bank Sulselbar diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan bank.
5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	5) Kesemua keputusan yang diambil didasari pada musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	6) Kesemua hasil rapat komite disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris menyurati Direksi untuk diberikan nasehat atau masukan.
7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.	7) Tidak terdapat intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas komite.
C. Governance Outcome	
1) Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaaan pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.	1) Kesemua risalah rapat komite termasuk *dissenting opinions* telah didokumentasikan dengan baik oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Namun Rapat Komite dilakukan secara gabungan dan hal ini tidak sesuai dengan PBI tentang GCG.
2) Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.	2) Kesemua komite telah melaksanakan fungsinya, antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
Penanganan Benturan Kepentingan	
A. Governance Structure	
Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai: 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; 2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1) Kejadian benturan kepentingan hingga saat ini belum terjadi. 2) Kebijakan yang mengatur benturan kepentingan terdapat dalam kode etik pegawai dan kode etik tersebut wajib dipatuhi serta dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan hukuman bahkan pemecatan.
B. Governance Process	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Sehubungan tidak adanya benturan kepentingan maka tidak ada suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan
C. Governance Outcome	
1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1) Tidak terdapat benturan kepentingan.
2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.	2) Kesemua kegiatan operasional Bank Sulselbar bebas dari benturan kepentingan.
3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	3) Bank Sulselbar dapatlah dinyatakan berhasil sehubungan dengan tidak adanya benturan kepentingan.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	
A. Governance Structure	
1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.	1) Grup Kepatuhan independent terhadap Satuan Kerja Operasional.
2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.	2) Pengangkatan, pemberhentian Direktur Kepatuhan dilakukan melalui mekanisme RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi
3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	3) Sumber daya pada group kepatuhan belum dapat dinyatakan cukup. Hal ini disebabkan kurangnya pelatihan terhadap SDM yang ada dan kurangnya SDM pada Grup Kepatuhan.
B. Governance Process	
1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:	1) Direktur Kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dan peraturan lainnya, melalui :
(1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;	(1) Tercakup dalam pedoman Grup Kepatuhan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;	(2) Setiap kebijakan, aktivitas atau kegiatan baru telah mendapatkan opini Direktur Kepatuhan.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang;	(3) Direktur Kepatuhan memantau komitmen bank kepada Bank Indonesia atau otoritas keuangan secara berkala.
b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;	b) Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara triwulanan kepada Direktur Utama tembusan Dewan Komisaris.
c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;	c) Perumusan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan tercantum pada Bab IV dan Bab V Buku Pedoman Fungsi Kepatuhan.
d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;	d) Direktur Kepatuhan melalui memonya telah mengusulkan kebijakan kepatuhan kepada Direktur Utama
e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;	e) Telah dilaksanakan melalui memorandum Direktur Kepatuhan.
f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang- undangan yang berlaku;	f) Sebelum kebijakan tersebut disetujui dimintakan kajian Dirkep.
g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;	g) Untuk meminimalkan risiko kepatuhan bank, Direktur Kepatuhan (Dirkep) telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi telah ditindaklanjuti.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	h) Melakukan review terhadap kebijakan/keputusan yang diambil Direksi setiap saat.
i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.	i) Membuat rencana kerja yang matang guna meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2) Penunjukan Direktur Kepatuhan berdasarkan keputusan RUPS dan peraturan lainnya yang berlaku.
3) Direksi telah:	3) Direksi telah
a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;	a) Setiap kebijakan yang dibuat oleh Direktur Kepatuhan dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan telah disetujui oleh Direksi.
b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;	b) Setiap peraturan baru telah dikomunikasikan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi atau media lainnya yang ada pada Bank Sulselbar.
c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.	c) Pelaksanaan fungsi kepatuhan tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan semata namun juga wajib dijalankan oleh Direksi lainnya, oleh karenanya pelaksanaan fungsi kepatuhan ini merupakan tanggungjawab seluruh Direksi.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:	4) Group kepatuhan telah :
a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;	a) Membuat langkah-langkah guna terciptanya budaya kepatuhan setiap tahunnya melalui rencana bisnis.
b) melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring,* dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;	b) Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-harinya Grup Kepatuhan melakukan
c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	c) Grup kepatuhan dalam kegiatan sehari-harinya disamping atas permintaan kajian juga melakukan kajian terhadap SOP-SOP atau kebijakan-kebijakan yang ada sekarang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d) melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	d) Dilaksanakan setiap saat berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkini dan terakhir.
e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;	e) Upaya-upaya yang ditempuh untuk memastikan bahwa kebijakan dan/atau prosedur yang dimiliki sesuai aturan yang berlaku adalah dengan mengirimkan memorandum melalui Direktur Kepatuhan kepada Direksi lainnya untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap kebijakan/prosedur.
f) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.	f) Antara lain memberikan masukan kepada Direktur Kepatuhan dan memastikan pemberian kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
C. Governance Outcome	
1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.	1) Laporan pelaksanaan Direktur Kepatuhan yang dikirim setiap semesternya telah disampaikan tepat waktu ke Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya
2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.	2) Isi dari laporan pelaksanaan Direktur Kepatuhan tersebut berdasarkan kepada PBI Fungsi Kepatuhan
3) Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.	3) Jumlah denda yang diberikan meningkat dibandingkan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan dengan Grup Kepatuhan jauh dari kata bagus.
4) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.	4) Bank belum berhasil membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional namun untuk pengambilan kebijakan sudah lebih baik.
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	
A. Governance Structure	
1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1) Struktur organisasi Grup Audit Intern (GAI)/SKAI telah disesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); b) membentuk SKAI; c) menyusun panduan audit intern.	2) Bank telah menyusun piagam audit *(Internal Audit Charter)*, membentuk GAI yang melakukan fungsi pengawasan *(ex-post)* dan buku panduan audit intern, namun belum dikinikan.
3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.	3) GAI Bank Sulselbar merupakan unit kerja yang independent.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
4) Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	4) Sumber daya yang dimiliki oleh GAI saat ini, masih dapat dikatakan kurang dengan semakin kompleksnya aktivitas usaha dan permasalahan yang ada serta jaringan kantor. Selain itu, belum adanya pemetaan beban kerja dan kebutuhan tenaga audit internal ideal.
B. Governance Process	
1) Direksi bertanggung jawab atas:	1) Direksi bertanggungjawab atas :
a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkat manajemen	a) Segala struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern bank untuk setiap level manajemen
b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.	b) Termasuk tindak lanjut temuan audit tersebut sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.
2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	2) Fungsi audit intern telah diterapkan secara efektif pada seluruh aspek kegiatan usaha baik yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan Bank dan Masyarakat
3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.	3) Kaji ulang terhadap pelaksanaan kerja GAI dan kepatuhan terhadap SPFAIB dilakukan oleh pihak eksternal yang telah melakukan kerjasama dengan Bank minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali.
4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.	4) Untuk tingkat kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan secara keseluruhan masih kurang dari kata memadai.
5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.	5) Terdapat penyimpangan namun masih dianggap wajar.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	6) Untuk peningkatan mutu keterampilan SDM GAI dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.	7) Pelaksanaan fungsi pengawasan secara independen oleh GAI jauh dari kata baik.Masih banyak ditemukan kekurangan.
8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang- kurangnya meliputi penilaian: a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; c) kualitas kinerja.	8) Tugas-tugas yang telah Grup Audit Intern yang telah dilakukan adalah melakukan evaluasi sistem pengendalian intern bank guna meningkatkan kinerja dari GAI itu sendiri dalam melakukan pemeriksaan.
9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.	9) Seluruh temuan GAI telah dilaporkan kepada Direktur Utama sebagai Supervisinya dengan tembusan ke Direktur Kepatuhan. Apabila terdapat temuan signifikan dilaporkan ke Bank Indonesia.
10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*.	10) Setiap tindaklanjut yang dilakukan oleh *auditee* dilaporkan ke Direktur Utama dan GAI. Bila tindaklanjut *auditee* tersebut tidak benar, maka GAI meminta perbaikan kembali dan hal ini merupakan salah satu bentuk pemantau GAI.
11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.	11) Pedoman kerja, sistem dan prosedur belum pernah dilakukan pengkinian.
C. Governance Outcome	

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	1) Tidak terdapat laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaporkan kepada RUPS.
2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.	2) Terdapat temuan-temuan yang berulang baik pada cabang yang sama maupun berbeda.
3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.	3) GAI tidak bersifat obyektif dalam melakukan audit. Hal ini dibuktikan dimana terdapat Auditor yang memeriksa cabang dimana Auditor tersebut menjadi Pimpinan Cabang.
4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja. b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip- prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern. c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.	4) Fungsi Audit intern dilaksanakan secara memadai namun perlu lebih ditingkatkan terutama terkait keindepensian dari auditor itu sendiri. Untuk jumlah dan kualitas dari Auditor itu belum dapat dipenuhi dari apa yang diharapkan.
Penerapan fungsi audit ekstern	

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
A. Governance Structure	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek- aspek: 1) kapasitas KAP yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) ruang lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud.	Aspek-aspek minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank Sulselbar.
B. Governance Process	
1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia.	2) Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank merupakan akuntan publik yang terdaftar pada Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK
2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	3) Akuntan Publik yang ditunjuk pada tahun 2013 ini, merupakan akuntan publik pengganti. Penggantian ini disebabkan karena KAP yang lalu telah melakukan pemeriksaan selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
3) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.	3) Penunjukan Akuntan Publik telah disetujui oleh RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk telah bekerja secara independent.
5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	5) Akuntan Publik sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.	6) Akuntan publik yang bertugas di Bank Sulselbar bekerja dengan independen dan profesional.
7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *Management Letter* kepada Bank Indonesia.	7) *Manajemen letter* telah dilaporkan oleh Akuntan Publik.
C. Governance Outcome	
1) Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP yang ditunjuk.	1) *Management Letter* dan hasil audit yang diberikan oleh Akuntan Publik dan KAP menunjukkan permasalahan signifikan yang perlu dilakukan penyelesaian segera.
2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.	2) Cakupan hasil audit Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.	3) Auditor dari Akuntan Publik dan KAP bersifat obyektif dan tidak dapat diintervensi.
Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
A. Governance Structure	
1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI,SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.	1) Bank memiliki Grup Manajemen Risiko, dengan struktur organisasi terdapat 2 (dua) departement dan disupervisi secara langsung oleh Direktur Kepatuhan. Disamping itu bank juga memiliki komite Pemantau Risiko, Grup Audit Intern dan Grup Kepatuhan.
2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.	2) Bank memiliki kebijakan manajemen risiko dan prosedur, namun untuk penetapan limit risiko belum memadai.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
B. Governance Process	
1) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas, diantaranya:	1) Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait manajemen risiko yang telah dilaksanakan antara lain :
a) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);	a) Menyetujui kebijakan manajemen risiko namun tidak termasuk *risk appetite* dan *risk tolerance.*
b) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;	b) Melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko namun tetap tidak ada perubahan.
c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.	c) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan nasehat terkait kebijakan Manajemen Risiko Bank.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
2) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya: a) menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud; b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan; d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan; e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;	2) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya terkait dengan Manajemen Risiko namun masih perlu ditingkatkan.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko; g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; h) memastikan pelaksanaan langkah- langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI; i) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif; j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; k) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.	

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.	3) Sistem yang ada belum lengkap dan tidak handal.
C. Governance Outcome	
1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.	1) Penerapan manajemen risiko bank belum berjalan secara efektif, masih dikerjakan secara parsial.
2) Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	2) Dewan Komisaris dan Direksi belum dapat melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	3) Bank cenderung konservatif, hal ini disebabkan karena Bank menyadari kekurangan yang dimilikinya.
Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar *(large exposure)*	
A. Governance Structure	
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.	Bank telah memiliki pedoman yang memadai terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
B. Governance Process	
1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku.	1) Telah dilakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	2) Proses untuk memastikan penyediaan dana kepada Pihak terkait dan penyediaan dana besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.	3) Tidak terdapat intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya sehubungan dengan pengambilan keputusan.
C. Governance Outcome	
1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah: a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku; b) Memperhatikan kemampuan permodalan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.	1) Terhadap penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar tidak pernah melampaui BMPK dan prinsip kehati-hatian serta kemampuan permodalan penyebaran/diversifikasi portofolio Bank.
2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.	2) Sehubungan tidak pernah terjadi pelanggaran dan pelampauan BMPK maka Bank tidak dilaporkan, namun untuk pelaporan lainnya telah dilaporkan.
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	
A. Governance Structure	
1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	1) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.	2) Laporan Pelaksanaan GCG buat setiap tahunnya dan disampaikan ke Bank Indonesia serta isi dari laporan pelaksanaan GCG tersebut didasari kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI)
3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai.	3) Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki belum lengkap, akurat dan tepat waktu.
4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT *security system* yang memadai.	4) Sistem Informasi Manajemen belum handal serta SDM yang dimiliki dan IT *security system* belum bagus.
B. Governance Process	
1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.	1) Bank telah transparant terhadap laporan keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* termasuk pula laporan keuangan.
2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain: a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; b) Petugas Bank (*Customer Service* dan *Marketing*) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah;	2) Bank belum transparan terhadap produk yang ditawarkan. Dalam brosur maupun penjelasan dari CS terhadap produk Bank hanya disampaikan saja keuntungannya, tidak termasuk risiko yang timbul. Namun Bank tidak pernah mempergunakan data nasabah untuk memasarkan produk pihak ketiga.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan- perubahan informasi produk; e) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti; f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat; g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah; h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.	
3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.	3) Bank tidak transparan dalam tata cara pengaduan. Bank hanya menyedian konter pengaduan saja dan itupun tidak diumumkan (tertutup)
4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan.	4) Dalam penyajian laporan Bank berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
5) Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	5) Laporan GCG disusun berdasarkan peraturan bank indonesia yang berlaku.
6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki *homepage* wajib mempublikasikannya pula pada *homepage* Bank.	6) Pada tahun 2011 laporan pelaksanaan GCG Bank Sulselbar diminta untuk dirubah nilainya dari 2 (dua) menjadi 3 (tiga) atas permintaan Bank Indonesia. Berdasarkan permintaan tersebut Bank telah melakukan perubahan sesuai penilaian Bank Indonesia dan diumumkan pada *Homepage* milik Bank serta laporan keuangan serta revisi telah disampaikan ke Bank Indonesia.
7) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian (*self assessment*) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, Bank:	7) Bank telah :
a) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat hasil penilaian (*self assessment*) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat;	a) Melakukan perubahan penilaian/peringkat berdasarkan peringkat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan telah dipublikasikan pada laporan keuangan publikasi periode terdekat.
b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (*self assessment*) GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki *homepage* wajib mempublikasikannya pula pada *homepage* Bank.	b) Hasil revisi penilaian telah disampaikan secara lengkap kepada Bank Indonesia dan diumumkan pada *homepage* milik Bank
C. Governance Outcome	

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
1) Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang- kurangnya kepada: a) Bank Indonesia; b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan; g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.	1) Laporan Tahunan telah disampaikan oleh Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya : Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga peringkat, asosiasi bank (ASBANDA), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan dan 2 (dua) majalah ekonomi keuangan.
2) Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada *homepage* Bank, meliputi: a) Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan); b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA.	2) Transparansi laporan pada *Homepage* milik bank meliputi laporan tahunan, laporan keuangan publikasi triwulanan dalam bahasa Indonesia.
3) Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (*self assessment*) Bank dan dilampiri hasil penilaian (*self assessment*) serta paling kurang mencakup:	3) Dalam laporan Pelaksanaan GCG pada tahun 2013 ini terdiri atas :
a) cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG dan hasil penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG;	a) Cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
b) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;	b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keluarga dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham
c) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;	c) Kepemilikan saham anggota Direksi dan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham bank.
d) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank;	d) Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank;
e) paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi;	e) Paket remunerasi/kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris
f) shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif;	f) Shares option, namun program ini tidak terdapat pada Bank Sulselbar.
g) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;	g) Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.
h) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;	h) Frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan.
i) jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;	i) Jumlah penyimpangan (fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh bank.
j) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;	j) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
k) *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank;	k) *Buy back* obligasi Bank. Untuk saham, Bank bukan merupakan perusahaan terbuka.
l) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.	l) Untuk Laporan Pelaksanaan GCG telah dilaporkan tepat waktu kepada pemegang saham dan pihak-pihak lainnya sebagaimana diwajibkan oleh SEBI GCG.
4) Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada pemegang saham dan kepada: a) Bank Indonesia; b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan; g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan	4) Untuk Laporan Pelaksanaan GCG telah dilaporkan tepat waktu kepada pemegang saham dan pihak-pihak lainnya sebagaimana diwajibkan oleh SEBI GCG.
5) Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan dalam *homepage* secara tepat waktu.	5) Laporan Pelaksanaan GCG juga ditampilkan pada *Homepage* tepat waktu.
6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.	6) Selama kurung waktu 1 (satu) tahun tidak ada pengaduan nasabah yang perlu diselesaikan melalui mediasi.
7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.	7) Bank belum menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.
Rencana strategis Bank	

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
A. Governance Structure	
1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.	1) Rencana strategis bank disusun dalam bentuk rencana korporasi *(Corporate plan)* dan *Business Plan* (rencana bisnis) dengan berpatokan pada visi dan misi bank.
2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	2) Rencana strategis didukung oleh pemilik, namun penambahan atau komitmen untuk menambahkan modal kurang.
B. Governance Process	
1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsive terhadap perubahan internal dan eksternal.	1) Dalam melakukan penyusunan rencana bisnis, bank melakukan secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsive terhadap perubahan internal dan eksternal.
2) Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.	2) Rencana bisnis bank sulselbar telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.
3) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada: a) Pemegang Saham Bank; b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	3) Rencana bisnis bank disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada pemegang saham melalui RUPS serta juga disosialisasikan ke cabang-cabang atau seluruh organisasi bank.
4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.	4) Pelaksanaan rencana bisnis bank tidak terlaksana secara efektif.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; b) prinsip kehati-hatian; c) penerapan manajemen risiko; d) azas perbankan yang sehat;	5) Penyusunan RBB Bank Sulselbar berpedoman pada PBI tentang rencana bisnis bank, dengan memperhatikan, yaitu : a) Faktor eksternal dan internal kelangsungan usaha bank. b) Prinsip kehati-hatian c) Manajemen risiko d) Dan azas perbankan yang sehat.
6) Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.	6) Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank.
7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah- langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	7) Pemilik kurang serius untuk mendukung rencana strategis bank.
C. Governance Outcome	
1) Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.	1) Rencana korporasi dan rencana bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
2) Rencana Korporasi *(corporate plan)* dan Rencana Bisnis Bank *(business plan)* berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	2) *Corporate plan & Business Plan* beserta realisasinya disampaikan Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
3) Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	3) Rencana bisnis bank menggambarkan pertumbuhan bank secara berkesinambungan.

Kriteria/Indikator *Criteria/Indicator*	Analisis *Analysis*
4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi *stakeholders.*	4) Pertumbuhan bank memberikan manfaat ekonomi dan non ekonomi bagi stakeholders di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
5) Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).	5) Penyusunan rencana bisnis dilakukan secara komprehensif.
6) Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.	6) Antara rencana strategis dengan infrastruktur bank tidak saling melengkapi.
7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.	7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan (dividen) dimana pemegang saham terhadap dividen, dimana setiap tahunnya pembagian keuntungan bank lebih besar pada dividen daripada laba ditahan untuk menambah modal.
8) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.	8) Untuk kondisi saat ini pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan bank walau masih dirasa kurang oleh bank untuk perkembangan usahanya.

Kesimpulan :

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas, disimpulkan bahwa telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahan dengan **CUKUP BAIK** yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat terlihat/tercermin dari penerapan/pemenuhan yang sangat memadai pada masing-masing aspek yaitu governance structure, governance process dan governance outcome pada 11 faktor penilaian GCG.

Adapun rincian penerapan pada masing-masing aspek,yaitu :

1. *Governance Structure*

Beberapa faktor negatif di *Governace Structure adalah :*

1) Belum adanya mekanisme nominasi Direksi dan Dewan Komisaris yang mapan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya rangkap jabatan oleh Direksi/Dewan Komisaris lainnya, atau dijabat oleh Pelaksana Tugas Sementara (PLTS) Direksi/Komisaris.

2) Belum diketahuinya kompetensi masing-masing anggota dan kesesuaiannya dengan PBI dan SEBI tentang GCG.

3) Rapat anggota Komite masih digabung dengan komite lainnya, hal ini tidak sesuai dengan PBI tentang GCG. Evaluasi atas rapat terhadap Satuan Kerja hanya terdokumentasi satu arah saja dan tidak adanya pemantauan terhadap evaluasi/rekomendasi dari Komite Bank serta dalam risalah rapat tidak memuat keterangan terkait ada tidaknya perbedaan pendapat.

4) Bahwa fungsi audit intern bank belum berjalan optimal, hal ini tercermin dari :

   a. Bank belum melakukan penguatan terhadap Grup Audit Intern (GAI) bank salah satunya terlihat dari perbandingan jumlah auditor dengan jaringan kantor bank.

   b. Bank belum melakukan pemetaan terhadap beban kerja dan kebutuhan audit internal ideal dan setara dengan perkembangan jaringan kantor bank.

   c. Bank belum memiliki kebijakan formal dalam menetapkan risiko jaringan kantor/satuan kerja bank.

   d. Bank belum memiliki pedoman khusus yang mengatur mengenai tata cara dan mekanisme rinci pelaksanaan pemeriksaan.

5) Bank belum memiliki infrastruktur yang memadai guna mendiseminasikan ketentuan internal/SOP bank kepada seluruh pegawai diseluruh jaringan kantor bank.

2. *Governance Process.*

Beberapa faktor negatif pada *Governance Process,* yaitu :

1) Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, yaitu : Dewan Komisaris belum melaksanakan tugas secara baik untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu : Direksi belum melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, yaitu : pelaksanaan tugas dari komite-komite yang dimiliki oleh Bank belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

4) Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu :

Bank belum mempunyai kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai benturan kepentingan.

5) Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu : strategi penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi.

6) Penerapan Fungsi Audit Intern, yaitu : belum terciptanya struktur pengendalian intern yang dapat menjamin terselenggaranya fungsi audit intern bank dalam setiap tingkat manajemen dan masih banyaknya temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Direksi serta jenis-jenis temuan yang cenderung tidak berbobot atau menemukan inti permasalahan.

7) Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian intern, yaitu perlu dilakukan pengembangan terhadap infrastruktur sistem informasi teknologi terkait penerapan Manajemen Risiko pada Bank.

8) Rencana strategis Bank, yaitu : pelaksanaan rencana bisnis bank harus dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar memenuhi aturan yang ditetapkan.

3. Governance Outcome

Adapun faktor negatif pada governance outcome yang perlu ditindaklanjuti adalah :

1) Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, yaitu : hasil rapat Dewan Komisaris yang merupakan rekomendasi belum dapat diimplementasikan oleh RUPS.

2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu : pertanggungjawaban Direksi telah diterima oleh RUPS namun RUPS berharap agar kedepannya pelaksanaan tugas dari Direksi dapat ditingkatkan.

3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, yaitu : dalam pelaksanaan fungsinya, rekomendasi komite-komite tersebut belum mendalam cenderung bersifat umum.

4) Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu : sehubungan belum adanya Pedoman, kegiatan operasional bank belum dapat dinyatakan bebas dari benturan kepentingan.

5) Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu : masih terdapat pelanggaran dengan jumlah denda yang meningkat cukup signifikan.

6) Penerapan Fungsi Audit Intern, yaitu : GAI tidak dapat bertindak obyektif dalam melakukan audit dan belum terpenuhi jumlah dan kualitas auditor intern yang diinginkan.

7) Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian intern, yaitu: Dewan Komisaris dan Direksi belum mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko

8) Rencana strategis Bank, yaitu : rencana bisnis bank tidak menggambarkan pertumbuhan bank secara berkesinambungan.

Berdasarkan kesimpulan diatas dan mengacu pada Matriks Peringkat *Good Corporate Governance* (lampiran III SE BI 15/15/DPNP), maka peringkat GCG Bank Sulselbar yaitu mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governcane* yang secara umum **CUKUP BAIK.** Hal ini dapat dilihat dengan dipenuhinya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance.* Apabila terdapat kelemahan **Signifikan** dalam pelaksanaan GCG tersebut. Namun apabila diperbaikan secara **serius dan berkesinambungan** kelemahan tersebut dapat ditanggulangi.

Makassar, Januari 2015

PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Dewan Komisaris

H. Andi Muallim
Plts. Komisaris Utama

Direksi

H.A.M. Rahmat Alimuddin
Direktur Utama

H. Harris Saleng
Direktur Kepatuhan

MANAJEMEN RESIKO

PENGUNGKAPAN PERMODALAN & PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pengungkapan Permodalan

Sesuai Pilar 1 Basel 2, PT. Bank Sulselbar melakukan perhitungan kecukupan permodalan berdasarkan metode yang selaras dengan roadmap penerapan Basel 2 di perbankan Indonesia, dengan uraian sebagai berikut :

a. Risiko Kredit dihitung dengan menggunakan *Standardized Approach (SA)*

b. Risiko Operasional dihitung dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* (BIA)

c. Risiko Pasar tidak diperhitungkan (tidak termasuk bank yang wajib memperhitungkan risiko pasar dalam permodalan).

Perhitungan kecukupan modal minimum yang dilakukan bank, tidak hanya ditujukan untuk menyerap potensi kerugian akibat risiko kredit, risiko pasar & risiko operasional sebagaimana Pilar 1, namun dilakukan dengan tetap memperhitungkan risiko lain yang material antara lain risiko likuiditas dan risiko 'lain'. Olehnya penyediaan modal minimum dilakukan dengan memperhitungkan penilaian profil risiko yang diatur dalam Pilar 2 Basel 2 atauICAAP - *Internal Capital Adequacy Assessment Process*).Selain hal tersebut, bank juga mengalokasikan modal untuk memgantisipasi kerugian dalam kondisi yang tidak normal (*Economic Capital*).

Dengan metode ini, memastikan bank memiliki permodalan yang cukup untuk menyerap risiko baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi tidak normal.

Selain untuk memenuhi kecukupan modal minimum sesuai regulasi, kebijakan permodalan bank diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan efisiensi permodalan dengan mengalokasikan pada eksposure yang memiliki *risk – return* yang optimal dan selaras dengan rencana strategis bank.

Persiapan Implementasi Basel III

Basel III lahir dari kebutuhan untuk menyempurnakan kerangka permodalan saat ini (Basel II) yang antara lain bertujuan untuk i).meningkatkankemampuan sektor perbankan untuk menyerap potensi risiko kerugian akibat krisiskeuangan dan ekonomi, danii).meningkatkankualitas manajemen risiko, *governance,* transparansi dan keterbukaan.

Ruang lingkup Dokumen "*Basel III: Global Regulatory Framewor for More Resilient Banks and Banking Systems*" yang diterbitkan pada akhir tahun 2010 adalah meliputi penguatan Kerangka Permodalan Global dan pengenalan Standar Likuiditas Globalyang secara bertahap akan mulai diterapkan tahun 2013 hingga implementasi penuh pada tahun 2019.

Sebagai persiapan atas kerangka Basel III, melalui *Quantitative Impact Study* (QIS) yang diinisiasi oleh BI, bank melakukan kajian untuk memastikan kesesuaian implementasi dengan kondisi internal bank diantaranya penilaian dampak implementasi Basel III terhadap permodalan dan likuiditas bank. Hasil analisa menunjukkan kemampuan permodalan dan likuiditas PT. Bank Sulselbar dalam menerapkan Basel III.

Tabel : Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Umum

KOMPONEN MODAL		Posisi Tanggal Laporan		"Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya"	
		Bank	Konsolidasi	Bank	Konsolidasi
KOMPONEN MODAL					
A	Modal Inti	1.105.239	1.217.276	916.856	1.025.870
	1 Modal disetor	568.933	568.933	528.739	528.739
	2 Cadangan Tambahan Modal	537.683	649.720	390.546	499.578
	3 Modal Inovatif	-		-	
	4 Faktor Pengurang Modal Inti	(1.377)	(1.377)	(2.429)	(2.447)
	5 Kepenti ngan Non Pengendali	-		-	
B	Modal Pelengkap	64.261	64.261	59.677	62.056
	1 Level Atas (Upper Tier 2)	64.261	68.600	59.677	62.055,65
	2 Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti	-		-	
	3 Faktor Pengurang Modal Pelengkap	-		-	
C	Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap	-		-	
	Eksposur Sekuri ti sasi	-		-	
D	Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3)	-		-	
E	MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR	-		-	
TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C)			1.285.875	976.533	1.087.926
TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E)			1.285.875	976.533	1.087.926
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT			4.090.483	3.598.088	3.760.748
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL			1.397.480	1.176.091	1.203.704
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR				-	
A	Metode Standar				
B	Model Internal				
RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)]		22,75%	23,43%	20,45%	21,91%

Penerapan Manajemen Risiko Bank secara umum,

Dalam penerapan manajemen risiko, bank berpedoman kepada pilar penerapan yang meliputi : *1).Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, 2).Kecukupan Kebijakan, Prosedure dan Penetapan Limit, 3).Kecukupan proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, dan 4). Sistem Pengendalian Intern.*

Penjabaran berbagai pilar tersebut, selanjutnya ditetapkan dalam suatu **Kerangka Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar** yang terdiri dari : Organisasi & SDM, Kebijakan, Proses & Metodologi, dan Infrastruktur. Kerangka ini menjadi dasar penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko di seluruh aktivitas maupun produk bank. Uraian singkat dari kerangka adalah sebagai berikut :

Kebijakan

– Penyusunan kebijakan manajemen risiko yang selaras dengan visi dan misi, *risk appetite*, kemampuan permodalan, Sumber Daya Manusia dan kapasitas pendanaan.

Organisasi& SDM

– Design struktur organisasi dengan berfokus kepada efektitas pelaksanaan prinsip *four eyes principles* dan *reporting*, penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas setiap di unit kerja dalam setiap aktivitas.

Prosess

– proses identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh kegiatan termasuk identifikasi produk & aktivitas baru,

– proses pengukuran dimaksudkan agar bank mampu mengkalkulasi eksposure risiko yang melekat dan memperkirakan dampak permodalan yang seharusnya dipelihara. Metodologi pengukuran permodalan berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia.

– proses pemantauan risiko difokuskan kepada upaya evaluasi terhadap eksposur risiko yang bersifat material dan atau berdampak kepada permodalan.

– proses pengendalian risiko dilakukan dengan cara antara lain penambahan modal, lindung nilai dan teknis mitigasi risiko lainnya.

Infrastruktur

– Penggunaan Teknologi Informasi yang mendukung proses dan metodologi.

Esensi penerapan manajemen risiko PT. Bank Sulselbar adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank.

Sebagai pelengkap pilar 1 dan pilar 2,penerapan Pilar 3 Basel II pada Bank Sulselbar ditujukan untuk menciptakan transparansi kondisi keuangan sebagai salah satu aspek penting dalam rangka memperkuat perbankan.Pengungkapan informasi merupakan sarana efektif untuk menginformasikan kepada pasar mengenai eksposur risiko yang ada pada bank. Pengungkapan Pilar 3 akan menjadi sarana untuk menunjukkan keunggulan dalam mengelola risiko, hal ini akan berdampak positif terhadap hasil kinerja bank, sehingga dapat meningkatkan daya kompetisi PT. Bank Sulselbar.

Cakupan pengungkapan dalam Pilar 3 dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Good Corporate Governance, Transparansi Informasi Keuangan, transparansi produk, dan transparansi proses manajemen risiko bank.

Organisasi Manajemen Risiko Secara Umum

Selain prinsip pemisahan fungsi, organisasi manajemen risiko disusun berdasarkan pertimbangan antara lain i).keselarasan dengan visi / misi bank, ii).kemampuan SDM, iii). Kemampuan permodalan, dan iv.*risk appetite / risk tolerance*. Secara umum organisasi manajemen risiko PT. Bank Sulselbar untuk seluruh jenis risiko tergambar sebagai berikut :

Kebijakan & strategi manajemen risiko dirumuskan oleh Komite (ALCO & Komite Manajemen Risiko) untuk kemudian ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris. ALCO merumuskan dan menetapkan kebijakan & strategi untuk optimalisasi asset & liability, dan Komite Manajemen Risiko merumuskan kebijakan, strategi & metodologi manajemen risiko secara keseluruhan. Organisasi Komite Manajemen Risiko terdiri 3 tiga bagian yaitu Komite Manjaemen Risiko Kredit, Komite Manajemen Risiko Likuiditas & Pasar dan Komite Manajemen Risiko Operasional & Risiko 'Lain'.

Seluruh unit kerja (*Risk Taking Unit* dan *Supporting Unit)* selaku *risk owner*bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko di masing-masing unitnya melalui penerapan internal control, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan strategi anti fraud. Pengelolaan risiko oleh *risk owner* merupakan pilar pertama dalam organisasi manajemen risiko PT. Bank Sulselbar (*1st line of defense*). Dalam konteks risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas, pengambilan keputusan yang merupakan kewenangan Direksi dilakukan melalui Komite yang keanggotaannya terdiri dari Direksi dan pejabat eksekutif terkait.

Monitoring eksposur risiko dilaksanakan oleh unit independen dari *risk taking unit* yaitu Grup Manajemen Risiko,Unit Khusus Anti Fraud &Grup Kepatuhanmerupakan lini kedua (*2nd line of defense*) dalam organisasi manajemen risiko PT. Bank Sulselbar.

Audit Internal oleh Grup Audit Intern merupakan lini terakhir (*3rd line of defense*) yang ditujukan untuk pengujian efektifitas penerapan manajemen risiko.

Hasil monitoring (*2nd line of defense*) danpengujian (*3rd line of defense*) selanjutnya menjadi dasar perumusan untuk pengembangan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan metodologi manajemen risiko.

Risiko Kredit

Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank, antara lain pemberian kredit, transaksi antar bank, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Tujuan penerapan manajemen risiko kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian bank.

Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Gambaran organisasi *1st line of defense* yang merupakan penjabaran dari organisasi manajemen risiko secara umum diuraikan sebagai berikut :

Seluruh unit bisnis selaku *risk owner* bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko kredit di masing-masing unit kerjanya (*1st line of defense*). Monitoring eksposur risiko kredit dilaksanakan oleh Grup Manajemen Risiko, Unit Khusus Anti Fraud dan Grup Kepatuhan (*2nd line of defense*), dan pelaksanaan Audit Internal oleh Grup Audit Intern merupakan lini terakhir (*3rd line of defense*) yang ditujukan untuk pengujian efektifitas penerapan manajemen risiko kredit.

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit, bank menetapkan organisasi yang berwenang dalam pemutusan kredit sebagai berikut :

Limit Kantor Cabang. Keputusan kredit yang merupakan limit Cabang dilakukan melalui Komite Kantor Cabang beranggotakan Pemimpin Cabang, seluruh Pemimpin Seksi dan pejabat pengusul.

Limit Pemimpin Grup. Keputusan kredit yang merupakan limit Pemimpin Grup, dilakukan melalui Komite Kredit di Kantor Pusat beranggotakan pejabat eksekutif dan Pemimpin Departemen terkait, serta perwakilan Komite Kantor Cabang selaku pengusul.

Limit Direksi. Keputusan kredit yang merupakan limit Direksi, dilakukan melalui Komite Kredit beranggotakan Direksi, pejabat eksekutif terkait dan perwakilan Komite cabang & Kantor Pusat selaku pengusul.

Limit Dewan Komisaris. Keputusan kredit di atas limit Direksi dengan jumlah signifikan dan atau berpotensi mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest)*, wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Dalam kerangka *2nd line of defense,* Grup Manajemen Risiko, Grup Kepatuhan serta Unit Anti Fraud yang merupakan unit independen dari *core risk taking unit* melakukan pemantauan eksposure risiko kredit.

Pelaksanaan *Risk Based Audit* oleh Audit Internal untuk pengujian efektifitas manajemen risiko kredit merupakan lini terakhir (*3rd line of defense*).

Sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern, Unit Anti Fraud menyusun, mengembangkan, memantau dan melaporkan implementasi strategi anti fraud terkait aktivitas perkreditan.

Manajemen Risiko Kredit untuk kredit yang memiliki eksposur signifikan

Dalam manajemen risiko untuk kredit yang memiliki eksposur yang signifikant bank menerapkan strategi yang konservatif antara lain :

- Penetapan kebijakan pemberian kredit kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
- kebijakan pricing, agunan & pemantauan yang lebih intensif.
- Penetapan limit yang dikaitkan dengan kemampuan modal menyerap kerugian dalam worst case scenario.
- Prosedur pemutusan kredit hingga ke level Dewan Komisaris yang dilengkapi dengan kajian dari Direktur Kepatuhan.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi

Risiko konsentrasi dikelola berdasarkan penetapan limit portfolio pada sektor ekonomi ataupun skim kredit tertentu yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank. Proses penetapan limit dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan bobot risiko suatu sektor / skim, kemampuan permodalan, kapasitas pendanaan, kemampuan SDM dan kinerja portfolio.

Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit

Mekanisme Pengukuran

Dalam perhitungan kecukupan modal risiko kredit, bank menggunakan pendekatan *standardized model* berdasarkan Basel II. Untuk tujuan pembentukan cadangan kerugian, risiko kredit diukur menggunakan probabilitasd dari data historis (minimal 3 tahun).

Saat ini bank telah mengembangkan *Internal Rating Model dan Consumer Scoring Card* yang implementasinya disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur Teknologi Informasi. Ke depan, *Internal rating Model* dan *consumer scoring card* diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kredit dan perhitungan kecukupan modal. Selain itu, hasil pengukuran risiko kredit berbasis rating dapat menjadi dasar penetapan 'pricing' yang lebih sesuai dengan tingkat risiko debitur (*risk based pricing*) dan

untuk pengembangan portofolio perkreditan.

Pengendalian Risiko Kredit

Mengacu kepada *Risk Management Framework,* Manajemen Risiko Kredit PT. Bank Sulselbar secara singkat diuraikan sebagai berikut :

- Penyusunan Kebijakan dan SOP perkreditan yang terdokumentasi dan tersosialisasi kepada seluruh unit kerja.
- Penetapan *Creditrisk tolerance* berdasarkan *risk appetite* yang dituangkan dalam Rencana bisnis bank yang dievaluasi secara periodik, antara lain penetapan : target *Non Performing Loan* (NPL) yang konservatif, target kredit per segment kredit dan target *credit recovery*
- Penetapan struktur organisasi mengacu kepada *four eyes principles* yang secara jelas memisahkan antara fungsi pemutus dan monitoring risiko kredit.
- Penetapan standar kualifikasi bagi pegawai yang terlibat dalam keputusan kredit dan monitoring kredit.
- Penggunaan Teknologi Informasi yang memudahkan proses reporting guna monitoring risiko kredit dan *early warning system*.
- Penerapan *risk based audit* oleh Audit Intern yang secara continue dievaluasi oleh Komite Audit.
- Rekomendasi penyempurnaan model Manajemen Risiko kredit oleh Komite Manajemen Risiko yang dipantau oleh Komite Pemantau Risiko di level Dewan Komisaris.

Definisi tagihan yang telah jatuh tempo& mengalami penurunan nilai

Definisi tagihan jatuh tempo adalah tagihan yang memiliki tunggakan lebih 90(Sembilan puluh) hari, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap akhir bulan.

Penurunan nilai / impairment untuk kredit yang jumlahnya di atas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan dievaluasi secara individual, berdasarkan bukti obyektif terjadinya suatu peristiwa meliputi :

a) Kesulitan keuangan signifikan pihak debitur.

b) Pelanggaran kontrak, terjadinya wanprestasi / tunggakan pembayaranpokok atau bunga ;

c) Pemberian keringanan (konsesi) kepada debitur yang mengalami kesulitankeuangan.

d) Debitur *akan dinyatakan pailit* atau melakukan *reorganisasi keuanganlainnya*;

e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;

f) Khusus untuk kredit yang diberikan, bank menggunakan kriteria tambahan untuk menentukan bukti obyektif penurunan nilai jika dikategorikan non performing loan sesuai ketentuan Bank Indonesia mencakup penilaian Prospek Usaha, Performance Debitur, dan Kemampuan Membayar

Bukti Objektif Penurunan Nilai yang dievaluasi secara kolektif, meliputi :

a) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut .

b) Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok.

1.3.Penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual dan kolektif, serta metode statistic yang digunakan dalam CKPN

Perhitungan CKPN individual dilakukan dengan menggunakan metode *discounted cash flows*, sedangkan untuk perhitungan CKPN secara kolektif bank menggunakan Model Kewajaran Penilaian Sendiri (*self assessment Model*) untuk mengestimasi penurunan nilai secara kolektif berdasarkan kerugian historis selama 3 (tiga) tahun terakhir dan LGD 5 tahun terakhir yang dievaluasi setiap tiga bulan dengan *roll rates analysis method*. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibentuk dengan menggunakan formula :

CKPN =Baki Debet Nilai Wajar x EAD

Dimana :

- *Exposure At Default* (EAD) adalah tarif Cadangan Kerugian Penurunan nilai (CKPN) yang dihitung dengan formula EAD = PD X LGD.
- Penentuan LGD dengan rumus : LGD = (1 - Rata-rata recovery rate)
- *Probability Of Default* (PD) : dihitung dengan menggunakan Roll Rate Analisys

Tabel : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Kategori Portofolio	Posisi Tanggal 31 Desember 2012					
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
	1	2	3	4	5	6
Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	26.695	-	-	-	-	26.695
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah Tinggal	215	1.737	237	7	-	2.196
Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
Kredit Pegawai Pensiunan	1.205.765	1.159.335	894.597	904.624	991.092	5.155.413
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	51.458	388.630	188.885	83.635	222.767	935.375
Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	13.077	23.303	17.600	9.509	8.560	72.049
Aset Lainnya						-
Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total	**1.297.210**	**1.573.005**	**1.101.319**	**997.775**	**1.222.419**	**6.191.728**

Posisi Tanggal 31 Desember 2011					
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
1	2	3	4	5	6
-	-	159	-	-	159
-	10.265	-	-	17.912	28.177
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13	1.043	850	392	1.860	4.158
-	-	-	-	-	-
1.109.462	1.204.367	767.676	461.873	769.418	4.312.796
226.177	309.452	244.125	256.920	279.407	1.316.081
-	-	-	-	-	-
1.163	114	422	-	488	2.187
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.336.815	**1.525.241**	**1.013.232**	**719.185**	**1.069.085**	**5.663.558**

Tabel : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

Kategori Portofolio	Posisi Tanggal 31 Desember 2012					
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
	< 1 tahun	>1 thn s.d. 3 thn	>3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	Total
Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	26.695	-	26.695
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah Tinggal	25	1.453	258	460	-	2.196
Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
Kredit Pegawai Pensiunan	11.300	437.140	633.562	4.073.410	-	5.155.412
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	11.798	110.175	189.740	623.662	-	935.375
Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	32.196	25.540	4.846	9.466	-	72.048
Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total	**55.319**	**574.308**	**828.406**	**4.733.693**	**-**	**6.191.726**

Posisi Tanggal 31 Desember 2011					
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
< 1 tahun	>1 thn s.d. 3 thn	>3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	Total
-	-	159	-	-	159
-	10.265	-	-	17.912	28.177
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13	1.043	850	392	1.860	4.158
-	-	-	-	-	-
1.109.462	1.204.367	767.676	461.873	769.418	4.312.796
226.177	309.452	244.125	256.920	279.407	1.316.081
-	-	-	-	-	-
1.163	114	422	-	488	2.187
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.336.815	**1.525.241**	**1.013.232**	**719.185**	**1.069.085**	**5.663.558**

Tabel : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	"Tagihan Kepada Pemerintah"	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	"Tagihan Kepada Bank"	"Kredit Beragun Rumah Tinggal"
Posisi Tanggal Laporan					
Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri pengolahan	-	11.249	-	-	-
Listrik, Gas dan Air	-	15.446	-	-	-
Konstruksi	-	-	-	-	-
Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-	-
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	-
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-	-
Perantara keuangan	-	-	-	-	-
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-	-
Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-
Jasa pendidikan	-	-	-	-	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-	-
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga					2.196
Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-
Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**26.695**	**-**	**-**	**2.196**

Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit pegawai Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	"Tagihan kepada Korporasi"	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
-	-	80.909	-	3.232	-	-
-	-	23.971	-	2.774	-	-
-	-	2.067	-	190	-	-
-	-	45.409	-	3.342	-	-
-	-	947	-	281	-	-
-	-	2.912	-	1.767	-	-
-	785	619.078	-	32.839	-	-
-	-	11.416	-	1.710	-	-
-	-	12.039	-	374	-	-
-	-	289	-	-	-	-
-	-	7.346	-	597	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.703	-	-	-	-
-	176	22.512	-	506	-	-
-	-	90.877	-	5.092	-	-
	5.154.452	13.793	-	19.343	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	107	-	-	-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	**5.155.413**	**935.375**	**-**	**72.047**	**-**	

Sektor Ekonomi	"Tagihan Kepada Pemerintah"	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	"Tagihan Kepada Bank"	"Kredit Beragun Rumah Tinggal"
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya					
Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	-	-	-	-
Perikanan	-	-	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri pengolahan	-	-	-	-	-
Listrik, Gas dan Air	-	10.265	-	-	-
Konstruksi	-	17.912	-	-	-
Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-	-
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	-
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-	-
Perantara keuangan	-	-	-	-	-
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-	-
Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-
Jasa pendidikan	-	-	-	-	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-	-
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-
Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-
Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-
TOTAL	-	28.177	-	-	-

Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit pegawai Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	"Tagihan kepada Korporasi"	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
-	-			-	-	-
-	161	104.048	-	68	-	-
-	-	33.465	-	2	-	-
-	-	2.577	-	-	-	-
-	-	60.293	-	55	-	-
-	-	833	-	-	-	-
-	-	5.598	-	21	-	-
-	-	873.289	-	1.129	-	-
-	-	13.414	-	113	-	-
-	-	16.877	-	-	-	-
-	-	526	-	-	-	-
-	-	10.069	-	100	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-	1.498	-	-	-	-
-	-	28.139	-	75	-	-
-	-	123.627	-	21	-	-
-	-	41.827	-	183	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-
-	**161**	**1.316.080**	**-**	**1.767**	**-**	**-**

Tabel : Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

Kategori Portofolio	Posisi Tanggal 31 Desember 2012					
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
	1	2	3	4	5	6
Tagihan	1.297.209	1.573.004	1.101.319	997.775	1.222.418	6.191.725
Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)	-	-	-	-	-	-
a. Belum jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
b. Telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	-	-	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	15.635	22.526	18.125	6.952	10.494	73.732
Tagihan yang dihapus huku						

Posisi Tanggal 31 Desember 2011					
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
1	2	3	4	5	6
1.354.570	1.552.437	1.020.729	731.733	1.085.033	5.744.502
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
17.756	27.195	7.496	12.547	15.949	80.943
13.837	43.488	8.172	15.621	52.994	134.112

Tabel : Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
		Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo			
Posisi Tanggal Laporan						
Pertanian, perburuan dan Kehutanan	84.141					2.746
Perikanan	26.745					2.355
Pertambangan dan Penggalian	2.257					174
Industri pengolahan	60.000					2.270
Listrik, Gas dan Air	16.675					249
Konstruksi	4.679					1.287
Perdagangan besar dan eceran	652.702					27.811
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	13.126					1.641
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	12.413					360
Perantara keuangan	289					10
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	7.943					496
Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-					-
Jasa pendidikan	1.703					5
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	23.193					684
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	95.969					4.572
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	5.189.784					29.072
Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-					-
Kegiatan yang belum jelas batasannya	107.177					1
Bukan Lapangan Usaha	-					
Lainnya	-					
Total	**6.298.796**					**73.733**

Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
		Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo			
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya						
Pertanian, perburuan dan Kehutanan	104.277				3.074	
Perikanan	33.468				2.010	
Pertambangan dan Penggalian	2.577				28	
Industri pengolahan	70.613				2.647	
Listrik, Gas dan Air	18.745				526	
Konstruksi	5.619				1.660	
Perdagangan besar dan eceran	874.419				31.101	
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	13.527				1.576	
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	16.877				293	
Perantara keuangan	526				95	
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	10.169				351	
Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-				-	
Jasa pendidikan	1.498				15	
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	28.214				2.420	
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	123.649				5.413	
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	42.010				5.278	
Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-				-	
Kegiatan yang belum jelas batasannya	-				-	
Bukan Lapangan Usaha	4.317.371				24.456	
Lainnya	-				-	
Total	**5.663.558**				**80.944**	

Tabel : Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Sektor Ekonomi	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
	CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
Saldo awal CKPN	-	80.855	-	118.411
Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	-	-	-	-
2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	-		-	85.067
2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	(15.341)	-	(95.416)
CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan	-	(10.146)	-	8.610
Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	18.365	-	(35.728)
Saldo akhir CKPN	**-**	**73.733**	**-**	**80.944**

Pengungkapan risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, penetapan bobot ATMR belum didasarkan kepada penetapan peringkat debitur / penjamin sehingga bobot risiko ATMR untuk seluruh kategori portfolio masih dikategorikan *unrating* / tanpa peringkat.

Tabel : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portfolio dan Skala Peringkat

Kategori Portofolio	Tagihan Bersih					
	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
	Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
	Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
	Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
	PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA- (idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB- (idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
	PT ICRA Indonesia	[Idr] AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr] AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr] BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
	PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
Tagihan Kepada Pemerintah	-					
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
"Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional"						
Tagihan Kepada Bank						
Kredit Beragun Rumah Tinggal						
Kredit Beragun Properti Komersial						
Kredit PegawailPensiunan	-					
"Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel"						
Tagihan kepada Korporasi						
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
Aset Lainnya						
Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
TOTAL						

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan							
Tagihan Be rsih							
Peringkat Jangka panjang		Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-I	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
B+ s.d B-	Kurang dari B-	FI+ s.d FI	F2	F3	Kurang dari F3		
BI s.d B3	Kurang dari B3	P-I	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	FI+(idn) s.d FI(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr] B-	[Idr]AI+ s.d [Idr]AI	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr] A3		
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idAI	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
						26.695	26.695
						-	-
						-	-
						2.196	2.196
						-	-
						5.155.413	5.155.413
						935.375	935.375
							-
						72.048	72.048
							-
							-
							-
						6.191.726	6.191.726

Kategori Portofolio	Tagihan Bersih					
	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
	Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
	Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
	Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
	PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA- (idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB- (idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
	PT ICRA Indonesia	[Idr] AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr] AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr] BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
	PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
Tagihan Kepada Pemerintah						
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
"Tagihan Kepada Bank Pem bangunan Multilateral dan Lembaga Internasional"	-					
Tagihan Kepada Bank						
Kredit Beragun Rumah Tinggal						
Kredit Beragun Properti Komersial						
Kredit PegawailPensiunan						
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Por tofolio Ritel	-					
Tagihan kepada Korporasi						
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						

Posisi Tanggal Laporan							
Tagihan Be rsih							
Peringkat Jangka panjang		Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-I	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
B+ s.d B-	Kurang dari B-	FI+ s.d FI	F2	F3	Kurang dari F3		
BI s.d B3	Kurang dari B3	P-I	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	FI+(idn) s.d FI(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr] B-	[Idr]AI+ s.d [Idr]AI	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr] A3		
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idAI	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
						25.738	25.738
						159	159
						28.177	28.177
						-	-
						-	-
						4.158	4.158
						-	-
						4.312.796	4.312.796
						1.316.081	1.316.081
						-	-
						2.187	2.187

Tabel : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan										ATMR
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit										
	0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	
Eksposur Neraca											
Tagihan Kepada Pemerintah	949.293										-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik								26.692			26.692
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional											-
Tagihan Kepada Bank		359.925				12.000					77.985
Kredit Beragun Rumah Tinggal			2.182								764
Kredit Beragun Properti Komersial											-
Kredit Pegawai Pensiunan						5.139.000					2.569.500
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							925.999				694.499
Tagihan kepada Korporasi											-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo								252	23.868		36.054
Aset Lainnya											-
Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)											-
Total Eksposur Neraca	949.293	359.925	2.182	0	0	5.151.000	925.999	26.944	23.868	-	3.405.494

(dalam jumlah rupiah)

"Beban Modal"	Posisi Tanggal Laporan										ATMR	"Beban Modal"
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit											
	0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	727.348										-	-
								28.336			28.336	2.267
											-	-
		616.051				12.000					129.210	10.337
			4.158								1.455	116
											-	-
						4.312.796					2.156.398	172.512
							1.316.080				987.060	78.965
											-	-
								25	2.162		3.268	261
											-	-
											-	-
340.549	727.348	616.051	4.158	-	-	4.324.796	1.316.080	28.361	2.162	-	3.305.728	264.458

Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan										ATMR
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit										
	0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	
Eksposur Kewajiban KomitmenlKontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif											
Tagihan Kepada Pemerintah											-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						7.055					3.528
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional											-
Tagihan Kepada Bank											-
Kredit Beragun Rumah Tinggal											-
Kredit Beragun Properti Komersial											-
Kredit Pegawai Pensiunan											-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel											-
Tagihan kepada Korporasi											-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo											-
Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)											-
Total Eksposur TRA	0	0	0	0	0	7.055	-	-	-	-	3.528

"Beban Modal"	Posisi Tanggal Laporan										ATMR	"Beban Modal"
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit											
	0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
											-	-
						9.056					4.528	362
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
											-	-
-	-	-	-	-	-	9.056	-	-	-	-	4.528	362

Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan										ATMR
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit										
	0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	
Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)											
Tagihan Kepada Pemerintah											
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik											
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional											
Tagihan Kepada Bank											
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel											
Tagihan kepada Korporasi											
Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)											
Total Eksposur Counterparty Credit Risk	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

"Beban Modal"	Posisi Tanggal Laporan										ATMR	"Beban Modal"
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit											
	0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel : Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan					
	"Tagihan Bersih"	Bagian Yang Dijamin Dengan				"Bagian Yang Tidak Dijamin"
		Agunan	Garansi	"Asuransi Kredit"	Lainnya	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
Eksposur Neraca						
Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	26.695	-	-	-	-	26.695
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah Tinggal	2.196	-	-	-	-	2.196
Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
Kredit PegawailPensiunan	5.155.412	-	-	-	-	5.155.412
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	935.375	-	-	-	-	935.375
Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	72.048	-	-	-	-	72.048
Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Neraca	6.191.726	-	-	-	-	6.191.726

(dalam jumlah rupiah)

Posisi Tanggal Laporan					
"Tagihan Bersih"	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit				"Bagian Yang Tidak Dijamin"
	Agunan	Garansi	"Asuransi Kredit"	Lainnya	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
-	-	-	-	-	-
28.177	-	-	-	-	28.177
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4.312.795	-	-	-	-	4.312.795
1.316.081	-	-	-	-	1.316.081
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5.657.053	-	-	-	-	5.657.053

Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan					
	"Tagihan Bersih"	Bagian Yang Dijamin Dengan				"Bagian Yang Tidak Dijamin"
		Agunan	Garansi	"Asuransi Kredit"	Lainnya	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
Eksposur Kewajiban KomitmenlKontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif						
Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	7.055	-	-	-	-	7.055
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur TRA	7.055	-	-	-	-	7.055
Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-

Posisi Tanggal Laporan					
"Tagihan Bersih"	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit				"Bagian Yang Tidak Dijamin"
	Agunan	Garansi	"Asuransi Kredit"	Lainnya	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
-	-	-	-	-	-
9.056	-	-	-	-	9.056
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9.056	-	-	-	-	9.056
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan					
	"Tagihan Bersih"	Bagian Yang Dijamin Dengan				"Bagian Yang Tidak Dijamin"
		Agunan	Garansi	"Asuransi Kredit"	Lainnya	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk						
	6.198.781	-	-	-	-	6.198.781

Posisi Tanggal Laporan					
"Tagihan Bersih"	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit				"Bagian Yang Tidak Dijamin"
	Agunan	Garansi	"Asuransi Kredit"	Lainnya	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5.666.109	-	-	-	-	5.666.109

Perhitungan ATMR Risiko Kredit Menggunakan Pendekatan Standar

Tabel Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	949.293	-	-	646.427	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	26.692	26.692	-	25.738	12.869	5.148
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	371.925	77.985	77.985	885.759	183.053	183.053
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2.182	764	764	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawail Pensiunan	5.139.000	2.569.500	2.569.500	3.597.670	1.798.835	719.534
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	925.999	694.499	694.499	1.609.804	1.207.353	321.961
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	24.120	36.054	36.054	-	-	-
11	Aset Lainnya	707.865	-	364.160	585.865	-	585.865
	TOTAL	**8.147.076**	**3.405.494**	**3.742.962**	**7.351.263**	**3.202.110**	**1.815.561**

Tabel : Eksposure Kewajiban Komitmen / Kontinjensi pada Transaksi Administrastif

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	3.528	3.528	3.528	4.528	4.528	4.528
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	14.444	10.833	10.833	13.257	9.943	9.943
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**17.971**	**14.360**	**14.360**	**17.785**	**14.471**	**14.471**

Tabel : Pengungkapan Eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*Counterparty Credit Risk*)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel :Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*Settlement Risk*)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
2	Non-delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Pengungkapan Eksposure Sekuritisasi

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip- prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.	-	-	-	-

RISIKO PASAR

Penerapan Manajemen Risiko Pasar

Sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko, PT. Bank Sulselbar tidak diwajibkan untuk mengalokasikan modal (*capital charger*) untuk risiko pasar dalam perhitungan CAR antara lainkarena tidak memiliki eksposur *trading book*. Namun demikian berdasarkan Pilar II Basel II, bank tetap diwajibkan untuk mengelola risiko pasar khususnya eksposure yang termasuk definisi *banking book*.

Bank terekspos dengan risiko tingkat suku bunga ketika variabel pasar bergerak kearah yang berlawanan dengan instrumen *banking book* yang dimiliki bank. Penerapan manajemen risiko pasar untuk instrument *banking book* menggunakan metodologi *Asset & Liability Management (ALMA)*meliputi penilaian *Sensitivity to Market Risk*yang merupakan penilaian kemampuan modal bank untuk mengcover dampak yang timbul akibat perubahan variabel pasar (*adverse movemen*t).

Dalam mengelola risiko suku bunga (*Interest rate risk in banking book – IRRBB*), bank menghitung gap antara *asset*

& liability (RSA-RSL) dan *maturitygap analysis* terhadap asset & liability yang sensitive terhadap suku bunga untuk kemudian menetapkan posisi untuk meminimalisir risiko suku bunga.

Organisasi Manajemen Risiko Pasar khususnya *interest rate risk in banking book* dikelola oleh Asset & Liability Committee (ALCO) dan dengan organisasi yang sama dengan organisasi Manajemen Risiko Likuiditas.

Tabel : Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Standar Model

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	Posisi Tanggal Laporan				Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya			
		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga								
	a. Risiko Spesifik								
	h. Risiko Umum								
2	Risiko Nilai Tukar								
3	Risiko Ekuitas *)								
4	Risiko Komoditas *)								
5	Risiko Option								
	Total								

*) Untuk hank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

Tabel :Perhitungan Interest Rate Risk In Banking Book (IRRBB)

(Jutaan Rupiah)

Instrument	Jatuh Tempo *)				
	s.d 1 bulan	>1-3 bulan	>3-6 bulan	>6-12 bulan	>12 bulan
RSA	1.162.979	106.174	82.122	48.870	6.112.799
RSL	1.918.587	645.604	1.240.823	1.031.541	1.713.089
GAP	**(755.608)**	(539.430)	(1.158.701)	(982.671)	4.399.710

Berdasar *Gap analysis*, bank menskenariokan perubahan suku bunga dan menilai dampak *Potensial loss*terhadap pendapatan dan ekses modal.

(Jutaan Rupiah)

Adverse Movement Scenario	Jatuh Tempo				
	s.d 1 bulan	>1-3 bulan	>3-6 bulan	>6-12 bulan	>12 bulan
+/- 100 bp	7.556	5.394	11.587	9.827	43.997
+/- 200 bp	15.112	10.789	23.174	19.653	87.994
+/- 300 bp	22.668	16.183	34.761	29.480	131.991
+/- 400 bp	30.224	21.577	46.348	39.307	175.988
+/- 500 bp	37.780	26.972	57.935	49.134	219.986

Dengan menskenariokan terjadi penurunan / kenaikan suku bunga dalam range tertentu, bank menilai kemampuan permodalan mengcover *potential loss* (*gap position* x Δsuku bunga). Ekses modal merupakan selisih perhitungan komponen modal (tier 1) yang diperuntukkan untuk mengcover fluktuasi suku bunga (tidak termasuk komponen Tier 1 yang diperuntukkan untuk mengcover risiko kredit dan risiko operasional).

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan menskenariokan kenaikan hingga 10%, potential loss yang bersumber fluktuasi suku bunga masih dapat dicover oleh permodalan bank.

RISIKO OPERASIONAL

Penerapan Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Dalam penerapan manajemen risiko operasional, organisasi bank disusun berpedoman kepada prinsip pemisahan fungsi dengan memperhatikan kemampuan SDM.Khusus untuk organisasi manajemen risiko operasional, bank membentuk sub Komite Manajemen Risiko yang khusus membidangi risiko operasional yang terdiri dari mayoritas Direksi, pejabat eksekutif dari grup terkait.

Berikut organisasi manajemen risiko operasional PT. Bank Sulselbar :

Seluruh unit kerja sebagai *risk owner* (baik *risk taking unit* maupun *supporting unit)* bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko operasional di masing-masing unit kerja (*1st line of defense*). Monitoring eksposur risiko operasional dilaksanakan oleh Grup Manajemen Risiko, Unit Khusus Anti Fraud dan Grup Kepatuhan (*2nd line of defense*), dan pelaksanaan Audit Internal oleh Grup Audit Intern merupakan lini terakhir (*3rd line of defense*) yang ditujukan untuk pengujian efektifitas penerapan manajemen risiko operasional.

Strategi Anti Fraud

Untuk mendukung efektifitas manajemen risiko operasional khususnya Sistem Pengendalian Intern, bank menyusun Strategi Anti Fraud yang meliputi Pilar Pencegahan, Pilar Deteksi, Pilar Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, serta Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Fraud. Dalam rangka pemantauan dan pengembangan strategi Anti Fraud bank membentuk Unit Anti Fraud yang bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama dan memiliki garis koordinasi & pelaporan ke Dewan Komisaris.

Proses Manajemen Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional adalah proses dimana risiko operasional diidentifikasi, dinilai, diukur, dipantau dan dikendalikan / mitigasi yang bertujuan untuk mengurangi profil risiko ke tingkat yang dapat diterima oleh manajemen, stakeholder dan regulator.

Bank melalukan identifikasi risiko dengan menyusun suatu daftar kejadian yang komprehensif yang dipetakan dalam kategori penyebab (*causes*) dan kategori event yang ditimbulkan sesuai rekomendasi Basel II (*Loss event database*). Berdasarkan hasil identifikasi, bank melakukan penilaian risiko dengan menyusun pemetaan (mapping) untuk membantu proses pemantauan dan pengendalian risiko operasional. Pemetaan merupakan salah satu proses "Qualitative Approach" untuk melihat hubungan antara *probability* dengan *impact* dalam suatu kuadran risiko. Jenis risiko yang termasuk dalam kategori kuadran kritis, mendapatkan prioritas tinggi dalam proses penanganan dan antisipasi.

Konsorsium Data Kerugian Eksternal

Untuk meningkatkan kemampuan bank dalam memetakan data kerugian (*loss event*), bank ikut serta dalam Konsorsium Data Kerugian eksternal (KDKE) yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh data kerugian eksternal yang kemudian digunakan kembali oleh bank sebagai *resources* untuk melakukan pengelolaan dan mitigasi risiko operasional. Melalui KDKE, para anggota konsorsium dapat berbagi informasi dan membahas, mengelola dan mitigasi risiko operasional dari data kerugian eksternal yang dialami oleh anggotanya.

Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi

Sebagai bagian dari manajemen risiko operasional, bank menerapkan manajemen risiko Sistem Informasi antara lain dengan melakukan langkah pengendalian yaitu penilaian berkala terhadap pengamanan sistem informasi, yang disertai dengan tindakan korektif apabila diperlukan, dan tersedianya prosedur *back-up* dan rencana darurat untuk menjamin berjalannya kegiatan operasional Bank dan mencegah terjadinya gangguan yang signifikan yang diuji secara berkala.

Bussiness Contiunity Management (BCM)

Bussiness Continity Management (BCM) merupakan proses pengelolaan secara menyeluruh dalam rangka identifikasi potensi kondisi darurat yang berdampak kepada kelangsungan operasional bank serta berisi langkah-langkah secara rinci mengenai organisasi, tanggung jawab dan prosedur dalam upaya pencegahan dan pemulihan pada saat terjadi gangguan yangdisebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Menyadari pentingnya BCM, Bank Sulselbar telah menyusun kebijakan, prosedur BCM untuk memastikan faktor internal maupun eksternal seperti kebakaran, kerususan, bencana alam dan serangan teroris dapat dikelola dengan baik, yang saat ini dalam proses finalisasi.

Metode Perhitungan Risiko Operasional

Sesuai ketentuan Bank lndonesia SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009, Bank telah melakukan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk risiko operasional menggunakan *Basic Indicator Approach* (BIA).

Dalam *Basic Indicator Approach*, total pendapatan kotor (*Gross Income*) digunakan sebagai indikator eksposur (*inherent risk*) yang menggambarkan skala operasional bisnis bank. Modal yang dipersyaratkan untuk risiko operasional secara keseluruhan yang harus disediakan oleh bank menurut *Basic Indicator Approach* adalah rata-rata pendapatan kotor / *Gross Income selama* 3 tahun dikalikan 15% (nilai alpha).

Tabel : Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank secara individual

No.	Pendekatan Yang Digunakan	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	729.987	111.798	1.397.480	627.566	94.135	1.176.687
	Total	729.987	111.798	1.397.480	627.566	94.135	1.176.687

RISIKO LIKUIDITAS

1. Pengungkapan Kualitatif

Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.Pengelolaan risiko likuiditas bank menggunakan metodologi ALMA (*Asset & Liability Management*) yang dikelola secara langsung oleh Grup Treasury sebagai *risk taking unit*.

Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas

Dalam manajemen risiko likuiditas, Grup Treasury bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas yang telah ditetapkan *Asset Liability Committee* (ALCO), dan melaporkan eksposur risiko likuiditas secara berkala kepada Grup Manajemen Risiko. Dalam konteks manajemen risiko likuiditas, Grup Pemasaran (berkoordinasi dengan Grup Treasury) melakukan ekspansi kredit yang selaras dengan struktur & kapasitas pendanaan serta melakukan upaya untuk mencegah penurunan kualitas kredit yang dapat mempengaruhi likuiditas bank.Penghimpunan dan penggunaan dana untuk operasional kantor cabang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Grup Treasury dan Grup Pemasaran di Kantor Pusat. (*1st line of defense*).

Grup Manajemen Risiko memiliki tanggungjawab antara lain i). memantau implementasi strategi dan

eksposure risiko likuiditas, ii). penerapan stress testing guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko likuiditas.

Rumusan tingkat / toleransi risiko, kerangka Manajemen Risiko Likuiditas serta rencana kontinjensi menjadi tugas dan tanggung jawab sub Komite Manajemen Risiko Likuiditas yang beranggotakan mayoritas Direksi dan pejabat eksekutig terkait. (*2nd line of defense*).

Proses Manajemen Risiko Likuiditas

Bank melakukan identifikassi sumber risiko likuiditas untuk mengetahui jumlah dan trend kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaannya.

Kebutuhan likuiditas diukur menggunakan metodologi *liquidity gap* berdasarkan *maturity mismatch* antara *asset* dan *liability (termasuk off-balanced sheet)* yangdisusun ke dalam periode waktu (*time bucket*) baik *contractual maturity* maupun *behavioral maturity*.

Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat.

Untuk tujuan pemantauan risiko likuiditas, bank menetapkan indikator (internal dan eksternal) peringatan dini (*early warning system*) yang meliputi :

Indikator Internal :

1. kualitas aset yang memburuk
2. peningkatan konsentrasi pada beberapa aset dan sumber pendanaan trtntu
3. peningkatan *mismatches*,
4. pengulangan terjadinya pelampauan limit, (limit internal / regulator)
5. peningkatan biaya dana, dan/atau
6. posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch yang* besar terutama pada skala waktu jangka pendek.

Indikator Eksternal :

1. Informasi publik yang negatif terhadap Bank, antara lain penurunan hasil peringkat oleh lembaga pemeringkat,
2. Penurunan fasilitas *credit line* yangdiberikan oleh bank koresponden,
3. Peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo, dan/atau
4. Keterbatasan akses untuk memperoleh pendanaan jangka panjang.

Tabel : Pengungkapan Profil Maturitas

No.	Pos-pos	Posisi Tanggal Laporan						Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya					
		Saldo	Jatuh Tempo					Saldo	Jatuh Te mpo				
			≤ 1 bulan	> 1 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 12 bln	> 12 bulan		≤ 1 bulan	> 1 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	> 6 bln s.d. 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	**NERACA**												
	A Aset												
	1 Kas	344.054	344.054					320.557	320.557				
	2 Penempatan pada Bank Indonesia	949.293	799.092	90.370	59.831			727.348	643.661	53.473	30.214		
	3 Penempatan pada bank lain	359.925	359.925					616.051	616.051				
	4 Surat Berharga	12.000					12.000	12.000					12.000
	5 Kredit yang diberikan	6.191.726	3.962	15.804	22.291	48.870	6.100.799	5.744.502	4.944	17.416	21.843	63.513	5.636.786
	6 Tagihan lainnya	-						-					
	7 Lain-lain	2.987.646	2.987.646					2.846.434	2.846.434				
	Total Aset	10.844.644	4.494.679	106.174	82.122	48.870	6.112.799	10.266.892	4.431.647	70.889	52.057	63.513	5.648.786
	B. Kewajiban	5.531.915	1.399.185	644.938	1.240.157	1.030.875	1.216.760	5.162.478	773.725	521.750	1.157.467	1.774.682	934.854
	1 Dana Pihak Ketiga	115	115					343	343				
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia	519.065	519.065					497.265	497.265				
	3 Kewajiban pada bank lain	398.549					398.549	397.245					397.245
	4 Surat Berharga yang Diterbitkan	100.000	222	666	666	666	97.780	150.130	222	666	666	666	147.910
	5 Pinjaman yang Diterima	-						-					
	6 Kewajiban lainnya	4.295.000	4.295.000					4.059.431	4.059.431				
	7 Lain-lain												
	Total Kewajiban	10.844.644	6.213.587	645.604	1.240.823	1.031.541	1.713.089	10.266.892	5.330.986	522.416	1.158.133	1.775.348	1.480.009
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	-	(1.718.908)	(539.430)	(1.158.701)	(982.671)	4.399.710	-	(899.339)	(451.527)	(1.106.076)	(1.711.835)	4.168.777
II	**REKENING ADMINISTRATIF**												
	A. Tagihan Rekening Administratif												
	1 Komitmen	-											
	2 Kontijensi	144.777	-				144.777	413.495	-				413.495
	Total Tagihan Rekening Administratif	144.777	-	-	-	-	144.777	413.495	-	-	-	-	413.495
	B. Kewajiban Rekening Administratif												
	1 Komitmen	13.255	-				13.255	16.118	-				16.118
	2 Kontijensi	132.297	-				132.297	404.648	-				404.648
	Total Kewajiban Rekening Administratif	145.552	-	-	-	-	145.552	420.766	-	-	-	-	420.766
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(775)	-	-	-	-	(775)	(7.271)	-	-	-	-	(7.271)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	(775)	(1.718.908)	(539.430)	(1.158.701)	(982.671)	4.398.935	(7.271)	(899.339)	(451.527)	(1.106.076)	(1.711.835)	4.161.506
	Se lisih Kumulatif	(775)	(1.719.683)	(2.258.338)	(1.698.131)	(2.141.372)	3.416.264	4.391.664	(906.610)	(1.350.866)	(1.557.603)	(2.817.911)	2.449.671

MANAJEMEN RISIKO HUKUM

1. Pengungkapan Kualitatif

Penerapan Manajemen Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Manajemen Risiko Hukum bertujuan untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi.

Organisasi Manajemen Risiko Hukum

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Tugas, Direktur Kepatuhan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta aktivitas bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhanterkait risiko hukum, bank membentuk Departemen Hukum & Kepatuhan di bawah Grup Kepatuhan yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

a. Mengevaluasi kesesuaian kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

b. Melakukan review dan atau merekomendasikan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

Risk taking unit maupun *supporting unit* selaku risk owner bertanggung jawab untuk mengelola risiko hukum berdasarkan kebijakan, ketentuan, system & prosedur yang telah ditetapkan. Untuk penanganan proses litigasi, bank membentuk Departemen Litigasi yang berada di bawah *Grup Corporate Secretary* (*1st line of defense*).

Grup Manajemen Risiko dan Departemen Hukum & Kepatuhan yang berada di bawah Grup Kepatuhan melakukan pemantauan terhadap eksposure risiko hukum dan secara bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur Risiko Hukum. (*2nd line of defense*).Grup Audit bertanggungjawab melakukan audit internal untuk menguji efektifitas penerapan manajemen risiko hukum (*3rd line of defense*).

RISIKO REPUTASI

Penerapan Manajemen Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank antara lain pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah. Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari Risiko Reputasi Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

Seluruh pegawai baik *core risk taking* maupun *supporting unit* menjadi bagian dari organisasi manajemen risiko reputasi sebagai *front liner* dan memiliki peran untuk membangun reputasi dan mencegah risiko reputasi.

Untuk mencegah risiko reputasi yang bersumber dari keluhan nasabah, bank membentuk Unit Penanganan & Penyelesaian Pengaduan Nasabah (UP3N) di Kantor Pusat dan seluruh kantor cabang.

Untuk mengelola *corporate image*, Bank membentuk Grup Corporate Secretary yang bertanggungjawab langsung ke Direktur Utama dan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain untuk i).pelaksanaan program edukasi masyarakat &*Corporate social Responsibility (CSR)*, ii). mengelola dan mengembangkan media komunikasi internal maupun eksternal, serta iii). mengkoordinir penanganan & penyelesaian pengaduan nasabah.

Peran seluruh pegawai (*risk taking unit*&*supporting unit*), penanganan dan penyelesaian pengaduan oleh Unit Penanganan & Penyelesaian Pengaduan Nasabah (UP3N) dan pengelolaan *corporate image* oleh Grup *Corporate Secretary* menjadi pilar pertama (*1st line of defense*) dalam penerapan manajemen risiko reputasi.

Grup Manajemen Risiko dan Grup Corporate Secretary melakukan pemantauan terhadap eksposure risiko reputasi dan secara bersama-sama merumuskan tindakan pencegahan dan pemulihan Risiko Reputasi serta merekomendasikan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya

Risiko Reputasi (*2nd line of defense*). Grup Audit bertanggungjawab melakukan audit internal untuk menguji efektifitas penerapan manajemen risiko reputasi (*3rd line of defense*).

Pengendalian Risiko Reputasi.

Hal-hal yang dilakukan bank untuk melakukan pengendalian risiko reputasi antara lain :

a) Penyusunan *Corporate Culture, Service Culture, code of conduct* yang menjadi dasar seluruh pegawai dalam bertindak dan berperilaku.

b) Mengintegrasikan / menjabarkan *corporate culture, service culture* dan *code of conduct*kedalam standar operasional prosedur antara lain Standar Layanan, penetapan *service Level Agreement* (SLA) layanan dan SLA penanganan penyelesaian pengaduan nasabah yang tertuang dalam Pedoman Penyelesaian dan Pengaduan Nasabah PT. Bank Sulselbar.

c) Pengelolaan *corporate image* secara tepat antara lain meliputi pelaksanaan program edukasi masyarakat &*Corporate social Responsibility (CSR)*, dan pengelolaan media komunikasi internal maupun eksternal.

d) Pelaksanaan System Pengendalian Risiko Reputasi antara lain i).melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan *risk awareness* dan budaya kepatuhan (*compliance culture*), ii).memastikan kecukupan kuantitas / kualitas SDM khususnya yang secara langsung mengelola risiko reputasi.

e) Pengujian efektifitas penerapan System Pengendalian Intern Risiko Reputasi untuk memastikan kesesuaian & kepatuhan terhadap kerangka, kebijakan, ketentuan, system dan prosedur maupun standar yang telah ditetapkan.

RISIKO STRATEGIK

Penerapan Manajemen Risiko Strategik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Stratejik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan stratejik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi stategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Stratejik adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan stratejik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Organisasi Manajemen Risiko Strategik

C*ore risk taking* dan *supporting unit* bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan strategik, dan mengimplementasikan strategi secara efektif. Grup Perencanaan

& Pengembangan bertanggungjawab untuk mengelola risiko strategik dan memfasilitasi perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi, termasuk rencana strategik dan rencana bisnis. (*1st line of defense*).

Terkait dengan manajemen risiko strategik, Grup Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggungjawab untuk i). memantau dan mengevaluasi perkembangan implementasi rencana stratejik, ii). memberikan masukan untuk pengembangan dan perbaikan strategi secara berkelanjutan, iii). memastikan bahwa seluruh issue strategik dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan stratejik telah ditindaklanjuti secara tepat waktu, dan iv).melaporkan risiko material yang timbul akibat perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi. (*2nd line of defense*). Grup audit internal melakukan pengujian untuk menilai kesesuaian dan kepatuhan unit kerja terhadap praktek maupun kerangka majemen risiko strategik. (*3rd line of defense*)

Proses Manajemen Risiko Strategik

Bank melakukan identifikasi risiko strategik dengan menilai deviasi pelaksanaan strategi termasuk rencana bisnis bank. Deviasi pelaksanaan strategi merupakan salah satu indikator pengukuran, pemantauan dan pelaporan risiko strategik.

Untuk melakukan pengendalian risiko strategik, bank melakukan upaya antara lain :

a) Penyusunan dan penetapan sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari visi / misi bank.

b) Design struktur organisasi untuk memastikan keselarasan visi/misi unit kerja selaras dengan visi / misi dan rencana strategik bank secara keseluruhan.

c) Penyusunan Rencana Bisnis yang selaras dengan visi / misi & sasaran strategis dengan mempertimbangkan lingkungan bisnis, kondisi keuangan, kemampuan permodalan, kapasitas pendanaan, kecukupan SDM dan kehandalan perangkat pengendalian.

d) Melakukan pemantauan secara periodik terhadap deviasi dengan cara membandingkan progress rencana strategis dengan hasil aktual, dan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat issue strategis akibat perubahan eksternal maupun internal yang berdampak kepada pencapaian rencana strategis (*feedback mechanism*).

e) Penerapan system pengendalian intern yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan & kesesuaian kerangka Manajemen Risiko strategik dengan eksposure risiko strategik.

MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN

Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Bank menerapkan manajemen risiko kepatuhan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko kepatuhan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negative dari aktivitas bank yan menyimpang atau melanggar standar yang berlaku umum, ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Risk taking unit maupun supporting unit selaku risk owner bertanggung jawab untuk mengelola risiko kepatuhan dengan menerapkan prinsip internal control dan fungsi kepatuhan. Penerapan internal control & fungsi kepatuhan di setiap unit merupakan tanggung jawab dari setiap Direktur sesuai bidang tugasnya. (*1st line of defense*).

Grup Manajemen Risiko dan Grup Kepatuhan melakukan pemantauan terhadap eksposure risiko kepatuhan dan secara bersama-sama melakukan review dan atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki oleh bank agar sesuai dengan ketentuan & perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Grup Kepatuhan dan Grup Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan (*2nd line of defense*).

Grup Audit bertanggungjawab melakukan audit internal untuk menguji kerangka manajemen risiko kepatuhan antara lain penerapan internal control dan fungsi kepatuhan. Grup Audit Internal bertanggungjawab langsung ke Direktur Utama, dan tindak lanjut hasil audit merupakan obyek pemantauan dari Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Audit. Hasil pelaksanaan audit menjadi salah satu dasar melakukan penyempurnaan system pengendalian internal risiko kepatuhan dan penerapan fungsi kepatuhan (*3rd line of defense*).

Proses Manajemen Risiko Kepatuhan

Bank melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposure risiko kepatuhan antara lain peningkatan kompleksitas usaha termasuk produk dan aktivitas baru. Berdasarkan hasil identifikasi, bank melakukan pengukuran dengan menggunakan parameter signifikansi dan frekwensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan perilaku yang mendasarinya. Hasil identifikasi dan pengukuran selanjutnya menjadi dasar pemantauan dan pelaporan eksposure risiko kepatuhan.

Dalam hal pengendalian risiko kepatuhan, hal yang dilakukan antara lain adalah :

a. Setiap rancangan kebijakan, system dan prosedur termasuk penerbitan produk & aktivitas baru terlebih dahulu wajib direview oleh Grup Kepatuhan dan Grup Manajemen Risiko serta mendapatkan persetujuan dari Direktur Kepatuhan (*compliance review*).

b. Penerapan internal control dan fungsi kepatuhan agar seluruh aktivitas unit kerja berpedoman kepada kebijakan, system dan prosedur yang telah ditetapkan.

c. Melakukan upaya untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan, antara lain dengan :

   i. sosialisasi untuk meningkatkan risk awareness & risk culture.

   ii. mengintegrasikan penerapan budaya kepatuhan dalam system promosi maupun remunerasi.

   iii. Penyusunan *code of conduct & corporate culture* sebagai pedoman perilaku yang disertai penandatanganan Pakta Integritas setiap pegawai.

d. Memastikan kecukupan (kuantitas / kualitas) SDM yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

e. Memastikan upaya agar tindakan penyimpangan telah ditindaklanjuti dengan ceppta dan tepat (termasuk pengenaan sanksi).

f. Melakukan penyempurnaan terhadap efektifitas penerapan sistem pengendalian intern dan penerapan fungsi kepatuhan.

Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris

Sebagai bagian dari manajemen risiko kepatuhan khususnya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris, bank membentuk Unit Pengenalan Nasabah di setiap Kantor Cabang yang dalam pelaksanaan tugasnya dipantau oleh Grup Kepatuhan khususnya Departemen Pengenalan Nasabah di Kantor Pusat.

Dalam program APU/PPT, bank melakukan *Customer Due Diligent (CDD)* identifikasi, verifikasi dan pemantauan kesesuaian transaksi dengan profil nasabah menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*). Terhadap nasabah yang berisiko tinggi termasuk PEP-*Politycal Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan teroris, bank menerapkan tindakan *Enhanced Due Diligent* (EDD) atau tindakan CDD yang lebih mendalam.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian transaksi dengan profil nasabah, Unit Pengenalan Nasabah Kantor Cabang melaporkan ke Unit Pengenalan Nasabah Kantor Pusat untuk selanjutnya diteruskan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) setelah mendapat persetujuan dari Direktur Kepatuhan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Kinerja tanggung jawab sosial perusahaan/ *Corporate Social Responsibility*/CSR) merupakan salah satu aspek penting bagi keberlanjutan PT Bank Sulselbar. Aspek ini mencakup kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Kami menyadari bahwa isu keberlanjutan semakin sentral dan menjadi kebutuhan bagi sebuah bisnis untuk terus berlanjut dengan sehat. Namun kami juga mengakui bahwa masih banyak yang harus kami lakukan untuk mendukung kinerja keberlanjutan, terutama untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangungan keberlanjutan.

Dalam melaksanakan CSR, Bank Sulselbar menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan tunduk pada semua peraturan terkait usaha perbankan yang etis. Dasar pelaksanaan CSR ini adalah :

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007
2. Peraturan Bank Indonesia no.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indoneisa no.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
3. Peraturan Pemerintah (PP) no.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
4. Surat Keputusan Direksi no.066/DIR/V/2012 tentang Pengelolaan Dana CSR PT Bank Sulselbar
5. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa no. 74 tanggal 25 Juni 2013

ALOKASI DANA

Bank Sulselbar mempunyai kebijakan untuk tidak memberikan bantuan, baik itu dalam bentuk dana maupun bentuk lainnya kepada partai politik atau hal-hal lain terkait dengan politik. Kebijakan ini merupakan bentuk independensi Bank Sulselbar terkait dunia politik, walaupun diketahui bahwa para pemegang saham dari Bank Sulselbar adalah pemerintah daerah se-provinsi Sulawesi Selatan dan Barat.

Kebijakan bantuan Bank Sulselbar lebih banyak fokus kepada masyarakat, dimana Bank Sulselbar beroperasional, yaitu provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kegiatan CSR Bank Sulselbar ini direncanakan setiap tahunnya dengan alokasi dana yang diperoleh dari 2,5% Laba Bank. Pelaksanaan CSR berpedoman kepada Sistem Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusannya dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Laporan Keuangan terkait penggunaan dana

CSR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan hasil Auditnya diserahkan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui. Adapun penggunaan dana CSR selama tahun 2014, tersebut adalah sebesar Rp6,783,610,200,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah).

Di masa akan datang, *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Sulselbar akan diupayakan agar lebih strategis, yaitu yang berdampak positif bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan alam sekitar. Bank Sulselbar merencanakan bahwa CSR bermula dari hulu ke hilir, mencakup *Supplier, Input, Process, Output* dan *Customer* (SIPOC).

Adapun contoh kegiatan tersebut adalah pada posisi *Supplier*. Bank akan menggunakan kertas yang ramah lingkungan, dimana *Supplier* wajib menunjukkan bahwa bahan baku untuk pembuatan kertas tersebut tidak berasal dari hutan konservasi atau hutan lindung yang dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Untuk *input,* pemakaian kertas sudah mulai dikurangi, yaitu dengan penggunaan e-document.

Pada bagian *Process*, Bank dalam menghasilkan jasa, wajib melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), memperhatikan hak asasi manusia dan praktik tenaga kerja. Pelaksanaan ini disesuaikan dengan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Disamping itu, untuk *customer,* Bank memberikan layanan dengan sepenuh hati untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya.

Diharapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh Bank Sulselbar bukan hanya merupakan kegiatan bagi-bagi laba, donasi dan kedermawanan semata. Namun, kegiatan CSR merupakan bentuk tanggungjawab Bank atas dampak yang diciptakan dari keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan hidup, melalui perilaku yang transparan dan etis.

Untuk melaksanakan kegiatan CSR, Bank Sulselbar telah menunjuk Departemen Komunikasi dan Humas yang berada di bawah koordinasi Grup *Corporate Secretary*.

PROGRAM CSR

Pelaksanaan Program CSR Bank Sulselbar terbagi dalam 4 (empat) program utama, sebagai berikut :

a. Lingkungan Hidup

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dilakukan sebagai upaya terpadu untuk memanfaatkan sumber daya secara bijaksana untuk diolah secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.

b. Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Ketenagakerjaan, kesehatan dan kesalamatan kerja dilakukan melalui kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama, pelatihan dan pengembangan pegawai.

c. Tanggung Jawab terhadap nasabah

Tanggung jawab terhadap pelanggan/ konsumen dilakukan melalui beberapa program yaitu edukasi perbankan dan pengaduan nasabah.

d. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Pengembangan sosial kemasyarakatan dibagi menjadi 3 (tiga) aspek utama, yaitu program pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, sosial kemasyarakatan atau pembinaan hubungan dengan masyarakat.

PENGGUNAAN DANA CSR BANK SULSELBAR TAHUN 2014

Penggunaan dana CSR Bank Sulselbar per 31 Desember 2014 sebesar Rp6,783,610,200 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) yang meliputi kegiatan antara lain yaitu kesehatan, sosial dan pendidikan, pelestarian alam dan program kemitraan. Penyaluran dana untuk kegiatan CSR dilakukan secara proporsional, menyeimbangkan antara program yang direncanakan dengan permohonan diterima, sesuai dengan kondisi masyarakat di sekitar lingkungan operasional perseroan.

Pendanaan Dana Pensiun Bank Sulselbar Tahun 2009 – 2014

Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
Bantuan Kesehatan	2.643.866.000
Bantuan Sosial dan Pendidikan	1.008.632.500
Bantuan Pelestarian Alam/Lingkungan	409.340.000
Bantuan Pengembangan Sarana & Prasarana	2.707.371.700
Kemitraan	14.400.000

Adapun serangkaian program kegiatan CSR Bank Sulselbar tahun 2014 adalah sebagai berikut :

CSR TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Penyelamatan lingkungan menjadi tantangan bagi kita bersama, tidak hanya bagi Bank Sulselbar, namun bagi semua perusahaan. Kami menyadari bahwa kinerja CSR terkait lingkungan hidup ini belum maksimal karena kami belum menghitung penggunaan

energi, mengolah limbah, maupun menghitung penghematan atas penggunaan material yang hemat energi.

Namun demikian, kami sadar bahwa kami juga harus mulai untuk menghitung dan membuat laporan atas kegiatan CSR ini agar kinerjanya dapat dipantau dengan lebih baik. Hingga akhir 2014, kami mendukung kegiatan CSR dalam bidang lingkungan hidup, misalnya dengan:

1. Kampanye 'Bank Sulselbar Peduli Lingkungan'

   Pada kegiatan "Bank Sulselbar Peduli Lingkungan", Bank telah melakukan berbagai kegiatan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, seperti menjadi prakarsa pelaksana kegiatan Gerakan Bank Menanam, Program Penghijauan Taman Kota Makassar, Pemberian Mobil Pengangkut Sampah Hidrolik,pemberian gerobak dan sepeda motor roda tiga untuk mengangkut sampah, serta bantuan pengadaan tempat sampah baik untuk wilayah Sulawesi Selatan maupun di wilayah Sulawesi Barat.

2. Konsep '*green office*'

   Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dari sisi internal Bank Sulselbar dilakukan dengan menerapkan konsep *green office* yang bertujuan agar gedung dan seluruh ruangan kantor, serta tamu yang berkunjung senantiasa peduli akan kegiatan yang ramah lingkungan. *green office* berupaya menciptakan lingkungan kerja kantor yang bersih, indah, nyaman dan sehat serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Walaupun masih sederhana, *green office* Bank Sulselbar diupayakan untuk dapat dilaksanakan dengan konsisten dan berkesinambungan.

   Konsep *green office* merupakan salah satu langkah nyata untuk meningkatkan efisiensi melalui pengoptimalan pencapaian profit. Dengan implementasi *green office*, banyak hal yang dapat dikelola dengan lebih efisien, baik dari aspek finansial maupun dalam bentuk penghematan pemakaian sumber daya alam dan pengurangan pencemaran.

   Aktivitas *green office* yang telah dilaksanakan Bank Sulselbar tahun 2014 dan berdampak secara langsung terhadap efisiensi antara lain:

   - Membeli dan menggunakan alat tulis kantor yang ramah lingkungan.
   - Mengaktifkan *setting energy saver* atau hemat energi dalam penggunaan komputer dan alat elektronik lainnya.
   - Menggunakan pendingin udara (AC) sesuai dengan kebutuhan.
   - Menggunakan air secara efisien.
   - Melakukan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* barang-barang yang dipergunakan.

CSR TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Bank Sulselbar berkomitmen untuk memberdayakan sumber daya manusia yang berada di sekitar Bank. Saat ini semua pegawai Bank, 100% berdomisili di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Mereka inilah yang termasuk dalam pegawai lokal.

Selain itu, Sulselbar juga aktif menyelenggarakan kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan dengan memberikan bantuan, yaitu:

a. Bidang sosial, meliputi antara lain:
   - Bantuan korban kebakaran di Kec. Rappocini Makassar
   - Bantuan Korban bencana Angin Puting Beliung di Sidrap dan Bulukumba
   - Bantuan Pembangunan Gedung Panti Asuhan Al-Ikhlas Makassar

b. Bidang kesehatan, meliputi antara lain:
   - Pemberian sarana kesehatan (alat medis, mobil ambulan)
   - Pengobatan umum
   - Bantuan Kegiatan Donor Darah

c. Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana umum, meliputi antara lain:
   - Perbaikan/pembangunan sarana ibadah, sarana kesehatan
   - Perbaikan/pembangunan sarana jalan dan jembatan
   - Program penghijauan, Pengelolaan air dan Penyehatan lingkungan
   - Bantuan penyaluran listrik kepada 100 rumah tangga di daerah terpencil dan kegiatan ini akan terus dilanjutkan karena berdampak besar, yaitu meningkatkan perekonomian dan pendidikan masyarakat. Penyaluran listrik ini dilakukan di desa Bantaeng, Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat, Ibu-ibu PKK, Mitra Sulselbar, dan Yayasan Pilar Kebangsaan di Bandung.
   - Bantuan Kegiatan Bedah Rumah di Kabupaten Polman

d. Bidang Pendidikan, meliputi antara lain:
   - -Bantuan sarana pendidikan: perbaikan/ pembangunan sekolah/pesantren
   - -Bantuan perpustakaan sekolah
   - -Bantuan pelatihan keterampilan

Kegiatan CSR lainnya yang bersifat strategis, adalah:

1. Menyalurkan dana CSR kepada perorangan maupun kelompok dalam bentuk bantuan modal yang akan dikembalikan ke bank berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, antara lain: Pembinaan Usaha Mikro dan Pembukaan Lapangan Kerja.

2. Menyalurkan dana untuk kelompok tani, disertai dengan edukasi pertanian dan pengelolaan keuangan.

3. Memberikan akses kedit bagi para petani yang kesulitan legalitas dan administrasi. Selama tahun 2014, akses ini diberikan dalam bentuk sertifikasi kepada petani kakao dan peternak sapi.

4. Memberikan kesempatan praktik kerja lapangan kepada siswa menengah atas dan mahasiswa untuk dapat belajar bekerja di Bank Sulselbar

CSR TERKAIT NASABAH

Kegiatan Edukasi Bank Sulselbar dilaksanakan secara berkala dengan tujuan mempererat silahturahmi dan memberikan edukasi tentang perbankan baik kepada nasabah maupun masyarakat umum. Edukasi perbankan ini juga dilakukan oleh Bank Sulselbar ke sekolah-sekolah

dengan cara simulasi kegiatan perbankan.

Disamping itu, Bank Sulselbar selalu memberikan informasi yang transparan kepada semua nasabahnya terkait risiko investasi yang ada pada setiap produk. Risiko setiap investasi tercantum dalam prospektus dan dijalankan sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia.

Bank Sulselbar menyediakan C*ustomer Service, Front liner* serta *Call Centre* untuk menjawab setiap pengaduan dan keluhan dari pelanggan. Disamping itu, pemantauan dan penyelesaian atas pengaduan nasabah dilakukan oleh Tim Penanganan & Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Tim P3N) sesuai dengan buku pedoman P3N. Kinerja tim P3N dipantau oleh Grup Kepatuhan dan dilaksanakan oleh Grup *Corporate Secretary*.

Pengaduan Nasabah

Pengaduan nasabah merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan perlindungan kepada nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank dan pengelolaannya dijalankan secara konsisten untuk meminimalisir potensi risiko reputasi yang dapat berdampak pada kepercayaan dan loyalitas nasabah.

Mekanisme pengaduan nasabah berpedoman pada peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Nasabah dilakukan dengan membentuk unit dan atau fungsi khusus yang berfungsi untuk menerima setiap pengaduan yang diajukan nasabah terkait dengan transaksi yang dilakukan nasabah. Unit kerja pengaduan nasabah Bank Sulselbar yakni

Grup Kepatuhan dan Grup Corporate Secretary serta Unit Khusus Pengaduan Nasabah (UKPN) pada masing-masing kantor cabang. Pembentukan unit kerja tersebut juga untuk menjamin bahwa seluruh pengaduan nasabah dapat terselesaikan secara efektif dan sesuai ketentuan.

Pengaduan nasabah yang diterima Bank Sulselbar selama tahun 2014 sebagai berikut :

Jenis Pendidikan	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah
	Bunga /Bagi Hasil/Margin Keuntungan	Denda/ Pinalti	Biaya Adm./ Provisi/ Transaksi	Kegagalan/ Keterlambatan Transaksi	Jumlah Tagihan/Saldo rekening	Lain-lain	
Penghimpunan Dana	-	-	-	-	-	230	230
Penyaluran Dana	-	-	-	-	-	-	-
Sistem Pembayaran	-	-	-	1.429	-	817	2.246
Produk Kerjasama	-	-	-	-	-	-	-
Produk Lainnya	-	-	-	-	-	-	-

Edukasi Perbankan

Program edukasi perbankan yang diselenggarakan Bank Sulselbar bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai layanan produk dan jasa Bank Sulselbar. Edukasi perbankan Bank Sulselbar tahun 2014 melibatkan nasabah dan masyarakat dengan kegiatan :

1. Program SIMOLEK yang bertujuan meningkatkan tingkat literasi jasa keuangan masyarakat, melalui SIMOLEK inilah masyarakat akan mendapatkan informasi dan edukasi mengenai layanan keuangan Bank Sulselbar.

2. Kegiatan Diskusi dan Literasi Keuangan yang difokuskan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah , segmentasi ini dipilih karena dinilai representative dan sesuai dengan fokus produk perbankan Bank Sulselbar dalam hal pembiayaan , dimana Segmentasi komunitas UMKM ini terdiri atas pelaku

UMKM, ibu rumah tangga, akademisi dan masyarakat umum lainnya.

3. Kegiatan Pendampingan Keikutsertaan UMKM yang bertujuan agar UMKM dapat mengelola dan mengembangkan manajemen usahanya untuk meningkatkan nilai tambah / prospek bisnis serta secara tidak langsung menjadi bentuk edukasi kepada para UMKM binaan maupun UMKM umum dalam hal memahami potensi bisnis yang bisa terakses pasar secara luas.

CSR TERKAIT SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia bagi Bank Sulselbar bersifat menyeluruh, tidak hanya bagi para pegawai saja, namun juga potensi sumber daya yang ada dalam masyarakat, khususnya yang berada di sekitar Bank.

Secara internal, keberadaan pegawai Bank Sulselbar sebagai aset Perusahaan diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB). PKB disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja, termasuk di dalamnya adalah ketentuan keselamatan kerja. Kegiatan yang terkait dengan keamanan dan keselamatan kerja ini, misalnya memperbaiki hydrant, memasang alat pemadam kebaran di tiap gedung, memberikan petunjuk evakuasi, menentukan *assembly point* bila ada keadaan darurat, mengadakan kegiatan donor darah setiap tiga bulan dari pegawai Bank Sulselbar untuk Palang Merah Indoneisa (PMI), serta menyediakan dokter jaga setiap hari di jam kantor.

Kepatuhan Bank Sulselbar untuk menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat ditunjukkan dengan tidak adanya jumlah kecelakaan kerja yang terjadi selama tahun 2014.

Bank Sulselbar selalu menjaga komposisi sumber daya manusianya agar dapat berkarya secara optimal. Proses seleksi dan penerimaan pegawai baru berlangsung melalui proses terbuka tanpa mempertimbangkan jenis kelamin, suku, agama, ras, status sosial dan afiliasi politik maupun hal-hal lain yang bersifat diskriminatif. Pada tahun 2014, dilaksanakan proses rekrutmen atas pegawai baru Bank Sulselbar untuk Tenaga Frontliner & Back office sebanyak 165 (sertaus enam puluh lima orang). Penyelenggaran rekrutmen Bank Sulselbar dilakukan secara independen dan transparan melalui kerjasama dengan pihak eksternal yaitu lembaga atau *assessor* rekrutmen seperti Universitas Hasanuddin, PPM Manajemen, LPPI, Kimia Farma, RS. Labuang Baji, Universitas Negeri Makassar, Prospek Human Capital dan sebagainya.

Anggaran Pelatihan 2014

Biaya untuk program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Bank Sulselbar tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 15.444 juta dan terealisasikan sebesar Rp. 11.017 juta atau sekitar 71 % dari anggaran yang direncanakan.

Biaya Pendidikan terhadap Biaya Tenaga Kerja Bank Sulselbar Tahun 2007 – 2014

Tahun	Biaya Pendidikan	Biaya Tenaga Kerja	Proporsi (%)
	Rp Juta		
2014	15.444	286.097	5%
2013	11.289	312.355	3.61 %
2012	7.192	275.279	2,61%
2011	8.552	207.785	4,12%
2010	7.100	224.390	3,16%
2009	5.395	177.022	3,05%
2008	5.746	170.933	3,36%
2007	**2.257**	**133.526**	**1,69%**

Program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tahun 2014

Program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Bank Sulselbar bertujuan untuk membentuk, mempersiapkan, membina, dan meningkatkan kompetensi serta kualitas pegawai secara berkesinambungan. Untuk itu, pendidikan dan pelatihan memiliki peran penting yang tidak hanya sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan produktivitas kerja.

Program pendidikan dan pelatihan Bank Sulselbar senantiasa berupaya memperhatikan prinsip – prinsip :

- Pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang disyaratkan untuk setiap jabatan merupakan faktor penentu untuk menetapkan program pelatihan dan pengembangan di setiap jenis

pendidikan dan pelatihan.

- Pengembangan kualitas pegawai mengikuti kebutuhan Bank akan kompetensi dan keahlian tertentu untuk mendukung peningkatan kapasitas dan volume bisnis.
- Pendidikan dan pelatihan diprioritaskan untuk memenuhi persyaratan atas kompetensi dan pengetahuan untuk setiap posisi jabatan.
- Meningkatkan keahlian profesi segenap pegawai.
- Merupakan program yang dinamis, secara terus menerus beradaptasi pada kebutuhan organisasi dan pekerjaan.

Bank Sulselbar juga telah menetapkan pola pelatihan sebagai acuan untuk setiap program pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan, sebagai berikut :

- Program Pelatihan Umum

  Program pelatihan ini diperuntukkan bagi calon pegawai atau pegawai baru sebagai tahap pengenalan terhadap Bank Sulselbar antara lain organisasi, budaya kerja dan garis besar lingkup usaha Bank Sulselbar. Program pelatihan umum terdiri atas program pelatihan umum untuk pegawai administrasi dan non administrasi.

- Program Pelatihan Kompetensi

  Program pelatihan kompetensi diperuntukkan bagi calon pegawai maupun pegawai tetap. Pelatihan kompetensi dimaksudkan agar setiap pegawai memiliki knowledge dan skills yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga diperoleh mutu dan hasil kerja yang optimal.

- Program Pelatihan Lainnya

  Program ini merupakan program pelatihan yang tidak termasuk dalam program pelatihan umum maupun pelatihan kompetensi, yang antara lain terdiri dari pengembangan wawasan, ceramah kerohanian dan lain sebagainya.

- Program Pengembangan profesi

  Program ini adalah program pengembangan yang disusun khusus untuk sekelompok peran tertentu, sebagai berikut :

  1. Program pengembangan profesi untuk jabatan fungsional, misalnya program pengembangan auditor dan pengembangan sekretaris.
  2. Program pengembangan profesi untuk jabatan struktural yang terdiri dari program pengembangan kepemimpinan yang diselenggarakan khusus untuk pegawai dengan golongan jabatan dan pangkat tertentu.
  3. Program pengembangan manajerial yang diselenggarakan khusus untuk pegawai dengan jabatan struktural tertentu, misalnya Pemimpin Grup, Pemimpin Cabang, dan Pemimpin Departemen.

Sepanjang tahun 2014, Bank Sulselbar telah menginvestasikan dana untuk program pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan program pengembangan pegawai lainnya, sebesar Rp. 15.444 juta, terjadi peningkatan sebesar 73% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp. 11.289 juta.

Biaya Pendidikan terhadap Biaya Tenaga Kerja Bank Sulselbar Tahun 2007 – 2014

Tahun	Realisasi	Anggaran	Realisasi (%)
	Rp Juta		
2014	11.017	15.444	71 %
2013	11.289	15.000	75,26 %
2012	7.192	8.068	89,14%
2011	8.552	10.255	83,39%
2010	7.100	8.120	87,44%
2009	5.395	5.256	102,64%
2008	5.746	6.199	92,69%

Program pendidikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan pegawai Bank Sulselbar baik melalui program regular maupun non regular. Program pelatihan diselenggarakan secara *inhouse* maupun *exhouse* yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan ternama dan profesional, khususnya di bidang perbankan.

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan secara internal maupun oleh pihak eksternal. Pada tahun 2014, program pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai Bank Sulselbar yaitu sekitar 198 pelatihan dengan jumlah pegawai yang ikut serta sebanyak 2016 orang.

Program Pendidikan dan Jumlah Peserta Tahun 2011-2014

Jenis Pendidikan	Jumlah Peserta (Tahun)			
	2014	2013	2012	2011
Pendidikan Karir	39	253	230	394
Pendidikan Teknis	1230	117	186	641
Seminar, Sosialisasi & Workshop	479	159	267	1.015
Pendidikan Lainnya	268	423	633	79
Total	**2016**	**952**	**1316**	**2219**

Selain pegawai yang masih aktif bekerja, Bank Sulselbar juga memberikan persiapan memasuki masa pensiun bagi para pegawainya. Beberapa bulan menjelang pensiun, pegawai ini diberi kesempatan untuk mengikuti kursus tentang wirausaha, baik di daerah sekitar maupun di luar kota.

Rencana Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015

Sumber daya manusia yang handal dan berkualitas merupakan komponen terpenting bagi Bank Sulselbar dalam mendukung pencapaian visi dan misi bank, serta dalam rangka pencapaian strategi dan target menuju *regional champion*. Oleh karena itu, strategi pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas Bank Sulselbar untuk dikelola secara terintegrasi. Program pendidikan dan pelatihan yang terprogram dan berkesinambungan akan dilaksanakan sebagai wujud untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional di bidangnya masing – masing sehingga akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan bisnis bank.

Program pendidikan dan pelatihan, diselenggarakan baik untuk program jangka pendek untuk meningkatkan keterampilan operasional pegawai dan memperbaiki proses bisnis, maupun program jangka panjang yaitu memberikan pelatihan berjenjang, baik teknis maupun manajerial, untuk meningkatkan wawasan penunjang jenjang karir.

Rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan potensi dan wawasan pegawai Bank Sulselbar pada tahun 2015 telah direncanakan dalam Rencana Bisnis Bank Sulselbar dianggarkan sebesar 5 % dari anggaran biaya tenaga kerja tahun 2014. Program pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan tahun 2014 sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Dasar Perbankan
2. Program Pelatihan Perbankan Syariah
3. Program Pelatihan Manajerial
4. Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Penunjang Keahlian
5. Seminar dan Workshop
6. Program Beasiswa Pendidikan
7. Program Kegiatan Ceramah/Penyegaran Rohani

DATA PERUSAHAAN

STRUKTUR ORGAN

Keterangan :

Garis Komando ————

Garis Koordinasi ·····

Sesuai SK Direksi No. SK/144/DIR/XI/2012 tanggal 22 Desember 2012
Perihal Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

NISASI PT. BANK SULSELBAR

BIOGRAFI PEMIMPIN GRUP

Biography Of Group Heads

NamaPejabat *Names of Officials*	Jabatan *Position*	Dasar/KetetapanPengangkatan *Basis/Provisions of Appointment*
Muh. Asril Azis	Pemimpin Grup SDM *The head of HR*	Surat KeputusanDireksi No.SK/145/DIR/XI/2014 tanggal 14Nop2014 *Decree of Directors* *No. SK/145/DIR/XI/2014 dated 14th of Nov 2014*
Abdul Rahman Gau	Pemimpin Grup Treasury *The Head of Treasury Group*	Surat Keputusan Direksi No.SK/145/DIR/XI/2014 tanggal 14Nop2014 *Decree of Directors* *No. SK/145/DIR/XI/2014 dated 14th of Nov 2014*
Dian A. Utina	Pemimpin Grup Perencanaan & Pengembangan *The Head of Planning and Development Group*	Surat Keputusan Direksi No.SK/060/DIR/VII/2014 tanggal 07Juli2014 *Decree of Directors* *No. SK/060/DIR/VII/2014 dated 7th of July 2014*
Chairun Maseali	Pemimpin Grup Audit Intern *The Head of Internal Audit Group*	Surat Keputusan Direksi No.SK/091/DIR/VII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 *Decree of Directors* *No. SK/091/DIR/VII/2014 dated 15th of August 2014*
Hasanuddin Usman	Pemimpin Grup Kepatuhan *The Head of Pursuance Group*	Surat Keputusan Direksi No.SK/080/DIR/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 *Decree of Directors* *No. SK/080/DIR/VII/2012 dated 3rd of July 2012*

NamaPejabat *Names of Officials*	Jabatan *Position*	Dasar/KetetapanPengangkatan *Basis/Provisions of Appointment*
Ahmad Firdaus	Pemimpin Grup Pemasaran *The Head of Marketing Group*	Surat Keputusan Direksi No.SK/090/DIR/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 *Decree of Directors* *No. SK/145/DIR/XI/2014 dated 14th of Nov 2014*
Subhan B. Utama	Pemimpin Grup Pengendalian Keuangan *The Head of Financial-Control Group*	Surat Keputusan Direksi No.SK/145/DIR/XI/2014 tanggal 14 Nop 2014 *Decree of Directors* *No. SK/145/DIR/XI/2014 dated 14th of Nov 2014*
Danny Gunawan	Pemimpin Grup Umum *The Head of Public Group*	Surat Keputusan Direksi No.SK/060/DIR/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 *Decree of Directors* *No. SK/060/DIR/VII/2014 dated 7th of July 2014*
Muhammad Iqbal	Pemimpin Grup Teknologi Informasi *The Head of Information Technology Group*	Surat Keputusan Direksi No.SK/001/DIR/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 *Decree of Directors* *No. SK/001/DIR/I/2013 dated 3rd of January 2013*
Amri Mauraga	Pemimpin Grup Manajemen Risiko *The Head of Risk Management Group*	Surat Keputusan Direksi No.SK/145/DIR/XI/2014 tanggal 14 Nop 2014 *Decree of Directors* *No. SK/145/DIR/XI/2014 dated 14th of Nov 2014*
Iswadi Ayub	Pemimpin Grup Unit Usaha Syariah *The Head of Shariah Business Unit*	Surat Keputusan Direksi No.SK/080/DIR/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 *Decree of Directors* *No. SK/080/DIR/VII/2012 dated 3rd of July 2012*
Irfan W. Roem	*Corporate Secretary*	Surat Keputusan Direksi No.SK/145/DIR/XI/2014 tanggal 14 Nop 2014 *Decree of Directors* *No. SK/145/DIR/XI/2014 dated 14th of Nov 2014*

Muh. Asril Azis
Pemimpin Grup SDM

Warga Negara Indonesia, 45 tahun (lahir pada tanggal 14 Februari 1969). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1996. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun2000. Menjabat sebagai Pemimpin Grup SDM sejak tanggal 14 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/145/DIR/XI/2014.

Abdul Rahman Gau
Pemimpin Grup Treasury

Warga Negara Indonesia, 49 tahun (lahir pada tanggal 07 Agustus 1965). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1989. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1991. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Treasury sejak tanggal 14 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/145/DIR/XI/2014.

Dian A. Utina
Pemimpin Grup Perencanaan dan Pengembangan

Warga Negara Indonesia, 46 tahun (lahir pada tanggal 21 Mei 1968). Meraih gelar Doktor di Bidang Ekonomi dari Universitas Hasanuddin pada Tahun 2014. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1995. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Perencanaan dan Pengembangan sejak tanggal 07 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/060/DIR/VII/2014.

Chairun Maseali
Pemimpin Grup Audit Intern

Warga Negara Indonesia, 51 tahun (lahir pada tanggal 23 Oktober 1963). Meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2002. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1989. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Audit Intern sejak tanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/091/DIR/VII/2014.

Hasanuddin Usman
Pemimpin Grup Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, 51 tahun (lahir pada tanggal 27 Desember 1963). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1986. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1989. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Kepatuhan sejak tanggal 03 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/080/DIR/VII/2012.

Ahmad Firdaus
Pemimpin Grup Pemasaran

Warga Negara Indonesia, 47 tahun (lahir pada tanggal 23 April 1967). Meraih gelar Sarjana Manajemen dari STIM LPI Makassar pada tahun 2005. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1987. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Pemasaran sejak tanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/090/DIR/VIII/2014.

Subhan B. Utama
Pemimpin Grup Pengendalian Keuangan

Warga Negara Indonesia, 49 tahun (lahir pada tanggal 20 Mei 1965). Meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Hasanuddin pada tahun 2004. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1995. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Pengendalian Keuangan sejak tanggal 14 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/145/DIR/XI/2014.

Amri Mauraga
Pemimpin Grup Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, 40 tahun (lahir pada tanggal 05 April 1974). Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2004. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1995. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko sejak tanggal 14 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. No. SK/145/DIR/XI/2014

Danny Gunawan
Pemimpin Grup Umum

Warga Negara Indonesia, 53 tahun (lahir pada tanggal 03 September 1961). Meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Hasanuddin pada tahun 2004. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1988. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Umum sejak tanggal 07 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/060/DIR/VII/2014.

Iswadi Ayub
Pemimpin Grup Unit Usaha Syariah

Warga Negara Indonesia, 38 tahun (lahir pada tanggal 10 Mei 1976). Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari YPUP Makassar pada tahun 1997. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 2007. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Unit Usaha Syariah sejak tanggal 03 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/080/DIR/VII/2012.

Muhammad Iqbal
Pemimpin Grup Teknologi Infomasi

Warga Negara Indonesia, 40 tahun (lahir pada tanggal 28 Juli 1974). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE AMKOP Makassar pada tahun 2003 Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 2000. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Teknologi Informasi sejak tanggal 03 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/001/DIR/I/2013 tanggal 03 Januari 2013.

Irfan W. Roem
Pjs. Pemimpin Grup Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, 35 tahun (lahir pada tanggal 19 Agustus 1979). Meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Hasanuddin pada tahun 2003. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 2005. Menjabat sebagai Pejabat Sementara Pemimpin Grup Corporate Secretary sejak tanggal 14 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/145/DIR/XI/2014.

BIOGRAFI DEWAN KOMISARIS

H. A. Muallim, SH., M.Si
Komisaris Utama
Pribadi
Berusia 61 tahun. Lahir di Bone pada tanggal 23 Desember 1953.

Kewarganegaraan dan Domisili
Warga Negara Indonesia. Berdomisili di Makassar, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan
Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 27 Januari 2007 berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta No. 8 tanggal 27 Januari 2007 tentang penunjukan sebagai Komisaris Utama Bank Sulselbar
Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 Juni 2014 diperpanjang masa jabatan sebagai Komisaris Utama sampai dengan ditetapkannya Komisaris Utama dan Komisaris Independen secara definitif pada RUPS LB yang direncanakan akan diselenggarakan pada tahun 2015.

Pendidikan
Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1977 dan gelar Master di bidang Administrasi Publik dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2001.

Pelatihan
Sejumlah pelatihan/seminar/workshop yang diikuti sebagai Komisaris Utama antara lain pelatihan mengenai manajemen perbankan, manajemen risiko, *good corporate governance* dan lain sebagainya di Indonesia.

Perjalanan Karir
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Sulselbar, berkarir dalam lingkup Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan antara lain Kepala Bagian Perundang-Undangan & Penataan Hukum Pemprov. Sulsel (1987 – 1989), PYMT Sekretaris Wilayah/Daerah Tk.II Sidrap (1989 – 1993), PYMT Sekretaris Wilayah/ Daerah Tk.II Gowa (1993 – 1994), Pj. Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II Gowa (1994 – 1996), Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II Sinjai (1996 – 1998), Wakil Ketua BKPMD Tk. I Sulsel (1998 – 1999), Kepala Kantor PMD (1999 – 2001), Kepala Bawasda Prov. Sulsel (2001 – 2002), Pejabat Bupati Luwu Utara (2004 – 2006) dan Sekretaris Prov. Sulawesi Selatan (2006 – 2014).

Drs. H. A. Tjoneng Mallombasang

Komisaris Independen

Pribadi
Berusia 67 tahun. Lahir di Gowa pada tanggal 17 Februari 1946.

Kewarganegaraan dan Domisili
Warga Negara Indonesia. Berdomisili di Makassar, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan
Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak Desember 2012 berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta No. 16 tanggal 15 Desember 2012 tentang Penunjukan sebagai Komisaris Independen Bank Sulselbar.
Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 Juni 2014 diperpanjang masa jabatan sebagai Komisaris Independen sampai dengan ditetapkannya Komisaris Utama dan Komisaris Independen secara definitif pada RUPS LB yang direncanakan akan diselenggarakan pada tahun 2015.

Pendidikan
Mendapatkan gelar Sarjana Administrasi dari STIA LAN-RI tahun 1976 dan gelar Master bidang Ekonomi Pembangunan dari Senior University International Jakarta tahun 1999.

Pelatihan
Sejumlah pelatihan/seminar/workshop yang diikuti sebagai Komisaris Independen antara lain *Workshop Best Practice* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Jakarta, Seminar BPD-SI di Jakarta, serta sejumlah pelatihan mengenai manajemen perbankan, manajemen risiko, *good corporate governance* dan lain sebagainya di Indonesia.

Perjalanan Karir
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen, juga pernah menjabat sebagai Komisaris pada tahun 2007 dan Komisaris Utama Bank Sulselbar tahun 2000 – 2006. Sejumlah jabatan dalam lingkup Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan yang pernah dipegang antara lain Sekwilda Tk. II Takalar (1987 – 1992), Kepala Biro Organisasi Setwilda Tk. I Sulsel (1992 – 1996), Kepala Dinas P&K Propensi Dati I Sulsel (1996 – 1997), Ass. Kessos Sekwilda Tk. I Sulsel (1997 – 1999), Kepala BKPMD Sulsel (1999 – 2000), Plts. Ass. Kessos Sekda Sulsel (2000 – 2001) dan Sekretaris Daerah Sulsel (2000 – 2006).

Drs. Natali Ikawidjaja, MM

Komisaris Independen

Pribadi
Berusia 51 tahun. Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 25 Desember 1963.

Kewarganegaraan dan Domisili
Warga Negara Indonesia. Berdomisili di Makassar, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan
Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2008 berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta No. 02 tanggal 01 Mei 2009 tentang Penunjukan sebagai Komisaris Independen Bank Sulselbar.

Pendidikan
Mendapatkan gelar Sarjana MIPA dari Universitas Pakuan Bogor Jawa Barat tahun 1987, gelar Master di bidang ekonomi/manajemen pemasaran dari Universitas Hasanuddin tahun 2001 dan sementara mengenyam pendidikan S3/Doktor bidang ekonomi pada Universitas Hasanuddin.

Pelatihan
Sejumlah pelatihan/seminar/workshop yang

diikuti sebagai Komisaris Independen antara lain *Round Table Discussion* Implementasi Basel III di Jakarta, *Human Capital Planning Towards* ASEAN *Economic Community* 2015 di Jakarta, dan Seminar Penerapan peaturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Khususnya yang terkait dengan perbankan, serta sejumlah pelatihan mengenai manajemen perbankan, manajemen risiko, *good corporate governance* dan lain sebagainya di Indonesia.

Perjalanan Karir

Sebelum menjabat Komisaris Independen pada Bank Sulselbar, berkarir sebagai akademisi/dosen pengajar pada beberapa universitas negeri dan swasta di Makassar, pernah menjadi Konsultan PUMK Bank Indonesia Makassar (1995), *Research and Evalution Coordinator* pada *Plan International* Makassar (1992 – 1995), dan *Senior Program Manager Project Concern International* Kendari Sulawesi Tenggara (1990 – 1992).

Prof. Muhammad Amri

Komisaris Independen

Pribadi

Berusia 48 tahun. Lahir di Majene pada tanggal 18 Januari 1966.

Kewarganegaraan dan Domisili

Warga Negara Indonesia. Berdomisili di Makassar, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2013 berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta No. 74 tanggal 25 Juni 2013 tentang Penunjukan sebagai Komisaris Independen Bank Sulselbar.

Pendidikan

Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin tahun 1989, gelar Master di bidang ekonomi/manajemen dari *University of Philippines* tahun 1995 dan gelar *Doctor of Philosophy* dari *University of Philippines* tahun 2001.

Pelatihan

Sejumlah pelatihan/seminar/workshop yang diikuti sebagai Komisaris Independen antara lain Workshop Kupas Tuntas Faktor Self Assessment GCG sebagai Elemen Penting dalam Penetapan Peringkat Komposisi GCG di Jakarta, Sistem Remunerasi dan Nominasi yang Komprehensif, Identifikasi dan Implementasi Sistem remunerasi Bank di Jakarta, dan Pemutakhiran Teknik Investigasi Fraud Berdasarkan *Best Practice*, serta sejumlah pelatihan mengenai manajemen perbankan, manajemen risiko, *good corporate governance* dan lain sebagainya di Indonesia.

Perjalanan Karir

Sebelum menjabat Komisaris Independen pada Bank Sulselbar, berkarir sebagai akademisi/dosen pengajar serta Guru Besar/Professor pada Universitas Hasanuddin sampai dengan saat ini.

BIOGRAFI DEWAN DIREKSI

BIOGRAFI DIREKSI PT. BANK SULSELBAR

H. A. Muhammad Rahmat
Direktur Utama

Pribadi
Berusia 51 tahun. Lahir di Makassar pada tanggal 06 Januari 1963.

Kewarganegaraan dan Domisili
Warga Negara Indonesia. Berdomisili di Makassar, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan
Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 24 Juni 2014 berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta No. 13 tanggal 24 Juni 2014 tentang penunjukan sebagai Direktur Utama Bank Sulselbar.

Pendidikan
Mendapatkan gelar Sarjana Sospol Administrasi Keuangan Negara dari Universitas Hasanuddin tahun 1988 dan Teknik Sipil Universitas Hasanuddin tahun 1991. Gelar Magister Manajemen dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2000 dan Magister *Science*/Sosial Program Penyelarasan Universitas Hasanuddin tahun 2001.

Pelatihan
Sejumlah pelatihan/seminar/workshop yang pernah diikuti antara lain Solusi Penanganan Perbankan, Training Rencana Bisnis Bank, Two days workshop and disscussion "Teknik-teknik pelaksanaan self assesment dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) serta sejumlah pelatihan mengenai manajemen perbankan, kredit, manajemen risiko dan lain sebagainya di Indonesia.

Perjalanan Karir
Memulai karir di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sejak tahun 1989 dan sejumlah jabatan penting selama 25 tahun berkarir di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan antara lain Pemimpin Cabang Pangkep tahun 1996 – 2003, Pemimpin Cabang Gowa tahun 2003 – 2007 dan terakhir menjabat sebagai Wakil Pemimpin Divisi Akuntansi dan Teknologi Informasi pada tahun 2007 dan terpilih sebagai Direktur Pemasaran untuk masa jabatan tahun 2007-2014 dan terakhir terpilih sebagai Direktur Utama PT. Bank Sulselbar untuk masa jabatan 2014-2018.

H. Ambo Samsuddin
Direktur Umum

Pribadi
Berusia 52 tahun. Lahir di Selayar pada tanggal 23 September 1962

Kewarganegaraan dan Domisili
Warga Negara Indonesia. Berdomisili di Makassar, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan
Menjabat sebagai Direktur Umum sejak tanggal 24 Juni 2014 berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta No. 13 tanggal 24 Juni 2014 tentang penunjukan sebagai Direktur Umum Bank Sulselbar.

Pendidikan
Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin tahun 1986 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2002.

Pelatihan
Sejumlah pelatihan/seminar/workshop yang pernah diikuti antara lain Peningkatan Pemahaman tentang aktivitas treasury, Monitoring BPD Net Online, Workshop Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sektor Perbankan, Pengukuhan PIA angkatan XV dan Seminar Nasional serta sejumlah pelatihan mengenai manajemen perbankan, kredit, manajemen risiko dan audit dan lain sebagainya di Indonesia.

Perjalanan Karir
Memulai karir di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sejak tahun 1987 dan sejumlah jabatan penting selama 27 tahun berkarir di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan antara lain Pemimpin Cabang Pembantu Gowa tahun 1995-1997, Pemimpin Cabang Sinjai tahun 1997-2000, Kepala Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Biro Perencanaan, Pengembangan dan Kepatuhan tahun 2003-2005, Wakil Pemimpin Satuan Kerja Manajemen Risiko tahun 2007-2008, Pemimpin Satuan Kerja Manajemen Risiko tahun 2008-2009, Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia tahun 2009-2012, Pemimpin Grup Audit Intern tahun 2012-2014 dan terakhir terpilih sebagai Direktur Umum untuk masa jabatan 2014-2018.

H. Harris Saleng
Direktur Kepatuhan

Pribadi
Berusia 58 tahun. Lahir di Sidenreng Rappang pada tanggal 08 September 1956

Kewarganegaraan dan Domisili
Warga Negara Indonesia. Berdomisili di Makassar, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan
Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak tahun 2002 dan terpilih kembali berdasarkan akta berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam akta No. 74 tanggal 25 Juni 2013 sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulselbar.

Pendidikan
Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin tahun 1984.

Pelatihan

Sejumlah pelatihan/seminar/workshop yang pernah diikuti antara lain Seminr Nasional Pengawasan Industri Jasa Keuangan Terintegrasi, Seminar FKDKP untuk level pengusrus bank, Training Rencana Bisnis Bank, Seminar Human Capital Toward ASEAN Economic serta sejumlah pelatihan mengenai manajemen perbankan, kredit, manajemen risiko dan lain sebagainya di Indonesia.

Perjalanan Karir

Memulai karir di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sejak tahun 1984 dan sejumlah jabatan penting selama 30 tahun berkarir di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan antara lain Pemimpin Cabang Maros tahun 1990-1991, Pjs. Kabag Riset Biro Perencanaan tahun 1991-1993, Pemimpin cabang Pare-pare tahun 1993-1998, Kepala Biro kredit tahun 1998-2002 dan menjabat sebagai Direkutur Kepatuhan Bank Sulselbar sejak tahun 2002 sampai sekarang.

BIOGRAFI KOMITE

KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN ANTI FRAUD

Drs. Natali Ikawidjaja, MM
Ketua
Menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud sejak tahun 2010. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Sulselbar.

Drs. H. Muslimin Abbas, MSi
Anggota
Warga Negara Indonesia, 65 tahun, lahir di Barru pada tanggal 20 September 1949. Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sulselbar sejak tahun 2007. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin dan gelar Master di bidang administrasi dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2000. Jabatan penting yang pernah dipegang dalam lingkup Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan antara lain Kepala Biro Keuangan (2000), Sekretaris Daerah Kab. Sidrap (2002), dan Sekretaris Daerah Kab. Maros (2006). Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas BPD Sulsel (2005) dan anggota Dewan Komisaris Bank Sulsel (2006).

Drs. As'ad Makarau
Anggota
Warga Negara Indonesia, 63 tahun, lahir di Batui (Sulteng) pada tanggal 13 Juli 1951. Mendapatkan gelar Ajun Akuntan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1979 dan Sarjana Ekonomi dari STIE-YPUP di Makassar. Berkarir sebagai Auditor pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan RI (1980 – 1983) dan Auditor Ahli Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan (1983 – 2007). Diangkat menjadi anggota Komite Audit per 1 Juli 2007 sampai dengan Juli 2014. Terhitung sejak 1 Agustus 2014 diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Drs. H. A. Tjoneng Mallombasang

Ketua
Menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tahun 2013. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Sulselbar dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

H. A. Muallim, SH, MSI
Anggota

Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tahun 2014. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Sulselbar, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Prof. Muhammad Amri
Anggota

Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tahun 2013. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Sulselbar, Ketua Komite Audit dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dra. Hj. Sulaeha Achmad
Anggota

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 31 Desember 1951. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin. Sejumlah jabatan penting selama 25 tahun berkarir di Bank Sulselbar adalah Wakil Kepala Biro Keuangan & Akuntansi (1983), Wakil Kepala Cabang Makassar (1990), Wakil Kepala Biro Pengawasan (1992), Wakil Kepala Biro Umum (1993), Kepala Biro Perencanaan & Pengembangan (1995), dan Kepala Biro SDM (1998). Jabatan terakhir adalah Pemimpin Divisi Akuntansi dan Teknologi Informasi (2002). Mengakhiri masa bakti pada tanggal 1 Januari 2007. Diangkat menjadi Anggota Komite Audit per 1 Juli 2007 sampai dengan Desember 2012 dan sejak Januari 2013 diangkat menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Drs. H. Andi Syahriwijaya, MM
Anggota

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, lahir di Watampone pada tanggal 08 Juli 1947. Menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan dan Nominasi sejak tahun 2013. Meraih gelar Sarjana dari STIA-LAN RI di Makassar pada tahun 1978 dan gelar Master pada Pasca Sarjana UMI pada tahun 2002. Berkarir sebagai Kepala Biro Otonomi Daerah Prov. Sulsel (1997 – 1999), Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Maros (1999 – 2002) dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap (2002 – 2007).

Muh. Asril Azis
Anggota

Warga Negara Indonesia, 45 tahun (lahir pada tanggal 14 Februari 1969). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1996. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 2000. Menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tahun 2014 dan saat ini pula menjabat sebagai Pemimpin Grup SDM.

KOMITE AUDIT

Prof. Muhammad Amri
Ketua
Menjadi Ketua Komite Audit sejak tahun 2013. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Sulselbar, Ketua Komite Audit dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Drs. M. Natsir Kadir M.Si.,Akt
Anggota
Warga Negara Indonesia, 61 tahun, lahir di bau-Bau pada tanggal 12 Agustus 1953. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Bank Sulselbar sejak tahun 2013. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dan Master di bidang ilmu ekonomi dan akuntasi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Berkarir sebagai Pengajar pada Jurusan Akuntasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (1987 – sekarang), tenaga ahli pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. Sulsel (2006 – sekarang), tenaga ahli Keuangan Daerah pada Kab. Maros (2011 – sekarang) dan Komite Audit pada PT Semen Tonasa (2007 – sekarang).

Aristo A. Awusy
Anggota
Warga Negara Indonesia, 57 tahun, lahir di Makassar pada tanggal 25 April 1957. Mendapatkan gelar Sarjana dari STIE-YPUP di Makassar. Sejumlah jabatan penting selama 29 tahun berkarir di Bank Sulselbar adalah Kepala Cabang Makale (1994-2003), Kabag. Administrasi dan Pelaporan Satuan Kerja Audit Intern (2003-2007), Wakil Pemimpin Cabang Utama Makassar (2007 – 2008), Wakil Pemimpin Divisi Akuntasi dan Teknologi Informasi (2008 – 2009). Jabatan terakhir adalah Pemimpin Divisi Akuntansi (2009 – 2012). Mengakhiri masa bakti pada tanggal 1 Maret 2011 dan diangkat menjadi Komite Pemantau Risiko per 1 Desember 2013 dan pada tanggal 01 Agustus 2014 ditugaskan pada Komite Audit PT. Bank Sulselbar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 jo PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Penerapan GCG pada Bank Umum.

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUN 2014

Guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami menerbitkan Laporan Tahunan 2014 PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Laporan Tahunan berisi informasi mengenai profil dan kinerja perusahaan, tata kelola organisasi, tanggung jawab sosial dan aspek penting lainnya untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2014

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Laporan Tahunan 2014 PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat beserta Laporan Keuangan dan informasi lain yang terkait merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Makassar, Desember 2014

Dewan Komisaris
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

H. A. Muallim, SH., M.Si
Plts. Komisaris Utama

Drs. H. A. Tjoneng Mallombasang
Plts. Komisaris Independen

Drs. Natali Ikawidjaja, MM
Komisaris Independen

Prof. Muhammad Amri, Ph.D
Komisaris Independen

Dewan Direksi
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

H. A. M. Rahmat Alimuddin
Direktur Utama

H. Ambo Samsuddin
Direktur Umum

H. A. M. Rahmat Alimuddin
Plts. Direktur Pemasaran

H. Harris Saleng
Direktur Kepatuhan

BIOGRAFI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

BIOGRAFI

Prof. DR. H. Halide

Ketua

Warga Negara Indonesia, 78 tahun, lahir di Makassar tanggal 29 September 1936. Menjadi Ketua Dewan Pengawas Bank Sulselbar sejak tahun 2007. Meraih gelar doktor bidang ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1979. Sebelum menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar pernah menjadi pengajar pada Universitas Hasanuddin di Makassar (1958-2006), menjabat sebagai Pembantu Rektor III Universitas Hasanuddin (1966-1968), Ketua Lembaga Penelitian , Ketua Computer Center, Sekretaris Senat dan Ketua Dewan Guru Besar UNHAS dan menjadi atase Pendidikan & Kebudayaan Kedubes RI Kerajaan Arab Saudi di Riyadh (1991-1995) dan Ketua Dewan Pendidikan Sulsel (2004-2014) serta Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Sulawesi Selatan (2004-2012).

Sampai dengan sekarang, memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah yakni pada BPRS Niaga Madani dan PT. Amanah Finance.

DR. Mukhlis Sufri, SE, MSi

Anggota

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, lahir di Palopo tahun 1962. Menjadi Anggota Dewan Pengawas Bank Sulselbar sejak tahun 2007. Meraih gelar doktor bidang ekonomi dari Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Sebelum menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar adalah pengajar pada Universitas Muslim Indonesia di Makassar, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan FE-UMI, Ketua Kajian & Da'wah Pascasarjana, Anggota Dewan Riset Daerah Prov, Pemda Provinsi Sulawesi Selatan. Konsultan Perencanaan Pembangunan & Ekonomi Lokal Sulsel, Koordinator Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) wilayah Sulsel dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Sulsel.

Sampai dengan sekarang, tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah di Lembaa Keuangan Syariah selain di Bank Sulselbar Syariah.

Ag. KH. Sanusi Baco, LC

Anggota

Warga Negara Indonesia, 77 tahun, lahir di Maros pada tanggal 3 April 1937. Menjadi Anggota Dewan Pengawas Bank Sulselbar sejak tahun 2007. Meraih gelar S2 Lc dari Fakultas Syariah Al-Azhar Mesir. Sebelum menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar adalah pengajar pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin di Makassar dan menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel.

Sampai dengan sekarang, memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah yakni pada PT. Amanah Finance.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bank Sulselbar telah membentuk Sekretaris Perusahaan sejalan dengan persyaratan perundang perundangan tentang pengungkapan data perusahaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 Peraturan Nomor IX.I.4.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Bank Sulselbar berperan sebagai penghubung Bank dengan para investor, pelaku pasar modal, regulator dan juga para pengamat guna meningkatkan pelayanan dan penyebaran informasi kinerja Bank Sulselbar kepada masyarakat dan investor. Sekretaris Perusahaan Bank Sulselbar pada tahun 2014 dijabat oleh Irfan W. Roem.

Pejabat Sekretaris Perusahaan Bank Sulselbar mulai ditunjuk sejak tanggal 25 Agustus 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK/009/DIR/VIII/2010 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary)* PT Bank Sulsel. Pada tahun 2012, dilakukan penyempurnaan struktur organisasi Kantor Pusat Bank Sulselbar berdasarkan Keputusan Direksi No. SK/144/DIR/XI/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Pengembangan Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Tata Kerja PT Bank Sulselbar. Sekretaris Perusahaan berada di bawah supervisi Direktur Utama dalam Struktur Organisasi Bank Sulselbar.

Fungsi Sekretaris Perusahaan dibentuk mengacu pada Lampiran Keputusan ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (Peraturan No.IX.I.4 No. 1) dengan tugas antara lain adalah :

1) Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik.
3) Memberikan masukan kepada Direksi guna mematuhi peraturan ketentuan Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
4) Sebagai penghubung/*contact person* antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam-LK dan masyarakat.

Sedangkan, fungsi Sekretaris Perusahaan menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara ("Permenneg BUMN 01/2011"), adalah:

1) Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;

2) Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

3) Sebagai penghubung (*liaison officer*); dan

4) Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2014, antara lain :

1) Mengikuti dan atau meng-*update* perkembangan pasar modal termasuk setiap peraturan pasar modal yang baru diterbitkan selama tahun 2014 serta memberikan masukan kepada manajemen dan unit kerja terkait dengan adanya peraturan baru tersebut.

2) Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.

3) Menyampaikan/menyiapkan bahan *press release* mengenai keterbukaan informasi kepada publik melalui Bursa atas setiap informasi berkaitan dengan aktivitas/kegiatan Bank Sulselbar yang disampaikan kepada media massa.

4) Menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada 24 Juni 2014

Pejabat *Corporate Secretary* dan Pemimpin Unit Kerja Di bawahnya

Terhitung sejak 2014, Irfan W. Roem ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana Keputusan Direksi No. SK/145/DIR/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang telah diumumkan pada Harian Bisnis Indonesia dan Harian Fajar pada tanggal 9 Desember 2014.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. SK/144/DIR/XI/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Pengembangan Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Tata Kerja PT Bank Sulselbar, Sekretaris Perusahaan Bank Sulselbar bertanggung jawab atas supervisi Departemen Komunikasi & Humas yang membawahi Sub Departemen Protokoler dan Departemen Legal & Kesekretariatan.

Tugas dan fungsi pokok Grup Sekretaris Perusahaan yaitu mensinergikan dan mengintegrasikan proses pengelolaan komunikasi internal dan eksternal, dan memastikan terpeliharanya mekanisme umpan balik yang sistematis kepada manajemen agar mampu merespon dinamika pasar modal, Bapepam, lembaga profesi penunjang pasar modal dan stakeholder serta penerapan fungsi

pengelolaan customer care secara menyeluruh, tepat dan efektif. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan mitigasi risiko hukum dan reputasi Bank melalui penyelesaian perkara hukum yang dilakukan dengan proses litigasi.

Biografi Sekretaris Perusahaan

Irfan W Roem. Warga Negara Indonesia, 36 tahun, lahir di Makassar tanggal 19 Agustus 1979 Bergabung dengan Bank Sulselbar sejak tahun 2001. Menjabat sebagai Pemimpin Departemen ALMA sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 dan pada bulan November 2014 ditugaskan sebagai Sekretaris Perusahaan. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin Tahun 2001 dan Magister Manajemen dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2003. Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko I – IV, Branch Manager Bank Tahun 2010 di jakarta serta sejumlah pelatihan lainnya mengenai manajemen perbankan, *risk management*, dan lain sebagainya di Indonesia.

Riwayat Jabatan Sekretaris Perusahaan

Riwayat jabatan singkat Irfan W. Roem di Bank Sulselbar, sebagai berikut:

Jabatan/Posisi	Unit Kerja/Cabang	Tahun
Staf Administrasi Kredit	Cabang Utama Makassar	2001
Analis Kredit	Cabang Utama Makassar	2007
Analis Manajemen Risiko	Satuan Kerja Manajemen Risiko	2008
Kepala Seksi Pemasaran	Cabang Utama Makassar	2009
Kepala Cabang Bantaeng	Cabang Bantaeng	2010
Pemimpin Dept. ALMA	Grup Treasury	2012
Pjs Pemimpin Grup Corporate Secretary	Grup Corporate Secretary	2014

NAMA PEMIMPIN CABANG

Names of Branch Leaders

Nama Pemimpin Cabang *Names of Branch Leaders*	**Cabang** *Branch*
Rosmala Arifin	Cabang Utama Makassar Utama Makassar Branch
H. Sukiman	Cabang Utama Bone Utama Bone Branch
Rusdi Arman	Cabang Utama Mamuju Utama Mamuju Branch
Syarifuddin Haruna	Cabang Maros Maros Branch
Muh. Daenur Hafsir	Cabang Pare-pare Pare-pare Branch
Entjiek Q. Junaedy	Cabang Sidrap Sidrap Branch
H. A. Dhamis Hamid	Cabang Pinrang Pinrang Branch

Nama Pemimpin Cabang *Names of Branch Leaders*	Cabang *Branch*
H. Andi Mulyadi	Cabang Polman Polman Branch
Nixoni Anau	Cabang Makale Makale Branch
Aras Tusdin Rasyid	Cabang Palopo Palopo Branch
Muhammad Rakib	Cabang Sengkang Sengkang Branch
Hisda Saleh	Cabang Bulukumba Bulukumba Branch
H. Abidin Panne	Cabang Sinjai Sinjai Branch
Rini Takaryani	Cabang Jeneponto Jeneponto Branch
Finni Arfianas Azwar	Cabang Selayar Selayar Branch
Azimat A. Mahmud	Cabang Bantaeng Bantaeng Branch
Bahrun Azikin	Cabang Majene Majene Branch
H.M. Nawir Mallaweang	Cabang Enrekang Enrekang Branch
Arman R. Damang	Cabang Pangkep Pangkep Branch

Nama Pemimpin Cabang *Names of Branch Leaders*	Cabang *Branch*
Dirhamsyah Kadir	Cabang Takalar Takalar Branch
Anwar Sulaiman	Cabang Barru Barru Branch
Irmayanti Sulthan	Cabang Gowa Gowa Branch
Hazjul	Cabang Soppeng Soppeng Branch
Yulis Suandi	Cabang Masamba Masamba Branch
H. Fatahuddin Tahang	Cabang Belopa Belopa Branch
H. M. Darsan Hamzah	Cabang Pasangkayu Pasangkayu Branch
Muh. Hatta Sese	Cabang Malili Malili Branch
Lili Handayani	Cabang Jakarta Jakarta Branch
H. Iskandar Anwar	Cabang Mamasa Mamasa Branch
Syahrul Anwar	Cabang Rantepao Rantepao Branch

Nama Pemimpin Cabang *Names of Branch Leaders*	Cabang *Branch*
Akhmad Ridha Abbas	Cabang Pembantu Siwa Pembantu Siwa Branch
Hendra Saad	Cabang Pembantu Daya Pembantu Daya Branch
Kamal Ikbal	Cabang Syariah Sengkang Syariah Sengkang Branch
Romy Thaha	Cabang Syariah Maros Syariah Maros Branch
Faisal Riza Basalamah	Cabang Syariah Makassar Syariah Makassar Branch
H. Haris Hanafing	Cabang Topoyo Topoyo Branch

ALAMAT KANTOR

Office Addresses

LIST OF BANK SULSELBAR OFFICES NETWORK PER DECEMBER 2014

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	*Telp./Fax*	Tanggal Operasional *Operational Date*	Catatan *Annotation*
MAIN BRANCH/BRANCH/SUBBRANCH/ SHARIA BRANCH				
Makassar Main Branch	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar	Tel. (0411) 859171 Fax. (0411) 85461	The Change of the name of Makassar Main Branch number: 1/397/DPIP/Prz. Dated December 2, 1999	Main Branch
Bone Main Branch	Jl. Ahmad Yani No. 15 Watampone	Tel. (0481) 21027 Fax. (0481) 23535		Main Branch
Mamuju Main Branch	Jl. Ahmad Yani No. 3 Mamuju	Tel. (0426) 21125 Fax. (0426) 21130	Operating License for upgrading the status KMKRI number: KEP-391/KM.17/1996 changing the address from temporary office to definitive BI License number 12/80/DPIP/Prz/Mks dated July 29, 2010 concerning the completeness of address changing documents of Bank Sulsel, Mamuju main branch	Main Branch

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	*Telp./Fax*	Tanggal Operasional *Operational Date*	Catatan *Annotation*
Maros Branch (1)	*Jl. Jend. Sudirman No. 3 Maros*	*Tel. (0411) 3882426 Fax. (0411) 3882428*		*Branch of Class II*
Parepare Branch (2)	*Jl. Bau Massepe No. 468 Parepare*	*Tel. (0421) 21364, 27751 Fax. (0421) 23947*	*Changing the address to definitive office BI License number 14/2/APBU/Mks/Rahasia. Dated May 28, 2012 concerning the application for changing the address of Parepare branch office*	*Branch of Class I*
Sidrap Branch (3)	*Jl. Jend. Sudirman No. 119 Pengkajene*	*Tel. (0421) 90246, 90247, 90248 Fax. (0421) 91487*		*Branch of Class II*
Pinrang Branch (4)	*Jl. Jend. Sudirman No. 257 Pinrang*	*Tel. (0421) 921416, 922955 Fax. (0421) 922628*		*Branch of Class I*
Polman Branch (5)	*Jl. Andi Depu No. 102 Polewali*	*Tel. (0428) 21666, 21987 Fax. (0428) 21022*	- *Relocation from temporal office to definitive office dated August 6, 2012* - *License of address changing in BI number 14/50/DPIP/Prz/Mks dated July 6, 2012 concerning the application for changing the address of Polman branch office.* - *Changing the address form definitive office to temporal office* - *BI License number 12/78/DPIP/Prz/Mks dated July 27, 2010 concerning the changing of the address of Bank Sulsel Polman Branch*	*Branch of Class II*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	*Telp./Fax*	Tanggal Operasional *Operational Date*	Catatan *Annotation*
Makale Branch(6)	*Jl. Pongtiku, Kel. Pantan, Kec. Makale*	*Tel. (0423) 22703 Fax. (0423) 22034*	*License for the changing of the address from BI number 12/113/DPIP/Prz/Mks dated November 22, 2010 concerning the changing of the address of Makale Branch*	*Branch of Class II*
Palopo Branch(7)	*Jl. Andi Baso Rahim (ex. Jl. Flamboyan) No. 1 Palopo*	*Tel. (0471) 21468, 21102 Fax. (0471) 24513*	*Changing the address from temporal office to definitive office BI License number 12/77/DPIP/Prz/ Mks dated July 27,2010 concerning the changing of the address of Palopo Branch*	*Branch of Class I*
Sengkang Branch(8)	*Jl. R. A. Kartini No. 1 Wajo*	*Tel. (0485) 324480, 324481 Fax. (0485) 324482*		*Branch of Class I*
Bulukumba Branch (9)	*Jl. Jend. Sudirman No. 48 Bulukumba*	*Tel. (0413) 81051 Fax. (0413) 81329*		*Branch of Class I*
Sinjai Branch (10)	*Jl. Persatuan Raya No. 58 Sinjai*	*Tel. (0482) 21013, 23171 Fax. (0482) 21040*		*Branch of Class II*
Jeneponto Branch (11)	*Jl. Pahlawan No. 5 Jeneponto*	*Tel. (0419) 21038, 21608 Fax. (0419) 21437*		*Branch of Class II*
Selayar Branch (12)	*Jl. Jend. Ahmad Yani Benteng, Selayar*	*Tel. (0414) 21780 Fax. (0414) 21051*	*Branch office license KMKRI.KEP. number: 345/KM.17/1996 dated January 1, 1996*	*Branch of Class II*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	*Telp./Fax*	Tanggal Operasional *Operational Date*	Catatan *Annotation*
Bantaeng Branch (13)	*Jl. Andi Mannapiang No. 1 Pasorongi Bantaeng*	*Tel. (0413) 22156 Fax. (0413) 21009*	*- Operating License of Cash Branch number 24/3/UPPP/PPTP dated May 23, 1991 - Operating License for upgrading the status KMKRI. Number: KEP-488/KM.17/1997 dated September 15, 1997 - 18 April 2011 Relocation to the new office building (definitive office) - License of the changing of the address number 13/10/DPIP/PRZ/Mks dated March 17, 2011 concerning the address changing of Bantaeng Branch*	*Branch of Class II*
Majene Branch (14)	*Jl. Gatot Subroto No. 59 Majene*	*Tel. (0422) 21099 Fax. (0422) 21754*	*Operating License of Cash office number 24/3/UPPP/PPTP dated May 23, 1991 (Status upgrading) Operational License number : 1/25/DGS//DPIP dated September 19, 1999*	*Branch of Class II*
Enrekang Branch (15)	*Jl. Sultan Hasanuddin No. 5 Enrekang*	*Tel. (0420) 21180 Fax. (0420) 21071*	*Operating License of Cash office 24/3/UPPP/PPTP dated May 23, 1991 (Status Upgrading) Operating License No : 1/25/DGS//DPIP dated November 19, 1999*	*Branch of Class II*
Pangkep Branch (16)	*Jl. Sultan Hasanuddin No. 7 Pangkajene*	*Tel. (0410) 21300, 21510 Fax. (0410) 21824*	*Operational License of Cash office number 24/3/UPPP/PPTP dated Mei 23, 1991 Operating License for upgrading the status, number: 2/49/DGS//DPIP dated September 6 2000*	*Branch of Class II*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	*Telp./Fax*	Tanggal Operasional *Operational Date*	Catatan *Annotation*
Takalar Branch (17)	*Jl. Jend. Sudirman No. 1 Takalar*	*Tel. (0418) 21421 Fax. (0418) 21770*	*Operational License of Cash office number 24/3/UPPP/PPTP dated May 23 1991 Operating License for upgrading the status number: 2/49/DGS//DPIP dated September 6 2000 Relocation of new office dated August 27, 2012 License of BI number 14/57/DPIP/Prz/mks dated August 3, 2012*	*Branch of Class II*
Barru Branch (18)	*Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Barru*	*Tel. (0427) 21703 Fax. (0427) 21188*	*Operational License of Cash office number 24/3/UPPP/PPTP dated May 23, 1991 Operating License for upgrading the status number: 2/49/DGS/DPIP dated September 6, 2000*	*Branch of Class II*
Gowa Branch (19)	*Jl. HOS. Cokroaminoto No. 2 Sungguminasa*	*Tel. (0411) 8220423, 8220424 Fax. (0411) 8220425*	*Operational License of Cash office number 24/3/UPPP/PPTP dated May 23, 1991 Operating License for upgrading the status, number: 2/58/DGS/DPIP dated Nopember 30, 2000*	*Branch of Class I*
Soppeng Branch (20)	*Jl. Kemakmuran No. 125 Watansoppeng*	*Tel. (0484) 23498 Fax. (0484) 21156*	*Operational License of Cash office number 24/3/UPPP/PPTP tgl. 23 Mei 1991 Operating License for upgrading the status, number: 3/8/DGS/DPIP dated March 8, 2001*	*Branch of Class II*
Masamba Branch (21)	*Jl. Suhada No. 1 Masamba*	*Tel. (0473) 21845 Fax. (0473) 21865*	*Operating License of Masamba Cash office number: 32/3/UpwB1/AdWB1/Up. Dated May 14, 1999 Operating License for upgrading the status number: 4/126/DPwB2/IDWB2/Mks dated July 8 2002*	*Branch of Class II*
Belopa Branch (22)	*Jl. Sungai Pareman No. 3 Belopa*	*Tel. (0471) 3314433 Fax. (0471) 3316008*	*Operating License for upgrading the status, number: 5/255/DPwB2/IDWB2/Mks dated December 31, 2003*	*Branch of Class II*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	*Telp./Fax*	Tanggal Operasional *Operational Date*	Catatan *Annotation*
Pasangkayu Branch (23)	*Jl. Andi Bandaco, Pasangkayu*	*Tel. (0411) 402212 Fax. (0411) 402213*	*Branch office License number: 6/179/DPwB2/IDWB2/Mks dated August 24 2004*	*Branch of Class II*
Malili Branch (24)	*Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 1 Malili*	*Tel. (0474) 321494 Fax. (0474) 321492*	*Branch office License, number: 6/264/DPwB2/IDWB2/Mks Dated December 1, 2004*	*Branch of Class II*
Jakarta Branch (25)	*Jl. Gatot Subroto Menara Bidakara 2 Kav. 73 – 74 Jakarta*	*Tel. (021) 83708750, 83708751, 83708752 Fax. (021) 83708757*	*August 4, 2010 License of BI number 12/81/DPIP/Prz/Mks dated July 30 2010 concerning the opening of Jakarta branch as a new branch of PT. Bank Sulsel*	*Branch of Class II*
Mamasa Branch (26)	*Jl. Poros Mamasa Km. 2, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Sulbar*	*Tel. (0428) 2841033 Fax. (0428) 2841032*	*- Sub-branch office License, number: 5/88/DPwB2/IWB2/Mks Dated May 14, 2003* *- License of the changing of the address, BI number 12/90/DPIP/Prz/Mks dated September 23, 2010 concerning the changing of address of Mamasa Sub-branch.* *- BI License number 13/16/DPIP/Prz/Mks dated April 9, 2011 concerning the status uprading of Mamasa sub-branch office to be a branch office.*	*Branch of Class II*
Rantepao Branch (27)	*Jl. Pongtiku No. 32 Rantepao*	*Tel. (0423) 24640 Fax. (0423) -*	*- Operating License of Cash office number 1/585/UPPB/AdP dated July 30, 1999* *- License of status upgrading number 14/17/DPIP/Prz/Mks dated April 3, 2012*	*Branch of Class II*
Topoyo Branch (28)	*Jl. Poros Mamuju-Topoyo*		*Operational dated June 2, 2014*	*Branch of Class II*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	*Telp./Fax*	Tanggal Operasional *Operational Date*	Catatan *Annotation*
Siwa Sub-branch (29)	*Jl. Andi Jaya No. 50 Siwa*	*Tel. (0472) 321463, 321081 Fax. (0472) 321042*	*Operating License of Cash office number: 1/585/UPPB/Adp. Dated July 30,1999 Operating License for upgrading the status of Siwa to be a sub-branch number: 7/217/DPwB2/IDWB2/Mks. Dated November 14, 2005*	*Sub-branch*
Daya Sub-branch (30)	*Jl. Perintis Kemerdekaan Komp. Ruko Bukit Khatulistiwa, Makassar*	*Tel. (0411) 4772404 Fax. (0411) 4772406*	*April 07, 2010 BI License number 12/21/DPIP/Prz/Mks dated March 15, 2012 concerning the opening of Daya Sub-branch office*	*Sub-branch*
Sengkang Sharia Branch (31)	*Jl. Veteran No. 50 Wajo*	*Tel. (0485) 21385 Fax. (0411) 21085*	*April 24, 2007*	*Sharia Branch*
Maros Sharia Branch (32)	*Jl. Jend. Sudirman (Samping Masjid Al Markaz Maros)*	*Tel. (0411) 3881221, 3881226 Fax. (0411) 3881230*	*December 30, 2007*	*Sharia Branch*
Cabang Syariah Makassar Sharia Branch (33)	*Jl. Dr. Sam Ratulangi Ruko No. 7 Blok C1 – C2 Makassar*	*Tel. (0411) 833063, 833019, 833062 Fax. (0411) 833064*	*Sharia Branch* *- License of BI number 10/87/DPBS/PadBS/Mks dated December 23 2008 concerning the Application for opening the Sharia Branch of Bank Saudara* *- Decree of Director number SK/166/DIR/2008 dated 30 December 30 2008 on Channeling of Makassar Sharia Brach of Bank Sulsel* *- BI License of the opening of Makassar Office channeling number 9/48/DPBS/PadBS/Mks dated August 28 2007 concerning the application of Channeling Sharia Office of Bank Saudara* *- Decree of Directors on Office Channeling number SK/072/DIR dated September 12, 2007 concerning the Sharia Office Channeling, Sharia Effort of PT. Bank Sulsel at Makassar Main Office*	*Sharia Branch*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	*Telp./Fax*	Tanggal Operasional *Operational Date*	Catatan *Annotation*
CASH OFFICE				
MAKASSAR MAIN BRANCH				
Cash Office of SAMSAT of Sulsel Province	Jl. A. Mappanyukki Makassar	Tel. (0411) 9264417 Fax. (0411) -		lend and use
Cash Office of The Governor of Sulsel Province	Jl. Urip Sumihardjo No. 269 Makassar	Tel. (0411) 453306 Fax. (0411) -	Operating License number : 28/40/UP-B1AdB1/Up. Dated September 28, 1995	lend and use
Cash Office of Gabungan Dinas Kota Makassar	Jl. Urip Sumihardjo No. 8 Makassar	Tel. (0411) 449458 Fax. (0411) -	Operating License number: 28/40/UPB1/AdB1/Up dated September 29 1995 March 3, 2011 (Relocation to the same address)	lend and use
Cash Office of Dinas PU of Sulsel Province	Jl. A.P.Pettarani Makassar	Tel. (0411) 450728 Fax. (0411) -	Operating License number: 30/129/UPBI/Adbi/Up, dated February 25 1998	lend and use
Cash Office of Labuang Baji	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 18 Makassar	Tel. (0411) 873275 Fax. (0411) –	Operating License number: 3/156/DPwB2/IDWB2/Mks dated November 6, 2001	lend and use
Cash office of Dadi Public Hospital	Jl. Lanto Dg.Pasewang	Tel. (0411) 2998572 Fax. (0421) -		lend and use
Cash Office of Diknas of Sulsel Province, Makassar	Jl. Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea, Makassar	Tel. (0411) 590173 Fax. (0411) -	- July 6,2009 (Status upgrading) March 9 2011 (Relocation to the same address)	lend and use
Cash Office of Antang, Makassar	Jl. Antang Raya No. 76 C-D, Makassar	Tel. (0411) 2436852 Fax. (0411) -	July 23, 2010	rent

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	*Telp./Fax*	Tanggal Operasional *Operational Date*	Catatan *Annotation*
Cash Office of Talasapang	*Jl. Poros Talasalapang No. 32 D, Makassar*	*Tel. (0411) 2436862 Fax. (0411) -*	*July 27, 2010*	*rent*
Cash Office of IPDN	*Jl. Cendrawasih No. 259, Makassar*	*Tel. (0411) 859193 Fax. (0411) -*	*December 28, 2010*	*lend and use*
Cash Office of Haji Public Hospital	*Jl. Dg. Ngeppe, Makassar*	*Tel. (0411) 855192 Fax. (0411) -*	*December 14, 2010*	*lend and use*
Cash Office of the Parliament of Sulsel Province	*Jl. Urip Sumohardjo Makassar*	*Tel. (0411) 421550 Fax. (0411) -*	*March 28, 2011*	*lend and use*
MAMUJU MAIN BRANCH				
-				
BONE MAIN BRANCH				
Cash Office of Mare, Bone	*Jl. Poros Bone – Sinjai*	*Tel. (0481) - Fax. (0481) -*		*rent*
Cash Office of Uloe, Sub-district of Dua Boccoe, Bone	*Jl. Poros Bone-Sengkang Dusun Dua Appasareng, Desa Uloe, Kec Dua Bocoe, Kab. Bone*	*Tel. (0481) - Fax. (0481) -*	*Operating License number: 3/156/DPwB2/IDWB2/Mks dated November 6, 2002 License of relocation to the same address number: S-17/KR.6112/204 dated December 23, 2014*	*rent*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	*Telp./Fax*	Tanggal Operasional *Operational Date*	Catatan *Annotation*
		MAROS BRANCH		
Cash Office of Bantimurung, Maros	*Jl. Poros Maros – Bantimurung - Bone*	*Tel. (0411) - Fax. (0411) -*	*Operating License number: 7/142/ DPwB2/IDWB2/Mks. Dated July 14, 2005*	*lend and use*
Cash Office of Camba Maros	*Jl. Poros Maros - Bone*		*December 2013*	*rent*
Cash Office of Salewangan Regional Public Hospital, Maros	*Jl. Poros Makassar – Maros*		*Desember 2013*	*lend and use*
		PANGKEP BRANCH		
Cash Office of Segeri, Pangkep	*Jl. Poros Segeri – Barru*	*Tel. (0410) 2317357 Fax. (0410) -*	*Operating License number: 4/123/ DPwB2/IDWB2/Mks dated July 4, 2002*	*Rent*
		BARRU BRANCH		
Cash Office of Pekkae, Barru	*Jl. Sultan Hasanuddin, Barru*	*Tel. (0427) 2323400 Fax. (0427) –*	*Operating License number: 7/142/ DPwB2/IDWB2/Mks. Dated July 14 2005*	*rent*
Cash Office of Mangkoso,- Sub-district Soppeng Riaja, Barru	*Jl. Poros Parepare - Makassar*	*Tel. (0427) - Fax. (0427) -*	*Operating License number: 3/128/ DPwB2/IDWB2/Mks dated September 20, 2001*	*rent*
		PAREPARE BRANCH		

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	*Telp./Fax*	Tanggal Operasional *Operational Date*	Catatan *Annotation*
Cash Office of A. Makkasau Public Hospital, Parepare	*Jl. Nurussa-mawati No. 3 Parepare*	*Tel. (0421) 22845 Fax. (0421) -*	*Operating License number: 3/94/DPwB2/ IDWB2/Mks dated July 18, 2001*	*lend and use*
		SIDRAP BRANCH		
Cash Office of Tanru Tedong, Sidrap	*Jl. Poros Sidrap – Wajo*	*Tel. (0421) 721006 Fax. (0411) -*	*Operating License number: 30/89/UPB1/ AdB1/Mks dated December 15, 1997*	*rent*
Cash Office of Rappang, Sidrap	*Jl. Poros Parepare - Enrekang*	*Tel. (0421) 93118 Fax. (0421) -*	*Operating License number: 4/11/DPwB2/ IDWB2/Mks dated March 5 2002*	*rent*
Cash Office of Amparita, Sidrap	*Jl. Poros Sidrap – Sop-peng*			*rent*
Cash Office of PTSP Sidrap	*Jl. Harapan Baru Blok A No. 6, Sidrap*		*October 30, 2014*	*lend and use*
		PINRANG BRANCH		
Cash Office of Terminal Lama, Pinrang	*Jl. Baronang No. 1, Pin-rang*	*Tel. (0421) 921650 Fax. (0421) -*	*Operating License number: 4/188/ DPWB2/IDWB2/Mks. Dated September 13, 2002 moved on May 14, 2012 No. 14/22/DPIP/Prz/Mks dated April 15, 2012 concerning the changing of the address of Terminal Lama Pinrang Cash Office.*	*rent*
ENREKANG BRANCH				
Cash Office of Alla, Enrekang	*Jl. Poros En-rekang – Tana Toraja*	*Tel. (0420) 2312578 Fax. (0420) -*	*Operating License number: 3/94/DPwB2/ IDWB2/Mks dated July 18, 2001*	*rent*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	*Telp./Fax*	Tanggal Operasional *Operational Date*	Catatan *Annotation*
MAKALE BRANCH				
-				
BELOPA BRANCH				
Cash Office of Lamasi, Belopa, moved to Padang Sappa	*Jl. RM. Darso Sugondo, Lamasi, Belopa*	*Tel. (0471) 3313391 Fax. (0471) -*	*Operating License number: 3/156/DPwB2/IDWB2/Mks dated November 6, 2001 Relocation License to Padang Sappa number: S-17/KR.6112/2014 tgl 23/12/2014*	*rent*
Cash Office of Walenrang, Belopa	*Jl. Poros Palopo – Masamba*	*Tel. (0471) 3315221 Fax. (0471) -*	*April 18, 2011*	*rent*
PALOPO BRANCH				
Cash Office of Sawerigading Public Hospital, Palopo	*Jl. Samiun No. 2, Palopo*	*Tel. (0471) 23172 Fax. (0471) -*		*lend and use*
Cash Office of KPTSP, Palopo	*Jl. KH. Muh. Hasyim, Palopo*	*Tel. (0471) - Fax. (0471) -*		*lend and use*
MASAMBA BRANCH				

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	*Telp./Fax*	Tanggal Operasional *Operational Date*	Catatan *Annotation*
Cash Office of Andi Djemma Public Hospital, Masamba	*Jl. Sultan Hasanuddin, Masamba*	*Tel. (0473) 21185 Fax. (0473) -*	*Operating License number: 6/105/ DPwB2/IDWB2/Mks. Dated June 11, 2004*	*lend and use*
MALILI BRANCH				
Cash Office of Tomoni, Malili	*Jl. Poros Mangkutana*	*Tel. (0473) 25120 Fax. (0473) -*		*Rent*
Cash Office of Sorowako, Malili	*Jl. Incoiro No. 26*	*Tel. (0473) - Fax. (0473) -*	*July 1, 2013*	*Rent*
Cash Office of Wowondula Malili				*rent*
GOWA BRANCH				
-				
TAKALAR BRANCH				
Cash Office of Sub-district of Galesong Selatan, Takalar	*Jl. Karaeng Bonto Maran-nu No. 22 A, Desa Gale-song Baru, Kec. Galesong*	*Tel. (0418) - Fax. (0418) -*	*Operating License number: 3/94/DPwB2/ IDWB2/Mks dated 18 July 18, 2001 Changed the address on September 21, 2011 BI License number. 13/73/DPIP/Prz/Mks dated September 8, 2011 concerning the application of the changing of the address of Cash Office of (KK)*	*rent*
JENEPONTO BRANCH				
BANTAENG BRANCH				

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	*Telp./Fax*	Tanggal Operasional *Operational Date*	Catatan *Annotation*
Cash Office of Banyorang, Bantaeng	*Jl. Poros Bantaeng – Banyorang*	*Tel. (0413) 2425133 Fax. (0413) -*	*Operating License number: 3/94/DPwB2/ IDWB2/Mks dated July 18, 2001*	*Rent*
		BULUKUMBA BRANCH		
Cash Office of Lanto Dg. Pasewang (Caile)	*Jl. Lanto Dg. Pasewang Bulukumba*	*Tel. (0413) - Fax. (0413) -*	*March 31, 2011 (06 April 2011)*	*lend and use*
Cash Office of Kajang	*Jl.Poros Kajang Bulu-kumba*		*December 2013*	*Rent*
		SELAYAR BRANCH		
Cash Office of Selayar Re-gent's Office	*Jl. Pemuda, Benteng, Selayar*	*Tel. (0414) 22601 Fax. (0414) -*	*Operating License number: 3/151/ DPwB2/IDWB2/Mks dated October 18, 2001*	*lend and use*
		SINJAI BRANCH		
Cash Office of Bikeru, Sinjai	*Jl. Poros Sinjai – Bulu-kumba*	*Tel. (0482) 2424533 Fax. (0482) -*	*Operating License number: 4/231/ DPwB2/IDWB2/Mks dated December 30, 2002*	*Rent*
Cash Office of KPTSP Sinjai	*Jl. Jend. Sudirman*		*April 4, 2013*	*lend and use*
		SOPPENG BRANCH		
Cash Office of Cabenge, Kec. Lilirilau, Soppeng	*Jl. Pahlawan No. 17, Kel. Pajalesang, Kec. Lilirilau, Sop-peng*	*Tel. (0484) 90871 Fax. (0484) 421354*		*rent*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	*Telp./Fax*	Tanggal Operasional *Operational Date*	Catatan *Annotation*
Cash Office of Watansoppeng Regent's Office	*Jl. Salotungo, Kel. Lalabata Rilau, Kec. Lalabata, Soppeng*	*Tel. (0484) 21538 Fax. (0484) -*		*lend and use*
		SENGKANG BRANCH		
-				
		POLMAN BRANCH		
Cash Office of Wonomulyo, Polewali	*Jl. Jend. Sudirman No. 130 (Complex of Andita Permai) Pole-wali*	*Tel. (0428) 52112 Fax. (0411) -*	*Operating License number: 3/94/DPwB2/ IDWB2/Mks dated July 18, 2001*	*Rent*
Cash Office of Tinambung Polman	*Jl. H. Andi Depu, Kec. Tinambung Polman*	*Tel. (0422) 21847*	*Operating,December 30, 2014*	*Rent*
		MAMASA BRANCH		
-				
		MAJENE BRANCH		
-				
		PASANGKAYU BRANCH		
-				

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	*Telp./Fax*	Tanggal Operasional *Operational Date*	Catatan *Annotation*
JAKARTA BRANCH				
-				
TOPOYO BRANCH				
-				
SHARIA BRANCH OF MAKASSAR				
Sharia branch office of ITTC	*Jl. Urip Sumo-hardjo*		*Operating, dated September 9, 2013*	*Rent*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Tanggal Operasional *Operational Date*
ATM		
MAKASSAR MAIN BRANCH		
Main Branch Office of Makassar	*Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar*	*License number: 2/125/DPwB2/IDWB2/Mks dated November 6, 2000*
Main Branch Office of Makassar	*Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar*	
Main Branch Office of Makassar	*Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar*	
Makassar Mayor's Office	*Jl. Jend.Ahmad Yani, Makassar*	*License number: 7/48/DPwB2/IDWB2/Mks dated February 22, 2005*
The Governor's Office of Sulsel Province	*Jl. Urip Sumihardjo, Makassar*	*License number: 2/125/DPwB2/IDWB2/Mks dated November 16, 2000*
Carrefour Tamalanrea, Makassar	*Jl. Perintis Kemerdekaan, Makassar*	
Haji Public Hospital, Makassar	*Jl. Dg. Ngeppe, Makassar*	
Panakukkang Mall, Makassar	*Jl. Boulevard Makassar*	

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Tanggal Operasional *Operational Date*
	ATM	
Ratu Indah Mall, Makassar	*Jl. Dr. Sam Ratulangi, Makassar*	
Makassar Trade Center (MTC), Makassar	*Jl. Jend. Ahmad Yani, Makassar*	
Cash Office of Labuang Baji, Makassar	*Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 18, Makassar -*	
Cash Office of Dadi Public Hospital, Makassar	*Jl. Lanto Dg. Pasewang, Makassar*	
Cash Office of Antang, Makassar	*Jl. Antang Raya No. 76 C-D, Makassar*	
Cash Office of Talasalapang, Makassar	*Jl. Poros Talasalapang No. 32 D, Makassar*	
Health Office of Sulsel Province	*Jl. Perintis Kemerdekaan, Makassar*	
Cash Office of SAMSAT Prov. Sulsel	*Jl. A. Mappanyukki Makassar*	
Makassar Golden Hotel (MGH)	*Jl.Pasar Ikan, Makassar*	*March 8, 2011*
Cash Office of the Parliament of Sulsel	*Jl. Urip Sumohardjo, Makassar*	*March 28, 2011*
Cash Office of National Education Office of Sulsel Province, Makassar	*Jl. Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea, Makassar*	*March 9, 2011*
Cash Office of Gabungan Dinas Kota Makassar	*Jl. Urip Sumihardjo No. 8 Makassar -*	*April 8, 2011*
Mobile cash of Makassar Main Branch	*Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar*	*May 31, 2011*
Cash Office of PU of Sulsel Province	*Jl. A.P. Pettarani, Makassar*	*February 18, 2013*
Food Security Agency office of Sulsel Province	*Jl. Sam Ratulangi,Makassar*	
	MAIN BRANCH OF MAMUJU	
Main Branch of Mamuju	*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3, Mamuju*	

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Tanggal Operasional *Operational Date*
	ATM	
Main Branch Mamuju	*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3, Mamuju*	
The Regent's office of Mamuju	*Jl. Sukarno-Hatta No. 1 Mamuju*	*April 29, 2013*
The Governor's Office of Sulbar	*Jl. Ahmad Yani No.1 Mamuju*	
	MAIN BRANCH OF BONE	
Main Branch of Bone	*Jl. Ahmad Yani No. 15, Bone*	*License number: 5/96/DPwB2/IDWB2/Mks dated May 22, 200*
The Regent's office of Bone	*Jl.*	*July 30, 2012*
	MAROS BRANCH	
Maros Branch	*Jl. Jend. Sudirman No. 3 Maros*	*License number: 6/199/DPwB2/IDWB2/Mks dated September 17, 2004*
Sultan Hasanuddin Airport	*Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar*	
The Regent's office of Maros	*Jl. Jend. Sudirman (Poros Maros – Pangkep), Maros*	*May 16, 2012*
Cash Office Camba	*Jl. Poros – Maros Bone*	
Cash Office of Salewangan Regional Public Hospital of Maros	*Jl. Poros Makassar - Maros*	
	PANGKEP BRANCH	
Pangkep branch	*Jl. Sultan Hasanuddin No. 7, Pangkajene*	*License number: 5/96/DPwB2/IDWB2/Mks dated November 22, 2003*
The Regent's office of Pangkep	-	*2011BI License number 13/23/DPIP/Prz/Mks dated May 13 2011 concerning the operational of ATM at the Regent's Office of Pangkep*
Cash Office of Segeri	*Jl. Poros Segeri - Barru-*	*March 21, 2013*
	BARRU BRANCH	
Barru Branch	*Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Barru*	*License number: 5/96/DPwB2/IDWB2/Mks dated May 22, 2003*
	PAREPARE BRANCH	

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Tanggal Operasional *Operational Date*
	ATM	
Cabang Parepare	*Jl. Bau Massepe Ruko No. 7 -8 Parepare*	*License number: 6/217/DPwB2/IDWB2/Mks dated October 6, 2004*
The Mayor's office of Parepare	*Jl. Jend. Sudirman, Parepare*	*January 28, 2011 epe) ari 2011 Treasury)*
	SIDRAP BRANCH	
Sidrap Branch	*Jl. Jend. Sudirman No. 119 Pengkajene*	-
Cash Office of Rappang	*Poros Parepare - Enrekang*	
	PINRANG BRANCH	
Pinrang Branch	*Jl. Jend. Sudirman No. 257 Pinrang*	-
	ENREKANG BRANCH	
Enrekang Branch	*Jl. Sultan Hasanuddin No. 4, Enrekang*	-
Cash Office of Alla, Enrekang	*Jl. Poros Enrekang – Tana Toraja*	*June 7, 2012*
The Mayor's Office of Enrekang	*Jl. Jend. Sudirman No. 1*	*March 22, 2013*
	MAKALE BRANCH	
Makale Branch	*Jl. Pongtiku, Kel. Pantan, Kec. Makale*	-
	RANTEPAO BRANCH	
Rantepao Branch	*Jl. Poros Rantepao – Palopo (Bolu)*	
	BELOPA BRANCH	
Belopa Branch	*Complex of The Regional Government offices of Luwu Regency*	-
Cash Office of Walenrang	*Jl. Poros Palopo – Masamba*	*April 18, 2011*
	PALOPO BRANCH	
Palopo Branch	*Jl. Andi Baso Rahim (ex. Jl. Flamboyan) No. 1 Palopo*	*License number: 6/262/DPwB2/IDWB2/Mks dated November 30, 2004*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Tanggal Operasional *Operational Date*
	ATM	
Palopo Branch	*Jl. Andi Baso Rahim (ex. Jl. Flamboyan) No. 1 Palopo*	-
Cash Office of Sawerigading Regional Public HospitalPalopo	*Jl. Samiun No. 2 Palopo*	-
	MASAMBA BRANCH	
Cash Office of Andi Djemma Public Hospital, Masamba	*Jl. Sultan Hasanuddin Masamba*	-
	MALILI BRANCH	
Malili Branch	*Jl. Sam ratulangi No. 1*	*April 6, 2011*
Cash Office of Tomoni, Malili	*Jl. Poros Mangkutana*	*April 6, 2011*
The Regent's Office of Luwu Timur	*Jl. Sam Ratulangi Malili*	-
Cash Office of Lagaligo Public Hospital, Wotu	*Jl. Poros Wotu*	*February 18, 2013*
Cash Office of Sorowako	*Jl. Incoiro No. 26*	*April 9, 2013*
	GOWA BRANCH	
Gowa Branch	*Jl. HOS. Cokroaminoto No. 2, Sungguminasa*	-
	TAKALAR BRANCH	
The Regent's office of Takalar	*Jl. Jend. Sudirman No. 26, Takalar*	*May 22, 2012*
Takalar Branch	*Jl. Jend. Sudirman No. 1, Takalar*	*August 23, 2012*
	JENEPONTO BRANCH	
Jeneponto Branch	*Jl. Pahlawan No. 5, Jeneponto*	*License number: 6/124/DPwB2/IDWB2/Mks dated July 6, 2004*
The Regent's office of Jeneponto	*Jl.Lanto Dg. Pasewang , Jeneponto*	*RBB 2014 Op. Dec 30, 2014*
	BANTAENG BRANCH	
Bantaeng Branch	*Jl. Andi Mannapiang No. 1 Pasorongi Bantaeng*	-
The Regent's Office of Bantaeng	*Jl. A. Mannapiang, Pasorongi, Bantaeng*	*May 22, 2012*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Tanggal Operasional *Operational Date*
	ATM	
	BULUKUMBA BRANCH	
Bulukumba Branch	Jl. Jend. Sudirman No. 48, Bulukumba	License number: 7/20/DPwB2/IDWB2/Mks dated January 19 2005
Cash Office of Lanto Dg. Pasewang (Caile)	Jl. Lanto Dg. Pasewang Bulukumba -	March 31, 2011
The Regent's Office of Bulukumba	Jl. Jend. Sudirman, No 1 Bulukumba	August 23, 2011
Cash Office of Kajang	Jl. Jend. Sudirman, Kec. Tanah Jaya, Kajang.	
	SELAYAR BRANCH	
Selayar Branch	Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng, Selayar	-
	SINJAI BRANCH	
Sinjai Branch	Jl. Persatuan Raya No. 48, Sinjai	License number: 5/96/DPwB2/IDWB2/Mks dated May 22, 2003
Cash Office of Bikeru	Jl. Poros Sinjai – Bulukumba	April 2, 2011
KPTSP office (old regent) Sinjai	Jl. Jend. Sudirman	
	SOPPENG BRANCH	
Soppeng Branch	Jl. Kemakmuran No. 125, Soppeng	-
Cash Office of the Regent's office of Soppeng	Jl. Salotungo, Kel. Lalabata Rilau, Watansoppeng	
	SENGKANG BRANCH	
Sengkang Branch	Jl. R.A.Kartini No. 1, Sengkang	License number: 7/37/DPwB2/IDWB2/Mks tanggal 03 Februari 2005
	POLEWALI BRANCH	
Polmas Branch	Jl. Andi Depu No. 172 Polewali	-
Cash Office Wonomulyo, Polewali	Jl. Jend. Sudirman No. 130 (Complex of Andita Permai) Polewali Tel. (0428) 52112 Fax. (0411)	March 29, 2011
The Regent's Office of Polman	Complex of The Regent's Office of Polewali Mandar	May 29, 2012

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Tanggal Operasional *Operational Date*
	ATM	
Cash Office of Tinambung	*Jl. H. Andi Depu TinambungTel. (0422) 21847*	*December 30, 2014*
	MAMASA BRANCH	
Mamasa Branch	*Jl. Poros Mamasa Km. 2, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Sulbar*	*March 9, 2011 (Mamasa) 03 Maret 2011 (Treasury)*
The Regent's Office of Mamasa	*Jl. Poros Mamasa – Rate Rate*	*Maret 8, 2013*
	MAJENE BRANCH	
Majene Branch	*Jl. Gatot Subroto No. 59, Majene*	-
The Regent's Office of Majene	*Jl. Gatot Subroto, Majene*	*March 8, 2013*
	PASANGKAYU BRANCH	
Pasangkayu Branch	*Jl. Andi Bandaco, Pasangkayu*	*February 25, 2011*
	JAKARTA BRANCH	
Jakarta Branch	*Jl. Gatot Subroto, Menara Bidakara 2, Jakarta*	*August 4, 2010*
Representative office of Sulsel Province	*Jl. Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta*	*April 14, 2011*
	TOPOYO BRANCH	
Cabang Topoyo Branch	*Jl. Poros Mamuju - Topoyo*	
	MAKASSAR SHARIA BRANCH	
Sharia Branch of Makassar	*Jl. Dr. Sam Ratulangi Ruko No. 7 Blok C1 –C2 Makassar*	-
Cash Office of Syariah ITTC/ UMI Tower	*Jl. Urip Sumoharjo Makassar*	
	MAROS SHARIA BRANCH	
Sharia Branch of Maros	*Jl. Jend. Sudirman (Next to the Masjid Al Markaz Maros)*	*April 11, 2012*
	SENGKANG SHARIA BRANCH	
	SIWA SUB-BRANCH	

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Tanggal Operasional *Operational Date*
	ATM	
Siwa Sub-Branch	*Jl. Andi Jaya No. 50, Siwa*	*March 17 2011*
	DAYA SUB-BRANCH	
Pembantu Daya Sub-Branch	*Jl. Perintis Kemerdekaan, Complex of Bukit Khatulistiwa Shophouses Mks*	*April 7, 2010*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Tanggal Operasional *Operational Date*
	PAYMENT POINT	
Payment Point of The Regent's Office of Gowa	*Jl. Masjid Raya No. 13, Sunggumi-nasa*	*License number:4/49/DPwB2/IDWB2/Mks dated 12/04/2002*
Payment Point of Sub-district office of Bajeng, Kab. Gowa	*Jl. Poros Gowa – Takalar*	*License number: 4/49/DPwB2/IDWB2/Mks dated 12/04/2002*
Payment Point of Samsat Sayang Makassar Town Square	*Jl. Perintis Kemerdekaan, Tamalan-rea,Makassar*	*2010*
Payment Point of SINTAP Parepare	*Jl. Veteran, Parepare*	*2011*
Payment Point of Pasar Sentral Enrekang	*Pasar Sentral Enrekang*	*2011*
Payment Point of Regional Revenue Office of Sulsel Province	*Jl. A.P. Pettarani*	*License number: 3/26/DPwB2/IDWB2/Mks dated 12/04/2002 June 7, 2012 License of Bank Indonesia number 14/25/DPIP/Prz/Mks dated April 27, 2012 concerning the application for Payment Point license*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Tanggal Operasional *Operational Date*
OFFICE CHANNELING		
Office Channelling of Main Branch of Bone	*Jl. Ahmad Yani No. 15, Watampone*	*December 30, 2009*
Office Channelling of Palopo Branch	*Jl. Andi Baso Rahim (ex. Jl. Falmboyan) No. 1, Palopo*	*December 30, 2009*
Office Channelling of Bulukumba Branch	*Jl. Jend. Sudirman No. 48, Bulukumba*	*Desember 30, 2009*
Office Channelling of Main branch of Mamuju	*Jl. Ahmad Yani No. 3, Mamuju*	*December 16, 2010*
Office Channelling of Pangkep Branch	*Jl. Sultan Hasanuddin No. 7, Pangkajene*	*December 16, 2010*
Office Channelling Barru Branch	*Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Barru*	*December 16, 2010*
Office Channelling of Pinrang Branch	*Jl. Jend. Sudirman No. 257, Pinrang*	*December 16, 2010*
Office Channelling of Sidrap Branch	*Jl. Jend. Sudirman No. 119, Sidrap*	*December 16, 2010*
Office Channelling Soppeng Branch	*Jl. Kemakmuran No. 125, Watansoppeng*	*December 16, 2010*
Office Channelling Sinjai Branch	*Jl. Persatuan raya No. 58, Sinjai*	*December 16, 2010*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Tanggal Operasional *Operational Date*
	OFFICE CHANNELING	
Office Channelling of Enrekang Branch	*Jl. Sultan Hasanuddin No. 5 Enrekang*	- *BI License number 14/43/DPIP/Prz/Mks dated June 27 2012 concerning the application for Sharia service counter license.* - *Decree of Directors number SK/100/DIR/VII/2012 dated July 31, 2012 concerning the opening of Sharia Service Counter, Sharia unit of Bank Sulselbar, Enrekang branch.*
Office Channelling of Belopa Branch	*Complex of the Government offices of Luwu Regency*	- *BI License number 14/43/DPIP/Prz/Mks dated 27 Juni 2012 concerning the application for Sharia Service Counter License* - *Decree of Directors number SK/101/DIR/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 concerning the opening of Sharia Service Counter, Sharia unit of Bank Sulselbar, Belopa branch.*
Office Channelling of Gowa Branch	*Jl. HOS. Cokroaminoto No. 2 Sungguminasa*	- *BI License number 14/43/DPIP/Prz/Mks dated June 27, 2012 concerning the application for Sharia Service Counter License* - *Decree of directors number SK/095/DIR/VII/2012 dated July 31, 2012 concerning the opening of Sharia Service Counter, Sharia unit of Bank Sulselbar, Gowa branch.*
Office Channelling of Takalar Branch	*Jl. Fitrah No. 22 Takalar*	- *BI Lisence number 14/43/DPIP/Prz/Mks dated June 27 2012 concerning the application for Sharia Service Counter License* - *Decree of Directors number SK/094/DIR/VII/2012 dated July 31, 2012 concerning the opening of Sharia Service Counter, Sharia unit of Bank Sulselbar, Takalar branch.*
Office Channelling of Polman Branch	*Jl. Andi Depu No. 102 Polewali*	- *BI License number 14/43/DPIP/Prz/Mks dated June 27, 2012 concerning the application of Sharia Service Counter License* - *Decree of directors number SK/091/DIR/VII/2012 dated July 31 2012 concerning the opening of Sharia Service Counter, Sharia unit of Bank Sulselbar, Polman branch.*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Tanggal Operasional *Operational Date*
OFFICE CHANNELING		
Office Channelling of Jeneponto Branch	*Jl. Pahlawan No. 5 Jeneponto*	- *BI License number 14/43/DPIP/Prz/Mks dated June 27, 2012 concerning the application for Sharia Service Counter License* - *Decree of Directors number SK/092/DIR/VII/2012 dated July 31, 2012 concerning the opening of Sharia Service Counter, Sharia unit of Bank Sulselbar, Jeneponto branch.*
Office Channelling of Parepare Branch	*Jl. Bau Massepe No. 468 Parepare*	- *BI License number 14/43/DPIP/Prz/Mks dated June 27, 2012 concerning the application for Sharia service counter license.* - *Decree of Directors number SK/093/DIR/VII/2012 dated July 31, 2012 concerning the opening of Sharia Service Counter, Sharia unit of Bank Sulselbar, Parepare branch.*
Office Channelling of Bantaeng Branch	*Jl. Andi Mannapiang No. 1 Pasorongi Bantaeng*	- *BI License number 14/43/DPIP/Prz/Mks dated June 27, 2012 concerning the application for Sharia service counter license.* - *Decree of Directors number SK/096/DIR/VII/2012 dated July 31, 2012 concerning the opening of Sharia Service Counter, Sharia unit of Bank Sulselbar, Bantaeng branch.*
Office Channelling of Masamba Branch	*Jl. Suhada No. 1 Masamba*	- *BI License number 14/43/DPIP/Prz/Mks dated June 27, 2012 concerning the application for Sharia Service Counter License* - *Decree of Directors number SK/087/DIR/VII/2012 date July 31, 2012 concerning the opening of Sharia Service Counter, Sharia unit of Bank Sulselbar, Masamba branch.*
Office Channelling of Majene Branch	*Jl. Gatot Subroto No. 59 Majene*	- *BI License number 14/43/DPIP/Prz/Mks dated June 27, 2012 concerning the application for Sharia Service Counter License* - *Decree of directors number SK/088/DIR/VII/2012 dated July 31, 2012 concerning the opening of Sharia Service Counter, Sharia unit of Bank Sulselbar, Majene branch.*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Tanggal Operasional *Operational Date*
	OFFICE CHANNELING	
Office Channelling of Makale Branch	*Jl. Pongtiku, Kel. Pantan, Kec. Makale*	- *BI License number 14/43/DPIP/Prz/Mks dated June 27, 2012 concerning the application for Sharia Service Counter License* - *Decree of Directors number SK/090/DIR/VII/2012 July 31, 2012 concerning the opening of Sharia Service Counter, Sharia unit of Bank Sulselbar, Makale branch.*
Office Channelling of Selayar Branch	*Jl. Jend. Ahmad Yani Benteng, Selayar*	- *BI License number 14/43/DPIP/Prz/Mks dated 27 June 2012 concerning the application for Sharia Service Counter License* - *Decree of Directors number SK/089/DIR/VII/2012 dated July 31, 2012 concerning the opening of Sharia Service Counter, Sharia unit of Bank Sulselbar, Selayak branch.*
Office Channelling of Malili Branch	*Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 1 Malili*	- *BI License number 14/43/DPIP/Prz/Mks dated June 27, 2012 concerning the application of Sharia Service Counter License* - *Decree of directors number SK/097/DIR/VII/2012 dated July 31, 2012 concerning the opening of Sharia Service Counter, Sharia unit of Bank Sulselbar, Malili branch.*
Office Channelling of Pasangkayu Branch	*Jl. Andi Bandaco, Pasangkayu*	- *BI License number 14/43/DPIP/Prz/Mks dated June 27, 2012 concerning the application for Sharia Service Counter License* - *Decree of Directors number SK/098/DIR/VII/2012 dated July 31, 2012 concerning the opening of Sharia Service Counter, Sharia unit of Bank Sulselbar, Pasangkayu branch.*
Office Channelling of Mamasa Branch	*Jl. Poros Mamasa Km. 2, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Sulbar*	- *BI License number 14/43/DPIP/Prz/Mks dated Juni 27, 2012 concerning the application for Sharia service counter license.* - *Decree of Directors number SK/099/DIR/VII/2012 dated July 31, 2012 concerning the opening of Sharia Service Counter, Sharia unit of Bank Sulselbar, Mamase branch.*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Tanggal Operasional *Operational Date*
	MOBILE CASH	
Bantaeng Branch	*Jl. Andi Mannapiang No. 1 Pasorongi Bantaeng*	*May 30,2011*
Gowa Branch	*Jl. HOS. Cokroaminoto No. 2 Sungguminasa*	*May 30,2011*
Makassar Main Branch	*Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar*	*May 30,2011*

License of the changing of the name and the logo of Bank Sulselbar number 13/53/APBU/Mks dated July 15, 2011 concerning the Report of Implementation of Change of Bank Saudara's Name and Logo

BankSulselbar

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
DISERTAI
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Melayani Sepenuh Hati

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Laporan Auditor Independen

Laporan Posisi Keuangan
per 31 Desember 2014 dan 2013..……..... 1-2

Laporan Laba Rugi Komprehensif
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013..... 3

Laporan Perubahan Ekuitas
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013..... 4

Laporan Arus Kas
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013..... 5

Catatan Atas Laporan Keuangan..... 6-78

Bank Sulselbar

Nomor: SR / 029 / R / GPK / III / 2015

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ir. Drs. Andi Muhammad Rahmat, MM
Alamat Kantor	:	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16, Makassar, Sulawesi Selatan
No. Telepon	:	(0411) 859171
Alamat Rumah	:	Jl. Bonto Langkasa I No. 46 Makassar
Jabatan	:	Direktur Utama

Nama	:	H. Ambo Samsuddin
Alamat Kantor	:	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16, Makassar, Sulawesi Selatan
No. Telepon	:	(0411) 859171
Alamat Rumah	:	BTN Minasa Upa Blok A5/8C Makassar
Jabatan	:	Direktur Umum

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
2. Laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi
Makassar, 20 Maret 2015

METERAI TEMPEL 20 32DE8ADF070175945 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Bank Sulselbar Direksi

Ir. Drs. Andi Muhammad Rahmat, MM	**H. Ambo Samsuddin**
Direktur Utama	Direktur Umum

Husni, Mucharam & Rasidi
Registered Public Accountants

No.: LAI/GA/HA/15007

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, laporan laba-rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas secara wajar untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan basis opini audit kami.

The Royal Palace Blok C-18 Jl. Prof. DR. Soepomo. SH, No. 178A, Jakarta 12870
Phone : 62 21 835 1868, 62 21 831 3413 **Fax** : 62 21 835 1978 **Website** : www.kaphmr.com **e-mail** : office@kaphmr.com **Izin Usaha** No. KEP 662/KM.17/1998

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tanggal 31 Desember 2014, hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Husni, Mucharam & Rasidi

Drs. Husni Arvan, CA., CPA.

Izin Praktik : AP.0071
Izin KAP : KEP-662/KM.17/1998

Jakarta, 20 Maret 2015

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
ASET			
Kas	2d,3	505.985.874.325	346.988.111.100
Giro pada Bank Indonesia	2e,4	707.682.530.771	644.901.221.714
Giro pada Bank Lain	2e,5	1.327.697.897	1.877.992.946
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain *setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp2.200.000.000 dan Rp1.950.000.000*	2f,6	594.800.000.000	550.050.000.000
Surat Berharga	2g,7	470.451.805.712	335.126.218.250
Kredit Yang Diberikan			
- Pihak Berelasi *setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp2.068.868.242 dan Rp2.324.374.409*	2c,2h,2i,8a,28,33,35,37,40	592.056.779	346.550.612
- Pihak Ketiga *setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp60.810.706.898 dan Rp71.423.557.590*	2h,2i,8a,28,33,35,37,40	6.971.143.296.632	6.117.631.740.655
Pembiayaan Syariah			
- Pihak Berelasi *setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp2.546.234 dan Rp12.123.749*	2c,2i,8a,28,33,35,40	252.077.176	1.200.251.154
- Pihak Ketiga *setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp10.685.468.360 dan Rp10.395.337.338*	2i,8a,28,33,35,40	478.209.704.417	454.531.509.807
Penyertaan	2j,9	81.584.000	81.584.000
Pajak Dibayar Dimuka	2s,17a	30.755.707.031	27.143.653.190
Aset Tetap *setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp157.934.467.224 dan Rp141.308.349.271*	2k,10	125.967.518.245	123.582.485.917
Aset Pajak Tangguhan	17e	18.052.593.343	19.193.613.444
Aset Lain-Lain	2l,11	98.037.344.110	112.220.098.507
JUMLAH ASET		**10.003.339.790.438**	**8.734.875.031.296**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	2m,12	177.778.956.317	145.990.885.081
Simpanan Nasabah			
- Pihak Berelasi			
Konvensional	2c,2n,13,	143.728.489.914	65.383.716.175
Syariah	37	5.346.897.800	9.083.988.228
- Pihak Ketiga			
Konvensional	2c,2n,13	6.426.796.857.308	5.466.465.900.346
Syariah		349.964.961.023	315.376.153.276
Simpanan dari Bank Lain	2b,2o,14	468.499.393.191	521.818.474.448
Surat Berharga Yang Diterbitkan	2b,2y,15	449.304.374.276	498.138.785.322
Pinjaman Yang Diterima	2b,2p,16	100.084.830.697	100.144.631.384
Utang Pajak	2s,17b	25.427.557.405	39.166.752.427
Imbalan Pasca Kerja	2u,19	50.540.062.542	44.681.098.629
Liabilitas Lainnya	18	85.973.320.548	100.038.233.527
JUMLAH LIABILITAS		**8.283.445.701.021**	**7.306.288.618.843**
EKUITAS			
Modal Saham			
Modal Dasar sebanyak 2.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh masing-masing sebanyak 606.033 dan 568.933 lembar saham per 31 Desember 2014 dan 2013	20	606.033.000.000	568.933.000.000
Tambahan Modal Disetor	21	55.136.400.000	11.600.942.699
Saldo laba	22		
Yang belum ditentukan penggunaannya		400.228.093.485	320.466.826.716
Yang telah ditentukan penggunaannya		658.496.595.932	527.585.643.038
JUMLAH EKUITAS		**1.719.894.089.417**	**1.428.586.412.453**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**10.003.339.790.438**	**8.734.875.031.296**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2014	2013
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah			
Pendapatan Bunga/Bagi Hasil	2q,23	1.434.306.092.192	1.246.024.974.356
Beban Bunga/Bagi Hasil	2q,24	(412.679.854.453)	(333.918.666.424)
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - bersih		**1.021.626.237.739**	**912.106.307.932**
PENDAPATAN/(BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA			
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	25	13.821.685.183	14.984.415.495
Administrasi	25	38.091.266.696	36.740.049.837
Lain-lain	25	7.322.366.605	5.267.194.716
Beban personalia	26	(337.008.107.660)	(312.355.479.639)
Beban umum dan administrasi	27	(191.069.697.137)	(211.546.583.524)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	28	(88.840.845.930)	(88.753.160.203)
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai		84.397.520.289	87.840.522.121
Jumlah Beban Operasional Lainnya		**(473.285.811.954)**	**(467.823.041.197)**
Pendapatan Operasional-bersih		**548.340.425.785**	**444.283.266.735**
PENDAPATAN/(BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan non operasional	29	445.060.000	1.686.475.559
Beban non operasional	29	(9.098.100.199)	(13.023.986.135)
Jumlah Beban Non Operasional		**(8.653.040.199)**	**(11.337.510.576)**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**539.687.385.586**	**432.945.756.159**
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	2t,17c	138.318.272.000	122.200.515.500
Pajak tangguhan	2t,17c	1.141.020.101	(5.181.215.714)
JUMLAH		**139.459.292.101**	**117.019.299.786**
LABA TAHUN BERJALAN		**400.228.093.485**	**315.926.456.373**
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA		-	-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**400.228.093.485**	**315.926.456.373**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian		Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor	Modal Donasi	Laba Ditahan		Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas
					Telah ditentukan penggunaannya			
					Cadangan Umum	Cadangan Bertujuan		
Saldo per 1 Januari 2013		**528.739.000.000**	**1.942.699**	**-**	**245.502.273.508**	**171.497.086.971**	**281.006.076.740**	**1.226.746.379.918**
Tambahan Modal Disetor	21	-	51.793.000.000	-	-	-	-	51.793.000.000
Pengesahan Penyetoran Modal oleh RUPS	21	40.194.000.000	(40.194.000.000)	-	-	-	-	-
Pembagian laba tahun lalu:								
Ditentukan untuk cadangan umum dan cadangan tujuan		-	-	-	55.293.141.280	55.293.141.279	(110.586.282.559)	-
Pembagian deviden dari laba tahun 2012		-	-	-	-	-	(165.879.423.838)	(165.879.423.838)
Total laba komprehensif tahun berjalan	22	-	-	-	-	-	315.926.456.373	315.926.456.373
Saldo per 31 Desember 2013		**568.933.000.000**	**11.600.942.699**	**-**	**300.795.414.788**	**226.790.228.250**	**320.466.826.716**	**1.428.586.412.453**
Tambahan Modal Disetor	21	-	80.635.457.301	-	-	-	-	80.635.457.301
Pengesahan Penyetoran Modal oleh RUPS	21	37.100.000.000	(37.100.000.000)	-	-	-	-	-
Pembagian laba tahun lalu:								
Ditentukan untuk cadangan umum dan cadangan tujuan		-	-	-	63.185.291.275	63.185.291.275	(126.370.582.550)	-
Pembagian deviden dari laba tahun 2013		-	-	-	-	-	(189.555.873.822)	(189.555.873.822)
Reklasifikasi atas akun-akun saldo laba	22	-	-	-	4.540.370.344	-	(4.540.370.344)	-
Dana kesejahteraan pegawai		-	-	-	-	-	-	-
Corporate Social Responsibility		-	-	-	-	-	-	-
Total laba komprehensif tahun berjalan	22	-	-	-	-	-	400.228.093.485	400.228.093.485
Saldo per 31 Desember 2014		**606.033.000.000**	**55.136.400.000**	**-**	**368.521.076.407**	**289.975.519.525**	**400.228.093.485**	**1.719.894.089.417**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	2014	2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:			
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	11,23,25	1.489.636.173.465	1.254.707.879.558
Pembayaran bunga, provisi dan komisi	24	(412.679.854.453)	(333.918.666.424)
Pembayaran beban karyawan dan pembelian barang dan jasa	18,26,27	(532.753.704.407)	(527.873.312.509)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	25,29	45.858.693.301	43.693.720.112
Laba Operasi sebelum Perubahan dalam Aset dan Liabilitas Operasi		**590.061.307.906**	**436.609.620.737**
Perubahan Dalam Aset dan Liabilitas Operasi			
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi			
Surat-surat berharga	7	(133.922.912.023)	89.459.909.103
Kredit yang Diberikan	8	(872.224.799.490)	(447.230.276.926)
Pembiayaan Syariah	8	(34.330.987.119)	(95.582.694.948)
Aset Lain-Lain	11	17.780.059.650	(9.554.806.640)
		(1.022.698.638.982)	**(462.907.869.411)**
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi			
Liabilitas Segera	12	27.338.877.079	42.407.296.445
Simpanan Nasabah	13	1.069.527.448.020	454.734.446.918
Simpanan dari bank lain	14	(53.319.081.257)	24.646.099.654
Liabilitas Lain-lain	18,19,26	(9.867.571.742)	18.927.431.539
		1.033.679.672.100	**540.715.274.556**
Kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan		601.042.341.024	514.417.025.882
Pembayaran pajak penghasilan	17a,17b,17c	(155.669.520.863)	(110.216.290.016)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**445.372.820.161**	**404.200.735.866**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:			
Perolehan Aset Tetap	10	(21.661.957.785)	(24.919.417.891)
Pengurangan Aset Tetap	10	2.650.807.504	-
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(19.011.150.281)**	**(24.919.417.891)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:			
Pembayaran Pinjaman Yang Diterima	16	(59.800.687)	(50.487.096.155)
Pembayaran dividen	22	(189.555.873.822)	(165.879.423.838)
Penyetoran modal	20	80.635.457.301	51.793.000.000
Pelunasan Surat Berharga Yang Diterbitkan	15	(50.000.000.000)	-
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		**(158.980.217.208)**	**(164.573.519.993)**
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		**267.381.452.672**	**214.707.797.982**
Kas dan Setara Kas Awal Tahun		**1.803.933.004.814**	**1.589.225.206.832**
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun		**2.071.314.457.486**	**1.803.933.004.814**
Kas dan Setara Kas terdiri atas :			
Kas	3	505.985.874.325	346.988.111.100
Giro pada Bank Indonesia	4	707.682.530.771	644.901.221.714
Giro pada Bank Lain	5	1.327.697.897	1.877.992.946
Penempatan pada Bank Indonesia & bank lain - Jatuh tempo sampai dengan 3 bulan sejak tanggal perolehan	6	594.800.000.000	550.050.000.000
Sertifikat Bank Indonesia - Jatuh tempo sampai dengan tiga bulan sejak tanggal perolehan	7	261.518.354.493	260.115.679.054
Jumlah Kas dan Setara Kas		**2.071.314.457.486**	**1.803.933.004.814**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

1. UMUM

a. Pendirian Bank

PT. Bank Sulselbar ("Bank") dahulu bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada mulanya didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan berdasarkan Akta No.95 tanggal 23 Januari 1961 oleh Notaris Raden Kadiman, notaris di Jakarta, dengan nama PT. Bank Pembangunan Sulawesi Selatan Tenggara, berkedudukan di Makassar. Berdasarkan Akta No.67 tanggal 13 Juli 1961 oleh Notaris Raden Kadiman, dilakukan perubahan nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara. Pada tahun 1961, Bank mulai kegiatan komersilnya yang berdasar pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1961.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 Tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara, yang statusnya sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 13 Tahun 2003 tanggal 20 Agustus 2003 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/25/ KEP.GBI/2005 tanggal 10 Mei 2005 telah ditetapkan perubahan bentuk Badan Hukum dari semula berbentuk Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Bank disingkat PT. Bank Sulsel sesuai Akta Pendirian No. 19 tanggal 27 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Mestariany Habie, S.H. di Makassar dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan SK No. C-31541 HT.01.01 TH 2004 tanggal 29 Desember 2004. Bank telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Makassar dengan No. TDP.503/0590/DP-0480/KPP tanggal 3 Januari 2005.

Pada Tahun 2007, Bank telah membentuk Unit Usaha Syariah yang menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip-prinsip Syariah. Pelaksanaannya dimulai sejak 28 April 2007 dengan Surat Izin Prinsip dari Bank Indonesia No. 9/20/DPbS/Mks tanggal 20 April 2007 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah. Dilanjutkan dengan meresmikan pembukaan Kantor Cabang Syariah Sengkang pada tanggal 28 April 2007. Disusul dengan pembukaan Kantor Cabang Syariah Maros pada tanggal 28 November 2007 dan Kantor Cabang Syariah Makassar pada tanggal 30 Desember 2008.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan No. 74 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, S.H. telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Bank yaitu dengan meningkatkan besarnya modal dasar menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000, perubahan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No:AHU-40408.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.

Berdasarkan akta persetujuan bersama seluruh pemegang saham Bank No. 16 tanggal 10 Februari 2011 oleh Rakhmawati Laica Marzuki, S.H., Notaris di Makassar dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-11765.AH.01.02.tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 para pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui pergantian nama PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank SulselBar.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah melakukan kegiatan usaha di bidang bank umum termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

1. UMUM (lanjutan)

b. Susunan Pengurus

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank yang diaktakan dengan akta No. 04 tanggal 2 Sesember 2011, akta No. 74 tanggal 25 Juni 2013 serta akta No. 13 tanggal 24 Juni 2014 seluruhnya oleh Rakhmawati Laica Marzuki, S.H., notaris di Makassar, susunan pengurus Bank pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Plt. Komisaris Utama	: H. Andi Mualim, SH, MS
Plt. Komisaris Independen	: Drs. H. A. Tjoneng Mallombasang
Komisaris Independen	: Drs. Natali Ikawidjaja, MM
Komisaris Independen	: Prof. Muhammad Amri

Direksi

Direktur Utama	: Ir. Drs. Andi Muhammad Rahmat, MM
Direktur Umum	: H. Ambo Samsudin
Plt. Direktur Pemasaran	: Ir. Drs. Andi Muhammad Rahmat, MM
Direktur Kepatuhan	: Drs. H. Harris Saleng

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK/180/DIR/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013, SK/181/DIR/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013, dan SK/033/DIR/IV/2014 tanggal 1 April 2014, Bank telah menetapkan Komite Audit, Komite Pemantau dan anti fraud dan Resiko dan Komite Renumerasi dan Nominasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	: Muhammad Amri
Anggota	: As'ad Makarau
Anggota	: M. Natsir Kadir

Komite Pemantau Resiko dan Anti Fraud

Ketua	: Natali Ikawidjaja
Anggota	: H. Muslimin Abbas
Anggota	: Aristo A Awusy

Komite Renumerasi dan Nominasi

Ketua Pelaksana Tugas	: H. A. Tjoneng Mallombasang
Anggota	: H. A. Muallim
Anggota	: Muhammad Amri
Anggota	: Hj. Sulaeha Achmad
Anggota	: H. A. Syahriwijaya
Anggota	: Pemimpin Sumber Daya Manusia

1. UMUM (lanjutan)

b. Susunan Pengurus (lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank yang diaktakan dengan akta No. 02 tanggal 1 Mei 2009, akta No. 03 tanggal 6 Oktober 2009, akta No. 61 tanggal 30 April 2010, akta No. 29 tanggal 30 Mei 2011, akta No. 4 tanggal 2 Desember 2011 serta akta No. 74 tanggal 25 Juni 2013 seluruhnya oleh Rakhmawati Laica Marzuki, S.H., notaris di Makassar, susunan pengurus Bank pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	: H. Andi Mualim, SH, MS
Komisaris Independen	: Drs. H. A. Tjoneng Mallombasang
Komisaris Independen	: Drs. Natali Ikawidjaja, MM
Komisaris Independen	: Prof. Muhammad Amri

Direksi

Direktur Utama	: Drs. Ellong Tjandra
Direktur Umum	: H. YanuarFachrudin, SE, MM
Direktur Pemasaran	: Ir. Drs. Andi Muhammad Rahmat, MM
Direktur Kepatuhan	: Drs. H. Harris Saleng

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK/123/DIR/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, SK/008/DIR/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, dan SK/007/DIR/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, Bank telah menetapkan Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Renumerasi dan Nominasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	: Muhammad Amri
Anggota	: As'ad makarau
Anggota	: M. Natsir Kadir

Komite Pemantau Resiko dan Anti Fraud

Ketua	: Natali Ikawidjaja
Anggota	: H. Muslimin Abbas
Anggota	: Aristo A Awusy

Komite Renumerasi dan Nominasi

Ketua Pelaksana Tugas	: H. A. Tjoneng Mallombasang
Anggota	: Natali Ikawidjaja
Anggota	: Hj. Sulaeha Achmad
Anggota	: H. A. Syahriwijaya
Anggota	: Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan Pengurus (lanjutan)

Pada tahun 2007, Bank telah membentuk Unit Usaha Syariah. Berkaitan dengan hal tersebut telah dibentuk Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK/029/DIR tanggal 26 April 2007 tentang pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Bank dan Surat Keputusan Direksi No. SK/034/DIR tanggal 11 Mei 2007 tentang Personalia Dewan Pengawas Syariah Bank, telah ditunjuk personalia untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Ketua	: Prof. DR. H. Halide
Anggota	: KH. M. Sanusi Baco, Lc
Anggota	: DR. Mukhlis Sufri, SE, Msi

Imbalan yang dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris Bank untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Direksi	2.594.531.596	3.695.548.608
Komisaris	2.432.091.276	2.194.432.866

Jumlah karyawan Bank untuktahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sejumlah 1.070 dan 1.023.

c. Jaringan Kantor

Dalam menjalankan kegiatannya, Bank memiliki 1 Kantor Pusat yang berlokasi di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16, Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun jaringan kantorBank yaitu sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Kantor Cabang Utama	3	3
Kantor Cabang Konvensional	28	27
Kantor Cabang Syariah	3	3
Kantor Cabang Pembantu	2	2
Kantor Kas	46	37
Kantor Layanan Syariah	25	25
Payment Point	6	6
Kantor Kas Mobil	3	3

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Bank untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008 termasuk Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan” yang terdapat dalam lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Sejak tahun 2007, Bank menerapkan unit usaha berprinsip Syariah. Laporan Keuangan unit usaha syariah tersebut disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2011)"Penyajian Laporan Keuangan Syariah", 102 "Akuntansi Murabahah", 105 "Akuntansi MUdharabah" 110 "Akuntansi Sukuk" dan 107 "Akuntansi Rahn" menggantikan No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) dan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Standar Akuntansi Syariah yang digunakan mengikuti Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/BPS tanggal 10 Juli 2013.

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan dasar akrual (kecuali laporan arus kas).

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Efektif 1 Januari 2012, Bank telah menerapkan PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan:Pengungkapan", PSAK 55 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, menggantikan PSAK No 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan:Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan:Penyajian" efektif sejak tanggal 1 januari 2010 yang menggantikan PSAK No. 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan:Penyajian".

i. Aset dan Liabilitas

Aset Keuangan

a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek *(short term profit-taking)* yang terkini. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan terdiri dari surat-surat berharga.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

i. Aset dan Liabilitas (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif dan dicatat masing masing sebagai “Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan” dan “Keuntungan/(kerugian) dari penjualan instrumen keuangan”. Pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam kelompok diperdagangkan dicatat sebagai “Pendapatan bunga”.

b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya administrasi serta dikurangi pendapatan provisi, komisi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi komprehensif dan dilaporkan sebagai “Pendapatan bunga”. Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai “Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai”.

c) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif;
- investasi yang ditetapkan oleh Bank dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

i. Aset dan Liabilitas (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

c) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari investasi dimiliki hingga jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif dan diakui sebagai "Pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui di dalam laporan keuangan sebagai "Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

d) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di laporan perubahan ekuitas, diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Bank tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas Keuangan

a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan ini merupakan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai "Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan". Beban bunga dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat di dalam "beban bunga".

Bank tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

i. Aset dan Liabilitas (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

b) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pengakuan dan Pengukuran

Bank menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk mencatat seluruh transaksi aset keuangan yang lazim *(regular).*

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan.

Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah hutang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual untuk atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Bank melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kontrol yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Bank menghapuskan saldo kredit dan surat-surat berharga dan cadangan kerugian nilai terkait, pada saat bank menentukan bahwa kredit atau surat-surat berharga tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit sehingga debitur/penerbit tidak lagi dapat melunasi kewajibannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

ii. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

iii. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset yang mengalami penurunan nilai dihitung secara individual dengan menggunakan metode *discounted cash flows*.

Untuk aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai cadangan kerugian penurunan nilainya dinilai secara kolektif berdasarkan data kerugian historis.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi.

Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

iii. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan *(collateralised financial asset)* mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan kredit yang diberikan dan efek-efek serta Obligasi Pemerintah (di dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang) diklasifikasikan ke dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

- Jika, pada periode berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif.
- Penerimaan kemudian atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan sebelumnya dikreditkan dengan menyesuaikan cadangan kerugian penurunan nilai.

b) Aset yang tersedia untuk dijual

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar dari investasi dalam instrumen utang di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Ketika terdapat bukti tersebut diatas untuk aset yang tersedia untuk dijual, kerugian kumulatif, yang merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi komprehensif, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi kompehensif, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010) mengenai "Pengungkapan pihak-pihak berelasi", pihak-pihak berelasi diartikan sebagai berikut :

1) Orang atau keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
   i. Pengendalian atau pengendali bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajamen kunci entitas atau entitas indu dari entitas pelapor.
2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lainnya.
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut maka entitas sponsor.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam poin (1).
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam poin 1 (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (suatu entitas induk dari entitas).

d. Kas dan Setara Kas

Komponen Kas dan setara kas meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

e. Giro Pada Bank Indonesia dan Pada Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan pada Bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar dan ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada).

Berdasarkan PBI No. 15/7/PBI/2013 tanggal 26 September 2013, GWM primer dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8%, GWM sekunder dalam rupiah ditetapkan sebesar 4% . Ketentuan lain yang terdapat pada PBI tersebut ialah diberlakukannya GWM LDR dalam Rupiah yaitu besaran perhitungan antara parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Giro Pada Bank Indonesia dan Pada Bank Lain (lanjutan)

Besaran Parameter yang akan digunakan dalam perhitungan GWM LDR dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut:

a. Batasi bawah LDR Target sebesar 78%
b. Batas atas LDR target sebesar 92%
c. KPMM insentif sebesar 14%
d. Parameter Disinsentif bawah sebesar 0,1
e. Parameter Disinsentif atas sebesar 0,2

PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum dalam rupiah dan valuta asing dimana GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing

f. Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan pada Bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar dan ditambahkan dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada).

g. Surat Berharga

Surat berharga dikelompokkan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo pada mulanya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi dan setelah pengakuan awal dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika ada.

Surat berharga yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara dan obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.

h. Kredit Yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu. Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Kredit pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Kredit yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dicatat sesuai dengan porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Bank dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

Kredit dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan antara bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atau penggantian asuransi atas kredit yang telah dihapusbukukan dikreditkan kedalam cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang direstrukturisasi dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah diantara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalamlaporan laba rugi komprehensif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Kredit Yang Diberikan (lanjutan)

Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit dan penghasilan bunga secara proporsional. Setelah tanggal 1 Januari 2010 saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang, penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak. Manajemen secara berkelanjutan mereview kredit yang restrukturisasi untuk meyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pebayaran dimasa depan. Kredit akan terus menjadi subyek penilaian penurunan nilai individual atau kolektif, dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal.

Dalam menentukan penurunan nilai secara kolektif, Bank menerapkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009, "Perubahan atas Surat Edaran No. 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)". Surat Edaran Bank Indonesia tersebut memuat penyesuaian atas PAPI (tahun 2008) tentang ketentuan transisi atas estimasi penurunan nilai kredit yang diberikan yang diberikan secara kolektif bagi bank yang memenuhi syarat.

Terhitung sejak 1 Januari 2011, bank telah mengukur penurunan nilai dan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas kredit secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik.

Bank dapat menggunakan data kerugian historis dari per group atas kelompok kredit yang serupa sampai bank dapat memiliki data sendiri, yaitu dalam hal bank:
- tidak memiliki data kerugian historis yang cukup memadai atas kelompok kredit ;
- tidak pernah mengalami kerugian dari kelompok kredit atau tidak memiliki pengalaman kerugian yang memadai ;
- memberikan kredit kepada industri atau sektor yang belum dilakukan sebelumnya; dan/ atau baru didirikan.

Bank dapat menggunakan beberapa pendekatan dalam menerapkan tingkat kerugian kelompok kredit, antara lain menggunakan Metode Statistik *(Statistical Model Analysis)* dengan parameter berikut:

- *Probability of Default* dengan pendekatan *Migration Analysis.*
- *Loss Given Default* dengan pendekatan *Recoverable Value*

% PD x % LGD x EAD
PD = *Probability of Default*
LGD = *Loss Given Default*
EAD = *Exposure at Default* (perkiraan nilai eksposur dari debitur tertentu pada saat terjadi default)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Non Produktif dan Rekening Administratif

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/DPNP tanggal 23 Desember 2011 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia yang terbit tanggal 16 Desember 2011, maka Bank tidak diwajibkan lagi membentuk penyisihan penghapusan aset non produktif dan transaksi rekening administratif yang diperhitungkan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2013 dan 2012. Namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Penyesuaian atas penyisihan penghapusan aset non produktif dan transaksi rekening administratif yang telah dibentuk telah dibebankan oleh Bank dalam laporan laba rugi komprehensif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah terdiri dari piutang murabahah dan pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan mudharabah disajikan dalam neraca sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar lebih besar daripada nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa akad atau diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat.

Piutang murabahah disajikan dalam neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi marjin murabahah ditangguhkan dan penyisihan kerugian piutang.

Rahn adalah fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban peminjam mengembalian pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, jaminan emas yang diberikan disimpan dan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/BPS tanggal 10 Juli 2013 bahwa Bank yang masih dalam proses pengumpulan pembiayaan secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari per grup atas pembiayaan secara kolektif sehingga sesuai dengan PAPSI 2013 dapat menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif sebagaimana dimaksud paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Bank masih diperbolehkan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai aset produktif serta estimasi kerugian atas rekening administratif berdasarkan hasil penelaahan terhadap kolektibilitas dari masing-masing aset produktif dan transaksi rekening yang mempunyai risiko kredit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktoberi 2008 serta Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011.

Klasifikasi	Persentase Minimum Penyisihan
Lancar	1%
Dalam perhatian khusus	5%
Kurang lancar	15%
Diragukan	50%
Macet	100%

Cadangan kerugian atas komitmen dan kontinjensi atas fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan dan garansi yang diterbitkan pada transaksi rekening administratif disajikan sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan.

j. Penyertaan

Penyertaan dalam bentuk saham yang nilainya di bawah 20% dari total nilai saham perusahaan yang bersangkutan dicatat berdasarkan harga perolehannya dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Pendapatan dividen diakui pada saat keputusan pembagian dividen diumumkan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

k. Aset Tetap

Bank memilih model harga perolehan*(cost model)* didalam kebijakan akuntansi aset tetap. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan kecuali aset tetap tertentu yang dinilai kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah dan aset tetap tanah tidak disusutkan. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double declining method*), kecuali bangunan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan persentase sebagai berikut :

	Persentase
Bangunan kantor	5%-10%
Bangunan rumah dinas	5%-10%
Kendaraan	25%-50%
Perabot kantor	25%-50%
Perabot rumah dinas	25%-50%

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Nilai buku aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun yang bersangkutan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Perubahan kebijakan akuntansi PSAK No.16 (Revisi 2011) "Aset Tetap" tidak memberikan dampak yang besar terhadap laporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan. ISAK 25 menetapkam bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap"dan tidak diamortisasi.

Sesuai dengan PSAK No. 47 "Akuntansi Tanah" semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah antara lain biaya perijinan, biaya survey dan pengukuran lokasi, biaya notaris dan pajak yang berhubungan dengan hal tersebut, ditangguhkan dan disajikan secara terpisah dari biaya perolehan hak atas tanah. Selain itu hak atas tanah tidak diamortisasi kecuali memenuhi kondisi-kondisi tertentu yang telah ditentukan.

l. Aset Lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari bunga yang masih harus diterima, uang muka dan biaya dibayar dimuka, agunan yang diambil alih dan persediaan barang cetakan. Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Selisih nilai agunan yang diambil alih dengan sisa pokok pinjaman yang diberikan, jika ada, dibebankan di laporan laba rugi tahun berjalan. Selisih nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat agunan tersebut dijual.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

m. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain.

Liabilitas pada awalnya diukur pada nilai wajar dan ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh liabilitas keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal, liabilitas segera dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

n. Simpanan Nasabah

Simpanan nasabah pada awalnya diukur pada nilai wajar dan ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh liabilitas keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal, simpanan nasabah dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

Produk simpanan dinilai sebagai berikut:

- Giro dan tabungan dinilai sebesar kewajiban Bank kepada nasabah
- Deposito dinilai sebesar jumlah pokok deposito yang tercantum dalam perjanjian antara bank dan nasabah
- Giro wadiah yaitu titipan dana dalam bentuk giro dan tabungan pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan pendapatan
- Tabungan dan deposito mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang memberikan pemilik dana imbalan bagi hasil
- Pendapatan unit syariah atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

o. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan pada Bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar dan ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh liabilitas keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal, simpanan nasabah dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

Simpanan dari Bank lain terdiri dari liabilitas terhadap Bank lain di dalam negeri dalam bentuk giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka. Simpanan dari Bank lain dinyatakan sesuai jumlah kewajiban terhadap Bank lain.

p. Pinjaman Yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia dan pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima pada awalnya diukur pada nilai wajar dan ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh pinjaman yang diterima tersebut, dan setelah pengakuan awal, pinjaman yang diterima dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

q. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan dicatat dalam pendapatan bunga dan beban bunga di dalam laporan laba rugi komprehensif menggunakan suku bunga efektif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

q. Pendapatan dan Beban Bunga (lanjutan)

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat , digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, bank mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pada saat kredit diklasifikasikan sebagai bermasalah, bunga yang diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontijensi.

Penerimaan tunai atas kredit yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet digunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif.

Bagi hasil dari pembiayaan mudharabah diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (cash basis). Keuntungan murabahah diakui selama periode akad berdasarkan konsep akrual. Pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain diakui pada saat diterima.

r. Pendapatan Provisi dan Komisi

Provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit diakui sebagai bagian/(pengurang) dari biaya perolehan kredit dan akan diakui sebagai pendapatan bunga dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Provisi dan komisi yang berkaitan dengan pembiayaan diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga.

s. Perpajakan

- Bank menghitung pajak penghasilan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 tentang (Revisi 2010) " Pajak Penghasilan" . Penerapannya tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
- Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.
- Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.
- Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.
- Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di neraca atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

t. Beban Yang Ditangguhkan

Pengeluaran tertentu yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan taksiran masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

u. Imbalan Pasca Kerja

Mulai tanggal 1 Januari 2012, Bank menerapkan PSAK No 24 (revisi 2010), "Imbalan Kerja" yang mengatur Imbalan kerja jangka pendek seperti pembayaran cuti tahunan, pembayaran cuti sakit dan imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti penghargaan tanda jasa dan cuti besar, diatur berdasarkan Peraturan perusahaan yang telah sesuai dengan Undang undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap laporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Sehubungan dengan imbalan pensiun, bank memiliki program pensiun manfaat pasti.

Bank memiliki program pensiun manfaat pasti untuk karyawan tetap yang memenuhi syarat. Dalam program ini, manfaat pensiun dibayarkan berdasarkan penghasilan dasar pensiun tertinggi karyawan dan masa kerja karyawan.

Program pensiun manfaat pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Bank, yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala. Program manfaat pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial yang jumlahnya melebihi jumlah yang lebih besar antara 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini imbalan pasti, kelebihannya dibebankan atau dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif selama rata-rata sisa masa kerja yang diharapkan dari karyawan tersebut.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi komprehensif, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (*period vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode *vesting*.

Imbalan pasca kerja tersebut telah dihitung sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2004).

v. Biaya Emisi Obligasi

Biaya emisi obligasi merupakan biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran emisi atau obligasi Bank dengan tingkat bunga tetap kepada masyarakat yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi Bank yang diterima. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal obligasi Bank diakui sebagai diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi Bank tersebut dengan menggunakan metode bunga efektif.

w. Laba Per Saham

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 56 tentang "Laba Per Saham". Laba operasional dan laba bersih per saham di hitung dengan membagi laba usaha dan laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang dari jumlah saham Bank yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

x. Informasi Segmen Usaha

Sebuah segmen usaha adalah sekelompok aset dan operasi yang menyediakan barang atau jasa yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya. Informasi keuangan disajikan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja dari setiap segmen usaha.

Segmen usaha terbagi dalam kelompok berdasarkan geografis menurut lokasi cabang.

y. Surat Berharga Yang Diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan merupakan obligasi yang diterbitkan oleh Bank yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan obligasi dikurangkan dari jumlah obligasi yang diterbitkan.

Setelah pengukuran awal surat berharga yang diterbitkan selanjutnya dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengukuran awal dan biaya-biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

z. Penilaian Dan Estimasi Akuntansi Yang Signifikan

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Bank untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode laporan. Pertimbangan dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Usaha yang berkelanjutan

  Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya, berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumberdaya untuk melanjutkan usahanya dimasa mendatang dan Bank tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya.

- Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

  Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 50 (Revisi 2011) dipenuhi.

- Nilai wajar atas instrumen keuangan

  Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak tersedia di pasar, Bank perlu mempertimbangkan mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar

- Kontinjensi

  Ketika Bank dalam proses hukum, perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

z. Penilaian Dan Estimasi Akuntansi Yang Signifikan (lanjutan)

- Penilaian mata uang fungsional

  PSAK No. 10 (Revisi 2010) mengharuskan Bank untuk menggunakan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling mewakili dampak ekonomi dari suatu transaksi, kejadian dan kondisi-kondisi yang relevan terhadap entitas. Bank dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut mata uang yang mempengaruhi harga jual atas instrumen keuangan dan jasa-jasa lainnya, mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan dan mata uang atas yang biasanya diterima dari aktivitas operasi.

- Estimasi dan asumsi

  Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank.

- Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan/piutang syariah

  Bank dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi komprehensif perlu membuat penilaian apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukan adanya penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman.

  Bank menggunakan perkiraan dalam menentukan tingkat penyisihan yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah penyisihan di masa yang akan datang.

- Umur ekonomis aset tetap

  Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbaharui jika memiliki harapan yang berbeda dari perkiraan sebelumnya. Estimasi masa manfaat aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

3. KAS

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Kas	485.885.124.325	328.695.311.100
Kas pada ATM	20.100.750.000	18.292.800.000
Jumlah	**505.985.874.325**	**346.988.111.100**

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Giro pada Bank Indonesia	707.682.530.771	644.901.221.714
Jumlah	**707.682.530.771**	**644.901.221.714**
GWM Utama	8,26%	8,24%
GWM Sekunder	5,33%	4,13%
GWM LDR	-	-

Giro Wajib Minimum Bank telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013 dan PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

5. GIRO PADA BANK LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Pihak ketiga		
Bank Umum		
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	486.135.161	1.711.472.162
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.734.443	10.944.535
PT. Bank Central Asia Tbk	775.672.875	100.607.927
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	51.153.181	50.707.257
PT. Bank Sulawesi Tengah	4.002.237	4.261.065
Jumlah giro pada bank lain	**1.327.697.897**	**1.877.992.946**

Suku bunga giro rata-rata per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing berkisar 2,50% - 3,00%.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh giro pada bank lain konvensional untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013tidak mengalami penurunan nilai sehingga cadangan kerugian penurunan nilai atas giro tidak dibentuk.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Akun ini terdiri dari:

a. Klasifikasi penempatan pada bank lain berdasarkan:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Pihak ketiga		
Deposito berjangka	220.000.000.000	195.000.000.000
Deposito on call	377.000.000.000	147.000.000.000
Interbank Call Money	-	210.000.000.000
Jumlah	**597.000.000.000**	**552.000.000.000**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2.200.000.000)	(1.950.000.000)
Jumlah penempatan pada bank lain – bersih	**594.800.000.000**	**550.050.000.000**

b. Klasifikasi penempatan pada bank lain berdasarkan bank

	31 Desember	
	2014	**2013**
Deposito		
Bank Umum		
PT. Bank Muamalat	155.000.000.000	55.000.000.000
PT. Bank Negara Indonesia Syariah	65.000.000.000	140.000.000.000
Interbank Call Money		
Bank Pembangunan Daerah		
BPD Maluku	-	50.000.000.000
BPD Sulawesi Tenggara	-	25.000.000.000
BPD Lampung	-	50.000.000.000
BPD Sulawesi Tengah	-	25.000.000.000
PT. Jabar Banten, Tbk	-	60.000.000.000
Deposito On Call		
Bank Umum		
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	150.000.000.000	-
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	227.000.000.000	147.000.000.000
Jumlah	**597.000.000.000**	**552.000.000.000**
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2.200.000.000)	(1.950.000.000)
Jumlah penempatan pada bank lain – bersih	**594.800.000.000**	**550.050.000.000**

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

c. Klasifikasi penempatan pada Bank lain berdasarkan kolektibilitas

Penempatan pada bank lain Unit Usaha Syariah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 digolongkan sebagai lancar.

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Saldo awal periode	(1.950.000.000)	(500.000.000)
Pembentukan selamaperiode bejalan	(300.000.000)	(1.450.000.000)
Pemulihan selama periode berjalan	50.000.000	-
Saldo akhir	**(2.200.000.000)**	**(1.950.000.000)**

Nisbah bagi hasil deposito per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing berkisar 50,00% - 85,00% dan 50,00% - 80,00%.

Suku bunga rata-rata deposito on call untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal31 Desember 2014 dan 2013 berkisar 7% dan 7,00%-7,60%.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pembentukan penyisihan aset produktif atas deposito syariah pada bank lain telah memadai.

7. SURAT-SURAT BERHARGA

Surat-surat berharga yang dimiliki oleh Bank per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah berupa Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara dan Obligasi yang dikategorikan sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*), dengan rincian sebagai berikut:

a. Klasifikasi surat-surat berharga berdasarkan jenis penerbit

	31 Desember	
	2014	**2013**
Pihak ketiga:		
Sertifikat Bank Indonesia	253.479.000.000	230.000.000.000
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	210.000.000.000	-
RR-SUN-21 HR	-	95.887.185.000
Bunga yang belum diamortisasi	(7.027.194.288)	(2.760.966.750)
Jumlah Surat Berharga	**456.451.805.712**	**323.126.218.250**
Obligasi		
Obligasi PT. Bank Sulut	4.000.000.000	2.000.000.000
Obligasi PT. Bank NTT	5.000.000.000	5.000.000.000
Obligasi PT. Bank Sumut	5.000.000.000	5.000.000.000
Jumlah Obligasi	**14.000.000.000**	**12.000.000.000**
Jumlah Surat-surat Berharga	**470.451.805.712**	**335.126.218.250**

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

b. Klasifikasi surat-surat berharga berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga:

Penerbit	Nilai	Tanggal Jatuh Tempo	SukuBunga Per Tahun	Lembaga Pemeringkat dan Peringkat
Dimiliki hingga jatuh tempo				
31 Desember 2014				
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	35.000.000.000	09 Januari 2015	7,15%	-
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	20.000.000.000	09 Januari 2015	7,18%	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	30.000.000.000	16 Januari 2015	6,95%	-
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	40.000.000.000	06 Februari 2015	7,15%	-
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	3.479.000.000	06 Februari 2015	7,18%	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	15.000.000.000	06 Februari 2015	6,45%	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	15.000.000.000	20 Februari 2015	6,50%	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	25.000.000.000	27 Februari 2015	6,50%	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	25.000.000.000	06 Maret 2015	6,50%	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	25.000.000.000	10 Maret 2015	6,50%	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	15.000.000.000	18 Maret 2015	6,50%	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	15.000.000.000	26 Maret 2015	6,75%	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	15.000.000.000	02 April 2015	6,75%	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	5.000.000.000	02 April 2015	6,77%	-
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	50.000.000.000	10 April 2015	7,10%	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	15.000.000.000	17 April 2015	6,75%	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	10.000.000.000	08 Mei 2015	6,80%	-
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	30.000.000.000	15 Mei 2015	6,90%	-
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	20.000.000.000	15 Mei 2015	7,00%	-
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	30.000.000.000	10 Juli 2015	6,88%	-
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	25.000.000.000	14 Agustus 2015	6,92%	-
Obligasi PT. Bank Sulut	2.000.000.000	09 April 2015	12,00%	PEFINDO/'idA-
Obligasi PT. Bank Sulut	2.000.000.000	08 Oktober 2019	11,90%	PEFINDO/'idA-
Obligasi PT. Bank NTT	5.000.000.000	08 Juli 2016	10,80%	PEFINDO/'idA-
Obligasi PT. Bank Sumut	5.000.000.000	05 Juli 2016	10,125%	PEFINDO/'idA-
Jumlah	**477.479.000.000**			

Penerbit	Nilai	Tanggal Jatuh Tempo	Suku Bunga Per Tahun	Lembaga Pemeringkat dan Peringkat
Dimiliki hingga jatuh tempo				
31 Desember 2013				
Bank Indonesia(SBI)	55.000.000.000	09 Januari 2014	4,86%	-
Bank Indonesia(SBI)	20.000.000.000	09 Januari 2014	4,88%	-
Bank Indonesia(SBI)	50.000.000.000	13 Februari 2014	5,00%	-
Bank Indonesia(SBI)	40.000.000.000	13 Maret 2014	5,35%	-
Bank Indonesia(SBI)	20.000.000.000	10 April 2014	5,35%	-
Bank Indonesia(SBI)	5.000.000.000	15 Mei 2014	6,00%	-
Bank Indonesia(SBI)	10.000.000.000	12 Juni 2014	6,70%	-
Bank Indonesia(SBI)	10.000.000.000	10 Juli 2014	7,00%	-
Bank Indonesia(SBI)	20.000.000.000	11 September 2014	7,22%	-
Surat UtangNegara	19.538.880.000	06 Januari 2014	6,05%	-
Surat UtangNegara	15.486.555.000	07 Januari 2014	6,34%	-
Surat UtangNegara	20.141.920.000	09 Januari 2014	6,34%	-
Surat UtangNegara	19.286.260.000	16 Januari 2014	6,34%	-
Surat UtangNegara	11.092.890.000	28 Januari 2014	6,23%	-
Surat UtangNegara	10.340.680.000	30 Januari 2014	6,20%	-
Obligasi PT. Bank Sulut	2.000.000.000	09 April 2015	12,00%	PEFINDO/'idA-
Obligasi PT. Bank NTT	5.000.000.000	08 Juli 2016	10,80%	PEFINDO/'idA-
Obligasi PT. Bank Sumut	5.000.000.000	05 Juli 2016	10,125%	PEFINDO/'idA-
Jumlah	**337.887.185.000**			

7. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

c. Klasifikasi surat berharga berdasarkan kolektibilitas

Manajemen berpendapat bahwa seluruh surat berharga untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013tidak mengalami penurunan nilai sehingga cadangan kerugian penurunan nilai atas surat berharga tidak dibentuk.

d. Klasifikasi surat berharga berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo

	31 Desember	
	2014	**2013**
Kurang dari 1 tahun	456.451.805.712	323.126.218.250
1 - 5 tahun	14.000.000.000	12.000.000.000
Jumlah	**470.451.805.712**	**335.126.218.250**

8. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

a. Menurut jenis kredit

	31 Desember	
	2014	**2013**
Pihak-pihak berelasi		
Kredit Yang Diberikan		
Kredit investasi	2.660.925.021	2.670.925.021
Penyisihan Kerugian	(2.068.868.242)	(2.324.374.409)
Sub Jumlah Kredit Yang Diberikan	**592.056.779**	**346.550.612**
Pembiayaan Syariah		
Piutang murabahah lainnya	254.623.410	1.212.374.903
Penyisihan Kerugian	(2.546.234)	(12.123.749)
Sub Jumlah Pembiayaan Syariah	**252.077.176**	**1.200.251.154**
Jumlah - Pihak Berelasi	**844.133.955**	**1.546.801.766**
Pihak ketiga		
Konvensional		
Kredit investasi	525.702.047.166	538.934.506.242
Kredit modal kerja	504.178.292.697	478.008.595.124
Kredit Perumahan Rakyat (KPR)	4.037.466.215	110.612.362.525
Kredit umum lainnya	5.998.036.197.452	5.061.499.834.354
Penyisihan Kerugian	(60.810.706.898)	(71.423.557.590)
Sub Jumlah	**6.971.143.296.632**	**6.117.631.740.655**
Syariah		
Piutang murabahah investasi	34.388.447.263	51.974.905.395
Piutang murabahah modal kerja	39.500.036.773	14.425.515.748
Piutang murabahah lainnya	394.702.182.168	376.418.058.519
Pembiayaan mudharabah	13.631.245.773	16.001.551.683
Rahn	6.673.260.800	6.106.815.800
Penyisihan Kerugian	(10.685.468.360)	(10.395.337.338)
Sub Jumlah	**478.209.704.417**	**454.531.509.807**
Jumlah - Pihak Ketiga	**7.449.353.001.049**	**6.572.163.250.462**
Jumlah Kredit Yang Diberikan dan Pembiayaan Syariah - Bersih	**7.450.197.135.004**	**6.573.710.052.228**

Jumlah pihak-pihak berelasi dicatat kembali pada catatan no. 37.

8. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

b. Kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas

Jenis Sektor Ekonomi	31 Desember 2014					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Konsumtif	5.980.043.044.923	8.704.381.649	1.098.426.255	1.213.950.855	11.123.487.812	6.002.183.291.494
Penyisihan	(11.059.286.329)	(4.075.024.953)	(303.911.247)	(334.410.305)	(7.408.466.818)	(23.181.099.652)
Jumlah	**5.968.983.758.594**	**4.629.356.696**	**794.515.008**	**879.540.550**	**3.715.020.994**	**5.979.002.191.842**
Pertanian	129.292.761.903	957.426.254	307.175.085	291.793.453	3.895.519.850	134.744.676.545
Penyisihan	(725.202.667)	(164.826.133)	(213.276.285)	(80.622.559)	(2.723.650.867)	(3.907.578.511)
Jumlah	**128.567.559.236**	**792.600.121**	**93.898.800**	**211.170.894**	**1.171.868.983**	**130.837.098.034**
Industri	60.559.914.144	1.002.771.566	54.245.131	6.002.108	2.093.933.830	63.716.866.779
Penyisihan	(408.250.784)	(259.070.678)	(21.838.016)	-	(1.550.842.702)	(2.240.002.180)
Jumlah	**60.250.663.360**	**743.700.888**	**32.407.115**	**6.002.108**	**543.091.128**	**61.575.864.599**
Listrik / Air	16.480.010.695	-	-	-	281.087.500	16.761.098.195
Penyisihan	(6.721.360)	-	-	-	(218.545.430)	(225.266.790)
Jumlah	**16.473.289.335**	**-**	**-**	**-**	**62.542.070**	**16.535.831.405**
Pertambangan	2.306.822.891	-	-	-	190.143.417	2.496.966.308
Penyisihan	(13.200.483)	-	-	-	(148.203.842)	(161.404.325)
Jumlah	**2.293.622.408**	-	-	-	**41.939.575**	**2.335.561.983**
Konstruksi	5.177.725.919	455.962.570	211.363.568	-	757.793.532	6.602.845.589
Penyisihan	(144.633.101)	(10.156.878)	(92.708.992)	-	(453.617.655)	(701.116.626)
Jumlah	**5.033.092.818**	**445.805.692**	**118.654.576**	**-**	**304.175.877**	**5.901.728.963**
Perumahan	10.244.900.903	319.582.482	-	-	223.762.466	10.788.245.851
Penyisihan	(88.400.442)	(13.363.453)	-	-	(173.975.236)	(275.739.131)
Jumlah	**10.156.500.461**	**306.219.029**	**-**	**-**	**49.787.230**	**10.512.506.720**
Perdagangan	590.865.312.585	4.837.697.925	1.031.147.932	1.633.286.043	24.452.235.115	622.819.679.600
Penyisihan	(4.191.473.982)	(1.549.135.774)	(275.738.061)	(379.285.322)	(17.313.864.263)	(23.709.497.402)
Jumlah	**586.673.838.603**	**3.288.562.151**	**755.409.871**	**1.254.000.721**	**7.138.370.852**	**599.110.182.198**
Pengangkutan dan Distribusi	32.141.648.267	524.171.077	29.727.728	-	1.534.495.671	34.230.042.743
Penyisihan	(391.523.286)	(237.450.383)	(13.220.617)	-	(1.108.792.048)	(1.750.986.334)
Jumlah	**31.750.124.981**	**286.720.694**	**16.507.111**	**-**	**425.703.623**	**32.479.056.409**
Jasa-jasa Dunia usaha	14.064.208.196	-	-	-	3.403.816.961	17.468.025.157
Penyisihan	(107.114.159)	-	-	-	(2.528.308.155)	(2.635.422.314)
Jumlah	**13.957.094.037**	-	-	-	**875.508.806**	**14.832.602.843**
Jasa-jasa sosial masyarakat	117.562.265.069	1.399.999.214	434.338.686	340.840.725	3.065.746.596	122.803.190.290
Penyisihan	(1.236.122.844)	(576.990.978)	(70.709.898)	(75.487.903)	(2.132.150.252)	(4.091.461.875)
Jumlah	**116.425.142.225**	**823.008.236**	**363.628.788**	**265.352.821**	**933.596.344**	**118.810.728.414**
Jumlah kredit yang diberikan	6.958.740.615.495	18.201.992.737	3.166.424.385	3.485.873.184	51.020.022.750	7.034.614.928.551
Jumlah cadangan kerugian	(18.371.929.437)	(6.886.019.230)	(991.403.116)	(869.806.089)	(35.760.417.268)	(62.879.575.140)
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	**6.940.368.686.058**	**11.315.973.507**	**2.175.021.269**	**2.616.067.095**	**15.259.605.482**	**6.971.735.353.411**

8. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

b. Kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas (lanjutan)

Jenis Sektor Ekonomi	31 Desember 2013					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Konsumtif	4.184.416.577.043	7.683.343.113	637.117.894	852.393.189	10.391.385.187	4.203.980.816.426
Penyisihan	(6.752.157.338)	(3.511.147.098)	(151.958.021)	(222.029.221)	(7.089.003.105)	(17.726.294.783)
Jumlah	**4.177.664.419.705**	**4.172.196.015**	**485.159.873**	**630.363.968**	**3.302.382.082**	**4.186.254.521.643**
Pertanian	103.205.904.121	1.674.128.832	173.683.106	416.863.934	5.415.083.279	110.885.663.272
Penyisihan	(563.892.276)	(381.723.069)	(18.846.686)	(106.062.366)	(4.030.261.260)	(5.100.785.657)
Jumlah	**102.642.011.845**	**1.292.405.763**	**154.836.420**	**310.801.568**	**1.384.822.019**	**105.784.877.615**
Industri	56.137.789.286	520.367.408	443.827.927	283.588.266	2.614.618.458	60.000.191.345
Penyisihan	(266.357.509)	(55.981.531)	(65.533.483)	(10.458.232)	(1.871.403.303)	(2.269.734.058)
Jumlah	**55.871.431.777**	**464.385.877**	**378.294.444**	**273.130.034**	**743.215.155**	**57.730.457.287**
Listrik / Air	16.389.006.816	4.778.495	-	-	281.087.500	16.674.872.811
Penyisihan	(3.882.202)	(563.913)	-	-	(244.616.598)	(249.062.713)
Jumlah	**16.385.124.614**	**4.214.582**	**-**	**-**	**36.470.902**	**16.425.810.098**
Pertambangan	2.066.938.907	-	-	-	190.143.417	2.257.082.324
Penyisihan	(8.649.763)	-	-	-	(165.472.445)	(174.122.208)
Jumlah	**2.058.289.144**	**-**	**-**	**-**	**24.670.972**	**2.082.960.116**
Konstruksi	2.842.545.713	69.288.973	-	-	1.767.082.932	4.678.917.618
Penyisihan	(110.777.549)	(16.463.069)	-	-	(1.159.740.352)	(1.286.980.970)
Jumlah	**2.731.768.164**	**52.825.904**	**-**	**-**	**607.342.580**	**3.391.936.648**
Perumahan	964.515.801.310	7.410.487.666	1.029.159.393	974.285.259	2.143.705.951	976.073.439.579
Penyisihan	(1.882.368.930)	(4.344.608.095)	(320.718.175)	(343.411.064)	(1.568.784.012)	(8.459.890.276)
Jumlah	**962.633.432.380**	**3.065.879.571**	**708.441.218**	**630.874.195**	**574.921.939**	**967.613.549.303**
Perdagangan	610.453.251.763	9.217.895.019	1.978.675.485	2.058.197.047	28.993.971.243	652.701.990.557
Penyisihan	(3.050.082.020)	(2.729.119.910)	(244.335.300)	(321.212.846)	(21.466.087.556)	(27.810.837.632)
Jumlah	**607.403.169.743**	**6.488.775.109**	**1.734.340.185**	**1.736.984.201**	**7.527.883.687**	**624.891.152.925**
Pengangkutan dan Distribusi	22.596.817.128	857.860.166	290.686.166	265.701.716	1.527.635.090	25.538.700.266
Penyisihan	(252.333.231)	(260.925.455)	(158.607.803)	(14.911.799)	(1.314.233.499)	(2.001.011.787)
Jumlah	**22.344.483.897**	**596.934.711**	**132.078.363**	**250.789.917**	**213.401.591**	**23.537.688.479**
Jasa-jasa Dunia usaha	13.834.300.352	354.878.208	-	-	3.880.386.592	18.069.565.152
Penyisihan	(96.034.715)	(52.333.450)	-	-	(3.259.522.586)	(3.407.890.751)
Jumlah	**13.738.265.637**	**302.544.758**	**-**	**-**	**620.864.006**	**14.661.674.401**
Jasa-jasa sosial masyarakat	112.574.405.656	2.692.841.661	189.774.285	311.616.566	5.096.345.748	120.864.983.916
Penyisihan	(767.955.841)	(713.522.955)	(75.023.465)	(159.971.921)	(3.544.846.982)	(5.261.321.164)
Jumlah	**111.806.449.815**	**1.979.318.706**	**114.750.820**	**151.644.645**	**1.551.498.766**	**115.603.662.752**
Jumlah kredit yang diberikan	6.089.033.338.095	30.485.869.541	4.742.924.256	5.162.645.977	62.301.445.397	6.191.726.223.266
Jumlah cadangan kerugian	(13.754.491.374)	(12.066.388.545)	(1.035.022.933)	(1.178.057.449)	(45.713.971.698)	(73.747.931.999)
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	**6.075.278.846.721**	**18.419.480.996**	**3.707.901.323**	**3.984.588.528**	**16.587.473.699**	**6.117.978.291.267**

8. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

c. Pembiayaan syariah berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas (lanjutan)

Jenis Sektor Ekonomi	31 Desember 2014					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pihak ketiga:						
Konsumtif	102.677.369.099	51.322.243	33.604.870	80.467.372	196.614.040	103.039.377.624
Penyisihan	(1.026.773.691)	(2.566.112)	(5.040.731)	(40.233.686)	(196.614.040)	(1.271.228.260)
Jumlah	**101.650.595.408**	**48.756.131**	**28.564.139**	**40.233.686**	**-**	**101.768.149.364**
Pertanian	236.310.969	-	-	-	27.208.397	263.519.366
Penyisihan	(2.363.110)	-	-	-	(27.208.397)	(29.571.507)
Jumlah	**233.947.859**	**-**	**-**	**-**	**-**	**233.947.859**
Industri	62.600.000	137.267.937	-	41.711.667	142.621.441	384.201.045
Penyisihan	(626.000)	(6.863.397)	-	(20.855.834)	(142.621.441)	(170.966.671)
Jumlah	**61.974.000**	**130.404.540**	**-**	**20.855.833**	**-**	**213.234.374**
Konstruksi	1.397.247.714	-	-	-	50.278.951	1.447.526.665
Penyisihan	(13.972.477)	-	-	-	(50.278.951)	(64.251.428)
Jumlah	**1.383.275.237**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.383.275.237**
Perumahan	333.743.525.472	2.320.738.520	761.606.370	102.026.425	607.198.350	337.535.095.137
Penyisihan	(3.337.435.255)	(116.036.926)	(114.240.955)	(51.013.213)	(607.198.350)	(4.225.924.699)
Jumlah	**330.406.090.217**	**2.204.701.594**	**647.365.415**	**51.013.212**	**-**	**333.309.170.438**
Perdagangan	7.337.687.872	163.717.564	243.232.536	223.700.228	2.021.081.831	9.989.420.031
Penyisihan	(73.376.879)	(8.185.878)	(36.484.880)	(111.850.114)	(2.021.081.831)	(2.250.979.582)
Jumlah	**7.264.310.993**	**155.531.686**	**206.747.656**	**111.850.114**	**-**	**7.738.440.449**
Pengangkutan dan Distribusi	264.612.698	-	-	-	361.969.828	626.582.526
Penyisihan	(2.646.127)	-	-	-	(361.969.828)	(364.615.955)
Jumlah	**261.966.571**	**-**	**-**	**-**	**-**	**261.966.571**
Jasa-jasa Dunia usaha	33.088.243.164	588.731.879	268.775.091	16.964.914	1.901.358.745	35.864.073.793
Penyisihan	(330.882.431)	(29.436.594)	(40.316.264)	(8.482.457)	(1.901.358.745)	(2.310.476.491)
Jumlah	**32.757.360.732**	**559.295.285**	**228.458.827**	**8.482.457**	**-**	**33.553.597.302**
Jumlah pembiayaan syariah	478.807.596.988	3.261.778.143	1.307.218.867	464.870.606	5.308.331.583	489.149.796.187
Jumlah cadangan kerugian	(4.788.075.970)	(163.088.907)	(196.082.830)	(232.435.304)	(5.308.331.583)	(10.688.014.594)
Jumlah pembiayaan syariah - bersih	**474.019.521.018**	**3.098.689.236**	**1.111.136.037**	**232.435.302**	**-**	**478.461.781.593**

8. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

c. Pembiayaan syariah berdasarkan sektor ekonomi dan kolektabilitas (lanjutan)

Jenis Sektor Ekonomi	31 Desember 2013					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pihak ketiga:						
Konsumtif	144.647.213.416	83.432.192	37.020.083	-	694.614.040	145.462.279.731
Penyisihan	(1.446.472.134)	(4.171.610)	(5.553.012)	-	(694.614.040)	(2.150.810.796)
Jumlah	**143.200.741.282**	**79.260.582**	**31.467.071**	**-**	**-**	**143.311.468.935**
Pertanian	2.828.722.158	-	-	-	28.943.390	2.857.665.548
Penyisihan	(28.287.222)	-	-	-	(28.943.390)	(57.230.612)
Jumlah	**2.800.434.936**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.800.434.936**
Industri	319.800.590	144.615.935	353.380.623	-	117.236.991	935.034.139
Penyisihan	(3.198.006)	(7.230.797)	(53.007.093)	-	(117.236.991)	(180.672.887)
Jumlah	**316.602.584**	**137.385.138**	**300.373.530**	**-**	**-**	**754.361.252**
Konstruksi	1.917.933.078	-	-	-	141.625.710	2.059.558.788
Penyisihan	(19.179.331)	-	-	-	(141.625.710)	(160.805.041)
Jumlah	**1.898.753.747**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.898.753.747**
Perumahan	288.546.099.641	1.700.597.184	344.155.976	136.311.979	402.078.490	291.129.243.270
Penyisihan	(2.885.460.996)	(85.029.859)	(51.623.396)	(68.155.990)	(402.078.490)	(3.492.348.731)
Jumlah	**285.660.638.645**	**1.615.567.325**	**292.532.579**	**68.155.990**	**-**	**287.636.894.538**
Perdagangan	7.399.579.530	373.206.660	485.457.884	149.410.272	1.795.802.013	10.203.456.359
Penyisihan	(73.995.795)	(18.660.333)	(72.818.683)	(74.705.136)	(1.795.802.013)	(2.035.981.960)
Jumlah	**7.325.583.735**	**354.546.327**	**412.639.201**	**74.705.136**	**-**	**8.167.474.399**
Pengangkutan dan Distribusi	282.500.686	-	-	-	386.988.225	669.488.911
Penyisihan	(2.825.007)	-	-	-	(386.988.225)	(389.813.232)
Jumlah	**279.675.679**	**-**	**-**	**-**	**-**	**279.675.679**
Jasa-jasa Dunia usaha	10.436.326.707	275.136.544	186.897.074	260.983.608	1.663.151.368	12.822.495.301
Penyisihan	(104.363.267)	(13.756.827)	(28.034.561)	(130.491.804)	(1.663.151.368)	(1.939.797.827)
Jumlah	**10.331.963.440**	**261.379.717**	**158.862.513**	**130.491.804**	**-**	**10.882.697.473**
Jumlah pembiayaan syariah	456.378.175.806	2.576.988.515	1.406.911.640	546.705.859	5.230.440.227	466.139.222.048
Jumlah cadangan kerugian	(4.563.781.758)	(128.849.426)	(211.036.746)	(273.352.930)	(5.230.440.227)	(10.407.461.087)
Jumlah pembiayaan syariah - bersih	**451.814.394.048**	**2.448.139.089**	**1.195.874.894**	**273.352.930**	**-**	**455.731.760.962**

d. Menurut jangka waktu

- **Berdasarkan sisa umur jatuh tempo**

	31 Desember	
	2014	**2013**
Telah jatuh tempo	28.553.961.645	28.470.789.292
Kurang dari 1 tahun	165.113.614.846	93.035.196.761
1 tahun hingga 2 tahun	183.625.980.789	196.476.575.462
2 tahun hingga 5 tahun	1.352.077.273.119	1.212.547.026.098
Lebih dari 5 tahun	5.794.393.894.339	5.127.335.857.701
Jumlah	**7.523.764.724.738**	**6.657.865.445.314**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(73.567.589.734)	(84.155.393.086)
Jumlah bersih	**7.450.197.135.004**	**6.573.710.052.228**

8. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

d. Menurut jangka waktu (lanjutan)

- **Berdasarkan perjanjian**

	31 Desember	
	2014	**2013**
Kurang dari 1 tahun	73.888.412.905	23.759.908.026
1 tahun hingga 2 tahun	12.771.829.615	64.023.746.607
2 tahun hingga 5 tahun	503.889.442.924	339.461.096.282
Lebih dari 5 tahun	6.933.215.039.294	6.230.620.694.399
Jumlah	**7.523.764.724.738**	**6.657.865.445.314**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(73.567.589.734)	(84.155.393.086)
Jumlah bersih	**7.450.197.135.004**	**6.573.710.052.228**

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :

a. Suku bunga rata-rata kontraktual untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar 16,12% dan 15,50%. Suku bunga rata-rata efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar 18,12% dan 18,50%. Nisbah bagi hasil mudharabah, murabahah dan rahn untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar 16%-18%, 14%-18% dan 14%.

b. Kredit yang diberikan pada pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama seperti yang diberikan kepada pihak lain.

c. Kredit umum lainnya merupakan kredit yang diberikan untuk pegawai negeri sipil di lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Semua kredit tersebut dijamin oleh Perum Jamkrindo, PT Askrindo, PT Jasa Rahardja Putera, PT ASEI, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Sarana Lindung Upaya, PT Asuransi Bumi Putera Muda 1967 dan PT Asuransi Jiwa Recapital. Adapun tabel suku bunga atas kredit lainnya yang diberikan adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Bentuk Kredit		
Umum lainnya	6.392.993.003.029	5.439.130.267.776
Porsi kredit usaha lainnya terhadap total kredit yang diberikan	84,97%	81,69%

d. Tabel jumlah kredit non-performing terdiri dari kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah dengan kolektibilitas (kurang lancar, diragukan dan macet) adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
NPL-Gross		
Jumlah	64.754.741.375	79.391.073.356
Persentase	0,86%	1,19%
NPL-Netto		
Jumlah	21.394.265.185	25.749.191.373
Persentase	0,29%	0,39%

Berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia No. 3/PBI/2001 tanggal 26 Desember 2001, rasio kredit non-performing adalah setinggi-tingginya 5% dari jumlah yang diberikan oleh Bank. Bank telah membentuk tim khusus untuk menangani kredit bermasalah melalui SK Direksi.

8. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan/pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

Kredit yang diberikan

	31 Desember	
	2014	**2013**
Saldo awal periode	73.747.931.999	80.943.683.918
Pembentukan selama periode berjalan	87.707.224.017	83.433.375.162
Pemulihan selama periode berjalan	(83.794.451.884)	(87.450.225.520)
Penerimaan kembali kredit hapus buku penjaminan dalam periode berjalan	5.106.146.551	2.721.480.951
Pinjaman hapus buku penjaminan	(9.255.775.543)	(5.900.382.512)
Beban asuransi atas AJN	(10.631.500.000)	-
Saldo akhir periode	**62.879.575.140**	**73.747.931.999**

Sesuai dengan SK Direksi PT Bank Sulselbar No. SK/173/DIR/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pembayaran Klaim PT. Asuransi Jiwa Nusantara dan mengacu pada keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-42/D.05/2013 tanggal 12 Juni 2013 perihal Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Nusantara, maka Bank memutuskan untuk membayar klaim debitur yang meninggal dunia sebesar Rp10.631.500.000.

Pembiayaan Syariah

	31 Desember	
	2014	**2013**
Saldo awal periode	10.407.461.087	6.927.972.647
Pembentukan selama periode berjalan	833.621.913	3.869.785.041
Pemulihan selama periode berjalan	(553.068.406)	(390.296.601)
Saldo akhir periode	**10.688.014.594**	**10.407.461.087**

f. Ikhtisar kredit yang dihapusbuku adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Saldo awal periode	90.266.386.988	87.087.485.427
Penghapusbukuan selama periode berjalan	9.255.775.543	5.900.382.512
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	(5.106.146.551)	(2.721.095.955)
Saldo akhir periode	**94.416.015.980**	**90.266.771.984**

Penerimaan kembali atas kredit yang dihapuskan selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesarRp5.106.146.551 dan Rp2.721.480.951. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 tidak terdapat penghapusbukuan murni.

Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, seluruh kredit yang diberikan dievaluasi secara kolektif.

8. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

f. Ikhtisar kredit yang dihapusbuku (lanjutan)

Rincian kredit kolektif yang mengalami penurunan nilai dan yang tidak mengalami penurunan nilai per 31 Desember 2014 dan 2013:

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	kredit yang mengalami penurunan nilai	**kredit yang tidak mengalami penurunan nilai**	**kredit yang mengalami penurunan nilai**	**kredit yang tidak mengalami penurunan nilai**
Kredit yang diberikan	64.754.741.375	7.459.009.983.363	79.391.073.356	6.578.474.371.957
DikurangiCKPN	(43.358.476.190)	(30.209.113.544)	(53.641.881.983)	(30.513.511.103)
Kredit yang diberikan – bersih	**21.396.265.185**	**7.428.800.869.819**	**25.749.191.373**	**6.547.960.860.854**

g. Dalam upaya penanganan kredit bermasalah Bank senantiasa menjaga dan memelihara kualitas kredit serta meminimalisir risiko kredit. Untuk itu Bank melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian terhadap kredit-kredit bermasalah yang mencakup penagihan debitur atau kompensasi, pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi kredit, hapusbuku kredit dan atau cara-cara lain yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

h. Manajemen berpendapat tidak terdapat pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditetapkan Bank Indonesia.

i. Keikutsertaan Bank dalam pinjaman sindikasi dengan Bank lain atas kredit yang diberikan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp15.178.571.430 dan Rp15.446.316.415 untuk PT. Perusahaan Listrik Negara dan Rp8.692.107.870 dan Rp11.248.942.768 untuk PT. Semen Tonasa. Partisipasi Bank dalam pinjaman sindikasi tersebut masing-masing sebesar 1,56% dan 1,66%.

j. Keikutsertaan Bank dalam pinjaman sindikasi dengan Bank lain atas pembiayaan syariah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp35.699.192.866 dan Rp7.625.381.016 untuk PT Amanah Finance. Persentase keikutsertaan atas sindikasi tersebut adalah 26,74%.

k. Berdasarkan surat nomor SR/02/B/DPS-BSS/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 dan SR/003/B/DPS-BSS/I/2014 tanggal 3 Januari 2014, Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar memberikan pandangan bahwa laporan keuangan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar masing-masing 31 Desember 2014 dan 2013 telah memenuhi kaidah-kaidah syariah.

9. PENYERTAAN

Saldo penyertaan merupakan penyertaan saham oleh PT. Bank Sulselbar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 pada PT. Sarana Sulselbar Ventura sebesar Rp81.584.000 dengan persentase kepemilikan sebesar 1,05%.

Cadangan kerugian penurunan nilai untuk penyertaan saham tidak dibentuk selama periode pelaporan. Dalam metode perhitungan CKPN untuk periode 3 tahun terakhir, aset keuangan yang dimiliki tidak mengalami penurunan nilai.

10.ASET TETAP

Rincian harga perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap adalah sebagai berikut:

31 Desember 2014

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Tanah	26.400.681.615	445.580.000	-	-	26.846.261.615
Bangunan kantor	91.794.768.758	1.433.513.750	-	-	93.228.282.508
Bangunan rumah dinas	5.290.232.080	-	-	-	5.290.232.080
Kendaraan	15.318.320.475	-	-	-	15.318.320.475
Perabot kantor	106.326.870.102	15.117.396.976	2.650.807.504	-	118.793.459.574
Perabot rumah dinas	2.043.833.220	68.332.500	-	-	2.112.165.720
Aset Dalam Penyelesaian	17.716.128.938	4.597.134.559	-	-	22.313.263.497
Jumlah	**264.890.835.188**	**21.661.957.785**	**2.650.807.504**	**-**	**283.901.985.469**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan kantor	30.056.928.407	6.431.737.807	-	-	36.488.666.214
Bangunan rumah dinas	1.912.832.523	332.262.910	-	-	2.245.095.433
Kendaraan	14.179.960.443	822.017.045	-	-	15.001.977.488
Perabot kantor	93.463.287.905	11.236.228.909	(2.374.681.721)	-	102.324.835.093
Perabot rumah dinas	1.695.339.993	178.553.003	-	-	1.873.892.996
Jumlah	**141.308.349.271**	**19.000.799.674**	**(2.374.681.721)**	**-**	**157.934.467.224**
Nilai Buku	**123.582.485.917**				**125.967.518.245**

31 Desember 2013

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Tanah	25.088.681.615	1.312.000.000	-	-	26.400.681.615
Bangunan kantor	90.481.667.577	1.313.101.181	-	-	91.794.768.758
Bangunan rumah dinas	5.039.738.080	250.494.000	-	-	5.290.232.080
Kendaraan	15.271.430.475	46.890.000	-		15.318.320.475
Perabot kantor	101.525.206.860	4.801.663.242	-	-	106.326.870.102
Perabot rumah dinas	1.933.773.190	110.060.030	-	-	2.043.833.220
Aset Dalam Penyelesaian	630.919.500	17.085.209.438	-	-	17.716.128.938
Jumlah	**239.971.417.297**	**24.919.417.891**			**264.890.835.188**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan kantor	23.702.679.315	6.354.249.092	-	-	30.056.928.407
Bangunan rumah dinas	1.573.525.096	339.307.427	-	-	1.912.832.523
Kendaraan	13.813.753.507	366.206.936	-	-	14.179.960.443
Perabot kantor	87.045.328.767	6.417.959.138	-	-	93.463.287.905
Perabot rumah dinas	1.491.424.236	203.915.757	-	-	1.695.339.993
Jumlah	**127.626.710.921**	**13.681.638.350**	**-**	**-**	**141.308.349.271**
Nilai Buku	**112.344.706.376**				**123.582.485.917**

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp19.000.799.674dan Rp13.681.638.350.

Bangunan kantor, bangunan rumah dinas, kendaraan, perabot kantor dan perabot rumah dinas pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT. Asuransi Bangun Askrida dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp186.204.631.348dan Rp125.807.888.608 yang akan jatuh tempo dalam berbagai tanggal.

Manajemen berpendapat bahwa total nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

10.ASET TETAP (lanjutan)

Pada tahun 2014,telah dilakukan koreksi atas Jasa Konsultasi Peningkatan *Service Quality* yang sebelumnya masuk dalam kelompok perabot kantor. Atas aset tersebut masih terdapat nilai buku sebesar Rp276.125.783 dan dibebankan pada akun beban operasional lainnya pada tahun 2014.

Tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan oleh Bank untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Rincian aset dalam penyelesaian untuk tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	Nilai	% Penyelesaian	Estimasi Penyelesaian
Pembangunan/rehabilitasi gedung kantor cabang:			
Bulukumba	4.036.206.750	85,17%	Triwulan I 2015
Pasangkayu	4.011.775.000	80,92%	Triwulan I 2015
Makassar	19.624.000	81,77%	Triwulan IV 2015
Malili	5.660.000.000	95,00%	Triwulan I 2015
Pengadaan peralatan dan perabot kantor:	8.585.657.747	85,17%	Triwulan I 2015
Total	**22.313.263.497**		

Rincian aset dalam penyelesaian untuk tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

	Nilai	% Penyelesaian	Estimasi Penyelesaian
Pembangunan/rehabilitasi gedung kantor cabang:			
Bulukumba	1.080.924.750	22,81%	Triwulan III 2014
Pasangkayu	181.450.000	3,66%	Triwulan IV 2014
Makassar	519.071.300	8,64%	Triwulan IV 2014
Malili	3.141.150.000	63,97%	Triwulan IV 2014
Pengadaan peralatan dan perabot kantor:	12.793.532.888	90,00%	Triwulan I 2014
Total	**17.716.128.938**		

11.ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Bunga yang masih harus diterima:		
Bunga kredit	58.733.205.441	52.245.177.882
Bunga penempatan pada bank lain	73.305.556	310.248.613
Bunga surat berharga	428.750.000	3.082.529.250
Uang muka dan biaya dibayar di muka:		
Sewa	29.630.659.864	43.519.126.109
Uang Muka	613.340.422	146.681.899
Lain-lain:		
Agunan yang diambil alih	616.041.231	616.041.231
Persediaan barang cetakan	3.952.048.481	6.523.362.021
Lain-lain	3.989.993.115	5.776.931.502
Jumlah	**98.037.344.110**	**112.220.098.507**

Uang muka merupakan transaksi atas pembelian barang dan uang muka pembayaran sewa gedung Cabang Mamuju. Lain-lain terdiri dari Jaminan Bank pada PT. Rintis Sejahtera dan Bank Mandiri sebesar Rp2.069.098.177, Beban yang belum didistribusikan sebesar Rp71.091.700 dan lain-lain sebesar Rp1.849.803.238.

11.ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia yang terbit tanggal 16 Desember 2011, maka Bank tidak diwajibkan lagi membentuk penyisihan penghapusan aset non produktif dan transaksi rekening administratif yang diperhitungkan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2014 dan 2013. Namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

12.LIABILITAS SEGERA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Kiriman uang	30.538.849.697	33.498.185.314
Rekening titipan	34.663.989.897	52.817.967.126
Bunga yang masih harus dibayar	16.982.129.924	12.532.935.768
Liabilitas karena jatuh tempo	101.387.871	104.622.632
Liabilitas *Corporate Social Responsibility*	9.828.446.090	8.776.095.881
Kewajiban ATM Bersama	4.919.526.948	3.167.420.396
Kewajiban ATM Prima	445.099.566	-
Kewajiban Pihak Ketiga	47.462.337.160	16.726.313.892
Aplikasi E-Dapen	17.363.669.000	16.154.343.800
Rekening Penampungan	14.540.493.152	1.690.791.941
Lain-lain	933.027.012	522.208.331
Jumlah Liabilitas Segera	**177.778.956.317**	**145.990.885.081**

Tahun 2014 Bank mencadangkan dana CSR yang diambil dari 2,50% dari laba bersih tahun 2013. Untuk tahun 2013 dana CSR diambil dari 2,50% dari laba bersih pada 31 Desember 2012. Bank membebankan dana CSR ke dalam laporan laba rugi komprehensif.

Rekening titipan adalah rekening yang terdiri dari titipan kliring, titipan kasda dan titipan asuransi. Kewajiban pihak ketiga adalah rekening yang terdiri atas transaksi operasional berupa tagihan listrik, air, komunikasi, iuran asosiasi dan media masa dan keamanan. Rekening penampungan adalah rekening atas penampungan gaji dan penampungan bantuan siswa. Transaksi lain-lain pada liabilitas segera lainnya merupakan transaksi kewajiban lainnya kepada rekanan.

13.SIMPANAN NASABAH

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Pihak Berelasi:		
Konvensional		
Giro	127.612.326.369	56.681.912.099
Tabungan		
Simpeda	15.144.984.176	6.892.108.456
Tampan	40.266.514	371.813.735
Tapemda	-	157.719
Tapemda Pensiun	84.619.927	2.165.745
Tabungan-Ku	23.428.224	97.882.432
Tabungan Haji	2.864.704	22.675.989
Deposito Berjangka	820.000.000	1.315.000.000
Jumlah Pihak Berelasi – Konvensional	**143.728.489.914**	**65.383.716.175**

13.SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

	31 Desember	
	2014	**2013**
Pihak Berelasi:		
Syariah		
Tabungan		
Tabungan Syariah	504.164.903	754.347.405
Tabungan Haji Syariah	167.702.889	189.612.080
Tabungan Kemitraan Syariah	30.008	28.743
Deposito Berjangka Mudharabah	4.675.000.000	8.140.000.000
Jumlah Pihak Berelasi - Syariah	**5.346.897.800**	**9.083.988.228**
Jumlah Simpanan Nasabah – Pihak Berelasi	**149.075.387.714**	**74.467.704.403**
Pihak Ketiga:		
Konvensional		
Giro	2.491.391.250.868	2.296.948.153.572
Tabungan		
Simpeda	1.183.814.656.376	1.102.734.808.179
Tampan	75.693.587.687	70.502.885.532
Tapemda	193.846.370.951	166.298.289.648
Tapemda Pelajar dan Mahasiswa	529.170.652	63.251.529
Tapemda Sayang Petani	26.011.572.377	31.451.866.052
Tapemda Pensiunan	57.524.607.879	57.642.721.667
Tapemda Bantuan Siswa	92.132.610.000	233.418.802.000
Tabungan-Ku	49.851.427.241	27.583.733.397
Tabungan Haji	26.422.667.365	26.093.939.546
Deposito Berjangka	2.229.578.935.912	1.453.727.449.224
Jumlah Pihak Ketiga – Konvensional	**6.426.796.857.308**	**5.466.465.900.346**
Giro Wadiah	14.655.638.625	7.258.235.415
Tabungan		
Tabungan Syariah	55.069.483.001	52.565.325.279
Tabungan Haji Syariah	888.889.033	1.303.112.388
Tabungan BKMT Syariah	7.360.408	29.739.895
Tabungan Kemitraan Syariah	805.868.652	172.484.595
Deposito Mudharabah	278.537.721.304	254.047.255.703
Jumlah Pihak Ketiga - Syariah	**349.964.961.023**	**315.376.153.276**
Jumlah Simpanan Nasabah – Pihak Ketiga	**6.776.761.818.331**	**5.781.842.053.622**
Jumlah Simpanan Nasabah	**6.925.837.206.045**	**5.856.309.758.025**

Jumlah pihak-pihak berelasi dicatat kembali pada catatan no. 37

Rincian tabungan masa depan berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
1 tahun	6.657.014.587	6.729.048.726
2 tahun	23.681.731.898	21.844.536.234
3 tahun	8.262.855.930	16.103.903.487
4 tahun	5.454.785.058	3.824.888.458
5 tahun	31.677.466.728	22.372.322.362
Jumlah	**75.733.854.201**	**70.874.699.267**

13.SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

Rincian Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
1 bulan	500.958.192.975	379.820.815.701
3 bulan	695.668.137.500	208.420.387.500
6 bulan	400.509.421.304	631.769.555.704
12 bulan	916.475.905.437	497.218.946.023
Jumlah	**2.513.611.657.216**	**1.717.229.704.928**

Tabungan Masa Depan menurut periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Kurang dari 3 bulan	10.726.395.251	14.543.394.705
Lebih dari 3 bulan hingga 6 bulan	9.558.167.434	8.414.304.172
Lebih dari 6 bulan hingga 12 bulan	11.541.204.805	9.291.749.232
Lebih dari 12 bulan hingga 24 bulan	30.229.735.493	13.503.036.498
Lebih dari 24 bulan hingga 60 bulan	13.678.351.218	25.122.214.660
Jumlah	**75.733.854.201**	**70.874.699.267**

Deposito menurut periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Kurang dari 3 bulan	1.499.151.788.779	1.106.103.903.201
Lebih dari 3 bulan hingga 6 bulan	878.430.663.000	212.322.555.704
Lebih dari 6 bulan hingga 12 bulan	136.029.205.437	398.803.246.023
Jumlah	**2.513.611.657.216**	**1.717.229.704.928**

Tingkat suku bunga rata-rata simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Giro	1,70%	3,00%
Tabungan	0%-4,00%	0%-4,00%
Deposito berjangka	6,00%-7,80%	6,75%-7,00%

Terdapat giro dan tabungan nasabah yang diblokir dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Giro	5.668.153.417	609.197.632
Tabungan	417.137.303	70.358.968
Jumlah	**6.085.290.720**	**6.085.290.720**

14.SIMPANAN DARI BANK LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Giro	8.499.393.191	6.818.474.448
Interbank Call Money	460.000.000.000	515.000.000.000
Jumlah Simpanan Dari Bank Lain	**468.499.393.191**	**521.818.474.448**

Rincian atan Simpanan dari Bank Lain

	31 Desember	
	2014	**2013**
Giro Pemerintah		
PT Bank DKI	20.276.165	20.276.165
PT Bank BPD Bali	10.937.847	10.937.847
PT Bank Sulteng	76.624.398	76.624.398
PT Bank Banten Jawa Barat Tbk	5.275.016	4.629.117
PT Bank Papua	504.045.888	37.376.649
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.101.403	2.319.517
PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.355.189	1.289.141
PT Bank Tabungan Negara Tbk	3.514.971	3.480.139
PT Bank Mandiri Syariah	3.730.908	40.707.962
PT Bank Tabungan Pensiunan Negara	1.052.879	837.744
PT Bank Bukopin	1.090.356	1.510.281
Bank Pasar KMUP	15.262.963	15.124.967
Sub Jumlah Giro Pemerintah	**645.267.983**	**215.113.927**
Giro Swasta		
PT Bank Universal Tbk	-	748.735
PT Bank Mutiara Tbk	12.584.838	11.853.933
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	18.158.270	89.666.831
PT Bank Maspion Indonesia	2.500.965.536	102.320.030
PT Bank Panin Tbk	844.739	836.447
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	956.615	947.188
PT Bank Sinarmas TBk	814.993	806.961
PT Bank Muamalat Indonesia	4.111.366.014	4.806.100.193
PT Mega Tbk	1.004.438	994.546
PT Bank Central Asia Tbk	29.274.646	29.253.783
PT Bank Permata Tbk	755.560	-
PT BPR Hasa Mitra	173.204.095	790.672.058
PT BPR Galesong	1	1.633.113
PT BPR Dara Mandiri	9.725	67.267.817
PT BPR Tanadoang	999.404.068	693.009.380
PT BPR Bank Pembiayaan Syariah Investama Mega Bakti	1.200.815	1.428.618
PT BPR Niaga Madani	3.580.855	5.820.888
Sub Jumlah Giro Swasta	**7.854.125.208**	**6.603.360.521**
Jumlah Giro	**8.499.393.191**	**6.818.474.448**
Jumlah Simpanan Dari Bank Lain – Dipindahkan	**8.499.393.191**	**6.818.474.448**

14.SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

Rincian atan Simpanan dari Bank Lain (lanjutan)

	31 Desember	
	2014	**2013**
Jumlah Simpanan Dari Bank Lain – Pindahan	**8.499.393.191**	**6.818.474.448**
Interbank Call Money		
PT Bank Aceh	-	100.000.000.000
PT Bank Jatim	125.000.000.000	75.000.000.000
PT Bank Papua	125.000.000.000	75.000.000.000
PT Bank BPD Bali	-	60.000.000.000
PT Bank Kaltim	50.000.000.000	50.000.000.000
PT Bank BPD Maluku	-	25.000.000.000
BPD Riau	70.000.000.000	75.000.000.000
BPD NTT	-	55.000.000.000
BPD DIY	50.000.000.000	-
PT Bank Kalsel	40.000.000.000	-
Jumlah *Interbank Call Money*	**460.000.000.000**	**515.000.000.000**
Jumlah Simpanan Dari Bank Lain	**468.499.393.191**	**521.818.474.448**

	31 Desember	
	2014	**2013**
Giro	1%	3,00%
Interbank Call Money	6,00%-7,50%	6,80%-7,50%

15.SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011	350.000.000.000	400.000.000.000
Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011	100.000.000.000	100.000.000.000
Biaya emisi obligasi	(6.836.190.602)	(6.836.190.602)
Penerimaan penerbitan obligasi bersih	**443.163.809.398**	**493.163.809.398**
Amortisasi biaya obligasi	6.140.564.878	4.974.975.924
Jumlah Surat Berharga Yang Diterbitkan – bersih	**449.304.374.276**	**498.138.785.322**

Pada tanggal 29 April 2011, Bank telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK berdasarkan surat No. S-4750/BL/2011atas penerbitan Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 dan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011.

Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 (obligasi) ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dengan tingkat bunga tetap yang terdiri dari dua seri:

Seri A sebesar Rp50.000.000.000, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun berjangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi.

15.SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Seri B sebesar Rp350.000.000.000, dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,40% per tahun berjangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Bunga obligasi ini akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali, terhitung sejak tanggal emisi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 12 Agustus 2011 dan terakhir pada tanggal jatuh tempo yaitu 12 Mei 2014 untuk Seri A dan 12 Mei 2016 untuk Seri B.

Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011 (sukuk) ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah dana sukuk sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal emisi. Sukuk ini diterbitkan dengan nisbah pemegang sukuk sebesar 72,5%. Pendapatan bagi hasil sukuk ini akan dibayarkan setiap tiga bulan terhitung sejak tanggal emisi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 12 Agustus 2011 dan terakhir pada tanggal jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2016.

Perdagangan Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 dan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I tahun 2011 dilakukan secara imobilisasi (tanpa warkat) dengan memindahbukukan secara elektronik dan diadministrasikan dalam penitipan kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2012 dan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I tahun 2012 telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Peringkat Efek Indonesia (PEFINDO) masing-masing dengan peringkat id A dan id A (sy).

Dana yang diperoleh dari penawaran umum Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 dan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I tahun 2011 ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan bank untuk ekspansi kredit dan pembiayaan syariah.

Atas dana yang diperoleh dari penawaran umum Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 dan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I tahun 2011, Bank akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum ini kepada Bapepam-LK serta para pemegang obligasi dan sukuk melalui Wali amanat sampai seluruh dana hasil penawaran umum ini habis digunakan sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Bank bermaksud untuk merubah penggunaan dana hasil penawaran umum ini, sebagaimana dimaksud di atas, maka Bank harus melaporkan perubahan penggunaan dana tersebut terlebih dahulu kepada Bapepam-LK dengan menggunakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Pada tanggal 29 April 2014, Obligasi Seri A sebesar Rp. 50.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun telah jatuh tempo dan bank telah melunasi kewajibannya.

16.PINJAMAN YANG DITERIMA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Bank Indonesia		
Kredit Likuiditas Bank Indonesia	84.830.697	118.891.401
Pinjaman Pemerintah		
Pinjaman dari Pemerintah (PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk)	-	25.739.983
Pinjaman dari Pemerintah (Kementrian Keuangan)	100.000.000.000	100.000.000.000
Jumlah	**100.084.830.697**	**100.144.631.384**

Pinjaman dari Bank Indonesia merupakan pinjaman yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk dipinjamkan kembali kepada pengusaha kecil dan mikro, kredit mikro investasi dan kredit rumah sederhana.

Pinjaman dari Pemerintah (PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk) merupakan pinjaman yang sifatnya penerusan pinjaman Pemerintah melalui Bank Sulsel dalam rangka pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/ Rumah Sangat Sederhana (KPR-RS/RSS). Dalam perjanjian penerusan ini pemerintah telah menunjuk PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Bank Koordinator. Berdasarkan perjanjian penerusan No. 35/PKS/DIR/1997 tanggal 29 April 1997, Pelita VI tahun 4 dengan perjanjian No. 19/PKS/DIR/1998 tanggal 17 Maret 1998, jangka waktu 1 Juli 2001 s.d 1 Januari 2013 dan perubahan perjanjian yang terakhirPelita VI tahun 5 No. 11/PKS/DIR/1999 tanggal 30 April 1999 Bank wajib membayar pokok pinjaman dengan dua puluh empat angsuran per setengah tahunan secara prorata dimulai 12 September 2002 dan berakhir 12 Maret 2014 dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 3% per tahun atas jumlah dana pinjaman yang telah ditarik dan masih terutang dari waktu ke waktu. Atas pinjaman kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada telah dilakukan pelunasan pada tanggal 12 Maret 2014 berdasarkan surat tagihan No. 46/CMFD/BDS-PP/III2014 pada tanggal 7 Maret 2014 perihal Tagihan Kewajiban RDI Pelita VI Tahun 2015.

Pinjaman dari Pemerintah (Kementrian Keuangan) merupakan fasilitas pinjaman yang diperuntukkan bagi kredit usaha mikro dan kecil yang diterima oleh Bank dan dipinjamkan kepada nasabah-nasabah yang mempunyai persyaratan program fasilitas yang bersangkutan. Sifat pinjaman tersebut di atas adalah penerusan, dimana risiko kredit ditanggung oleh Bank. Berdasarkan perubahan perjanjian No. AMA-44/KP-040/DSMI/2009 tanggal 27 Januari 2009 Bank wajib membayar pokok pinjaman dengan lima kali angsuran per setengah tahunan secara prorata dimulai 10 Desember 2017 dan berakhir 10 Desember 2019.

17.PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	31 Desember	
	2014	**2013**
PPh Pasal 25	30.755.707.031	27.143.653.190
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka	**30.755.707.031**	**27.143.653.190**

Pemeriksaan tahun pajak 2007

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dari Direktorat Jenderal Pajak No. 00012/206/07/812/12 tanggal 2 Agustus 2012, menetapkan kekurangan pembayaran pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2007 sebesar Rp31.660.998.124. Pada tanggal 3 September 2012 dan 6 Desember 2012 bank telah melakukan setoran pajak atas SKPKB untuk pajak penghasilan badan tahun 2007 masing-masing sebesar Rp2.745.665.987 dan Rp3.000.000.000. Bank berpendapat bahwa perlakuan administrasi perpajakan yang diselenggarakan sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga saat ini Bank melakukan proses pengajuan keberatan atas SKPKB tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00085/207/07/812/12 tanggal 2 Agustus 2012, menetapkan kekurangan pembayaran pajak pertambahan nilai barang dan jasa untuk tahun pajak 2007 sebesar Rp3.500.962.434. Pada tanggal 3 September 2012 Bank telah melakukan setoran pajak atas SKPKB untuk setoran pajak pertambahan nilai barang dan jasa untuk tahun pajak 2007 sebesar Rp2.083.006.211. Bank berpendapat bahwa perlakuan administrasi perpajakan yang diselenggarakan sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga saat ini Bank melakukan proses pengajuan keberatan atas SKPKB tersebut.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dari Direktorat Jenderal Pajak yang dikirim ke masing-masing cabang Bank, menetapkan kekurangan pembayaran pajak penghasilan pasal 21, pasal 4 ayat 2 dan pasal 23 untuk tahun pajak 2007 masing-masing sebesar Rp873.223.818, Rp4.806.689.140 dan Rp338.914.895. Pada tanggal 3 September 2012 bank telah melakukan setoran pajak atas SKPKB untuk setoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan pasal 23 untuk tahun pajak 2007 masing-masing sebesar Rp1.670.969.822 dan Rp94.763.631.

Bank berpendapat bahwa perlakuan administrasi perpajakan yang diselengarakan sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga saat ini Bank melakukan proses pengajuan keberatan atas SKPKB tersebut.

Pada tahun 2013 Bank melakukan pembayaran kekurangan atas SKPKB PPh badan, SKPKB PPN dan SKPKB PPh 21, SKPKB pasal 4 ayat 2 dan SKPKB PPh 23 yang seluruhnya tahun pajak 2007 sebesar Rp28.345.910.005.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. 80097-812-90097-2013 tanggal 26 November 2013 dan No. 80092-812-0092-2013 tanggal 15 November 2013. Bank memperoleh restitusi pajak sebesar Rp10.676.924.001. Namun dari jumlah tersebut dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPh final tahun pajak 1994 sampai dengan tahun pajak 2013 sebesar Rp7.145.077.927 maka Bank menerima restitusi pajak sebesar Rp3.518.246.069.

Atas Surat Kementrian Keuangan RI tersebut diatas PT. Bank Sulselbar melakukan upaya banding melalui Surat No. SR/010/GPK/I/2014 dan No. SR/008/GPK/I/2014. Atas dasar upaya banding tersebut, maka uang muka pajak yang telah dibayarkan oleh PT. Bank Sulselbar tetap disajikan sebagai uang muka pajak sebesar Rp27.143.653.190.

17.PERPAJAKAN (lanjutan)

Pada tahun 2014 telah diterima restitusi pajak tahun 2007 sebesar Rp244.590.285 oleh cabang pinrang yang masing-masing terdiri dari restitusi PPh 21 dan bunga. Sehingga saldo pajak dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp26.898.702.905.

Pemeriksaan tahun pajak 2009

Pada tanggal 24 Januari 2014 telah terbit Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dari Direktorat Jenderal Pajak untuk Kantor Pusat dan Cabang Utama atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dengan rincian sebagai berikut yaitu SKPKB untuk Cabang Utama dengan No. 0004/201/09/812/14 atas PPh Pasal 21 sebesar Rp347.983.877 dan No. 0004/240/09/812/14 atas PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 17.426.748. Adapun SPKB untuk Kantor Pusat yaitu dengan No. 00003/201/09/812/14 atas PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.278.146.100, No. 0003/203/09/812/14 atas PPh Pasal 23 sebesar Rp429.844.975, No. 0003/206/09/812/14 atas PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp4.333.755.646, No. 0003/240/09/812/14 atas PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp6.071.130. Atas rincian tersebut jumlah kurang bayar pajak tahun 2009 adalah sebesar Rp6.413.228.476 yang telah dilakukan pembayaran setiap cabang pada tanggal 24 Februari 2014 dan telah dicatat pada laba rugi tahun berjalan di setiap cabang Bank. PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp4.333.755.646, Bank mencatat sebagai uang muka pajak atas keberatan yang diajukan.

b. Utang Pajak

	31 Desember	
	2014	**2013**
PPh Pasal 21	9.164.254.734	11.481.017.907
PPh Pasal 4 ayat 2	2.131.577.066	1.179.247.837
PPh Pasal 25	12.020.426.000	7.625.620.000
PPh Pasal 29	2.111.299.605	18.880.866.683
Jumlah Utang Pajak	**25.427.557.405**	**39.166.752.427**

c. Estimasi Beban Pajak Penghasilan

	31 Desember	
	2014	**2013**
Beban Pajak kini	138.318.272.000	122.200.515.500
Beban/(Manfaat) pajak tangguhan	1.141.020.101	(5.181.215.714)
Jumlah	**139.459.292.101**	**117.019.299.786**

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

17.PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak Bank untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Laba sebelum pajak penghasilan	**539.687.385.586**	**432.945.756.159**
Perbedaan Temporer		
Imbalan pasca kerja	15.683.165.273	15.526.758.279
Pembayaran imbalan pasca kerja	(9.824.201.361)	(7.934.588.054)
Beban bonus	-	8.161.984.094
Pembayaran bonus	(8.161.984.094)	-
Beban penghargaan direksi dan komisaris tahun berjalan	2.969.261.746	6.590.789.439
Pembayaran penghargaan direksi dan komisaris tahun lalu	(14.143.040.575)	(1.681.210.376)
Beban Tantiem dan jaspro tahun berjalan	70.040.916.360	55.287.129.865
Pembayaran Tantiem dan jaspro tahun lalu	(54.902.494.675)	(48.328.612.435)
Penyisihan aset produktif dan aset non produktif selain kredit dan pembiayaan syariah	250.000.000	1.450.000.000
CKPN Kredit	(6.976.088.071)	(9.012.669.341)
Jumlah Perbedaan Temporer	**(5.064.465.397)**	**20.059.581.471**

17.PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Estimasi Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

	31 Desember	
	2014	**2013**
Perbedaan Permanen		
Perawatan kesehatan	272.834.494	250.577.038
Pajak-pajak	8.165.015	7.342.968.010
Pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas	89.595.752	171.734.118
Pemeliharaan dan perbaikan perabot dan perlengkapan rumah dinas	491.841.766	71.171.718
Promosi	2.916.688.401	11.069.957.375
Penyusutan rumah dinas	178.553.018	339.307.427
Penyusutan perabot dan perlengkapan rumah dinas	1.165.588.954	203.915.757
Listrik dan air rumah dinas	572.529.532	330.564.046
Komunikasi kantor	242.257.310	182.249.081
Komunikasi rumah dinas	45.977.971	65.867.003
Olah raga dan seni	286.197.900	2.382.131.567
Bahan bakar	433.642.706	306.647.600
Perlengkapan rumah dinas	26.904.640	40.325.730
Alat-alat kebutuhan rumah dinas	41.806.074	41.883.950
Denda dan sanksi	111.336.007	1.564.413.906
Kerugian operasional	2.780.136.946	-
Sumbangan	4.122.903.885	1.904.919.366
Biaya non operasi	4.863.208.113	9.528.091.055
Jumlah Perbedaan Permanen	**18.650.168.484**	**35.796.724.747**
Jumlah Koreksi Fiskal	**13.585.703.087**	**55.856.306.218**
Laba Kena Pajak	553.273.088.673	488.802.062.377
Laba Kena Pajak – dibulatkan	**553.273.088.000**	**488.802.062.000**
Perhitungan Pajak Penghasilan Kini:		
25% x Rp553.273.088.000	138.318.272.000	-
25% x Rp488.802.062.000	-	122.200.515.500
PPh Terhutang	**138.318.272.000**	**122.200.515.500**
Kredit Pajak Penghasilan:		
Uang Muka PPh pasal 25	136.206.972.395	103.319.648.817
Jumlah Kredit Pajak Penghasilan	**136.206.972.395**	**103.319.648.817**
Kurang Bayar Pajak Penghasilan	**2.111.299.605**	**18.880.866.683**

Perhitungan perpajakan untuk tahun 2014 telah sesuai dengan SPT yang disampaikan kekantor pajak, sedangkan untuk pengisian SPT tahun 2014 Bank akan menggunakan hasil laporan audit sebagai dasar perhitungan perpajakan.

17.PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rekonsiliasi antara angka Laba Sebelum Pajak Penghasilan dengan angka Beban Pajak Penghasilan:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Laba sebelum pajak penghasilan	**539.687.385.586**	**432.945.756.159**
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	134.921.846.396	108.236.439.040
Pengaruh pajak atas beda tetap pada tarif pajak yang berlaku	4.662.542.121	8.949.181.187
Pengaruh pajak atas beda temporer pada tarif pajak yang berlaku	(1.266.116.349)	5.014.895.368
Aset Pajak Tangguhan	1.141.020.101	(5.181.215.714)
Dibulatkan	(168)	(95)
Beban pajak – bersih	**139.459.292.101**	**117.019.299.786**

e. Aset pajak tangguhan

2014			
	1 Januari	**Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan**	**31 Desember**
Imbalan pasca kerja	11.170.274.657	1.464.740.979	12.635.015.636
Akru Penghargaan Direksi dan Komisaris 2014	-	2.251.520.220	2.251.520.220
Akru Penghargaan Direksi dan Komisaris 2013	7.085.460.952	(7.085.460.952)	-
Akru Tantiem dan Jasa Produksi 2014	-	17.817.780.097	17.817.780.097
Akru Tantiem dan Jasa Produksi 2013	14.033.174.676	(14.033.174.676)	-
PPAP selain kredit	362.500.000	187.500.000	550.000.000
CKPN	(13.457.796.841)	(1.743.925.769)	(15.201.722.610)
Aset/(Liabilitas) Pajak Tangguhan	**19.193.613.444**	**(1.141.020.101)**	**18.052.593.343**

2013			
	1 Januari	**Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan**	**31 Desember**
Imbalan pasca kerja	9.272.232.101	1.898.042.556	11.170.274.657
Akru Penghargaan Direksi dan Komisaris 2013	-	7.085.460.952	7.085.460.952
Akru Penghargaan Direksi dan Komisaris 2012	3.817.570.163	(3.817.570.163)	-
Akru Tantiem dan Jasa Produksi 2013	-	14.033.174.676	14.033.174.676
Akru Tantiem dan Jasa Produksi 2012	12.293.795.318	(12.293.795.318)	-
PPAP selain kredit	175.000.000	187.500.000	362.500.000
CKPN	(11.546.199.852)	(1.911.596.989)	(13.457.796.841)
Aset/(Liabilitas) Pajak Tangguhan	**14.012.397.730**	**5.181.215.714**	**19.193.613.444**

18.LIABILITAS LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Setoran jaminan	4.370.957.283	11.590.087.834
Pendapatan yang ditangguhkan	331.108.190	3.162.271.131
Tantiem dan jasa produksi	71.271.120.389	56.132.698.703
Cad. Bonus dan Penghargaan	9.006.080.883	28.341.843.806
Lain-lain	994.053.803	811.332.053
Jumlah	**85.973.320.548**	**100.038.233.527**

Liabilitas segera lainnya dengan rincian lain-lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri atas transaksi titipan kepada pihak ketiga.

19.IMBALAN PASCA KERJA

Bank membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti dengan mengacu pada PSAK 24 dan Keputusan Direksi Bank. Penilaian aktuaria atas liabilitas imbalan pasti dan imbalan pensiun pada tanggal 31 Desember 2014dan 2013 dihitung oleh aktuaria PT. Dian Artha Tama dengan laporannya masing-masing tanggal 18 Februari 2015 dan 7 Februari 2014. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah 905 dan 876 orang. Data per 31 Desember 2014 dan 2013 tersebut adalah sesuai dengan laporan aktuaris yang terbagi dalam tiga program yaitu sebagai berikut:

a. Program Penghargaan Masa Kerja

Berdasarkan laporan aktuaris No. 221-A/PSAK/DAT/II/2015 untuk perhitungan Penghargaan Masa Kerja, beban (pendapatan) imbalan pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Biaya jasa kini	11.529.236.265	10.524.011.079
Biaya bunga	1.940.112.514	1.093.054.457
(Laba)/Rugi Aktuaria	(4.417.628.288)	(2.561.452.609)
Jumlah	**9.051.720.491**	**9.055.612.927**

Status liabilitas imbalan pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Nilai kini liabilitas	31.876.573.598	27.273.187.216
Kerugian aktuaria yang belum diakui	-	-
Jumlah	**31.876.573.598**	**27.273.187.216**

19.IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Saldo awal tahun	27.273.187.216	24.779.864.628
Penyesuaian saldo awal	-	-
Pembayaran manfaat	(4.448.334.109)	(6.562.290.339)
Beban tahun berjalan	9.051.720.491	9.055.612.927
Jumlah	**31.876.573.598**	**27.273.187.216**

b. Program Penghargaan Pada Usia Pensiun

Berdasarkan laporan aktuaris No. 221-B/PSAK/DAT/II/2015 untuk perhitungan Penghargaan Pada Usia Pensiun, beban (pendapatan)imbalan pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Biaya jasa kini	1.330.916.402	1.480.192.346
Biaya bunga	920.300.000	1.153.316.704
(Laba)/Rugi Aktuaria	2.897.343.116	2.971.639.036
Jumlah	**5.148.559.518**	**5.605.148.086**

Status liabilitas imbalan pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Nilai kini liabilitas	16.001.471.482	16.228.779.215
Kerugian aktuaria yang belum diakui	-	-
Jumlah	**16.001.471.482**	**16.228.779.215**

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Saldo awal tahun	16.228.779.215	11.995.928.844
Pembayaran manfaat	(5.375.867.251)	(1.372.297.715)
Beban tahun berjalan	5.148.559.518	5.605.148.086
Jumlah	**16.001.471.482**	**16.228.779.215**

19.IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

c. Program Dana Pensiun

Berdasarkan laporan aktuaris No. 221-C/PSAK/DAT/II/2015 untuk perhitungan Dana Pensiun, beban (pendapatan) program imbalan kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Biaya jasa kini	772.392.312	688.851.214
Biaya bunga	452.389.216	96.092.945
(Laba)/Rugi Aktuaria	258.103.736	81.053.107
Jumlah	**1.482.885.264**	**865.997.266**

Status liabilitas program imbalan pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

	31 Desember	
	2014	**2013**
Nilai kini liabilitas	6.068.600.347	5.322.226.067
Kerugian aktuaria yang belum diakui	(3.406.582.885)	(4.143.093.869)
Jumlah	**2.662.017.462**	**1.179.132.198**

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Saldo awal tahun	1.179.132.198	313.134.932
Beban tahun berjalan	1.482.885.264	865.997.266
Jumlah	**2.662.017.462**	**1.179.132.198**

19.IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Secara keseluruhan atasprogram imbalan pasca kerja tersebut maka dapat diikhitisarkan sebagai berikut:

Beban (pendapatan)imbalan pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

	31 Desember	
	2014	**2013**
Biaya jasa kini	13.632.544.979	12.693.054.639
Biaya bunga	3.312.801.730	2.342.464.106
(Laba)/Rugi Aktuaria	(1.262.181.436)	491.239.534
Jumlah	**15.683.165.273**	**15.526.758.279**

Imbalan pasca kerja yang termasuk dalam laporan posisi keuangan berdasarkan laporan aktuaria pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Nilai kini liabilitas	53.946.645.427	48.824.192.498
Kerugian aktuaria yang belum diakui	(3.406.582.885)	(4.143.093.869)
Jumlah	**50.540.062.542**	**44.681.098.629**

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Saldo awal tahun	44.681.098.629	37.088.928.404
Pembayaran manfaat	(9.824.201.360)	(7.934.588.054)
Beban tahun berjalan	15.683.165.273	15.526.758.279
Jumlah	**50.540.062.542**	**44.681.098.629**

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan biaya dan imbalan pasca kerja oleh PT. Dian Artha Tama, aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Mortalita	GAM-1971	GAM-1971
Tingkat cacat	0,01% per tahun	0,01% per tahun
Tingkat pensiun dipercepat	1% per tahun	1% per tahun
Tingkat pengunduran diri	0,75% per tahun	0,75% per tahun
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	7% per tahun	7% per tahun
Bunga teknis	8,0% per tahun	8,5% per tahun
Metode	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*

20. MODAL SAHAM

Modal PT. Bank Sulselbar untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Modal Dasar	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
Modal yang Belum Disetor	(1.393.967.000.000)	(1.431.067.000.000)
Modal Disetor	**606.033.000.000**	**568.933.000.000**
Tambahan Modal Disetor	55.136.400.000	11.600.942.699
Jumlah	**661.169.400.000**	**580.533.942.699**

Rincian para pemegang saham, jumlah saham dan nilai masing-masing saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sulselbar yang diaktakan melalui akta No. 12 tanggal 24 Juni 2014 oleh Rakhmawati Laica Marzuki, SH., Notaris di Makassardan disetujui dalam Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU-03877.40.21.2014 tanggal 8 Juli 2014, adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014		
Nama Pemegang Saham	**Jumlah Saham**	**Kepemilikan**	**Jumlah**
Propinsi Sulawesi Selatan	216.000	35,64%	216.000.000.000
Kabupaten Pangkep	23.524	3,88%	23.524.000.000
Kabupaten Selayar	24.330	4,01%	24.330.000.000
Kabupaten Pinrang	20.500	3,38%	20.500.000.000
Kabupaten Wajo	18.265	3,01%	18.265.000.000
Kota Makassar	17.000	2,81%	17.000.000.000
Kabupaten Takalar	18.440	3,04%	18.440.000.000
Kabupaten Barru	18.110	2,99%	18.110.000.000
Kabupaten Janeponto	12.501	2,06%	12.501.000.000
Kabupaten Bantaeng	13.017	2,15%	13.017.000.000
Kabupaten Sidrap	11.571	1,91%	11.571.000.000
Kabupaten Luwu Timur	45.000	7,43%	45.000.000.000
Kota Parepare	11.147	1,84%	11.147.000.000
Kabupaten Enrekang	8.510	1,40%	8.510.000.000
Kabupaten Luwu	11.172	1,84%	11.172.000.000
Kabupaten Soppeng	20.000	3,30%	20.000.000.000
Kabupaten Sinjai	10.845	1,79%	10.845.000.000
Kabupaten Bone	7.106	1,17%	7.106.000.000
Kabupaten Maros	17.500	2,89%	17.500.000.000
Kota Palopo	10.000	1,65%	10.000.000.000
Kabupaten Luwu Utara	3.355	0,55%	3.355.000.000
Kabupaten Tana Toraja	10.086	1,66%	10.086.000.000
Kabupaten Gowa	4.054	0,67%	4.054.000.000
Kabupaten Bulukumba	5.214	0,86%	5.214.000.000
Kabupaten Toraja Utara	7.500	1,24%	7.500.000.000
Propinsi Sulawesi Barat	6.000	0,99%	6.000.000.000
Kabupaten Mamuju	8.540	1,41%	8.540.000.000
Kabupaten Polman	7.399	1,22%	7.399.000.000
Kabupaten Majene	6.800	1,12%	6.800.000.000
Kabupaten Mamasa	7.500	1,24%	7.500.000.000
Kabupaten Mamuju Utara	5.047	0,83%	5.047.000.000
Jumlah	**606.033**	**100%**	**606.033.000.000**

20.MODAL SAHAM (lanjutan)

Rincian para pemegang saham, jumlah saham dan nilai masing-masing saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sulselbar yang diaktakan melalui akta No. 74 tanggal 25 Juni 2013 oleh Rakhmawati Laica Marzuki, SH., Notaris di Makassardan disetujui dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-40408.A.H01.02.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013, adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013		
Nama Pemegang Saham	**Jumlah Saham**	**Kepemilikan**	**Jumlah**
Propinsi Sulawesi Selatan	216.000	37,97%	216.000.000.000
Kabupaten Pangkep	23.524	4,13%	23.524.000.000
Kabupaten Selayar	21.830	3,84%	21.830.000.000
Kabupaten Pinrang	19.500	3,43%	19.500.000.000
Kabupaten Wajo	18.265	3,21%	18.265.000.000
Kota Makassar	17.000	2,99%	17.000.000.000
Kabupaten Takalar	18.440	3,24%	18.440.000.000
Kabupaten Barru	16.110	2,83%	16.110.000.000
Kabupaten Janeponto	12.501	2,20%	12.501.000.000
Kabupaten Bantaeng	13.017	2,29%	13.017.000.000
Kabupaten Sidrap	11.571	2,03%	11.571.000.000
Kabupaten Luwu Timur	35.000	6,15%	35.000.000.000
Kota Parepare	9.647	1,70%	9.647.000.000
Kabupaten Enrekang	8.510	1,50%	8.510.000.000
Kabupaten Luwu	10.172	1,79%	10.172.000.000
Kabupaten Soppeng	20.000	3,52%	20.000.000.000
Kabupaten Sinjai	8.745	1,54%	8.745.000.000
Kabupaten Bone	7.106	1,25%	7.106.000.000
Kabupaten Maros	12.500	2,20%	12.500.000.000
Kota Palopo	8.000	1,41%	8.000.000.000
Kabupaten Luwu Utara	3.355	0,59%	3.355.000.000
Kabupaten Tana Toraja	5.586	0,98%	5.586.000.000
Kabupaten Gowa	4.054	0,71%	4.054.000.000
Kabupaten Bulukumba	3.214	0,56%	3.214.000.000
Kabupaten Toraja Utara	6.000	1,05%	6.000.000.000
Propinsi Sulawesi Barat	4.000	0,70%	4.000.000.000
Kabupaten Mamuju	8.540	1,50%	8.540.000.000
Kabupaten Polman	7.399	1,30%	7.399.000.000
Kabupaten Majene	6.800	1,20%	6.800.000.000
Kabupaten Mamasa	7.500	1,32%	7.500.000.000
Kabupaten Mamuju Utara	5.047	0,89%	5.047.000.000
Jumlah	**568.933**	**100%**	**568.933.000.000**

21.TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tahun 2014 Pemegang saham menyetujui setoran modal sebesar Rp80.635.457.301, yang menjadi modal disetor sebesar Rp37.100.000.000 sedangkan sisanya sebesar Rp55.136.400.000 belum disetujui.

22. SALDO LABA

Rincian saldo laba yang ditahan adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Belum ditentukan penggunaannya		
Penyajian kembali aset pajak tangguhan	-	4.540.370.343
Laba bersih tahun berjalan	400.228.093.485	315.926.456.373
Jumlah belum ditentukan penggunaannya	**400.228.093.485**	**320.466.826.716**
Telah ditentukan penggunaannya		
Cadangan tujuan	289.975.519.525	226.790.228.250
Cadangan umum	368.521.076.407	300.795.414.788
Jumlah telah ditentukan penggunaannya	**658.496.595.932**	**527.585.643.038**
Jumlah Saldo Laba	**1.058.724.689.417**	**848.052.469.754**

Pada tahun 2014 pembagian tantiem dan jaspro masing-masing sebesar 5,00% dan 12,50% dari laba bersih tahun 2013 berdasarkan RUPS No. 23 tanggal 30 Mei 2011. Berdasarkan akta RUPS No. 12 tanggal 24 Juni 2014 perihal modal sumbangan Bank Indonesia Rp243.905.400 dan penyajian kembali atas aset pajak tangguhan sebesar Rp4.296.464.944, Bank mencatat sebagai penambah Cadangan Umum.

23. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Kredit yang diberikan	1.184.480.266.103	1.066.408.462.681
Penempatan pada Bank Indonesia	4.893.546.425	7.803.258.658
Penempatan pada bank lain	134.859.442.281	91.134.169.526
Surat berharga	24.949.548.300	11.118.117.302
Syariah:		
Margin murabahah dan mudharabah	70.809.956.342	62.034.787.525
Bagi hasil Deposito	13.479.053.313	6.692.963.115
Qardh gadai	834.279.428	833.215.549
Jumlah	**1.434.306.092.192**	**1.246.024.974.356**

Total pendapatan bunga kepada pihak-pihak berelasi dirinci kembali pada catatan no. 37.

Total jumlah amortisasi pendapatan dan biaya transaksi yang diakui sebagai penambah/pengurang pendapatan bunga untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp13.016.367.547 dan (Rp758.934.791).

24. BEBAN BUNGA DAN BAGI HASIL SYARIAH

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Pinjaman yang diterima	7.367.160.475	10.155.605.847
Giro	106.340.119.948	91.464.120.562
Deposito	202.263.971.399	116.315.976.673
Tabungan	30.443.014.309	27.245.554.522
Bagi hasil syariah	-	22.024.522.181
Surat berharga yang diterbitkan	48.610.549.152	51.592.780.747
Lainnya	17.655.039.170	15.120.105.892
Jumlah	**412.679.854.453**	**333.918.666.424**

Lainnya pada beban bunga dan bagi hasil syariah merupakan asuransi kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Total pendapatan bunga kepada pihak-pihak berelasi dirinci kembali pada catatan no. 37.

25. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	13.821.685.183	14.984.415.495
Administrasi	38.091.266.696	36.740.049.837
Lain-lain	7.322.366.605	5.267.194.716
Jumlah	**59.235.318.484**	**56.991.660.048**

Total pendapatan operasional lainnya kepada pihak-pihak berelasi dirinci kembali pada catatan no. 37. Pendapatan administrasi merupakan pendapatan yang diterima oleh Bank atas administrasi rekening untuk tabungan, giro dan deposito. Pendapatan lain-lain sebagian besar terdiri dari penerimaan terkait risiko operasional, setoran pokok debitur yang telah dihapusbuku dan lain-lain.

26. BEBAN PERSONALIA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Gaji dan upah	128.832.855.235	126.161.030.848
Tunjangan	84.906.936.620	85.160.958.670
Imbalan pasca kerja	15.683.165.273	15.526.758.279
Tantiem dan jasa produksi	70.039.916.360	55.287.129.865
Honorarium	26.528.646.777	18.473.370.053
Pendidikan dan pelatihan	11.016.587.395	11.746.231.924
Jumlah	**337.008.107.660**	**312.355.479.639**

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Beban barang dan jasa	7.185.669.802	8.612.086.425
Beban penyusutan	19.000.799.674	13.681.638.350
Beban amortisasi obligasi	1.165.588.954	1.632.569.159
Beban perjalanan dinas	19.592.715.337	20.500.402.549
Beban pemeliharaan dan perbaikan	5.582.883.967	6.404.879.246
Beban listrik, air dan telekomunikasi	13.646.179.870	11.690.783.205
Beban bank	9.283.866.146	6.450.047.714
Beban sewa	27.757.441.565	22.828.698.591
Beban promosi	10.813.486.224	11.879.027.875
Beban perlengkapan	1.471.363.838	2.539.608.068
Beban pajak lain	1.072.142.852	8.564.001.032
Beban penagihan	468.649.797	736.646.536
Beban asuransi	39.063.309.909	65.623.562.273
Beban lain-lain	34.965.599.202	30.402.632.501
Jumlah	**191.069.697.137**	**211.546.583.524**

Beban lain-lain pada beban umum dan administrasi sebagian besar merupakan beban rutin, CSR, jasa TI, iuran asosiasi dan media masa, bahan bakar, kerugian terkait risiko operasional dan lain-lain.

28. PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN DAN NON KEUANGAN-BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai:		
Kredit yang diberikan	87.707.224.017	83.433.375.162
Pembiayaan syariah	833.621.913	3.869.785.041
Penempatan pada bank lain	300.000.000	1.450.000.000
Sub Jumlah Pembentukan	**88.840.845.930**	**88.753.160.203**
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai:		
Kredit yang diberikan	(83.794.451.884)	(87.450.225.520)
Pembiayaan syariah	(553.068.405)	(390.296.601)
Penempatan pada bank lain	(50.000.000)	-
Sub Jumlah Pemulihan	**(84.397.520.289)**	**(87.840.522.121)**
Jumlah	**4.443.325.641**	**912.638.082**

29. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Pendapatan non operasional		
Pendapatan deviden	4.482.633	5.378.782
Lain-lain	440.577.367	1.681.096.777
Jumlah Pendapatan Non Operasional	**445.060.000**	**1.686.475.559**
Beban non operasional		
Denda	(111.336.007)	(1.564.413.906)
Sumbangan	(4.122.903.885)	(1.904.919.366)
Lain-lain	(4.863.860.307)	(9.554.652.863)
Jumlah Beban Non Operasional	**(8.207.980.199)**	**(13.023.986.135)**
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	**(8.653.040.199)**	**(11.337.510.576)**

Pendapatan non operasional untuk pos lain-lain merupakan pendapatan diterima Bank, diantaranya dari denda atas pencairan deposito yang belum jatuh tempo dan selisih lebih kas teller.

Biaya non operasional untuk pos lain-lain merupakan biaya Bank antara lain biaya tamu, biaya snack karyawan, biaya rekreasi, biaya ulang tahun Bank dan biaya penghargaan/prestasi.

30. LABA PER SAHAM DASAR

Laba operasional dan laba bersih

Laba operasional dan laba bersih untuk tujuan penghitungan laba per saham (pembilang) adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Laba operasional	539.687.385.586	432.945.756.159
Laba bersih	400.228.093.485	315.926.456.373

Jumlah saham

Perubahan nilai saham bonus dan deviden saham merupakan penambahan jumlah saham tanpa disertai perubahan sumber daya. Oleh karena itu, untuk tujuan penghitungan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar, perubahan nilai nominal saham bonus dan deviden saham dianggap sudah terjadi pada awal periode laporan keuangan terawal disajikan.

Jumlah saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham beredar (penyebut) untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar 588.245 dan 568.933.

Laba per saham dasar

Laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Laba operasional per saham	917.453	760.978
Laba bersih per saham	680.376	555.296

31.DANA PENSIUN

Penyelenggaraan dana pensiun Bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/PD-BPDSS/2001 tanggal 30 November 2001 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-172/KM.6/2002 tanggal 29 Juli 2002. Jenis program adalah program pensiun manfaat pasti pesertanya seluruh karyawan Bank yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi dengan status pegawai tetap, dengan metode penghitungan *"Attained Age Normal Cost Method"* yang ditentukan berdasarkan Valuasi Aktuaria pada tanggal 1 Oktober 2014 dengan No. 001/LA/DAT/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 dan tanggal 1 Agustus 2013 dengan No. 068/LA/DAT/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Mortalita	GAM 1971	GAM 1971
Tingkat cacat	0,01% per tahun	0,01% per tahun
Tingkat pensiun dipercepat	0,50% per tahun	0,50% per tahun
Tingkat pengunduran diri	1,00% per tahun	1% per tahun
Kenaikan penghasilan dasar pensiun	7% per tahun	7% per tahun
Bunga teknis	7,5% per tahun	7,5% per tahun

	31 Desember	
	2014	**2013**
Jumlah peserta aktif	820	878
Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)/bulan	4.669.864.899	4.156.429.326
Jumlah peserta pasif		
- Penerima pensiun/bulan	192	160
Jumlah Rupiah	771.373.598	624.767.610
- Pensiun ditunda/bulan	23	20
Jumlah Rupiah	73.452.652	59.512.589
Kekayaan dana pensiun	266.986.326.830	215.805.721.873
Kewajiban aktuaria	(271.283.018.691)	(265.921.875.487)
Selisih lebih (kurang) kekayaan dana pensiun atas kewajiban aktuaria	**(4.296.691.861)**	**(50.116.153.614)**

32. ASET DAN LIABILITAS MENURUT KELOMPOK JATUH TEMPONYA BERDASARKAN SISA PERIODE

31 Desember 2014	Sampai dengan 1 Bulan	1-3 Bulan	3-6 Bulan	6-12 Bulan	1-2 Tahun	2-5 Tahun	Lebih dari 5 Tahun	Tidak Memiliki Jatuh Tempo	Jumlah
Aset									
Kas	505.985.874.325	-	-	-	-	-	-	-	505.985.874.325
Giro pada Bank Indonesia	707.682.530.771	-	-	-	-	-	-	-	707.682.530.771
Giro pada bank lain	1.327.697.897	-	-	-	-	-	-	-	1.327.697.897
Penempatan pada bank lain	597.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	597.000.000.000
Surat-surat berharga	84.833.059.602	176.685.294.891	143.996.107.284	52.937.343.935	10.000.000.000	2.000.000.000	-	-	470.451.805.712
Kredit yang diberikan	36.405.878.114	24.625.884.696	41.484.987.055	91.150.826.626	183.625.980.789	1.352.077.273.119	5.794.393.894.339	-	7.523.764.724.738
Penyertaan	-	-	-	-	-	-	-	81.584.000	81.584.000
Aset tetap	-	-	-	-	-	-	-	125.967.518.245	125.967.518.245
Aset pajak tangguhan	-	-	-	-	-	-	-	18.052.593.343	18.052.593.343
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	128.793.051.141	128.793.051.141
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	-	(75.767.589.734)	(75.767.589.734)
Jumlah Aset	**1.933.235.040.709**	**201.311.179.587**	**185.481.094.339**	**144.088.170.561**	**193.625.980.789**	**1.354.077.273.119**	**5.794.393.894.339**	**197.127.156.995**	**10.003.339.790.438**
Liabilitas									
Liabilitas segera	177.778.956.317	-	-	-	-	-	-	-	177.778.956.317
Simpanan nasabah	5.418.797.794.011	427.572.084.673	887.988.830.434	147.570.410.242	30.229.735.493	13.678.351.192	-	-	6.925.837.206.045
Simpanan dari bank lain	468.499.393.191	-	-	-	-	-	-	-	468.499.393.191
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	449.304.374.276	-	-	-	449.304.374.276
Pinjaman yang diterima	84.830.697	-	-	-		100.000.000.000	-	-	100.084.830.697
Utang pajak	25.427.557.405	-	-	-	-	-	-	-	25.427.557.405
Imbalan pasca kerja	-	-	-	-	-	-	-	50.540.062.542	50.540.062.542
Liabilitas lain-lain	85.973.320.548	-	-	-	-	-	-	-	85.973.320.548
Jumlah Liabilitas	**6.176.561.852.169**	**427.572.084.673**	**887.988.830.434**	**147.570.410.242**	**479.534.109.769**	**113.678.351.192**	**-**	**50.540.062.542**	**8.283.445.701.021**
Perbedaan	**(4.243.326.811.460)**	**(226.260.905.086)**	**(702.507.736.095)**	**(3.482.239.681)**	**(285.908.128.980)**	**1.240.398.921.927**	**5.794.393.894.339**	**146.587.094.453**	**1.719.894.089.417**

32. ASET DAN LIABILITAS MENURUT KELOMPOK JATUH TEMPONYA BERDASARKAN SISA PERIODE (lanjutan)

31 Desember 2013	Sampai dengan 1 Bulan	1-3 Bulan	3-6 Bulan	6-12 Bulan	1-2 Tahun	2-5 Tahun	Lebih dari 5 Tahun	Tidak Memiliki Jatuh Tempo	Jumlah
Aset									
Kas	346.988.111.100	-	-	-	-	-	-	-	346.988.111.100
Giro pada Bank Indonesia	644.901.221.714	-	-	-	-	-	-	-	644.901.221.714
Giro pada bank lain	1.877.992.946	-	-	-	-	-	-	-	1.877.992.946
Penempatan pada bank lain	552.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	552.000.000.000
Surat-surat berharga	170.808.981.474	89.306.697.580	34.323.493.596	28.687.045.600	2.000.000.000	10.000.000.000	-	-	335.126.218.250
Kredit yang diberikan	32.370.767.772	17.456.813.607	29.186.618.294	52.382.210.078	189.735.896.472	1.216.464.511.524	5.120.268.627.567	-	6.657.865.445.314
Penyertaan	-	-	-	-	-	-	-	81.584.000	81.584.000
Aset tetap	-	-	-	-	-	-	-	123.582.485.917	123.582.485.917
Aset pajak tangguhan	-	-	-	-	-	-	-	19.193.613.444	19.193.613.444
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	139.363.751.697	139.363.751.697
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	-	(86.105.393.086)	(86.105.393.086)
Jumlah Aset	**1.748.947.075.006**	**106.763.511.187**	**63.510.111.890**	**81.069.255.678**	**191.735.896.472**	**1.226.464.511.524**	**5.120.268.627.567**	**196.116.041.972**	**8.734.875.031.296**
Liabilitas									
Liabilitas segera	145.990.885.081	-	-	-	-	-	-	-	145.990.885.081
Simpanan nasabah	4.578.092.121.757	612.498.329.979	219.871.859.876	407.221.995.255	13.503.036.498	25.112.065.586	10.349.074		5.856.309.758.025
Simpanan dari bank lain	521.818.474.448	-	-	-	-	-	-	-	521.818.474.448
Surat berharga yang diterbitkan			50.000.000.000				448.138.785.322		498.138.785.322
Pinjaman yang diterima	-	8.579.994	-	8.579.994	127.471.396	-	100.000.000.000	-	100.144.631.384
Utang pajak	20.285.885.744	18.880.866.683	-	-	-	-	-	-	39.166.752.427
Imbalan pasca kerja	-	-	-	-	-	-	-	44.681.098.629	44.681.098.629
Liabilitas lain-lain	100.038.233.527	-	-	-	-	-	-	-	100.038.233.527
Jumlah Liabilitas	**5.366.225.600.557**	**631.387.776.656**	**269.871.859.876**	**407.230.575.249**	**13.630.507.894**	**25.112.065.586**	**548.149.134.396**	**44.681.098.629**	**7.306.288.618.843**
Perbedaan	**(3.617.278.525.551)**	**(524.624.265.469)**	**(206.361.747.985)**	**(326.161.319.571)**	**178.105.388.578**	**1.201.352.445.938**	**4.572.119.493.171**	**151.434.943.343**	**1.428.586.412.453**

33.IKATAN

1. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 004/PKS-BSSB/I/2014, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas akses transaksi rekening Pemerintah Propinsi Sulsel secara online pada Bank dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah dengan BPK dan Pemerintah propinsi Sulsel, syarat yang telah ditentukan.
2. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 005/PKS-BSSB/I/2014, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas Pekerjaan Pengembangan MPN Gen II antara Mantra Global Konsultan, syarat yang telah ditentukan.
3. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 022/PKS-BSSB/II/2014, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas program kredit usaha mikro ekonomi produktif dengan DAKAB, syarat yang telah ditentukan.
4. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 057/PKS-BSSB/III/2014, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas pengadaan active device selama 3 tahun dengan PT Aplikasi Lintasarta, syarat yang telah ditentukan.
5. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 060/PKS-BSSB/IV/2014, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas akses data transaksi rekening secara online dengan Pemprop Sulawesi Barat, syarat yang telah ditentukan.
6. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 093/PKS-BSSB/IV/2014, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas addendum I perjanjian kontra garansi bank dan garansi bank *back to back guarante* dengan PT ASKRIDA, syarat yang telah ditentukan.
7. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 145i/PKS-BSSB/VIII/2014, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas pekerjaan jasa rekrutmen dan seleksi calon pegawai Bank dengan PT Bina Utama PPM Management, syarat yang telah ditentukan.
8. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 162/PKS-BSSB/X/2014, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya dengan PLN, syarat yang telah ditentukan.
9. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 166/PKS-BSSB/X/2014, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas pemanfaatan induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik dalam pelayanan perbankan lingkup Bank dengan Direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementrian dalam negeri Republik Indonesia, syarat yang telah ditentukan.
10. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 346/PKS-BSSB/XI/2014, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas pengadaan hardware security modul dengan PT Sisnet Citra sejahtera, syarat yang telah ditentukan.
11. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 012/PKS-BSSB/I/2013, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas penerbitan dan pemasangan kartu kredit Co. Brand dengan PT. Bank Mandiri dengan syarat yang telah ditentukan.
12. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 014/PKS-BSSB/I/2013, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas Lisenci sofware dengan CV. Flash Komp dengan syarat yang telah ditentukan.
13. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 020/PKS-BSSB/I/2013, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas sewa 12 unit mesin ATM dengan PT. Titan Sarana Niaga dengan syarat yang telah ditentukan.
14. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 026/PKS-BSSB/II/2013, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas sewa Utilities Data Center dan DRC selama 5 tahun dengan CV. Bayu Adhi dengan syarat yang telah ditentukan.

33.IKATAN (lanjutan)

16. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 027/PKS-BSSB/II/2013, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas pekerjaan pengembangan aplikasi pemantauan APU dan PPT dengan PT. Mantra Global dengan syarat yang telah ditentukan.
17. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 047/PKS-BSSB/III/2013, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas pemeliharaan aplikasi VBS Syariah dengan PT. Mantra Global dengan syarat yang telah ditentukan.
18. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 073/PKS-BSSB/IV/2013, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atas pengembangan dan implementasi electronic data capture (EDC) dengan PT. Sarana Pactindo dengan syarat yang telah ditentukan.

34.ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi berasal dari:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	8.778.250.622	12.761.770.219
Garansi yang diterbitkan	108.295.592.260	146.152.067.147

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia yang terbit tanggal 16 Desember 2011, maka Bank tidak diwajibkan lagi membentuk penyisihan penghapusan aset non produktif dan transaksi rekening administratif yang diperhitungkan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2011. Namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Penyesuaian atas penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif yang telah dibentuk dan dibebankan dalam laporan laba rugi.

35. RASIO ASET PRODUKTIF TERHADAP JUMLAH ASET

Berikut rasio aset produktif terhadap total aset produktif:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Giro pada bank lain	0,02%	0,03%
Penempatan pada bank lain	7,00%	7,40%
Surat-surat berharga	5,54%	4,51%
Kredit yang diberikan, tidak termasuk penempatan *non performing*	87,44%	88,07%
Penyertaan	0,001%	0,001%
Jumlah	**100%**	**100%**

Rasio aset non produktif terhadap total aset produktif atas kredit non performing per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar dan 0,25% dan 0,35%.

36. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/23/DPNP/Tanggal 29 September 2003.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 mewajibkan bank-bank untuk menuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8%. Peraturan Bank Indonesia No. 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 mewajibkan bank-bank di Indonesia dengan kualifikasi tertentu untuk memperhitungkan risiko pasar dalam perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan wajib memenuhi risiko kewajiban penyediaan modal minimum sebasar 8%.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Modal inti		
Modal disetor	606.033.000.000	568.933.000.000
Cadangan tambahan modal	834.887.558.890	627.288.946.822
Modal pelengkap		
Cadangan umum 1,25% dari ATMR	74.842.364.245	67.282.210.558
Jumlah	**1.515.762.923.135**	**1.263.504.157.380**

36.RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (lanjutan)

	31 Desember	
	2014	**2013**
Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Kredit	4.410.848.882.089	3.985.097.497.996
Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Operasional	1.576.540.257.501	1.397.479.346.682
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang tersedia untuk risiko kredit	34,36%	31,71%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang tersedia untuk risiko kredit dan resiko operasional	25,32%	23,47%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan Bank Indonesia	8%	8%

37.SIFAT TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan dengan persyaratan dan kondisi yang normal dilakukan dengan pihak ketiga. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Kredit yang diberikan/Pembiayaan syariah :		
Pemegang saham	2.660.925.021	2.670.925.021
Karyawan kunci	254.623.410	1.212.374.903
Dikurangi penyisihan penghapusan	(2.071.414.476)	(2.336.498.158)
Jumlah	**844.133.955**	**1.546.801.766**
Persentase terhadap jumlah aset	0,008%	0,018%
Giro		
Giro pemegang saham	127.612.326.369	56.681.912.099
Jumlah	**127.612.326.369**	**56.681.912.099**
Persentase terhadap jumlah aset	1,54%	0,78%
Tabungan		
Karyawan kunci	15.968.061.345	8.330.792.304
Jumlah	**15.968.061.345**	**8.330.792.304**
Persentase terhadap jumlah aset	0,19%	0,11%
Deposito		
Pemegang saham		-
Karyawan kunci	5.495.000.000	9.455.000.000
Jumlah	**5.495.000.000**	**9.455.000.000**
Persentase terhadap jumlah aset	0,07%	0,13%

37.SIFAT TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pihak-pihak berelasi yang mempunyai saldo transaksi lebih dari Rp1.000.000.000 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Kredit yang diberikan		
Pemkab Gowa	2.660.925.021	2.670.925.021
Jumlah Kredit Yang Diberikan	**2.660.925.021**	**2.670.925.021**
Giro		
Kas Umum Daerah Kota Makassar	127.612.326.369	56.681.912.099
Jumlah Giro	**127.612.326.369**	**56.681.912.099**
Tabungan		
Karyawan Kunci	10.704.608.141	-
Jumlah Tabungan	**10.704.608.141**	**-**

	31 Desember	
	2014	**2013**
Pendapatan dan Beban bunga		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	360.342.440	111.530.302
Giro	16.589.327.616	14.658.189.914
Tabungan	212.374.817	355.830.067
Deposito	384.650.000	571.949.895
Jumlah Pendapatan dan Beban Bunga	**17.546.694.873**	**15.697.500.178**
Persentase terhadap beban bunga	4,25%	4,93%

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

No.	Pihak-pihak berelasi	Sifat Hubungan	Transaksi
1.	Karyawan kunci	Komisaris, Direksi, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Divisi	Rekening giro, tabungan dan deposito
2.	Propinsi Sulawesi Selatan	Pemegang saham	Rekening giro dan tabungan

38. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan kegiatannya, Bank senantiasa berhadapan dengan risiko yang merupakan risiko bawaan dalam setiap kegiatannya antara lain dalam bentuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional sehingga diperlukan pengelolaan Bank yang baik dan pengelolaan risiko yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Sistem pengendalian risiko di Bank mulai disesuaikan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan intern Bank, antara lain menyusun Pedoman Sistem Operasional Prosedur Manajemen risiko dan melakukan secara berkesinambungan sosialisasi kepada seluruh jajaran Bank agar manajemen risiko dapat terimplementasi secara terintegrasi ke dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif serta mampu menganalisa dan mengelola seluruh risiko yang terkait.

Penilaian profil risiko per 31 Desember 2014 secara keseluruhan dinilai *Moderate* denganperingkat kualitas adalah *fair*. Adapun ringkasan sesuai matriks profil risiko yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi	
		Tingkat Risiko	Peringkat Kualitas
1	Kredit	*Moderate*	*Fair*
2	Pasar	*Moderate*	*Fair*
3	Likuiditas	*Moderate*	*Fair*
4	Operasional	*Moderate to High*	*Marginal*
5	Hukum	*Low to Moderate*	*Fair*
6	Strategik	*Moderate*	*Marginal*
7	Kepatuhan	*Moderate to High*	*Fair*
8	Reputasi	*Low to Moderate*	*Fair*

1. Risiko Kredit

Dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum sebagaimana telah diubah sesuai PBI No. 11/25/PBI/2009, maka program kerja bank dalam manajemen risiko diarahkan dan dikembangkan sesuai dengan pedoman Bank Indonesia tersebut.

Dengan tetap mengacu kepada *Risk Management Framework*, Manajemen Risiko Kredit diuraikan sebagai berikut :

- Penyusunan / penyempurnaan Kebijakan dan SOP perkreditan yang terdokumentasi dengan baik yang disosialisasikan kepada seluruh unit kerja (termasuk penetapan rasio agunan dan penetapan standar proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit.
- Penetapan *Credit risk tolerance* berdasarkan *risk appetite* yang dituangkan dalam Rencana bisnis bank yang dievaluasi secara periodik, antara lain penetapan target *Non Performing Loan (NPL)* di atas standar Bank Indonesia, target kredit per segmen kredit, target *credit recovery*.
- Penetapan standar kualifikasi bagi pegawai yang terlibat dalam keputusan kredit dan monitoring kredit.
- Penggunaan Teknologi Informasi yang memudahkan proses *reporting* guna monitoring risiko kredit dan *early warning system*.
- Penerapan *risk based* audit untuk pengujian model manajemen risiko kredit oleh Audit Intern yang secara berkelanjutan dievaluasi oleh Komite Audit di level Dewan Komisaris.
- Rekomendasi penyempurnaan model Manajemen Risiko kredit oleh Komite Manajemen Risiko yang secara berkelanjutan dipantau oleh Komite Pemantau Risiko di level Dewan Komisaris

38.MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

1. Risiko Kredit (lanjutan)

Konsentrasi kredit Bank berdasarkan sektor ekonomi lihat catatan no. 8b.

Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan kredit lainnya. Eksposur risiko kredit terhadap aset laporan posisi keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2014	**2013**
Kas	505.985.874.325	346.988.111.100
Giro pada Bank Indonesia	707.682.530.771	644.901.221.714
Giro pada bank lain	1.327.697.897	1.877.992.946
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	597.000.000.000	552.000.000.000
Surat-surat berharga	470.451.805.712	335.126.218.250
Kredit yang diberikan/pembiayaan syariah	7.523.764.724.738	6.657.865.445.314
Penyertaan	81.584.000	81.584.000
Jumlah Kotor	**9.806.294.217.443**	**8.538.840.573.324**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(73.567.589.734)	(84.155.393.086)
Jumlah – Bersih	**9.732.726.627.709**	**8.454.685.180.238**

Bank juga telah mengembangkan sistem pemeringkatan risiko debitur yang lebih dikenal dengan Internal *Credit Risk Rating System*. Ke depan diharapkan agar pemberian peringkat kepada setiap debitur menjadi suatu masukan / landasan dalam membantu pejabat yang berwenang untuk memutuskan kelayakan kredit dengan lebih baik.

Dalam konteks manajemen risiko yang lebih luas, pengembangan Internal *Credit Risk Rating System* merupakan salah satu komponen utama dalam pengukuran risiko yang dikaitkan dengan ketentuan permodalan seperti yang disebutkan oleh *Basel II Accord*. Selain itu, hasil pengukuran risiko yang berbasis *rating* ini juga dapat menjadi sarana penetapan "*pricing*" yang lebih sesuai dengan tingkat risiko debitur (*risk-based pricing*) dan pengembangan portofolio perkreditan.

2. Risiko Tingkat Bunga/Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dari portofolio yang dimiliki bank, yang dapat merugikan bank (*adverse movement*). Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga.

Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank yang mengandung risiko suku bunga. Tingkat sensitivitas pendapatan bank terhadap perubahan suku bunga sangat bergantung kepada karakteristik instrumen keuangan yang membentuk portofolio bank, antara lain :

a. *maturity* - semakin panjang jangka waktu maturitas semakin sensitif terhadap perubahan suku bunga

b. *repricing scedule* - instrumen keuangan dengan tingkat bunga *floating*/mengambang lebih sensitif dibanding instrumen keuangan dengan tingkat bunga *fixed*/tetap.

38.MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

2. Risiko Tingkat Bunga/Risiko Pasar (lanjutan)

Tabel dibawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal *repricing* atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Keterangan	Nilai tercatat	Kurang dari 3 bulan	3-12 bulan	12-24 bulan	Lebih dari 24 bulan
Aset					
Giro pada Bank Indonesia	707.682.530.771	-	-	-	-
Giro pada bank lain	1.327.697.897	-	-	-	-
Penempatan pada bank lain	594.800.000.000	594.800.000.000	-	-	-
Surat-surat berharga	470.451.805.712	261.518.354.493	196.933.451.219	10.000.000.000	2.000.000.000
Kredit Yang Diberikan	7.523.764.724.738	61.029.762.810	132.635.813.681	183.625.980.789	7.146.473.167.458
Jumlah Aset	**9.298.026.759.118**	**917.348.117.303**	**329.569.264.900**	**193.625.980.789**	**7.148.473.167.458**
Liabilitas					
Simpanan Nasabah	6.925.837.206.045	5.846.369.442.684	1.035.559.240.676	30.229.735.493	13.678.351.192
Simpanan Dari Bank Lain	468.499.393.191	468.499.393.191	-	-	-
Pinjaman Yang DIterima	100.084.830.697	84.830.697	-	-	100.000.000.000
Jumlah Liabilitas	**7.494.421.429.933**	**6.314.953.666.572**	**1.035.559.240.676**	**30.229.735.493**	**113.678.351.192**
Jumlah	**16.792.448.189.050**	**7.232.301.783.875**	**1.365.128.505.576**	**223.855.716.282**	**7.262.151.518.649**

Analisis Sensitivitas

Pengelolaan risiko suku bunga dilengkapi dengan analisa sensitivitas secara periodik untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga yang signifikan. Analisis sensitivitas terhadap kenaikan atau penurunan suku bunga pasar, dengan asumsi perubahan suku bunga pasar, dengan asumsi perubahan yang simetris pada kurva imbal hasil, posisi laporan posisi keuangan yang konstan menggunakan asumsi perilaku, dengan dampak terhadap aset bersih yang mengandung komponen bunga sebagai berikut:

Sensitivitas terhadap risiko suku bunga	Kenaikan Bunga	Penurunan Bunga	Penurunan Bunga
Fluktuasi suku bunga 1%	(19.036.902.271)	-	19.036.902.271
Fluktuasi suku bunga 2%	(38.073.804.543)	-	38.073.804.543
Fluktuasi suku bunga 3%	(57.110.706.814)	-	57.110.706.814
Fluktuasi suku bunga 4%	(76.147.609.085)	-	76.147.609.085
Fluktuasi suku bunga 5%	(95.184.511.357)	-	95.184.511.357

3. Risiko Likuiditas

Bank sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional.

Bank menjaga likuiditas dengan mempertahankan jumlah aset likuid yang cukup untuk membayar simpanan para nasabah, dan menjaga agar jumlah aset yang jatuh tempo pada setiap periode dapat menutupi jumlah liabilitas yang jatuh tempo.

38.MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

3. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Aset likuid bank terutama terdiri dari penempatan pada bank-bank lain dan lembaga keuangan lainnya, giro pada Bank Indonesia dan kas. Apabila Bank memerlukan likuiditas, dengan segera Bank dapat menarik cadangan dana dalam giro pada Bank Indonesia atau mencari pinjaman di pasar uang antar bank di Indonesia. Cadangan utama Bank terdiri dari cadangan Giro Wajib Minimum dan kas di kantor-kantor cabang.

Saat ini Peraturan Bank Indonesia mewajibkan bank-bank di Indonesia untuk menjaga Giro Wajib Minimum secara harian, dalam bentuk simpanan tanpa bunga pada Bank Indonesia sekurang-kurangnya sebesar 8% dari liabilitas pihak ketiga bukan bank dalam Rupiah.

Pengendalian likuiditas senantiasa dilakukan dengan cara melakukan keseimbangan antara sumber-sumber dana dan pemanfaatannya, sehingga benar-benar masih dalam limit risiko yang dapat diterima dan memberikan kontribusi berupa profit yang wajar, yang pengelolaannya oleh Divisi Treasury dan tim Alco *(Asset Liability Comitee)*.

Langkah-langkah yang diambil oleh Bank sehubungan menjaga likuiditas yaitu meningkatkan pelayanan kepada nasabah simpanan serta menawarkan produk dan bunga yang menarik kepada nasabah untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas jumlah simpanan, mengintensifkan usaha penagihan kepada debitur bermasalah dan menempatkan kelebihan dana pada efek-efek yang dimiliki pasar sehingga dapat dicairkan setiap saat apabila bank membutuhkan.

Tabel analisis likuiditas (sisa jangka waktu jatuh tempo) dari aset dan liabilitas Bank (lihat catatan no. 32).

4. Risiko Operasional

Sebagai antisipasi terhadap risiko operasional, sejak tahun 2010 bank telah melakukan ujicoba untuk menghitung *Capital Charger* untuk risiko operasional berdasarkan metode *Basic Indicator Approach (BIA)* sebesar prosentase tertentu dari *Gross Income* perseroan. *Capital Charger* untuk risiko operasional ini akan berlaku efektif tahun 2011. Selain struktur organisisasi yang didesign berlandaskan prinsip *four eyes principles* guna memastikan adanya *dual control*, bank juga melakukan pemetaan terhadap *event* risiko operasional untuk kemudian melakukan penyempurnaan terhadap metode pengelolaan untuk mencegah berulangnya/memitigasi kejadian risiko operasional tersebut. Untuk meningkatkan *risk awareness*, perseroan mewajibkan seluruh pejabat bank memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko yang lebih tinggi dari ketentuan standar yang diwajibkan oleh Bank Indonesia.

5. Risiko Hukum

Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, perseroan telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan di Kantor Pusat yang memiliki 2 bagian yaitu Bagian Hukum & Kepatuhan dan Bagian Pengenalan Nasabah.

- Menginventarisir dan memastikan seluruh aktivitas Bank didukung oleh sistem dan prosedur pelaksanaan.
- Mengawasi, mengarahkan dan memastikan kebijakan, sistem dan prosedur bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik intern maupun ekstern.
- Mengevaluasi dan mengkaji perjanjian/kontrak antara bank dengan pihak lainnya dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi bank.
- Melakukan pembahasan, penilaian dan memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Direksi serta unit kerja lain mengenai masalah hukum yang dihadapi oleh bank.

38.MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

5. Risiko Hukum (lanjutan)

Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, perseroan telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan di Kantor Pusat yang memiliki 2 bagian yaitu Bagian Hukum & Kepatuhan dan Bagian Pengenalan Nasabah.

- Memantau pelaksanaan komitmen bank dengan Bank Indonesia guna memastikan komitmen tersebut telah dijalankan oleh bank.
- Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) pada Kantor Cabang.
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja kantor pusat dan kantor cabang terhadap ketentuan, peraturan dan perundang - undangan.

6. Risiko Strategik

Risiko inherent tergolong *moderate* dengan kategori sebagai berikut:
- Strategi bank relatif berisiko rendah dan strategi usaha ke depan diarahkan pada usaha yang sama
- Bank memiliki keunggulan kompetitif namun terdapat ancaman dari *competitor* cukup tinggi
- Realisasi Rencana Bisnis Bank secara umum tercapai dengan beberapa deviasi yang sifatnya minor

Kualitas penerapan manajemen risiko dengan kategori *fair* yaitu dengan uraian sebagai berikut:
- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko strategik kurang memadai dan proses pemantauan dan umpan balik yang kurang efektif
- Perlunya peningkatan dukungan sistem informasi manajemen

7. Risiko Kepatuhan

Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar atas nilai tukar valuta asing dan tingkat suku bunga, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

Untuk itu, Bank telah mengimplementasikan suatu Kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) terpadu, yang merupakan sarana untuk penentuan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur untuk memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Bank dapat dikenali, diukur, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

Dari sisi organisasi, bank telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite Pemantau Risiko, Komite TSI dan Komite Kredit untuk mengoptimalkan fungsi manajemen risiko bank. Selain hal tersebut, struktur organisasi perseroan didesign berlandaskan prinsip *four eyes principles*.

8. Risiko Reputasi

Risiko inheren tergolong *moderate* dengan kategori sebagai berikut:
- Tidak terdapat pengaruh reputasi negative dari pemilik bank
- Tidak terdapat potensi pelanggaran etika bisnis dari *stakeholder*
- Frekuensi penyampaian keluhan *moderate*
- Transparansi kondisi keuangan memenuhi ekspektasi minimum

Kualitas penerapan manajemen risiko dengan kategori *fair* yaitu dengan uraian sebagai berikut:
- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko reputasi perlu penyempurnaan
- Struktur dan pengelolaan risiko reputasi membutuhkan tindakan perbaikan
- Sistem informasi manajemen belum optimal

39.SEGMENTASI USAHA

Segmentasi usaha Bank menurut geografis untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2014			
	Wilayah Sulawesi Selatan	Wilayah Sulawesi Barat	Jakarta	Jumlah
Aset				
Kas	411.556.539.925	93.572.191.400	857.143.000	505.985.874.325
Giro pada Bank Indonesia	707.682.530.771	-	-	707.682.530.771
Giro pada bank lain	1.219.895.883	9.104.014	98.698.000	1.327.697.897
Penempatan pada bank lain	594.800.000.000	-	-	594.800.000.000
Surat-surat berharga	470.451.805.712	-	-	470.451.805.712
Kredit yang diberikan	5.593.342.193.892	1.375.806.198.279	2.586.961.240	6.971.735.353.411
Pembiayaan Syariah	478.461.781.593	-	-	478.461.781.593
Penyertaan	81.584.000	-	-	81.584.000
Pajak Dibayar Dimuka	30.755.707.031	-	-	30.755.707.031
Aset tetap	111.709.041.093	14.160.356.476	98.120.676	125.967.518.245
Aset pajak tangguhan	18.052.593.343	-	-	18.052.593.343
Aset lain-lain	85.527.609.121	11.912.589.930	597.145.059	98.037.344.110
Jumlah Aset	**8.503.641.282.364**	**1.495.460.440.099**	**4.238.067.975**	**10.003.339.790.438**
Liabilitas				
Liabilitas segera	164.195.087.125	9.722.146.142	3.861.723.050	177.778.956.317
Simpanan nasabah	5.688.989.967.710	535.629.317.022	701.217.921.313	6.925.837.206.045
Simpanan dari bank lain	468.483.850.580	15.542.611	-	468.499.393.191
Surat berharga yang diterbitkan	449.304.374.276	-	-	449.304.374.276
Pinjaman yang diterima	100.084.830.697	-	-	100.084.830.697
Utang pajak	24.505.602.002	175.173.312	746.782.091	25.427.557.405
Imbalan pasca kerja	50.540.062.542	-	-	50.540.062.542
Liabilitas lain-lain	85.841.237.859	83.012.674	49.070.015	85.973.320.548
Jumlah Liabilitas	**7.031.945.012.791**	**545.625.191.761**	**705.875.496.469**	**8.283.445.701.021**
Pendapatan				
Pendapatan bunga	1.200.549.920.529	233.379.998.424	376.173.239	1.434.306.092.192
Beban Bunga	(379.779.145.837)	(17.729.436.270)	(15.171.272.346)	(412.679.854.453)
Pendapatan bunga – bersih	**820.770.774.692**	**215.650.562.154**	**(14.795.099.107)**	**1.021.626.237.739**
Pendapatan operasional lainnya	126.293.156.971	17.038.770.075	300.911.727	143.632.838.773
Beban operasional lainnya	(591.483.541.730)	(20.164.954.871)	(5.270.154.126)	(616.918.650.727)
Pendapatan (beban non operasional lainnya	(1.460.465.041)	(23.055.053.098)	15.862.477.940	(8.653.040.199)
Laba rugi sebelum pajak	**354.119.924.892**	**189.469.324.260**	**(3.901.863.566)**	**539.687.385.586**
Beban pajak	(139.459.292.101)	-	-	(139.459.292.101)
Laba (rugi bersih	**214.660.632.791**	**189.469.324.260**	**(3.901.863.566)**	**400.228.093.485**

39.SEGMENTASI USAHA (lanjutan)

Keterangan	31 Desember 2013			
	Wilayah Sulawesi Selatan	Wilayah Sulawesi Barat	Jakarta	Jumlah
Aset				
Kas	299.603.714.350	46.720.689.750	663.707.000	346.988.111.100
Giro pada Bank Indonesia	644.901.221.714	-	-	644.901.221.714
Giro pada bank lain	1.768.560.104	9.362.842	100.070.000	1.877.992.946
Penempatan pada bank lain	550.050.000.000	-	-	550.050.000.000
Surat-surat berharga	335.126.218.250	-	-	335.126.218.250
Kredit yang diberikan	4.904.165.443.434	1.211.924.482.358	1.888.365.475	6.117.978.291.267
Pembiayaan Syariah	455.731.760.961	-	-	455.731.760.961
Penyertaan	81.584.000	-	-	81.584.000
Pajak Dibayar Dimuka	27.143.653.190	-	-	27.143.653.190
Aset tetap	112.761.025.889	10.660.536.556	160.923.472	123.582.485.917
Aset pajak tangguhan	19.193.613.444	-	-	19.193.613.444
Aset lain-lain	98.589.786.184	13.241.346.560	388.965.763	112.220.098.507
Jumlah Aset	**7.449.116.581.520**	**1.282.556.418.066**	**3.202.031.710**	**8.734.875.031.296**
Liabilitas				
Liabilitas segera	116.040.935.981	29.666.029.840	283.919.260	145.990.885.081
Simpanan nasabah	5.119.425.270.609	644.783.990.066	92.100.497.350	5.856.309.758.025
Simpanan dari bank lain	519.667.581.091	2.150.893.357	-	521.818.474.448
Surat berharga yang diterbitkan	498.138.785.322	-	-	498.138.785.322
Pinjaman yang diterima	100.144.631.384	-	-	100.144.631.384
Utang pajak	38.428.817.392	633.492.218	104.442.817	39.166.752.427
Imbalan pasca kerja	44.681.098.629	-	-	44.681.098.629
Liabilitas lain-lain	99.075.629.088	94.477.424	868.127.015	100.038.233.527
Jumlah Liabilitas	**6.535.602.749.496**	**677.328.882.905**	**93.356.986.442**	**7.306.288.618.843**
Pendapatan				
Pendapatan bunga	1.200.548.078.193	233.379.995.092	376.173.239	1.434.304.246.524
Beban Bunga	(379.779.145.837	(17.729.436.270	(15.171.272.346	(412.679.854.453
Pendapatan bunga – bersih	**820.768.932.356**	**215.650.558.822**	**(14.795.099.107**	**1.021.624.392.071**
Pendapatan operasional lainnya	126.293.156.972	17.038.770.075	300.911.727	143.632.838.774
Beban operasional lainnya	(590.537.713.984	(20.085.271.301	(5.240.154.126	-615.863.139.411
Pendapatan (beban non operasional lainnya	-1.462.994.539	-23.055.053.098	15.862.477.940	-8.655.569.697
Laba rugi sebelum pajak	**-1.462.994.539**	**189.549.004.498**	**15.862.477.940**	**540.738.521.737**
Beban pajak	(142.363.899.950	-	-	(142.363.899.950
Laba (rugi bersih	**212.697.480.855**	**158.418.213.216**	**1.018.108.979**	**372.133.803.050**

40.ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel berikut ini merupakan tabel nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan Bank untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014				
Keterangan	**Dimiliki Hingga Jatuh Tempo**	**Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang**	**Biaya Perolehan Diamortisasi**	**Jumlah Nilai Tercatat**	**Jumlah Nilai Wajar**
Aset					
Kas	-	505.985.874.325	-	505.985.874.325	505.985.874.325
Giro pada Bank Indonesia	-	707.682.530.771	-	707.682.530.771	707.682.530.771
Giro pada bank lain	-	1.327.697.897	-	1.327.697.897	1.327.697.897
Penempatan pada bank lain	-	594.800.000.000	-	594.800.000.000	594.800.000.000
Surat-surat berharga	470.451.805.712	-	-	470.451.805.712	470.451.805.712
Kredit Yang Diberikan	-	7.450.197.135.004	-	7.450.197.135.004	7.450.197.135.004
Liabilitas					
Simpanan Nasabah	-	-	6.925.837.206.045	6.925.837.206.045	6.925.837.206.045
Simpanan Dari Bank Lain	-	-	468.499.393.191	468.499.393.191	468.499.393.191
Surat Berharga Yang Diterbitkan	449.304.374.276	-	-	449.304.374.276	449.304.374.276
Pinjaman Yang DIterima	-	-	100.084.830.697	100.084.830.697	100.084.830.697
Jumlah	**919.756.179.988**	**9.259.993.237.997**	**7.494.421.429.933**	**17.674.170.847.918**	**17.674.170.915.173**

	31 Desember 2013				
Keterangan	**Dimiliki Hingga Jatuh Tempo**	**Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang**	**Biaya Perolehan Diamortisasi**	**Jumlah Nilai Tercatat**	**Jumlah Nilai Wajar**
Aset					
Giro pada Bank Indonesia	-	644.901.221.714	-	644.901.221.714	644.901.221.714
Giro pada bank lain	-	1.877.992.946	-	1.877.992.946	1.877.992.946
Penempatan pada bank lain	-	550.050.000.000	-	550.050.000.000	550.050.000.000
Surat-surat berharga	335.126.218.250	-	-	335.126.218.250	335.126.218.250
Kredit Yang Diberikan	-	6.573.710.052.228	-	6.573.710.052.228	6.573.710.052.228
Liabilitas					
Simpanan Nasabah	-	-	5.856.309.758.025	5.856.309.758.025	5.856.309.758.025
Simpanan Dari Bank Lain	-	-	521.818.474.448	521.818.474.448	521.818.474.448
Surat Berharga Yang Diterbitkan	498.138.785.322	-	-	498.138.785.322	498.138.785.322
Pinjaman Yang DIterima	-	-	100.144.631.384	100.144.631.384	100.144.631.384
Jumlah	**833.265.003.572**	**7.125.638.045.174**	**6.478.272.863.857**	**14.437.175.912.603**	**15.082.077.134.317**

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan kecuali surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo, Kredit yang diberikan yang mempunyai risiko nilai wajar, mendekati nilai tercatatnya karena mendekati jengka waktu tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut dan/atau suku bunganya sering ditinjau ulang.

Nilai wajar surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo ditentukan berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.

Nilai wajar kredit yang diberikan yang mempunyai risiko nilai wajar dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2014.

41.KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/BPS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Bank mulai menerapkan PSAK 50/55 pada tanggal 30 Januari 2015 sesuai dengan memo No. MM/001/KMRK/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 dengan rincian penyesuaian sebagai berikut:

Jenis	Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian Sehubungan Dengan PSAK 50 dan 55	Setelah Penyesuaian
Pembiayaan	10.688.014.594	419.962.141	10.268.052.453

42.PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggungjawab penuh terhadap penyajian laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 20 Maret 2015.

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Tujuan
1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi. 2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. 3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

Tujuan
- kecukupan transparansi laporan; - kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; - perlindungan konsumen; - obyektivitas dalam melakukan *assessment*/audit; - kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau - peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Bank Indonesia.

1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris A. *Governance Structure*	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris pada Bank Sulselbar melebih dari 3 (tiga) orang namun tidak melebihi jumlah anggota Direksi.
	2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	2) Kesemua anggota Dewan Komisaris berdomisili di tempat kedudukan Bank Sulselbar yaitu Makassar, Sulawesi Selatan.
	3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	3) 3 (tiga) dari 4 (empat) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independent.
	4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: a) pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b) yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;	4) Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (Satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank, namun Bank Sulselbar tidak memiliki anak perusahaan.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.	5) Terdapat Komisaris Independent yang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada 2 (dua) Komite pada Bank Sulselbar.
	6) Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	6) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga antar anggota Dewan Komisaris maupun para Direktur.
	7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	7) Dalam melakukan pekerjaannya anggota Dewan Komisaris berpedoman pada pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris.
	8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	8) Bukti bahwa anggota Dewan Komisaris memiliki integritas salah satunya adalah telah lulus *fit & Proper test* Bank Indonesia.
	9) Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak- pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	9) Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dari mantan Direksi atau eksekutif Bank, sehingga tidak perlu melalui masa *cooling off.*

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	10) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 11) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia. 12) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 13) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 14) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi	10) Seluruh Komisaris Independent tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya termasuk Direksi dan pemegang saham. 11) Sebelum menjalankan tugasnya seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test.* 12) Kesemua anggota Dewan Komisaris mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan jabatannya. 13) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar secara berkelanjutan agar sesuai dengan tugas dan jabatannya. 14) Komposisi Dewan Komisaris tidak pernah dintervensi oleh pemilik/pemegang

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	B. *Governance Process*	
	1) Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1) Kesemua anggota Dewan Komisaris sebelum diangkat dan dipilih oleh Pemegang Saham melalui RUPS LB telah memperoleh persetujan dari Komite Remunerasi dan Nominasi
	2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip- prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	2) Dewan Komisaris Bank Sulselbar berusaha agar prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dalam kegiatan usaha-usaha Bank dengan memberikan nasehat kepada Direksi melalui Surat Dewan Komisaris.
	3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	3) Dewan Komisaris Bank Sulselbar telah melakukan tugas sebagai Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi walaupun hal tersebut belum cukup.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. 7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	4) Dewan Komisaris Bank Sulselbar senantiasa berusaha untuk menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. 5) Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. 6) Dewan Komisaris dibantu dengan Komite Audit melakukan pemantauan tindaklanjut Direksi/Manajemen terhadap hasil pemeriksaan dan masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Direksi. 7) Belum pernah terjadi kejadian ini sebagaimana ditanyakan.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	8) Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris belum sepenuh dilaksanakan secara independen.
	9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	9) Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) Komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi
	10) Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	10) Seluruh anggota Komite diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi berdasarkan rekomdasi dari Dewan Komisaris
	11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa tugas Komite dijalankan secara efektif dikarenakan anggota Dewan Komisaris terdapat dalam Komite tersebut.
	12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	12) Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di tempat kedudukan Bank Sulselbar sehingga waktu dan kesempatan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
	13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi apabila	13) Semua rapat Dewan Komisaris berjalan sesuai agenda dan

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	14) Kesemua keputusan Direksi diambil secara musyawarah dan mufakat atau suara terbanyak apabila tidak terjadi musyawarah mufakat
	15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	15) Dewan Komisaris Bank Sulselbar hanya mempergunakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Sulselbar.
	16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	16) Dewan Komisaris Bank Sulselbar mempergunakan fasilitas yang telah disetujui oleh RUPS dan Bank Sulselbar.
	17) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	17) Dewan Komisaris Bank Sulselbar independent terhadap intervensi pemegang saham.
	C. *Governance Outcome* 1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi secara jelas.	1) Keseluruhan rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan risalah rapat tersebut disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris termasuk *dissenting opinions*

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. 3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. 4) Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan: a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) *shares option* yang dimilik Dewan Komisaris. 5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan	2) Keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait telah menerima notulen rapat. 3) Tidak kesemua hasil rapat dapat direkomendasikan atau diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi 4) Dalam laporan Pelaksanaan GCG telah dijelaskan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham lebih dari 5 % (lima persen) pada perusahaan, tidak memiliki hubungan keuangan, keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi dan hanya menikmati remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dan Bank Sulselbar. Untuk program *share option,* Bank Sulselbar tidak memiliki. 5) Telah terjadi peningkatan dalam kinerja bank, penyelesaian permasalahan dan pencapaian hasil yang sesuai keinginan pemangku kepentingan namun hal tersebut masih perlu ditingkatkan.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	Perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris. 6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	6) Tidak terdapat intervensi/gangguan dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan berkurangnya keuntungan bank.
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi A. *Governance Structure* 1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. 2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	1) Berdasarkan anggaran dasar Bank Sulselbar jumlah anggota Direksi adalah 4 (empat) orang dan dimungkinkan bertambah. 2) Keseluruhan anggota Direksi Bank Sulselbar berdomisili ditempat kedudukan Bank Sulselbar yaitu Makassar, Sulawesi Selatan.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 (dua) tahun).	3) Keseluruhan anggota Direksi Bank Sulselbar telah memiliki pengetahuan lebih dari 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif bank.
	4) Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	4) Tidak terdapat anggota Direksi Bank Sulselbar yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun perusahaan lainnya.
	5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	5) Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) pada perusahaan lainnya.
	6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	6) Keseluruhan anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua.
	7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	7) Anggota Direksi sebelum dipilih menjadi Direksi oleh RUPS telah memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	8) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib namun pedoman tersebut perlu dilakukan perubahan mengikuti struktur organisasi dan peraturan yang berlaku
	9) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	9) Dalam melakukan pekerjaannya Direksi tidak melibatkan konsultan atau jasa profesional lainnya kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.
	10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	10) Seluruh anggota Direksi Bank Sulselbar telah lulus *fit and Proper test* sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
	11) Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.	11) Direktur Utama Bank Sulselbar berasal dari Pihak Independent.
	12) Seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	12) Seluruh Direksi Bank Sulselbar telah lulus *fit and Proper test,* termasuk Direktur Kepatuhan yang terpilih kembali.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	13) Secara keseluruhan anggota Direksi memiliki Kompetensi dan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya.
	14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	14) Kemauan dan kemampuan untuk belajar dimiliki oleh Direksi Bank Sulselbar. Hal ini dibuktikan dengan pelatihan-pelatihan yang diikuti guna menambah pengetahuan dan mengimplementasikan dalam tugasnya
	15) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	15) Budaya belajar merupakan salah satu budaya yang dimiliki oleh Direksi Bank Sulselbar guna menunjang tugasnya.
	16) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	16) Jumlah/komposisi Direksi telah sesuai dengan anggaran dasar Bank Sulselbar dimana jumlah Direksi minimal 4 (empat) dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	B. *Governance Process*	
	1) Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	1) Seluruh anggota Komite yang diangkat oleh Direksi merupakan keputusan dari Dewan Komisaris.
	2) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	2) Direksi tidak pernah memberi kuasa umum melainkan kuasa khusus dan hal ini tidak mengalihkan tugas dan fungsi Direksi
	3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	3) Direksi bertanggungjawab penuh terhadap kepengurusan Bank.
	4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasardan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	4) Dalam menjalankan atau mengelola Bank didasari pada anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Perseroan Terbatas.
	5) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.	5) Masih terdapat intervensi dari pemegang saham namun hal tersebut masih dapat ditangani oleh Direksi.
	6) Direksi telah melaksanakan prinsip- prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	6) 5 (lima) prinsip GCG selalu pergunakan dalam melakukan tugasnya oleh Direksi.
	7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi	7) Tidak semua hasil

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	8) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.	8) Setiap permintaan data dari Dewan Komisaris diberikan tepat waktu, lengkap, akurat dan terkini.
	9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	9) Kebijakan/keputusan yang dibuat oleh Direksi berdasarkan kepada hasil musyawarah mufakat atau melalui suara terbanyak apabila tidak ditemukan kata sepakat.
	10) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.	10) Tidak semua keputusan Direksi dapat diimpelemntasikan. Hal ini terkadang tidak adanya kemauan dari bawahan untuk menjalani keputusan Direksi tersebut.
	11) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	11) Setiap keputusan/kebijakan yang diambil oleh Direksi ditempuh melalui mekanisme Rapat Direksi.
	12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	12) Seluruh Direksi Bank Sulselbar hanya mempergunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan RUPS.
	13) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	13) Direksi Bank Sulselbar tidak ada yang menggunakan fasilitas kantor demi kepentingan pribadi dan keluarganya.
	14) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada	14) Terdapat intervensi, namun masih dapat dikendalikan oleh Direksi.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	C. *Governance Outcome* 1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS. 3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. 4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank. 5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* yang terjadi dalam rapat Direksi. 6) Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;	1) Direksi telah menyerahkan pertanggungjawabanny a atas pelaksanaan tugas Direksi kepada RUPS. 2) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direksi telah diterima oleh RUPS. 3) Setiap kebijakan Direksi khususnya terkait kepegawaian telah disampaikan kepada pegawai antara lain melalui sosialisasi. 4) Setiap arah bisnis yang ditentukan oleh Direksi disosialisasikan melalui Surat Edaran Direksi ke setiap cabang. 5) Seluruh rapat Direksi baik yang terdapat *dissenting opinions* maupun tidak telah dibuatkan notulen rapat. 6) Dalam laporan pelaksanaan GCG, diungkapkan bahwa Direksi tidak memiliki saham mencapai 5% (lima persen) pada Bank maupun perusahaan lain dan antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) *shares option* yang dimiliki Direksi.	Fasilitas yang ditetapkan oleh RUPS dan Bank. Tidak terdapat program *shares option* untuk Direksi pada Bank Sulselbar.
	7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.	7) Target laba yang ditetapkan dalam rencana bisnis pada tahun 2013 tercapai dan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bank dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi.
	8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.	8) Adanya peningkatan kinerja individu mendorong tercapainya target. Hal ini semua disebabkan karena sistem pelatihan yang mulai berjalan dengan baik.
	9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung	9) Penerapan budaya pembelajaran secara berlanjutan diterapkan untuk seluruh karyawan guna meningkatkan prestasi dan pencapaian target

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. 10) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.	10. Terdapat intervensi dari pemilik namun hal tersebut tidak mengganggu secara signifikan dan tetap memberikan keuntungan sesuai dengan yang ditetapkan.
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite A. *Governance Structure* 1) Komite Audit a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.	a) Pada Komite Audit Bank Sulselbar diketuai oleh Komisaris Independent dan 2 (dua) orang anggota Komite masing ahli di bidang keuangan/akutansi dan hukum/perbankan. Namun Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Pihak Independent yang mewakili bidang Hukum/perbankan tidak diketahui Kompetensinya.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. 2) Komite Pemantau Risiko a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. 3) Komite Remunerasi dan Nominasi a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang	b) Komite Audit Bank Sulselbar diketuai oleh Muhammad Amri yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris dari pihak independent. c) Secara keseluruhan semua anggota Komite Audit merupakan Pihak Independent. d) Kesemua anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. a) Pada Bank Sulselbar Komite Pemantau Risiko dinamakan Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud. Komite ini terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) dari Komisaris Independent dan 2 (dua) dari Pihak Independent. b) Komite ini diketuai oleh Komisaris Independent. c) 51% (lima puluh satu persen) berasal dari pihak independent dan sisa berasala dari Pensiunan Pejabat Eksekutif Bank Sulselbar. d) Kesemua anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. a) Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri atas 5 (lima) orang, 1 (satu) dari anggota Dewan Komisaris Independent dan 1 (satu) orang dari

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank. c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen. d) Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. e) Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka: (1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan (2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan *succession plan* Bank.	b) Pejabat eksekutif Bank Sulselbar yang ditunjuk untuk mewakili merupakan Pemimpin Group SDM yang notabene memiliki ilmu mengenai remunerasi, nominasi dan *succession plan.* c) Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar diketuai oleh anggota Dewan Komisaris dari Pihak Independent. d) 2 (dua) anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. e) Di Bank Sulselbar remunerasi dan nominasi digabung sehingga menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. 5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.	4) Tidak terdapat unsur Direksi pada Komite Audit dan Pemantau Risiko 5) Terdapat 1 (satu) anggota Komite Audit yang merangkap jabatan pada Komite Audit di PT. Semen Tonasa. Namun dalam melaksanakan tugas anggota komite ini mempunyai kompetensi, kriteria, independensi, dan kerahasian serta Kode etik Bank Sulselbar. 6) Kesemua anggota komite dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan keluarga. 7) Semua pihak independen yang merupakan pejabat eksekutif Bank Sulselbar telah melalui masa tunggu *(cooling off)* selama 6 (enam) bulan.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. 9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai. 10) Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik. B. *Governance Process* 1) Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.	8) Lebih dari 51% (lima puluh satu persen) tingkat kehadiran anggota Independent dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dalam rapat. 9) Lebih dari 51% (lima puluh satu persen) tingkat kehadiran anggota Komite yang berasal dari pihak independen dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. 10) Tidak ada intervensi pemilik dalam penentuan anggota Komite-Komite pada Bank Sulselbar. a) Tugas utama dari Komite audit antara lain adalah melakukan pemantauan, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjutnya. Kesemua tugas tersebut telah dilakukan/dilaksanakan

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	b) Komite Audit telah melakukan *review* terhadap: (1) pelaksanaan tugas SKAI; (2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku; (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan (4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.	b) Kesemua tugas untuk mereview pelaksanaan tugas SKAI (GAI), kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akutansi yang berlaku dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas segala temuan dari SKAI, Akuntan Publik dan Bank Indonesia telah dilaksanakan. Bentuk pelaksaan tugas tersebut dilakukan dengan cara memberikan masukan/memorandum kepada Dewan Komisaris.
	c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.	c) Komite Audit Bank Sulselbar telah memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Dewan Komisaris untuk Akuntan Publik dan KAP.
	2) Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;	a) Komite Pemantau Risiko Bank Sulselbar telah melakukan pemantauan risiko, evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, namun itu semua masih jauh dari kata sempurna.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). 3) Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: (1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; (2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. c) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.	b) Komite Pemantau Risiko setiap saat melakukan rapat dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) untuk mengevaluasi kinerja dari SKMR tersebut. a) Komite remunerasi telah memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Direksi terkait remunerasi pejabat eksekutif dan pegawai. b) Untuk kebijakan nominasi, komite telah memiliki kebijakan tersebut dan penerapannya telah dilaksanakan pada pemilihan Direksi tahun 2013 serta disampaikan kepada RUPS. Namun Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan mekanisme dimiliki belum berjalan baik, hal ini dibuktikan adanya PLTS Direksi dan Dewan Komisaris. c) Tidak semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan rekomendasi dari Komite Nominasi dan remunerasi. d) Kesemua anggota Dewan Komisaris dari Pihak Independen sebelum dipilih dan diangkat oleh RUPS telah memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank. 5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. 6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. 7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaantugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan. C. *Governance Outcome* 1) Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaaan pendapat (*dissenting opinions)* secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik. 2) Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.	4) Rapat Komite Bank Sulselbar diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan bank. 5) Kesemua keputusan yang diambil didasari pada musyawarah mufakat atau suara terbanyak. 6) Kesemua hasil rapat komite disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris menyurati Direksi untuk diberikan nasehat atau masukan. 7) Tidak terdapat intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas komite. 1) Kesemua risalah rapat komite termasuk *dissenting opinions* telah didokumentasikan dengan baik oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Namun Rapat Komite dilakukan secara gabungan dan hal ini tidak sesuai dengan PBI tentang GCG. 2) Kesemua komite telah melaksanakan fungsinya, antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
4.	Penanganan Benturan Kepentingan A. *Governance Structure* Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai: 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; 2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. B. *Governance Process* Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. C. *Governance Outcome* 1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. 3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	1) Kebijakan yang mengatur benturan kepentingan terdapat dalam kode etik pegawai dan kode etik tersebut wajib dipatuhi serta dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan hukuman bahkan pemecatan. 2) Kejadian benturan kepentingan hingga saat ini belum terjadi. 3) Sehubungan tidak adanya benturan kepentingan maka tidak ada suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan 1) Tidak terdapat benturan kepentingan. 2) Kesemua kegiatan operasional Bank Sulselbar bebas dari benturan kepentingan. 3) Bank Sulselbar dapatlah dinyatakan berhasil sehubungan dengan tidak adanya benturan kepentingan.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank A. *Governance Structure* 1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. B. *Governance Process* 1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara: (1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;	1) Grup Kepatuhan independent terhadap Satuan Kerja Operasional. 2) Pengangkatan, pemberhentian Direktur Kepatuhan dilakukan melalui mekanisme RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. 3) Sumber daya pada group kepatuhan belum dapat dinyatakan cukup. Hal ini disebabkan kurangnya pelatihan terhadap SDM yang ada dan kurangnya SDM pada Grup Kepatuhan. 1) Direktur Kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dan peraturan lainnya, melalui : (1)Tercakup dalam pedoman Grup Kepatuhan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; (3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang; b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank; c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank	(2) Setiap kebijakan, aktivitas atau kegiatan baru telah mendapatkan opini Direktur Kepatuhan. (3) Direktur Kepatuhan memantau komitmen bank kepada Bank Indonesia atau otoritas keuangan secara berkala. b) Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara triwulanan kepada Direktur Utama tembusan Dewan Komisaris. c) Perumusan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan tercantum pada Bab IV dan Bab V Buku Pedoman Fungsi Kepatuhan. d) Direktur Kepatuhan melalui memonya telah mengusulkan kebijakan kepatuhan kepada Direktur Utama e) Telah dilaksanakan melalui memorandum Direktur Kepatuhan. f) Sebelum kebijakan tersebut disetujui

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. 2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Direksi telah: a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif; b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;	g) Untuk meminimalkan risiko kepatuhan bank, Direktur Kepatuhan (Dirkep) telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi telah ditindaklanjuti. h) Melakukan review terhadap kebijakan/keputusan yang diambil Direksi setiap saat. i) Membuat rencana kerja yang matang guna meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan. 2) Penunjukan Direktur Kepatuhan berdasarkan keputusan RUPS dan peraturan lainnya yang berlaku. 3) Direksi telah a) Setiap kebijakan yang dibuat oleh Direktur Kepatuhan dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan telah disetujui oleh Direksi. b) Setiap peraturan baru telah dikomunikasikan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi atau media lainnya yang ada pada Bank Sulselbar.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan. 4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; b) melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d) melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan,	c) Pelaksanaan fungsi kepatuhan tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan semata namun juga wajib dijalankan oleh Direksi lainnya, oleh karenanya pelaksanaan fungsi kepatuhan ini merupakan tanggungjawab seluruh Direksi. 4) Group kepatuhan telah : a) Membuat langkah-langkah guna terciptanya budaya kepatuhan setiap tahunnya melalui rencana bisnis. b) Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-harinya Grup Kepatuhan melakukan c) Grup kepatuhan dalam kegiatan sehari-harinya disamping atas permintaan kajian juga melakukan kajian terhadap SOP-SOP atau kebijakan-kebijakan yang ada sekarang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d) Dilaksanakan setiap saat berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkini dan terakhir.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; f) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. C. *Governance Outcome* 1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait. 2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. 3) Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.	e) Upaya-upaya yang ditempuh untuk memastikan bahwa kebijakan dan/atau prosedur yang dimiliki sesuai aturan yang berlaku adalah dengan mengirimkan memorandum melalui Direktur Kepatuhan kepada Direksi lainnya untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap kebijakan/prosedur. f) Antara lain memberikan masukan kepada Direktur Kepatuhan dan memastikan pemberian kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1) Laporan pelaksanaan Direktur Kepatuhan yang dikirim setiap semesternya telah disampaikan tepat waktu ke Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya 2) Isi dari laporan pelaksanaan Direktur Kepatuhan tersebut berdasarkan kepada PBI Fungsi Kepatuhan 3) Jumlah denda yang diberikan meningkat dibandingkan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan dengan Grup Kepatuhan jauh dari kata bagus.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	4) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.	4) Bank belum berhasil membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional namun untuk pengambilan kebijakan sudah lebih baik.
6.	Penerapan fungsi audit intern A. *Governance Structure* 1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: a) menyusun Piagam Audit (Internal Audit Charter); b) membentuk SKAI; c) menyusun panduan audit intern. 3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. 4) Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif. B. *Governance Process* 1) Direksi bertanggung jawab atas: a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkat manajemen	1) Struktur organisasi Grup Audit Intern (GAI)/SKAI telah disesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Bank telah menyusun piagam audit *(Internal Audit Charter)*, membentuk GAI yang melakukan fungsi pengawasan *(ex-post)* dan buku panduan audit intern, namun belum dikinikan. 3) GAI Bank Sulselbar merupakan unit kerja yang independent. 4) Sumber daya yang dimiliki oleh GAI saat ini, masih dapat dikatakan kurang dengan semakin kompleksnya aktivitas usaha dan permasalahan yang ada serta jaringan kantor. Selain itu, belum adanya pemetaan beban kerja dan kebutuhan tenaga audit internal ideal. 1) Direksi bertanggungjawab atas : a) Segala struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern bank untuk setiap level manajemen

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. 2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. 3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. 4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai. 5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank. 6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. 7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.	b) Termasuk tindak lanjut temuan audit tersebut sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. 2) Fungsi audit intern telah diterapkan secara efektif pada seluruh aspek kegiatan usaha baik yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan Bank dan Masyarakat 3) Kaji ulang terhadap pelaksanaan kerja GAI dan kepatuhan terhadap SPFAIB dilakukan oleh pihak eksternal yang telah melakukan kerjasama dengan Bank minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali. 4) Untuk tingkat kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan secara keseluruhan masih kurang dari kata memadai. 5) Terdapat penyimpangan namun masih dianggap wajar. 6) Untuk peningkatan mutu keterampilan SDM GAI dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. 7) Pelaksanaan fungsi pengawasan secara independen oleh GAI jauh dari kata baik.Masih banyak ditemukan kekurangan.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang- kurangnya meliputi penilaian: a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; c) kualitas kinerja. 9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. 10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*. 11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. C. *Governance Outcome* 1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS. 2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.	8. Tugas-tugas yang telah Grup Audit Intern yang telah dilakukan adalah melakukan evaluasi sistem pengendalian intern bank guna meningkatkan kinerja dari GAI itu sendiri dalam melakukan pemeriksaan. 9. Seluruh temuan GAI telah dilaporkan kepada Direktur Utama sebagai Supervisinya dengan tembusan ke Direktur Kepatuhan. Apabila terdapat temuan signifikan dilaporkan ke Bank Indonesia. 10. Setiap tindaklanjut yang dilakukan oleh *auditee* dilaporkan ke Direktur Utama dan GAI. Bila tindaklanjut *auditee* tersebut tidak benar, maka GAI meminta perbaikan kembali dan hal ini merupakan salah satu bentuk pemantau GAI. 11. Pedoman kerja, sistem dan prosedur belum pernah dilakukan pengkinian. 1. Tidak terdapat laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaporkan kepada RUPS. 2. Terdapat temuan-temuan yang berulang baik pada cabang yang sama maupun berbeda.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit. 4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja. b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip- prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern. c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.	3. GAI tidak bersifat obyektif dalam melakukan audit. Hal ini dibuktikan dimana terdapat Auditor yang memeriksa cabang dimana Auditor tersebut menjadi Pimpinan Cabang. 4. Fungsi Audit intern dilaksanakan secara memadai namun perlu lebih ditingkatkan terutama terkait keindepensian dari auditor itu sendiri. Untuk jumlah dan kualitas dari Auditor itu belum dapat dipenuhi dari apa yang diharapkan.
7.	Penerapan fungsi audit ekstern A. *Governance Structure* Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek- aspek:	1. Aspek-aspek minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank Sulselbar.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	1) kapasitas KAP yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) ruang lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud. B. *Governance Process* 1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia. 2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. 4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	1. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank merupakan akuntan publik yang terdaftar pada Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK 2. Akuntan Publik yang ditunjuk pada tahun 2013 ini, merupakan akuntan publik pengganti. Penggantian ini disebabkan karena KAP yang lalu telah melakukan pemeriksaan selama 5 (lima) tahun berturut-turut. 3. Penunjukan Akuntan Publik telah disetujui oleh RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris. 4. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk telah bekerja secara independent. 5. Akuntan Publik sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional. 7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *Management Letter* kepada Bank Indonesia. C. *Governance Outcome* 1) Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP yang ditunjuk. 2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.	6. Akuntan publik yang bertugas di Bank Sulselbar bekerja dengan independen dan profesional. 7. *Manajemen letter* telah dilaporkan oleh Akuntan Publik. 1. *Management Letter* dan hasil audit yang diberikan oleh Akuntan Publik dan KAP menunjukkan permasalahan signifikan yang perlu dilakukan penyelesaian segera. 2. Cakupan hasil audit Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Auditor dari Akuntan Publik dan KAP bersifat obyektif dan tidak dapat diintervensi.
8.	Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern A. *Governance Structure* 1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI,SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.	1. Bank memiliki Grup Manajemen Risiko, dengan struktur organisasi terdapat 2 (dua) departement dan disupervisi secara langsung oleh Direktur Kepatuhan. Disamping itu bank juga memiliki komite Pemantau Risiko, Grup Audit Intern dan Grup Kepatuhan.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai. B. *Governance Process* 1) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas, diantaranya: a) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); b) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.	2. Bank memiliki kebijakan manajemen risiko dan prosedur, namun untuk penetapan limit risiko belum memadai. 1. Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait manajemen risiko yang telah dilaksanakan antara lain : a) Menyetujui kebijakan manajemen risiko namun tidak termasuk *risk appetite* dan *risk tolerance.* b) Melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko namun tetap tidak ada perubahan. c) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan nasehat terkait kebijakan Manajemen Risiko Bank.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	2) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya: a) menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadapkecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud; b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, me ngukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan; d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka	2. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan Manajemen Risiko namun masih perlu ditingkatkan.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan; e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko; f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko; g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; h) memastikan pelaksanaan langkah- langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI; i) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif; j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; k) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	kerja yang melakukan menyelesaikan transaksi. 3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal. C. *Governance Outcome* 1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. 2) Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. 3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	3. Sistem yang ada belum lengkap dan tidak handal. 1. Penerapan manajemen risiko bank belum berjalan secara efektif, masih dikerjakan secara parsial. 2. Dewan Komisaris dan Direksi belum dapat melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. 3. Bank cenderung konservatif, hal ini disebabkan karena Bank menyadari kekurangan yang dimilikinya.
9.	Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) A. *Governance Structure* Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring*	1. Bank telah memiliki pedoman yang memadai terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	dan penyelesaian masalahnya.	
	B. *Governance Process*	
	1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku.	1. Telah dilakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank.
	2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	2. Proses untuk memastikan penyediaan dana kepada Pihak terkait dan penyediaan dana besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
	3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.	3. Tidak terdapat intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya sehubungan dengan pengambilan keputusan.
	C. *Governance Outcome*	
	1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah: a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku; b) Memperhatikan kemampuan permodalan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.	1. Terhadap penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar tidak pernah melampaui BMPK dan prinsip kehati-hatian serta kemampuan permodalan penyebaran/diversifikasi portofolio Bank.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.	2. Sehubungan tidak pernah terjadi pelanggaran dan pelampauan BMPK maka Bank tidak dilaporkan, namun untuk pelaporan lainnya telah dilaporkan.
10.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal A. *Governance Structure* 1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. 2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai. 4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT *security system* yang memadai.	1. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan. 2. Laporan Pelaksanaan GCG buat setiap tahunnya dan disampaikan ke Bank Indonesia serta isi dari laporan pelaksanaan GCG tersebut didasari kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) 3. Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki belum lengkap, akurat dan tepat waktu. 4. Sistem Informasi Manajemen belum handal serta SDM yang dimiliki dan IT *security system* belum bagus.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	B. *Governance Process* 1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain: a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; b) Petugas Bank (*Customer Service* dan *Marketing*) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah; c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk;	1. Bank telah transparant terhadap laporan keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* termasuk pula laporan keuangan. 2. Bank belum transparan terhadap produk yang ditawarkan. Dalam brosur maupun penjelasan dari CS terhadap produk Bank hanya disampaikan saja keuntungannya, tidak termasuk risiko yang timbul.Namun Bank tidak pernah mempergunakan data nasabah untuk memasarkan produk pihak ketiga.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	e) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti; f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat; g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah; h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.	
	3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.	3. Bank tidak transparan dalam tata cara pengaduan. Bank hanya menyedian konter pengaduan saja dan itupun tidak diumumkan (tertutup)
	4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan.	4. Dalam penyajian laporan Bank berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan.
	5) Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	5. Laporan GCG disusun berdasarkan peraturan bank indonesia yang berlaku.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki *homepage* wajib mempublikasikannya pula pada *homepage* Bank. 7) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian (*self assessment*) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, Bank: a) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat hasil penilaian (*self assessment*) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat; b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (*self assessment*) GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki *homepage* wajib mempublikasikannya pula pada *homepage* Bank.	6) Pada tahun 2011 laporan pelaksanaan GCG Bank Sulselbar diminta untuk dirubah nilainya dari 2 (dua) menjadi 3 (tiga) atas permintaan Bank Indonesia. Berdasarkan permintaan tersebut Bank telah melakukan perubahan sesuai penilaian Bank Indonesia dan diumumkan pada *Homepage* milik Bank serta laporan keuangan serta revisi telah disampaikan ke Bank Indonesia. 7) Bank telah : a) Melakukan perubahan penilaian/peringkat berdasarkan peringkat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan telah dipublikasikan pada laporan keuangan publikasi periode terdekat. b) Hasil revisi penilaian telah disampaikan secara lengkap kepada Bank Indonesia dan diumumkan pada *homepage* milik Bank

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	C. *Governance Outcome* 1) Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang- kurangnya kepada: a) Bank Indonesia; b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan; g) 2 (dua) Majalah Ekonomi Keuangan. 2) Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada *homepage* Bank, meliputi: a) Laporan Tahunan (keuangan dan non- keuangan); b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA.	1) Laporan Tahunan telah disampaikan oleh Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya : Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga peringkat, asosiasi bank (ASBANDA), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan dan 2 (dua) majalah ekonomi keuangan. 2) Transparansi laporan pada *Homepage* milik bank meliputi laporan tahunan, laporan keuangan publikasi triwulanan dalam bahasa Indonesia.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	3) Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (*self assessment*) Bank dan dilampiri hasil penilaian (*self assessment*) serta paling kurang mencakup: a) cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG dan hasil penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG; b) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank; c) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank; d) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi	3) Dalam laporan Pelaksanaan GCG pada tahun 2013 ini terdiri atas : a) Cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keluarga dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham c) Kepemilikan saham anggota Direksi dan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham bank. d) Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank; e) Paket remunerasi/kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank; e) paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi; f) shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif; g) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; h) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan; i) jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; j) transaksi yang mengandung benturan kepentingan; k) *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank; l) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan. 4) Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada pemegang saham dan kepada: a) Bank Indonesia; b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)	f) Shares option, namun program ini tidak terdapat pada Bank Sulselbar. g) Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah. h) Frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan. i) Jumlah penyimpangan (fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh bank. j) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan. k) *Buy back* obligasi Bank. Untuk saham, Bank bukan merupakan perusahaan terbuka. l) Selama tahun 2013 Bank Sulselbar tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik hanya pada kegiatan sosial melalui program CSR *(Corporate Social Responsibility).* 4) Untuk Laporan Pelaksanaan GCG telah dilaporkan tepat waktu kepada pemegang saham dan pihak-pihak lainnya sebagaimana diwajibkan oleh SEBI GCG.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan; g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan 5) Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan dalam *homepage* secara tepat waktu. 6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik. 7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.	5) Laporan Pelaksanaan GCG juga ditampilkan pada *Homepage* tepat waktu. 6) Selama kurung waktu 1 (satu) tahun tidak ada pengaduan nasabah yang perlu diselesaikan melalui mediasi. 7) Bank belum menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.
11.	Rencana strategis Bank A. *Governance Structure* 1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. 2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	1) Rencana strategis bank disusun dalam bentuk rencana korporasi *(Corporate plan)* dan *Business Plan* (rencana bisnis) dengan berpatokan pada visi dan misi bank. 2) Rencana strategis didukung oleh pemilik, namun penambahan atau komitmen untuk menambahkan modal kurang.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	B. *Governance Process* 1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsive terhadap perubahan internal dan eksternal. 2) Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris. 3) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada: a) Pemegang Saham Bank; b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif. 5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;	1) Dalam melakukan penyusunan rencana bisnis, bank melakukan secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsive terhadap perubahan internal dan eksternal. 2) Rencana bisnis bank sulselbar telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS. 3) Rencana bisnis bank disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada pemegang saham melalui RUPS serta juga disosialisasikan ke cabang-cabang atau seluruh organisasi bank. 4) Pelaksanaan rencana bisnis bank tidak terlaksana secara efektif. 5) Penyusunan RBB Bank Sulselbar berpedoman pada PBI tentang rencana bisnis bank, dengan memperhatikan, yaitu : a) Faktor eksternal dan internal kelangsungan usaha bank. b) Prinsip kehati-hatian c) Manajemen risiko d) Dan azas perbankan yang sehat.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	b) prinsip kehati-hatian; c) penerapan manajemen risiko; d) azas perbankan yang sehat; 6) Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. 7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah- langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. C. *Governance Outcome* 1) Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. 2) Rencana Korporasi *(corporate plan)* dan Rencana Bisnis Bank *(business plan)* berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 3) Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	6) Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank. 7) Pemilik kurang serius untuk mendukung rencana strategis bank. 1) Rencana korporasi dan rencana bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. 2) *Corporate plan & Business Plan* beserta realisasinya disampaikan Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS. 3) Rencana bisnis bank menggambarkan pertumbuhan bank secara berkesinambungan.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders. 5) Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis). 6) Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur. 7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank. 8) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.	4) Pertumbuhan bank memberikan manfaat ekonomi dan non ekonomi bagi stakeholders di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. 5) Penyusunan rencana bisnis dilakukan secara komprehensif. 6) Antara rencana strategis dengan infrastruktur bank tidak saling melengkapi. 7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan (dividen) dimana pemegang saham terhadap dividen, dimana setiap tahunnya pembagian keuntungan bank lebih besar pada dividen daripada laba ditahan untuk menambah modal. 8) Untuk kondisi saat ini pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan bank walau masih dirasa kurang oleh bank untuk perkembangan usahanya.

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

A. *Governance Structure*

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah.....
- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah.....

B. *Governance Process*

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah.....
- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah.....

C. *Governance Outcome*

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah.....
- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah.....

Kesimpulan :

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas, disimpulkan bahwa telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahan dengan **CUKUP BAIK** yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat terlihat/tercermin dari penerapan/pemenuhan yang sangat memadai pada masing-masing aspek yaitu governance structure, governance process dan governance outcome pada 11 faktor penilaian GCG. Adapun rincian penerapan pada masing-masing aspek,yaitu :

1. *Governance Structure*

   Beberapa faktor negatif di *Governace Structure adalah :*

   1) Belum adanya mekanisme nominasi Direksi dan Dewan Komisaris yang mapan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya rangkap jabatan oleh Direksi/Dewan Komisaris lainnya, atau dijabat oleh Pelaksana Tugas Sementara (PLTS) Direksi/Komisaris.
   2) Belum diketahuinya kompetensi masing-masing anggota dan kesesuaiannya dengan PBI dan SEBI tentang GCG.
   3) Rapat anggota Komite masih digabung dengan komite lainnya, hal ini tidak sesuai dengan PBI tentang GCG. Evaluasi atas rapat terhadap Satuan Kerja hanya terdokumentasi satu arah saja dan tidak adanya pemantauan terhadap evaluasi/rekomendasi dari Komite Bank serta dalam risalah rapat tidak memuat keterangan terkait ada tidaknya perbedaan pendapat.
   4) Bahwa fungsi audit intern bank belum berjalan optimal, hal ini tercermin dari :
      a. Bank belum melakukan penguatan terhadap Grup Audit Intern (GAI) bank salah satunya terlihat dari perbandingan jumlah auditor dengan jaringan kantor bank.
      b. Bank belum melakukan pemetaan terhadap beban kerja dan kebutuhan audit internal ideal dan setara dengan perkembangan jaringan kantor bank.
      c. Bank belum memiliki kebijakan formal dalam menetapkan risiko jaringan kantor/satuan kerja bank.
      d. Bank belum memiliki pedoman khusus yang mengatur mengenai tata cara dan mekanisme rinci pelaksanaan pemeriksaan.

   5) Bank belum memiliki infrastruktur yang memadai guna mendiseminasikan ketentuan internal/SOP bank kepada seluruh pegawai diseluruh jaringan kantor bank.

2. *Governance Process.*

   Beberapa faktor negatif pada *Governance Process,* yaitu :

   1) Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, yaitu : Dewan Komisaris belum melaksanakan tugas secara baik untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
   2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu : Direksi belum melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
   3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, yaitu : pelaksanaan tugas dari komite-komite yang dimiliki oleh Bank belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
   4) Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu : Bank belum mempunyai kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai benturan kepentingan.
   5) Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu : strategi penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi.
   6) Penerapan Fungsi Audit Intern, yaitu : belum terciptanya struktur pengendalian intern yang dapat menjamin terselenggaranya fungsi audit intern bank dalam setiap tingkat manajemen dan masih banyaknya temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Direksi serta jenis-jenis temuan yang cenderung tidak berbobot atau menemukan inti permasalahan.
   7) Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian intern, yaitu perlu dilakukan pengembangan terhadap infrastruktur sistem informasi teknologi terkait penerapan Manajemen Risiko pada Bank.
   8) Rencana strategis Bank, yaitu : pelaksanaan rencana bisnis bank harus dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar memenuhi aturan yang ditetapkan.

3. Governance Outcome

   Adapun faktor negatif pada governance outcome yang perlu ditindaklanjuti adalah :

   1) Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, yaitu : hasil rapat Dewan Komisaris yang merupakan rekomendasi belum dapat diimplementasikan oleh RUPS.
   2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu : pertanggungjawaban Direksi telah diterima oleh RUPS namun RUPS berharap agar kedepannya pelaksanaan tugas dari Direksi dapat ditingkatkan.

3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, yaitu : dalam pelaksanaan fungsinya, rekomendasi komite-komite tersebut belum mendalam cenderung bersifat umum.
4) Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu : sehubungan belum adanya Pedoman, kegiatan operasional bank belum dapat dinyatakan bebas dari benturan kepentingan.
5) Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu : masih terdapat pelanggaran dengan jumlah denda yang meningkat cukup signifikan.
6) Penerapan Fungsi Audit Intern, yaitu : GAI tidak dapat bertindak obyektif dalam melakukan audit dan belum terpenuhi jumlah dan kualitas auditor intern yang diinginkan.
7) Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian intern, yaitu: Dewan Komisaris dan Direksi belum mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko
8) Rencana strategis Bank, yaitu : rencana bisnis bank tidak menggambarkan pertumbuhan bank secara berkesinambungan.

Berdasarkan kesimpulan diatas dan mengacu pada Matriks Peringkat *Good Corporate Governance* (lampiran III SE BI 15/15/DPNP), maka peringkat GCG Bank Sulselbar yaitu mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governcane* yang secara umum **CUKUP BAIK.** Hal ini dapat dilihat dengan dipenuhinya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance.* Apabila terdapat kelemahan **Signifikan** dalam pelaksanaan GCG tersebut. Namun apabila diperbaikan secara **serius dan berkesinambungan** kelemahan tersebut dapat ditanggulangi.

Makassar, Januari 2015

PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Dewan Komisaris	**Direksi**	
H. Andi Muallim	**H.A.M. Rahmat Alimuddin**	**H. Harris Saleng**
Plts. Komisaris Utama	Direktur Utama	Direktur Kepatuhan